



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Majene bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Majene. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Majene, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Handwritten signature and mark

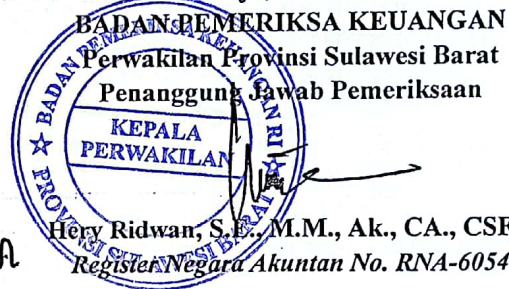
Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XIX.MAM/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Mamuju, 14 Mei 2024



Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA 
Register Negara Akuntan No. RNA-6054



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN KEUANGAN
AUDITED

2023

PEMERINTAH
KABUPATEN MAJENE





KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satu pelaksanaannya dengan menyusun laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui laporan keuangan diharapkan Pemerintah Kabupaten Majene dapat menyajikan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan risiko dalam pengambilan keputusan dapat diminimalkan. Sebagai wujud keseriusan dengan penuh tanggung jawab maka kami atas nama Pemerintah Kabupaten Majene menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengisyaratkan bahwa laporan keuangan selain sebagai kewajiban *mandatory*, juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan bagi pemangku kepentingan, laporan keuangan wajib memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengelolaan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 baik dari tahapan perencanaan hingga pelaporan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat beberapa perubahan dibandingkan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya. Terutama pada bagan akun standar, mekanisme hibah dan bantuan sosial, serta belanja transfer.

LKPD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang meliputi : (a) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyusun LKPD Tahun Anggaran 2023 ini telah menyajikan laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan memuat semua data material dan informasi yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh transaksi yang material telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan mengedepankan aspek keandalan dalam penyajian laporan, transaksi-transaksi



transaksi dilaksanakan telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan terhadap pos-pos anggaran baik pada akun pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran telah dijelaskan secara memadai.

Pemerintah Kabupaten Majene dalam rangka mewujudkan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kami senantiasa berupaya untuk mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas publik dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas LKPD agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Upaya tersebut telah dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan, sistem *reward and punishment*, pembinaan intensif terkait implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, serta dengan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dirumuskan berdasarkan prioritas belanja daerah yang didalamnya termasuk merumuskan alokasi anggaran *post pandemic Corona Virus Disease 2019* dengan dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2023 dalam mewujudkan akselerasi pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan ekonomi berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majene mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga pelaksanaan kebijakan anggaran bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan akuntabilitas pada aspek kualitas LKPD Kabupaten Majene di masa mendatang akan lebih baik lagi.

 **BUPATI MAJENE**

H. A. ACHMAD SYUKRI, SE., M.M.



RINGKASAN

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Majene menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan ini disusun berdasarkan konsolidasian antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan menggunakan sistem aplikasi daring dan terintegrasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Berikut kami paparkan ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya dan menyajikan ikhtisar informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun anggaran 2023 tercatat sebesar **Rp887.077.959.303,37** atau mencapai **94,92%** dari target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp934.535.405.462,00**. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp87.794.782.521,37**, Pendapatan Transfer sebesar **Rp798.281.176.782,00**, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp1.002.000.000,00**. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan **Rp53.714.233.942,70** atau **6,45%** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar **Rp833.363.725.360,67**.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar **Rp885.015.750.318,80** atau meningkat **3,16%** dari realisasi tahun sebelumnya yakni Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar **Rp857.874.377.782,25**. Realisasi Belanja dan Transfer tersebut terdiri dari realisasi Belanja sebesar **Rp772.991.016.944,80** dan Transfer sebesar **Rp112.024.733.374,00**. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja dan Transfer, maka terdapat surplus anggaran sebesar **Rp2.062.208.984,57**. Ringkasan Laporan Realisasi APBD TA.2023 dapat disajikan sebagai berikut.



Uraian	2023			2022
	Anggaran Pokok	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	934.535.405.462,00	887.077.959.303,37	94,92	833.363.725.360,67
Belanja	837.295.103.244,00	772.991.016.944,80	92,32	755.648.444.910,25
Transfer	95.090.302.218,00	112.024.733.374,00	117,81	102.225.932.872,00
Surplus/(Defisit)	2.150.000.000,00	2.062.208.984,57	95,92	(24.510.652.421,58)
Pembiayaan Netto	(2.150.000.000,00)	6.413.537.864,07	(298,30)	32.636.510.407,94
SiLPA/SiKPA	0,00	8.475.746.848,64	0,00	8.126.059.660,36

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2023 direalisasikan sebesar **Rp8.475.746.848,64**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp349.687.188,28** atau **4,30%** dibandingkan dengan tahun 2022 dimana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir tercatat sebesar **Rp8.126.059.660,36**. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 dapat dilihat dengan rincian mutasi sebagai berikut.

U R A I A N	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	8.126.059.660,36	37.362.520.716,94
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	8.138.537.864,07	37.256.712.081,94
Sub Total	(12.478.203,71)	105.808.635,00
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36
Sub Total	8.463.268.644,93	8.231.868.295,36
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	12.478.203,71	(105.808.635,00)
Lain – Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Majene mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.685.817.860.654,03** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp30.627.497.984,64**, Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp58.711.566.210,83** Aset Tetap sebesar **Rp1.590.166.201.673,40** dan Aset Lainnya sebesar **Rp6.312.594.785,16**. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp57.608.887.592,45** yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp57.608.887.592,45** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.628.208.973.061,58**. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut.



Posisi Neraca	31-Des-23	31-Des-22
Aset Lancar	30.627.497.984,64	23.337.047.195,39
Investasi Jangka Panjang	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83
Aset Tetap	1.590.166.201.673,40	1.501.443.030.038,47
Aset Lainnya	6.312.594.785,16	7.036.503.759,16
Jumlah Aset	1.685.817.860.654,03	1.558.221.070.811,85
Kewajiban Jangka Pendek	57.608.887.592,45	57.338.342.773,33
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	77.469.976,00
Jumlah Kewajiban	57.608.887.592,45	57.415.812.749,33
Ekuitas	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.685.817.860.654,03	1.558.221.070.811,85

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majene untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Dari kegiatan operasional pemerintah daerah, Pendapatan-LO adalah sebesar **Rp861.836.646.897,53**, Beban sebesar **Rp860.629.493.408,15**, sehingga Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp1.207.153.489,38**. Sementara itu pada pos Kegiatan Non Operasional terdapat defisit sebesar **(Rp9.512.406,00)**. Terdapat Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar **Rp(1.977.663.278,00)**, sehingga Defisit-LO sebesar **(Rp780.022.194,62)**

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

U R A I A N	2023	2022
Pendapatan-LO	861.836.646.897,53	843.959.670.790,72
Beban	860.629.493.408,15	935.412.586.261,64
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	1.207.153.489,38	(91.452.915.470,92)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(9.512.406,00)	0,00
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	(1.977.663.278,00)	(2.893.036.163,00)
Surplus/(Defisit)-LO	(780.022.194,62)	(94.345.951.633,92)

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023.

Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Majene periode 2023 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :



Uraian	2023	2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	105.890.395.086,57	65.120.931.018,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(105.553.186.102,00)	(94.251.583.440,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(171.115.933,20)	164.652.387,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	166.093.051,37	(28.966.000.034,58)

6. Laporan Perubahan Ekuitas

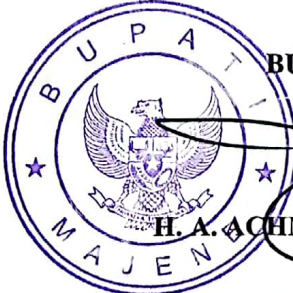
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode tahun 2023. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.628.208.973.061,58**.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
Ekuitas Awal	1.500.805.258.062,52	1.591.813.548.616,05
Surplus/Defisit-LO	(780.022.194,62)	(94.345.951.633,92)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	128.183.737.193,68	3.337.661.080,39
Ekuitas Akhir	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.


BUPATI MAJENE
H. A. ACHMAD SYUKRI, SE., M.M.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Majene, Mei 2024
BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, SE., M.M.

Pernyataan Tanggung Jawab-vii-



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN	iii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH.....	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	5
NERACA.....	6
LAPORAN OPERASIONAL.....	9
LAPORAN ARUS KAS.....	12
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	15
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	16
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	16
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	19
BAB II GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL	21
2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	21
2.2. Kebijakan Keuangan	38
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	46
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	65
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	65
3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian	89
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	91
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	91
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	91



4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	92
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai SAP	104
4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu	107
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	114
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	114
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	165
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	170
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	231
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	254
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	266
BAB VI PENUTUP	271



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2022	24
Tabel 2.2	Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene Tahun 2014 – 2024	25
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2018–2022	25
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2018–2022	26
Tabel 2.5	Tingkat Inflasi Umum Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	28
Tabel 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 – 2022 di Kabupaten Majene..	34
Tabel 2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2017-2022	37
Tabel 2.8	Perkembangan IPM dan Faktor Pendukung IPM Kabupaten Majene Tahun 2017- 2022	37
Tabel 2.9	Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 s.d. Tahun 2024.....	41
Tabel 2.10	Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2024	45
Tabel 2.11	Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2024.....	46
Tabel 2.12	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2023	47
Tabel 2.13	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	52
Tabel 2.14	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023	53
Tabel 3.1	Rekapitulasi Target Dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	69
Tabel 3.2	Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023	71
Tabel 3.3	Rekapitulasi Target Dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	72
Tabel 3.4	Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023	73
Tabel 3.5	Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023	74
Tabel 3.6	Rekapitulasi Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	75
Tabel 3.7	Rekapitulasi Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	76
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023	77
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023	77
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.	78
Tabel 3.11	Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023	79
Tabel 3.12	Realisasi Transfer Bagi Hasil APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023	79



Tabel 3.13	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	80
Tabel 3.14	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	81
Tabel 3.15	Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2023	83
Tabel 3.16	Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2023	84
Tabel 3.17	Pengalokasian DTU Untuk Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2023.....	84
Tabel 3.18	Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021-2023	85
Tabel 3.19	Alokasi Anggaran Bidang Pengawasan Kabupaten Majene Tahun 2021-2023	87
Tabel 3.20	Alokasi Anggaran Mengantisipasi Dampak Inflasi Kabupaten Majene Tahun 2022-2023.....	88
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA TA 2022 dan 2023.....	114
Tabel 5.2	Pendapatan – LRA	116
Tabel 5.3	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	118
Tabel 5.4	Kriteria Rasio Efektivitas Daerah	119
Tabel 5.5	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	120
Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	121
Tabel 5.7	Pendapatan Pajak Daerah.....	122
Tabel 5.8	Pendapatan Retribusi Daerah.....	124
Tabel 5.9	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	128
Tabel 5.10	Pendapatan Transfer.....	131
Tabel 5.11	Dana Bagi Hasil (DBH)	134
Tabel 5.12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2023	135
Tabel 5.13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA. 2023	135
Tabel 5.14	Dana Pendapatan Bagi Hasil.....	137
Tabel 5.15	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA.....	139
Tabel 5.16	Rincian Belanja Menurut Jenis	140
Tabel 5.17	Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi	142
Tabel 5.18	Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Fungsi	143
Tabel 5.19	Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Wajib	145
Tabel 5.20	Belanja Operasi.....	146
Tabel 5.21	Belanja Pegawai.....	147
Tabel 5.22	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.....	147
Tabel 5.23	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	148
Tabel 5.24	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	149
Tabel 5.25	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.....	149
Tabel 5.26	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	150
Tabel 5.27	Belanja Barang dan Jasa	151
Tabel 5.28	Belanja Hibah Tahun 2023	152
Tabel 5.29	Daftar Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD	153



Tabel 5.30	Belanja Modal.....	156
Tabel 5.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156
Tabel 5.32	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158
Tabel 5.33	Belanja Modal, Jalan Irigasi dan Jaringan	158
Tabel 5.34	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	159
Tabel 5.35	Belanja Tak Terduga.....	161
Tabel 5.36	Belanja Transfer.....	162
Tabel 5.37	Perhitungan Pembiayaan Netto.....	163
Tabel 5.38	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	165
Tabel 5.39	Laporan Perubahan Saldo Anggaran.....	166
Tabel 5.40	Rincian Koreksi Saldo Kas atas Kesalahan Pembukuan di Tahun Sebelumnya.....	168
Tabel 5.41	Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022	170
Tabel 5.42	Saldo Kas di Rekening Kas Daerah	175
Tabel 5.43	Kas di Bendahara BLUD	178
Tabel 5.44	Saldo Kas di Rekening Bank atas Kegiatan Prolanis.....	178
Tabel 5.45	Saldo Kas di Rekening Bank atas Penerimaan Retribusi Kesehatan dan Pengelolaan Dana JKN BPJS Kesehatan	179
Tabel 5.46	Saldo Kas di Rekening Bank atas Pengelolaan dana BOK.....	179
Tabel 5.47	Saldo Kas Tunai pada Bendahara BLUD	180
Tabel 5.48	Kas di Bendahara BOS	181
Tabel 5.49	Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya pada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Majene	182
Tabel 5.50	Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran	183
Tabel 5.51	Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya pada Puskesmas.....	183
Tabel 5.52	Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya pada Sekolah	184
Tabel 5.53	Daftar Rincian Penyetoran Potongan Pajak	185
Tabel 5.54	Piutang Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.....	187
Tabel 5.55	Daftar Piutang Pajak	189
Tabel 5.56	Daftar Piutang Retribusi	189
Tabel 5.57	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	190
Tabel 5.58	Daftar Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	191
Tabel 5.59	Rincian Piutang Lainnya.....	192
Tabel 5.60	Daftar Penyisihan Piutang.....	192
Tabel 5.61	Rincian Persediaan Tahun 2023.....	194
Tabel 5.62	Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	195
Tabel 5.63	Daftar Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2023	195
Tabel 5.64	Mutasi Investasi Permanen - Penyertaan Modal Tahun 2023.....	197
Tabel 5.65	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023.....	198
Tabel 5.66	Tabel Penambahan dan Pengurangan Aset tetap TA. 2023	199
Tabel 5.67	Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Tanah.....	200
Tabel 5.68	Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin	202
Tabel 5.69	Tabel Mutasi Tambah/Mutasi Kurang.....	203



Tabel 5.70	Mutasi Masuk Peralatan Akibat Mutasi antar SKPD Tanggal 30 November 2023	205
Tabel 5.71	Mutasi Keluar Peralatan Akibat Mutasi antar SKPD Tanggal 30 November 2023	206
Tabel 5.72	Rincian Saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung	208
Tabel 5.73	Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan	209
Tabel 5.74	Mutasi Masuk atas Pengakuan Hutang Belanja Gedung dan Bangunan	210
Tabel 5.75	Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan Mutasi antar SKPD Tanggal 30 November 2023.....	210
Tabel 5.76	Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan Mutasi antar SKPD Tanggal 15 Desember 2023	211
Tabel 5.77	Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD Tanggal 30 November 2023.....	212
Tabel 5.78	Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD Tanggal 15 Desember 2023	213
Tabel 5.79	Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022	214
Tabel 5.80	Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	214
Tabel 5.81	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022	217
Tabel 5.82	Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Tetap Lainnya.....	217
Tabel 5.83	Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	218
Tabel 5.84	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	219
Tabel 5.85	Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud.....	221
Tabel 5.86	Aset Tak Berwujud dan Amortisasi	222
Tabel 5.87	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain.....	223
Tabel 5.88	Tren Rasio Solvabilitas - <i>Debt to Equity</i> Kabupaten Majene 2019-2023	225
Tabel 5.89	Tren Rasio Solvabilitas - <i>Debt to Assets</i> Kabupaten Majene 2019-2023	225
Tabel 5.90	Daftar Utang PFK per 31 Desember 2023	226
Tabel 5.91	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022	227
Tabel 5.92	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan.	228
Tabel 5.93	Utang Belanja Menurut Jenisnya s.d. 31 Desember 2023	229
Tabel 5.94	Saldo Ekuitas 2023	231
Tabel 5.95	Rincian Pendapatan LO Tahun 2023	234
Tabel 5.96	Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	235
Tabel 5.97	Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO.....	235
Tabel 5.98	Rincian Pendapatan Transfer - LO.....	237
Tabel 5.99	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO.....	238
Tabel 5.100	Rincian Beban Laporan Operasional	239
Tabel 5.101	Beban Pegawai.....	240
Tabel 5.102	Beban Persediaan	241
Tabel 5.103	Transaksi Mempengaruhi Saldo Beban Persediaan di Tahun 2023.....	243
Tabel 5.104	Rincian Beban Jasa Per SKPD.....	243
Tabel 5.105	Beban Jasa Per Jenis	245
Tabel 5.106	Rincian Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2023.....	245



Tabel 5.107	Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2023.....	245
Tabel 5.108	Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2023.....	246
Tabel 5.109	Beban Barang dan Jasa BLUD.....	247
Tabel 5.110	Beban Hibah – LO Tahun 2023	248
Tabel 5.111	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2023	249
Tabel 5.112	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023	249
Tabel 5.113	Beban Transfer - LO	250
Tabel 5.114	Beban Lain-lain - LO	250
Tabel 5.115	Rincian beban lain-lain - LO per SKPD	251
Tabel 5.116	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	252
Tabel 5.117	Rincian Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga - LO.....	252
Tabel 5.118	Posisi Arus Kas Bersih Berdasarkan Aktivitas	254
Tabel 5.119	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	256
Tabel 5.120	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	258
Tabel 5.121	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	259
Tabel 5.122	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	260
Tabel 5.123	Rincian Belanja pada Rekening Giro Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	261
Tabel 5.124	Rincian Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	263
Tabel 5.125	Saldo Akhir Kas.....	265
Tabel 5.126	Rincian Saldo Akhir Kas	266
Tabel 5.127	Surplus/Defisit LO per SKPD.....	267
Tabel 5.128	Koreksi yang Langsung Menambah Ekuitas	268
Tabel 5.129	Koreksi yang Langsung Mengurangi Ekuitas.....	269



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Regional Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene 2016-2022	22
Grafik 2. 2	Kontribusi PDRB Kabupaten Majene Terhadap Perkembangan Regional Sulawesi Barat Tahun 2018-2022	23
Grafik 2. 3	Tingkat Inflasi Regional Tahun 2015-2022	29
Grafik 2. 4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene, Periode 2017– 2022	30
Grafik 2. 5	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene dan Provinsi Sulbar Periode 2017-2022	31
Grafik 2. 6	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kab. Majene dan Prov. Sulbar Periode 2017 – 2022	32
Grafik 2. 7	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene	33
Grafik 2. 8	Index Gini (<i>Gene Ratio</i>) Kabupaten Majene Tahun 2017-2021	35
Grafik 2. 9	Perbandingan Indeks Gini/Koefisien Gini antara Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021	36
Grafik 3. 1	Capaian Target dan Realisasi Pendapatan	69
Grafik 3. 2	Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023	70
Grafik 3. 3	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	71
Grafik 3. 4	Persentase Capaian Target Pendapatan Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	72
Grafik 3. 5	Persentase Capaian Target Lain-lain Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.....	75
Grafik 5.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019-2023	115
Grafik 5.2	Tren Rasio Kemandirian Kabupaten Majene 2019-2023.....	118
Grafik 5.3	Tren perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene 2019-2023	119
Grafik 5.4	Tren Perkembangan Rasio Efisiensi Kabupaten Majene 2019-2023.....	121
Grafik 5.5	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kab. Majene TA. 2023.....	122
Grafik 5.6	Komposisi Pendapatan Transfer	132
Grafik 5.7	Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019-2023	138
Grafik 5.8	Perkembangan Belanja dan Transfer Tahun 2019-2023.....	141
Grafik 5.9	Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi Tahun 2023.....	144
Grafik 5.10	Komposisi Belanja Menurut Jenis TA 2023	145
Grafik 5.11	Perbandingan Belanja Modal Tahun 2019-2023.....	155
Grafik 5.12	Komposisi Belanja Modal per Jenis TA 2023	155
Grafik 5.13	Tren Perkembangan Belanja Tak terduga Kabupaten Majene Tahun 2019-2023	160
Grafik 5.14	Tren Perkembangan SiLPA Kab. Majene 2019-2023.....	164
Grafik 5.15	Tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kab. Majene Tahun 2019-2023.....	170



Grafik 5.16	Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2020-2023	171
Grafik 5.17	Komposisi Aset Kabupaten Majene Tahun 2023.....	171
Grafik 5.18	Perkembangan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene 2019-2023.....	173
Grafik 5.19	Perkembangan Rasio Cepat (Quick Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene 2019-2023	173
Grafik 5.20	Perkembangan Rasio Kas (Cash Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019-2023.....	174
Grafik 5.21	Komposisi Piutang TA. 2023.....	187
Grafik 5.22	Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Kabupaten Majene 2019-2023	197
Grafik 5.23	Komposisi Aset Tetap berdasarkan Jenisnya.....	199
Grafik 5.24	Grafik Perkembangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	202
Grafik 5.25	Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	208
Grafik 5.26	Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2023	224
Grafik 5.27	Perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya 2019-2023	229
Grafik 5.28	Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2021-2023.....	232
Grafik 5.29	Kegiatan Operasional 2021-2023.....	233
Grafik 5.30	Komposisi Pendapatan - LO TA 2023.....	234
Grafik 5.31	Komponen Pendapatan Asli Daerah – LO Kab. Majene TA 2023	235
Grafik 5.32	Perbandingan Beban Operasi TA 2023.....	239
Grafik 5.33	Tren Perkembangan Surplus/Defisit – LO Kabupaten Majene 2019-2023 ...	253
Grafik 5.34	Komposisi Arus Kas Bersih Tahun 2019 s.d. 2023	254
Grafik 5.35	Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2019-2023	255
Grafik 5.36	Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2019-2023	257
Grafik 5.37	Tren Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene 2019-2023	270



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 2 Daftar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 3 Daftar Piutang dan Penyisihannya Per 31 Desember 2023
- Lampiran 4 Daftar Sisa Persediaan Per 31 Desember 2023
- Lampiran 5 Daftar Utang PFK Per 31 Desember 2023
- Lampiran 6 Saldo Utang Belanja Per SKPD Per 31 Desember 2023
- Lampiran 7 Daftar Utang Belanja Per 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	15.634.764.909,00	10.740.841.614,61	68,70	9.461.193.553,39
4	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	5.1.1.1.2	6.295.728.500,00	3.559.947.334,00	56,55	5.803.175.060,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	5.1.1.1.3	3.333.308.081,00	3.298.690.028,00	98,96	3.333.308.081,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	5.1.1.1.4	115.574.361.972,00	70.195.303.544,76	60,74	51.965.639.042,28
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LRA	5.1.1.1	140.838.163.462,00	87.794.782.521,37	62,34	70.563.315.736,67
8	PENDAPATAN TRANSFER – LRA					
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LRA					
10	DANA PERIMBANGAN – LRA					
11	Dana Bagi Hasil – LRA	5.1.1.2.1.1	5.159.841.000,00	8.064.980.017,00	156,30	10.784.967.445,00
12	Dana Alokasi Umum – LRA	5.1.1.2.1.2	503.503.051.000,00	508.603.740.400,00	101,01	485.848.952.931,00
13	Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA	5.1.1.2.1.3	80.134.213.000,00	78.097.585.458,00	97,46	74.119.888.581,00
14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA	5.1.1.2.1.3	123.544.010.000,00	123.320.564.365,00	99,82	109.054.956.339,00
15	Jumlah Dana Perimbangan – LRA		712.341.115.000,00	718.086.870.240,00	100,81	679.808.765.296,00

No. Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA – LRA					
17	Dana Insentif Daerah – LRA	5.1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	2.301.731.000,00
18	Dana Desa – LRA	5.1.1.2.1.5	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01	55.584.815.000,00
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA		54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01	57.886.546.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	766.527.242.000,00	773.902.149.240,00	100,96	737.695.311.296,00
21	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH – LRA					
22	Pendapatan Bagi Hasil – LRA	5.1.1.2.2.1	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48	23.814.548.328,00
23	Bantuan Keuangan – LRA	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	63.550.000,00
24	Jumlah Transfer Antar Daerah – LRA	5.1.1.2.2	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48	23.878.098.328,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer – LRA	5.1.1.2	791.537.242.000,00	798.281.176.782,00	100,85	761.573.409.624,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA					
27	Pendapatan Hibah – LRA	5.1.1.3.1	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39	1.227.000.000,00
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	5.1.1.3	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39	1.227.000.000,00
29	JUMLAH PENDAPATAN – LRA	5.1.1	934.535.405.462,00	887.077.959.303,37	94,92	833.363.725.360,67
30	BELANJA					
31	BELANJA OPERASI					
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	449.101.271.369,00	372.584.721.002,00	82,96	406.980.998.990,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	258.569.834.151,00	283.016.566.756,80	109,45	218.629.512.958,25
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	11.438.811.106,00	11.505.624.306,00	100,58	36.875.447.859,00
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	775.546.000,00
36	Jumlah Belanja Operasi	5.1.2.1	719.167.516.626,00	667.164.512.064,80	92,77	663.261.505.807,25

No. Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
37	BELANJA MODAL					
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	2.375.000.000,00	723.073.962,00	30,45	1.025.276.300,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	20.210.349.846,00	18.297.386.946,00	90,53	13.710.223.053,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	51.777.622.772,00	53.184.829.425,00	102,72	19.183.777.725,00
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	41.089.214.000,00	31.464.043.269,00	76,57	55.784.625.862,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	335.000.000,00	179.508.000,00	53,58	50.000.000,00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	340.400.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Jumlah Belanja Modal	5.1.2.2	116.127.586.618,00	103.848.841.602,00	89,43	89.753.902.940,00
45	BELANJA TAK TERDUGA					
46	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	2.000.000.000,00	1.977.663.278,00	98,88	2.633.036.163,00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	2.000.000.000,00	1.977.663.278,00	98,88	2.633.036.163,00
48	JUMLAH BELANJA		837.295.103.244,00	772.991.016.944,80	92,32	755.648.444.910,25
49	TRANSFER					
50	TRANSFER BAGI HASIL					
51	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4	1.518.476.491,00	827.869.060,00	54,52	889.031.538,00
52	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4	1.089.032.338,00	388.485.314,00	35,67	348.068.334,00
53	Jumlah Transfer Bagi Hasil		2.607.508.829,00	1.216.354.374,00	46,65	1.237.099.872,00
54	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
55	Bantuan Keuangan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4	38.296.666.389,00	54.993.100.000,00	143,60	55.584.815.000,00
56	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01	45.404.018.000,00

No. Urut	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
57	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		92.482.793.389,00	110.808.379.000,00	119,82	100.988.833.000,00
58	JUMLAH TRANSFER	5.1.2.4	95.090.302.218,00	112.024.733.374,00	117,81	102.225.932.872,00
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.1.2	932.385.405.462,00	885.015.750.318,80	94,92	857.874.377.782,25
60	SURPLUS / (DEFISIT)		2.150.000.000,00	2.062.208.984,57	95,92	(24.510.652.421,58)
61	PEMBIAYAAN	5.1.3				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	8.138.537.864,07	0,00	37.256.712.081,94
64	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		10.000.000,00	8.138.537.864,07	81.385,38	37.256.712.081,94
66	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
67	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	79,86	4.620.000.000,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	79,86	4.620.000.000,00
70	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	(2.150.000.000,00)	6.413.537.864,07	(298,30)	32.636.712.081,94
71	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.4	0,00	8.475.746.848,64	0,00	8.126.059.660,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI MAJENE



H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M

Laporan Realisasi APBD -4-

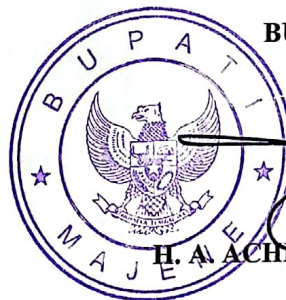


PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	8.126.059.660,36	37.362.520.716,94
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	8.138.537.864,07	37.256.712.081,94
3	Sub Total		(12.478.203,71)	105.808.635,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36
5	Sub Total		8.463.268.644,93	8.231.868.295,36
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	12.478.203,71	(105.808.635,00)
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

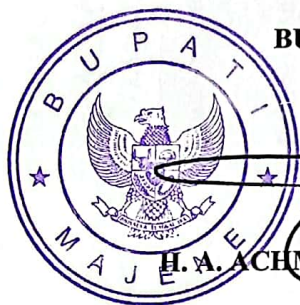
(dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		8.480.304.393,60	8.301.733.138,52
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	83.313.671,24	84.310.247,12
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	157.422.650,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	200.000,00	395.152.322,91
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	8.260.015.001,20	7.596.192.119,29
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	0,00	43.996.339,00
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	924.890,00	2.267.164,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	135.850.831,16	22.392.296,20
Setara Kas	5.3.1.1.8	0,00	0,00
Piutang	5.3.1.1.9	3.212.422.663,26	3.885.272.398,77
Piutang Pajak	5.3.1.1.9.1	6.690.953.932,40	6.388.955.683,40
Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.10	(5.451.614.187,20)	(4.892.799.762,34)
Piutang Pajak Netto		1.239.339.745,20	1.496.155.921,06
Piutang Retribusi	5.3.1.1.9.2	806.913.760,00	828.582.161,00
Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.10	(325.595.622,50)	(174.952.934,51)
Piutang Retribusi Netto		481.318.137,50	653.629.226,49
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9.3	171.858.967,00	269.299,22
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	(859.294,84)	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		170.999.672,16	269.299,22
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.3.1.1.9.4	1.327.402.119,00	1.710.342.952,00
Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.3.1.1.10	(6.637.010,60)	0,00
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Netto		1.320.765.108,40	1.710.342.952,00
Piutang Pendapatan Lainnya	5.3.1.1.9.5	0,00	25.000.000,00
Penyisihan Pendapatan Lainnya	5.3.1.1.10	0,00	(125.000,00)
Piutang Pendapatan Lainnya Netto		0,00	24.875.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.9.5	56.999.299,04	56.999.299,04
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.10	(56.999.299,04)	(56.999.299,04)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.9.5	523.154.330,40	523.154.330,40
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.10	(523.154.330,40)	(523.154.330,40)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.1.11	18.934.770.927,78	11.150.041.658,10
JUMLAH ASET LANCAR	5.3.1.1	30.627.497.984,64	23.337.047.195,39

Uraian	Ref	2023	2022
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	5.3.1.2.1	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.2	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.3	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		58.711.566.210,83	26.404.489.818,83
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83
ASET TETAP			
Tanah	5.3.1.3.1	453.403.273.655,00	463.312.227.957,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	365.654.630.459,57	348.618.945.476,57
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	727.138.651.618,67	676.964.053.091,43
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.059.184.874.560,65	1.028.371.277.580,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	13.081.620.364,08	13.000.515.364,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	15.938.153.107,00	15.938.153.107,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.044.235.002.091,57)	(1.044.762.142.537,61)
JUMLAH ASET TETAP	5.3.1.3	1.590.166.201.673,40	1.501.443.030.038,47
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	300.449.791,00	300.449.791,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	5.964.632.711,00	5.190.519.106,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(4.560.952.974,16)	(3.751.218.336,16)
Aset Tak Berwujud Netto		1.403.679.736,84	1.439.300.769,84
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	43.423.051.158,22	46.272.038.392,22
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(38.814.585.900,90)	(40.975.285.193,90)
Aset Lain-lain Netto		4.608.465.257,32	5.296.753.198,32
JUMLAH ASET LAINNYA	5.3.1.4	6.312.594.785,16	7.036.503.759,16
JUMLAH ASET	5.3.1	1.685.817.860.654,03	1.558.221.070.811,85
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	109.162.361,00	33.020.669,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	7.583.333,33	46.583.333,33
Utang Belanja	5.3.2.1.3	57.491.941.898,12	57.117.850.133,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	200.000,00	140.888.638,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	57.608.887.592,45	57.338.342.773,33
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2	0,00	77.469.976,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	0,00	77.469.976,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.3.2	57.608.887.592,45	57.415.812.749,33

Uraian	Ref	2023	2022
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.3	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.685.817.860.654,03	1.558.221.070.811,85

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

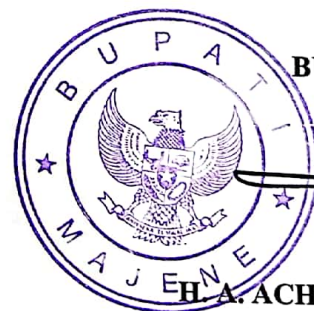
(dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (penurunan)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah – LO	5.4.1.1.1	11.042.839.863,61	9.982.144.824,39	1.060.695.039,22	10,63
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1	3.835.487.583,00	6.147.120.127,67	(2.311.632.544,67)	(37,61)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1	8.889.449.774,00	3.333.308.081,00	5.556.141.693,00	166,69
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1	69.980.877.981,34	47.958.899.105,66	22.021.978.875,68	45,92
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO	5.4.1.1.1	93.748.655.201,95	67.421.472.138,72	26.327.183.063,23	39,05
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN – LO					
10	Dana Bagi Hasil – LO	5.4.1.1.2	7.586.552.000,00	11.895.340.462,00	(4.308.788.462,00)	(36,22)
11	Dana Alokasi Umum – LO	5.4.1.1.2	508.603.740.400,00	485.848.952.931,00	22.754.787.469,00	4,68
12	Dana Alokasi Khusus Fisik – LO	5.4.1.1.2	78.097.585.458,00	74.119.888.581,00	3.977.696.877,00	5,37
13	Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO	5.4.1.1.2	123.320.564.365,00	109.054.956.339,00	14.265.608.026,00	13,08
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	5.4.1.1.2	717.608.442.223,00	680.919.138.313,00	36.689.303.910,00	5,39
15	Dana Insentif Daerah – LO		0,00	2.301.731.000,00	(2.301.731.000,00)	(100,00)
16	Dana Desa – LO		0,00	55.584.815.000,00	(55.584.815.000,00)	(100,00)
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO		0,00	57.886.546.000,00	(57.886.546.000,00)	(100,00)

No. Urut	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (penurunan)	(%)
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH – LO					
19	Pendapatan Bagi Hasil – LO	5.4.1.1.2	23.996.086.709,00	20.111.225.539,00	3.884.861.170,00	19,32
20	Bantuan Keuangan – LO		0,00	63.550.000,00	(63.550.000,00)	(100,00)
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	5.4.1.1.2	23.996.086.709,00	20.174.775.539,00	3.821.311.170,00	18,94
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO	5.4.1.1.2	741.604.528.932,00	758.980.459.852,00	(17.375.930.920,00)	(2,29)
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
24	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3	26.483.462.763,58	17.532.738.800,00	8.950.723.963,58	51,05
25	Lain-Lain Pendapatan Sesuai UU – LO		0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
26	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	5.4.1.1.3	26.483.462.763,58	17.557.738.800,00	8.925.723.963,58	50,84
27	JUMLAH PENDAPATAN – LO	5.4.1.1	861.836.646.897,53	843.959.670.790,72	17.876.976.106,81	2,12
28	BEBAN					
29	Beban Pegawai	5.4.1.2.1	378.689.132.030,00	410.666.470.398,00	(31.977.338.368,00)	(7,79)
30	Beban Persediaan	5.4.1.2.2	63.418.777.607,42	80.789.468.387,94	(17.370.690.780,52)	(21,50)
31	Beban Jasa	5.4.1.2.3	99.479.834.024,00	107.525.981.182,00	(8.046.147.158,00)	(7,48)
32	Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.4	11.759.257.794,00	13.662.054.886,00	(1.902.797.092,00)	(13,93)
33	Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.5	18.853.685.809,00	35.777.437.772,00	(16.923.751.963,00)	(47,30)
34	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	5.4.1.2.6	1.576.910.000,00	11.553.600.000,00	(9.976.690.000,00)	(86,35)
35	Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.1.2.7	24.965.142.758,00	0,00	24.965.142.758,00	0,00
36	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.1.2.8	68.172.137.112,40	13.239.636.757,61	54.932.500.354,79	414,91
37	Beban Hibah	5.4.1.2.9	34.405.131.852,00	23.110.610.755,00	11.294.521.097,00	48,87
38	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.10	57.600.000,00	775.546.000,00	(717.946.000,00)	(92,57)
39	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.11	102.813.696.890,10	107.496.338.693,36	(4.682.641.803,26)	(4,36)
40	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.12	720.220.756,59	(8.758.820,98)	728.979.577,57	(8.322,80)
41	Beban Transfer	5.4.1.2.13	50.866.289.200,00	107.569.098.046,00	(56.702.808.846,00)	(52,71)

No. Urut	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (penurunan)	(%)
42	Beban Lain-lain	5.4.1.2.14	4.851.677.574,64	23.255.102.204,71	(18.403.424.630,07)	(79,14)
43	JUMLAH BEBAN	5.4.1.2	860.629.493.408,15	935.412.586.261,64	(74.783.092.853,49)	(7,99)
44	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (28 – 45)	5.4.1	1.207.153.489,38	(91.452.915.470,92)	92.660.068.960,30	(101,32)
45	KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO					
46	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		9.512.406,00	0,00	9.512.406,00	0,00
47	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.1	(9.512.406,00)	0,00	(9.512.406,00)	0,00
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.2.2	1.197.641.083,38	(91.452.915.470,92)	92.650.556.554,30	(101,31)
49	POS LUAR BIASA					
50	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
51	Beban Luar Biasa	5.4.3.1	1.977.663.278,00	2.893.036.163,00	(915.372.885,00)	(31,64)
52	POS LUAR BIASA	5.4.3	(1.977.663.278,00)	(2.893.036.163,00)	915.372.885,00	(31,64)
53	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.4	(780.022.194,62)	(94.345.951.633,92)	93.565.929.439,30	(99,17)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	10.740.841.614,61	9.461.193.553,39
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1	3.559.947.334,00	5.803.175.060,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1	3.298.690.028,00	3.333.308.081,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1	70.174.648.044,76	51.843.319.542,28
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1	4.042.833.959,00	8.776.700.298,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1	4.022.146.058,00	2.008.267.147,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1	508.603.740.400,00	485.848.952.931,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1	201.418.149.823,00	183.174.844.920,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1	0,00	2.301.731.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.5.1	55.815.279.000,00	55.584.815.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1	24.379.027.542,00	23.814.548.328,00
14	Penerimaan Dana Bantuan Khusus Keuangan	5.5.1	0,00	63.550.000,00
15	Penerimaan Hibah	5.5.1	1.002.000.000,00	1.227.000.000,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.1	887.057.303.803,37	833.241.405.860,67
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1	372.584.721.002,00	406.980.998.990,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1	283.016.566.756,80	218.629.512.958,25
20	Pembayaran Hibah	5.5.1	11.505.624.306,00	36.875.447.859,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1	57.600.000,00	775.546.000,00
22	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1	1.977.663.278,00	2.633.036.163,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1	827.869.060,00	1.237.099.872,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.1	388.485.314,00	0,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1	110.808.379.000,00	100.988.833.000,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1	781.166.908.716,80	768.120.474.842,25
27	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1	105.890.395.086,57	65.120.931.018,42
28	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
29	Arus Masuk Kas			
30	Penjualan atas Peralatan dan mesin/aset yang tidak dipisahkan	5.5.2	11.505.500,00	0,00
31	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	9.150.000,00	122.319.500,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.2	20.655.500,00	122.319.500,00
33	Arus Keluar Kas			
34	Perolehan Tanah	5.5.2	723.073.962,00	1.025.276.300,00
35	Perolehan Peralatan dan mesin	5.5.2	18.297.386.946,00	13.710.223.053,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	53.184.829.425,00	19.183.777.725,00

No.	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022
37	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	5.5.2	31.464.043.269,00	55.784.625.862,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	179.508.000,00	50.000.000,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	1.725.000.000,00	4.620.000.000,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.2	105.573.841.602,00	94.373.902.940,00
41	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(105.553.186.102,00)	(94.251.583.440,00)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas			
44	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
46	Arus Keluar Kas			
47	Pembayaran Pokok Pinjaman			
48	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
49	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	0,00	0,00
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
51	Arus Masuk Kas			
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4	57.268.912.207,00	57.080.755.059,00
53	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	5.5.4	200.000,00	0,00
54	Uang Masuk atas adanya Pendapatan Bunga pada SMP 10 Ulumanda dan SMP 9 Majene	5.5.4	79.980,00	0,00
55	Uang Masuk atas Sisa Saldo pada Rekening PPTK Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan OR	5.5.4	227,00	0,00
56	Uang Masuk atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum	5.5.4	7.447.998,00	0,00
57	Uang Masuk atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekertariat Daerah	5.5.4	767.000,00	0,00
58	Uang Masuk atas Bantuan Sarana Peribadatan yang terlambat di SPJkan Sekertariat Daerah	5.5.4	5.513.374,96	0,00
59	Jurnal Koreksi Pendapatan BLUD Pelayanan Kesehatan 2023	5.5.4	4.283.010,00	0,00
60	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.4	57.287.203.796,96	57.080.755.059,00
61	Arus Keluar Kas			
62	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4	57.202.282.921,00	57.056.991.310,00
63	Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.5.4	84.888.638,00	0,00
64	Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.5.4	56.000.000,00	0,00
65	Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum	5.5.4	1.009.405,20	0,00

No.	Uraian	Ref	Saldo 2023	Saldo 2022
66	Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekertariat Daerah	5.5.4	754.765,96	0,00
67	Uang Keluar atas Kelebihan Pencairan Dana Desa	5.5.4	113.384.000,00	0,00
68	Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran	5.5.4	0,00	(140.888.638,00)
69	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.4	57.458.319.730,16	56.916.102.672,00
70	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(171.115.933,20)	164.652.387,00
71	Kenaikan / Penurunan Kas		166.093.051,37	(28.966.000.034,58)
72	Saldo Awal Kas		8.301.733.138,52	37.371.777.636,94
73	Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya	5.2.4	12.478.203,71	(105.808.635,00)
74	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		0,00	1.764.171,16
75	Saldo Akhir Kas	5.5.5	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52
76	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	83.313.671,24	84.310.247,12
77	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	157.422.650,00
78	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	200.000,00	395.152.322,91
79	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	8.260.015.001,20	7.596.192.119,29
80	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	0,00	43.996.339,00
81	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	924.890,00	2.267.164,00
82	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	135.850.831,16	22.392.296,20
83	Setara Kas		0,00	0,00
84	Saldo Akhir Kas	5.5.5	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M

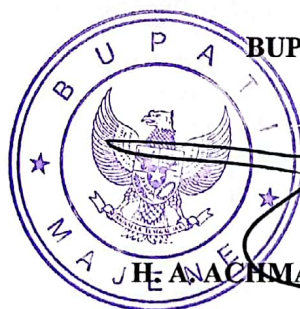


PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.500.805.258.062,52	1.591.813.548.616,05
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(780.022.194,62)	(94.345.951.633,92)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	128.183.737.193,68	3.337.661.080,39
4	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas		12.478.203,71	201.674,00
5	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang		3.392.338,30	(556.791.745,00)
6	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
7	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan		133.151.205,00	(7.006.875,00)
8	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi		25.920.061.221,00	0,00
9	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lancar		0,00	0,00
10	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap		102.114.654.225,67	3.595.426.563,57
11	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya		0,00	0,00
12	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban		0,00	300.520.771,82
13	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya		0,00	5.310.691,00
14	EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI MAJENE

H. ANACHMAD SYUKRI, S.E., M.M



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Seiring dengan reformasi pada struktur negara dan pemerintahan dalam negeri, pada sektor pengelolaan keuangan negara juga mengalami perubahan yang transformatif sebagai instrumen pendukung tercapainya agenda-agenda reformasi. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, membawa perubahan atas penyelenggaraan sistem akuntansi dari berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi berbasis akrual (*accrual*). Untuk penerapannya, maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Aspek pengungkapan penuh (*full disclosure*) menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual. Hal ini terkait dengan pengungkapan hak ataupun kewajiban pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraan *cash toward accrual* dianggap belum mengakomodir secara penuh akan penyajian hak dan kewajiban pemerintah daerah yang semestinya diungkapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Perubahan yang paling mendasar dalam pergeseran konsep penyelenggaraan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis *cash toward accrual* menjadi penyelenggaraan akuntansi berbasis *full accrual* adalah perubahan atas jumlah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan sistem akuntansi *accrual*, pemerintah daerah selaku entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan, yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Sistem akuntansi berbasis akrual ini merupakan anak kandung dari paket regulasi pengelolaan keuangan yang telah terlebih dahulu ada seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yaitu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang di bidang keuangan tersebut mengamanatkan agar Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) yang berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan sampai dengan tahun 2023 dan seluruh transaksi yang telah



dilakukan selama periode Tahun Anggaran (TA) 2023. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi/data keuangan yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja dan beban yang tercantum dalam laporan keuangan.

Selain hal tersebut, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengisyaratkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tersebut di atas, merupakan rangkuman dari pelaksanaan APBD pada unit kerja terkait yang dipertanggungjawabkan selama satu periode. Oleh sebab itu, keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan tergantung pada bagaimana unit kerja membuat dan menyampaikan SPJ. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara teknis implementasi tidak hanya sebatas menyampaikan SPJ. Lebih dari itu, SKPD/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diposisikan sebagai entitas akuntansi. Sebagai entitas akuntansi, OPD memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD untuk kemudian dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, untuk:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan sejauh mana sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD/OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majene adalah:



- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- n. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 3);
- p. Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;
- q. Peraturan Bupati Majene Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene.
- r. Peraturan Bupati Majene Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023;
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 44);
- t. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 7);
- u. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 12);
- v. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 16);
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 24);
- x. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 28); dan
- y. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 29).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

II. Gambaran Ekonomi Makro dan Fiskal

- 2.1. Ekonomi makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan



2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala pencapaian

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi sesuai SAP
- 4.5. Kebijakan akuntansi tertentu

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

VI. Penutup



BAB II GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Dalam Tahun 2023 ini, Pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh positif berdasarkan berbagai indikator domestik dan eksternal yang menunjukkan ketahanan yang impresif. Keduanya menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi perekonomian global ke depan. Proyeksi lembaga- lembaga keuangan dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan berat di Tahun 2023 mulai terbukti. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka. Di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap *resilience*, dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan pertama.

Dengan kondisi nasional dan global saat ini, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Majene pasca Covid-19 sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi, maka Kabupaten Majene dalam mewujudkan Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius harus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kondisi geografis di setiap wilayah serta meningkatkan infrastruktur penunjang perekonomian dengan tujuan menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majene.

Pencapaian tujuan pembangunan secara optimal membutuhkan analisis atas indikator ekonomi makro yang ditujukan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Di samping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat rancangan kebijakan fiskal daerah.

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa mendatang. Fungsi lain dari indikator makro adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

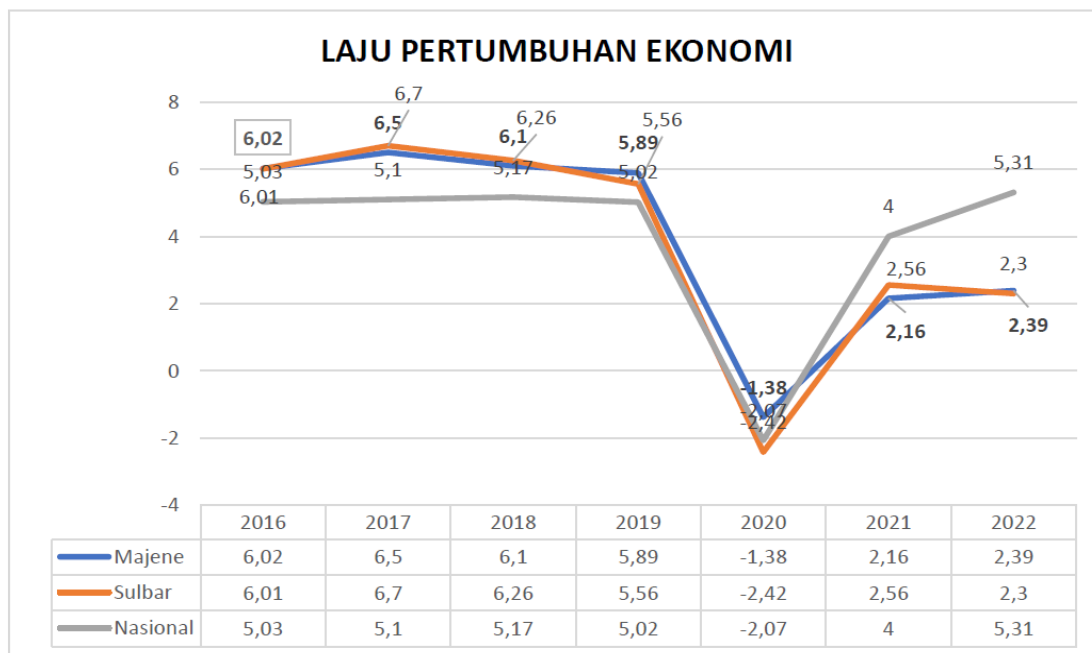
Dalam konteks evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah, secara lebih spesifik indikator-indikator makro ekonomi yang perlu untuk diamati adalah laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Berikut gambaran indikator ekonomi makro Kabupaten Majene sepanjang Tahun 2023 berdasarkan data BPS Kabupaten Majene.

Beberapa indikator ekonomi makro mencakup sumber daya manusia, sosial kependudukan dan ekonomi yang berperan dalam mendukung pencapaian prioritas RKPD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene secara kumulatif terus tumbuh positif dimana pada Tahun 2021 tumbuh sebesar 2,16% dan Tahun 2022 sebesar 2,39%. Pertumbuhan ini sudah sejalan dengan kondisi nasional dimana pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 sebesar 4% dan Tahun 2022 sebesar 5,31% sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi barat pada Tahun 2021 sebesar 2,56% dan Tahun 2022 sebesar 2,3%. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene masih di bawah nasional dan provinsi, beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pertumbuhan ekonomi masih lambat diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan pendukung utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Majene pertumbuhannya relatif stagnan sejak pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Regional Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene 2016-2022

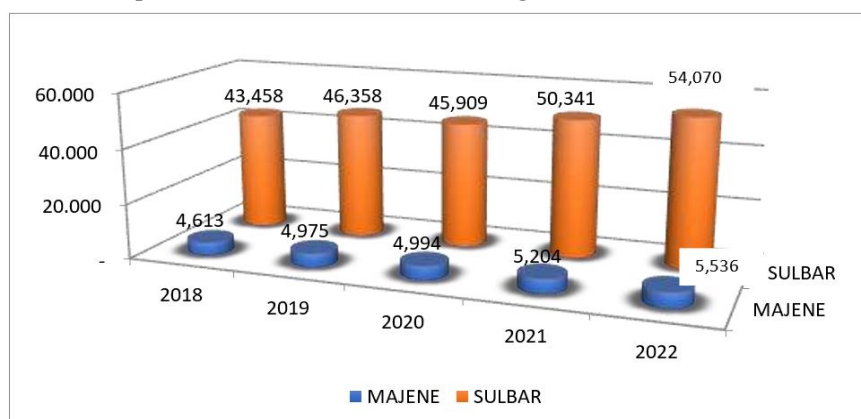
Faktor pertumbuhan ekonomi tersebut di atas dipengaruhi oleh Konsumsi rumah tangga tumbuh positif seiring dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang minim pembatasan kegiatan. Investasi mengalami pertumbuhan signifikan didorong oleh pembangunan pasca bencana dan realisasi proyek infrastruktur pemerintah yang masif di akhir Tahun. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mengalami kontraksi akibat penurunan produksi sejumlah komoditas sebagai dampak dari fenomena cuaca ekstrem di akhir Tahun. membaiknya mobilitas penduduk akibat pelonggaran PPKM pada triwulan IV/2021, secara kumulatif, perekonomian Kabupaten Majene Tahun 2022 diproyeksikan tumbuh

lebih baik dari Tahun sebelumnya. Tingkat vaksinasi serta pembangunan infrastruktur dan pembangunan pasca gempa yang terus berjalan akan meningkatkan aktivitas perekonomian selama Tahun 2022. Konsumsi masyarakat akan tumbuh lebih baik yang terus meningkat dan pembatasan kegiatan yang mulai menurun. Sektor investasi diperkirakan akan tumbuh dengan baik didorong oleh pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan per kapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada Tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Majene pada Tahun 2018 mencapai 4,613 milyar dan Tahun 2019 meningkat menjadi 4,975 milyar rupiah, Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 4,994 milyar rupiah, dan di Tahun 2021 mencapai sebesar 5,204 milyar rupiah serta di Tahun 2022 meningkat 5,536 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan perkembangan PDRB Sulawesi Barat, maka rata-rata PDRB Kabupaten Majene berkontribusi 9,77%. Jumlah ini relatif tidak proporsional, karena PDRB Sulawesi Barat diakumulasi oleh 6 Kabupaten. Oleh karena itu, untuk Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah yang tepat dalam melakukan intervensi pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan proporsional. Adapun kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Majene terhadap Perkembangan PDRB Sulawesi Barat periode 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:



Grafik 2. 2 Kontribusi PDRB Kabupaten Majene Terhadap Perkembangan Regional Sulawesi Barat Tahun 2018-2022

Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2023



Struktur ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan sejauh mana suatu kategori lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah untuk menyumbang perekonomian daerah pada kurun waktu tertentu. Penggambaran struktur ekonomi daerah antara lain digunakan untuk merancang suatu kebijakan dalam rangka pengembangan kategori lapangan usaha tertentu ke masa yang akan datang. Pada Tahun 2022 dari 17 sektor lapangan usaha ekonomi, terdapat 3 sektor yang masih negatif diantaranya sektor (1) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar -2,17%; (2) konstruksi sebesar -2,75%; (3) jasa keuangan dan asuransi sebesar -1,44%. Sedangkan sektor yang tumbuh signifikan diantaranya: (1) pengadaan listrik dan gas sebesar 15,34%; (2) penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,99%; dan transportasi dan pergudangan sebesar 8,97%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2022

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian Kehutanan & Perikanan	7,91	7,46	1,51	1,55	3,2
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,92	5,9	-5,39	5,73	2,32
3.	Industri Pengolahan	6,83	5,91	1,66	5,89	2,1
4.	Pengadaan Listrik & Gas	6,02	6,28	5,14	-3,4	15,34
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	7,85	2,74	0,64	0,18	-2,17
6.	Konstruksi	6,05	4,53	-11,88	9,64	-2,75
7.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,35	5,28	-1,55	3,08	1,29
8.	Transportasi & Pergudangan	5,2	4,09	-5,34	3,07	8,97
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,69	11,98	-6,04	5,08	8,99
10.	Informasi & Komunikasi	6,81	13,09	5,36	0,17	2,03
11.	Jasa Keuangan & Asuransi	2,82	4,04	7,03	5,92	-1,44
12.	Real Estate	5,72	5,87	2,79	-2,7	3,57
13.	Jasa Perusahaan	3,8	4,32	-4,94	0,1	4,25
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,68	2,78	-6,36	0,11	2,25
15.	Jasa Pendidikan	4,44	4,75	-5,68	-1,68	2,96
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	7,01	1,04	3,21	-0,08	4,14
17.	Jasa Lainnya	6,14	5,3	-3,41	3,79	6,69
	Produk Domestik Regional Bruto	6,06	6,01	-1,38	2,16	2,39

Sumber: BPS Kab. Majene Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas diharapkan Kabupaten Majene pada Tahun 2023 dapat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi dengan melakukan berbagai kebijakan diantaranya:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal;
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan;
3. Pengembangan Industrialisasi, Agribisnis, Agroteknologi & Agromarine;
4. Pengendalian Harga-harga Kebutuhan Pokok; dan



5. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan

Tabel 2. 2 Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene Tahun 2014 – 2024

Tahun	LPE (%)
2014	5,35
2015	5,73
2016	6,02
2017	6,29
2018	6,06
2019	6,01
2020	-1,38
2021	2,16
2022	2,39
2023*	6,25
2024*	6,37

Keterangan : * Angka Proyeksi

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan per kapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Adapun gambaran PDRB Kabupaten Majene berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2018–2022

Lapangan Usaha	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.144,70	33,9	1.230,10	34,4	1.248,70	35,4	1.256,06	35,15	1.305,6	35,43
Pertambangan dan Penggalian	89,7	2,7	95	2,7	89,9	2,5	95,04	2,64	97,25	2,64
Industri Pengolahan	185,7	5,5	196,6	5,5	199,9	5,7	211,64	5,88	216,1	5,86
Pengadaan Listrik dan Gas	4,1	0,1	4,4	0,1	4,6	0,1	4,46	0,12	5,15	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1	5,16	0,14	5,27	0,14



Lapangan Usaha	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Konstruksi	265,4	7,9	277,4	7,8	244,4	6,9	268,01	7,45	260,64	7,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323,6	9,6	340,7	9,5	335,4	9,5	345,72	9,61	350,19	9,5
Transportasi dan Pergudangan	58,2	1,7	60,6	1,7	57,3	1,6	59,11	1,64	64,41	1,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,6	0,3	10,8	0,3	10,1	0,3	10,71	0,30	11,67	0,32
Informasi dan Komunikasi	183,7	5,4	207,7	5,8	218,9	6,2	219,25	6,09	223,71	6,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	113,7	3,4	118,3	3,3	126,6	3,6	134,12	3,73	132,2	3,59
Real Estate	113,4	3,4	120,1	3,4	123,4	3,5	120,02	3,33	124,3	3,37
Jasa Perusahaan	1,8	0,1	1,8	0,1	1,7	0	1,74	0,05	1,81	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	384,8	11,4	395,5	11,1	370,3	10,5	369,77	10,27	378,1	10,26
Jasa Pendidikan	324,4	9,6	339,8	9,5	320,5	9,1	315,12	8,76	324,44	8,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,2	1,5	51,7	1,4	53,4	1,5	53,36	1,48	55,57	1,51
Jasa lainnya	114,3	3,4	120,4	3,4	116,3	3,3	120,67	3,35	128,74	3,34
Total	3.373,4	100	3.576,1	100	3.526,8	100	3.598,98	100	3.685,15	100

Sumber Data : BPS Kab. Majene, 2023

**Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHK)
2010 Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2018–2022**

Lapangan Usaha	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.680,10	36,4	1.827,30	36,7	1.894,70	37,9	1.963,8	37,74	2.124,6	38,4
Pertambangan dan Penggalan	123,7	2,7	133,1	2,7	128,2	2,6	137,21	2,64	145,3	2,62
Industri Pengolahan	234,1	5,1	251,8	5,1	261,5	5,2	288,8	5,55	310,02	5,6
Pengadaan Listrik dan Gas	3,1	0,1	3,2	0,1	3,4	0,1	3,27	0,06	3,79	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,2	0,1	5,3	0,1	5,4	0,1	5,38	0,1	5,5	0,1
Konstruksi	327,5	7,1	353,4	7,1	313,3	6,3	357,62	6,87	365,69	6,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	517,1	11,2	548,5	11	547	11	579,27	11,13	617,2	11,16



Lapangan Usaha	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Transportasi dan Pergudangan	75,3	1,6	79,1	1,6	76	1,5	78,85	1,52	91,8	1,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,8	0,3	14,5	0,3	13,8	0,3	14,72	0,28	16,34	0,3
Informasi dan Komunikasi	229,4	5	260,2	5,2	274,3	5,5	274,77	5,28	280,77	5,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	160,9	3,5	169,9	3,4	182	3,6	203,6	3,91	218,43	3,95
Real Estate	152,8	3,3	162,1	3,3	167,2	3,3	163,44	3,14	173,96	3,1
Jasa Perusahaan	2,1	0	2,2	0	2,1	0	2,14	0,04	2,29	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	473,5	10,3	504,6	10,1	485,6	9,7	482,37	9,27	496,12	8,97
Jasa Pendidikan	413,1	9	449,5	9	429,6	8,6	432,14	8,3	445,71	8,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,6	1,4	64,6	1,3	67,3	1,3	67,45	1,3	70,97	1,3
Jasa lainnya	138,2	3	145,6	2,9	142,1	2,8	149,17	2,87	163,24	2,95
Total	4.612,70	100	4.974,90	100	4.993,50	100	5.204,02	100	5.531,7	100

Sumber Data : BPS Kab. Majene, 2023

Berdasarkan data tabel di atas, terkait perkembangan 17 sektor PDRB Kabupaten Majene dalam periode 2018 – 2022 baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Majene dominan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan dominasi lebih dari sepertiganya dan juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan kedua dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene meskipun setiap Tahunnya hanya memberikan kontribusi rata-rata 11,16% pada PDRB atas dasar harga berlaku dan 9,50% pada PDRB atas dasar harga konstan.

2.1.3. Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi dihitung pada 98 kota pada 38 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan Nilai Inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS yaitu Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat

penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu bahan makanan: makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, perumahan: air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

a. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender

Inflasi Tahun Kalender adalah perbandingan IHK bulan n Tahun y dibanding bulan Desember Tahun y-1. Laju inflasi secara umum pada Tahun 2022 adalah 4,85 persen. Apabila ditinjau dari kelompok transportasi merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 20,44 persen. Sementara itu, laju inflasi pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mencapai 11,17 persen. Pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Tahun 2022 mencapai 8,13 persen. Dari seluruh kelompok pengeluaran, Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi diangka -1,29 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Tingkat Inflasi Umum Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022

No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022
	Inflasi Umum	4,85
	Menurut Kelompok Pengeluaran	
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,94
2.	Pakaian dan Alas Kaki	2,65
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,84
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	11,17
5.	Kesehatan	3,49
6.	Transportasi	20,44
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,29
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,69
9.	Pendidikan	0,62
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	4,86
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,13

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

b. Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (Year to Year)

Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n Tahun y dibanding bulan n Tahun y-1. Selama kurun waktu Tahun 2015-2022 inflasi tertinggi tercatat di Tahun 2015 yakni sebesar 5,07 persen dan pada Tahun 2016 laju inflasi dapat ditekan, namun kembali meningkat pada Tahun 2017, kemudian stagnan di Tahun 2018-2020 dan kembali meningkat di Tahun 2021 yakni sebesar 4,39 persen kemudian meningkat lagi di Tahun 2022 yakni sebesar 4,85 persen. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari Tahun 2015 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik 2. 3 Tingkat Inflasi Regional Tahun 2015-2022

Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2023

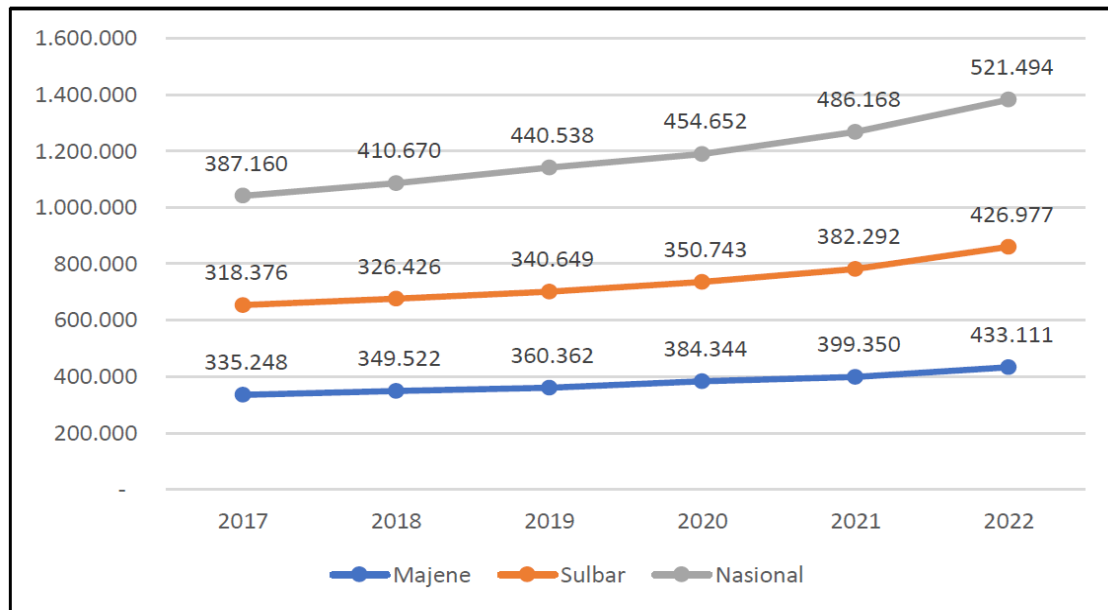
2.1.4. Perkembangan Perspektif Kemiskinan Kabupaten Majene

Dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu dapat dilihat dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan tren tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2017 – 2022. Paparan kemiskinan ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2.100 kilokalori perkapita perhari). Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

2.1.4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Majene

Garis Kemiskinan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan dan 51 komoditi non-makanan (47 komoditi di desa) yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan kilokalori perkapita perhari. Dengan kata lain, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai pengeluaran minimum yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Besaran garis kemiskinan menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak. Untuk lebih jelasnya terkait Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene terhadap Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Grafik 2. 4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene, Periode 2017– 2022

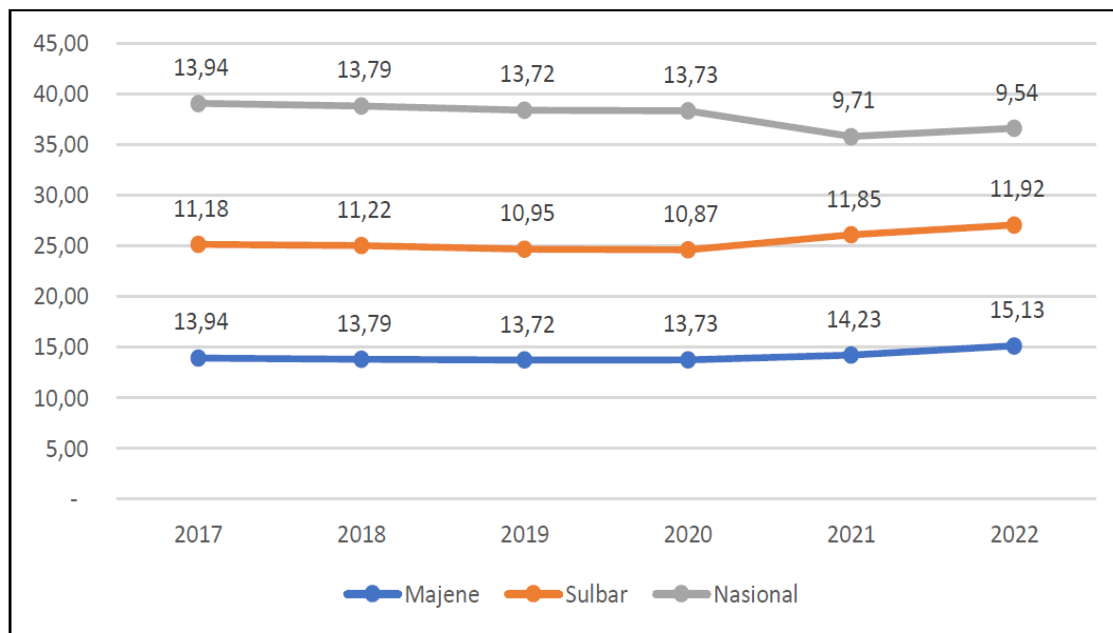
Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan garis kemiskinan di Kab. Majene meningkat setiap Tahunnya seiring dengan Prov. Sulbar. Peningkatan ini tidak lepas dari inflasi yang terjadi rutin tiap Tahunnya. Adapun besaran garis kemiskinan Kab. Majene di Tahun 2022 sebesar 433.111 rupiah/kapita/bulan masih berada di atas garis kemiskinan Prov. Sulawesi Barat sebesar 426.977 rupiah/kapita/bulan (meski masih berada di bawah garis kemiskinan nasional yang mencapai 521.494 rupiah/kapita/bulan) dapat disimpulkan bahwa garis kemiskinan di Kab. Majene masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi dan memerlukan langkah strategis pemerintah dan swasta dalam menjaga kestabilan harga di tengah pergerakan inflasi rutin Tahunan.

2.1.4.2. Persentase Penduduk Miskin

Selama periode 2017 – 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami fluktuatif penurunan dan peningkatan, kondisi tersebut setiap Tahunnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan skala Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami peningkatan dari Tahun 2017 dengan angka 13,94 persen hingga Tahun 2022 dengan angka 15,13 persen.. Dalam kurun waktu Tahun 2017-2022, persentase penduduk miskin tertinggi adalah pada Tahun 2022 sebesar 15,13 persen, sedangkan persentase penduduk miskin terkecil berada pada Tahun 2019 sebesar 13,72 persen.

Dari grafik di bawah terlihat bahwa Kab. Majene menunjukkan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari Tahun 2019-2022 dari angka 13,72 di Tahun 2019 hingga 15,13 pada Tahun 2022, Hal tersebut menjadi catatan pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan program pembangunan yang berprinsip keberpihakan dengan harapan persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene dapat ditekan.



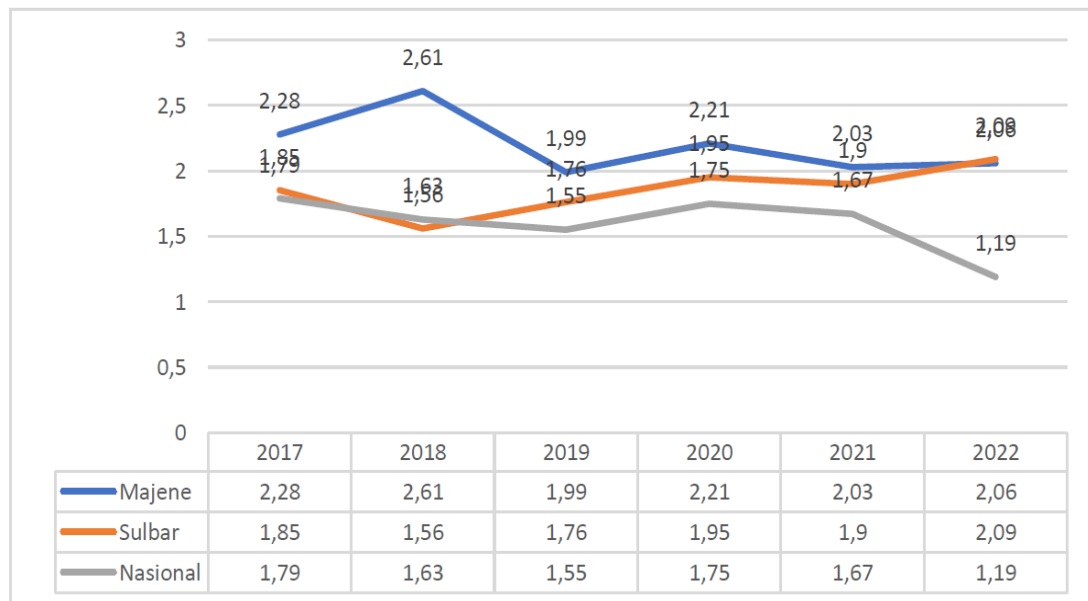
Grafik 2. 5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene dan Provinsi Sulbar Periode 2017-2022

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2023

2.1.4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Persoalan kemiskinan bukan hanya mengacu pada jumlah dan persentase penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan Tingkat keparahan kemiskinan merupakan dimensi lain yang ikut menjadi parameter kemiskinan suatu wilayah. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Majene dibandingkan dengan kabupaten lain dalam provinsi dan perbandingannya dengan capaian provinsi dan nasional.



Grafik 2. 6 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kab. Majene dan Prov. Sulbar Periode 2017 – 2022

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat, 2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2017 – 2022 terjadi fluktuasi pada indeks kedalaman kemiskinan, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan.

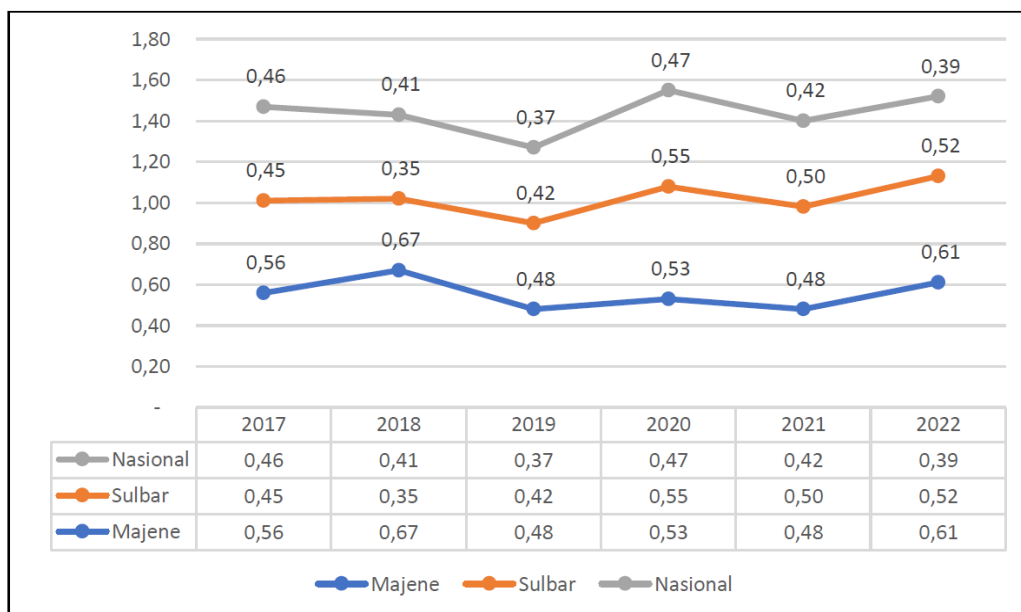
Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Majene Tahun 2017-2022 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,03 dibanding Tahun 2021, ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Majene semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Secara nasional, indeks kedalaman kemiskinan stabil di angka 0,48 poin sementara di Kab. Majene menurun sebesar 0,03 poin, lebih rendah dibanding kenaikan skala provinsi yang juga mengalami kenaikan sebesar 0,19 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga komoditi di Kab. Majene masih sangat rentan terhadap instabilitas perekonomian. Oleh sebab itu, kebijakan pemerataan pembangunan menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar kesenjangan antar warga miskin tidak semakin melebar.

2.1.4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene

Indeks keparahan kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) selama Tahun 2019 – 2020 cenderung naik, pada Tahun 2021 mengalami penurunan setelah Pemerintah menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sejalan dengan persentase penduduk miskin Kabupaten Majene. Salah satu faktor penyebab angka keparahan kemiskinan naik disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru negara tak terkecuali Indonesia, Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020 sebesar 0,53 poin atau naik 0,05 dibanding Tahun 2019 dan kembali turun pada Tahun 2021 diangka 0,48 poin, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin masih tinggi dan Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,61. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2. 7 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat, 2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2017 – 2022 terjadi fluktuasi pada indeks keparahan kemiskinan, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Majene menghadapi kondisi yang lebih pelik dari rata-rata penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh sebab itu, kebijakan bantuan dan jaminan sosial tepat sasaran menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar warga miskin di Kabupaten Majene tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan yang akan semakin mempersulit perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam pengentasan kemiskinan.

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi

memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Majene, pada Tahun 2022 terdapat 84.464 orang penduduk Majene yang masuk kategori angkatan kerja, 1.890 orang diantaranya merupakan pengangguran, angka pengangguran ini menurun jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2021 sebesar 2,19 persen. Selengkapnya data terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Majene pada Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 – 2022 di Kabupaten Majene

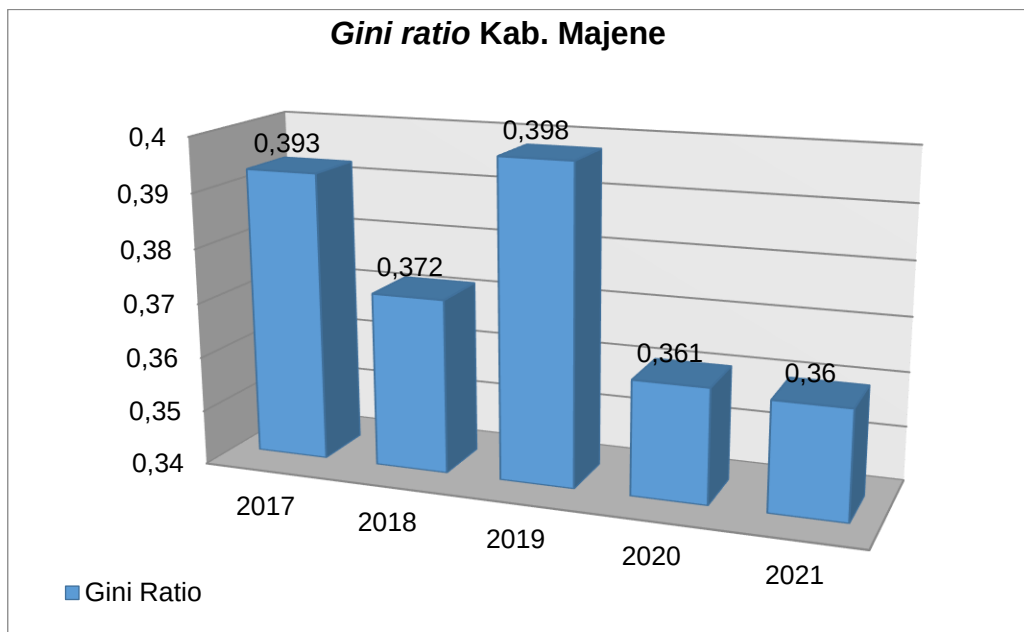
Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,73	4,35	4,25	2,85	2,19
Angkatan Kerja	Orang	82,37	80,064	84.085	81.802	86.354
- Bekerja	Orang	79.400	76.766	80.506	79.474	84
- Pengangguran	Orang	2.960	3.298	3.579	2.328	1.890
Bukan Angkatan Kerja	Orang	33.820	39.157	39.329	43.371	40.536
- Sekolah	Orang	10.650	10.943	11.008	11.188	8.360
- Mengurus Rumah Tangga	Orang	17,86	23.034	23.337	27.000	26.238
- Lainnya	Orang	5.280	5.180	4.984	5.183	5.938

Sumber : BPS Kabupaten Majene 2023

2.1.6. Indeks Gini (*Gene Ratio*)

Indeks gini atau *Gene Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

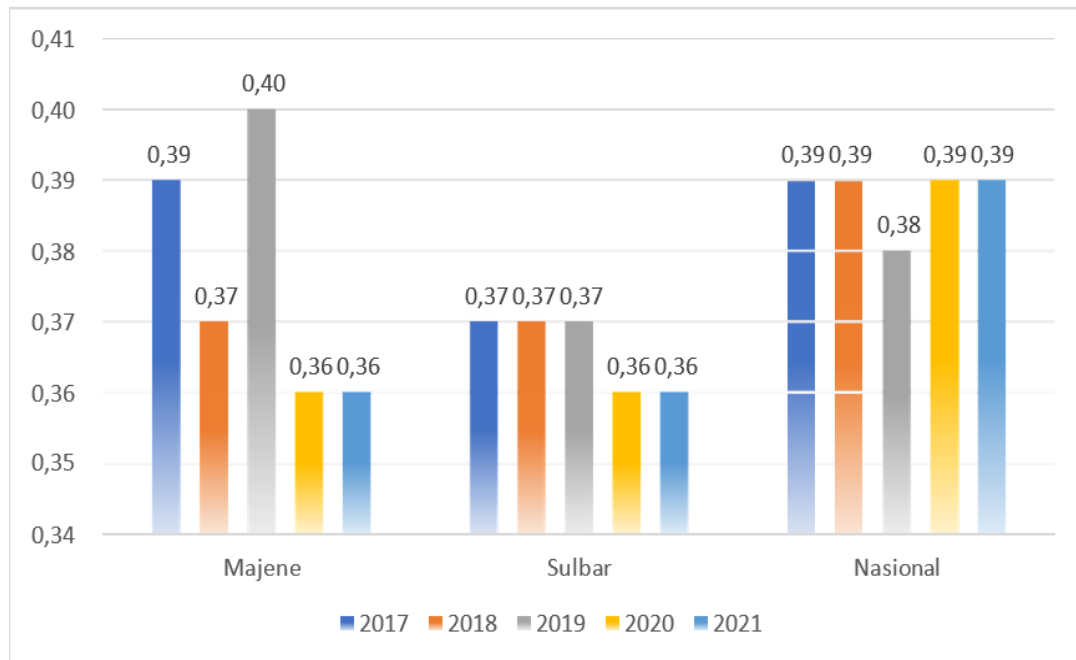


Grafik 2. 8 Index Gini (*Gene Ratio*) Kabupaten Majene Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kab. Majene

Gene Ratio adalah alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata. Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah. Selama periode 2016-2020, *Gene Ratio* Kabupaten Majene mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari Tahun ke Tahun. Pada kurun 2017-2018 *Gene Ratio* Kabupaten Majene mengalami penurunan dari sebesar 0,393 turun menjadi 0,372 pada Tahun 2018. Kemudian ketimpangan tertinggi tercatat pada Tahun 2019 dimana mengalami peningkatan sebesar 0,026 menjadi 0,398. Kemudian pada Tahun 2020 menurun tajam menjadi sebesar 0,361, dan pada Tahun 2021 sebesar 0,360. Berdasarkan pengelompokan, maka dapat dikatakan bahwa *Gene Ratio* Kabupaten Majene termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang. Berdasarkan data statistik lingkup regional, *Gene Ratio* Kabupaten Majene tidak jauh berbeda dengan *Gene Ratio* Sulawesi Barat dimana pada Tahun 2021 berada pada nilai 0,360 yang tidak mengalami perubahan dari Tahun 2020 dan juga termasuk dalam kategori ketidakmerataan sedang. Angka *Gene Ratio* keduanya masih lebih rendah dibanding angka *Gene Ratio* nasional dimana pada Tahun 2021 *Gene Ratio* Indonesia adalah 0,390 yang sebelumnya pada Tahun 2020 sebesar 0,390.

Gene Ratio Kabupaten Majene mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari 0,38 pada Tahun 2016 dan turun 0,02 poin menjadi 0,36 pada Tahun 2021. Fluktuasi yang sama terjadi pada skala provinsi dan nasional dimana per Tahun 2021, Provinsi mencapai 0,35 dan pada skala nasional mencapai 0,38. Fluktuasi ini umumnya disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menurunkan ketimpangan perekonomian masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Adapun perbandingan Indeks Gini/Koefisien Gini Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:



Grafik 2. 9 Perbandingan Indeks Gini/Koefisien Gini antara Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Di Provinsi Sulawesi Barat dalam periode Tahun 2017-2022 Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan angka pencapaian nilai IPM lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat setiap Tahunnya, Sedangkan Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar juga menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya namun dengan nilai IPM yang masih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Barat. Untuk jelasnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

Tahun	Uraian	Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasang-kayu	Mamuju Tengah	Sulawesi Barat
2017	IPM	65,40	62,35	63,92	66,32	65,67	63,64	64,30
	Peringkat	3,00	6,00	4,00	1,00	2,00	5,00	
2018	IPM	66,01	63,14	64,66	67,11	66,60	64,43	65,10
	Peringkat	3,00	6,00	4,00	1,00	2,00	5,00	
2019	IPM	66,59	63,74	65,32	67,72	67,27	65,10	65,73
	Peringkat	3,00	6,00	4,00	1,00	2,00	5,00	
2020	IPM	66,91	63,84	66,02	68,15	67,79	65,71	66,11
	Peringkat	3,00	6,00	4,00	1,00	2,00	5,00	
2021	IPM	67,29	64,32	66,63	68,32	68,03	66,18	66,36
	Peringkat	3,00	6,00	4,00	1,00	2,00	5,00	
2022	IPM	67,84	64,79	67,21	68,88	68,61	66,89	66,92
	Peringkat	3,00	6,00	4,00	1,00	2,00	5,00	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Data tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 Kabupaten Majene masih berada pada peringkat ke 3 (tiga) dengan nilai IPM yaitu sebesar 67,84 dan lebih besar dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 66,92 atau lebih besar 0,92.

IPM Kabupaten Majene pada Tahun 2022 meningkat sebesar 0,55 poin dari Tahun 2021. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk yang tercermin dalam bentuk kontribusi komponen utama IPM yang meliputi: Indikator Kesehatan dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); Indikator pengetahuan penduduk diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta Indikator Ekonomi melalui indikator Pengeluaran per Kapita. Pada Tahun 2022 dengan indikator pembentuk IPM yang berbeda menempatkan Kabupaten Majene pada posisi ketiga di Sulawesi Barat. Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Majene serta ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu lima Tahun pada periode 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Perkembangan IPM dan Faktor Pendukung IPM Kabupaten Majene Tahun 2017-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Harapan lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
2017	65,4	60,79	13,57	8,14	9.559,00
2018	66,01	61,05	13,58	8,25	9.904,00
2019	66,59	61,3	13,6	8,25	10.063,00



Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Harapan lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
2020	66,91	61,56	13,61	8,65	10.056,00
2021	67,29	61,77	13,62	8,91	10.028,00
2022	67,84	62,16	13,63	9,1	10.152,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Majene berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Arah kebijakan keuangan Tahun 2023 juga memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat, Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
3. Disiplin anggaran, Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan

dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD; dan

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
4. Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus memperhatikan:
 - a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; dan
 - b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
5. Taat Asas, APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda di dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya.

2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah.

Sampai saat ini sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Majene masih sangat bertumpu pada dana transferan dari pusat, karena pendapatan asli daerah sendiri belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Majene pada Tahun 2015 – 2018 mulai menunjukkan adanya peningkatan setiap Tahunnya, namun pada Tahun 2019 dan 2022 ternyata mengalami penurunan. Untuk meningkatkan kembali pendapatan asli daerah tersebut diperlukan usaha yang lebih keras lagi dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya penerimaan pendapatan asli daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu Tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 ini terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;



2. Pendapatan Transfer, yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa dana hibah.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat realisasi dari target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 yang sampai dengan semester I baru mencapai sekitar 27%, maka untuk target perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap diasumsikan sama dengan target pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 ;
2. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi;
3. Pendapatan transfer juga diasumsikan sama dengan target pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2023, di samping itu tetap melakukan koordinasi dengan Provinsi dalam hal penerimaan pendapatan bantuan keuangan;
4. Tambahan penerimaan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa Pendapatan Hibah Program Hibah Air Limbah Setempat (ALS) APBN TA. 2023 dan Pendapatan Hibah Program Hibah Air Minum Perdesaan APBN TA. 2023; dan
5. Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional dan kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah serta kebijakan harga BBM.

Agar target pendapatan yang direncanakan dapat tercapai, maka kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan melalui :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;
3. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya;
4. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak;
5. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan



oleh Daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah;

6. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah;
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki;
8. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
9. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; dan
10. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah secara menyeluruh dalam rangka pemulihan perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 untuk Tahun 2023.

Realisasi pendapatan daerah dalam dua Tahun sebelumnya, proyeksi/target Tahun berkenaan serta Tahun berikutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 9 Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 s.d. Tahun 2024

Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2023 (Perubahan)	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.125.586.865,16	70.563.315.736,67	140.838.163.462,00	140.838.163.462,00	96.612.922.240,00
Pajak Daerah	8.890.315.383,50	9.461.193.553,39	15.634.764.909,00	15.634.764.909,00	16.330.608.242,00
Retribusi Daerah	4.805.382.493,00	5.803.175.060,00	6.295.728.500,00	6.295.728.500,00	7.531.489.700,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.895.153.594,00	3.333.308.081,00	3.333.308.081,00	3.333.308.081,00	3.839.951.727,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	68.534.735.394,66	51.965.639.042,28	115.574.361.972,00	115.574.361.972,00	68.910.872.571,00
PENDAPATAN TRANSFER	776.740.189.291,00	761.573.409.624,00	791.537.242.000,00	793.858.194.000,00	961.813.515.414,85
Transfer Pemerintah Pusat	754.167.009.321,00	737.695.311.296,00	766.527.242.000,00	768.848.194.000,00	935.617.379.414,85
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	12.938.722.775,00	10.784.967.445,00	5.159.841.000,00	5.159.841.000,00	6.515.796.440,00
Dana Alokasi Umum	486.320.121.000,00	485.848.952.931,00	503.503.051.000,00	503.503.051.000,00	531.210.361.474,85
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.122.017.373,00	74.119.888.581,00	80.134.213.000,00	80.134.213.000,00	178.000.000.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	95.084.108.573,00	109.054.956.339,00	123.544.010.000,00	124.235.810.000,00	150.000.000.000,00



Uraian	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2023 (Perubahan)	Proyeksi/Target pada Tahun 2024
Dana Insentif Daerah	24.920.508.000,00	2.301.731.000,00			
Dana Desa	65.781.531.600,00	55.584.815.000,00	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	69.891.221.500,00
Transfer Antar Daerah	22.573.179.970,00	23.878.098.328,00	25.010.000.000,00	25.010.000.000,00	26.196.136.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya ***)	20.923.179.970,00	23.814.548.328,00	25.010.000.000,00	25.010.000.000,00	26.196.136.000,00
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.650.000.000,00	63.550.000,00			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	48.827.690.000,00	1.227.000.000,00	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	23.189.453.125,00
Hibah	20.598.000.000,00	1.227.000.000,00	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	23.189.453.125,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	28.229.690.000,00				
JUMLAH	910.693.466.156,16	833.363.725.360,67	934.535.405.462,00	936.856.357.462,00	1.081.615.890.779,85

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah tersebut di atas diperlukan juga strategi pencapaiannya, yang antara lain sebagai berikut.

2. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru;
 - c. Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - d. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 - f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan; dan
 - h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan

pendapatan asli daerah;

3. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - b. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
4. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait.

2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Belanja daerah yang dimaksud adalah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi belanja berdasarkan peraturan pemerintah tersebut terdiri atas :

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Perencanaan belanja daerah Kabupaten Majene dalam Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan realisasi Tahun 2021, 2022 dan 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perubahan anggaran belanja Tahun 2023 antara lain :

1. Pengalokasian anggaran belanja pegawai dalam APBD Pokok 2023 mengalami perubahan asumsi dari perhitungan di awal tahun, sehingga perlu dilakukan pergeseran dan perubahan anggaran;



2. Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, maka pada tahap parsial telah dilakukan penyesuaian belanja daerah untuk memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (*Specific Grant*);
3. Dengan adanya Program Hibah Air Limbah Setempat (ALS) APBN TA. 2023 dan Hibah Program Hibah Air Minum Perdesaan APBN TA. 2023 maka dilakukan penyesuaian pada anggaran belanja barang dan jasa;
4. Penyesuaian belanja akibat adanya pergeseran antar jenis belanja yang direncanakan oleh perangkat daerah; dan
5. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

Selanjutnya dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023 yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2023 yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, maka kebijakan perubahan belanja daerah Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran *mandatory* sesuai perundang-undangan;
2. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
3. Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah;
4. Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan;
5. Mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene;
6. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
7. Berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah;
8. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa; dan



10. Belanja tak terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam dan sosial dan juga pandemi penyakit atau virus.

Realisasi belanja daerah dalam dua Tahun sebelumnya, proyeksi/target Tahun berkenaan serta Tahun berikutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 10 Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2024

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2023 (Perubahan)	Proyeksi Tahun 2024
BELANJA OPERASI	674.939.481.057,13	663.261.505.807,25	719.167.516.626,00	714.400.509.062,00	807.271.177.432,72
Belanja Pegawai	393.510.740.305,13	406.980.998.990,00	449.101.271.369,00	394.860.574.252,00	467.356.753.620,00
Belanja Barang dan Jasa	272.760.997.893,00	218.629.512.958,25	258.569.834.151,00	299.375.441.504,00	291.316.830.506,72
Belanja Bunga	0,00	-			
Belanja Hibah	8.610.142.859,00	36.875.447.859,00	11.438.811.106,00	20.106.893.306,00	48.532.793.306,00
Belanja Bantuan Sosial	57.600.000,00	775.546.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	64.800.000,00
BELANJA MODAL	83.749.169.412,51	89.753.902.940,00	116.127.586.618,00	111.779.037.732,00	157.694.788.318,13
Belanja Modal Tanah	3.266.125.680,00	1.025.276.300,00	2.375.000.000,00	1.492.602.100,00	15.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.664.035.246,51	13.710.223.053,00	20.210.349.846,00	20.384.585.750,00	27.537.763.146,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.616.225.428,00	19.183.777.725,00	51.777.622.772,00	55.835.684.882,00	36.544.268.232,85
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.692.258.958,00	55.784.625.862,00	41.089.214.000,00	33.835.835.000,00	77.921.296.939,23
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	510.524.100,00	50.000.000,00	335.000.000,00	230.330.000,00	660.724.100,00
Belanja Modal Aset Lainnya			340.400.000,00		30.735.900,00
BELANJA TAK TERDUGA	3.329.446.706,00	2.633.036.163,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	3.329.446.706,00	2.633.036.163,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	115.883.420.087,00	102.225.932.872,00	95.090.302.218,00	114.632.242.203,00	107.659.925.029,00
Belanja Bagi Hasil	714.816.787,00	1.237.099.872,00	2.607.508.829,00	3.823.863.203,00	2.607.508.829,00
Belanja Bantuan Keuangan	115.168.603.300,00	100.988.833.000,00	92.482.793.389,00	110.808.379.000,00	105.052.416.200,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	877.901.517.262,64	857.874.377.782,25	932.385.405.462,00	942.811.788.997,00	1.074.625.890.779,85
SURPLUS / DEFISIT	32.791.975.893,52	(24.510.652.421,58)	2.150.000.000,00	(5.955.431.535,00)	6.990.000.000,00

2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat



digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua Tahun sebelumnya, proyeksi/target Tahun berkenaan serta Tahun berikutnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 11 Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2024

URAIAN	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2023 (Perubahan)	Proyeksi pada Tahun 2024
Penerimaan Pembiayaan Daerah	7.689.544.823,42	37.256.712.081,94	10.000.000,00	8.115.431.535,00	10.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.689.544.823,42	37.256.712.081,94	0,00	8.105.431.535,00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0.00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.119.000.000,00	4.620.000.000,00	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	7.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	3.119.000.000,00	4.620.000.000,00	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	7.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	4.570.544.823,42	32.636.712.081,94	(2.150.000.000,00)	5.955.431.535,00	(6.990.000.000,00)

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Majene yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun Visinya adalah Majene **Unggul, Mandiri, Religius**. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Majene Unggul: Bermakna bahwa Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.



Majene Mandiri: Bermakna bahwa Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.

Majene Religius: Bermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman”.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman”.

Dalam rangka merealisasikan Visi Pembangunan tersebut, terdapat 4 (empat) Misi Pembangunan yang dicanangkan yakni:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang Unggul dan Kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel;
3. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan
4. Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene dan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 12 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2023

Visi: Majene Unggul, Mandiri, Religius

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.			Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan



No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	Mewujudkan Sumber daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Meningkatkan taraf hidup Masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kesehatan
			Terwujudnya pembangunan daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak
			Meningkatkan standar hidup masyarakat yang merata hingga pedesaan
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bermutu dan berbasis Teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah
			Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah
			Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor
3.	Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat
			Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup
4.	Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis	Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat	Meningkatkan kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara

Prioritas Daerah Kabupaten Majene dalam RKPD Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi. Sehingga perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi agar terjadi sinergitas dan berkesinambungan dari Pusat ke Kabupaten sehingga tercapai Indonesia Maju.

Isu Strategis pembangunan daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 yang telah disusun dan diselaraskan dengan isu strategis pembangunan secara Nasional maupun Regional Sulawesi Barat. sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Standar Kualitas Hidup Masyarakat;
2. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; dan
3. Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 ini masih mempertimbangkan dampak terjadinya pandemi Covid-19 dan Agenda Pemulihan Ekonomi. Proses intervensi secara spesifik melalui program vaksinasi serta upaya penegakan protokol kesehatan terus dilakukan sampai akhir Tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang cukup berhasil menurunkan grafik kasus Covid-19. Akan tetapi upaya penanggulangan dampak yang ditimbulkan diperkirakan baru akan terselesaikan efektif 1-2

Tahun pasca pandemi, oleh karena itu pembangunan Kabupaten Majene pada Tahun 2023 akan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi dampak Pandemi Covid-19
Upaya Pemulihan ekonomi melalui penguatan inovasi produk barang/jasa dan nilai tambah Industri Kreatif khususnya IKM dan UMKM sebagai penggerak pemulihan ekonomi lokal akan menjadi prioritas pada Tahun 2023 mendatang. Sejalan dengan Tema pembangunan yang telah ditetapkan bahwa akan dilaksanakan upaya akseleratif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi utamanya pada sektor riil, penguatan industri kecil menengah dan revitalisasi objek-objek ekonomi. Penguatan ekonomi rakyat sebagai kunci utama dalam pemulihan ekonomi lokal. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi didorong dengan dukungan regulasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
2. Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Penguatan standarisasi pelayanan yang menjadi kewajiban Pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan layanan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Sosial dan Ketenteraman dan ketertiban Masyarakat yang telah diatur secara teknis melalui penetapan regulasi dari setiap Kementerian. Fokus pemerintah Kabupaten Majene terhadap penguatan SPM ini tergambar dari masih rendahnya capaian standarisasi pelayanan yang telah dilakukan pada Tahun sebelumnya sesuai dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Modernisasi Tata kelola Pemerintahan
Keterjangkauan dan kemudahan akses layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan keinginan masyarakat secara menyeluruh. Maka untuk mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses dan berkualitas dibutuhkan pemerintahan yang inovatif serta akuntabel. Dalam hal merespons persoalan tersebut, maka upaya modernisasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik akan lebih dioptimalkan. Kemudian secara simultan akan dilakukan upaya penguatan implementasi dan internalisasi reformasi birokrasi yang telah berjalan berdasarkan *roadmap* dan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah disusun sebagai rujukan teknis dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Pengembangan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan wajib masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi salah satu hal yang vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah baik dari perspektif ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterbukaan akses melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur diharapkan dapat membuka jalur perekonomian sehingga dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat pelaku ekonomi. Pembangunan infrastruktur wajib memperhatikan kualitas dengan mengedepankan asas manfaat dan menyesuaikan terhadap analisis dampak lingkungan sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta tetap mempertimbangkan daya dukung lahan, kualitas lingkungan hidup dan kerentanan bencana. Perencanaan dan pembangunan yang komprehensif diharapkan dapat mencegah bencana alam maupun bencana non alam.

Hasil identifikasi dan telaah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 menjadi

acuan dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD Tahun 2023. Adapun Tema pembangunan daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 adalah Akselerasi Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Ekonomi Kerakyatan menuju Majene Unggul dan Mandiri. Adapun prioritas pembangunan pada Tahun 2023 diarahkan kepada:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi lokal

Penguatan ekonomi rakyat sebagai kunci utama dalam pemulihan lokal. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi didorong dengan dukungan regulasi yang lebih inklusif dari Pemerintah Kabupaten Majene. Adapun langkah strategis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan IKM dan UMKM;
- b. Mengoptimalkan fasilitas bantuan pelaku usaha IKM dan UMKM serta perintis usaha ekonomi kreatif;
- c. Optimalisasi penerapan digitalisasi pemasaran produk IKM dan UMKM; dan
- d. Penguatan kegiatan promosi destinasi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

2. Pengendalian Harga-harga Kebutuhan Pokok

Pemenuhan Kebutuhan Primer masyarakat Kabupaten Majene menjadi salah satu prioritas utama yang wajib diperhatikan. Ketersediaan bahan pangan menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan sehingga dibutuhkan intervensi Pemerintah daerah melalui kebijakan khusus secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kemudian akan berimplikasi kepada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Adapun langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:

- a. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor Perangkat daerah dan *stakeholders* terkait dalam kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
- b. Penguatan analisis dan identifikasi terhadap kondisi rawan pangan daerah; dan
- c. Penguatan kebijakan *monitoring*, pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan daerah

3. Peningkatan Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan

sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor yang cukup dominan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Majene. Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat terfokus pada sektor ekonomi primer seperti sektor pertanian dan kelautan perikanan. Hal tersebut kemudian ditunjang dengan kondisi dan karakteristik geografis wilayah Kabupaten Majene yang sangat potensial terhadap hasil produksi pertanian dan perikanan. Upaya dan langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan yakni sebagai berikut:

- a. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
- b. Peningkatan produktivitas perikanan dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing;

4. Pengembangan Agribisnis, Agroteknologi dan Agromarine

Pengembangan agribisnis, agroteknologi dan *agromarine* dalam rangka meningkatkan hasil produksi komoditas unggulan merupakan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Perkembangan zaman yang semakin maju, transisi digitalisasi yang sangat akseleratif sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tak terkecuali aktivitas ekonomi pertanian. Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan dalam menyediakan data dan akan sangat membantu dalam upaya peningkatan kapasitas dan nilai tambah hasil produksi. Upaya langkah strategis yang akan dilakukan yakni sebagai berikut:

- a. Penyusunan konsep pengembangan kawasan berbasis data spasial akurat; dan
- b. Penguatan integrasi teknologi dalam mengembangkan kawasan industri pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan.

5. Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM serta memudahkan akses lapangan kerja

Peningkatan Kualitas dan daya saing SDM akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Aspek layanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar dan utama masyarakat khususnya di Kabupaten Majene adalah bagaimana kemudahan aksesibilitas dan optimalisasi layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu pembukaan akses lapangan pekerjaan secara bertahap akan tetap menjadi prioritas baik itu melalui penguatan iklim investasi maupun dengan pendampingan secara intensif terhadap generasi produktif untuk lebih meningkatkan daya saing, kreativitas dan inovasinya untuk membuka opsi-opsi lapangan pekerjaan. adapun langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:

- a. Meningkatkan Kualitas pendidikan dalam konteks manajemen, tata kelola, dan aksesibilitas Pendidikan;
- b. Menjamin Proses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi dengan mengedepankan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
- c. Meningkatkan Upaya dalam pengendalian fertilitas dan mortalitas serta stimulasi gizi terhadap calon/Ibu Hamil dan Anak yang rentan gizi kronis dan Stunting;
- d. Menjamin Perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- e. Penguatan kreativitas dan daya saing pemuda dalam rangka memasuki lapangan pekerjaan.

6. Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Pembangunan suatu daerah akan tercermin dari kualitas infrastrukturnya. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur akan tetap menjadi salah satu prioritas utama. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan wajib masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi salah satu hal yang vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah baik dari perspektif ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Adapun langkah strategis yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pelosok; dan
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang distribusi ekonomi.

7. Peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kualitas perumahan dan kawasan pemukiman merupakan hal yang sangat vital dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Sarana dan prasarana utilitas perumahan, pemenuhan akses sanitasi layak, air bersih dan air minum merupakan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Adapun langkah strategisnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas perumahan yang bebas kumuh;
- Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak masyarakat; dan
- Meningkatkan akses air bersih dan air minum layak masyarakat

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Target 2023
1.	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	69
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	65 (B)
3.	Pendapatan Per kapita	Rp28,62 Juta
4.	Indeks Kesalihan Sosial	70%
5.	Rata-rata Lama Sekolah	9,21 Tahun
6.	Harapan Lama Sekolah	14,26 Tahun
7.	Angka Harapan Hidup	62,23 Tahun
8.	Prevalensi Stunting	0
9.	Gender Indeks Pembangunan	95,1
10.	Indeks Perlindungan Anak	70,5
11.	Persentase Penduduk Miskin	12,00%
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70%
13.	<i>Gene Ratio</i>	0,336
14.	Poin Predikat SAKIP	BB
15.	Opini BPK	WTP
16.	Nilai LPPD	3,57
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 (Baik)
18.	Tingkat maturitas SPBE	3,0 (Baik)
19.	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	70%
20.	Pertumbuhan Ekonomi	6,25%
21.	Laju Inflasi (YoY)	2,09
22.	Indeks Infrastruktur Wilayah	73,20%
23.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,41%
24.	Angka Kriminalitas	227



Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap Tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*), terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	68.53
2	Indeks Reformasi Birokrasi	65 (B)
3	Pendapatan Per kapita	Rp28,62 Juta
4	Indeks Kesalihan Sosial	70%
5	Rata-rata Lama Sekolah	9,21 Tahun
6	Harapan Lama Sekolah	14,26 Tahun
7	Angka Harapan Hidup	62,23 Tahun
8	Prevalensi Stunting	23,08%
9	Indeks Pembangunan Gender	95,1
10	Indeks Perlindungan Anak	70,5
11	Persentase Penduduk Miskin	12%
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70%
13	<i>Gene Ratio</i>	0,336
14	Poin Predikat SAKIP	BB
15	Opini BPK	WTP
16	Nilai LPPD	3.57
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 (Baik)
18	Tingkat maturitas SPBE	3 (Baik)
19	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	70%
20	Pertumbuhan Ekonomi	5,5% - 6,25%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
21	Laju Inflasi (YoY)	2,09
22	Indeks Infrastruktur Wilayah	73,20%
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,41%
24	Angka Kriminalitas	227
Aspek Pelayanan Umum		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Angka Partisipasi Kasar SD	104,91%
2.	Angka Partisipasi Kasar SMP	93,35%
3.	Angka Partisipasi Murni SD	98,50%
4.	Angka Partisipasi Murni SMP	97%
5.	Angka Partisipasi Sekolah SD	98,50%
6.	Angka Partisipasi Sekolah SMP	97%
7.	Persentase sarpras sekolah dalam kondisi baik	70%
8.	Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B	80%
9.	Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B	60%
10.	Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%
11.	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikasi	80%
12.	Persentase Izin yang diterbitkan	70%
13.	Persentase Bahasa dan Sastra yang di Kembangkan	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,7
2.	% Fasyankes yang memiliki dokumen manajemen mutu dan keselamatan pasien	36%
3.	Prevalensi Penyakit Menular dan	32,68%
4.	% Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan ASPAK sesuai standar	54,55%
5.	Proporsi anggaran yang dialokasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan	39%
6.	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar	100%
7.	% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT sesuai standar	85%
8.	Persentase Desa/ Kelurahan Sehat	50%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.	Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik	86,62%
2.	Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik	94,35%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	67,85%
4.	Persentase Penduduk berakses air minum (Non Perpipaan)	32,15%
5.	Persentase sarana Persampahan Regional	100%
6.	Persentase Akses Sanitasi	75%
7.	Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik	94,53%
8.	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	100%
9.	Persentase kondisi gedung pemerintah baik	100%
10.	Persentase desa dan Kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung atau prasarana bangunan	100%
11.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	55,33%
12.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	96,50%
13.	Persentase tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	100%
14.	Persentase permohonan IUJK yang terlayani	100%
15.	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR	100%
16.	Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	persentase perbaikan rumah akibat bencana	60%
2.	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	50%
3.	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	60%
4.	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	60%
5.	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang ditangani	60%
6.	Persentase kondisi PSU dalam kondisi baik	80%
7.	Persentase Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	80%
8.	Persentase sertifikat yang di terbitkan	65%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
3.	Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai	65%
4.	Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan	65%
5.	Persentase anggota linmas yang bersertifikasi	65%
6.	Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsivitas dalam Penanganan Bencana	100%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
7.	Persentase Peningkatan responsivitas dalam penanganan kebakaran	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.	Persentase KAT yang ditangani	100%
2.	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%
3.	Persentase PMKS yang tertangani	60%
4.	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	90%
5.	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	93%
6.	Persentase kampung siaga yang terbentuk	25%
7.	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	85%
8.	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga kerja	ada
2.	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	80%
3.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	90%
4.	Persentase penempatan pencari kerja	100%
5.	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.	Persentase Lembaga PUG yang aktif	45%
2.	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	37%
3.	Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender	65%
4.	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%
5.	Persentase Keluarga dan anak yang terlayani	90%
6.	Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	40%
7.	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar	45%
8.	Persentase Pemenuhan Hak Anak	70%
9.	Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	30%
10.	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
1.	Persentase lumbung pangan masyarakat yang aktif	100%
2.	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78,7
3.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	89,06%
4.	Persentase Desa Rawan Pangan	7,32%
5.	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
1.	Persentase pengajuan izin lokasi yang disetujui	60%
2.	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	65%
3.	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	55%
4.	Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat	65%
5.	Persentase pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan	55%
6.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	50%
7.	Ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	50%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1.	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%
2.	Indeks Kualitas Air	58,95%
3.	Indeks Kualitas Udara	84,51%
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,02%
5.	Luas RTH yang tersedia	75%
6.	Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	100%
7.	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	90%
8.	Presentasi Data MHA yang tersedia	25%
9.	Persentase Masyarakat / Komunitas peduli Lingkungan Hidup yang mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	100%
10.	Persentase pelatihan, pendidikan dan penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100%
11.	Klasifikasi Adipura	Kelas IV
12.	Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani	100%
13.	Persentase Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R	22%
14.	Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan	15,85%
15.	Persentase Cakupan area penanganan persampahan	64,20%
16.	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	65,80%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1.	Persentase Kepemilikan KTP	100%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
2.	Persentase Kepemilikan KK	100%
3.	Persentase Kepemilikan KIA	30%
4.	Persentase Kepemilikan Akta	100%
5.	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akta Kelahiran	97%
6.	Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak	100%
7.	Persentase OPD / lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan	35%
8.	Persentase ketersediaan <i>database</i> kependudukan	100%
9.	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1.	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%
2.	Persentase Jumlah Kerja Sama Desa	78,70%
3.	Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%
4.	Persentase desa Berkembang; Mandiri; Maju	20%
5.	Persentase BUMDesa yang aktif	25%
6.	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang dibina	4%
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	70%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1.	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,56
2.	Persentase <i>Contraceptive Prevalance Rate</i> (CPR)	74,11%
3.	Persentase peserta KB aktif MKJP	32%
4.	Persentase Kampung KB	34%
5.	<i>Unmetneed</i>	9,82%
6.	Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB	79%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	79%
2.	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	87%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Persentase PPID yang aktif	100%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	80%
3.	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi	2 SIM
4.	Jumlah layanan yang sudah berbasis digital	1 Layanan



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
5.	Indeks SPBE	3
6.	Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet	90%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
1.	Persentase KSP Yang Difasilitasi Perizinannya	25%
2.	Persentase koperasi yang aktif	21,10%
3.	Persentase KSP/USP Koperasi yang sesuai dengan kriteria penilaian	57,50%
4.	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0,92%
5.	Persentase Pengelola Koperasi yang Bersertifikat	4,88%
6.	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	5,05%
7.	Persentase UMKM yang Diberdayakan	5,43%
8.	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	4,33%
9.	Persentase Usaha Mikro yang Melakukan Kemitraan	0,20%
10.	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	0,16%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1.	Dokumen Pengembangan iklim penanaman modal	2 Dok
2.	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	40%
3.	Jumlah Nilai Investasi	Rp. 140 Milyar
4.	Dokumen Strategi Penanaman Modal	ada
5.	Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)	80
6.	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100%
7.	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	85%
8.	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	45%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1.	Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	1
2.	Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	1
3.	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1.	Persentase Data Statistik Sektorial yang terpenuhi	25%
2.	Persentase OPD yang menyediakan Data Statistik Sektorial	25%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan	40%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
	Layanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1.	Persentase <i>event</i> kesenian skala Nasional/regional yang dilaksanakan	62,50%
2.	Persentase lembaga adat yang di bina	83,33%
3.	Persentase Kelompok Kesenian yang dibina	13%
4.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	63,64%
5.	Persentase Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu	84,21%
6.	Persentase sarana dan prasarana museum dalam kondisi baik	40%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%
2.	Persentase Perpustakaan yang di bina	100%
3.	Persentase kelompok Literasi yang dibina	100%
4.	Persentase Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya	21%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	80%
2.	Persentase Arsip yang didokumentasikan (<i>scan</i>)	15%
3.	Persentase Penggunaan Arsip bersifat tertutup yang dikelola	70%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1.	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	100%
2.	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%
3.	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100%
4.	Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	117.553 Orang
2.	Jumlah Objek Wisata Super prioritas yang dikembangkan	4 Objek
3.	Persentase sarana dan Prasarana di Objek wisata prioritas dalam kondisi baik	70%
4.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,60%
5.	Persentase promosi pariwisata	100%
6.	Persentase ruang berekspresi pelaku ekonomi kreatif yang di bangun	62,50%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
7.	Persentase peserta Pelatihan yang memahami Materi pelatihan	85%
8.	Persentase SDM ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)	60%
9.	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi (Uji Kompetensi)	73,33%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1.	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	5%
2.	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	5%
3.	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	5%
4.	Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	5%
5.	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	75%
6.	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak	100%
7.	Persentase Hama Penyakit yang ditangani	80%
8.	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani	65%
9.	Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti	100%
10.	Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%
11.	Persentase kelembagaan Petani yang di Bina	80%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1.	Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi	77%
2.	Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik	59,09%
3.	Persentase kecukupan <i>stock</i> barang kebutuhan pokok daerah	100%
4.	Persentase Usaha Komoditi Ekspor Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan	40%
5.	Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	100%
6.	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitas pemasaran	20%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1.	Persentase Sentra Industri Aktif	66,67%
2.	Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri	66,67%
3.	Persentase IKM Yang Memiliki Rekomendasi Penerbitan Izin	50%
4.	Persentase IKM Yang Terdaftar di SIINas	50%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi	1 Dokumen
2.	Persentase Transmigrasi Umum	100%
3.	Persentase Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan	100%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH		
1.	Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik	100%
2.	Persentase OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik	80%
3.	Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	90%
4.	Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan	100%
5.	Persentase Fasilitasi layanan Kesra	100%
6.	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100%
7.	Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian	100%
8.	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan	100%
9.	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	100%
10.	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA	100%
SEKRETARIAT DPRD		
1.	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang untuk anggota DPRD	100%
2.	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang di fasilitasi	100%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
PERENCANAAN		
1.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	100%
2.	Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	100%
3.	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya di atas 90%	45%
4.	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya di atas 90%	75%
5.	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya di atas 90%	45%
KEUANGAN		
1.	Opini BPK	WTP
2.	Persentase SiLPA Terhadap APBD	1,40%
3.	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	100%
4.	Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu
5.	Ketepatan waktu pengesahan APBD	Tepat Waktu



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
6.	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	70%
7.	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5,33%
8.	Persentase peningkatan Pendapatan	5,16%
KEPEGAWAIAN		
1.	Persentase data kepegawaian yang <i>up to date</i>	100%
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20%
3.	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	80%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1.	Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi	15%
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural	38%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1.	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%
2.	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	100%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
INSPEKTORAT DAERAH		
1.	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
2.	Persentase catatan/saran hasil revidi dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	100%
3.	Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B	14 OPD
4.	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	6 OPD
UNSUR KEWILAYAHAN		
KECAMATAN		
1.	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	80
2.	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	98%
3.	Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan	54%
4.	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	98%
5.	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu	54%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target 2023
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.	Persentase Konflik Sara yang ditangani	100%
2.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	100%
3.	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Serta Budaya Politik	100%
4.	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%
5.	Persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%
Aspek Daya Saing Daerah		
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp885.000,00
2.	Nilai tukar petani	114,85
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	49,02%
4.	Produktivitas total daerah Berdasarkan PDRB ADBH	60,6
5.	Indeks Desa Membangun (Desa kategori "Maju")	5 Desa
6.	Rasio Ekspor terhadap Impor	0,69
7.	Total Posisi Pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR	1.375.000 Juta Rupiah
8.	Jumlah Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Skala Usaha	444.000 Juta Rupiah
9.	Rasio Ketersediaan Listrik	99,93
10.	Angka kriminalitas yang tertangani	240 Kasus
11.	Rasio ketergantungan	0,52

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan pemerintah daerah selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Untuk itu pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 3);
- o. Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;
- p. Peraturan Bupati Majene Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;
- q. Peraturan Bupati Majene Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023;



- r. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor 44);
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 7);
- t. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 12);
- u. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 16);
- v. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 24);
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 28); dan
- x. Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majene Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2023 Nomor 29).

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penerimaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Majene, yang merupakan salah satu komponen dari PAD sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan yang mengakibatkan masih rendahnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total penerimaan daerah di Kabupaten Majene. Hal ini mengakibatkan masih sangat tergantungnya keuangan daerah kepada dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus mampu meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah.

Upaya yang dilakukan untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang

bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga harus tetap dimaksimalkan agar kemampuan kapasitas fiskal daerah dapat terus meningkat sehingga seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal pula. Upaya intensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan di Kabupaten Majene antara lain:

- a. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b. Peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- c. Sosialisasi dengan memberikan penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi agar mereka sadar bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti mereka telah ikut andil dalam peningkatan pembangunan di daerahnya; dan
- d. Memperkuat proses pemungutan melalui peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah dan penyusunan perda/perbup terkait pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui:

- a. Identifikasi wajib pajak baru/potensial secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dan biaya yang dibutuhkan sebagai upaya untuk menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerja sama melalui model kerja sama masyarakat, swasta, dan pemerintah (*public-private partnership*); dan
- b. Cara yang terakhir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak, agar pendapatan asli daerah tersebut dapat terus meningkat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari pusat.

3.1.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

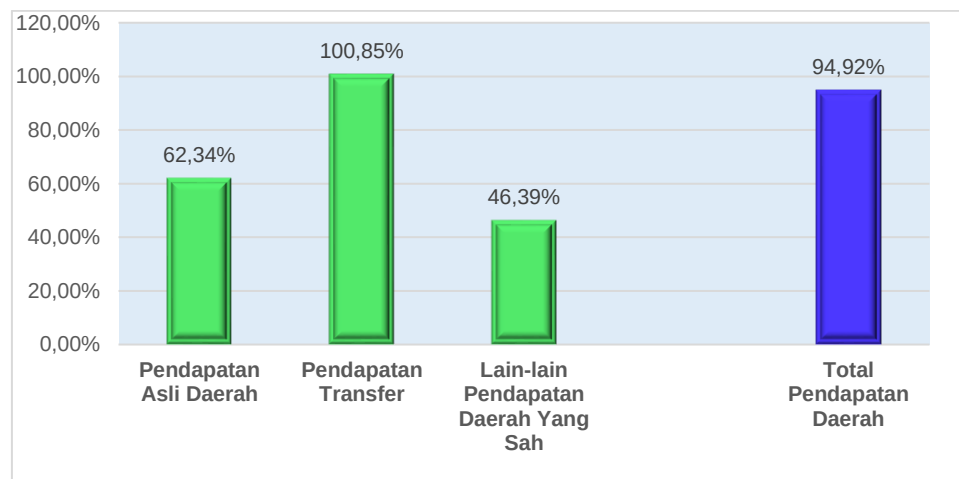
desentralisasi, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2023 jumlah pendapatan dalam APBD Pokok Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp934.535.405.462,00. Dari jumlah tersebut berdasarkan data yang telah dilakukan pergeseran sebanyak enam kali dan telah terealisasi sebesar Rp887.077.959.303,37 atau mencapai 94,92 persen. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci pada tabel berikut.

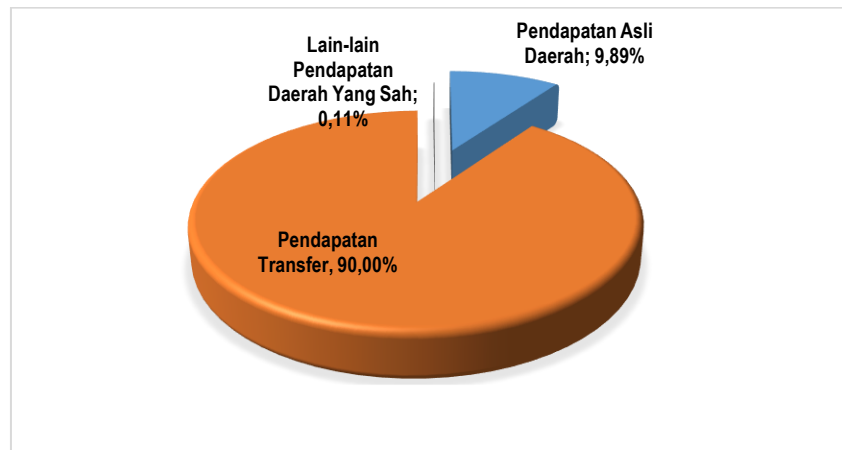
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	140.838.163.462,00	87.794.782.521,37	62,34
Pendapatan Transfer	791.537.242.000,00	798.281.176.782,00	100,85
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39
Total	934.535.405.462,00	887.077.959.303,37	94,92

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 62,34%, Pendapatan Transfer mencapai 100,85% dan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 46,39%. Gambaran tingkat capaian target dan komposisi realisasi dari ketiga jenis pendapatan daerah tersebut pada Tahun 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini



Grafik 3.1 Capaian Target dan Realisasi Pendapatan



Grafik 3.2 Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Dari diagram komposisi realisasi pendapatan daerah di atas untuk Tahun 2023 ini terlihat bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah menyumbang 9,89 persen dari total realisasi, sektor Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar 90,00 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,11 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 terdapat peningkatan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah dimana pada tahun sebelumnya menyumbang 8,47 persen dan penurunan pada sektor Pendapatan Transfer Daerah yang sebelumnya mencatat 91,39 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat kontribusi 0,15 persen terhadap total realisasi keseluruhan pendapatan. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat agar dapat memberikan kontribusi.

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen penerimaan pendapatan daerah:

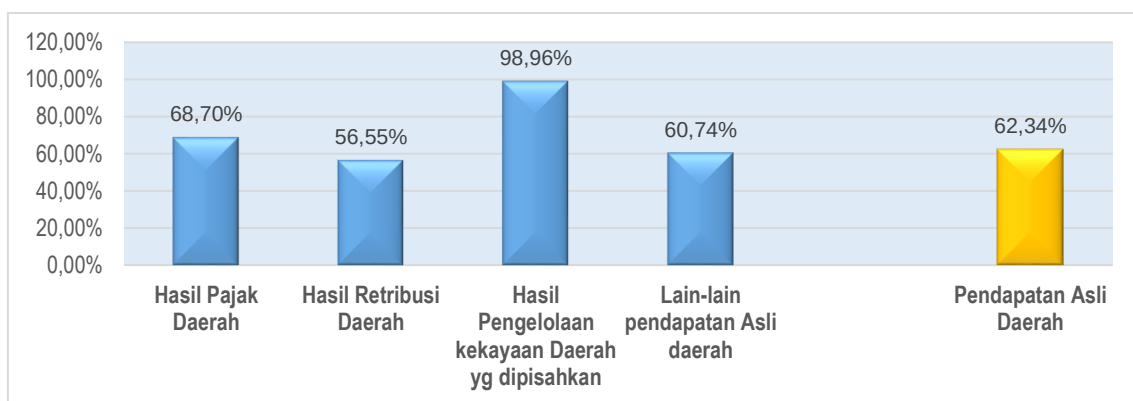
3.1.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp140.838.163.462,00 dan terealisasi sebesar Rp87.794.782.521,37 atau mencapai 62,34 persen dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran tingkat capaian target dari komponen pendapatan asli daerah pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Hasil Pajak Daerah	15.634.764.909,00	10.740.841.614,61	68,70
Hasil Retribusi Daerah	6.295.728.500,00	3.559.947.334,00	56,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.333.308.081,00	3.298.690.028,00	98,96
Lain-lain Pendapatan Asli daerah	115.574.361.972,00	70.195.303.544,76	60,74
Pendapatan Asli Daerah	140.838.163.462,00	87.794.782.521,37	62,34



Grafik 3.3 Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah belum dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dimana tingkat penerimaan realisasi pajak daerah tersebut sebesar 68,70 persen dari target yang ditetapkan. Untuk keempat komponen pendapatan asli daerah yang lain rata-rata terealisasi di bawah 100 persen dari keempat komponen pendapatan asli tersebut kurang 1,04 persen untuk mencapai realisasi 100 persen yakni pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mencapai penerimaan realisasi mencapai 98,96 persen sesuai dengan target yang ditentukan.

3.1.1.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik transfer tersebut bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah lainnya. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Salah satu kelompok dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

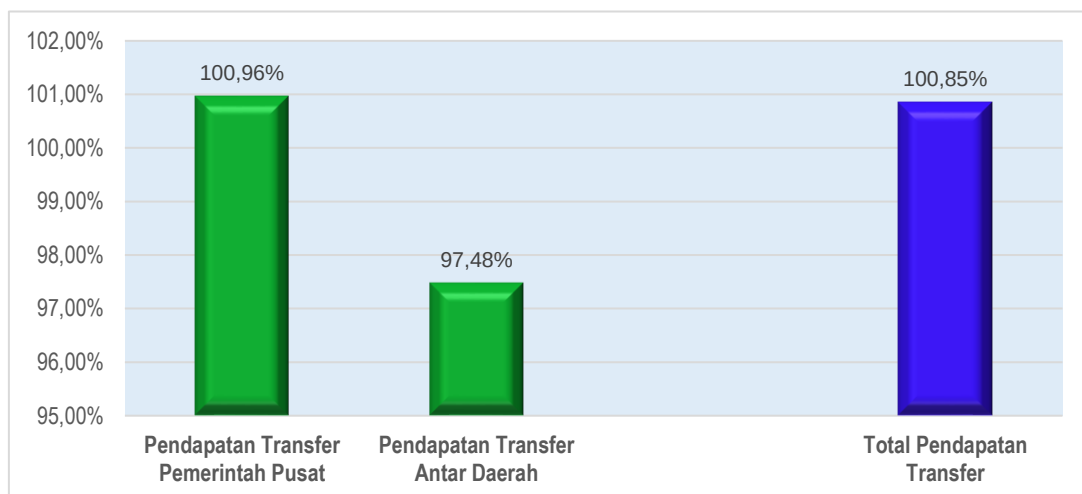
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Majene.

Untuk Tahun 2023 secara keseluruhan Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp791.537.242.000,00 dan terealisasi sebesar Rp798.281.176.782,00 atau mencapai 100,85 persen dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen dana perimbangan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.527.242.000,00	773.902.149.240,00	100,96
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48
Total Pendapatan Transfer	791.537.242.000,00	798.281.176.782,00	100,85

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023



Grafik 3.4 Persentase Capaian Target Pendapatan Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa dari dua komponen penerimaan yang bersumber dari transfer, capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi tidak mencapai target yang ditentukan, Adapun kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat hanya terealisasi sebesar 100,96 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya terealisasi sebesar 97,48 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.



3.1.1.2.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan penerimaan daerah yang merupakan transfer dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan yang paling material mempengaruhi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Majene dalam menjalankan fungsi otonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Kelompok Transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa, berbeda dengan tahun sebelumnya (TA 2022) Pemerintah Kabupaten Majene mendapatkan insentif daerah sebesar Rp2.301.731.000,00. Dana Perimbangan sendiri jenis pendapatan yang paling besar di antara semua kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimana dalam rinciannya terdapat Dana Bagi Hasil Pajak maupun Non Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Capaian realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan pada Tahun 2023 Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Dana Perimbangan	712.341.115.000,00	718.086.870.240,00	100,81
- Dana Bagi Hasil	5.159.841.000,00	8.064.980.017,00	156,30
- Dana Alokasi Umum	503.503.051.000,00	508.603.740.400,00	101,01
- Dana Alokasi Khusus Fisik	80.134.213.000,00	78.097.585.458,00	97,46
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.544.010.000,00	123.320.564.365,00	99,82
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	
Dana Desa	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.527.242.000,00	773.902.149.240,00	100,96

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa persentase tertinggi capaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2023 adalah Dana Bagi Hasil dengan persentase 156,30 persen, Dana Desa dengan persentase mencapai 103,01 persen serta Dana Alokasi Umum yang realisasinya mencapai 101,01 persen. Jenis pendapatan yang tidak terealisasi sesuai target adalah Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 yang tertinggi berasal dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, PPh Pasal 21, dan Sumber Daya Alam Perikanan. Dana Bagi Hasil dalam perkembangan realisasinya bersifat tidak menetap, bergantung pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan daerah pada sektor-sektor perekonomiannya. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan kebijakan fiskal



pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta keselarasan program pemerintah pusat dan daerah. Pada Tahun 2023 Dana Alokasi Umum tidak terealisasi penuh diakibatkan pelaporan realisasi anggaran dan laporan lainnya ke pemerintah pusat sering mengalami keterlambatan sehingga mendapatkan sanksi penundaan. Adapun Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2023 hampir memenuhi target realisasi dimana Dana Alokasi Khusus Fisik mencapai 97,46 persen dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik mencapai 99,82 persen.

3.1.1.2.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, atau pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 adalah Dana Bagi Hasil bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dana Bagi Hasil terdiri Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Bantuan Keuangan Khusus adalah transfer dari pemerintah daerah provinsi dalam rangka pendanaan program kegiatan prioritas Kabupaten Majene. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.463.526.283,00	3.320.614.675,00	95,87
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.684.608.873,00	2.503.489.090,00	67,94
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.589.243.175,00	7.881.075.534,00	141,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	62.434.269,00	20.028.121,00	32,08
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.210.187.400,00	10.653.820.122,00	87,25
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat defisit penerimaan daerah dari kelompok Pendapatan Transfer Antar Daerah dimana persentase realisasinya mencapai 97,48 persen. Realisasi pendapatan transfer dari provinsi sangat bergantung dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk merealisasikan objek pendapatan yang akan dibagi hasilkan ke pemerintah kabupaten/kota. Pada Tahun 2023 Pendapatan Bagi Hasil mengalami kenaikan realisasi secara signifikan dari pada tahun 2022 yang hanya mencapai realisasi sebesar 79,40 persen, pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor menyumbang 141,00 persen. Sedangkan untuk 2023 Pemerintah Kabupaten Majene tidak mendapatkan Bantuan Keuangan berbeda dengan tahun sebelumnya sebesar Rp63.550.000,00.

3.1.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh penerimaan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp2.160.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.002.000.000,00 atau 46,39 persen dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Hibah	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39
Dana Darurat	0,00	0,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai UU	0,00	0,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023



Grafik 3.5 Persentase Capaian Target Lain-lain Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan tabel dan diagram di atas hanya terdapat satu komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2023, yaitu Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp1.002.000.000,00 atau sekitar 46,39 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun 2023.



3.1.2 Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah

3.1.2.1. Kebijakan Umum Belanja dan Transfer Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Dan untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Untuk itu penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Total belanja dan transfer daerah Kabupaten Majene untuk Tahun 2023 ditetapkan dalam APBD Pokok Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 dan ditargetkan sebesar Rp932.385.405.462,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	837.295.103.244,00	772.991.016.944,80	92,32
- Belanja Operasi	719.167.516.626,00	667.164.512.064,80	92,77
- Belanja Modal	116.127.586.618,00	103.848.841.602,00	89,43
- Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.977.663.278,00	98,88
Transfer	95.090.302.218,00	112.024.733.374,00	117,81
- Transfer Bagi Hasil	2.607.508.829,00	1.216.354.374,00	46,65
- Transfer Bantuan Keuangan	92.482.793.389,00	110.808.379.000,00	119,82
Total Belanja dan Transfer	932.385.405.462,00	885.015.750.318,80	94,92



3.1.2.2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp837.295.103.244,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp719.167.516.626,00, Belanja Modal sebesar Rp116.127.586.618,00 dan Belanja Tak terduga sebesar Rp2.000.000.000,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2023 total belanja daerah yang dapat terealisasi sebesar Rp772.991.016.944,80 atau 92,32 persen dari target. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok tersebut dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Operasi	719.167.516.626,00	667.164.512.064,80	92,77
- Belanja Modal	116.127.586.618,00	103.848.841.602,00	89,43
- Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.977.663.278,00	98,88
Total Belanja	837.295.103.244,00	772.991.016.944,80	92,32

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk Belanja Operasi sebesar 92,77 persen, Belanja Modal sebesar 89,43 persen, dan Belanja Tak Terduga sebesar 98,88 persen.

3.1.2.2.1. Belanja Operasi

Kelompok Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk mendanai operasional Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan dalam pemerintahan. Belanja operasi digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pelaksanaan Belanja Operasi pada tahun 2023 mencatatkan Belanja Barang dan Jasa sebagai komponen belanja dengan realisasi tertinggi dengan persentase sebesar 109,42 persen. Di tempat kedua tercatat Belanja Hibah dengan tingkat realisasi sebesar 100,58 persen. Selanjutnya Belanja Bantuan Sosial terealisasi dengan besaran 100,00 persen. Realisasi terendah terdapat pada Belanja Pegawai yakni sebesar 82,96 persen. Secara keseluruhan belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp719.167.516.626,00 dapat terealisasi Rp667.164.512.064,80. Gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja operasi tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	449.101.271.369,00	372.584.721.002,00	82,96
Belanja Barang dan Jasa	258.569.834.151,00	283.016.566.756,80	109,45
Belanja Hibah	11.438.811.106,00	11.505.624.306,00	100,58
Belanja Bantuan Sosial	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00
Total Belanja Operasi	719.167.516.626,00	667.164.512.064,80	92,77

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

3.1.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dua komponen Belanja Modal dari kelima komponen Belanja Modal tersebut rata-rata terealisasi di atas 80 persen, kecuali untuk Belanja Modal Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Secara keseluruhan Belanja Modal yang ditargetkan sebesar Rp116.127.586.618,00 dapat terealisasi Rp103.848.841.602,00 atau sebesar 89,43%.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen Belanja Modal tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	2.375.000.000,00	723.073.962,00	30,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.210.349.846,00	18.297.386.946,00	90,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.777.622.772,00	53.184.829.425,00	102,72
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.089.214.000,00	31.484.043.269,00	76,57
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	335.000.000,00	179.508.000,00	53,58
Belanja Modal Aset Lainnya	340.400.000,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal	116.127.586.618,00	103.848.641.602,00	89,43

3.1.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga atau Belanja Lain-Lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak terduga pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi 98,88 persen yakni sebesar Rp1.977.663.278,00. Belanja Tak Terduga pada Tahun 2023 dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Pengeluaran atas pos Belanja Tak Terduga digunakan untuk pembayaran tarif listrik penerangan jalan umum kepada PLN, membiayai seluruh rehabilitasi darurat atas penanggulangan dampak bencana gempa di Kecamatan Malunda, Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah, Pengamanan Hari Raya, Infrastruktur, serta Pemakaman Jenazah Covid-19 di wilayah Kabupaten Majene, Pembayaran PBB-P2 Mess Pemda di Jakarta, Kegiatan Pangan Murah, Rehabilitasi Jalan, Pengelolaan Persampahan dan Penyelesaian Konflik Sosial.

3.1.2.3. Target dan Realisasi Transfer Daerah

Transfer adalah pengeluaran uang oleh Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas pelaporan ke entitas lain sebagai kewajiban atas perintah peraturan perundang-undangan. Transfer Daerah terdiri atas Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi



Hasil merupakan bagi hasil atas sejumlah Pendapatan Asli Daerah kepada Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara Transfer Bantuan Keuangan merupakan transfer ke pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa sebanyak 10% dari Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majene serta Dana Desa yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.

Transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp95.090.302.218,00 dan realisasinya mencapai 117,81 persen yakni sebesar Rp112.024.733.374,00. Berikut gambaran tingkat capaian realisasi Transfer Daerah pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.11 Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Transfer Bagi Hasil	2.607.508.829,00	1.216.354.374,00	46,65
Transfer Bantuan Keuangan	92.482.793.389,00	110.808.379.000,00	119,82
Total Transfer	95.090.302.218,00	112.024.733.374,00	117,81

3.1.2.3.1. Transfer Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil merupakan transfer Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan bagi hasil atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10 % kepada seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Majene.

Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.607.508.829,00 dengan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp1.518.476.491,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.089.032.338,00. Pada tahun 2023 realisasi atas transfer bagi hasil tersebut hanya mencapai 46,65 persen. Pada kelompok Bagi Hasil Pajak hanya terealisasi sebesar Rp827.869.060,00 dengan persentase sebesar 54,52 persen. Sedangkan Bagi Hasil Retribusi hanya terealisasi sebesar Rp388.485.314,00 dengan persentase sebesar 35,67 persen. Berikut gambaran realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.12 Realisasi Transfer Bagi Hasil APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Bagi Hasil Pajak	1.518.476.491,00	827.869.060,00	54,52
Bagi Hasil Retribusi	1.089.032.338,00	388.485.314,00	35,67
Total Transfer Bagi Hasil	2.607.508.829,00	1.216.354.374,00	46,65

3.1.2.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran daerah dalam rangka peningkatan pemerataan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya.

Pada APBD periode Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Transfer Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa lingkup Kabupaten Majene dalam bentuk Bantuan Keuangan Umum (Alokasi Dana Desa) serta Bantuan Keuangan Khusus (Dana Desa). Bantuan Keuangan Umum Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp38.296.666.389,00 dan terealisasi sebesar Rp54.993.100.000,00 atau 145,74 persen. Adapun Dana Desa dianggarkan sebesar Rp54.186.127.000,00 dan terealisasi sebesar Rp55.815.279.000,00 atau terealisasi sebesar 103,01 persen.

Berikut gambaran realisasi Bantuan Keuangan Umum (Alokasi Dana Desa) dan Bantuan Keuangan Khusus (Dana Desa) pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.13 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Bantuan Keuangan Umum	38.296.666.389,00	54.993.100.000,00	143,60
Bantuan Keuangan Khusus	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01
Total Bantuan Keuangan	92.482.793.389,00	110.808.379.000,00	119,82

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

3.1.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah meliputi Selisih Lebih Perhitungan Tahun Lalu, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pengembalian bantuan modal. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Majene untuk tahun anggaran 2023 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dari penerimaan Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan

antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun APBD Tahun Anggaran 2023 menganggarkan pengeluaran pembiayaan pada item penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mandar yang merupakan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majene.

3.1.3.2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Besaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 yang terdiri atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp10.000.000,00. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp2.160.000.000,00 dapat terealisasi mencapai 79,86 persen atau sebesar Rp1.725.000.000,00. Berdasarkan realisasi tersebut maka terdapat surplus pada pembiayaan daerah.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

Tabel 3.14 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu	0,00	8.138.537.864,07	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
Total	10.000.000,00	8.138.537.864,07	81.385,38
Pengeluaran Pembiayaan	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	79,86
Penyertaan Modal	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	79,86
Total	(2.150.000.000,00)	6.413.537.864,07	(298,30)

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

3.1.4 Mandatory Spending

Mandatory spending daerah adalah belanja atau pengeluaran daerah yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan tersebut antara lain berupa batas minimal atau maksimal anggaran belanja/pengeluaran yang masuk dalam *mandatory spending* yang harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD.) Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah serta mendorong kinerja sektor tertentu serta mendorong pemerintah daerah untuk fokus dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan. *Mandatory spending* merupakan upaya pemerintah pusat untuk memastikan daerah mengalokasikan sumber dayanya demi pembangunan yang optimal. Agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pembangunan sektor prioritas maka dibuat ketentuan dalam peraturan perundangan yang mewajibkan



pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk keperluan belanja dalam fungsi tertentu. Kewajiban alokasi anggaran tersebut dilakukan mengingat sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan, alokasi belanja di daerah untuk sektor tertentu relatif lebih rendah. Namun evaluasi atas dampak peningkatan anggaran pada bidang tersebut pada kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu untuk dilakukan.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pemda wajib mengalokasikan belanja pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) minimal 20%, untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, yaitu untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN); dan
4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

3.1.4.1 Bidang Pendidikan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dengan semangat tersebut selanjutnya pada Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 pada bidang pendidikan sebesar Rp317.713.743.521,00,00 dalam bentuk Belanja Operasi sebesar Rp289.666.322.040,00 dalam bentuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah. Selain itu dialokasikan juga Belanja Modal sebesar Rp28.047.421.481,00 untuk pemenuhan infrastruktur Pendidikan. Jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp932.385.405.462,00, maka anggaran Pendidikan tersebut mencapai 34,08 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat berdasarkan sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4)

dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pemda wajib mengalokasikan belanja pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) minimal 20 persen.

Alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir untuk bidang pendidikan Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Anggaran		%
		Belanja Daerah	Pendidikan	
1.	2021	917.338.950.921,00	276.912.870.451,00	30,19
2.	2022	949.697.815.671,00	284.538.863.948,00	29,96
3.	2023	932.385.405.462,00	317.713.743.521,00	34,08

3.1.4.2 Bidang Kesehatan

Pada dasarnya, *mandatory spending* di bidang kesehatan merupakan salah satu implementasi dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Secara khusus, *mandatory spending* dalam bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171, yang mengamanatkan pemerintah secara mutlak untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji. Sementara, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan untuk mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Tujuan dari *mandatory spending* di bidang kesehatan ini secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171, yaitu untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp142.140.846.033,00,00 dalam bentuk Belanja Operasi sebesar Rp109.876.855.670,00 dalam bentuk Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa. Selain itu dialokasikan juga Belanja Modal sebesar Rp32.263.990.363,00 untuk pemenuhan infrastruktur kesehatan jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp932.385.405.462,00, maka anggaran kesehatan tersebut mencapai 23,11 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat berdasarkan sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji.

Alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir untuk bidang kesehatan Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran				%
	Belanja Daerah	Belanja Gaji	Kesehatan	Belanja Daerah diluar Belanja Gaji	
	1	2	3	4 = 1-2	(3/4*100)
2021	917.338.950.921,00	284.959.738.061,00	120.556.770.651,00	632.379.212.860,00	19,06
2022	949.697.815.671,00	293.001.743.643,00	104.065.468.007,00	656.696.072.028,00	15,85
2023	932.385.405.462,00	317.285.639.241,00	142.140.846.033,00	615.099.766.221,00	23,11

3.1.4.3 DTU untuk Pembangunan Infrastruktur Publik

Pengalokasian Dana Transfer Umum (DTU) berupa DAU dan DBH oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 untuk pembangunan infrastruktur publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat sebesar Rp141.216.767.057,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Modal Infrastruktur Publik sebesar Rp116.127.586.618,00; Belanja Pemeliharaan sebesar Rp13.592.769.333,00; Belanja Hibah sebesar Rp11.438.811.106,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp57.600.000,00. Jika dihitung persentase dari besaran DTU sebesar Rp453.669.792.000,00, maka anggaran pemenuhan pembangunan infrastruktur mencapai 31,13 persen atau memenuhi syarat minimal 25 persen berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

Pengalokasian Dana Transfer Umum (DTU) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 17 Pengalokasian DTU Untuk Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Anggaran		%
		DTU	Infrastruktur	
1.	2021	447.329.815.792,00	120.159.908.381,00	26,86
2.	2022	445.496.969.200,00	159.681.307.972,00	35,84
3.	2023	453.669.792.000,00	141.216.767.057,00	31,13

3.1.4.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pelayanan publik di desa-desa, pemerintah Indonesia telah menetapkan dua program penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Kedua program tersebut adalah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan

dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa; dan
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana 10% (sepuluh persen) dari total Dana Transfer Umum yang diperoleh pemerintah daerah wajib dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di desa. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Majene mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp54.993.100.000,00 yang terdiri dari: (1) Anggaran 2023 ADD Tahun 2023 sebesar Rp50.866.289.200,00 dan (2) dianggarkan utang Tahun 2023 sebesar Rp4.126.810.800,00.

Pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) oleh pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021-2023

No.	Uraian	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.	DAU	486.320.121.000,00	486.195.888.000,00	503.503.051.000,00
2.	DBH	10.396.766.492,00	8.831.910.000,00	5.159.841.000,00
3.	Total	496.716.887.492,00	495.027.798.000,00	508.662.892.000,00
4.	Anggaran ADD	49.387.071.700,00	49.530.828.800,00	38.296.666.389,00
5.	Persentase (5/3*100%)	9,94	10,01	7,53

3.1.5 Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1. Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan



- peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
 - c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probit Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
 - f. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
2. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; dan
 3. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 untuk biaya operasional pengawasan Inspektorat sebesar Rp1.770.946.000,00 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp932.385.405.462,00 sebesar 0,19% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi ini belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengamanatkan agar daerah dengan besaran APBD sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total Belanja Daerah namun atas keterbatasan fiskal yang ada dengan target program prioritas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Majene harus dipenuhi dalam rentang waktu efektif yang tergolong singkat, maka Pemerintah Kabupaten Majene hanya dapat mengalokasikan kegiatan pengawasan yang bersifat prioritas.

Alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada SKPD Inspektorat Kabupaten Majene tiga tahun terakhir 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.19 Alokasi Anggaran Bidang Pengawasan Kabupaten Majene
Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Anggaran		%
		Belanja	Pengawasan	
1.	2021	917.338.950.921,00	4.302.535.460,00	0,47
2.	2022	949.697.815.671,00	3.093.274.432,00	0,33
3.	2023	932.385.405.462,00	1.770.946.000,00	0,19

Dengan keterbatasan anggaran dalam bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene mampu menunjukkan kinerja terbaik terkait penyelesaian atas temuan. Berdasarkan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hingga Desember 2023 pemerintah Kabupaten Majene telah menyelesaikan tindak lanjut atas temuan 75,12 persen yang berarti sudah di atas rata-rata target nasional sebesar 75%.

3.1.6 Penanganan Dampak Inflasi

Inflasi menurut Badan Pusat Statistik adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks tersebut adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa

Dampak inflasi dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan stabilitas inflasi itu sendiri. Inflasi yang rendah dan stabil dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang, dan mendorong investasi. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, dan mengganggu perencanaan keuangan individu dan bisnis.

Dengan diumumkannya kenaikan BBM subsidi oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2022. Hal ini berimplikasi pada perekonomian nasional yang salah satunya adalah meningkatnya inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Penanganan dampak inflasi kali ini didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan adanya penganggaran belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Implementasi kebijakan dimaksud diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022. Dengan adanya PMK ini, maka Pemda berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya. Adapun belanja wajib perlindungan sosial ini dipergunakan untuk, antara lain (1) pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan, (2) penciptaan lapangan kerja, dan/atau (3) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Besaran DTU yang dihitung sebesar penyaluran DAU



bulan Oktober-Desember 2022 dan penyaluran DBH Triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib perlindungan sosial tidak termasuk belanja wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengantisipasi dampak inflasi Tahun 2022, oleh Pemerintah kabupaten Majene mengalokasikan belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp2.544.497.560,00 yang terdiri dari kegiatan: (1) bantuan sosial sebesar Rp1.140.252.392,00 yang terdiri bantuan sosial kepada nelayan dan pelaku UKM; (2) Subsidi sektor transportasi melalui kegiatan Subsidi kepada Angkutan Dalam Kota sebesar Rp464.660.000,00 dan (3) kegiatan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp939.585.168,00 yang terdiri dari (a) kegiatan pasar murah sebesar Rp150.000.000,00; (b) Subsidi Bibit Petani Cabai, Obat-obatan sebesar Rp68.860.000,00; (c) Subsidi Bibit Bawang Merah sebesar Rp645.725.168,00 dan (d) subsidi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebesar Rp75.000.000,00.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Majene mengalokasikan dan untuk pengendalian inflasi sebesar Rp3.249.208.150,00 yang terdiri dari kegiatan: (1) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp12.500.000,00; (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp15.000.000,00; (3) pada Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp30.000.000,00; (4) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan pada Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp24.213.800,00; (5) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp7.494.350,00; (6) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.110.000.000,00; dan (7) Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp50.000.000,00.

Alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan mengantisipasi dampak inflasi yang merupakan belanja wajib perlindungan sosial 2 tahun terakhir 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.20 Alokasi Anggaran Mengantisipasi Dampak Inflasi
Kabupaten Majene Tahun 2022-2023**

No.	Tahun	Anggaran Mengantisipasi dampak Inflasi (Rp)
1.	2022	2.544.497.560,00
2.	2023	3.249.208.150,00

Dari tabel di atas terdapat kenaikan pengalokasian anggaran pada tahun 2023 untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan mengantisipasi dampak inflasi yang merupakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp704.710.590,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.544.497.560,00.



3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian

3.2.1 Permasalahan Dan Solusi Pendapatan Daerah

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah antara lain adalah:

1. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari Bantuan Pusat;
2. Penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
5. Masih lemahnya sanksi hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
6. Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
7. Masih belum meratanya tingkat profesionalisme kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah yang tersebar pada berbagai instansi pengelola pendapatan.

Untuk menyikapi permasalahan pendapatan daerah tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan pajak dan retribusi yang ada, meliputi:
 - a. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - c. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - d. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
2. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
3. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
4. Menginventarisasi serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah; dan
5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak.



3.2.2 Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan belanja pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran belanja daerah masih didominasi oleh belanja tidak langsung untuk membayarkan gaji dan tunjangan pegawai. Di samping itu anggaran biaya perjalanan dinas, pemeliharaan gedung/kendaraan dan biaya pelaksanaan kegiatan semakin memperbesar kebutuhan anggaran untuk pegawai;
2. Masih minimnya anggaran yang tersedia untuk anggaran belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan masyarakat masih belum optimal, untuk itu diharapkan agar perencanaan belanja daerah diharapkan agar lebih mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene;
3. Masih rendahnya tingkat realisasi investasi, terbatasnya kesempatan kerja, kondisi infrastruktur perdesaan yang masih belum memadai dibandingkan dengan standar pelayanan minimal, keterbatasan energi listrik yang mempengaruhi iklim investasi, kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah yang masih rendah, daya saing sektor riil pertanian dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan belum optimal;
4. Sumber pendapatan yang terbatas dan lebih banyak tergantung pada dana transferan dari pusat;
5. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran; dan
6. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Permasalahan yang sifatnya rutin pada pembiayaan daerah, yaitu bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya yang direncanakan dalam Anggaran Pokok hanya estimasi berdasarkan catatan sementara pada akhir tahun anggaran. Penetapan anggaran pembiayaan ini tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan angka pasti hanya dapat diketahui setelah berakhirnya APBD Tahun Anggaran sebelumnya. Keadaan ini berdampak pada belum optimalnya dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dianggap sangat prioritas dan mendesak dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan Entitas Akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD, BLUD, dan PPKD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi dalam sejarah implementasi akuntansi pemerintahan di Indonesia baik pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan terakhir sejak tahun 2015 diwajibkan bagi seluruh entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

1. Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP Nomor 1 Paragraf 8). Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah

terbatasnya informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

2. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrua (Cash Toward Accrual Based Accounting)

Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Regulasi yang mengatur penerapan basis kas menuju akrual adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Akuntansi Berbasis Akrua (Accrual Based Accounting)

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP Nomor 1 Paragraf 8). Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi dianggap sistem yang paling *modest*. Keberhasilan beberapa negara seperti Selandia Baru dalam menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang lebih dulu terbit, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual secara penuh.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah diatur bahwa seluruh entitas pelaporan baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya tahun pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas pelaporan berdasarkan amanat dari peraturan tersebut mulai pada tahun 2015 telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah juga menyajikan laporan keuangan dengan basis kas pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dimana pendapatan serta penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

4.3.1. Neraca

4.3.1.1. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) atau Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Majene yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :

- a. Piutang Pajak
- b. Piutang Retribusi
- c. Piutang Dana Perimbangan/Bagi Hasil termasuk DAU dan DAK
- d. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- e. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
- f. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- g. Piutang Lain-Lain PAD yang sah

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan Piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- d. Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan :

- a. Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan pupuk di Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan.

- b. Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode perpetual digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir

4. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen;

Investasi non permanen dapat berupa:

- 1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
- 4) Investasi non permanen lainnya.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Penyajian Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dari Dana Bergulir bertujuan agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Majene harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Nilai Satuan Minimum

Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

6. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

- a. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- b. Lisensi dan *franchise*
- c. Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya
- d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- e. Aset Lain-Lain Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

7. Aset Lain-lain

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri atas:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:
 - a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - c) Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

4.3.1.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kota.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat

dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang kepada Pihak Ketiga
- b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari : Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
- c. Utang Bunga (untuk PPKD)
Utang Bunga, terdiri dari Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya dan Utang Bunga Luar Negeri.
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (untuk PPKD)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kabupaten lain.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka (untuk SKPD)
Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III dan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.
- f. Utang Beban
Utang Beban diakui sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing

dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.1.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Majene yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Majene pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Ekuitas
Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

4.3.2. Laporan Operasional

4.3.2.1. Pendapatan

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
2. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
3. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
7. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a. PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

4.3.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban terdiri dari:

1. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
2. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang

- dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
4. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;
 5. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
 6. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
 7. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 8. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
 9. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
 10. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ke tertagihan piutang;
 11. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas;
 12. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 13. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
 14. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah;
 15. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.
 16. Pengakuan Beban pada saat:
 - a. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;



- b. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- d. Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- e. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
- f. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- g. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya;
- h. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- i. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- j. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- k. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;

- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
- 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
- 7) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.
Pengukuran Beban pada saat:
 - a) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
 - b) Beban diukur berdasarkan:
 - (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
 - (2) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
 - c) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai SAP

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari

pemerintah pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber- sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak pembaharuan, diantaranya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang pada dasarnya pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang diakui adalah pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan, serta pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Menurut Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 terbit pada tanggal 22 Oktober 2010. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut PP No.71 Tahun 2010, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Entitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual (*basis accrual*), sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi tata buku tunggal (*single entry accounting system*) berbasis kas (*cash basis*). Sistem pencatatan *single entry* ini sangat sederhana yaitu hanya mencatat satu kali setiap terjadi transaksi. Transaksi yang menyebabkan kas bertambah akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang akan dicatat di sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* sangat sederhana dan mudah dipahami, namun di samping itu juga mempunyai banyak kelemahan. Sistem akuntansi yang berbasis kas memiliki kelemahan sebagai berikut:

1. Informasi yang lebih kompleks yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis kas;
2. Relevansi laporan keuangan bagi para pengambil keputusan sangat kurang, karena basis kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain; dan
3. Pertanggungjawaban ke publik terbatas pada penggunaan kas saja, tidak dicantumkan pertanggungjawaban atas pengelolaan aktiva lainnya dan utang atau kewajiban.

Banyaknya kekurangan dari *single step* berbasis kas tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Maka sistem yang lama dikembangkan menjadi sistem baru yang dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Keuangan (*financial reports*) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas

(LAK), serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Karakter dalam sistem yang baru adalah *double entry* dan basis akrual (*accrual basis*). Sistem tersebut dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tidak hanya dari transaksi masa lalu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban kas yang timbul di masa depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapan SAP, di antaranya:

1. Kualitas SDM yang belum memadai. Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang bersifat terbatas. Padahal ketersediaan SDM aparatur yang memahami teknis di bidang akuntansi pemerintahan merupakan unsur paling dominan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini. Pemerintah Kabupaten Majene hingga saat ini belum termasuk daerah dengan SDM akuntansi yang memadai. Para pejabat penatausahaan keuangan di tingkat SKPD pun belum berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi.
2. Dinamika regulasi yang sering mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Inkonsistensi dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan akuntansi secara maksimal. Sering kali terjadi terdapat beberapa petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan yang tidak sejalan. Misalnya dalam penganggaran masih merujuk kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan pada ranah pelaporan merujuk kepada PP Nomor 71 Tahun 2010 yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
3. Efektivitas tata laksana dan keorganisasian dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur pemerintah daerah. Dalam implementasi pengelolaan keuangan, masih banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan di tingkat SKPD yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan di SKPD. Adapun pada ranah pelaporan, masih banyak PPK-SKPD yang tidak terlibat secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Masih banyak PPK-SKPD masih bergantung terhadap bendahara maupun operator dalam menyusun laporan keuangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah bekerja sama dengan lembaga pengawas internal pemerintah lainnya dalam mengembangkan sistem informasi yang dapat memudahkan, namun sebagian besar PPK-SKPD belum memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Pekerjaan teknis tersebut lebih sering dilakukan oleh bendahara ataupun operator.

Namun dalam pelaksanaan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini, Pemerintah Kabupaten Majene telah melakukan upaya-upaya. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Majene telah menyiapkan sarana pendukung berupa sistem informasi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. Bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah telah menggunakan SIMDA Keuangan dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran pelaporan keuangan, pemerintah daerah telah mulai menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual sejak tahun 2015 sesuai amanat PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah.

2. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah telah menyusun perangkat regulasi yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan standar akuntansi pemerintah daerah. Pada tahun 2014, Bupati Majene telah menerbitkan tiga peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah, yaitu Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur, dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian pada tahun 2018, pemerintah daerah melakukan perubahan regulasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi.
3. Pemerintah Kabupaten Majene dalam berbagai kesempatan senantiasa melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pengelola keuangan daerah. Setiap tahun anggaran, pemerintah melalui SKPD yang mempunyai fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah melaksanakan program bimbingan teknis dan pelatihan secara periodik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memperkuat sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah utamanya yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi maupun di SKPD selaku penyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada akhirnya pemerintah daerah telah melakukan segala upaya maksimal dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintah daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat sebanyak enam kali berturut-turut, namun hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa praktik pengelolaan keuangan utamanya pada ranah pelaporan tidak meninggalkan permasalahan. Masih cukup banyak pekerjaan rumah yang tersisa bagi pemerintah daerah dalam dunia pengelolaan keuangan daerah. Namun dengan strategi yang tepat, pemerintah berharap dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual dengan baik dan efektif agar mewujudkan aspek akuntabilitas dan transparansi yang baik demi terciptanya lingkungan *good governance* di Kabupaten Majene.

4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

4.5.1. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang; dan
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

1. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
2. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA;
3. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;
4. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

1. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
2. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

1. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

1. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - a. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - b. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

1. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas;
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

- a. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas; dan
- b. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

1. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
2. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

1. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

1. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait;
2. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan mengurangi akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada PSAP 10 paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada PSAP 10 paragraf 21, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada PSAP 10 paragraf 20 adalah:

1. Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebit pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.
2. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :

1. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
2. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4.5.3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset, dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.5.4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tugas, pokok, dan fungsi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
2. Fungsi tersebut tetap ada; dan
3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.5.5. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai



menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan antara Laporan Keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dengan Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Majene selaku entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah.

5.1.1. Pendapatan – LRA

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan – LRA	887.077.959.303,37	833.363.725.360,67	53.714.233.942,70	6,45
Jumlah	887.077.959.303,37	833.363.725.360,67	53.714.233.942,70	6,45

*Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten
Majene pada Tahun
Anggaran (TA) 2023 tercatat
senilai Rp887.077.959.303,37
atau mencapai 94,92% dari
target.*

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp887.077.959.303,37 atau mencapai 94,92% dari target APBD TA 2023 senilai Rp934.535.405.462,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp87.794.782.521,37. Pendapatan Transfer senilai Rp798.281.176.782,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp1.002.000.000,00. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan Rp53.714.233.942,70 atau 6,45% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat senilai Rp833.363.725.360,67.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA TA 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	934.535.405.462,00	887.077.959.303,37	94,92	833.363.725.360,67
Pendapatan Asli Daerah	140.838.163.462,00	87.794.782.521,37	62,34	70.563.315.736,67

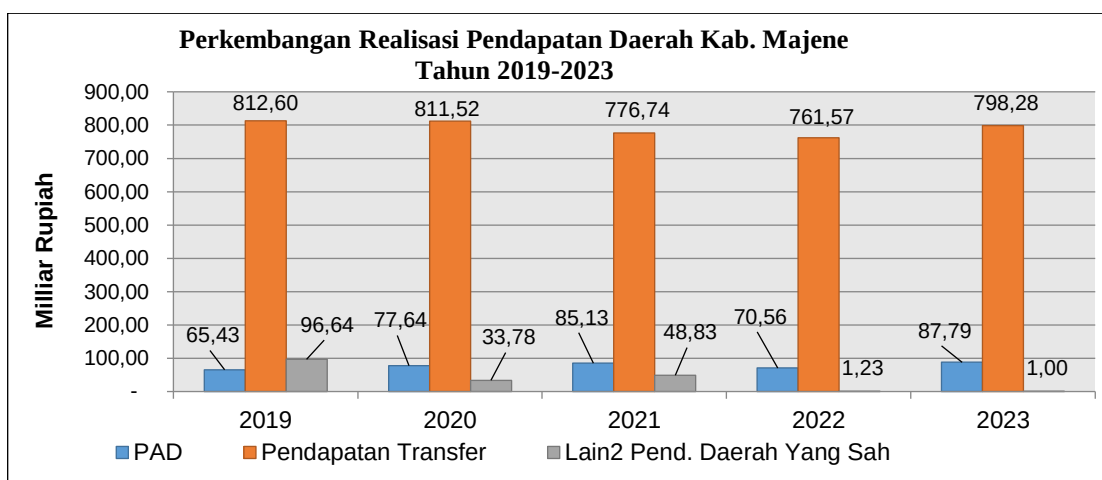


Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	791.537.242.000,00	798.281.176.782,00	100,85	761.573.409.624,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39	1.227.000.000,00

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Majene sebagaimana umumnya pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia sebelum masa Pandemi *Covid-19* cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang disebabkan kenaikan dana transfer dari pusat pada beberapa kelompok jenis transfer. Namun sejak tahun 2020 di periode Pandemi *Covid-19* yang berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional, keadaan tersebut memaksa pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi APBN dalam rangka penanggulangan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi penerimaan negara yang rendah pada akhirnya berdampak terhadap kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Atas kondisi tersebut pemerintah pusat meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan *refocusing* dan realokasi APBD untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran virus *Covid-19* serta pemulihan ekonomi lokal melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan pencegahan penyebaran virus *Covid-19* ditempuh salah satunya melalui pembatasan sosial aktivitas masyarakat yang berdampak menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini sangat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah yang sangat bergantung terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat. Pada akhirnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Majene untuk mencapai target penerimaan pendapatan tidak optimal. Kebijakan perubahan alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga berdampak terhadap perekonomian di desa. Turunnya besaran Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat, serta Alokasi Dana Desa yang alokasinya merupakan 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil juga mempengaruhi kemampuan desa untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di desa.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan kelompok pendapatan pada periode 2019-2023 dilihat pada Grafik 5.1.



Grafik 5.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019-2023



Dibandingkan dengan realisasi di Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan secara signifikan yang terjadi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar (Rp225.000.000,00). Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan senilai Rp17.231.466.784,70 dan kelompok Pendapatan Transfer juga terjadi kenaikan senilai Rp36.707.767.158,00.

Rincian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Pendapatan – LRA

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	934.535.405.462,00	887.077.959.303,37	94,92	833.363.725.360,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.838.163.462,00	87.794.782.521,37	62,34	70.563.315.736,67
Pendapatan Pajak Daerah	15.634.764.909,00	10.740.841.614,61	68,70	9.461.193.553,39
Pendapatan Retribusi Daerah	6.295.728.500,00	3.559.947.334,00	56,55	5.803.175.060,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.333.308.081,00	3.298.690.028,00	98,96	3.333.308.081,00
Lain-lain PAD yang Sah	115.574.361.972,00	70.195.303.544,76	60,74	51.965.639.042,28
PENDAPATAN TRANSFER	791.537.242.000,00	798.281.176.782,00	100,85	761.573.409.624,00
Transfer Pemerintah Pusat	766.527.242.000,00	773.902.149.240,00	100,96	737.695.311.296,00
Dana Perimbangan	712.341.115.000,00	718.086.870.240,00	100,81	679.808.765.296,00
- Dana Bagi Hasil (DBH)	5.159.841.000,00	8.064.980.017,00	156,30	10.784.967.445,00
- Dana Alokasi Umum	503.503.051.000,00	508.603.740.400,00	101,01	485.848.952.931,00
- Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	80.134.213.000,00	78.097.585.458,00	97,46	74.119.888.581,00
- Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik	123.544.010.000,00	123.320.564.365,00	99,82	109.054.956.339,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01	57.886.546.000,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	2.301.731.000,00
- Dana Desa	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01	55.584.815.000,00
Transfer Antar Daerah	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48	23.878.098.328,00
Pendapatan Bagi Hasil	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48	23.814.548.328,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	63.550.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39	1.227.000.000,00
Pendapatan Hibah	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39	1.227.000.000,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi seluruh jenis pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene mencapai 94,92% dimana capaian ini lebih tinggi dari capaian di Tahun Anggaran 2022 dimana realisasi pendapatan daerah seluruhnya berada di angka 90,70%. Jika dilihat pada tabel 5.2 di atas terlihat bahwa persentase capaian realisasi paling rendah terdapat pada jenis kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yakni 46,39%. Dari sisi penetapan target (anggaran) pendapatan, kelompok pendapatan ini pada tahun sebelumnya lebih tinggi dikarenakan pada tahun sebelumnya salah satu objek pendapatan pada kelompok ini adalah Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan mempunyai anggaran dan realisasi yang lebih besar dibanding tahun ini. Selanjutnya persentase capaian realisasi terendah terdapat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah yakni di angka 62,34%. Capaian yang rendah ini disebabkan oleh kontribusi persentase capaian pada jenis pendapatan Retribusi Daerah dengan persentase 56,55%. Adapun Pendapatan Transfer secara anggaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan realisasi yakni mencapai 100,85%. Kenaikan terjadi pada jenis pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dimana pada jenis pendapatan tersebut terkoreksi melampaui realisasi sebesar 101,01% untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan 156,30% untuk Dana Bagi Hasil (DBH). Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Penyaluran DAU *Specific Grant*/SG terdiri atas, DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, DAU Bidang Pekerjaan Umum, dan DAU Pendanaan Kelurahan.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LRA

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Asli Daerah	87.794.782.521,37	70.563.315.736,67	17.231.466.784,70	24,42
Jumlah	87.794.782.521,37	70.563.315.736,67	17.231.466.784,70	24,42

*Pendapatan Asli Daerah
sampai dengan per 31
Desember 2023
terrealisasi senilai
Rp87.794.782.521,37
atau 62,34% dari
anggaran senilai
Rp140.838.163.462,00.*

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp87.794.782.521,37 atau 62,34% dari anggaran senilai Rp140.838.163.462,00. Realisasi tersebut naik senilai Rp17.231.466.784,70 atau 24,42% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat senilai Rp70.563.315.736,67.

Kenaikan ini disebabkan Kenaikan dari capaian dan persentase capaian di tahun sebelumnya yakni pada objek pendapatan Pajak Daerah senilai Rp10.740.841.614,61 dan Lain-Lain PAD Yang Sah senilai Rp70.195.303.544,76. Jenis Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dan Pendapatan BLUD pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan pada kelompok Pajak Daerah merupakan jenis pendapatan yang paling tinggi kontribusinya terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023.

1) Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene tergolong ke kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian berkisar di antara 8%-12%

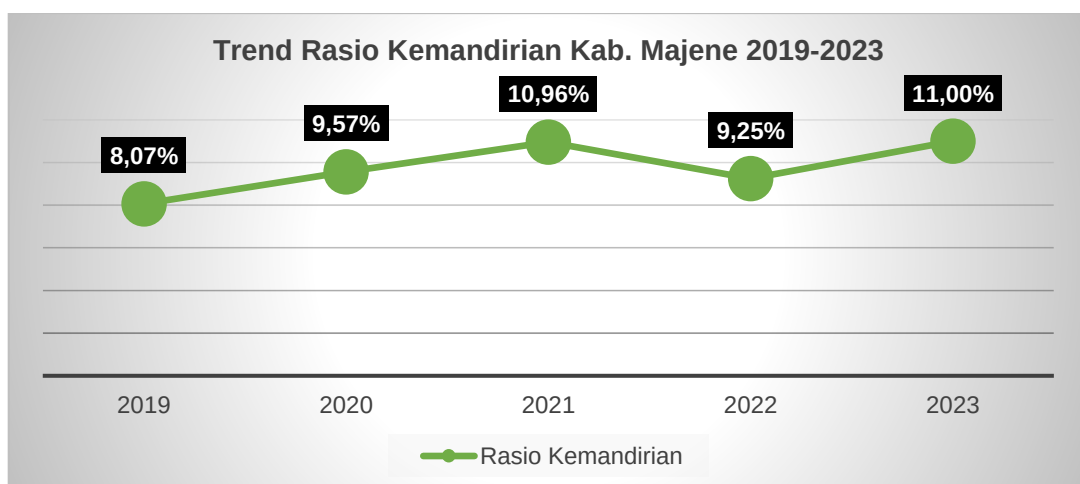
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Sulawesi Barat dan pinjaman daerah.

Tabel 5.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

- Pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berikut dapat kami gambarkan tren rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir.



Grafik 5.2 Tren Rasio Kemandirian Kabupaten Majene 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene berada di persentase 11,00% tergolong ke kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian berkisar di antara 8%-12%. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Majene dengan Pemerintah Pusat dalam hubungan keuangannya memiliki pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dan kecenderungan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan karakteristik lokal daerah termasuk rendah. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2021, sedangkan rasio kemandirian terendah terjadi di tahun 2019.

2) Analisis Rasio Efektivitas Daerah

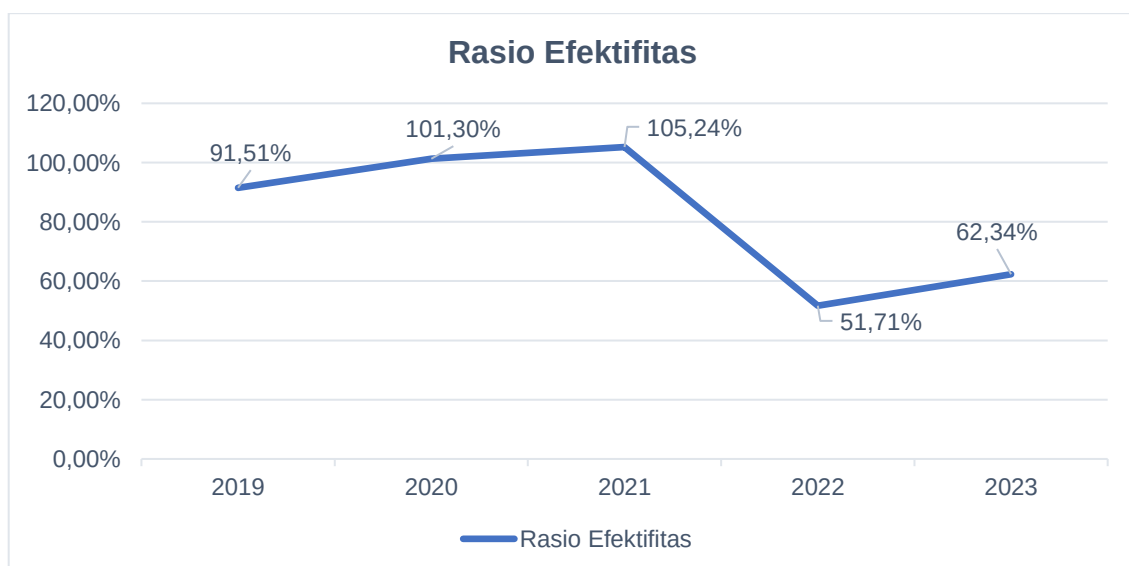
Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang lima tahun terakhir tergolong cukup efektif, namun pada Tahun Anggaran 2023 mencatat rasio efektivitas terendah, yakni 62,34%.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria rasio efektivitas daerah dapat dikelompokkan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 5.4 Kriteria Rasio Efektivitas Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Tidak Efektif	$X < 100\%$
Efektif Berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 5.3 Tren perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene 2019-2023

Berdasarkan Grafik 5.3 tersebut rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang empat tahun terakhir tergolong cukup efektif dimana rasio efektivitas berada di atas 100% kecuali pada tahun 2019. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada periode sebelumnya di tahun anggaran 2021 dimana efektivitas pemenuhan target pendapatan mencapai 105,24%. Sedangkan rasio efektivitas terendah terjadi di tahun anggaran 2022 dimana efektivitas pemenuhan target pendapatan hanya di persentase 51,71%. Pada periode tersebut rasio efektivitas Kabupaten Majene termasuk dalam kriteria tidak efektif karena capaian rasionya berada di bawah 100%.

Tahun Anggaran 2023 mencatat rasio efektivitas yang terbilang rendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene hanya mencapai 62,34%. Capaian di tahun ini terkoreksi cukup dalam dari tahun 2021 yang merupakan tren tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir namun mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2022. Secara kuantitas, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada seluruh jenis pendapatan pada periode ini pada dasarnya mencatat realisasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, kecuali pada jenis Lain-Lain PAD Yang Sah. Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah pada tahun ini mencatat capaian realisasi yang sangat rendah di angka 60,74%. Kondisi ini diakibatkan beberapa objek pendapatan yang menetapkan target yang cukup tinggi, namun tidak dapat direalisasikan secara optimal.

3) Analisis Rasio Efisiensi Daerah

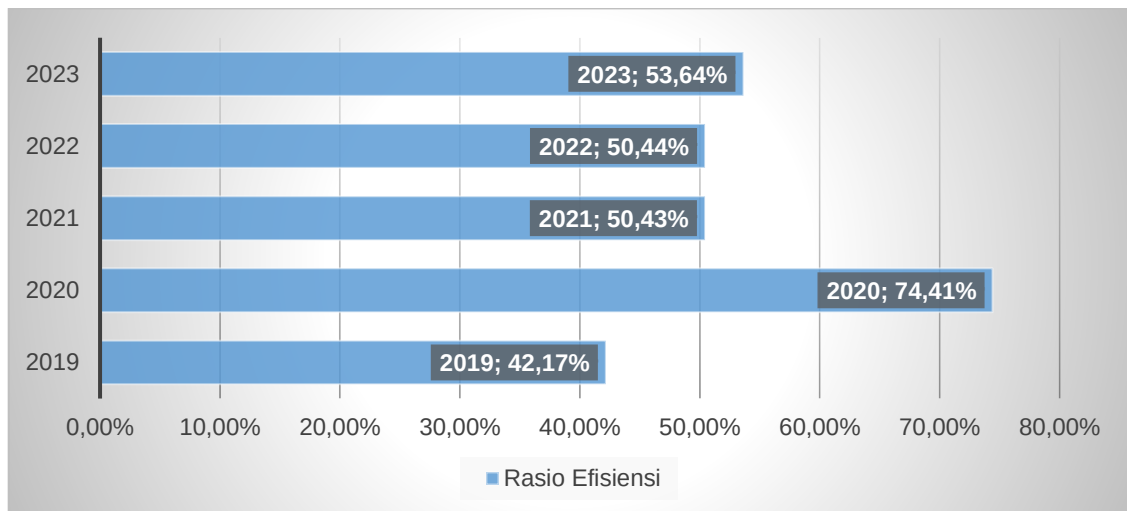
Kabupaten Majene masih termasuk efisien selama lima tahun. Rasio efisiensi tertinggi Kabupaten Majene terjadi pada tahun anggaran 2021

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%.

Tabel 5.5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
Tidak efisien	$X > 100\%$
Kurang Efisien	$X = 90\%-100\%$
Cukup Efisien	$X = 80\%-90\%$
Efisien	$X = 60\%-80\%$
Sangat Efisien	$X = < 60\%$

Penilaian rasio efisiensi Kabupaten Majene dilakukan dengan menggunakan pendekatan realisasi pajak dan retribusi sebagai kapasitas riil keuangan daerah. Realisasi pajak dan retribusi tersebut kemudian dibandingkan anggaran operasional Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 5.4 Tren Perkembangan Rasio Efisiensi Kabupaten Majene 2019-2023

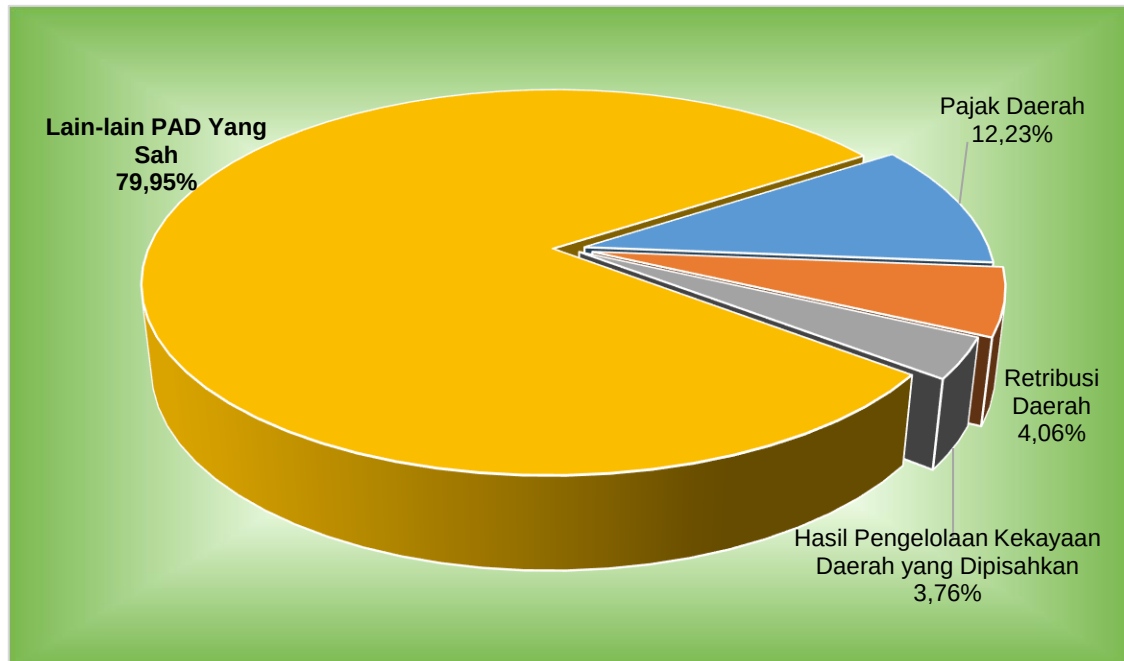
Berdasarkan Grafik 5.4 di atas tergambar bahwa secara umum Kabupaten Majene masih termasuk pada kriteria rasio efisiensi yang cukup baik. Rasio efisiensi Majene pada tahun 2023 masih berada pada kategori sangat efisien dengan rasio di angka 53,64%. Rasio ini lebih baik dibanding 2 (dua) tahun sebelumnya di tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2023 sangat efisien dalam mengumpulkan penerimaan daerah di kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir termasuk fluktuatif. Rasio efisiensi tertinggi Kabupaten Majene terjadi pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada masa Pandemi Covid-19. Rasio efisiensi terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Pada periode tersebut biaya operasional dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi namun tidak memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Namun pada periode tersebut rasio efisiensi Kabupaten Majene masih termasuk pada kategori efisien. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.838.163.462,00	87.794.782.521,37	62,34	70.563.315.736,67
Pendapatan Pajak Daerah	15.634.764.909,00	10.740.841.614,61	68,70	9.461.193.553,39
Pendapatan Retribusi Daerah	6.295.728.500,00	3.559.947.334,00	56,55	5.803.175.060,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.333.308.081,00	3.298.690.028,00	98,96	3.333.308.081,00
Lain-lain PAD yang sah	115.574.361.972,00	70.195.303.544,76	60,74	51.965.639.042,28

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan realisasinya pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5.5 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kab. Majene TA. 2023

5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Pajak Daerah	10.740.841.614,61	9.461.193.553,39	1.279.648.061,22	13,53
Jumlah	10.740.841.614,61	9.461.193.553,39	1.279.648.061,22	13,53

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp15.634.764.909,00, terealisasi senilai Rp10.740.841.614,61

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp15.634.764.909,00 sampai dengan per 31 Desember terealisasi senilai Rp10.740.841.614,61 atau 68,70%. Dibanding dengan Tahun Anggaran 2022, realisasi TA 2023 mengalami Kenaikan senilai Rp1.279.648.061,22 atau 13,53% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	15.634.764.909,00	10.740.841.614,61	68,70	9.461.193.553,39
Pajak Hotel	1.435.422.750,00	214.517.545,00	14,94	213.007.920,00
Pajak Restoran	1.479.204.000,00	1.465.826.729,00	99,10	1.511.655.978,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Hiburan	262.800.000,00	93.441.500,00	35,56	78.512.250,00
Pajak Reklame	375.683.750,00	172.779.250,00	45,99	179.894.875,00
Pajak Penerangan Jalan	5.094.254.292,00	5.744.021.642,00	112,75	5.179.560.351,00
Pajak Parkir	57.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	2.120.000,00	7,07	15.130.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.600.000.000,00	310.636.105,00	19,41	345.788.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.500.000.117,00	1.162.824.602,00	46,51	946.269.171,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.800.000.000,00	1.574.674.241,61	56,24	991.375.008,39

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir secara keseluruhan jenis pajak dari Pajak Daerah berada pada tren realisasi yang rendah dari target penerimaan yang ditetapkan. Capaian realisasi terendah terdapat pada Pajak Parkir sebesar 0,00%, disusul Pajak Sarang Burung Walet 7,07%, Pajak Hotel 14,94%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang hanya terealisasi 19,41%, Pajak Hiburan sebesar 35,56%, Pajak Reklame sebesar 45,99% serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 46,51%. Adapun penyebab dan atau kendala tidak tercapainya target perolehan pajak pada komponen-komponen tersebut:

- 1) Pajak Parkir belum dapat direalisasikan dikarenakan belum adanya aturan pasti tentang yang mendasari realisasinya.
- 2) Pajak Hiburan dan Pajak Hotel pada periode berjalan belum dapat direalisasikan dengan optimal. Hal ini masih dipengaruhi oleh suasana *Post Pandemic Covid-19* dimana aktivitas perekonomian di masyarakat dapat dikatakan sudah bertumbuh namun belum pada kondisi yang ideal sebagaimana sebelum masa *Covid-19*. Selain itu, objek pajak yang ada memang masih terbatas serta kurang intensif dilakukan pembaruan. Umumnya perolehan dari sektor ini hanya efektif pada tempat hiburan yang beroperasi setiap hari seperti tempat karaoke. Adapun pada objek seperti hiburan umum dan anak-anak kontribusinya minim dikarenakan operasionalnya yang tidak setiap hari.
- 3) Capaian Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan pada tahun 2022 bisa dikatakan sangat rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan. Salah satu titik permasalahannya adalah pemungutan atas pajak ini hanya dapat dilakukan secara efektif pada pelaku usaha swasta atau Pihak Ketiga yang mengerjakan proyek fisik APBD baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat maupun APBD Kabupaten Majene. Adapun pada objek lain seperti pemilik usaha tambang maupun penyelenggara proyek fisik yang bersumber dari pembiayaan APBN tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kewenangan izin tambang berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta penyelenggara program APBN lebih sering tidak melaporkan proyek yang dikerjakan pada pemerintah daerah setempat.



- 4) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Perkotaan dan Perdesaan tidak mencapai target disebabkan data wajib pajak yang tidak andal akibat belum di-update. Keadaan ini menyebabkan penetapan pajak oleh pemerintah daerah sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya sering terdapat penetapan yang ganda, nilai penetapan yang tidak relevan, dan penetapan atas objek tanah yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Retribusi Daerah	3.559.947.334,00	5.803.175.060,00	(2.243.227.726,00)	(38,66)
Jumlah	3.559.947.334,00	5.803.175.060,00	(2.243.227.726,00)	(38,66)

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp6.295.728.500.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada periode APBD Pokok TA 2023 senilai Rp6.295.728.500,00 jumlah retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp3.559.947.334,00 atau 56,55%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp2.243.227.726,00 atau 38,66%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	6.295.728.500,00	3.559.947.334,00	56,55	5.803.175.060,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.994.881.900,00
Retribusi Pelayanan Persampahan	550.000.000,00	376.801.000,00	68,51	399.195.700,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	484.560.000,00	246.953.500,00	50,96	170.048.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.642.204.000,00	907.113.000,00	55,24	994.136.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	18.000.000,00	2.225.000,00	12,36	3.875.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	9.000.000,00	3.225.000,00	35,83	9.000.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	219.592.500,00	224.508.750,00	102,24	175.691.250,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	857.664.000,00	370.744.000,00	43,23	691.043.113,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	127.800.000,00	103.020.000,00	80,61	106.293.100,00
Retribusi Terminal	115.440.000,00	32.144.000,00	27,84	39.578.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	638.520.000,00	371.317.500,00	58,15	382.683.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	269.065.400,00	26,91	518.652.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	21.000.000,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.448.000,00	626.730.184,00	104,38	289.947.997,00
Retribusi Izin Trayek	11.500.000,00	5.100.000,00	44,35	7.150.000,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Penerimaan Retribusi Daerah dapat terealisasi di angka rata-rata 56,55%. Persentase realisasi paling tinggi terdapat pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 104,38%, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 102,24% dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 100,00%. Sementara realisasi paling rendah terdapat pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang hanya mencatat realisasi sebesar 12,36%, lalu berikutnya pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan capaian 26,91%, Retribusi Terminal 27,84%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mencapai 35,83%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 43,23% dan Retribusi Izin Trayek yang hanya mencatat realisasi hingga 44,35%.

- 1) Retribusi Pelayanan Persampahan sama halnya dengan pendapatan pada pelayanan kesehatan yang mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Realisasi yang tercatat per 31 Desember 2023 senilai Rp376.801.000,00 sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai Rp399.195.700,00.
- 2) Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penerimaan atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha. Pelayanan pasar mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar (Rp87.023.000,00) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp907.113.000,00 yang mengalami penurunan 8,75% dari tahun sebelumnya senilai Rp994.136.000,00.
- 3) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan mencatat realisasi pendapatannya per 31 Desember 2023 senilai Rp3.225.000,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai Rp9.000.000,00 atau sebesar 64,17% masih jauh dari target.
- 4) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah pada tahun anggaran 2023 juga mencatat capaian yang positif dimana target yang ditetapkan tercapai 100%. Pendapatan ini juga dikelola oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dimana terdapat unit usaha Depot Air Minum. Tren penerimaan depot air minum ini senantiasa mencapai target dari tahun ke tahun.
- 5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu komponen PAD yang memiliki realisasi yang lebih dari 100%. Selain itu terdapat progres yang positif dimana terjadi kenaikan senilai Rp336.782.187,00 realisasi dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp289.947.997,00 dengan rasio kenaikan sebesar 116,15%.
- 6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada TA 2023 ini kembali berhasil mencatat realisasi yang tinggi yakni 102,24% sebagaimana tahun sebelumnya. Tantangan dalam pengelolaan retribusi adalah kondisi dimana umumnya objek pajaknya tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Majene. Sebagian berdomisili di wilayah Makassar dan sebagian lagi bahkan merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta. Namun pada dasarnya objek retribusi adalah objek yang patuh, akan tetapi sering kali terlambat dalam melaksanakan



pembayaran atas retribusinya. Pada tahun ini Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian secara proaktif telah melaksanakan penagihan retribusi di awal waktu kepada wajib pajak yang bersangkutan sehingga realisasi dapat maksimal hasilnya.

- 7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercatat sebagai objek pendapatan dengan capaian realisasi terendah pada tahun anggaran 2023, yakni 12,36%. Objek pendapatan ini dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Majene dimana terdapat fasilitas berupa mobil operasional penyedotan kakus serta fasilitas daur ulang limbah. Kendala tidak tercapainya realisasi pada objek retribusi ini adalah dikarenakan belum tersosialisasikannya kepada masyarakat tentang pentingnya proses sanitasi pada kakus dan telah tersedianya fasilitas penyedotan dan daur ulang limbah rumah tangga pada pemerintah daerah.
- 8) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan salah satu penerimaan yang memiliki persentase penyerapan realisasi yang tinggi senilai 80,61%. Namun jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, penerimaan ini memiliki progres penurunan senilai Rp3.273.100,00 dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp106.293.100,00.
- 9) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan memiliki realisasi 0,00% disebabkan tidak dianggarkannya di tahun 2023. Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Secara umum pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan telah berjalan cukup baik, namun masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan mengalami fluktuasi yang cukup beragam dari tahun ke tahun sehingga sering terjadi penetapan target yang terlalu optimistis.
- 10) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah yang mempunyai tren realisasi tahunan yang selalu rendah. Namun tahun ini mengalami kenaikan senilai Rp76.905.500,00. Selain target yang ditetapkan tiap tahunnya terlalu tinggi dibanding objek pungutnya, potensi kebocoran oleh oknum selalu menjadi permasalahan internal di Dinas Perhubungan. Pengendalian atas pengelolaan retribusi pada Dinas Perhubungan selalu menjadi catatan setiap tahunnya baik di internal Pemerintah Kabupaten Majene maupun di pihak DPRD Kabupaten Majene ketika melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Potensi perolehan atas retribusi parkir pada dasarnya cukup tinggi mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan penambahan pengguna kendaraan bermotor di kawasan Majene diakibatkan rutinitas sebagai kawasan pengembangan pendidikan tinggi. Objek parkir dengan kontribusi paling tinggi terhadap objek pendapatan ini adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Sedangkan objek retribusi parkir yang masih kurang kontribusinya adalah terminal, pasar, RSUD Majene dan tempat-tempat umum lainnya.
- 11) Retribusi Izin Trayek yang pengelolaannya merupakan tugas pokok Dinas Perhubungan pada periode sebelumnya tercatat dengan realisasi Rp7.150.000,00 namun tahun ini mengalami penurunan sebesar (Rp2.050.000,00) dengan realisasi senilai Rp5.100.000,00. Retribusi Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Pasca Pandemi Covid-19 geliat



perekonomian sebenarnya sudah cukup berkembang namun belum sebagaimana keadaan sebelum Covid-19.

- 12) Retribusi Terminal berdasarkan penyajian tabel di atas merupakan sektor pendapatan yang termasuk rendah realisasinya dan juga mengalami penurunan sebesar (Rp7.434.000,00) dari tahun lalu. Retribusi Terminal sebagaimana retribusi lainnya di Dinas Perhubungan tidak dapat direalisasikan secara optimal dikarenakan faktor kurang maksimalnya infrastruktur pelayanan. Tidak maksimalnya pelayanan juga dipengaruhi oleh minimnya aparatur pengelola serta sarana yang memadai dalam melaksanakan operasional pemungutan pendapatan.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.298.690.028,00	3.333.308.081,00	(34.618.053,00)	(1,04)
Jumlah	3.298.690.028,00	3.333.308.081,00	(34.618.053,00)	(1,04)

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp3.298.690.028,00, merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bank

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yakni Bank Sulselbar. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp3.333.308.081,00 dan terealisasi senilai Rp3.298.690.028,00 atau 98,96%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut mengalami penurunan senilai (Rp34.618.053,00) atau (1,04)% dibandingkan dengan TA 2022.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Lain-lain PAD Yang Sah	70.195.303.544,76	51.965.639.042,28	18.229.664.502,48	35,08
Jumlah	70.195.303.544,76	51.965.639.042,28	18.229.664.502,48	35,08

Lain-lain PAD yang Sah tercatat terealisasi mencapai Rp70.195.303.544,76

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp115.574.361.972,00, namun sampai dengan per 31 Desember hanya terealisasi senilai Rp70.195.303.544,76 atau 60,74%. Capaian ini cukup signifikan perbedaannya bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar yakni Rp51.965.639.042,28. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada TA 2023 mengalami kenaikan senilai Rp18.229.664.502,48 atau 35,08% dari periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	115.574.361.972,00	70.195.303.544,76	60,74	51.965.639.042,28
Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan	38.200.000,00	20.655.500,00	54,07	122.319.500,00
Hasil Kerja Sama Daerah	55.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	2.750.000.000,00	1.078.241.558,25	39,21	1.230.628.218,33
Pendapatan Bunga	429.601.095,00	243.973.457,00	56,79	305.753.427,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	1.862.349.475,73	186,23	411.905.414,55
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	32.926.473,78	65,85	7.219.524,40
Pendapatan Denda Pajak	0,00	4.414.100,00	0,00	2.430.748,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	150.903.356,00	0,00	208.928.263,00
Pendapatan BLUD	56.306.560.877,00	66.801.839.624,00	118,64	42.321.979.336,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	7.354.474.611,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa hanya terdapat 2 (dua) jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mencatat surplus pendapatan dari target penerimaan yakni Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang mencapai 186,23% serta Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan persentase capaian di angka 118,64%.

Objek pendapatan yang mencatat realisasi paling rendah adalah Hasil Kerja Sama Daerah dengan realisasi nihil. Sementara capaian realisasi pada Penerimaan Jasa Giro yang hanya mencapai 39,21%, Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebesar 54,07%, dan Pendapatan Bunga sebesar 56,79%. Permasalahan yang melatarbelakangi tercapai dan tidaknya target pendapatan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penjualan atas Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan sebagai barang rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kegiatan operasional. Pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan penjualan pada sebagian barang milik daerah dalam bentuk peralatan dan mesin seperti kursi, laptop, dan sebagainya. Penjualan ini dilakukan secara langsung setelah melalui proses verifikasi di lapangan.
- 2) Objek pendapatan BLUD pada jenis Lain-Lain PAD Yang Sah lainnya mencatat surplus dengan persentase realisasi yang cukup tinggi yakni 118,64%. RSUD Majene mencatat kontribusi paling tinggi dimana pendapatan BLUD nya tercatat terealisasi sebesar 127,45%. Capaian realisasi tersebut dipengaruhi oleh salah satunya pendapatan yang diterima oleh RSUD Majene atas penanganan pasien terinfeksi *Covid-19*. Selain itu sejak tahun 2020 yang lalu Kabupaten Majene telah dapat menyelenggarakan pengelolaan BLUD disebabkan karena besarnya pendapatan bertambahnya jumlah BLUD menjadi 12 yakni RSUD Majene, beserta



seluruh puskesmas yang ada di Kab. Majene. Selain itu pendapatan yang bersumber dari klaim terhadap BPJS tidak lagi terlambat dibayarkan.

- 3) Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah mengalami kenaikan realisasi yang signifikan yakni Rp1.450.444.061,18, rasio kenaikan mencapai 352,13% dari realisasi tahun 2022. Kenaikan tersebut disebabkan hasil temuan LHP BPK Temuan BPK 2022 LHP No.15/LHP/XIX.MAM/12/2022 dan No.15.B/LHP/XIX.MAM/12/2022 pada tahun sebelumnya yang harus segera dibayarkan di tahun 2023.
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang diterima akibat terlambatnya penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Jenis penerimaan ini mencatat realisasi senilai Rp32.926.473,78 dari target yang direncanakan senilai Rp50.000.000,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat penerimaan senilai Rp7.219.524,40.
- 5) Penerimaan Jasa Giro merupakan penerimaan yang sumbernya berasal dari penempatan uang pada bank. Penerimaan jasa giro mencatat realisasi sebesar 39,21% sebanyak Rp1.078.241.558,25. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan giro mengalami penurunan sebesar 12,38% dimana tahun sebelumnya tercatat realisasi jasa giro senilai Rp1.230.628.218,33.
- 6) Pendapatan dari pengembalian merupakan setoran pengembalian atas gaji dan tunjangan tahun sebelumnya. Realisasi yang tercatat sampai 31 Desember 2023 senilai Rp150.903.356,00 Nilai ini mengalami penurunan sebesar 27,77% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp208.928.263,00.
- 7) Pendapatan Bunga tahun ini mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada target yang ditetapkan di tahun 2023 memang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya periode sebelumnya di tahun 2022. Selain itu faktor menurunnya jumlah anggaran APBD yang dikelola Pemerintah Kabupaten Majene tentu berpengaruh terhadap nilai transaksi dan besaran bunga yang diperoleh atas transaksi tersebut. Keseluruhan faktor ini menyebabkan realisasi pendapatan bunga masih tergolong rendah di antara kelompok pendapatan yang lainnya.
- 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah pada tahun 2023 mencatat realisasi paling rendah yaitu sebesar 0,00% namun realisasi tahun ini mengalami kenaikan yakni Rp1.983.352,00 dari realisasi tahun sebelumnya diantara rincian objek pendapatan yang lain dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi ini merupakan realisasi Pendapatan Denda Pajak atas pajak hotel, Pajak Restoran dan Sejenisnya, Pajak Pasir dan Kerikil, PBBP2, dan Denda BPHTB-Pemindahan Hak.
- 9) Hasil Kerja Sama Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain. Objek pendapatan ini merupakan salah satu yang tidak mencatatkan realisasi sama sekali (nihil) sepanjang Tahun Anggaran 2023. Penetapan target pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada proyeksi pendapatan yang diperkirakan diterima di tahun berjalan dari hasil pengelolaan *Participating Interest* Blok Sebuk. Kabupaten Majene bersama 3 (tiga) pemerintah daerah lainnya masing-masing Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Kotabaru diketahui ditetapkan sebagai daerah yang berhak mendapatkan dana bagi hasil yang dikenal sebagai *Participating Interest* (PI) atas pengelolaan

tambang minyak dan gas bumi pada Blok Sebuku melalui Badan Usaha Milik Daerah masing-masing. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara. Berikut kami uraikan perjalanan realisasi Partisipasi Interest 10% Blok Sebuku bagi Pemerintah Kabupaten Majene

- Berdasarkan Notulen Rapat Wakil Presiden pada tanggal 25 Maret tahun 2015, hasil *Participating Interest* wilayah pantai (Wilayah Kerja) Sebuku disepakati akan didistribusi secara merata dan menjadi hak 4 (empat) wilayah/pemerintah daerah sebagaimana disebutkan di atas.
- Pemerintah daerah dan BUMD menindaklanjuti Nota Kesepakatan tersebut dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah di daerah masing-masing yang akan ditetapkan sebagai penerima dana *Participating Interest*. Pemerintah Kabupaten Majene menunjuk Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene (AUM) sebagai BUMD yang akan menerima dan mengelola dana *Participating Interest* tersebut. Adapun Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjuk PT. Sebuku Energi Malaqbi (SEM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjuk PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan (BBKS), dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru menunjuk Perusda Saijaan Mitra Lestari (SML).
- Keempat pemerintah daerah memberikan penyertaan modal kepada keempat BUMD tersebut untuk menggunakan jasa konsultan yakni Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri - Institut Teknologi Bandung (LAPI-ITB) pada tahun 2018 untuk mendampingi BUMD dalam melaksanakan *Due Diligent (Open Data)* dari pihak Kontraktor Kerja Sama (K3S) Pearl Oil Sebuku Ltd. kepada BUMD tentang potensi dan proyeksi hasil pengelolaan migas pada Wilayah Kerja Sebuku.
- Pada tahun 2020 dilakukan pembentukan BUMD konsorsium yakni PT. Dangsanak Banua Sebuku (DBS) yang selanjutnya akan ditunjuk sebagai representasi keempat BUMD sebagai penerima Partisipasi Interest. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan pada Permen ESDM Nomor 37 tahun 2016 bahwa BUMD yang akan bertindak sebagai penerima dana *Participating Interest* tidak boleh melakukan usaha/bisnis lain selain Usaha Hulu Migas khusus pengurusan *Participating Interest*.
- Maret 2022 Menteri ESDM mengeluarkan surat Nomor T-93/MG.04/MEM.M/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal pelaksanaan Partisipasi Interes 10% di Wilayah Kerja Sebuku dimana dalam surat tersebut menteri menetapkan PT. DBS sebagai *Indonesian Participant* dalam Kontrak Kerja Sama Sebuku dan meminta kepada Pearl Oil Sebuku Ltd untuk melakukan penandatanganan *Farmout Agreement* dan *Operating Agreement* dengan PT. DBS dalam rangka pengalihan PI 10% Wilayah Kerja Sebuku.
- Agustus 2022, Pearl Oil Sebuku Ltd. mengajukan penawaran kepada PT. DBS dalam rangka melaksanakan penandatanganan *agreement* dengan kontraktor kerja sama dalam rangka merealisasikan PI WK Sebuku.
- Desember 2022, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) mengeluarkan surat dengan Nomor SRT-0059/SKKIE0000/2022/S9 tanggal 30 Desember 2022 perihal Pengalihan Partisipasi Interest 10% di Wilayah Kerja



Sebuku dan menetapkan bahwa PT.DBS telah memenuhi syarat untuk menerima pengalihan PI 10% di WK Sebuku

- Januari 2023 Menteri ESDM menerbitkan Surat dengan Nomor: T-38/MG.04/MEM.M/2023 kepada Kepala SKK Migas yang menetapkan Persetujuan Pengalihan *Partisipating Interest* 10% di Wilayah Kerja Sebuku dan menetapkan kewajiban Pearl Oil Sebuku Ltd untuk memberikan bagi hasil pengelolaan minyak dan gas bumi di Wilayah Sebuku kepada PT. Dangsanak Banua Sebuku.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	773.902.149.240,00	737.695.311.296,00	36.206.837.944,00	4,91
Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.379.027.542,00	23.878.098.328,00	500.929.214,00	2,10
Jumlah	798.281.176.782,00	761.573.409.624,00	36.707.767.158,00	4,82

Pendapatan Transfer pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp791.537.242.000 sampai dengan per 31 Desember terealisasi senilai Rp798.281.176.782,00 atau 100,96 %

Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa serta transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp791.537.242.000,00 sampai dengan per 31 Desember terealisasi senilai Rp798.281.176.782,00 atau 100,96%. Bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp761.573.409.624,00, realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2023 mengalami peningkatan senilai Rp36.707.767.158,00 atau 4,82% atau dengan rincian sebagai berikut.

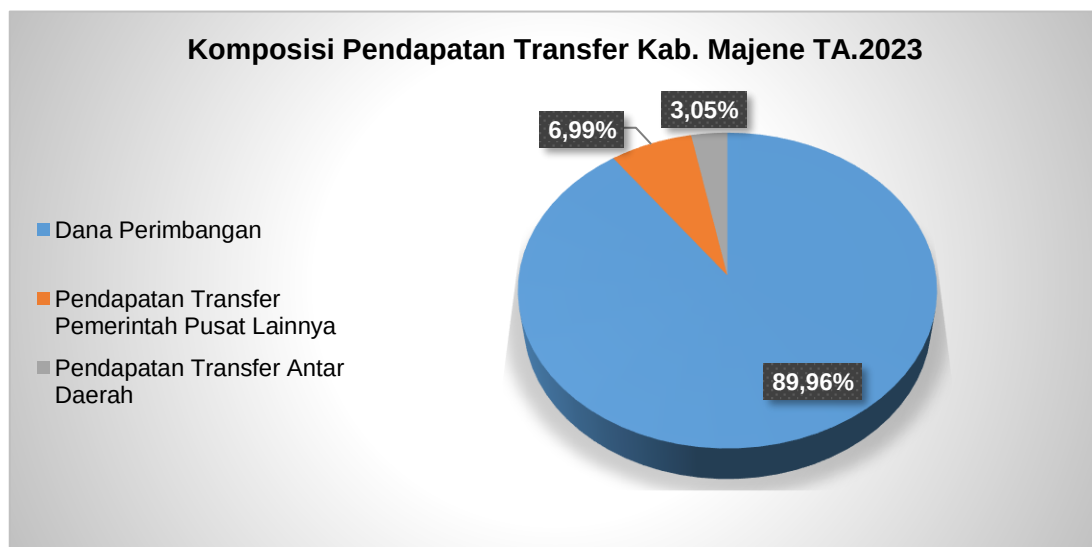
Tabel 5.10 Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	766.527.242.000,00	773.902.149.240,00	100,96	737.695.311.296,00
Dana Perimbangan	712.341.115.000,00	718.086.870.240,00	100,81	679.808.765.296,00
Dana Bagi Hasil	5.159.841.000,00	8.064.980.017,00	156,30	10.784.967.445,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Umum	503.503.051.000,00	508.603.740.400,00	101,01	485.848.952.931,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	80.134.213.000,00	78.097.585.458,00	97,46	74.119.888.581,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.544.010.000,00	123.320.564.365,00	99,82	109.054.956.339,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01	57.886.546.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	2.301.731.000,00
Dana Desa	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01	55.584.815.000,00
Transfer Antar Daerah	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48	23.878.098.328,00
Pendapatan Bagi Hasil	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48	23.814.548.328,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	63.550.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer	791.537.242.000,00	798.281.176.782,00	100,85	761.573.409.624,00

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas dapat diperhatikan bahwa jenis pendapatan transfer yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene masih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat pada jenis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berikut komposisi Pendapatan Transfer pemerintah daerah berdasarkan persentase per jenisnya disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5.6 Komposisi Pendapatan Transfer

Berdasarkan grafik di atas tergambar bahwa pendapatan transfer dari eksternal pemerintah daerah sebagai sektor pendapatan yang paling dominan dalam APBD Kabupaten Majene, transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil masih merupakan komponen terbesar yang mencapai 89,96% dari total pendapatan transfer. Dana Perimbangan merupakan kelompok transfer yang sejatinya dialokasikan dalam rangka mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Komponen dana perimbangan tidak banyak dipengaruhi kinerja pemerintah daerah, namun lebih banyak mempertimbangkan aspek tipologi daerah berdasarkan karakteristik seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan semacamnya. Adapun sektor transfer lainnya seperti Dana Insentif Daerah (DID), bagi hasil pajak, serta dana desa merupakan kelompok transfer yang bergantung kepada indikator yang lebih mengarah ke kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih tergolong daerah yang belum memiliki kemandirian fiskal untuk membiayai kebutuhannya sehingga masih sangat bergantung pada kelompok pendapatan transfer.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pusat

Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa serta transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dana Perimbangan	718.086.870.240,00	679.808.765.296,00	38.278.104.944,00	5,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	55.815.279.000,00	57.886.546.000,00	(2.071.267.000,00)	(3,58)
Jumlah	773.902.149.240,00	737.695.311.296,00	36.206.837.944,00	2,05

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	8.064.980.017,00	10.784.967.445,00	(2.719.987.428,00)	(25,22)
Jumlah	8.064.980.017,00	10.784.967.445,00	(2.719.987.428,00)	(25,22)

Kelompok Dana Bagi Hasil (DBH) pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp5.159.841.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp8.064.980.017,00 atau 156,30%, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.11 Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.159.841.000,00	8.064.980.017,00	156,30	10.784.967.445,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	626.005.000,00	1.206.172.954,00	192,68	5.901.342.370,00
DBH PPh Pasal 21	2.520.081.000,00	2.798.072.954,00	111,03	2.794.495.744,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	38.588.051,00	0,00	80.862.184,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	4.190.000,00	5.171.284,00	123,42	41.720.147,00
DBH Sumber Daya Alam Perkebunan Sawit	0,00	1.794.766.000,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	46.399.000,00	47.289.563,00	101,92	8.236.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.166.000,00	2.174.919.211,00	110,79	1.958.311.000,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dana Alokasi Umum (DAU)	508.603.740.400,00	485.848.952.931,00	22.754.787.469,00	4,68
Jumlah	508.603.740.400,00	485.848.952.931,00	22.754.787.469,00	4,68

Kelompok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp503.503.051.000,00 dan sampai pada akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp508.603.740.400,00 atau 101,01%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp22.754.787.469,00 atau 4,68% dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dana Alokasi Khusus Fisik	78.097.585.458,00	74.119.888.581,00	3.977.696.877,00	5,37
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	123.320.564.365,00	109.054.956.339,00	14.265.608.026,00	13,08
Jumlah	201.418.149.823,00	183.174.844.920,00	18.243.304.903,00	9,96

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp201.418.140.823,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp203.678.223.000,00 atau 98,89%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp18.243.304.903 atau 18,45% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:



1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan senilai Rp80.134.213.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp78.097.585.458,00 atau 97,46% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2023

Uraian	2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.134.213.000,00	78.097.585.458,00	97,46
Dana Alokasi Khusus, Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	80.134.213.000,00	78.097.585.458,00	97,46

2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan senilai Rp123.544.010.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp123.320.564.365,00 atau 99,82% dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA. 2023

Uraian	2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	123.544.010.000,00	123.320.564.365,00	99,82
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	62.411.839.000,00	62.411.837.000,00	100,00
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	55.973.500.000,00	55.973.500.000,00	100,00
- Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	6.438.339.000,00	6.438.337.000,00	100,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	1.518.000.000,00	1.518.000.000,00	100,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	1.518.000.000,00	1.518.000.000,00	100,00
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	27.323.300.000,00	27.318.039.110,00	99,98
- Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kinerja Tahap 1	14.478.889.110,00	14.478.889.110,00	100,00
- Dana Bantuan Operasional Sekolah, Reguler Tahap 2	12.844.410.890,00	12.839.150.000,00	99,96
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	21.843.596.000,00	21.079.586.181,00	96,50
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan	17.114.845.000,00	13.607.703.781,00	79,51
- Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.728.751.000,00	7.471.882.400,00	158,01
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan	8.097.300.000,00	8.782.492.690,00	108,46
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	3.697.200.000,00	4.382.931.000,00	118,55



Uraian	2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan	3.700.100.000,00	3.700.100.000,00	100,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Museum	700.000.000,00	699.461.690,00	99,92
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	514.543.224,00	86,04
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Perlindungan Perempuan	598.000.000,00	514.543.224,00	86,04
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	532.100.000,00	476.191.160,00	89,49
- Dana Fasilitas Penanaman Modal	532.100.000,00	476.191.160,00	89,49
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.219.875.000,00	1.219.875.000,00	100,00
- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.219.875.000,00	1.219.875.000,00	100,00

5.1.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah (DID)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	2.301.731.000,00	(2.301.731.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	2.301.731.000,00	(2.301.731.000,00)	(100,00)

Dana Insentif Daerah (DID) sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp0,00 dari yang dianggarkan senilai Rp0,00 atau 0,00%

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang Tata Kelola Keuangan Daerah, Pelayanan Umum Pemerintahan, dan Pelayanan Dasar Publik yang sampai dengan per 31 Desember 2023 tidak menganggarkan insentif. Sementara tahun 2022 terealisasi senilai Rp2.301.731.000,00 dengan besaran Anggaran senilai Rp2.301.731.000,00.

5.1.1.2.1.5 Dana Desa

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Dana Desa	55.815.279.000,00	55.584.815.000,00	230.464.000,00	0,41
Jumlah	55.815.279.000,00	55.584.815.000,00	230.464.000,00	0,41

Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer langsung ke rekening desa namun tetap dilaporkan dalam APBD Kabupaten Majene serta digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat yang sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp55.815.279.000,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp54.186.127.000,00 atau 1,03%. hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2022, Pelampauan realisasi tahun 2023 senilai Rp1.629.152.000,00 merupakan tambahan Dana Desa



Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No.S-129/PK/2023 pada 14 Desa yang mendapatkan tambahan anggaran sebagai desa berkembang. Untuk Rincian penerimaan Dana Desa dapat lebih jelas dilihat pada **lampiran 1** laporan ini.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	24.379.027.542,00	23.878.098.328,00	500.929.214,00	2,10
Jumlah	24.379.027.542,00	23.878.098.328,00	500.929.214,00	2,10

Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan senilai Rp25.010.000.000,00 sampai pada akhir Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan senilai Rp24.379.027.542,00 atau 97,48%.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Bagi Hasil	24.379.027.542,00	23.814.548.328,00	564.479.214,00	2,37
Jumlah	24.379.027.542,00	23.814.548.328,00	564.479.214,00	2,37

Pendapatan Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp25.010.000.000,00 sampai pada akhir Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan senilai Rp24.379.027.542,00 atau 97,48%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14 Dana Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil	25.010.000.000,00	24.379.027.542,00	97,48
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.463.526.283,00	3.320.614.675,00	95,87
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.684.608.873,00	2.503.489.090,00	67,94
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.589.243.175,00	7.881.075.534,00	141,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	62.434.269,00	20.028.121,00	32,08
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.210.187.400,00	10.653.820.122,00	87,25

5.1.1.2.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Bantuan Keuangan	0,00	63.550.000,00	(63.550.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	63.550.000,00	(63.550.000,00)	(100,00)

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau desa penerima. Contohnya adalah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Ke Kabupaten/Kota Serta Desa dan Bantuan Keuangan Dari Kabupaten/Kota Ke Desa. Tahun 2023 tidak terdapat anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan, sementara tahun 2022 terdapat realisasi senilai Rp63.550.000,00.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LRA	1.002.000.000,00	1.227.000.000,00	(225.000.000,00)	(18,34)
Jumlah	1.002.000.000,00	1.227.000.000,00	(225.000.000,00)	(18,34)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.002.000.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.002.000.000,00 dari jumlah yang telah dianggarkan senilai Rp2.160.000.000,00 atau 46,39%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp225.000.000,00 atau 18,34% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp1.227.000.000,00. Berikut perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5.7 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019-2023

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat cenderung fluktuatif. Pada tahun anggaran 2020 dan 2021 pendapatan hibah terealisasi cukup tinggi disebabkan karena perubahan kebijakan terkait penganggaran dan pelaporan Dana Biaya Operasional Sekolah dimana sebelumnya dianggarkan pada pos Pendapatan Asli Daerah dan sejak tahun 2020 dianggarkan dan dilaporkan pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi terendah tercatat pada Tahun Anggaran 2022. Penurunan tersebut diakibatkan karena adanya perubahan mekanisme penganggaran yang diatur dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang sebelumnya dianggarkan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 namun pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada kelompok DAK Non Fisik begitu pun pada tahun 2023 di anggarkan pada pos yang sama. Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp1.002.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.15 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	2023			2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,39	1.227.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.160.000.000,00	1.002.000.000,00	46,93	1.227.000.000,00

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dari Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Majene memperoleh hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp2.160.000.000,00. Hibah tersebut bersumber dari hibah yang diteruskan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mandar berupa Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan Kab/Kota Tahun Anggaran 2023 Hibah tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan program pemenuhan target pemenuhan sanitasi dan air bersih melalui BUMD. Mekanisme pemberian hibah menggunakan sistem *reimburse*, dimana pemerintah daerah akan menyusun sendiri program pemenuhan sanitasi dan air bersih melalui BUMD nya masing-masing dengan menggunakan pembiayaan APBD. Program ini menitikberatkan pada pemasangan sambungan baru utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setelah program dilaksanakan di lapangan, biaya yang digunakan tersebut akan digantikan oleh Pemerintah Pusat setelah penyampaian laporan realisasi kegiatan.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mandar dalam melaksanakan program kegiatan tersebut hanya mampu merealisasikan senilai Rp1.002.000.000,00 dari Rp2.160.000.000,00 yang ditargetkan akan diteruskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



5.1.2. Belanja dan Transfer

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Belanja dan Transfer	885.015.750.318,80	857.874.377.782,25	27.141.372.536,55	3,16
Jumlah	885.015.750.318,80	857.874.377.782,25	27.141.372.536,55	3,16

Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2023 senilai Rp885.015.750.318,80 atau 94,92% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp932.385.405.462,00

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance-Based Budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Rincian belanja menurut jenis disajikan secara rinci pada tabel berikut ini:

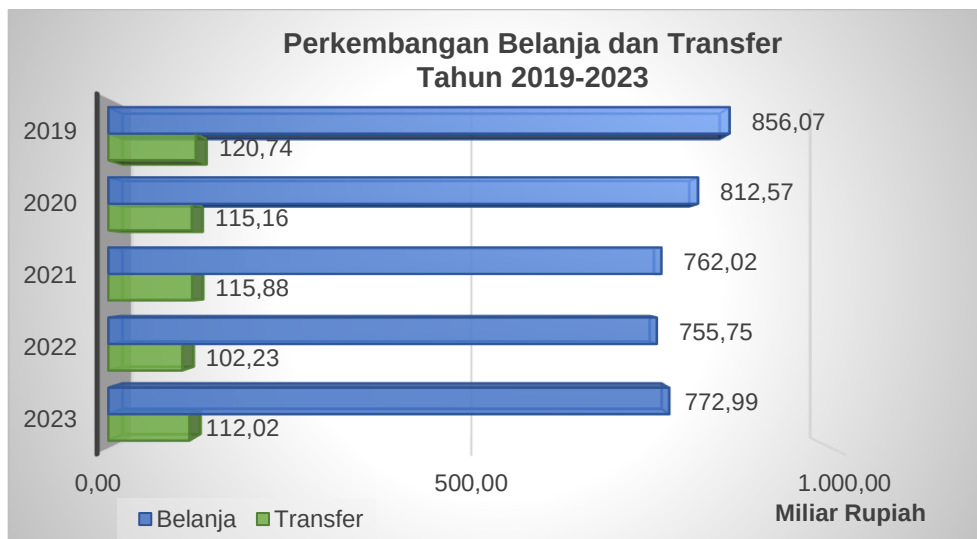
Tabel 5.16 Rincian Belanja Menurut Jenis

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
BELANJA OPERASI	719.167.516.626,00	667.164.512.064,80	92,77	663.261.505.807,25
Belanja Pegawai	449.101.271.369,00	372.584.721.002,00	82,96	406.980.998.990,00
Belanja Barang dan Jasa	258.569.834.151,00	283.016.566.756,80	109,45	218.629.512.958,25
Belanja Hibah	11.438.811.106,00	11.505.624.306,00	100,58	36.875.447.859,00
Belanja Bantuan Sosial	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	775.546.000,00
BELANJA MODAL	116.127.586.618,00	103.848.841.602,00	89,43	89.753.902.940,00
Belanja Tanah	2.375.000.000,00	723.073.962,00	30,45	1.025.276.300,00
Belanja Peralatan dan Mesin	20.210.349.846,00	18.297.386.946,00	90,53	13.710.223.053,00
Belanja Gedung dan Bangunan	51.777.622.772,00	53.184.829.425,00	102,72	19.183.777.725,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	41.089.214.000,00	31.464.043.269,00	76,57	55.784.625.862,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	335.000.000,00	179.508.000,00	53,58	50.000.000,00
Belanja Aset Lainnya	340.400.000,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	1.977.663.278,00	98,88	2.633.036.163,00



URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
BELANJA TRANSFER	95.090.302.218,00	112.024.733.374,00	117,81	102.225.932.872,00
Transfer Bagi Hasil	2.607.508.829,00	1.216.354.374,00	46,65	1.237.099.872,00
Transfer Bantuan Keuangan	92.482.793.389,00	110.808.379.000,00	119,82	100.988.833.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	932.385.405.462,00	885.015.750.318,80	94,92	857.874.377.782,25

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp885.015.750.318,80 atau meningkat 3,16% dari saldo tahun sebelumnya di Tahun 2022 yang tercatat senilai Rp857.874.377.782,25. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi senilai Rp667.164.512.064,80, Belanja Modal senilai Rp103.848.841.602,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp1.977.663.278,00 dan transfer senilai Rp112.024.733.374,00. Berikut perkembangan realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5.8 Perkembangan Belanja dan Transfer Tahun 2019-2023

Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Khusus dalam kelompok belanja, sesuai dengan Paragraf 18 PSAP Nomor 02 yang menyebutkan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

1) Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Belanja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini PPKD. Berikut dalam tabel kami gambarkan ringkasan realisasi belanja menurut organisasi secara berurutan berdasarkan besaran realisasi belanja.



Tabel 5.17 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi

No.	Organisasi	Anggaran Pokok Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	317.713.743.521,00	299.305.481.415,00	94,21
2.	Dinas Kesehatan	185.242.846.033,00	185.036.416.901,80	99,89
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.096.729.484,00	78.821.857.719,00	86,53
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	10.243.911.845,00	7.317.295.057,00	71,43
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.469.531.340,00	4.130.422.681,00	92,41
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.745.956.838,00	5.190.584.136,00	90,33
7.	Dinas Sosial	2.320.965.444,00	1.782.018.205,00	76,78
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.803.513.120,00	5.578.958.583,00	96,13
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.622.573.984,00	4.204.817.636,00	90,96
10.	Dinas Ketahanan Pangan	1.920.719.171,00	1.630.049.813,00	84,87
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.574.183.693,00	5.819.558.565,00	88,52
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.758.403.776,00	2.578.721.231,00	93,49
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.486.683.534,00	2.408.771.502,00	69,08
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.225.305.090,00	10.179.606.366,00	83,27
15.	Dinas Perhubungan	3.586.736.926,00	3.172.515.937,00	88,45
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	5.737.971.538,00	4.752.927.897,00	82,83
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4.130.227.378,00	3.332.058.719,00	80,67
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.102.238.888,00	2.653.400.824,00	85,53
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.797.309.698,00	13.969.104.123,00	109,16
20.	Dinas Perpustakaan	2.684.176.974,00	2.400.276.916,00	89,42
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.412.498.770,00	10.939.892.184,00	105,07
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	13.758.233.483,00	12.144.395.196,00	88,27
23.	Sekretariat Daerah	28.664.783.007,00	26.501.749.776,00	92,45
24.	Sekretariat DPRD	21.645.349.724,00	15.938.821.549,00	73,64
25.	Badan Perencanaan Daerah	3.823.988.681,00	3.080.983.872,00	80,57
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	105.641.993.277,00	121.215.550.991,00	114,74
27.	Badan Pendapatan Daerah	9.268.097.703,00	7.671.015.199,00	82,77
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	4.788.330.209,00	3.970.223.964,00	82,91
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.156.312.044,00	2.077.497.190,00	96,34
30.	Inspektorat Daerah	6.002.226.368,00	4.986.854.325,00	83,08
31.	Kecamatan Banggae	7.008.174.132,00	6.105.732.550,00	87,12
32.	Kecamatan Banggae Timur	8.711.462.568,00	7.598.824.915,00	87,23
33.	Kecamatan Pamboang	3.258.525.476,00	2.838.714.228,00	87,12



No.	Organisasi	Anggaran Pokok Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
34.	Kecamatan Sendana	6.912.935.244,00	3.542.489.729,00	51,24
35.	Kecamatan Tammerodo	1.282.765.912,00	1.147.194.234,00	89,43
36.	Kecamatan Tubo Sendana	1.771.680.857,00	1.492.419.669,00	84,24
37.	Kecamatan Ulumanda	1.431.592.598,00	1.118.630.629,00	78,14
38.	Kecamatan Malunda	3.732.827.776,00	3.269.218.714,00	87,58
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.849.899.358,00	5.110.697.178,00	87,36
JUMLAH		932.385.405.462,00	885.015.750.318,80	94,92

Dapat dilihat bahwa SKPD dengan urutan 5 (lima) teratas dengan anggaran belanja yang paling tinggi adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dengan jumlah anggaran senilai Rp317.713.743.521,00, Dinas Kesehatan senilai Rp185.242.846.033,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp105.641.993.277,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp91.096.729.484,00 serta Sekretariat Daerah Rp28.664.783.007,00. Postur belanja yang dominan pada kelompok satuan kerja tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam arah pembangunan daerah.

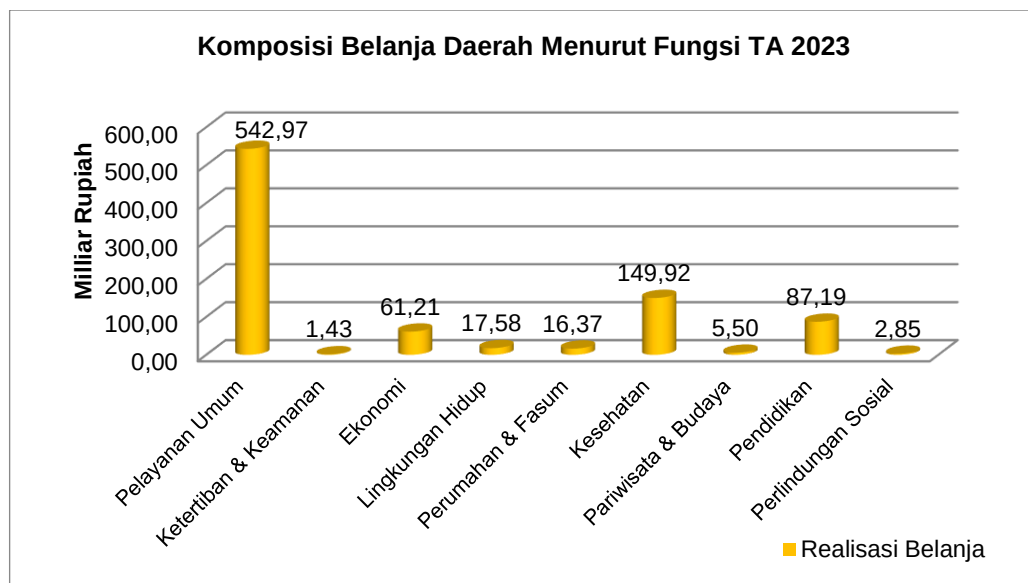
2) Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Urusan Pemerintahan

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene juga dapat diklasifikasikan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Belanja pemerintah daerah menurut fungsi terbagi dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Majene per fungsi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 5.18 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Fungsi

No.	Uraian Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Pelayanan Umum	585.701.582.351,00	542.968.169.891,00	92,70
2.	Ketertiban dan Keamanan	1.473.120.000,00	1.430.100.000,00	97,08
3.	Ekonomi	77.970.936.366,00	61.209.669.652,00	78,50
4.	Lingkungan Hidup	16.979.890.590,00	17.576.883.413,00	103,52
5.	Perumahan dan Fasilitas Umum	14.390.134.000,00	16.373.491.081,00	113,78
6.	Kesehatan	146.869.051.149,00	149.920.696.426,80	102,08
7.	Pariwisata dan Budaya	4.841.793.111,00	5.498.033.000,00	113,55
8.	Pendidikan	81.163.099.948,00	87.192.878.589,00	107,43
9.	Perlindungan Sosial	2.995.797.947,00	2.845.828.266,00	94,99
Jumlah		932.385.405.462,00	885.015.750.318,80	94,92

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Majene menurut fungsi Tahun Anggaran 2023 terlihat pada grafik berikut:



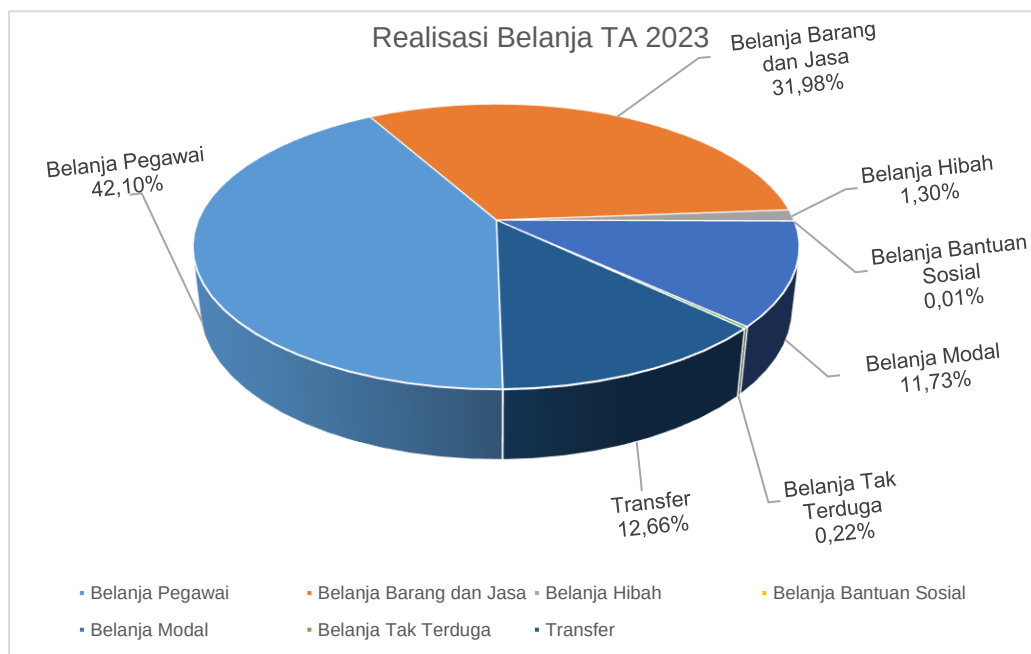
Grafik 5.9 Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi Tahun 2023

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2023, bidang penyelenggaraan pemerintahan atau fungsi yang memiliki alokasi anggaran belanja yang paling dominan adalah Pelayanan Umum, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, serta Lingkungan Hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

3) Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Jenis

Berdasarkan PSAP Nomor 02, Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan klasifikasi ekonominya terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp667.164.512.064,80, Belanja Modal senilai Rp103.848.841.602,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp1.977.663.278,00 dan Transfer senilai Rp112.024.733.374,00. Komposisi belanja Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 berdasarkan klasifikasi ekonomi disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5.10 Komposisi Belanja Menurut Jenis TA 2023

4) Belanja Wajib Dana Transfer Umum dan Perlindungan Sosial

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 50 diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, maka daerah berpotensi menerima sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini kemudian dipertegas lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib. Belanja wajib yang dimaksud terdiri atas belanja Pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari Dana Transfer Umum, belanja Kesehatan 10%, belanja wajib infrastruktur yang bersumber dari DTU sebesar 25%, dan Alokasi Dana Desa 10%.

Tabel 5.19 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Wajib

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendidikan	71.257.396.000,00	68.278.234.044,00	95,82
2.	Kesehatan	58.515.484.000,00	57.151.865.864,00	97,67
3.	Pekerjaan Umum	23.447.516.000,00	22.863.627.474,00	97,51
4.	Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
5.	Dukungan Penggajian PPPK Daerah	15.033.870.000,00	1.387.203.740,00	9,23
Jumlah		172.254.266.000,00	153.680.931.122,00	89,22



Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang termasuk ke dalam kelompok Dana Transfer Umum adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan transfer DAU Kabupaten Majene pada APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp503.503.051.000,00 dan DBH senilai Rp5.159.841.000,00. Adapun Dana Transfer Umum yang diatur penggunaannya dalam peraturan perundang-undangan tentang APBN adalah Dana Transfer Umum yang bersifat *non-earmark* (belum ditetapkan penggunaannya). Berdasarkan anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene kemudian menganggarkan belanja wajib yang peruntukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang APBN senilai Rp172.254.266.000,00. Anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) kelompok pembiayaan meliputi belanja bidang pendidikan senilai Rp71.257.396.000,00 yang kemudian terealisasi 95,82%, belanja bidang kesehatan senilai Rp58.515.484.000,00 dan terealisasi 97,67%, belanja bidang pekerjaan umum senilai Rp23.447.516.000,00 dan terealisasi 97,51%, belanja dukungan pendanaan kelurahan senilai Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi 100,00% serta belanja gaji aparatur non ASN dan PPPK senilai Rp15.033.870.000,00 yang terealisasi 9,23%.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Belanja Operasi	667.164.512.064,80	663.261.505.807,25	3.903.006.257,55	0,59
Jumlah	667.164.512.064,80	663.261.505.807,25	3.903.006.257,55	0,59

Pengeluaran Belanja Operasi pada tahun 2023 realisasi senilai Rp667.164.512.064,80 dengan capaian realisasi 92,77%

Pengeluaran Belanja Operasi pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp719.167.516.626,00 dengan realisasi senilai Rp667.164.512.064,80 atau 92,77%. Belanja Operasi pada periode APBD Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp3.903.006.257,55 dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.20 Belanja Operasi

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	449.101.271.369,00	372.584.721.002,00	82,96	406.980.998.990,00
Belanja Barang dan Jasa	258.569.834.151,00	283.016.566.756,80	109,45	218.629.512.958,25
Belanja Hibah	11.438.811.106,00	11.505.624.306,00	100,58	36.875.447.859,00
Belanja Bantuan Sosial	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	775.546.000,00
Jumlah	719.167.516.626,00	667.164.512.064,80	92,77	663.261.505.807,25



5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Belanja Pegawai	372.584.721.002,00	406.980.998.990,00	(34.396.277.988,00)	(8,45)
Jumlah	372.584.721.002,00	406.980.998.990,00	(34.396.277.988,00)	(8,45)

Realisasi belanja pegawai pada TA 2023 rata-rata komponen belanja gaji terealisasi 82,96% dari yang dianggarkan senilai Rp449.101.271.369,00

Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp449.101.271.369,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp372.584.721.002,00 atau 82,96%. Adapun rincian realisasi belanja pegawai dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.21 Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	317.285.639.241,00	285.274.324.023,00	89,91	284.178.355.733,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	23.252.102.400,00	9.060.332.453,00	38,97	25.744.672.418,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	67.958.723.815,00	70.385.001.796,00	103,57	60.405.291.700,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.448.055.704,00	7.183.522.896,00	85,03	7.196.212.226,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	231.277.693,00	170.659.834,00	73,79	169.921.668,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	510.880.000,00
Belanja Pegawai BLUD	31.414.592.516,00	0,00	0,00	28.775.665.245,00
Jumlah	449.101.271.369,00	372.584.721.002,00	82,96	406.980.998.990,00

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2023 direalisasikan senilai Rp285.274.324.023,00 atau 89,91% dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp317.285.639.241,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok ASN	241.737.833.478,00	217.678.848.969,00	90,05
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.723.110.330,00	19.476.678.599,00	89,66
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.749.327.800,00	5.057.680.000,00	87,97



Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.649.732.400,00	16.029.245.820,00	96,27
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.462.145.900,00	3.680.531.412,00	82,48
Belanja Tunjangan Beras ASN	12.793.349.840,00	12.293.801.940,00	96,10
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	310.062.272,00	274.408.810,00	88,50
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.142.836,00	3.112.106,00	99,02
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.387.312.714,00	8.989.307.783,00	78,94
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	565.591.308,00	447.677.376,00	79,15
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.692.964.106,00	1.343.031.208,00	79,33
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	211.066.257,00	0,00	0,00
Jumlah	317.285.639.241,00	285.274.324.023,00	89,91

Realisasi belanja pegawai pada TA 2023 menunjukkan capaian realisasi yang baik dimana rata-rata komponen belanja gaji terealisasi di atas 80%.

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada tahun 2023 direalisasikan senilai Rp9.060.332.453,00 atau 38,97% dari jumlah anggaran pokok senilai Rp23.252.102.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

URAIAN	Tahun 2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	2.504.964.370,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	61.818.000,00	15.868.800,00	25,67
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.976.748.000,00	320.838.780,00	16,23
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.743.135.200,00	4.738.500,00	0,17
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	18.470.401.200,00	6.213.922.003,00	33,64
Jumlah	23.252.102.400,00	9.060.332.453,00	38,97

3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp70.385.001.796,00 atau 103,57% dari jumlah anggaran pokok senilai Rp67.958.723.815,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.24 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	317.928.015,00	176.447.508,00	55,50
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	6.550.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.973.502.000,00	55.933.898.600,00	99,93
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.438.337.000,00	8.981.002.300,00	139,49
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.518.000.000,00	1.783.500.000,00	117,49
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.462.000.000,00	2.985.833.388,00	86,25
Honorarium	248.956.800,00	517.770.000,00	207,98
Jumlah	67.958.723.815,00	70.385.001.796,00	103,57

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp7.183.522.896,00 atau 85,03% dari jumlah anggaran pokok senilai Rp8.448.055.704,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

URAIAN	Tahun 2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	37.816.800,00	48,10
Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00	51.128.520,00	50,43
Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.248.400,00	814.233.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.244.900,00	88.244.100,00	82,28
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	26.856.900,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.077.000,00	692.728,00	2,47
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000,00	15.740,00	44,97
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.378.757.904,00	843.220.008,00	61,16
Belanja Tunjangan transportasi DPRD	2.700.000.000,00	2.376.000.000,00	88,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00	0,00	0,00
Jumlah	8.448.055.704,00	7.183.522.896,00	85,03



5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp170.659.834,00 atau 73,79% dari jumlah anggaran pokok senilai Rp231.277.693,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	2023		
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	7.644.000,00	5.964.000,00	78,02
Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	8.111.040,00	5.069.400,00	62,50
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH / WKDH	2.730.000,00	849.194,00	31,11
Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	2.800,00	1.880,00	67,14
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	9.501.120,00	5.446.080,00	57,32
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	117.000,00	112.320,00	96,00
Belanja luran Jaminan Kematian KDH / WKDH	351.000,00	336.960,00	96,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH	49.940.733,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
Jumlah	231.277.693,00	170.659.834,00	73,79

6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp510.880.000,00 atau 100% dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp510.880.000,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direalisasikan senilai Rp110.880.000,00 atau 100,00% dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp110.880.000,00 dan
- 2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH pada TA 2022 direalisasikan senilai Rp400.000.000,00 atau 100,00% dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp400.000.000,00.

7) Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp0,00.



5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Belanja Barang dan Jasa	283.016.566.756,80	218.629.512.958,25	64.387.053.798,55	29,45
Jumlah	283.016.566.756,80	218.629.512.958,25	64.387.053.798,55	29,45

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan per 31 Desember 2023 telah direalisasikan senilai Rp283.016.566.756,80 atau 109,45%

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan senilai Rp258.569.834.151,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 telah direalisasikan senilai Rp283.016.566.756,80 atau 109,45%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
BELANJA BARANG				
Belanja Barang Pakai Habis	74.816.993.597,00	60.311.209.986,00	80,61	58.577.483.974,25
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	12.493.000,00
BELANJA JASA				
Belanja Jasa Kantor	48.425.606.606,00	38.241.117.448,00	78,97	46.105.606.261,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.424.759.393,00	18.220.264.645,00	66,44	14.127.128.143,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	294.083.339,00	404.900.000,00	137,68	910.785.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.253.525.000,00	1.219.800.000,00	97,31	660.181.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.408.936.176,00	7.706.892.949,00	91,65	1.692.287.250,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	34.266.232.983,00	34.682.592.752,00	101,22	18.459.590.372,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	510.000.000,00	225.000.000,00	44,12	361.700.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	430.646.000,00	99.445.000,00	23,09	795.919.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Pajak Daerah	125.000.000,00	124.033.312,00	99,23	125.000.000,00
BELANJA PEMELIHARAAN				
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.606.678.020,00	3.090.111.399,00	67,08	4.765.290.481,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.186.091.313,00	1.121.919.662,00	94,59	1.372.145.274,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.800.000.000,00	7.708.683.248,00	98,83	6.101.938.488,00



URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
BELANJA PERJALANAN DINAS				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.956.431.964,00	18.926.688.105,00	70,21	29.635.726.613,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT				
Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	1.309.500.000,00	1.579.910.000,00	120,65	11.546.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA BOS				
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	24.961.142.758,00	0,00	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.755.349.760,00	64.174.855.492,80	309,20	23.378.018.102,00
Jumlah	258.569.834.151,00	283.016.566.756,80	109,45	218.629.512.958,25

Pada belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023, masih terdapat belanja yang belum dibayarkan senilai Rp167.331.037,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata . Hal tersebut disebabkan karena terdapat kegiatan swakelola belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, yakni pengadaan pakaian adat mandar dan kegiatan sejarah makam tua dibayarkan pada tanggal 3 Januari 2024.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Belanja Hibah	11.505.624.306,00	36.875.447.859,00	(25.369.823.553,00)	(68,80)
Jumlah	11.505.624.306,00	36.875.447.859,00	(25.369.823.553,00)	(68,80)

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp11.438.811.106,00 dengan realisasi senilai Rp11.505.624.306,00 atau 95,13%.

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp11.438.811.106,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp11.505.624.306,00 atau 100,58%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28 Belanja Hibah Tahun 2023

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	372.700.000,00



URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	10.727.617.800,00	2.850.000.000,00	26,57	8.139.629.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	499.700.000,00
Belanja Hibah Dana BOS Ke Satuan Pendidikan	0,00	7.944.431.000,00	0,00	27.152.225.557,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	711.193.306,00	711.193.306,00	100,00	711.193.302,00
Jumlah	11.438.811.106,00	11.505.624.306,00	100,58	36.875.447.859,00

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan mendasar terhadap mekanisme pengelolaan hibah pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelola belanja hibah mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD. Namun dengan ketentuan yang terakhir, belanja hibah dapat dikelola di tingkat SKPD. Realisasi belanja hibah berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Daftar Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD

No.	SKPD	Nilai Hibah (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga		7.994.431.000,00
	Dana BOS Satdikdas	7.994.431.000,00	
2.	Sekretariat Daerah		200.000.000,00
	Hibah BAZNAS	200.000.000,00	
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3.311.193.306,00
	Hibah Partai Politik	3.311.193.306,00	

Hibah pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga merupakan hibah berbentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan untuk Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Hibah tersebut bersumber dari Dana Alokasi Non Fisik Bidang Pendidikan. Selain itu terdapat hibah bagi organisasi sosial kemasyarakatan seperti KONI dan Pramuka, serta beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu. Hibah pada Sekretariat Daerah merupakan hibah kepada Polres Majene dan bantuan masjid. Belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik merupakan hibah yang berbentuk bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Belanja Bantuan Sosial	57.600.000,00	775.546.000,00	(717.946.000,00)	(92,57)
Jumlah	57.600.000,00	775.546.000,00	(717.946.000,00)	(92,57)

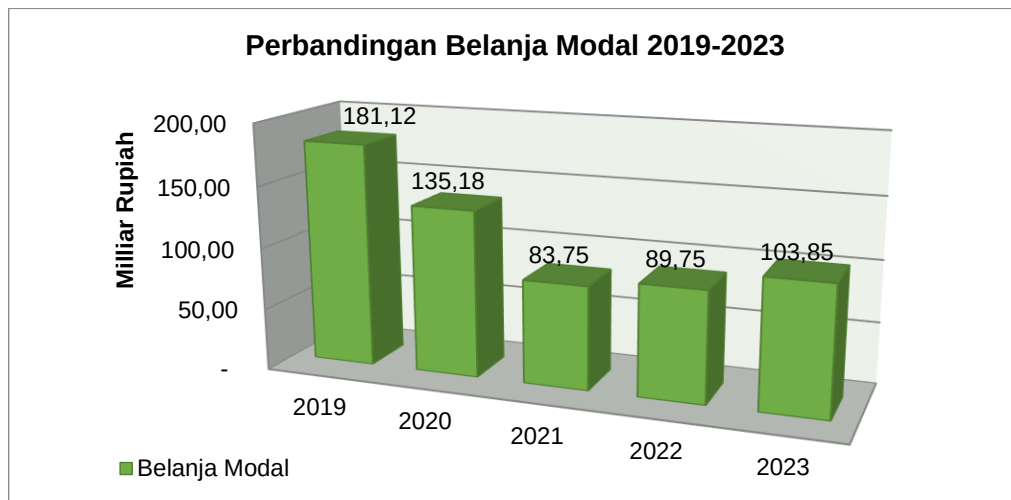
Selain mekanisme hibah, mekanisme belanja bantuan sosial juga mengalami perubahan pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja. Sebagaimana belanja hibah, belanja bantuan sosial sebelumnya mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD. Namun dengan ketentuan yang terakhir, belanja bantuan sosial dapat dikelola di tingkat SKPD. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada 1 SKPD yaitu Dinas Sosial berupa Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga yang dianggarkan senilai Rp57.600.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp57.600.000,00 atau 100%. Bantuan sosial ini merupakan bantuan kepada masyarakat eks penyandang penyakit kusta berdasarkan SK Bupati Majene Nomor: 462/HK/KEP-BUP/V/2023 Tentang Pembayaran Bantuan Kepada Masyarakat Eks Penyandang Penyakit Kusta.

5.1.2.2. Belanja Modal

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Belanja Modal	103.848.841.602,00	89.753.902.940,00	14.094.938.662,00	15,70
Jumlah	103.848.841.602,00	89.753.902.940,00	14.094.938.662,00	15,70

Belanja Modal pada tahun anggaran 2023 terealisasi senilai Rp103.848.841.602,00

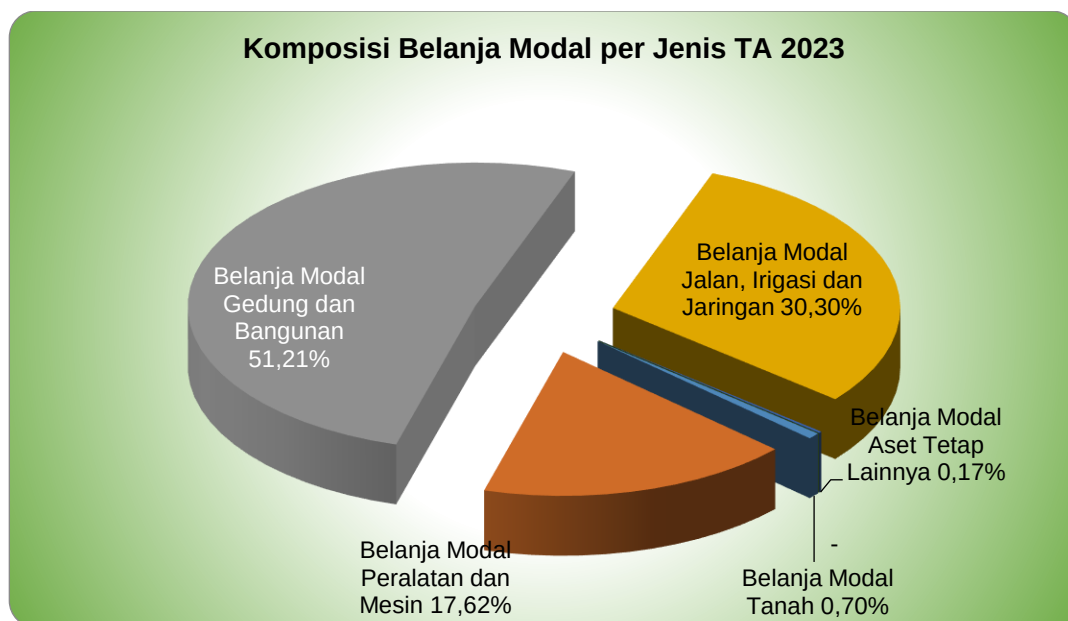
Belanja modal pada tahun anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp116.127.586.618,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp103.848.841.602,00 atau 89,43%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.094.938.662 atau 15,70%. Berikut kami gambarkan perbandingan belanja modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019-2023.



Grafik 5.11 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2019-2023

Grafik di atas dapat dilihat bahwa belanja modal dalam kurun lima tahun terakhir paling tinggi realisasinya pada Tahun Anggaran 2019 yakni senilai Rp181.120.182.393,80. Kemudian mengalami penurunan sekitar 25,36% atau senilai Rp45.936.879.820,34 pada tahun 2020 menjadi Rp135.183.302.573,46. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan senilai Rp51.434.133.160,95 atau 38,05% menjadi Rp83.749.169.412,51. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan senilai Rp6.004.733.527,49 atau naik sekitar 7,17%. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan senilai Rp14.094.938.662,00 atau naik sekitar 15,70 %.

Komposisi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Majene TA 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.12 Komposisi Belanja Modal per Jenis TA 2023

Grafik komposisi belanja modal berdasarkan jenisnya pada Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja modal dengan persentase tertinggi yakni 51,21%. Kemudian pada posisi kedua adalah belanja modal jenis Belanja Modal jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan Persentase 30,30%. Kemudian disusul oleh Peralatan dan Mesin dengan persentase 17,62%, lalu belanja modal jenis Tanah dengan komposisi 0,70%, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap lainnya dengan persentase 0,17%.

Realisasi belanja modal berdasarkan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Belanja Modal

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	2.375.000.000,00	723.073.962,00	30,45	1.025.276.300,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	20.210.349.846,00	18.297.386.946,00	90,53	13.710.223.053,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.777.622.772,00	53.184.829.425,00	102,72	19.183.777.725,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	41.089.214.000,00	31.464.043.269,00	76,57	55.784.625.862,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	335.000.000,00	179.508.000,00	53,58	50.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	340.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	116.127.586.618,00	103.848.841.602,00	89,43	89.753.902.940,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan senilai Rp2.375.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 telah terealisasi senilai Rp723.073.962,00 atau 30,45%.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp20.210.349.846,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp18.297.386.946,00 atau 90,53%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 mengalami Kenaikan senilai Rp4.587.163.893,00 atau 33,46% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel 5.31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	94.486.720	94.000.000	99,48	90.250.000,00



URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	919.800.000,00	1.370.245.600	148,97	3.589.534.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	174.658.500,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	110.805.491,00	8.000.000	7,22	482.466.321,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.371.776.888,00	1.467.267.998	106,96	1.320.499.207,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	7.220.000,00
Belanja Modal Alat Studio	105.500.000,00	56.145.000,00	53,22	486.004.264,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	91.165.725,00	5.000.000 ,00	5,48	31.776.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	57.720.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	9.667.342.278,00	8.361.568.672,00	86,49	1.759.729.668,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	610.802.200,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	837.000.000,00	834.449.000,00	99,70	1.044.326.850,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	4.523.695.381,00	1.251.511.000,00	27,67	3.384.907.625,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	380.206.000,00	60.881.000,00	16,01	670.328.418,00
Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	2.463.250.626,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.078.571.363,00	2.325.068.050,00	111,86	0,00
Jumlah	20.210.349.846,00	18.297.386.946,00	90,53	13.710.223.053,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp51.777.622.772,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp53.184.829.425,00 atau 102,72%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan senilai Rp34.001.051.700,00 atau 177,24% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp53.184.829.425,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.32 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.983.476.872,00	39.697.988.012,00	104,51	18.419.167.725,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.093.758.400,00	5.271.333.090,00	103,49	483.260.000,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	100.000.000,00	71.143.744,00	71,14	7.230.000,00
Belanja Modal Tugu / Tanda Batas	7.250.000.000,00	7.150.131.679,00	98,62	274.120.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.350.387.500,00	994.232.900,00	73,63	0,00
Jumlah	51.777.622.772,00	53.184.829.425,00	102,72	19.183.777.725,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp41.089.214.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp31.464.043.269,00 atau 76,57% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33 Belanja Modal, Jalan Irigasi dan Jaringan

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan	31.649.214.000,00	26.121.565.573,00	82,53	25.304.033.239,00
Belanja Modal Jembatan	650.000.000,00	404.373.705,00	62,21	134.900.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	163.315.000,00	0,00	2.964.512.850,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	7.790.000.000,00	4.254.788.991,00	54,62	23.784.993.273,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	199.300.000,00



URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	480.000.000,00	0,00	0,00	3.247.386.500,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	149.500.000,00
Jumlah	41.089.214.000,00	31.464.043.269,00	76,57	55.784.625.862,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp335.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp179.508.000,00 atau 53,58% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	125.000.000,00	99.450.000,00	79,56	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	100.000.000,00	49.728.000,00	49,73	0,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	110.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	30.330.000,00	0,00	0,00
Jumlah	335.000.000,00	179.508.000,00	53,58	50.000.000,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp340.400.000,00 namun tidak ada realisasi sampai pada tanggal 31 Desember 2023.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Belanja Tidak Terduga	1.977.663.278,00	2.633.036.163,00	(655.372.885,00)	(24,89)
Jumlah	1.977.663.278,00	2.633.036.163,00	(655.372.885,00)	(24,89)

Belanja Tak Terduga
tahun 2023 terealisasi
senilai
Rp1.977.663.278,00 atau
90,88%

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Belanja Tak Terduga pada tahun anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.977.663.278,00 atau 98,88%. Tren perkembangan realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Majene selama kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



**Grafik 5.13 Tren Perkembangan Belanja Tak terduga Kabupaten Majene
Tahun 2019-2023**

Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja tidak terduga paling tinggi selama kurun lima tahun terakhir adalah Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 yakni senilai Rp27.109.843.503,00. Keadaan tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan anggaran di awal masa Pandemi Covid-19 dimana alokasi belanja tidak terduga difokuskan pada pelayanan kesehatan Covid-19, penyediaan jejaring pengaman sosial bagi masyarakat tidak mampu, serta bantuan stimulan kepada pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi daerah.

Belanja tidak terduga pada tahun 2023 digunakan pada beberapa jenis pengeluaran mulai dari pemulangan jenazah, bantuan listrik untuk pengungsi Aholeang, Operasi Ketupat Marano, *Fogging*, perbaikan tanggul laut, pengelolaan persampahan, penerangan jalan, rumah untuk pengungsi, dampak konflik dan pangan rumah serta kegiatan lainnya. Rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.35 Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Nilai (Rp)
1.	Pemulangan Jenazah	SK Bupati Nomor 399/HK/ KEP-BUP/IV/2023	3.000.000,00
2.	Listrik Pengungsi Aholeang	SK Bupati Nomor 398/HK/ KEP-BUP/IV/2023	20.000.000,00
3.	Operasi Ketupat Marano	SK Bupati Nomor 434/HK/ KEP-BUP/IV/2023	5.000.000,00
4.	Fogging	SK Bupati Nomor 553/HK/KEP-BUP/VI/2023	50.000.000,00
5.	Mess Pemda	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/652/VIII/Tahun 2023	118.944.911,00
6.	Tanggul Laut	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/712/VIII/Tahun 2023	198.600.000,00
7.	Kebakaran Hutan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/722/IX/Tahun 2023	30.000.000,00
8.	Listrik Pengungsi	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/851/XI/Tahun 2023	38.145.000,00
9.	Pengelolaan Persampahan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/900/XII/Tahun 2023	11.312.800,00
10.	Jalan Seppong, Awo	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/881/XI/Tahun 2023	567.000.000,00
11.	Penerangan Jalan Umum	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/906/XII/Tahun 2023	158.178.567,00
12.	Dampak Konflik	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/918/XII/Tahun 2023	50.000.000,00
13.	Rumah Pengungsi	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/921/XII/Tahun 2023	500.000.000,00
14.	Pembangunan Buronjong	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/922/XI/Tahun 2023	92.000.000,00
15.	Pangan Murah	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/803/X/Tahun 2023	15.482.000,00
16.	Normalisasi Fungsi Jalan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/798/X/Tahun 2023	120.000.000,00
Jumlah			1.977.663.278,00

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak TA 2023 yang dianggarkan sebagai Belanja Tidak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset. Namun pada penggunaan anggaran tak terduga tahun anggaran 2023, terdapat belanja yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut.

- Belanja Tak Terduga senilai Rp500.000.000, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2024; dan
- Belanja Tak Terduga senilai Rp50.000.000, pada Dinas Sosial dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2024.

5.1.2.4. Transfer

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Transfer	112.024.733.374,00	102.225.932.872,00	9.798.800.502,00	9,59
Jumlah	112.024.733.374,00	102.225.932.872,00	9.798.800.502,00	9,59



Transfer Tahun
Anggaran 2023
direalisasikan senilai
Rp112.024.733.374,00
atau 117,81%

Transfer pada Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan senilai Rp95.090.302.218,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 telah direalisasikan senilai Rp112.024.733.374,00 atau 117,81% yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, serta Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36 Belanja Transfer

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil	2.607.508.829,00	1.216.354.374,00	46,65	1.237.099.872,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	1.518.476.491,00	827.869.060,00	54,52	889.031.538,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	1.089.032.338,00	388.485.314,00	35,67	348.068.334,00
Transfer Bantuan Keuangan	92.482.793.389,00	110.808.379.000,00	119,82	100.988.833.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (Alokasi Dana Desa)	38.296.666.389,00	54.993.100.000,00	145,74	55.584.815.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (Dana Desa)	54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	103,01	45.404.018.000,00
Jumlah	95.090.302.218,00	112.024.733.374,00	117,81	102.225.932.872,00

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Majene yang bersumber dari Dana Transfer Umum kepada Pemerintah Desa dan Dana Desa kepada seluruh desa lingkup Kabupaten Majene dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 2** dari catatan atas laporan keuangan ini.

5.1.3. Pembiayaan

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan
Pembiayaan pada
Tahun Anggaran 2023
sampai dengan per 31
Desember 2023
terrealisasi senilai
Rp8.138.537.864,07
atau 81.385,38%.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp10.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp8.138.537.864,07 atau 81.385,38%. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari Dana Bergulir dianggarkan senilai Rp10.000.000,00 namun tidak terdapat realisasi. Adapun realisasi SiLPA senilai Rp8.138.537.864,07 atau 81.385,38% dari yang dianggarkan.



5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.725.000.000,00 atau 79,86%.

Pengeluaran Pembiayaan merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang dianggarkan senilai Rp2.160.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2023 telah direalisasikan senilai Rp1.725.000.000,00 atau 79,86%. Pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan investasi pemerintah berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mandar Kabupaten Majene. Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Mandar merupakan penerusan hibah dari Kementerian PUPR senilai Rp1.725.000.000,00 dalam rangka pelaksanaan program penyediaan air bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pencairan penyertaan modal tersebut dilakukan dua tahap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/587VI/2023 tertanggal 6 Juli 2023 dengan pembayaran tahap pertama senilai Rp517.500.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 34.01/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/P.02/7/2023 dan tahap kedua senilai Rp1.207.500.000,00 melalui dokumen SP2D Nomor 34.01/04/2/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/P.04/09/2023 masing-masing transaksi pada tanggal 6 Juli 2023 dan tanggal 29 September 2023.

5.1.3.3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp8.138.537.864,07 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp1.725.000.000,00. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.413.537.864,07 sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 senilai Rp32.636.712.081,94. Rincian dan perhitungan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

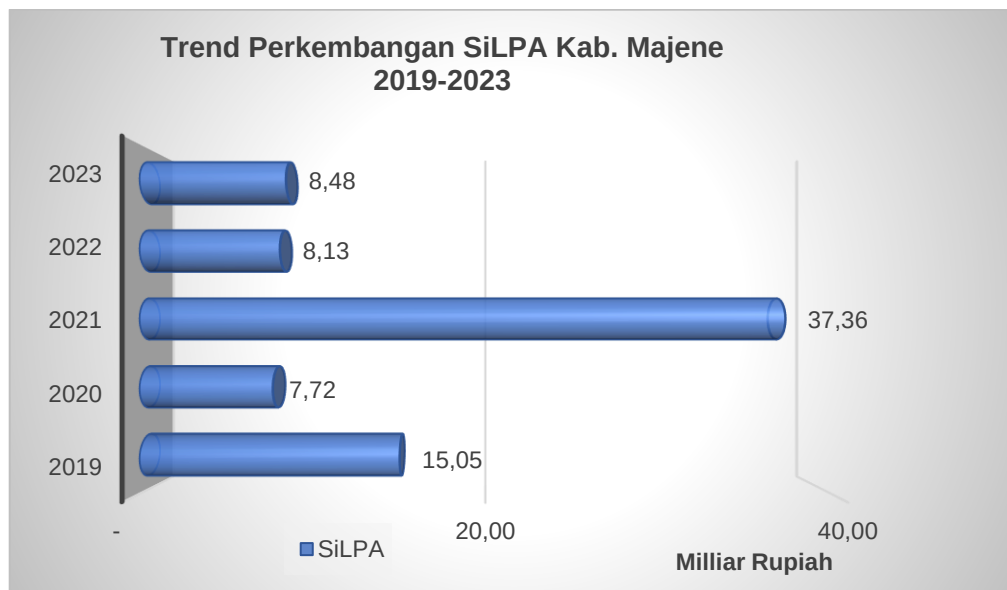
Tabel 5.37 Perhitungan Pembiayaan Netto

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	8.138.537.864,07	0,00	37.256.712.081,94
Penerimaan Kembali Pinjaman	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	10.000.000,00	8.138.537.864,07	81.385,38	37.256.712.081,94
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	79,86	4.620.000.000,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	79,86	4.620.000.000,00
Jumlah	(2.150.000.000,00)	6.413.537.864,07	(298,30)	32.636.712.081,94

5.1.3.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36	349.687.188,28	4,30
Jumlah	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36	349.687.188,28	4,30

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Meskipun keberadaan SiLPA masih bisa digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun secara umum SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi Pembiayaan Netto positif, atau Pembiayaan Netto lebih besar dari defisit APBD. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi. SiLPA ini terbentuk dari realisasi perolehan PAD yang melebihi apa yang sudah ditargetkan, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap, dan selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Dalam melakukan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah, penting untuk melihat tren perkembangan SiLPA antara tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut tren perkembangan SiLPA Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2019 hingga 2023 disajikan dalam grafik.



Grafik 5.14 Tren Perkembangan SiLPA Kab. Majene 2019-2023

SiLPA pada tahun Anggaran 2023 tercatat senilai Rp8.475.746.848,64 dimana nilai tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya di tahun 2022 senilai Rp349.687.188,28 atau sebesar 4,30%. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa SiLPA pada tahun 2022 merupakan SiLPA yaitu Rp8.126.059.660,36. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa SiLPA pada tahun 2021 merupakan SiLPA tertinggi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam lima tahun terakhir yaitu Rp37.362.520.716,94. Tingginya SiLPA pada periode tersebut disebabkan



karena terdapat penerimaan kas yang merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana yang diterima menjelang akhir periode pelaporan di tahun tersebut. Kondisi ini menyebabkan pendapatan tersebut tidak dapat langsung digunakan di tahun berjalan sehingga menjadi SiLPA di akhir tahun. Pada tahun 2019 SiLPA senilai Rp15.047.332.183,39 terjadi penurunan angka SiLPA namun hanya senilai Rp600.616.933,34 atau sekitar 3,84% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan SiLPA senilai Rp7.328.786.833,97 atau sekitar 48,70%. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan SiLPA senilai Rp29.643.975.367,52 atau sekitar 384,06%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan SiLPA senilai Rp29.236.461.056,58 atau sekitar 78,25%.

SiLPA Tahun Berkenaan senilai Rp8.475.746.848,64 adalah hasil dari penjumlahan antara Surplus/Defisit Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp2.062.208.984,57 dengan Pembiayaan Neto senilai Rp6.413.537.864,07. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.38 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan	934.535.405.462,00	887.077.959.303,37	94,92	833.363.725.360,67
Belanja dan Transfer	932.385.405.462,00	885.015.750.318,80	94,92	857.874.377.782,25
Surplus/(Defisit)	2.150.000.000,00	2.062.208.984,57	95,92	(24.510.652.421,58)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	10.000.000,00	8.138.537.864,07	81.385,38	37.256.712.081,94
Pengeluaran Pembiayaan	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	79,86	4.620.000.000,00
Pembiayaan Neto	(2.150.000.000,00)	6.413.537.864,07	(298,30)	32.636.712.081,94
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	8.475.746.848,64	0,00	8.126.059.660,36

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Entitas



yang menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih awalnya hanya ditujukan pada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Sejalan dengan pemberlakuan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Laporan Perubahan SAL yang sebelumnya hanya dibuat oleh PPKD sebagai konsolidator LKPD, saat ini juga harus dibuat oleh entitas Badan Layanan Umum Daerah. Berikut kami uraikan pos-pos akun yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023.

SAL identik dengan aset kas yang berasal dari perhitungan realisasi pendapatan-LRA, belanja serta pembiayaan yang menghasilkan SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran. SAL bukan dihasilkan dari LAK, karena di dalam LAK juga mencantumkan transaksi transitoris, dimana transaksi transitoris bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. SAL merupakan bagian dari ekuitas, karena di dalam suatu ekuitas juga terdapat aset kas.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2023 direalisasikan senilai Rp8.475.746.848,64. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar atau 4.30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2022 dimana Saldo Anggaran Lebih Akhir tercatat senilai Rp8.126.059.660,36. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 dapat dilihat dengan rincian mutasi sebagaimana dalam laporan berikut ini.

Tabel 5.39 Laporan Perubahan Saldo Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	8.126.059.660,36	37.362.520.716,94
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	8.138.537.864,07	37.256.712.081,94
3.	Sub Total	(12.478.203,71)	105.808.635,00
4.	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36
5.	Sub Total	8.463.268.644,93	8.231.868.295,36
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	12.478.203,71	(105.808.635,00)
7.	Lain – Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		8.475.746.848,64	8.126.059.660,36

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal senilai Rp8.126.059.660,36 merupakan SiLPA tahun 2022 berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Majene TA 2022. Saldo SiLPA tersebut digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada periode APBD Perubahan TA 2023. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir adalah saldo akhir yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai SiLPA pada periode anggaran berikutnya. Tercatat Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember senilai Rp8.475.746.848,64.



5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Saldo Anggaran Lebih Awal	8.126.059.660,36	37.362.520.716,94	(29.236.461.056,58)	(78,25)
Jumlah	8.126.059.660,36	37.362.520.716,94	(29.236.461.056,58)	(78,25)

SAL Awal Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp8.126.059.660,36 atau turun sekitar 78,25% dari SAL Awal tahun 2022 senilai Rp37.362.520.716,94

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp8.126.059.660,36 atau turun sekitar 78,25% dari SAL Awal tahun 2022 senilai Rp37.362.520.716,94. SAL awal tahun 2023 merupakan SAL Akhir tahun 2022 atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	8.138.537.864,07	37.256.712.081,94	(29.118.174.217,87)	(78,16)
Jumlah	8.138.537.864,07	37.256.712.081,94	(29.118.174.217,87)	(78,16)

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp8.138.537.864,07 atau turun sekitar 78,16% dari SAL Awal tahun 2022 senilai Rp37.256.712.081,94. Terdapat selisih antara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai penerimaan pembiayaan di tahun berjalan dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal diakibatkan terdapat koreksi yang mempengaruhi SAL Awal atas kesalahan pembukuan di tahun sebelumnya yang akan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini pada pos Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
SiLPA/SiKPA	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36	349.687.188,28	4,15
Jumlah	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36	349.687.188,28	4,15

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan tabel di atas per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Majene mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai



Rp8.475.746.848,64. Saldo SiLPA tersebut mengalami Kenaikan senilai Rp349.687.188,28 atau 4,15% dari tahun 2022 senilai Rp8.126.059.660,36

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	12.478.203,71	(105.808.635,00)	118.286.838,71	111,79
Jumlah	12.478.203,71	(105.808.635,00)	118.286.838,71	111,79

Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 mencatat terdapat koreksi yang menyebabkan perubahan pada akun kas yang merupakan potongan pajak atas SP2D yang double cair pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp182.000,00 dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan senilai Rp5.270.270,00.

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan pos yang menjelaskan koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang mempengaruhi posisi kas. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmetika, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2022 mencatat terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada akun kas. Transaksi ini terjadi di Saldo Kas ke Kas Daerah pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bersumber sisa kas di bendahara pengeluaran atas double cair SP2D tahun 2022, yang telah tersetorkan. Berdasarkan PSAP 10 dinyatakan bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Lebih jelasnya koreksi yang dilakukan atas kesalahan pembukuan di tahun sebelumnya yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.40 Rincian Koreksi Saldo Kas atas Kesalahan Pembukuan di Tahun Sebelumnya

No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Saldo Audited Tahun 2022 (Rp)	Saldo Seharusnya (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.280.000,00	7.098.000,00	(182.000,00)	Koreksi SiLPA atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	45.000.000,00	39.729.730,00	(5.270.270,00)	Koreksi SiLPA atas sisa kas di Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah			(0,29)	Koreksi atas saldo buku kas di BLUD – RSUD
4.	Puskesmas Lembang			778.891,00	Koreksi atas saldo awal kas di BLUD – PKM Lembang atas Pendapatan Jasa Giro Tahun 2023

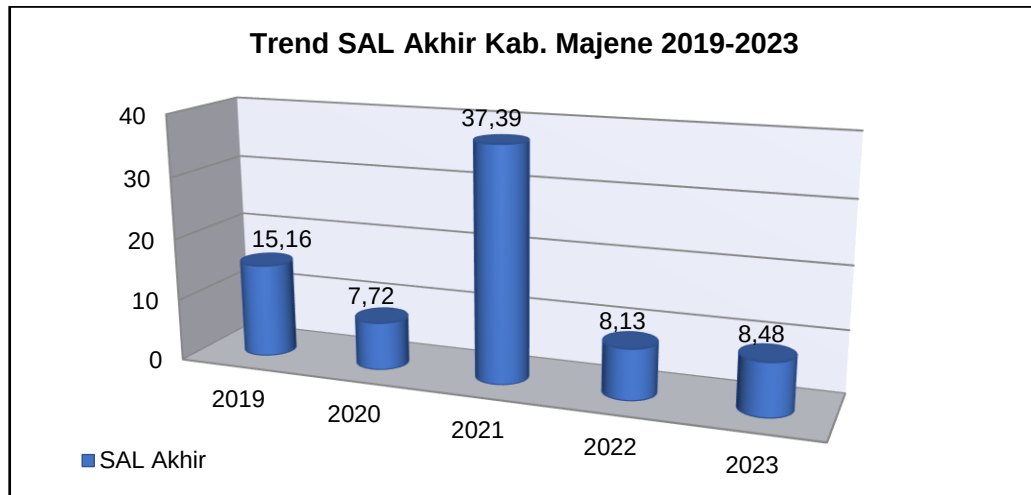


No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Saldo Audited Tahun 2022 (Rp)	Saldo Seharusnya (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
5.	Puskesmas Pamboang			1.831.575,00	Koreksi atas saldo awal kas di BLUD – PKM Pamboang atas Pendapatan Jasa Giro Tahun 2022
6.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga			742.000,00	Koreksi temuan Inspektorat atas Belanja Dana BOS SMPN 1 Majene TA 2022 yang tidak terealisasi dan belum di transaksikan di TA 2023
7.	Puskesmas Sendana I			52.700,00	Koreksi tambah atas pengakuan saldo awal kas Prolanis
8.	Puskesmas Tammerodo			67.800,00	Koreksi tambah atas pengakuan saldo awal kas Prolanis
9.	Puskesmas Banggae I			11.399.884,00	Koreksi tambah atas pengakuan saldo awal kas Prolanis
10.	Puskesmas Salutambung			50.000,00	Koreksi tambah atas pengakuan saldo awal kas Prolanis
11.	Puskesmas Ulumanda			2.685.000,00	Koreksi tambah atas pengakuan saldo awal kas Prolanis
12.	Puskesmas Banggae II			66.900,00	Koreksi tambah atas pengakuan saldo awal kas Prolanis
13.	Puskesmas Lembang			119.734,00	Koreksi tambah atas pengakuan saldo awal kas Prolanis
14.	Puskesmas Pamboang			135.990,00	Koreksi tambah atas pengakuan saldo awal kas Prolanis
Jumlah				12.478.203,71	

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Laporan Perubahan Saldo Anggaran	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36	349.687.188,28	4,30
Jumlah	8.475.746.848,64	8.126.059.660,36	349.687.188,28	4,30

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir adalah saldo akhir kas yang dimiliki pemerintah daerah pada saat tutup buku di akhir periode pelaporan. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2023 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp8.475.746.848,64. Saldo tersebut tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang akan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2023. Pada grafik di bawah ini disajikan tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene kurun 2019-2023 (dalam miliar rupiah).



Grafik 5.15 Tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kab. Majene Tahun 2019-2023

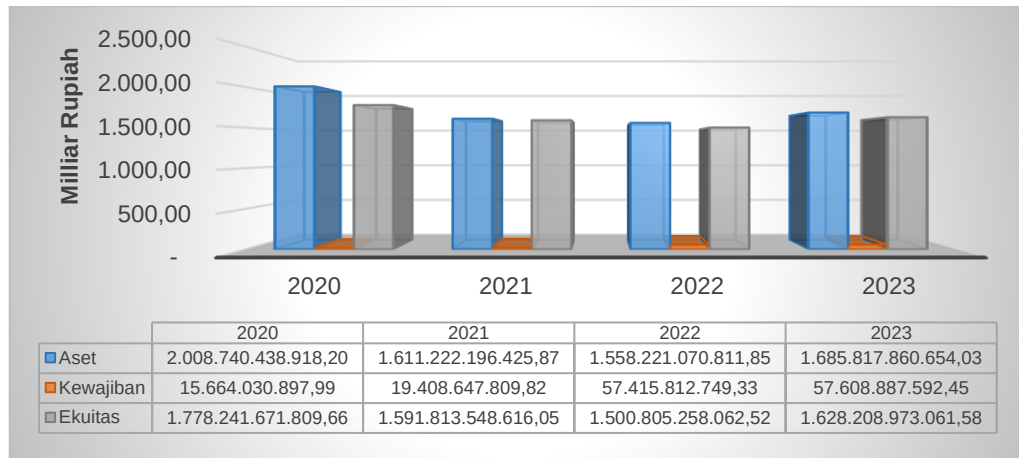
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah sebagai entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.41 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022

Posisi Neraca	Tahun 2023	Tahun 2022
Aset Lancar	30.627.497.984,64	23.337.047.195,39
Investasi Jangka Panjang	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83
Aset Tetap	1.590.166.201.673,40	1.501.443.030.038,47
Aset Lainnya	6.312.594.785,16	7.036.503.759,16
Jumlah Aset	1.685.813.994.654,03	1.558.221.070.811,85
Kewajiban Jangka Pendek	57.608.887.592,45	57.338.342.773,33
Kewajiban Jangka Panjang	00,00	77.469.976,00
Jumlah Kewajiban	57.608.887.592,45	57.415.812.749,33
Ekuitas	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.685.817.860.654,03	1.558.221.070.811,85

Perkembangan nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene selama empat tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini.



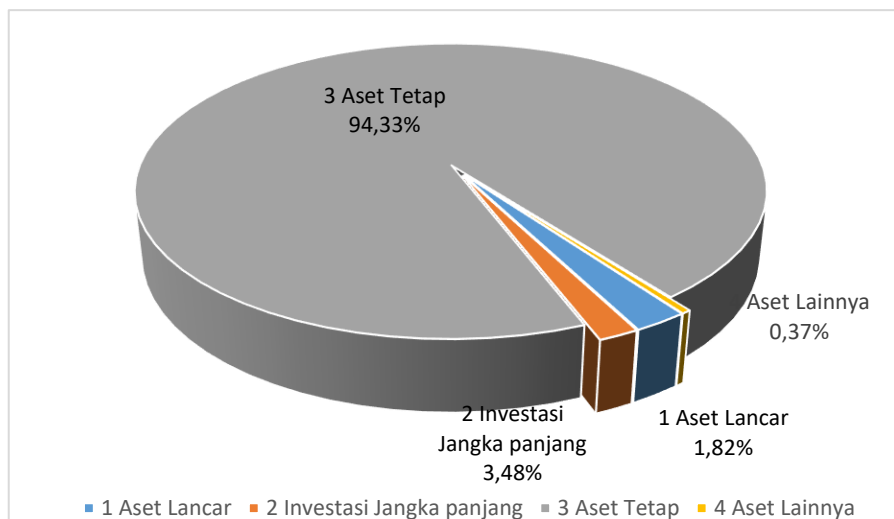
Grafik 5.16 Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2020-2023

5.3.1. ASET

Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Aset juga dapat diartikan sebagai sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi

Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023.



Grafik 5.17 Komposisi Aset Kabupaten Majene Tahun 2023



5.3.1.1. Aset Lancar

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Aset Lancar	30.627.497.984,64	23.337.047.195,39	7.290.450.789,25	31,24
Jumlah	30.627.497.984,64	23.337.047.195,39	7.290.450.789,25	31,24

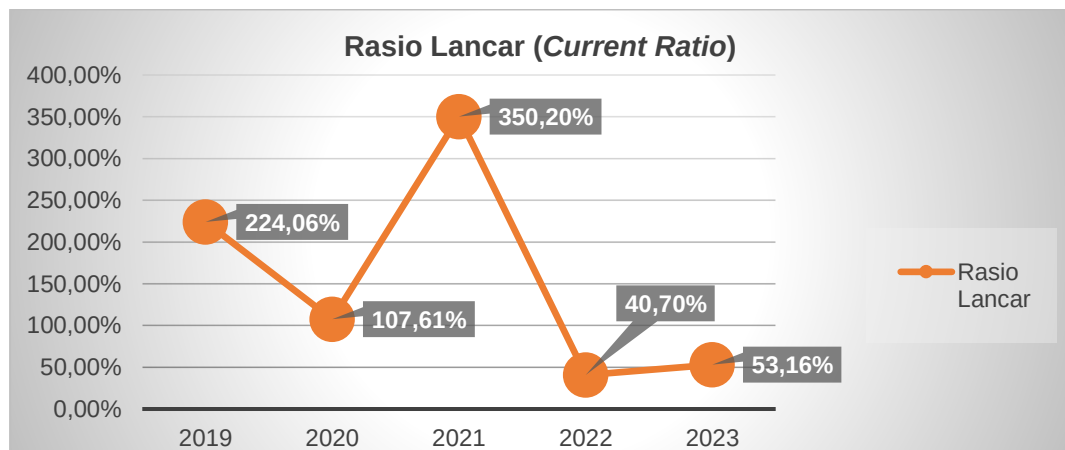
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas dan setara kas.
- Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset lancar merupakan indikator likuiditas pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang menyebabkan beban atas pengeluaran APBD. Berikut ini kami uraikan analisis rasio likuiditas pemerintah daerah dengan pendekatan rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).

1) Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan pendekatan Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas. Analisis likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Rasio ini membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar. Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir berdasarkan perkembangan aset lancar dan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar. Rasio tersebut dapat dilihat tabel berikut.

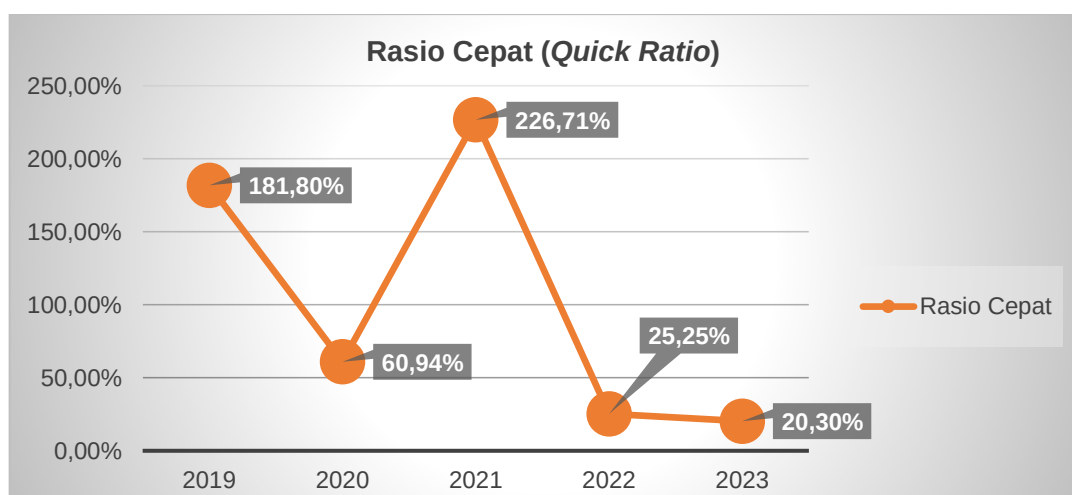


Grafik 5.18 Perkembangan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene 2019-2023

Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2023 berada pada 53,16%. Rasio ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dimana hanya 41,66%.

2) Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan pendekatan Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan penjelasan lebih lanjut dari Rasio Lancar (*Current Ratio*). Penghitungan Rasio Cepat hanya menggunakan aktiva yang paling likuid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan tidak dapat ditukar dengan kas. Rasio Cepat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang lebih ketat. Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar dikurang persediaan dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat tabel berikut.



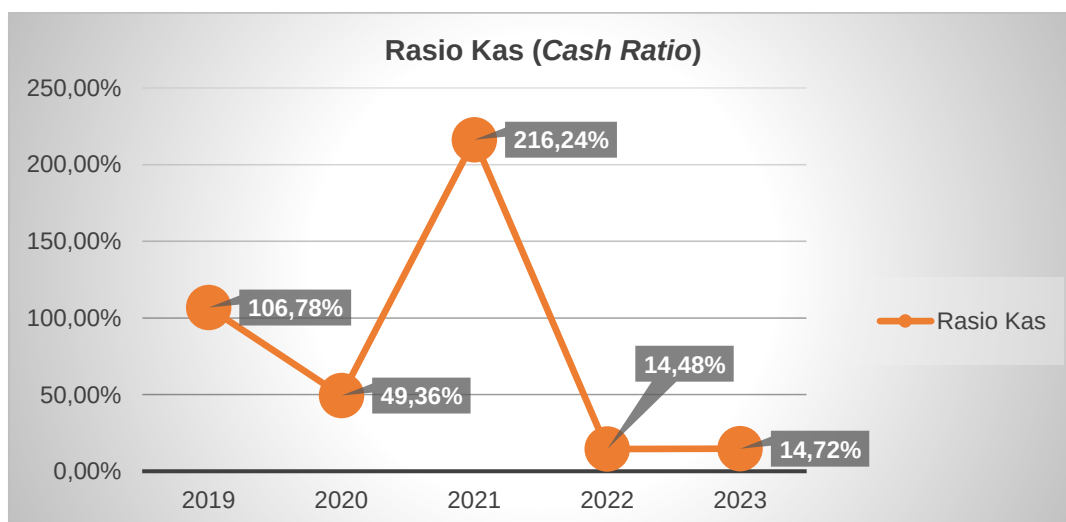
Grafik 5.19 Perkembangan Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene 2019-2023

Berdasarkan grafik tersebut di atas terlihat bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) pada Tahun Anggaran 2023 berada pada 20,30%. Sebagaimana pada analisis Rasio Lancar, analisis Rasio Cepat juga menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Majene untuk dapat menyelesaikan kewajiban dengan aset lancar yang dimiliki dan dapat secara cepat dikonversi menjadi kas tergolong sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan analisis Rasio cepat, maka perhitungan kemampuan penyelesaian kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten Majene cenderung semakin rendah.

Berdasarkan data pada grafik juga dapat disimpulkan bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2021. Sebelumnya pada pendekatan Rasio lancar (*Current Ratio*) juga menunjukkan rasio likuiditas tertinggi terjadi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perhitungan Rasio Likuiditas melalui pendekatan rasio cepat yang lebih ketat, likuiditas tertinggi tetap tercatat di tahun 2021.

3) Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan pendekatan Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) adalah cara menghitung likuiditas pemerintah daerah yang melibatkan posisi saldo kas pemerintah daerah. Penghitungan Rasio Cepat hanya menggunakan kas sebagai acuan untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Piutang pendapatan dan persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan sulit ditukar dengan kas. Rasio Kas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang paling realistis dan efisien. Rasio Kas (*Cash Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar berupa kas dan setara kas dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat tabel berikut.



Grafik 5.20 Perkembangan Rasio Kas (Cash Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019-2023



Aset lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan rincian kami uraikan berikut ini.

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kas di Kas Daerah	83.313.671,24	84.310.247,12	(996.575,88)	(1,18)
Jumlah	83.313.671,24	84.310.247,12	(996.575,88)	(1,18)

Saldo Kas di Kas Daerah (Kasda) adalah saldo kas yang terdapat pada Rekening Umum Kas Daerah sesuai dengan Buku Kas Umum Kasda dan rekening koran per 31 Desember 2023 senilai Rp83.313.671,24. Terdapat perbedaan saldo Kas di Kasda antara Rekening koran per 31 Desember 2023 dengan aplikasi karena adanya Double Cair SP2D senilai Rp113.384.000,000 atas Pembayaran Alokasi Dana Desa, Kepada Desa Tubo Poang Bulan Oktober, November Tahun 2023 (Triwulan IV) SK Bupati Nomor: 1146/HK/KEP-BUP/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, SP2D tersebut terbit di tanggal 20 Desember 2023 dan di tanggal 21 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 34.01/04.0/000711/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/P.05/12/2023.

Saldo tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp996.575,88 dibandingkan saldo Kas di Kasda tahun sebelumnya yakni Rp84.310.247,12. Rincian saldo kas pada rekening Giro Kasda adalah sebagai berikut.

Tabel 5.42 Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Akun	Saldo (Rp)
1.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-0001-1	Rek. Kas Umum Daerah - PAD/LAIN-LAIN PENDAPATAN	70.673.154,24
2.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-2779-2	Rek. Kas Umum Daerah - DAU/DBH	0,00
3.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-3224-9	Rek. Kas Umum Daerah - DAK	0,00
4.	BRI Cabang Majene	0047-01-0225-30-5	Bupati Majene	997.819,00
5.	BNI Cabang Majene	18349335-8	Pemda Kab. Majene	11.642.698,00
Jumlah				83.313.671,24

Atas penggunaan rekening tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-0001-1 merupakan Rekening Kas Umum Daerah. Rekening tersebut merupakan rekening utama yang digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Untuk transaksi yang sifatnya penerimaan daerah, rekening ini digunakan untuk menerima dan menyimpan sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, penerimaan dari non kapitasi BPJS, dana bagi hasil provinsi, jasa retribusi pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), pemindahbukuan realisasi PBB dari rekening BRI, jasa giro dan deposito, serta setoran-setoran atas temuan pengembalian. Adapun untuk transaksi yang sifatnya pengeluaran daerah rekening tersebut diperuntukkan untuk melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk menyalurkan dana non

kapitasi, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak maupun Retribusi Desa, serta pengeluaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD baik melalui mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, maupun LS.

- 2) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-2779-2 merupakan rekening kas daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan transaksi atas penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang meliputi transfer atas Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Desa. Adapun transaksi pengeluaran pada rekening ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran untuk pembiayaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun yang dikerjasamakan ke pihak ketiga, serta penyaluran belanja transfer Dana Desa kepada Desa, pembayaran hibah partai politik, pembayaran gaji aparatur.
- 3) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-3224-9 merupakan rekening yang difungsikan untuk menyimpan dan menyalurkan pembayaran atas pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dari pemerintah pusat khusus pada kelompok Dana Alokasi Khusus. Rekening ini digunakan dengan tujuan untuk memisahkan dana transfer yang sifat dan peruntukannya secara khusus telah diatur. Hal ini bertujuan untuk kepentingan kemudahan rekonsiliasi dan laporan penyerapan yang secara berkala harus dilaporkan ke pemerintah pusat.
- 4) BRI Cabang Majene 0047-01-0225-30-5 dalam penggunaannya dipergunakan untuk menampung penerimaan jasa giro serta pendapatan atas deposito pemerintah daerah pada bank BRI. Rekening ini tidak melakukan transaksi penerimaan dari sumber pendapatan daerah, aktivitas yang dilakukan kebanyakan hanya berupa pemindahbukuan pasca pendapatan atas deposito maupun jasa giro tersebut.
- 5) BNI Cabang Majene 18349335-8 dipergunakan untuk menampung dana yang akan didepositokan sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan bunga dari deposito tersebut untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kas di Bendahara Penerimaan	00,00	157.422.650,00	(157.422.650,00)	(100,00)
Jumlah	00,00	157.422.650,00	(157.422.650,00)	(100,00)

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 bernilai Nihil.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersumber dari pungutan maupun setoran atas pendapatan daerah yang hingga per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Kas Daerah sebesar 00,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar (100,00%) dibanding saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp157.422.650,00.

Apabila merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 paragraf 22 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, maka



kas atas pendapatan retribusi tersebut tidak termasuk definisi Kas di Bendahara Penerimaan karena belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan-LRA. Namun pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Umum Kas Negara/Daerah, dirumuskan interpretasi bahwa Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Dengan interpretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kas yang berada pada Bendahara Penerima FKTP tersebut merupakan bagian dari Kas BLUD. Hal ini mengingat Bendahara Penerima pada FKTP merupakan pejabat yang telah diberikan otoritas oleh Dinas Kesehatan (secara struktural) dan Bendahara Umum Daerah (secara fungsional) untuk melaksanakan penerimaan atas pendapatan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kesimpulan itu, maka saldo kas tersebut disajikan sebagai Kas di BLUD sehingga Kas di Bendahara Penerimaan tahun ini bersaldo nihil yang sebelumnya terdapat pada Bendahara Penerimaan di tiga Puskesmas yakni Puskesmas Totoli, Puskesmas Tammerodo, dan Puskesmas Salutambung senilai Rp5.585.500,00 yang merupakan penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan yang telah diterima di rekening bendahara namun hingga akhir periode belum disetorkan ke Rekening Kas BLUD

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kas di Bendahara Pengeluaran	200.000,00	395.152.322,91	(394.952.322,91)	(99,95)
Jumlah	200.000,00	395.152.322,91	(394.952.322,91)	(99,95)

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp200.000,00 ini mengalami penurunan sebesar (99,95%) dari tahun sebelumnya

Kas di bendahara pengeluaran disebabkan adanya belanja alat tulis kantor yang belum dibayarkan di tahun anggaran 2023 oleh Bendahara pengeluaran Kelurahan Banggae. Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp200.000,00. Nilai saldo mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebelumnya per 31 Desember 2022 yakni Rp395.152.322,91. Terjadi penurunan senilai (Rp394.952.322,91) dengan persentase sebesar (99,95%).

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kas di BLUD	8.260.015.001,20	7.596.192.119,29	663.822.881,91	8,74
Jumlah	8.260.015.001,20	7.596.192.119,29	663.822.881,91	8,74

Saldo kas pada Bendahara BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Diketahui bahwa terdapat saldo kas pada Bendahara BLUD senilai Rp8.260.015.001,20 per 31 Desember 2023. Jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya



senilai Rp7.596.192.119,29 maka dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan nilai dengan persentase 8,74% atau senilai Rp663.822.881,91. Rincian saldo kas di Bendahara BLUD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.43 Kas di Bendahara BLUD

No.	BLUD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	RSUD:	5.806.849.451,00	7.504.717.762,29
	BNI	3.510.354.935,00	7.504.717.762,29
	Sulselbar	2.186.307.723,00	0,00
	Tunai	110.186.793,00	0,00
		2.453.165.550,20	91.474357,00
2.	Puskesmas Banggae I	208.146.254,00	0,00
3.	Puskesmas Banggae II	94.323.818,00	0,00
4.	Puskesmas Lembang	304.032.577,00	82.005.012,00
5.	Puskesmas Totoli	231.260.971,00	0,00
6.	Puskesmas Pamboang	199.166.850,00	9.469.345,00
7.	Puskesmas Sendana I	330.079.861,00	0,00
8.	Puskesmas Sendana II	254.017.091,00	0,00
9.	Puskesmas Tammerodo	160.171.143,20	0,00
10.	Puskesmas Salutambung	146.416.901,00	0,00
11.	Puskesmas Malunda	457.617.432,00	0,00
12.	Puskesmas Ulumanda	67.932.652,00	0,00
Jumlah		8.260.015.001,20	7.596.192.119,29

Adapun rincian atas saldo kas di BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.44 Saldo Kas di Rekening Bank atas Kegiatan Prolanis

No.	Puskesmas	Rekening Bank Prolanis	Saldo Rek. Prolanis Tahun 2023 (Rp)
1.	Puskesmas Banggae I	BNI 1238957235	0,00
2.	Puskesmas Banggae II	BRI 004701014181535	3.697.400,00
3.	Puskesmas Lembang	BNI 7417411157	1.020.302,00
4.	Puskesmas Totoli	-	0,00
5.	Puskesmas Pamboang	BNI 4448844129	6.837.944,00
6.	Puskesmas Sendana I	BRI 493901026739531	1.821.100,00
7.	Puskesmas Sendana II	BRI 004701015223534	91.600,00
8.	Puskesmas Tammerodo	BRI 802901017000532	4.634.800,00
9.	Puskesmas Salutambung	BRI 004701015226532	32.900,00
10.	Puskesmas Malunda	BRI 495401036541534	939.300,00
11.	Puskesmas Ulumanda	BNI 1471477751	0,00
Jumlah			19.075.346,00



Terdapat saldo kas Prolanis Puskesmas Totoli senilai Rp300.000,00 pada rekening bank JKN.

Tabel 5.45 Saldo Kas di Rekening Bank atas Penerimaan Retribusi Kesehatan dan Pengelolaan Dana JKN BPJS Kesehatan

No.	BLUD	Rekening Bank JKN	Saldo Rek. JKN Tahun 2023 (Rp)
1.	RSUD:		5.696.662.658,00
	BNI	BNI 1555556672	3.510.354.935,00
	Sulselbar	Sulselbar 0720020000169390	2.186.307.723,00
			1.288.580.748,20
2.	PKM Banggae I	BNI 0339834578	161.296.590,00
3.	PKM Banggae II	BNI 0339840037	87.784.418,00
4.	PKM Lembang	BNI 039989544	240.011.630,00
5.	PKM Totoli	BNI 033987945	54.199.496,00
6.	PKM Pamboang	BNI 2877544704	30.121.795,00
7.	PKM Sendana I	BRI 004701001077307	181.021.690,00
8.	PKM Sendana II	BRI 004701001080300	62.733.100,00
9.	PKM Tammerodo	BRI 004701001078303	131.787.855,20
10.	PKM Salutambung	BRI 004701001081306	82.621.987,00
11.	PKM Malunda	BRI 004701001079309	245.481.765,00
12.	PKM Ulumanda	BRI 004701001076301	11.520.422,00
Jumlah			6.985.243.406,20

Tabel 5.46 Saldo Kas di Rekening Bank atas Pengelolaan dana BOK

No.	BLUD	Rekening Bank BOK	Saldo Rek. BOK Per Tahun 2023 (Rp)
1.	RSUD	-	0,00
2.	PKM Banggae I	BNI 1590076524	45.642.164,00
3.	PKM Banggae II	BNI 1590076477	1.940.000,00
4.	PKM Lembang	BNI 1590076513	63.000.645,00
5.	PKM Totoli	BNI 1590076499	172.551.839,00
6.	PKM Pamboang	BNI 1590076568	161.162.111,00
7.	PKM Sendana I	BNI 1590076557	147.237.071,00
8.	PKM Sendana II	BNI 1590076502	191.192.391,00
9.	PKM Tammerodo	BNI 1590076535	21.831.488,00
10.	PKM Salutambung	BNI 1590076466	63.270.014,00
11.	PKM Malunda	BNI 1590076546	211.196.367,00
12.	PKM Ulumanda	BNI 1590076488	54.225.138,00
Jumlah			1.133.249.228,00



PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLU, BLU harus dapat mengidentifikasi kas pada BLU yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD. Dana BOK merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Transferan Pusat Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dikelola langsung oleh Puskesmas). Berdasarkan hal tersebut, TA 2023 BOK tersaji sebagai bagian dari Kas di BLUD dikarenakan perubahan struktur organisasi dari FKTP menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1053/HK/KEP/BUP/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

Tabel 5.47 Saldo Kas Tunai pada Bendahara BLUD

No.	BLUD	Saldo Kas Tunai Tahun 2023 (Rp)	Keterangan
1.	RSUD	110.186.793,00	Retribusi kesehatan 2023
2.	Puskesmas Banggae I	1.207.500,00	Retribusi kesehatan 2023
3.	Puskesmas Banggae II	902.000,00	Retribusi kesehatan 2023
4.	Puskesmas Totoli	4.509.636,00	Retribusi kesehatan 2022 dan 2023
5.	Puskesmas Pamboang	1.045.000,00	Retribusi kesehatan 2023
6.	Puskesmas Tammerodo	1.917.000,00	Retribusi kesehatan 2022 dan 2023
7.	Puskesmas Salutambung	492.000,00	Retribusi kesehatan 2022
8.	Puskesmas Ulumanda	2.187.092,00	Sisa belanja
Jumlah		122.447.021,00	

Saldo kas tunai pada Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 merupakan saldo kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan RSUD dan Puskesmas yang bersumber dari pungutan pendapatan BLUD yang hingga 31 Desember 2023 belum disetorkan ke rekening BLUD. Apabila merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 Paragraf 22 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, maka kas atas pendapatan Retribusi tersebut tidak termasuk definisi kas dibendahara penerimaan karena belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan – LRA. Namun pada interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) nomor 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dirumuskan interpretasi bahwa pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Melalui interpretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kas yang berada pada bendahara penerimaan BLUD tersebut merupakan bagian dari kas yang dikuasai oleh BUD.



5.3.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kas di Bendahara FKTP	00,00	43.996.339,00	(43.996.339,00)	(100,00)
Jumlah	00,00	43.996.339,00	(43.996.339,00)	(100,00)

Nilai saldo kas di Bendahara FKTP mengalami penurunan senilai (Rp43.996.339,00) atau (100,00%) dari tahun sebelumnya dimana tercatat saldo Kas di bendahara FKTP senilai Rp43.996.339,00. Hal tersebut terjadi karena Pada periode Tahun Anggaran 2023 saldo kas pada Bendahara FKTP di reklas ke saldo kas BLUD sehingga saldo kas di bendahara FKTP tahun 2023 bernilai Nihil.

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kas di Bendahara Dana BOS	924.890,00	2.267.164,00	(1.342.274,00)	(59,20)
Jumlah	924.890,00	2.267.164,00	(1.342.274,00)	(59,20)

Per 31 Desember 2023 terdapat saldo kas pada Bendahara pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan lingkup Kabupaten Majene senilai Rp924.890,00. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp2.267.164,00, maka dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan nilai dengan persentase 59,20% atau senilai Rp1.342.274,00. Rincian Saldo Kas pada Bendahara BOS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.48 Kas di Bendahara BOS

No.	Nama Unit Kerja	Saldo Kas (Rp)
1.	SD Negeri No. 3 Tinambung	177.000,00
2.	SD Negeri No. 35 Pumballar	5.890,00
3.	SMP Negeri 1 Majene	742.000,00
Total		924.890,00

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kas Lainnya	135.850.831,16	22.392.296,20	113.458.534,96	506,69
Jumlah	135.850.831,16	22.392.296,20	113.458.534,96	506,69

Kas lainnya pada tahun 2023 senilai Rp135.850.831,16 nilai tersebut mengalami kenaikan yang signifikan di bandingkan tahun 2022 yakni senilai Rp113.458.534,96 atau sebesar 506,69%. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Des 2023. Kemudian juga terdapat saldo kas bendahara sekolah yang bersifat non tunai dimana saldo tersebut sudah ada sejak tahun 2021.



Tercatat per 31 Desember 2023 terdapat saldo kas pada bendahara sekolah yang bersifat non tunai dan tersimpan di bank senilai Rp22.472.276,20. Saldo tersebut merupakan saldo kas hasil temuan pemeriksaan pada periode audit 2021 yang lalu. Sampai dengan akhir periode pelaporan 2023, diketahui bahwa saldo kas tersebut masih belum dilakukan transaksi penarikan oleh pihak sekolah untuk disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Majene. Saldo tersebut dicatat dan disajikan sebagai Kas lainnya pada periode LKPD TA.2021 yang lalu. Saldo kas tersebut tersimpan pada rekening BRI bendahara sekolah yang diperkirakan berasal dari dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang pada periode-periode sebelumnya dan tidak termuat dalam batang tubuh APBD Kabupaten Majene.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8 mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Di dalam pelaksanaan akuntansi atas kas, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pemahaman mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kas. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas menyatakan bahwa pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUN/BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya. Tabel berikut merincikan daftar sekolah pemilik saldo kas lainnya.

Tabel 5.49 Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya pada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Majene

No.	Bank	No. Rekening	Nama Nasabah	Saldo Tahun 2023 (Rp)
1.	BRI	4701001007302	SDN 2 APOANG	2.059,00
2.	BRI	4701000977300	SDN 02 KAMPUNG BARU	9.205,20
3.	BRI	4701001101300	SMPN 1 MAJENE	2.504,00
4.	BRI	4701001094309	SMPN 2 MAJENE	6.056,00
5.	BRI	4701001165304	SMPN 2 MAJENE	8.083,00
6.	BRI	4701001095305	SMPN 3 MAJENE	983.915,00
7.	BRI	4701001211309	SMPN 6 MAJENE	6.137,00
8.	BRI	4701001042302	SMPN 6 MAJENE	202.235,00
9.	BRI	4701000516308	SMPN 5 MALUNDA	33.189,00
10.	BRI	4701001040300	SMPN 6 MALUNDA	799.710,00
11.	BRI	4701000535302	SMPN 6 MALUNDA	36.118,00
12.	BRI	4701000981309	SMPN 10 ULUMANDA	8.837.794,00
13.	BRI	4701000979302	SMPN 9 MAJENE	11.198.790,00
14.	BRI	4701000864303	SMPN 7 SATU ATAP MAJENE	15.345,00
15.	BRI	4701000523305	SMPN 7 SATAP MAJENE	24.333,00
16.	BRI	4701000524301	SMPN 8 SATAP MAJENE	26.965,00
17.	BRI	4701000866305	SMPN 8 SATAP LOMBANG	44.357,00



No.	Bank	No. Rekening	Nama Nasabah	Saldo Tahun 2023 (Rp)
18.	BRI	4701000517304	SMPN 1 PAMBOANG	67.829,00
19.	BRI	4701001164308	SMPN 1 PAMBOANG	8.083,00
20.	BRI	4701000513300	SMPN 2 PAMBOANG	60.868,00
21.	BRI	4701000515302	SMPN 3 PAMBOANG	47.292,00
22.	BRI	4701000514306	SMPN 4 PAMBOANG	51.409,00
Jumlah				22.472.276,20

Selain dari saldo kas bendahara sekolah di atas, Juga terdapat potongan pajak yang belum disetorkan oleh Beberapa bendahara hingga per 31 Desember 2023 dan beberapa saldo rekening PPTK. Pengakuan saldo pada Sekretariat Daerah merupakan saldo rekening PPTK Bagian Kesra atas honor imam masjid yang belum diserahkan senilai Rp767.000,00 dan Bantuan Sarana Peribadatan Baitul Mauna senilai Rp5.513.374,96 baru terbayarkan pada 30 Januari 2024 Pengakuan saldo pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga merupakan saldo rekening PPTK Bidang PAUD dan PNF Senilai Rp227,00. Untuk pengakuan Saldo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan saldo pada rekening PPTK Bina Marga atas akumulasi jasa tabungan senilai Rp2.597.149,00 dan saldo pada rekening PPTK Bidang Cipta Karya atas sisa akumulasi jasa tabungan senilai Rp4.191.898,00 serta saldo pada rekening PPTK Bidang Pengairan atas sisa akumulasi jasa tabungan senilai Rp658.951,00. Rincian Potongan pajak dan saldo rekening PPTK tersebut dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini.

Tabel 5.50 Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran

No.	SKPD	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Saldo Rekening PPTK (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	9.954.553,00	37.483.838,00	6.280.374,96	53.718.765,96
2.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga			227,00	227,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			7.447.998,00	7.447.998,00
	Jumlah	9.954.553,00	37.483.838,00	13.728.599,96	61.166.990,96

Kas Lainnya dibendahara BLUD, merupakan pajak yang telah dipungut oleh bendahara puskesmas namun belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya pada Puskesmas

No.	SKPD	PPN (Rp)	PPh 21 (Rp)	PPh 22 (Rp)	Pajak Jaminan Kesehatan & IWP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Puskesmas Banggae II		150.000,00			150.000,00
2.	Puskesmas Tammerodo	3.069.066,00	18.361.373,00	837.019,00		22.267.458,00
3.	Puskesmas Salutambung	693.693,00	189.189,00			882.882,00
4.	Puskesmas Ulumanda		37.964,00	292.937,00	39.015,00	369.916,00
5.	Puskesmas Malunda		809.209,00			809.209,00
	Jumlah					24.479.465,00



Kas Lainnya dibendahara BOS, merupakan pajak yang telah dipungut oleh bendahara Sekolah namun belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 5.52 Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya pada Sekolah

No.	SKPD	PPN (Rp)	PPH 21 (Rp)	PPH 23 (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	TK Negeri Pembina Sendana	0,00	266.700,00	0,00	266.700,00
2.	TK Negeri Pembina Perdesaan	0,00	212.100,00	0,00	212.100,00
3.	TK Pembina Majene	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.	SPNF SKB	3.526.490,00	0,00	346.000,00	3.872.490,00
5.	SD Negeri 3 Tinambung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.	SD Negeri 7 Taukong	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
7.	SD 10 Salutambung	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8.	SD 11 Maliaya	0,00	140.580,00	0,00	140.580,00
9.	SD 16 Puare	0,00	64.000,00	58.400,00	122.400,00
10.	SD 12 Pattabeang	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
11.	SD 13 Pallarangan	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12.	SD 21 Salutahongan	523.243,00	0,00	99.000,00	622.243,00
13.	SD 21 Totolisi	0,00	105.180,00	0,00	105.180,00
14.	SD 40 Pappota	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
15.	SDN 4 Mekkatta	1.091.675,00	331.200,00	248.000,00	1.670.875,00
16.	SDN 50 Talonga	0,00	0,00	122.760,00	122.760,00
17.	SDN 58 Pangale	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
18.	SDN 39 Batususun	0,00	50.320,00	0,00	50.320,00
19.	SDN 16 Garogo	0,00	457.200,00	0,00	457.200,00
20.	SDN 8 Sirindu	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
21.	SDN 1 Saleppa	2.096.160,00	1.498.076,00	0,00	3.594.236,00
22.	SMP 1 Sendana	6.205.109,00	6.409.960,00	0,00	12.615.069,00
23.	SMP 1 Majene	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
24.	SMP 6 Majene	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
25.	SMP 3 Sendana	177.120,00	189.000,00	104.010,00	470.130,00
26.	SMP 2 Pamboang	0,00	482.416,00	9.200,00	491.616,00
27.	SMP 4 Malunda	0,00	527.500,00	970.000,00	1.497.500,00
Jumlah		13.619.797,00	12.134.932,00	1.977.370,00	27.732.099,00

Berdasarkan tabel diatas, Dimana Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran potongan pajak pada periode berjalan tahun 2024, berikut ini tertera tanggal penyetoran potongan pajak oleh bendahara SKPD.



Tabel 5.53 Daftar Rincian Penyetoran Potongan Pajak

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal setor
1.	Sekretariat Daerah	47.438.391,00	
2.	Dinas Kesehatan		
	a. Puskesmas Banggae II	150.000,00	6 Jan 2024
	b. Puskesmas Tammerodo	22.267.458,00	6 Jan 2024
	c. Puskesmas Salutambung	882.882,00	3 Jan 2024
	d. Puskesmas Ulumanda	369.916,00	6 Mar 2024
	e. Puskesmas Malunda	809.209,00	6 Jan 2024
3.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga		
	a. SDN 3 Tinambung	20.000,00	5 Jan 2024
	b. SDN 7 Taukong	365.000,00	8 Jan 2024
	c. SDN 10 Salutambung	6.000,00	10 Jan 2024
	d. SDN 11 Maliaya	140.580,00	26 Feb 2024
	e. SDN 16 Puare	122.400,00	9 Jan 2024
	f. SDN 12 Pettabeang	45.000,00	8 Jan 2024
	g. SDN 13 Pallarangan	726.000,00	19 Mar 2024
	h. SDN 21 Salutahongan	622.243,00	28 Feb 2024
	i. SDN 21 Totolisi	105.180,00	18 Mar 2024
	j. SDN 40 Pappota	4.500,00	30 Jan 2024
	k. SDN 4 Mekatta	1.670.875,00	3 Feb 2024
	l. SDN 50 Talongga	122.760,00	19 Feb 2024
	m. SDN 58 Pangale	96.000,00	8 Jan 2024
	n. SDN 39 Batu Susun	50.320,00	24 Feb 2024
	o. SDN 16 Garoggo	457.200,00	16 Jan 2024
	p. SDN 8 Sirindu	16.000,00	5 Jan 2024
	q. SDN 1 Saleppa	3.594.236,00	19 Mar 2024
	r. SMP 1 Sendana	12.615.069,00	10 Jan 2024
	s. SMP 1 Majene	43.200,00	9 Jan 2024
	t. SMP 6 Majene	90.000,00	10 Jan 2024
	u. SMP 3 Sendana	470.130,00	9 Feb 2024
	v. SMP 2 Pamboang	491.616,00	29 Jan, 30 Jan, 26 Feb, 14 Mar,
	w. SMP 4 Malunda	1.497.500,00	20 Mar 2024
4.	Tingkat TK/PAUD dan Kesetaraan		
	a. TK Negeri Pembina Pedesaan	212.100,00	27 Feb 2024
	b. TK Negeri Pembina Sendana	266.700,00	28 Feb 2024
	c. TK Negeri Pembina Majene	9.000,00	15 Feb 2024
	d. SPNF SKB Majene	3.872.490,00	19 Mar 2024
Jumlah		99.649.955,00	



5.3.1.1.8. Setara Kas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Setara Kas	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	00,00	00,00	00,00	00,00

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

- 1) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan.
- 2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 3) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Deposito Berjangka ini berupa kertas berharga yang mencantumkan beberapa informasi antara lain Nomor deposito, jangka waktu dan besaran Nominal yang diinvestasikan. Deposito berjangka Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terdiri dari:

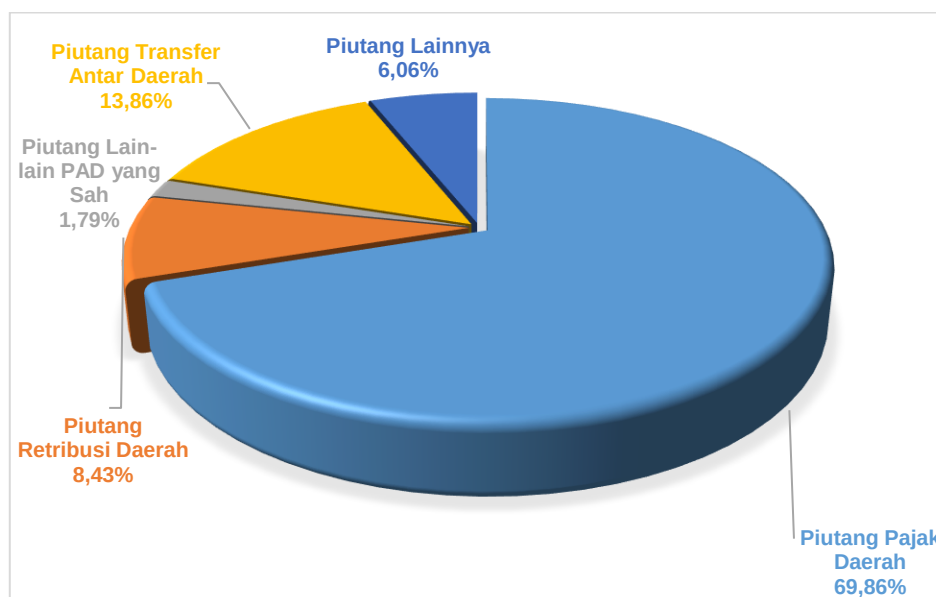
- 1) Deposito dengan nomor B000407 Dengan besaran Nominal Rp5.000.000.000,00 berjangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.
- 2) Deposito dengan nomor B00041408 dengan besaran Nominal Rp5.000.000.000,00 berjangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.
- 3) Deposito dengan nomor B041409 dengan besaran Nominal Rp3.000.000.000,00 berjangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 29 Desember 2023
- 4) Deposito dengan nomor B041410 dengan besaran Nominal Rp2.000.000.000,00 berjangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 29 Desember 2023

Berdasarkan uraian di atas maka Setara Kas pada TA 2023 adalah Nihil.

5.3.1.1.9. Piutang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Piutang	3.212.422.663,26	3.885.272.398,77	(672.849.735,51)	(17,32)
Jumlah	3.212.422.663,26	3.885.272.398,77	(672.849.735,51)	(17,32)

Piutang daerah merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih. Piutang tahun 2023 senilai Rp3.212.422.663,26 merupakan piutang netto atas Piutang pendapatan senilai Rp9.577.282.407,84 dan Penyisihan piutang senilai Rp6.364.859.744,58. Piutang tersebut mengalami penurunan senilai Rp672.849.735,51 dari tahun sebelumnya senilai Rp3.885.272.398,77. Komposisi piutang daerah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5.21 Komposisi Piutang TA. 2023

Secara keseluruhan Piutang Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Majene dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Piutang Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	6.690.953.932,40	6.388.955.683,40
	Piutang Retribusi Daerah	806.913.760,00	828,582,161.00
Dinas Kesehatan	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	283.208.650,00



SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	- Piutang Retribusi Pelataran	369.967.060,00	246.170.060,00
	- Piutang Retribusi Los	0,00	303.000,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	17.336.251,00
Sekretariat Daerah	- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	151.500.000,00	87.500.000,00
	- Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	600.000,00
	- Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	63.200.000,00	46.520.000,00
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	- Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	179.694.200,00	27.465.000,00
	- Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	113.379.200,00
Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	- Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.200.000,00	6.100.000,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	171.858.967,00	269.299,22
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	269.299,22
	- Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa- Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	113.384.000,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	- Piutang Pendapatan BLUD	32.651.467,00	0,00
Dinas Kesehatan	- Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	25.823.500,00	0,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	1.327.402. 19,00	1.710.342.952,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	1.327.402.119,00	1.710.342.952,00
	Piutang Lainnya	580.153.629,44	605.153.629,44
Jumlah		9.577.282.407,84	9.533.303.725,06



5.3.1.1.9.1. Piutang Pajak

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Piutang Pajak	6.690.953.932,40	6.388.955.683,40	301.998.249,00	4,73
Jumlah	6.690.953.932,40	6.388.955.683,40	301.998.249,00	4,73

Piutang pajak pada tahun 2023 tercatat senilai Rp6.690.953.932,40 sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp6.388.955.683,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Daftar Piutang Pajak

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PBB P2	5.384.799.325,00	5.089.032.076,00
Pajak BPHTB	186.132.996,50	186.132.996,50
Pajak Hotel	20.620.000,00	20.620.000,00
Pajak tempat Hiburan	2.250.000,00	2.250.000,00
Pajak Restoran	440.013.091,00	429.232.091,00
Pajak Reklame	68.569.200,00	68.569.200,00
Pajak Galian Gol. C	588.569.319,90	593.119.319,90
Jumlah	6.690.953.932,40	6.388.955.683,40

5.3.1.1.9.2. Piutang Retribusi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Piutang Retribusi	806.913.760,00	828.582.161,00	(21.668.401,00)	(2,62)
Jumlah	806.913.760,00	828.582.161,00	(21.668.401,00)	(2,62)

Piutang retribusi pada tahun 2023 senilai Rp806.913.760,00 sedangkan pada tahun 2022 senilai Rp828.582.161,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56 Daftar Piutang Retribusi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	283.208.650,00
Retribusi Pelayanan Pasar	369.967.060,00	246.473.060,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	17.336.251,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	214.700.000,00	134.620.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	179.694.200,00	140.844.200,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.200.000,00	6.100.000,00
Jumlah	806.913.760,00	828.582.161,00



5.3.1.1.9.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	171.858.967,00	269.299,22	171.589.667,78	63.717.11
Jumlah	171.858.967,00	269.299,22	171.589.667,78	63.717.11

Pemerintah Kabupaten Majene mencatat Piutang Pendapatan Lain-lain PAD per 31 Desember 2023 senilai Rp171.858.967,00. Berikut daftar piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023.

Tabel 5.57 Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	113.384.000,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD RSUD	32.651.467,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	25.823.500,00	0,00
- PKM Banggae II	3.674.200,00	0,00
- PKM Lembang	13.982.000,00	0,00
- PKM Pamboang	6.338.000,00	0,00
- PKM Sendana I	1.053.200,00	0,00
- PKM Sendana II	776.100,00	0,00
Piutang Remunerasi TDF 2022	0,00	269.299,22
Jumlah	171.858.967,00	269.299,22

Piutang Lain-Lain PAD yang sah ini telah disetorkan melewati tahun pelaporan. Berikut rincian saldonya.

1. Piutang Pendapatan dari pengembalian ini merupakan setoran pengembalian Alokasi Dana Desa atas SP2D dobel cair Desa Tubo Poang senilai Rp113.384.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. STS No. 65 Tanggal 6 Maret 2024 Rp53.000.000,00;
 - b. STS No. 73 Tanggal 5 April 2024 Rp10.384.000,00;
 - c. STS No. 71 Tanggal 5 April 2024 Rp35.000.000,00; dan
 - d. STS No. 72 Tanggal 5 April 2024 Rp15.000.000,00.
2. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Prolanis senilai Rp25.823.500,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. PKM Banggae II setoran tanggal 10 Januari 2024 Rp820.000,00 dan setoran tanggal 12 Januari 2024 senilai Rp2.860.000,00 dengan potongan biaya transfer masing-masing Rp2.900,00;



- b. PKM Lembang setoran tanggal 8 Januari 2024 Rp770.000,00 dan setoran tanggal 12 Januari 2024 senilai Rp7.465.000,00 dan setoran tanggal 12 Januari 2024 senilai Rp5.747.000,00 tanpa potongan biaya transfer;
- c. PKM Pamboang setoran tanggal 8 Januari 2024 Rp620.000,00 dan setoran tanggal 12 Januari 2024 senilai Rp5.718.000,00 tanpa potongan biaya transfer;
- d. PKM Sendana I setoran tanggal 8 Januari 2024 Rp400.000,00 dan setoran tanggal 12 Januari 2024 senilai Rp659.000,00 dengan potongan biaya transfer masing-masing Rp2.900,00; dan
- e. PKM Sendana II setoran tanggal 12 Januari 2024 senilai Rp779.000,00 dengan potongan biaya transfer Rp2.900,00.

5.3.1.1.9.4. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Piutang Transfer Antar Daerah	1.327.402.119,00	1.710.342.952,00	(382,940,833.00)	(22.39)
Jumlah	1.327.402.119,00	1.710.342.952,00	(382.940.833,00)	(22.39)

Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi Triwulan IV Tahun 2023 belum diterima daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp1.327.402.119,00 dan Rp1.710.342.952,00. Berikut rincian Piutang Transfer Bagi Hasil pajak Daerah dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.58 Daftar Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bagi Hasil Pajak Rokok	1.327.402.119,00	1.710.342.952,00
Jumlah	1.327.402.119,00	1.710.342.952,00

5.3.1.1.9.5. Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Lainnya	580.153.629,44	605.153.629,44	(25.000.000,00)	(4,13)
Jumlah	580.153.629,44	605.153.629,44	(25.000.000,00)	(4,13)

Piutang Lainnya adalah piutang yang berasal dari pungutan kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam piutang pendapatan. Per 31 Desember 2023 Piutang Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Majene tercatat senilai Rp580.153.629,44. Rincian Piutang Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut.



Tabel 5.59 Rincian Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Setoran (Rp)	Tunggakan Tahun 2022 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.999.299,04	0,00	56.999.299,04
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	523.154.330,40	0,00	523.154.330,40
Tunjangan Komunikasi Insentif dan Biaya Operasional DPRD Tahun 2006 yang Belum Dikembalikan ke Kas Daerah sampai 31 Desember 2019	466.851.500,00	0,00	466.851.500,00
Tunggakan Penjualan Kendaraan Dinas dan Operasional Sesuai SK Bupati Nomor 307 Tahun 2006	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
Denda Keterlambatan atas Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2015	2.845.630,40	0,00	2.845.630,40
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	48.777.200,00	0,00	48.777.200,00
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Jumlah	580.153.629,44	25.000.000,00	605.153.629,44

5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Penyisihan Piutang	(6.364.859.744,58)	(5.648.031.326,29)	(716.828.418,29)	(12,69)
Jumlah	(6.364.859.744,58)	(5.648.031.326,29)	(716.828.418,29)	(12,69)

Penyisihan Piutang pada tahun 2023 senilai (Rp6.364.859.744,58) dan pada tahun 2022 senilai (Rp5.648.031.326,29). Rincian piutang dan penyisihannya dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 3** dalam catatan atas laporan keuangan ini. Adapun rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.60 Daftar Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pajak	(5.451.614.187,20)	(4.892.799.762,34)
Piutang Retribusi	(325.595.622,50)	(174.952.934,51)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(859.294,84)	0,00
- Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa- Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa	(566.920,00)	0,00



Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
- Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(292.374,84)	0,00
- RSUD	163.257,34	0,00
- PKM Banggae II	18.371,00	0,00
- PKM Lembang	69.910,00	0,00
- PKM Pamboang	31.690,00	0,00
- PKM Sendana I	5.266,00	0,00
- PKM Sendana II	3.880,50	0,00
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(6.637.010,60)	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	(125.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(56.999.299,04)	(56.999.299,04)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(523.154.330,40)	(523.154.330,40)
Jumlah	(6.364.859.744,58)	(5.648.031.326,29)

5.3.1.1.11. Persediaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Persediaan	18.934.770.927,78	11.150.041.658,10	7.784.729.269,68	69,82
Jumlah	18.934.770.927,78	11.150.041.658,10	7.784.729.269,68	69,82

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene, perhitungan persediaan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Perpetual

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode perpetual, yaitu pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues*, membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan/bahan farmasi.

2. Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode ini digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2023 senilai Rp18.934.770.927,78 atau naik sebesar 69,82% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp11.150.041.658,10. Berikut rincian persediaan dapat dilihat dalam tabel berikut. Berikut rincian persediaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.61 Rincian Persediaan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Bahan	0,00	21.366.950,00
2.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	955.149.810,73	877.778.186,69
3.	Obat-obatan	10.743.897.603,80	8.713.081.974,41
4.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	7.217.936.572,25	1.537.814.547,00
5.	Natura dan Pakan	17.786.941,00	0,00
Total		18.934.770.927,78	11.150.041.658,10

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan persediaan sebesar Rp7.784.729.269,68 atau sebesar 69,82% yaitu dari 11.150.041.658,10 per 31 Desember 2022 menjadi Rp18.934.770.927,78 per 31 Desember 2023. Kenaikan ini dominan disebabkan oleh penggunaan persediaan obat-obatan dan instalasi farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas se-Kabupaten Majene serta Barang yang belum sempat diserahterimakan kepada masyarakat.

Diketahui bahwa persediaan obat-obatan pada UPTD. Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Majene sebagiannya telah ditetapkan melewati batas masa penggunaan atau kedaluwarsa. Pengadaan obat dan bahan medis habis Pakai (BMHP) dalam perhitungan kebutuhan selalu memperhitungkan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai untuk *Buffer Stock* atau Stok Penyangga untuk mengantisipasi kejadian kekosongan obat dan BMHP pada kondisi tertentu seperti adanya Lonjakan pasien ke Fasilitas Kesehatan, kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit, Bencana Alam dan lain-lain sebesar 10% dari nilai total pagu anggaran Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Penanganan obat kedaluwarsa dalam hal ini pemusnahan di UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Majene dilakukan terakhir pada Tahun 2015. Akibatnya obat yang telah melewati masa kedaluwarsa sejak tahun 2016-2023 masih tersimpan ruang penyimpanan obat kedaluwarsa. Kondisi ruang penyimpanan saat ini hampir penuh sehingga harus ditindaklanjuti untuk melakukan pemilahan obat kedaluwarsa yang sudah menjadi limbah medis dan merupakan bahan kimia berbahaya.

Tercatat obat kedaluwarsa terhitung sejak 2016-2023 senilai Rp1.216.434.242,00 dengan rinciannya sebagai berikut pada Tahun 2016 senilai Rp36.088.599,00 terdiri dari 39 Item. Tahun 2017 senilai Rp141.373.139,00 terdiri dari 26 item. Tahun 2018 senilai Rp117.889.190,00 terdiri dari 14 item. Tahun 2019 senilai Rp191.223.554,00 terdiri dari 48 item. Tahun 2020 senilai Rp264.877.775,00 terdiri dari 53 item. Tahun 2021 senilai Rp159.876.676,00 terdiri dari 58 item. Tahun 2022 senilai Rp204.454.793,00 terdiri dari 31 Item. Tahun 2023 senilai Rp100.650.516,00 terdiri dari 47 item obat dan BMHP. Keseluruhan obat mulai tahun 2016-2023 senilai Rp27.724.224.982,58 diluar pengadaan obat dan bahan medis habis pakai bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat, dengan persentase obat kedaluwarsa sebesar 4,39%. Rincian persediaan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **lampiran 4** dalam catatan atas laporan keuangan ini.



5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Investasi Jangka Panjang	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83	32.307.076.392,00	122,35
Jumlah	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83	32.307.076.392,00	122,35

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp58.711.566.210,83 dan Rp26.404.489.818,83 mengalami peningkatan sebesar 122,35% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.62 Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00
2.	Investasi Non Permanen Lainnya	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)
3.	Investasi Permanen – Penyertaan modal	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83
	Jumlah	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir senilai Rp2.958.167.671,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada tahun 2023 senilai Rp2.958.167.671,00. Adapun rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.63 Daftar Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2023

Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00

5.3.1.2.2. Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Investasi Non Permanen Lainnya	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)	0,00	0,00
Jumlah	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)	0,00	0,00

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya merupakan penyisihan atas Dana Bergulir yang diragukan tertagih atau dikategorikan macet per 31 Desember 2023 senilai (Rp2.958.167.671,00).



5.3.1.2.3. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Investasi Permanen – Penyertaan modal	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83	32.307.076.392,00	122,35
Jumlah	58.711.566.210,83	26.404.489.818,83	32.307.076.392,00	122,35

*Investasi Permanen –
Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Per
31 Desember 2023
adalah senilai
Rp58.711.566.210,83
atau naik 122,35%
dibandingkan dengan
saldo per 31 Desember
2022 senilai
Rp26.404.489.818,83*

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene berupa Penyertaan Modal pada bank Sulselbar, Perusahaan Daerah Air Minum Majene, dan Perusda Aneka Usaha.

Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp58.711.566.210,83 atau mengalami peningkatan sebesar 122,35% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp26.404.489.818,83. Peningkatan saldo investasi permanen terjadi pada Tahun Anggaran 2023 disebabkan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mandar dan laba yang diperoleh Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kabupaten Majene dikurangi dengan kerugian yang dialami oleh PDAM Tirta Mandar pada Tahun 2023. Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Mandar merupakan penerusan hibah dari Kementerian PUPR senilai Rp1.725.000.000,00 dalam rangka pelaksanaan program penyediaan air bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pencairan penyertaan modal tersebut dilakukan dua tahap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/587/Tahun 2023 tertanggal 22 Juni 2023.

Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene pada PDAM Tirta Mandar mengalami penurunan akibat kerugian yang dialami berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Dalam laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Budiandru & Rekan dengan Nomor 00015/04.54/AU.2/10/1826-1/I/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 terhadap laporan keuangan PDAM Tirta Mandar tercatat PDAM Tirta Mandar mengalami kerugian senilai Rp851.274.599,00 pada laporan laba rugi. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017, PDAM Tirta Mandar merupakan BUMD yang kepemilikannya modalnya 100% milik pemerintah daerah. Atas komposisi kepemilikan modal tersebut, maka metode pencatatan investasi dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Olehnya itu kerugian PDAM Tirta Mandar tersebut diakui dan dicatat sebagai beban penurunan nilai investasi pemerintah daerah yang mengurangi nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Mandar.

Selain itu nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene juga mengalami kenaikan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Hal tersebut didasarkan atas laporan

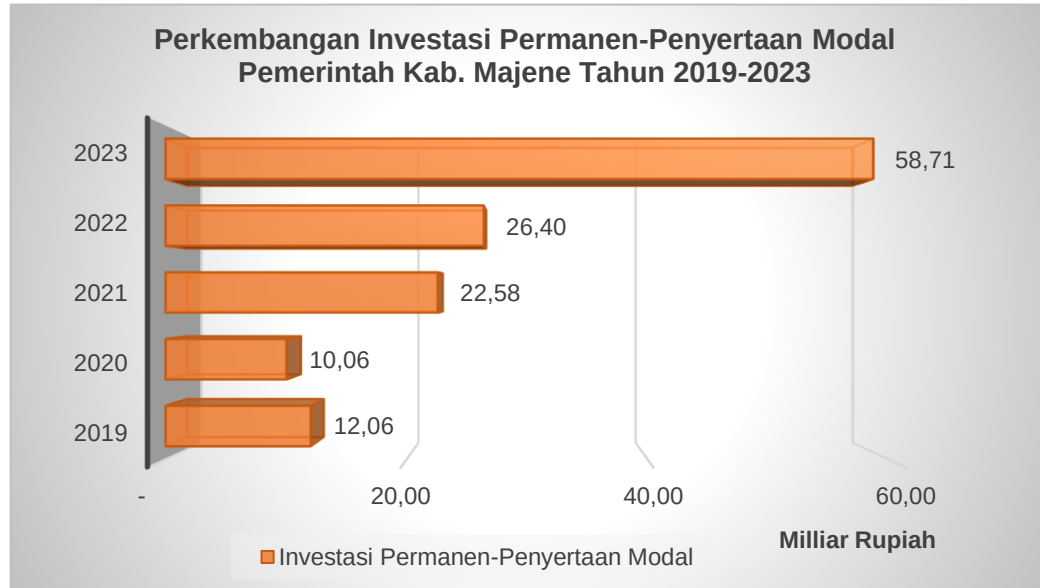


Auditor Independen Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan Nomor : 000030/2.0890/AU.2/05/1495-2/1/IV/2024 dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan Daerah Aneka Usaha, laba yang diperoleh pada Tahun 2023 senilai Rp5.590.759.746,00 dan laba yang diperoleh pada Tahun 2022 senilai Rp25.920.061.221,00. Namun, kenaikan investasi pada tahun 2022 yang diakui hanya senilai Rp25.842.591.245,00. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan kewajiban jangka panjang atas akumulasi kerugian investasi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sejak tahun 2019 sampai 2021 senilai Rp77.469.976,00. Oleh karena itu, total penambahan penyertaan modal atas laba Perusahaan Daerah Aneka Usaha senilai Rp31.433.350.991,00. Mutasi Investasi Permanen Penyertaan Modal Kabupaten Majene Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.64 Mutasi Investasi Permanen - Penyertaan Modal Tahun 2023

No.	Perusahaan	Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Perusda Aneka Usaha	18.236.000.000,00	31.510.820.967,00	77.469.976,00	49.669.350.991,00
2.	PDAM Tirta Mandar	5.168.489.818,83	1.725.000.000,00	851.274.599,00	6.042.215.219,83
3.	Bank Sulselbar	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah		26.404.489.818,83	33.158.350.991,00	851.274.599,00	58.711.566.210,83

Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Kabupaten Majene dari tahun 2019-2023, dapat di lihat pada grafik berikut.



Grafik 5.22 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Kabupaten Majene 2019-2023



5.3.1.3. Aset Tetap

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Aset Tetap	1.590.166.201.673,40	1.501.443.030.038,47	88.723.171.634,93	5,91
Jumlah	1.590.166.201.673,40	1.501.443.030.038,47	88.723.171.634,93	5,91

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Perubahan nilai aset tetap merupakan indikator kemampuan sumber daya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi operasional penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai penopang peningkatan ekonomi wilayah Kabupaten Majene.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap antara lain terdiri dari:

- Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan alat besar, alat angkutan bermotor, alat angkutan tak bermotor, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga alat studio, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu – rambu, dan peralatan olah raga;
- Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung, monumen, bangunan menara, tugu titik kontrol/ pasti, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi;
- Aset Tetap Lainnya, meliputi bahan perpustakaan, bahan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan lainnya, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman dan barang koleksi, dan aset renovasi; dan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Saldo aset tetap pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.590.166.201.673,40 dengan rincian sebagai berikut.

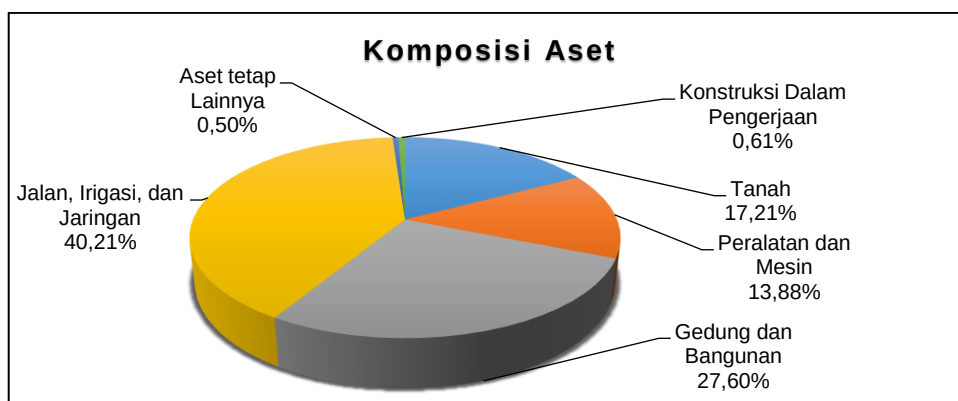
Tabel 5.65 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	453.403.273.655,00
2.	Peralatan dan Mesin	365.654.630.459,57
3.	Bangunan dan Gedung	727.138.651.618,67



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.059.184.874.560,65
5.	Aset Tetap Lainnya	13.081.620.364,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	15.938.153.107,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.044.235.002.091,57)
Jumlah		1.590.166.201.673,40

Komposisi aset tetap berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 5.23 Komposisi Aset Tetap berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa kelompok aset paling material yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majene adalah aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan. Sedangkan kelompok aset yang paling rendah yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah aset tetap lainnya. Laporan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 berdasarkan tabel di atas merupakan akibat dari penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.66 Tabel Penambahan dan Pengurangan Aset tetap TA. 2023

No.	Uraian	Saldo Aset Tetap Tahun 2022 (Rp)	Mutasi Aset		Saldo Aset Tetap Tahun 2023 (Rp)
			Penambahan Aset Tahun 2023 (Rp)	Pengurangan Aset Tahun 2023 (Rp)	
1.	Tanah	463.312.227.957,00	2.670.448.962,00	12.579.403.264,00	453.403.273.655,00
2.	Peralatan dan Mesin	348.618.945.476,57	22.789.791.524,00	5.754.106.541,00	365.654.630.459,57
3.	Bangunan dan Gedung	676.964.053.091,43	62.881.751.176,00	12.707.152.648,76	727.138.651.618,67
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.028.371.277.580,00	43.245.766.538,60	12.432.169.557,95	1.059.184.874.560,65
5.	Aset Tetap Lainnya	13.000.515.364,08	182.013.000,00	100.908.000,00	13.081.620.364,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.938.153.107,00	0,00	0,00	15.938.153.107,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.044.762.142.537,61)	527.140.446,04	0,00	(1.044.235.002.091,57)
Jumlah		1.501.443.030.038,47	132.296.911.646,64	43.573.740.011,71	1.590.166.201.673,40



Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkenaan dengan mutasi akun aset tetap selama tahun 2023 yaitu:

5.3.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Tanah	453.403.273.655,00	463.312.227.957,00	(9.908.954.302,00)	(2,14)
Jumlah	453.403.273.655,00	463.312.227.957,00	(9.908.954.302,00)	(2,14)

Aset Tetap Tanah Tahun 2023 senilai Rp453.403.273.655,00 atau terjadi penurunan sebesar 2,14% dari Tahun 2022

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp453.403.273.655,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp9.908.954.302,00 atau sebesar 2,14% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp463.312.227.957,00. Adapun tabel mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 5.67 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Tanah

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2023		463.312.227.957,00
Penambahan		
1.	Realisasi Belanja Modal	723.073.962,00
2.	Mutasi Masuk	1.947.375.000,00
Jumlah		2.670.448.962,00
Pengurangan		
1.	Mutasi Keluar	12.530.008.264,00
2.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	49.395.000,00
Jumlah		12.579.403.264,00
Saldo per 31 Desember 2023		453.403.273.655,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah selama TA 2023 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp2.670.448.962,00 yang terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp723.073.962,00;
- 2) Mutasi Masuk Rp1.947.375.000,00 yang terdiri dari:
 - a) Mutasi masuk tanah akibat dari hibah Sarana Prasarana dan Utilitas (PSU) Perumahan senilai Rp1.757.980.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/885/XI/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Status dan Pencatatan Aset Daerah atas Perolehan Hibah ke dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene Berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Tahun Anggaran 2023;



- b) Mutasi masuk disebabkan karena perolehan aset dari hutang senilai Rp49.395.000,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- c) Mutasi masuk disebabkan karena berpindahnya aset tetap tanah dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp140.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/884/XI/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Mutasi Barang Milik Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Sekretariat DPRD.

Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp12.579.403.264,00 yakni:

- 1) Mutasi keluar senilai Rp12.530.008.264,00 terdiri dari:
 - a) Penghapusan Aset Tetap Tanah yang telah dihibahkan sebesar Rp12.390.008.264,00 terdiri dari:
 - (1) Hibah Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Majene ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp8.627.213.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/930/XII/TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah Jalan, Jalan dan Jembatan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena Dihibahkan Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.627.213.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (2) Hibah Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Majene ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat senilai Rp3.560.161.619,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/931/XII/TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena Dihibahkan Kepada Kepolisian Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat TA 2023 senilai Rp3.560.161.619,00 dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan
 - (3) Hibah Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Majene ke Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju senilai Rp202.633.645,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/815/X/TAHUN 2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penghapusan barang milik daerah berupa bangunan tanah dan bangunan dari daftar inventaris barang milik daerah tahun anggaran 2023 senilai Rp202.633.645,00 dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
 - b) Pengurangan yang bersumber dari mutasi keluar karena berpindahnya aset tetap tanah dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/884/XI/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Mutasi Barang Milik Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 senilai Rp140.000.000,00 pada Sekretariat DPRD mutasi ke Sekretariat Daerah.
- 2) Reklasifikasi atas Belanja Modal Tanah ke Aset Tak berwujud senilai Rp49.395.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

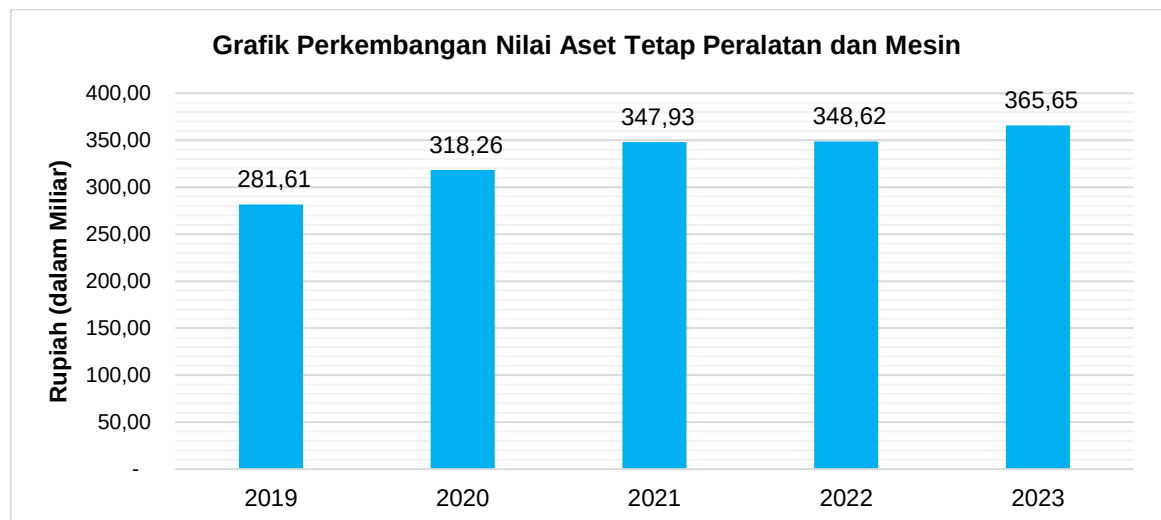


5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Peralatan dan Mesin	365.654.630.459,57	348.618.945.476,57	17.035.684.983,00	4,89
Jumlah	365.654.630.459,57	348.618.945.476,57	17.035.684.983,00	4,89

Aset Tetap Peralatan dan
Mesin Tahun 2023
senilai
Rp365.654.630.459,57
atau terjadi Kenaikan
sebesar 4,89% dari
Tahun 2022

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp365.654.630.459,57. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp17.035.684.983,00 atau sebesar 4,89% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp348.618.945.476,57. Berikut grafik perkembangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir.



Grafik 5.24 Grafik Perkembangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: alat besar, alat angkutan bermotor, alat angkutan tak bermotor, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga alat studio, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu, peralatan olah raga dan lain sebagainya. Adapun rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.68 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Alat Besar	16.260.597.520,00	15.467.266.720,00
2.	Alat Angkutan	70.388.850.534,84	68.416.754.534,84
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.392.907.428,98	2.056.589.928,98



No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4.	Alat Pertanian	3.299.396.465,25	3.294.956.465,25
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	76.486.796.980,81	72.583.216.086,81
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	9.390.976.139,44	9.487.904.069,44
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	86.270.581.693,40	79.724.303.168,40
8.	Alat Laboratorium	28.497.331.552,75	27.655.693.352,75
9.	Alat Persenjataan	275.499.243,00	269.619.243,00
10.	Komputer	65.669.202.276,19	63.124.710.532,19
11.	Alat Keselamatan Kerja	2.831.816.532,00	2.673.674.282,00
12.	Peralatan Proses/Produksi	6.527.000,00	6.527.000,00
13.	Rambu-Rambu	2.347.278.936,91	2.347.278.936,91
14.	Peralatan Olah Raga	1.536.868.156,00	1.510.451.156,00
Jumlah		365.654.630.459,57	348.618.945.476,57

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Adapun mutasi tambah kurang Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.69 Tabel Mutasi Tambah/Mutasi Kurang

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023		348.618.945.476,57
Penambahan		
1.	Realisasi Belanja Modal	18.297.386.946,00
2.	Mutasi Masuk	3.058.804.737,00
3.	Reklasifikasi dan Koreksi masuk	1.433.599.841,00
Jumlah		22.789.791.524,00
Pengurangan		
1.	Mutasi Keluar	3.244.522.711,00
2.	Reklasifikasi Koreksi Keluar	1.941.831.334,00
3.	Tambah/Kurang Aset Ekstrakomptabel	567.752.496,00
Jumlah		5.754.106.541,00
Saldo per 31 Desember 2023		365.654.630.459,57

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2023 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp22.789.791.524,00 yang terdiri dari:

- 1) Penambahan bersumber dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 senilai Rp18.297.386.946,00, yang terdiri dari:



- a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp15.131.671.806,00;
 - b) Belanja modal yang dipisahkan senilai Rp2.463.250.626,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
 - c) Belanja Modal senilai Rp698.464.514,00 yang bersumber dari dana JKN pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari: (1) Puskesmas Banggae I senilai Rp55.814.000,00; (2) Puskesmas Banggae II senilai Rp48.000.000,00; (3) Puskesmas Lembang senilai Rp39.326.000,00; (4) Puskesmas Malunda senilai Rp130.670.000,00; (5) Puskesmas Pamboang senilai Rp51.900.000,00; (6) Puskesmas Salutabung senilai Rp9.430.000,00; (7) Puskesmas Sendana I senilai Rp125.766.000,00; (8) Puskesmas Sendana II senilai Rp62.105.000,00; (9) Puskesmas Tammerodo senilai Rp48.481.514,00; (10) Puskesmas Totoli senilai Rp72.912.000,00; dan (11) Puskesmas Ulumanda senilai Rp54.060.000,00; dan
 - d) Reklasifikasi atas kesalahan belanja barang jasa BOS senilai Rp4.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (SD Negeri 55 Deteng-Deteng).
- 2) Penambahan Mutasi Masuk senilai Rp3.058.804.737,00 yang terdiri dari:
- a) Mutasi masuk disebabkan karena ada Hibah Peralatan dan Mesin berupa kendaraan dinas senilai Rp1.954.640.000,00 berdasarkan SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/905/X/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Status dan Pencatatan Aset Daerah atas Perolehan Hibah ke dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene Berupa Kendaraan Dinas Tahun 2023 yang terdiri dari: (1) senilai Rp35.000.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp1.028.140.000,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp821.500.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan (4) senilai Rp70.000.000,00 pada Kecamatan Banggae;
 - b) Mutasi masuk disebabkan adanya hibah peralatan dan mesin senilai Rp19.078.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/916/XII/TAHUN 2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Pencatatan Aset Daerah atas Perolehan Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat ke dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023;
 - c) Mutasi masuk disebabkan karena perolehan Aset Peralatan Mesin yang bersumber dari hutang senilai Rp473.176.237,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp209.429.237,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan (2) senilai Rp263.747.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan
 - d) Mutasi tambah/masuk disebabkan karena berpindahnya aset peralatan dan mesin dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp611.910.500,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/884/XI/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Mutasi Barang Milik Daerah Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 terdiri dari: (1) senilai Rp250.920.000,00 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp17.000.000,00 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; (3) senilai Rp22.090.000,00 pada Dinas Sosial mutasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah; (4) senilai Rp185.300.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah mutasi dari Sekretariat



Daerah; (5) senilai Rp125.550.500,00 pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mutasi dari Sekretariat Daerah; dan (6) senilai Rp11.050.000,00 pada Kecamatan Banggae Timur mutasi dari Sekretariat DPRD.

Mutasi masuk Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.70 Mutasi Masuk Peralatan Akibat Mutasi antar SKPD Tanggal 30 November 2023

No.	Penambahan pada SKPD	SKPD Asal	Nilai (Rupiah)
1.	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.920.000,00
2.	Sekretariat Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.000.000,00
3.	Dinas Sosial	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.090.000,00
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretariat Daerah	185.300.000,00
5.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	Sekretariat Daerah	125.550.500,00
6.	Kecamatan Banggae Timur	Sekretariat DPRD	11.050.000,00
Jumlah			611.910.500,00

3) Penambahan akibat reklasifikasi dan koreksi masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp1.433.599.841,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) senilai Rp102.623.000,00 berasal dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan
- Reklasifikasi antar akun Belanja Modal Bangunan dan Gedung senilai Rp1.330.976.841,00 terdiri dari: (1) senilai Rp159.712.501,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp1.107.536.340,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; (3) senilai Rp14.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan (4) senilai Rp49.728.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp5.754.106.541,00 yang terdiri dari:

- Pengurangan yang bersumber dari mutasi keluar senilai Rp3.244.522.711,00 terdiri dari:
 - Penghapusan Barang milik Daerah berupa peralatan dan mesin dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp2.632.612.211,00 terdiri dari:
 - Penghapusan/Pemusnahan BMD senilai Rp304.113.334,00 terdiri dari:
 - Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena kategori pakai habis (BPH) senilai Rp274.706.494,00 terdiri dari: (1) senilai Rp83.106.994,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp40.460.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan (3) senilai Rp151.139.500,00 Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan
 - Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena pemusnahan senilai Rp29.406.840,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene SK No. 514/HK/KEP-BUP/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena Telah Dimusnahkan TA 2023 terdiri dari: (1) senilai Rp510.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (2) senilai Rp1.776.000,00 pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; (3) senilai Rp8.972.507,00 pada



- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (4) senilai Rp2.460.000,00 pada Kecamatan Banggae; dan (5) senilai Rp15.688.333,00 pada Kecamatan Banggae Timur.
- (2) Penghapusan BMD karena telah beralih kepemilikan melalui penjualan langsung senilai Rp2.328.498.877. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene SK No. 513/HK/KEP-BUP/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena Telah Beralih Kepemilikan melalui Penjualan Langsung TA. 2023 terdiri dari: (1) senilai Rp66.551.200,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp148.216.346,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (3) senilai Rp6.000.000,00 pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; (4) senilai Rp158.803.778,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (5) senilai Rp1.855.985.053,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (6) senilai Rp8.592.500,00 pada Kecamatan Banggae; (7) senilai Rp37.200.000,00 pada Kecamatan Banggae Timur; (8) Rp9.000.000,00 pada Kecamatan Sendana; (9) senilai Rp18.348.000,00 pada Kecamatan Malunda; dan (10) senilai Rp19.802.000,00 pada Kecamatan Ulumanda.
- b) Mutasi keluar disebabkan karena berpindahnya aset Peralatan dan Mesin SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp611.910.500,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/884/XI/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Mutasi Barang Milik Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 terdiri dari: (1) senilai Rp250.920.000,00 mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp17.000.000,00 mutasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Sekretariat Daerah; (3) senilai Rp22.090.000,00 mutasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Sosial; (4) senilai Rp185.300.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan dan Aset Daerah; (5) senilai Rp125.550.500,00 mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; dan (6) senilai Rp11.050.000,00 mutasi dari Sekretariat DPRD ke Kecamatan Banggae Timur.

Mutasi keluar Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.71 Mutasi Keluar Peralatan Akibat Mutasi antar SKPD Tanggal 30 November 2023

No.	Mutasi keluar	SKPD Penerima	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat Daerah	250.920.000,00
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sekretariat Daerah	17.000.000,00
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Sosial	22.090.000,00
4.	Sekretariat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	185.300.000,00
5.	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	125.550.500,00
6.	Sekretariat DPRD	Kecamatan Banggae Timur	11.050.000,00
JUMLAH			611.910.500,00



- 2) Pengurangan karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.941.831.334,00 terdiri dari:
- a) Koreksi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena kesalahan belanja senilai Rp2.321.600.000,00 pada Dinas Kesehatan;
 - b) Koreksi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor: 12.B/LHP/XIX.MAM/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 senilai Rp244.200.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c) Pengurangan karena pembayaran utang tahun sebelumnya senilai Rp1.710.290.551,00 terdiri dari: (1) senilai Rp275.260.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp21.400.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp5.500.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp633.791.600,00 pada Dinas Kesehatan; (5) senilai Rp536.393.951,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (6) senilai Rp179.300.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; (7) senilai Rp56.145.000,00 pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; dan (8) senilai Rp2.500.000,00 pada Kecamatan Banggae Timur; dan
 - d) Reklasifikasi tambah/kurang aset lainnya senilai (Rp2.334.259.217,00) terdiri dari: (1) senilai (Rp11.050.000,00) pada Sekretariat DPRD; (2) senilai (Rp11.038.500,00) pada Sekretariat Daerah; (3) senilai (Rp66.551.200,00) pada Dinas Kesehatan; (4) senilai (Rp145.366.346,00) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (5) senilai (Rp7.776.000,00) pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; (6) senilai (Rp159.352.285,00) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; (7) senilai (Rp1.855.985.053,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (8) senilai Rp11.038.500,00 pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; (9) senilai (Rp9.960.000,00) pada Kecamatan Banggae; (10) senilai (Rp41.013.333,00) pada Kecamatan Banggae Timur; (11) senilai (Rp4.000.000,00) pada Kecamatan Sendana; (12) senilai (Rp18.348.000,00) pada Kecamatan Malunda; dan (13) senilai (Rp14.857.000,00) pada Kecamatan Ulumanda.
- 3) Tambah/Kurang Aset Ekstrakomptabel Rp567.752.496,00 terdiri dari: (1) senilai Rp5.000.000,00 pada Dinas Perhubungan; (2) senilai Rp16.157.040,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp536.131.956,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; (4) senilai (Rp3.360.000,00) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (5) senilai Rp13.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (6) senilai (Rp7.314.000,00) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (7) senilai Rp18.907.500,00 pada Kecamatan Banggae; (8) senilai (Rp825.000,00) pada Kecamatan Banggae Timur; (9) senilai (Rp5.000.000,00) pada Kecamatan Sendana; dan (10) senilai (Rp4.945.000,00) pada Kecamatan Ulumanda.



5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Gedung dan Bangunan	727.138.651.618,67	676.964.053.091,43	50.174.598.527,24	7,41
Jumlah	727.138.651.618,67	676.964.053.091,43	50.174.598.527,24	7,41

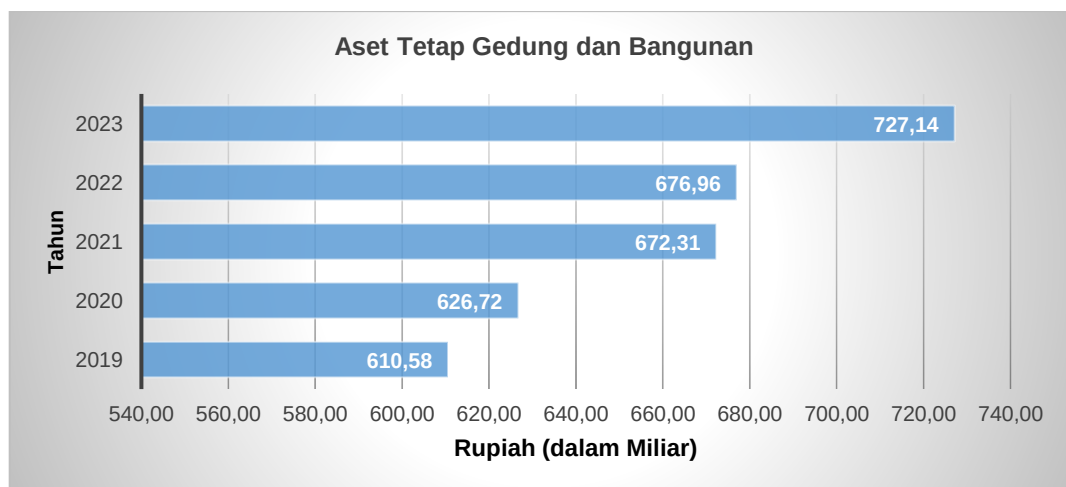
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp727.138.651.618,67 atau terjadi Kenaikan sebesar 7,41% dari Tahun 2022

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp727.138.651.618,67. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp50.174.598.527,24 atau sebesar 7,41% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp676.964.053.091,43. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, bangunan gedung, monumen, bangunan menara, tugu titik kontrol/pasti. Adapun rincian bangunan dan gedung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.72 Rincian Saldo Aset Tetap Bangunan dan Gedung

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Bangunan Gedung	712.949.410.097,67	669.880.452.600,43
2.	Bangunan Monumen	2.343.176.546,00	2.343.176.546,00
3.	Bangunan Menara	664.331.983,00	664.331.983,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.181.732.992,00	4.076.091.962,00
Jumlah		727.138.651.618,67	676.964.053.091,43

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tren perkembangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Majene sampai dengan per 31 Desember 2023 dalam grafik berikut.



Grafik 5.25 Aset Tetap Gedung dan Bangunan



Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Bangunan dan Gedung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.73 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2023		676.964.053.091,43
Penambahan		
1.	Realisasi Belanja Modal	53.184.829.425,00
2.	Mutasi Masuk	9.497.897.350,40
3.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Masuk	199.024.400,60
Jumlah		62.881.751.176,00
Pengurangan		
1.	Mutasi Keluar	7.465.060.305,64
2.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Keluar	5.242.092.343,12
3.	Tambah/(Kurang) Aset Ekstrakomptabel	0,00
Jumlah		12.707.152.648,76
Saldo per 31 Desember 2023		727.138.651.618,67

Adapun rincian penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama TA 2023 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp62.881.751.176,00 yang terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 senilai Rp53.184.829.425,00;
- 2) Penambahan Mutasi Masuk senilai Rp9.497.897.350,40 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mutasi masuk karena adanya hibah gedung dan bangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat senilai Rp4.813.316.439,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/916/XII/TAHUN 2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Pencatatan Aset Daerah atas Perolehan Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat ke dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023.
 - b) Mutasi masuk atas perolehan aset dari hutang Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp1.520.547.512,40 yang terdiri: (1) senilai Rp83.551.044,40 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp188.714.913,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp210.848.100,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (4) senilai Rp1.022.783.455,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan (5) senilai Rp14.650.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Mutasi masuk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.74 Mutasi Masuk atas Pengakuan Hutang Belanja Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.551.044,40
2.	Dinas Kesehatan	188.714.913,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	210.848.100,00
4.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	1.022.783.455,00
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.650.000,00
Jumlah		1.520.547.512,40

c) Mutasi masuk/bertambah Gedung dan Bangunan antar SKPD senilai Rp3.164.033.399,00 terdiri dari:

- (1) Mutasi masuk/bertambah disebabkan karena berpindahnya aset Gedung dan Bangunan dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp418.970.909,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/884/XI/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Mutasi Barang Milik Daerah Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 terdiri dari: (1) senilai Rp20.000.000,00 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp76.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga mutasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah; (3) senilai Rp253.100.000,00 pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mutasi dari Sekretariat Daerah; dan (4) senilai Rp69.370.909,00 pada Kecamatan Pamboang mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi masuk gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.75 Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan Mutasi antar SKPD
Tanggal 30 November 2023**

No.	Penambahan Pada SKPD	SKPD Asal	Nilai (Rupiah)
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	20.000.000,00
2.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	Badan Keuangan dan Aset Daerah	76.500.000,00
3.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Sekretariat Daerah	253.100.000,00
4.	Kecamatan Pamboang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.370.909,00
JUMLAH			418.970.909,00

- (2) Mutasi masuk/bertambah disebabkan karena berpindahnya aset Gedung dan Bangunan dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp2.745.062.490,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/920/XII/Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Mutasi Barang Milik Daerah II Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 terdiri dari: (1) senilai Rp2.411.366.549,00 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2)



senilai Rp184.272.518,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah mutasi dari Dinas Kesehatan; dan (3) senilai Rp149.423.423,00 pada Kecamatan Banggae mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi masuk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.76 Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan Mutasi antar SKPD
Tanggal 15 Desember 2023**

No.	Penambahan Pada SKPD	SKPD Asal	Nilai (Rupiah)
1.	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.411.366.549,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Dinas Kesehatan	184.272.518,00
3.	Kecamatan Banggae	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.423.423,00
JUMLAH			2.745.062.490,00

- 3) Penambahan disebabkan karena reklasifikasi/koreksi senilai Rp199.024.400,60 terdiri dari:
- Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) senilai Rp44.843.800,00 berasal dari belanja barang dan Jasa untuk kegiatan pembangunan, biaya pengawasan dan lainnya memenuhi syarat sebagai aset dan atribusi ke aset pada Dinas Kesehatan;
 - Penambahan gedung dan bangunan yang bersumber dari reklasifikasi dari Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp154.180.600,60 terdiri dari: (1) senilai Rp99.580.600,60 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan (2) senilai Rp54.600.000,00 Pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp12.707.152.648,76 yang terdiri dari:

- Pengurangan/Mutasi keluar Bangunan dan Gedung senilai Rp7.465.060.305,64 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemberian hibah BMD berupa Bangunan dan Gedung ke Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju senilai Rp172.300.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/815/X/TAHUN 2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penghapusan barang milik daerah berupa bangunan tanah dan bangunan dari daftar inventaris barang milik daerah tahun anggaran 2023 pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Penghapusan/Pemusnahan BMD berupa Bangunan dan Gedung senilai Rp3.354.326.906,64 karena telah dirobohkan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene SK Nomor 100.3.3.2/951/XII/TAHUN 2023 tanggal 11 Desember 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari: (1) senilai Rp2.191.847.960,64 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp808.350.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah; dan (3) senilai Rp354.128.946,00 pada Kecamatan Banggae;
 - Pengurangan karena pembayaran utang tahun sebelumnya senilai Rp774.400.000,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp193.500.000,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp541.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan (3) senilai Rp39.500.000,00 pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; dan



d) Mutasi keluar/kurang Gedung dan Bangunan antar SKPD senilai Rp3.164.033.399,00 terdiri dari:

- (1) Mutasi kurang/keluar disebabkan karena berpindahnya aset Gedung dan Bangunan dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp418.970.909,00. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/884/XI/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Mutasi Barang Milik Daerah Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 terdiri dari: (1) senilai Rp20.000.000,00 mutasi dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp253.100.000,00 mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; (3) senilai Rp69.370.909,00 mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Pamboang; dan (4) senilai Rp76.500.000,00 mutasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga;

Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.77 Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD Tanggal 30 November 2023

No.	Pengurangan Pada SKPD	Mutasi Ke SKPD	Nilai (Rupiah)
1.	Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah	20.000.000,00
2.	Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	253.100.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Pamboang	69.370.909,00
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	76.500.000,00
JUMLAH			418.970.909,00

- (2) Mutasi kurang/keluar disebabkan karena berpindahnya aset Gedung dan Bangunan dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp2.745.062.490,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/920/XII/Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Mutasi Barang Milik Daerah II Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023 terdiri dari: (1) senilai Rp2.411.366.549,00 mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp149.423.423,00 mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Banggae; dan (3) senilai Rp184.272.518,00 mutasi dari Dinas Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah.

Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 5.78 Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi
antar SKPD Tanggal 15 Desember 2023**

No.	Pengurangan Pada SKPD	Mutasi Ke SKPD	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat Daerah	2.411.366.549,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Banggae	149.423.423,00
3.	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	184.272.518,00
JUMLAH			2.745.062.490,00

- 2) Pengurangan/Mutasi Keluar Aset tetap Gedung dan Bangunan disebabkan karena reklasifikasi/koreksi senilai Rp5.242.092.343,12 yang terdiri dari:
- a) Koreksi atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi definisi aset tetap senilai Rp1.275.671.790,00 karena kesalahan belanja yang semestinya masuk pada kategori belanja yang diserahkan yang terdiri dari: (1) senilai Rp707.104.427,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan (2) senilai Rp568.567.363,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga;
 - b) Koreksi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor: 12.B/LHP/XIX.MAM/05/2023 tanggal: 22 Mei 2023 senilai Rp36.632.630,12 terdiri dari: (1) senilai Rp9.366.764,62 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp3.098.282,52 pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan (3) senilai Rp24.167.582,98 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga;
 - c) Mutasi kurang Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi antar akun belanja modal ke senilai Rp3.929.787.923,00 terdiri dari:
 - (1) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp1.279.968.841,00 terdiri dari: (1) senilai Rp159.712.501,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp1.106.256.340,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; (3) senilai Rp14.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (2) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi senilai Rp2.443.869.082,00 terdiri dari: (1) senilai Rp2.421.869.082,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; (2) senilai Rp22.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (3) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Belanja Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.
 - (4) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke Belanja Aset Tak Berwujud senilai Rp203.850.000,00 terdiri dari: (1) senilai Rp199.350.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan (2) senilai Rp4.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.



5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.059.184.874.560,65	1.028.371.277.580,00	30.813.596.980,65	3,00
Jumlah	1.059.184.874.560,65	1.028.371.277.580,00	30.813.596.980,65	3,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp1.059.184.874.560,65 atau terjadi Kenaikan sebesar 3,00 % dari Tahun 2022

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.059.184.874.560,65. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.813.596.980,65 atau sebesar 3,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp1.028.371.277.580,00. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Adapun rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.79 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	667.512.693.580,27	647.602.473.548,00
2.	Bangunan Air (Irigasi)	362.272.505.142,73	351.911.128.194,35
3.	Instalasi	20.153.806.431,00	19.611.806.431,00
4.	Jaringan	9.245.869.406,65	9.245.869.406,65
Jumlah		1.059.184.874.560,65	1.028.371.277.580,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.80 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2023		1.028.371.277.580,00
Penambahan		
1.	Realisasi Belanja Modal	31.464.043.269,00
2.	Mutasi Masuk	9.248.354.092,60
3.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	2.533.369.177,00
Jumlah		43.245.766.538,60
Pengurangan		
1.	Mutasi keluar	11.582.898.927,00
2.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	849.270.630,95
3.	Tambah / (Kurang) Aset Ekstrakomptabel	-
Jumlah		12.432.169.557,95
Saldo per 31 Desember 2023		1.059.184.874.560,65



Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2023 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp43.245.766.538,60 yang terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp31.464.043.269,00;
- 2) Penambahan Mutasi Masuk senilai Rp9.248.354.092,60 yang terdiri dari:
 - a) Mutasi tambah Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp7.975.509.750,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/916/XII/TAHUN 2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Pencatatan Aset Daerah Atas Perolehan Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat ke dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023;
 - b) Mutasi tambah aset tetap jalan jaringan dan irigasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang bersumber dari hibah sarana prasarana utilitas perumahan senilai Rp179.190.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/885/XI/TAHUN 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Status Dan Pencatatan Aset Daerah Atas Perolehan Hibah ke dalam Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene Berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Tahun Anggaran 2023; dan
 - c) Mutasi tambah Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari hutang senilai Rp1.093.654.342,60 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3) Penambahan Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari reklasifikasi dan koreksi atas belanja senilai Rp2.533.369.177,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi atas pencatatan aset JIJ berupa Bangunan WC umum di *Sport Center* yang penganggarnya berupa barang yang akan diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp89.500.095,00; dan
 - b) Penambahan Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan Bangunan senilai Rp2.443.869.082,00 terdiri dari: (1) senilai Rp2.421.869.082,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan (2) senilai Rp22.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp12.432.169.557,95 yang terdiri dari:

- 1) Pengurangan/Mutasi keluar Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp11.582.898.927,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Pengurangan bersumber dari mutasi keluar berupa hibah Pemerintah Kabupaten Majene ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp10.762.132.927,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene



Nomor: 100.3.3.2/930/XII/TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan, Jalan dan Jembatan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena Dihilangkan Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023; dan

- b) Mutasi keluar/kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan karena pembayaran utang tahun sebelumnya senilai Rp820.766.000,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp545.006.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp134.645.000,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp96.365.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan (4) senilai Rp44.750.000,00 pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Reklasifikasi/Koreksi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp849.270.630,95 yang terdiri dari:
- a) Koreksi atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022 Nomor: 12.B/LHP/XIX.MAM/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 senilai Rp174.221.423,35 pada yang terdiri dari: (1) senilai Rp117.628.463,43 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan (2) senilai Rp56.592.959,92 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b) Mutasi kurang karena reklasifikasi antar akun Belanja Modal senilai Rp675.049.207,60 terdiri dari:
 1. Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp99.580.602,60 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Bangunan dan Gedung senilai Rp54.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan
 3. Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Aset Tak Berwujud senilai Rp520.868.605,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Aset Tetap Lainnya	13.081.620.364,08	13.000.515.364,08	81.105.000,00	0,62
Jumlah	13.081.620.364,08	13.000.515.364,08	81.105.000,00	0,62

Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 senilai Rp13.081.620.364,08 atau terjadi kenaikan sebesar 0,62% dari Tahun 2022.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp13.081.620.364,08. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp81.105.000,00 atau sebesar 0,62% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp13.000.515.364,08.



Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman dan termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Adapun rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.81 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Bahan Perpustakaan	5.281.113.515,08	5.224.708.515,08
2.	Brg. Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.147.932.953,00	3.123.232.953,00
3.	Tanaman	112.647.000,00	112.647.000,00
4.	Aset Tetap dalam renovasi	4.539.926.896,00	4.539.926.896,00
Jumlah		13.081.620.364,08	13.000.515.364,08

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.82 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Tetap Lainnya

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2023		13.000.515.364,08
Penambahan		
1.	Realisasi Belanja Modal	179.508.000,00
2.	Mutasi Masuk	405.000,00
3.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	2.100.000,00
Jumlah		182.013.000,00
Pengurangan		
1.	Mutasi Keluar	67.900.000,00
2.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	14.708.000,00
3.	Tambah / (Kurang) Aset Ekstrakomptabel	18.300.000,00
Jumlah		100.908.000,00
Saldo per 31 Desember 2023		13.081.620.364,08

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama TA 2023 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai Rp182.013.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 senilai Rp179.508.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Realisasi Belanja Modal non BOS senilai Rp149.178.000,00 TA 2023; dan
 - b) Realisasi Belanja Modal BOS senilai Rp30.330.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.



- 2) Mutasi masuk yang bersumber dari Belanja Modal yang dipisahkan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) senilai Rp405.000,00; dan
- 3) Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp100.908.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Mutasi Kurang karena penghapusan Aset Tetap Lainnya karena penjualan senilai Rp67.900.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 513/HK/KEP-BUP/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena Telah Beralih Kepemilikan melalui Penjualan Langsung TA 2023;
- 2) Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi/koreksi belanja senilai Rp14.708.000,00 terdiri dari:
 - a) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi/koreksi antar akun Belanja Modal Aset Tetap lainnya ke Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp51.008.000,00 terdiri dari: (1) senilai Rp1.280.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan (2) senilai Rp49.728.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; dan
 - b) Tambah/(Kurang) Aset Lainnya pada Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar (Rp36.300.000,00) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .
- 3) Tambah/(Kurang) Aset Ekstrakomptabel pada Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp18.300.000,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp49.900.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga; dan (2) senilai (Rp31.600.000,00) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.938.153.107,00	15.938.153.107,00	0,00	0,00
Jumlah	15.938.153.107,00	15.938.153.107,00	0,00	0,00

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 senilai Rp15.938.153.107,00 atau terjadi kenaikan sebesar 0% dari Tahun 2022

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp15.938.153.107,00 Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp0,00 atau sebesar 0% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp15.938.153.107,00. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.83 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023		15.938.153.107,00
Penambahan		
1.	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	0,00
Jumlah		0,00



No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Pengurangan		
1.	Reklasifikasi Aset Tetap	0,00
Jumlah		0,00
Saldo per 31 Desember 2023		15.938.153.107,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Akumulasi Penyusutan	1.044.235.002.091,57	1.044.762.142.537,61	(527.140.446,04)	(0,05)
Jumlah	1.044.235.002.091,57	1.044.762.142.537,61	(527.140.446,04)	(0,05)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 senilai Rp1.044.235.002.091,57 atau terjadi Penurunan sebesar 0,05% dari Tahun 2022

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.044.235.002.091,57. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp527.140.446,04 atau 0,05% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp1.044.762.142.537,61. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.84 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2023 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	453.403.273.655,00	0,00	453.403.273.655,00
2.	Peralatan dan Mesin	365.654.630.459,57	289.658.049.224,11	75.996.581.235,46
3.	Gedung dan Bangunan	727.138.651.618,67	326.558.620.004,46	400.580.031.614,21
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.059.184.874.560,65	425.989.519.684,00	633.195.354.876,65
5.	Aset Tetap Lainnya	13.081.620.364,08	2.028.813.179,00	11.052.807.185,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.938.153.107,00	0,00	15.938.153.107,00
Jumlah		2.634.401.203.764,97	1.044.235.002.091,57	1.590.166.201.673,40

Terdapat koreksi nilai pada saldo awal Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan yang disebabkan karena kesalahan dalam perhitungan aset yang terkapitalisasi dan perhitungan masa manfaat yang keliru yang terdiri dari:

1. Koreksi saldo awal penyusutan sebesar (Rp102.531.102.698,14) yang terdiri dari: (1) Peralatan dan Mesin senilai Rp255.302,00; (2) Gedung dan Bangunan sebesar (Rp44.346.299.067,35); dan (3) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp58.185.058.932,79).



2. Koreksi beban penyusutan sebesar (Rp19.654.739.144,89) yang terdiri dari: (1) Peralatan dan Mesin senilai Rp31.017.654,00; (2) Gedung dan Bangunan sebesar (Rp8.057.706.730,89); dan (3) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp11.628.050.068,00).

5.3.1.4. Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Aset Lainnya	6.312.594.785,16	7.036.503.759,16	(723.908.974,00)	(10,29)
Jumlah	6.312.594.785,16	7.036.503.759,16	(723.908.974,00)	(10,29)

Saldo Aset lainnya
per 31 Desember
2023 senilai
Rp6.312.594.785,16.

Mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Selain itu, terdapat juga Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Sementara Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan dikategorikan rusak berat.

Aset tetap yang dikelompokkan sebagai Aset Lainnya merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain, yang disebabkan karena kondisi rusak berat, tidak diketahui keberadaannya serta kondisi lain yang menyebabkan aset tetap tidak bisa dimanfaatkan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp6.312.594.785,16. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp723.908.974,00 dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp7.036.503.759,16.

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Tagihan Jangka Panjang	300.449.791,00	300.449.791,00	0,00	0,00
Jumlah	300.449.791,00	300.449.791,00	0,00	0,00

Tagihan Jangka Panjang merupakan tagihan atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2005 s.d. 2009 yang belum dikembalikan. Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp300.449.791,00. Nilai tersebut masih sama dengan periode pembukuan sebelumnya per 31 Desember 2022 dikarenakan tidak terdapat realisasi pembayaran atas pengembalian saldo kas sepanjang periode TA 2023.



5.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Aset Tak Berwujud Nilai Neto	1.403.679.736,84	1.439.300.769,83	(35.621.032,99)	(2,47)
Jumlah	1.403.679.736,84	1.439.300.769,83	(35.621.032,99)	(2,47)

Nilai neto Aset Tak Berwujud Tahun 2023 senilai Rp1.403.679.736,84 atau terjadi penurunan sebesar (2,47) % dari Tahun 2022

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp5.964.632.711,00 dengan nilai neto Rp1.403.679.736,84. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp35.621.032,99 atau sebesar 2,47% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp5.190.519.106,00 dengan nilai neto Rp1.439.300.769,83. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.85 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023		5.190.519.106,00
Penambahan		
1.	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (ATB)	774.113.605,00
Jumlah		774.113.605,00
Pengurangan		
1.	Mutasi Keluar	0,00
Jumlah		0,00
Saldo per 31 Desember 2023		5.964.632.711,00

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tak Berwujud selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

Penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp774.113.605,00 bersumber dari:

- 1) Penambahan dari reklasifikasi Belanja senilai Rp774.113.605,00 terdiri dari:
 - a) Penambahan yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Bangunan Gedung ke Belanja Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp108.758.299,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp104.258.299,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan (2) senilai Rp4.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga;
 - b) Penambahan yang bersumber dari reklasifikasi Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi ke Belanja Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp491.965.408,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - c) Penambahan yang bersumber dari Utang ke Belanja Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp173.389.900,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp49.395.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan (2) senilai Rp123.994.900,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Untuk mengetahui lebih jelas penyajian nilai Aset Tak Berwujud dengan nilai neto dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.86 Aset Tak Berwujud dan Amortisasi

No.	Nama SKPD	Harga Perolehan 2023 (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku/Neto (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	40.000.000,00	10.833.333,00	29.166.667,00
2.	Sekretariat Daerah	110.800.000,00	110.800.000,00	-
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.474.241.082,00	1.420.141.636,33	1.054.099.445,67
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	99.195.000,00	26.966.563,00	72.228.437,00
5.	Dinas Kesehatan	1.185.232.500,00	1.049.744.687,50	135.487.812,50
6.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	893.726.000,00	889.208.833,33	4.517.166,67
7.	Dinas PMD	14.077.320,00	14.077.320,00	-
8.	Dinas PPPA	3.120.000,00	3.120.000,00	-
9.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	4.870.372,00	4.870.372,00	-
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.870.372,00	4.870.372,00	-
11.	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian	49.900.000,00	43.662.500,00	6.237.500,00
12.	Badan Pendapatan Daerah	816.100.657,00	777.325.657,00	38.775.000,00
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	54.870.372,00	18.412.039,00	36.458.333,00
14.	Badan Perencanaan Daerah	31.999.036,00	31.999.036,00	-
15.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	36.630.000,00	9.920.625,00	26.709.375,00
16.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	145.000.000,00	145.000.000,00	-
Jumlah Nilai Perolehan		5.964.632.711,00	4.560.952.974,16	1.403.679.736,84

Bahwa untuk nilai Aset Tak Berwujud (ATB) saldo awal per 31 Desember 2023 dengan nilai perolehan senilai Rp5.964.632.711,00 dan Amortisasi senilai Rp4.560.952.974,16.

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Aset Lain-lain	4.608.465.257,32	5.296.753.198,32	(688.287.941)	(12,99)
Jumlah	4.608.465.257,32	5.296.753.198,32	(688.287.941)	(12,99)



Aset lain-lain neto tahun 2023 senilai Rp4.608.465.257,32 mengalami penurunan sebesar 12,99% dari tahun 2022 dengan nilai senilai Rp5.296.753.198,32

Aset Lain-Lain tahun 2023 dengan nilai neto senilai Rp4.608.465.257,32 dengan nilai bruto senilai Rp43.423.051.158,22 mengalami Penurunan senilai Rp688.287.941 atau sebesar 12,99% dari tahun 2022 dengan nilai senilai Rp5.296.753.198,32.

Aset Lain-Lain tahun 2023 senilai Rp43.423.051.158,22 yang terdiri dari Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain senilai Rp42.791.106.158,22 dan Aset Lain-Lain Lainnya (TDF) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara senilai Rp631.945.000,00. Atas Aset Lain-Lain yang telah dihentikan penggunaannya terdapat akumulasi penyusutan senilai Rp38.814.585.900,90. Sehingga nilai neto dari Aset Lain-Lain senilai Rp4.608.465.257,32 (Rp3.976.520.257,32 + Rp631.945.000,00).

Tabel 5.87 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2023 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	37.208.318.861,79	35.222.486.663	1.985.832.198,79
3.	Gedung dan Bangunan	3.502.155.685,03	2.469.730.416	1.032.425.269,03
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	712.868.249,50	172.809.190	540.059.059,50
5.	Aset Tetap Lainnya	1.367.763.361,90	949.559.631,90	418.203.730,00
Jumlah		42.791.106.158,22	38.814.585.900,90	3.976.520.257,32

5.3.2. KEWAJIBAN

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kewajiban	57.608.887.592,45	57.415.812.749,33	193.074.843,12	0,34
Jumlah	57.608.887.592,45	57.415.812.749,33	193.074.843,12	0,34

Saldo Kewajiban Pemerintah kabupaten Majene per 31 Desember 2023 senilai Rp57.608.887.592,45 yang mengalami penurunan senilai Rp193.074.843,12 atau sekitar 0,34% dari tahun sebelumnya

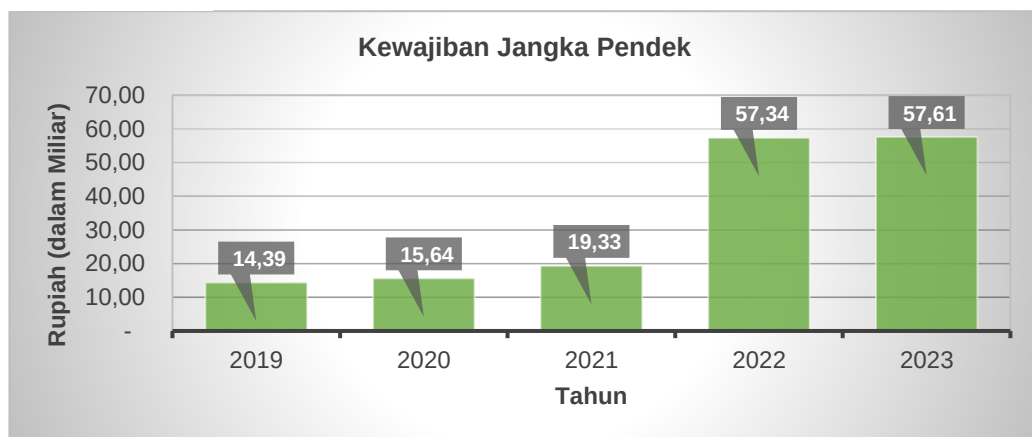
Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp57.608.887.592,45 sedangkan pada periode sebelumnya pada tahun 2022 senilai Rp57.415.812.749,33. Saldo kewajiban tersebut mengalami kenaikan senilai Rp193.074.843,12 atau sekitar 0,34% dari tahun sebelumnya. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp57.608.887.592,45 dan Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp0,00. Pos yang mengalami peningkatan adalah Kewajiban Jangka Pendek yaitu utang belanja yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dapat dibayar oleh pemerintah daerah akibat tidak adanya kas yang cukup pada akhir tahun untuk membiayai belanja tersebut.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kewajiban Jangka Pendek	57.608.887.592,45	57.338.342.773,33	270.544.819,12	0,47
Jumlah	57.608.887.592,45	57.338.342.773,33	270.544.819,12	0,47

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 senilai Rp57.608.887.592,45 yang mengalami penurunan senilai Rp270.544.819,12 atau sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp57.608.887.592,45 dan tahun 2022 adalah senilai Rp57.338.342.773,33. Saldo tersebut mengalami kenaikan senilai Rp270.544.819,12 atau sebesar 0,47%. Tren Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5.26 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2023

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman dalam negeri (obligasi), pinjaman lembaga internasional, pinjaman dari pemerintah lain, atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Karakteristik kewajiban jangka pendek yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang relatif cepat, maka kewajiban jangka pendek menjadi salah satu indikator dalam analisis laporan keuangan pada aspek solvabilitas.

1) Analisis Rasio Solvabilitas - Debt to Equity

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva pemerintah dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung

pemerintah dibandingkan dengan aktivasnya. Rasio solvabilitas - *Debt to Equity* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio solvabilitas - *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.88 Tren Rasio Solvabilitas - *Debt to Equity* Kabupaten Majene 2019-2023

Tahun	Utang (Rp)	Ekuitas (Rp)	<i>Debt to Equity Ratio</i>
2019	14.394.194.524,65	1.572.507.169.905,55	0,009
2020	15.637.663.582,99	1.567.136.324.807,57	0,01
2021	19.331.177.833,82	1.591.813.548.616,05	0,012
2022	57.338.342.773,33	1.500.805.258.062,52	0,038
2023	57.608.887.592,45	1.628.208.973.061,58	0,035

Rasio solvabilitas *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 0,0035 dan jika dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,038 maka diketahui bahwa terdapat penurunan rasio solvabilitas *Debt to Equity* sebesar 0,003. Kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan ekuitas tahun 2023 yang bersumber dari koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023. Adapun rasio solvabilitas *Debt to Equity* paling rendah terjadi pada tahun anggaran 2019. Namun secara umum rasio solvabilitas *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene masih relatif sangat kecil atau dapat dikatakan dalam batas aman.

2) Analisis Rasio Solvabilitas - *Debt to Assets*

Rasio solvabilitas *Debt to Assets* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total aset pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki pemerintah daerah yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap pembiayaan dari aset. Semakin tinggi rasio ini semakin besar risiko yang dihadapi. Sehingga dengan demikian, rasio ini merupakan indikator sejauh mana utang pemerintah daerah dapat ditutupi dengan aset yang dimilikinya. Tabel di bawah ini merupakan daftar rasio solvabilitas - *Debt to Assets* Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019-2023.

Tabel 5.89 Tren Rasio Solvabilitas - *Debt to Assets* Kabupaten Majene 2019-2023

Tahun	Utang (Rp)	Aset (Rp)	<i>Debt to Assets Ratio</i>
2019	14.394.194.524,65	1.586.901.364.430,00	0,009
2020	15.637.663.582,99	1.582.773.988.390,56	0,01
2021	19.331.177.833,82	1.611.222.196.425,87	0,012
2022	57.415.812.749,33	1.558.221.070.811,85	0,037
2023	57.608.887.592,45	1.685.817.860.654,03	0,034

Dalam kurun waktu lima tahun, rasio solvabilitas *Debt to Assets* Pemerintah Kabupaten Majene mengalami peningkatan secara berturut-turut sejak tahun 2019 hingga 2022 karena

adanya peningkatan jumlah utang yang cukup signifikan. Antara tahun 2022 hingga 2023 terjadi penurunan sebesar 0,003. Penurunan rasio solvabilitas *Debt to Assets* pada tahun 2023 ini terjadi karena adanya koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 yang menambah nilai aset tetap tahun 2023. Adapun rasio paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,009 dan tertinggi tahun 2022 yakni sebesar 0,037. Berdasarkan rasio tersebut diketahui bahwa aset Pemerintah Kabupaten Majene dapat menjamin utang yang dimiliki.

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	109.162.361,00	33.020.669,00	76.141.692,00	230,59
Jumlah	109.162.361,00	33.020.669,00	76.141.692,00	230,59

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp109.162.361,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut terdapat pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, dan Dinas Kesehatan. Adapun Rincian utang Perhitungan Pihak ketiga untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **lampiran 5** dalam catatan laporan keuangan ini. Berikut daftar utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023.

Tabel 5.90 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	27.337.109,00
2.	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)	36.523.827,00
3.	Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)	33.521.462,00
4.	Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)	2.228.542,00
5.	Iuran Wajib Pegawai	9.512.406,00
6.	Iuran Jaminan Kesehatan	39.015,00
	Jumlah	109.162.361,00

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Diterima Dimuka				
- Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi	7.583.333,33	46.583.333,33	(39.000.000,00)	(83,72)
Jumlah	7.583.333,33	46.583.333,33	(39.000.000,00)	(83,72)



Pendapatan Diterima Dimuka atas retribusi penyewaan kekayaan senilai Rp7.583.333,33 tercatat pada Sekretariat Daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas daerah tersebut.

Dalam pengelolaan dan pencatatan pendapatan daerah yang berlangsung di Kabupaten Majene, transaksi penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka diberlakukan pada 2 (dua) sumber pendapatan yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pendapatan Diterima Dimuka Pajak, wajib pajak menyetorkan beban pajak kepada pemerintah daerah atas suatu hak yang dapat dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Begitu juga dengan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi dimana masyarakat membayar retribusi kepada pemerintah daerah dalam rangka memperoleh suatu hak atas barang/jasa yang dimiliki pemerintah. Pendapatan Diterima Dimuka pada tahun 2023 hanya terdapat pada satu SKPD pada Sekretariat Daerah yakni penyewaan sebagian tanah dari untuk fasilitas ATM kepada Bank BNI.

Diketahui terdapat Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Daerah tercatat pada Sekretariat Daerah atas sewa lahan dan bangunan. Per 31 Desember 2023 terdapat saldo senilai Rp7.583.333,33. Saldo tersebut dicatat dan diakui atas Pendapatan Diterima Dimuka yang timbul pada TA 2023.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.91 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
1.	Sekretariat Daerah	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Atas Sewa Tanah Dan Gedung	7.583.333,33	46.583.333,33	39.000.000,00	(83,72)
Jumlah			7.583.333,33	46.583.333,33	39.000.000,00	(83,72)

Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan perjanjian sewa lahan yang dikelola tercatat pada Sekretariat Daerah terdiri atas PT. Bank Sulselbar Cabang Majene dengan Kontrak Nomor 134.4/001/Ks Lembaga/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019 yang tidak menghasilkan pendapatan diterima dimuka sampai per 31 Desember 2023. Begitu pun pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Kontrak Nomor 17 Januari 2022/KS-Lembaga/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 tidak menghasilkan pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023. Terakhir pada PT. Bank Negara Indonesia dengan Kontrak Nomor 134.4/14/Ks-Lembaga/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022 yang menghasilkan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp7.583.333,33.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan perjanjian sewa lahan yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.92 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan

No.	Nama Penyewa	Waktu Perjanjian	Sewa/Tahun (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1.	PT. Bank Sulselbar Cabang Majene a. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Depan Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga b. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Depan Kantor Satpol PP Kab. Majene	02/01/2019 5 Tahun (2 Januari 2019 s/d 2 Januari 2024)	13.000.000,00	65.000.000,00	0,00
2.	PT. Bank Rakyat Indonesia a. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Kantor Bupati Majene b. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Ex. Kantor Dispenda Jl. Sultan Hasanuddin, Lembang c. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan RSUD Majene Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Banggae	17/01/2022 2 Tahun (17 Januari 2022 s/d 17 Januari 2024)	19.500.000,00	39.000.000,00	0,00
3.	PT. Bank Negara Indonesia a. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Ex. Kantor Dispenda Jl. Sultan Hasanuddin, Lembang	11/03/2022 3 Tahun (11 Maret 2022 s/d 11 Maret 2025)	6.500.000,00	19.500.000,00	7.583.333,33
Jumlah			39.000.000,00	123.500.000,00	7.583.333,33

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Utang Belanja	57.491.941.898,12	57.117.850.133,00	374.091.765,12	0,65
Jumlah	57.491.941.898,12	57.117.850.133,00	374.091.765,12	0,65

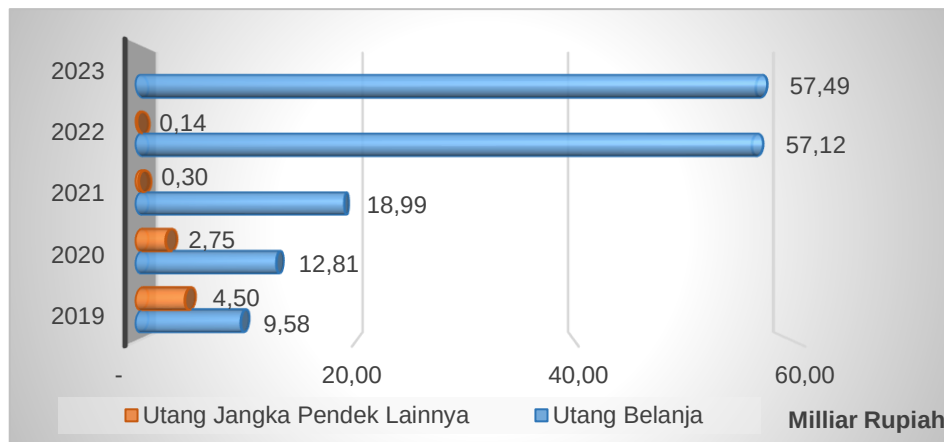
Utang Belanja per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp57.491.941.898,12

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 senilai Rp57.491.941.898,12 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp57.117.850.133,00 dimana terjadi kenaikan senilai Rp374.091.765,12 atau 0,65%. Utang senilai Rp57.491.941.898,12 merupakan sisa utang tahun 2019 hingga 2022 serta penambahan utang baru pada tahun 2023 yang hingga akhir periode belum terbayarkan. Rincian jumlah utang belanja per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 6** dan **lampiran 7**. Adapun rincian utang belanja berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.93 Utang Belanja Menurut Jenisnya s.d. 31 Desember 2023

No.	Unit Kerja	Total Utang s.d 2023 (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	8.762.159.186,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	38.866.396.700,12
3.	Utang Belanja Modal Tanah	8.346.700,00
4.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.177.364.052,00
5.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.780.767.165,00
6.	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.547.513.095,00
7.	Utang Belanja Tidak Terduga	260.000.000,00
8.	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	89.395.000,00
Jumlah		57.491.941.898,12

Kewajiban jangka pendek tersebut berdasarkan kriterianya disajikan pada jenis Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Belanja senilai Rp57.491.941.898,12 merupakan utang yang diakui pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Nomor 700.033/LHR/2024 tanggal 14 Maret 2024, LHR Nomor 700.012/LHP/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, dan LHR Nomor: 700.011/LHP/III/2024 tanggal 15 Maret 2024. Berikut perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang disajikan pada grafik berikut.



Grafik 5.27 Perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya 2019-2023

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Utang Jangka Pendek Lainnya	200.000,00	140.888.638,00	(140.688.638,00)	(99,86)
Jumlah	200.000,00	140.888.638,00	(140.688.638,00)	(99,86)



Utang Jangka Pendek
Lainnya per 31 Desember
2023 tercatat senilai
Rp200.000,00,

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp200.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp140.888.638,00 dimana terjadi penurunan sebesar 99,86%. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2023 tersebut merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran Kelurahan Banggae yang diperuntukkan untuk Belanja ATK tetapi belum terbayarkan di TA 2023. Atas utang tersebut telah dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2024.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	77.469.976,00	(77.469.976,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	77.469.976,00	(77.469.976,00)	(100,00)

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan jumlah Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp77.469.976,00 atau 100,00% dari Rp77.469.976,00. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2022 merupakan akumulasi kerugian yang terjadi pada Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021. Saldo tersebut telah dikoreksi/dihapuskan karena pada tahun 2022 dan 2023 Perusda Aneka Usaha telah mencatatkan keuntungan masing-masing senilai Rp25.920.061.221,00 dan Rp5.590.759.746,00. Keuntungan tersebut tertuang pada Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Tanggal 31 Desember 2022 Nomor 00061/2.0890/AU.2/05/1495-1/1/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 untuk tahun 2022 dan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Tanggal 31 Desember 2023 Nomor 000040/2.0890/AU.2/05/1495-2/1/IV/2024 tanggal 29 April 2024 untuk tahun 2023.

Sesuai PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (revisi 2016) paragraf 20 yang menyatakan bahwa “Jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi tersebut, maka nilai akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.” Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene mengatur bahwa Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene sebagai BUMD yang kepemilikan modalnya seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Majene maka perhitungan nilai investasi menggunakan metode ekuitas dimana seluruh kerugian yang dialami oleh BUMD akan menjadi beban tanggungan pemerintah daerah yang akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah pada BUMD tersebut.

5.3.3. EKUITAS

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Ekuitas	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52	127.403.714.999,06	8,49
Jumlah	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52	127.403.714.999,06	8,49



Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Posisi ekuitas pemerintah daerah pada setiap periodenya dapat dijadikan indikator penilaian kinerja keuangan maupun operasional pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp1.628.208.973.061,58 dimana ekuitas tersebut merupakan Ekuitas Awal yang ditambah/dikurang Surplus/Defisit LO, kemudian ditambah/dikurang Koreksi Ekuitas serta Perubahan Kebijakan Mendasar Lainnya. Rincian saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.94 Saldo Ekuitas 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Ekuitas Awal	1.500.805.258.062,52
Surplus / Defisit LO	(780.022.194,62)
Koreksi Nilai Persediaan	133.151.205,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	128.050.585.988,68
Ekuitas Akhir	1.628.208.973.061,58

Pada periode tahun 2023, terdapat perubahan-perubahan yang menambah dan mengurangi ekuitas pemerintah daerah. Perubahan tersebut yaitu karena adanya Defisit-LO dan terdapat koreksi-koreksi ekuitas SKPD yang disajikan pada akun Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas disebabkan oleh perubahan nilai aset tetap akibat reklas dan mutasi antar SKPD, perubahan nilai piutang, perubahan nilai utang, serta koreksi kesalahan penyajian. Penjelasan atas Koreksi Ekuitas Lainnya dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2023 tercatat sebesar (Rp780.022.194,62)

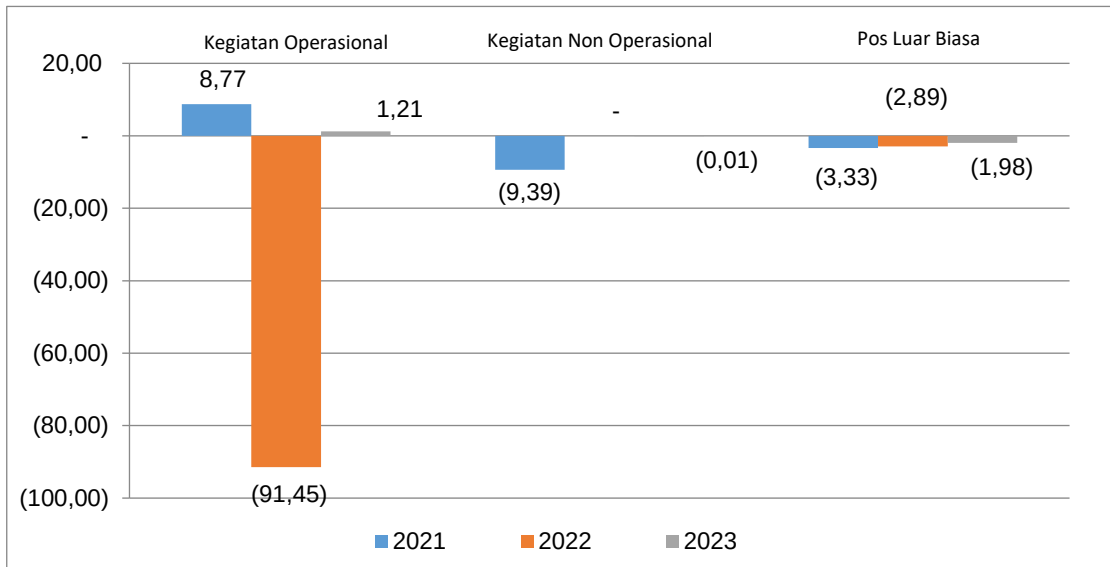
Laporan operasional adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan yang menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit – LO.

Penyelenggaraan operasional Pemerintah Kabupaten Majene selama tahun pelaporan 2023 mencatatkan Defisit – LO sebesar (Rp780.022.194,62) dimana nilai ini mengalami peningkatan senilai Rp93.565.929.439,30 atau 99,17% dibandingkan Defisit – LO pada tahun 2022 senilai (Rp94.345.951.633,92). Surplus/(Defisit) LO Tahun 2023 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.207.153.489,38 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai (Rp9.512.406,00) kemudian Pos Luar Biasa tercatat senilai (Rp1.977.663.278,00). Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai Rp861.836.646.897,53 dan Beban Operasional senilai Rp860.629.493.408,15.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 tercatat senilai (Rp9.512.406,00) yang mencatat surplus atas koreksi utang, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp0,00. Laporan Operasional Tahun



2023 menyajikan angka tahun 2022 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak tahun 2021 (dalam miliar) dapat dilihat pada grafik berikut.



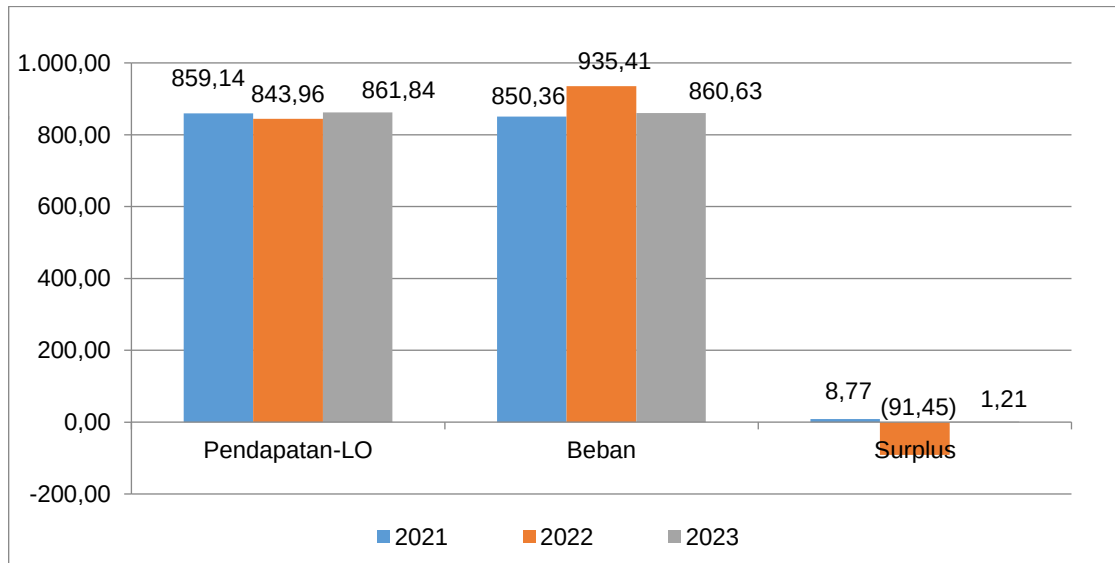
Grafik 5.28 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2021-2023

5.4.1. Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Majene tercatat senilai Rp1.207.153.489,38 dari Pendapatan Operasional senilai Rp861.836.646.897,53 dan Beban Operasional senilai Rp860.629.493.408,15.

Kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban – LO, dan Surplus/Defisit Operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional pemerintah daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Operasional secara keseluruhan merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO. Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain.

Selama periode tahun 2023, nilai surplus dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene tercatat senilai Rp1.207.153.489,38 yang diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai Rp861.836.646.897,53 dan Beban Operasional senilai Rp860.629.493.408,15. Perbandingan pendapatan, beban, dan surplus dari kegiatan operasional tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5.29 Kegiatan Operasional 2021-2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021-2023 beban operasional pada tahun 2023 merupakan tertinggi kedua setelah tahun 2022, sedangkan Pendapatan-LO 2023 berada pada urutan tertinggi dari tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2023 sudah optimal dalam merealisasikan pendapatan daerah. Dari perbandingan data tersebut bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih perlu mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang menimbulkan beban di periode berjalan. Pendapatan-LO tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan pada kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Pendapatan Dana Desa. Adapun Surplus-LO tertinggi tercatat pada periode TA 2022 dimana pada periode tersebut banyak pembayaran utang beban yang pengakuan bebannya telah dicatat pada periode sebelumnya.

5.4.1.1. Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan – LO	861.836.646.897,53	843.959.670.790,72	17.876.976.106,81	2,12
Jumlah	861.836.646.897,53	843.959.670.790,72	17.876.976.106,81	2,12

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 senilai Rp861.836.646.897,53

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan **wewenang** entitas pemerintah, yang dihasilkan oleh transaksi operasional yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

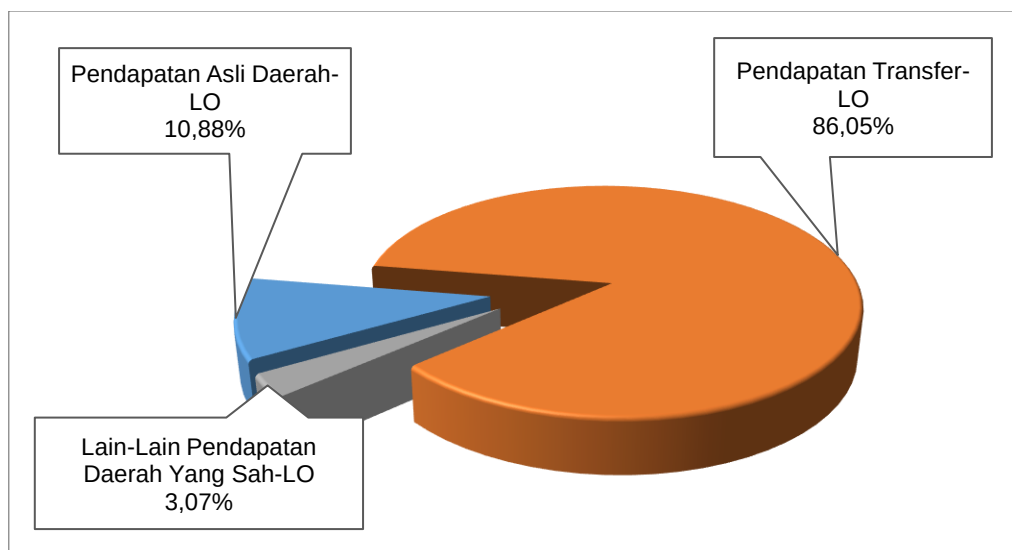
Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2023 senilai Rp861.836.646.897,53 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO senilai Rp93.748.655.201,95, Pendapatan Transfer – LO Rp741.604.528.932, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO sampai dengan akhir TA 2023 senilai Rp26.483.462.763,58. Rincian Pendapatan – LO TA 2023 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.95 Rincian Pendapatan LO Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	93.748.655.201,95	67.421.472.138,72
Pendapatan Pajak Daerah – LO	11.042.839.863,61	9.982.144.824,39
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.835.487.583,00	6.147.120.127,67
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.889.449.774,00	3.333.308.081,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	69.980.877.981,34	47.958.899.105,66
PENDAPATAN TRANSFER – LO	741.604.528.932,00	758.980.459.852,00
Pendapatan Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan -LO	717.608.442.223,00	680.919.138.313,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	57.886.546.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	23.996.086.709,00	20.174.775.539,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	26.483.462.763,58	17.557.738.800,00
Pendapatan Hibah – LO	26.483.462.763,58	17.532.738.800,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	0,00	25.000.000,00
Jumlah	861.836.646.897,53	843.959.670.790,72

Komposisi Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Majene pada TA 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.30 Komposisi Pendapatan - LO TA 2023

5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada TA 2023 senilai Rp93.748.655.201,95. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp26.327.183.063,23 atau sebesar

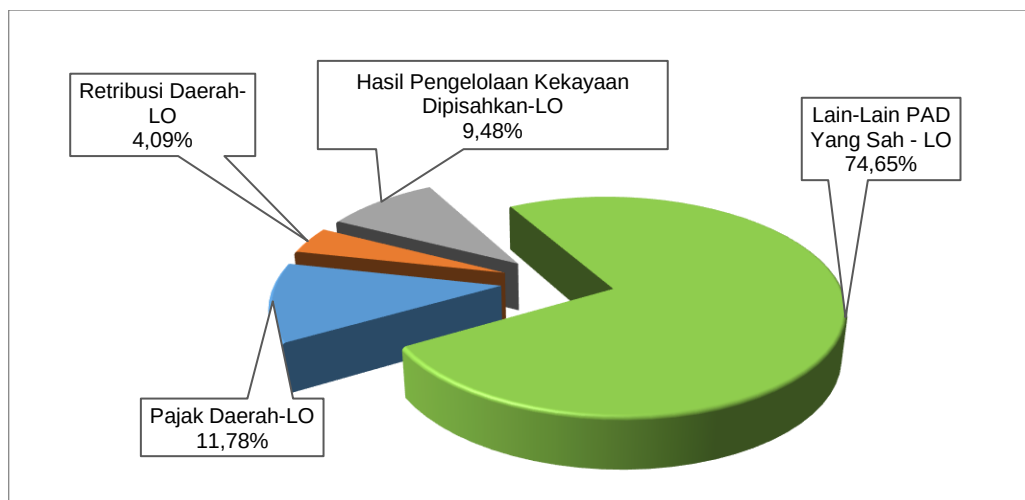


39,05% dibanding tahun 2022 dimana tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO terealisasi senilai Rp67.421.472.138,72. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.96 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	11.042.839.863,61	9.982.144.824,39
Pendapatan Retribusi Daerah	3.835.487.583,00	6.147.120.127,67
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.889.449.774,00	3.333.308.081,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	69.980.877.981,34	47.958.899.105,66
Jumlah	93.748.655.201,95	67.421.472.138,72

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5.31 Komponen Pendapatan Asli Daerah – LO Kab. Majene TA 2023

Secara rinci tentang Pendapatan Asli Daerah – LO dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.97 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Daerah - LO	11.042.839.863,61
Pajak Hotel - LO	214.517.545,00
Pajak Restoran - LO	1.476.607.729,00
Pajak Hiburan - LO	93.441.500,00
Pajak Reklame - LO	172.779.250,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	5.744.021.642,00



Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Sarang Burung Walet - LO	2.120.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	306.086.105,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	1.458.591.851,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	1.574.674.241,61
Retribusi - LO	3.835.487.583,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	376.801.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	246.953.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.030.607.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	2.225.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	3.225.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	245.524.999,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	464.824.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	141.870.000,00
Retribusi Terminal - LO	32.144.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	371.317.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	267.165.400,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	21.000.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	626.730.184,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	5.100.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	8.889.449.774,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	8.889.449.774,00
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	69.980.877.981,34
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO	11.505.500,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	9.150.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	1.076.477.387,09
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	251.762.737,74
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara - LO	750.054.969,77
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	1.112.294.505,96
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	32.926.473,78
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	593.185,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	2.331.627,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.268.640,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	214.220,00



Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	6.428,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan -LO	150.903.356,00
Pendapatan dari BLUD - LO	66.581.388.951,00
Jumlah	93.748.655.201,95

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Pendapatan Transfer	741.604.528.932,00	758.980.459.852,00	(17.375.930.920,00)	(2,29)
Jumlah	741.604.528.932,00	758.980.459.852,00	(17.375.930.920,00)	(2,29)

Pendapatan Transfer - LO per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp741.604.528.932,00. Pendapatan jenis ini mengalami Penurunan senilai (Rp17.375.930.920,00) atau (2,29%) dari tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Transfer - LO dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.98 Rincian Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Jumlah (Rp)
a) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO	717.608.442.223,00
1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	7.586.552.000,00
2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	508.603.740.400,00
3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	78.097.585.458,00
4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	123.320.564.365,00
b) Transfer Antar Daerah - LO	23.996.086.709,00
1) Pendapatan Bagi Hasil - LO	23.996.086.709,00
Jumlah	741.604.528.932,00

5.4.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	26.483.462.763,58	17.557.738.800,00	8.925.723.963,58	50,84
Jumlah	26.483.462.763,58	17.557.738.800,00	8.925.723.963,580	50,84

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp26.483.462.763,58 sedangkan pada tahun 2022 tercatat senilai Rp17.557.738.800,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan senilai Rp8.925.723.963,58 atau 50,84% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya mutasi tambah dari aset tetap yang berasal dari beberapa SKPD dengan jumlah yang signifikan seperti Dinas Pendidikan dan Pemuda



Olaharaga yang menerima hibah senilai Rp4.832.394.439,00, Dinas Kesehatan senilai Rp1.028.140.000,00, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan senilai Rp1.937.170.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp7.975.509.750,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan senilai Rp821.500.000,00, Kecamatan Banggae senilai Rp70.000.000,00 serta Sekretariat Daerah senilai Rp35.000.000,00. Pendapatan Hibah berupa obat-obatan kepada Dinas Kesehatan senilai Rp8.325.871.940,58 dengan rincian hibah dari pemerintah daerah senilai Rp5.429.807.565,58 dan dari pemerintah pusat senilai Rp2.896.064.375 dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp455.876.634,00. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.99 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

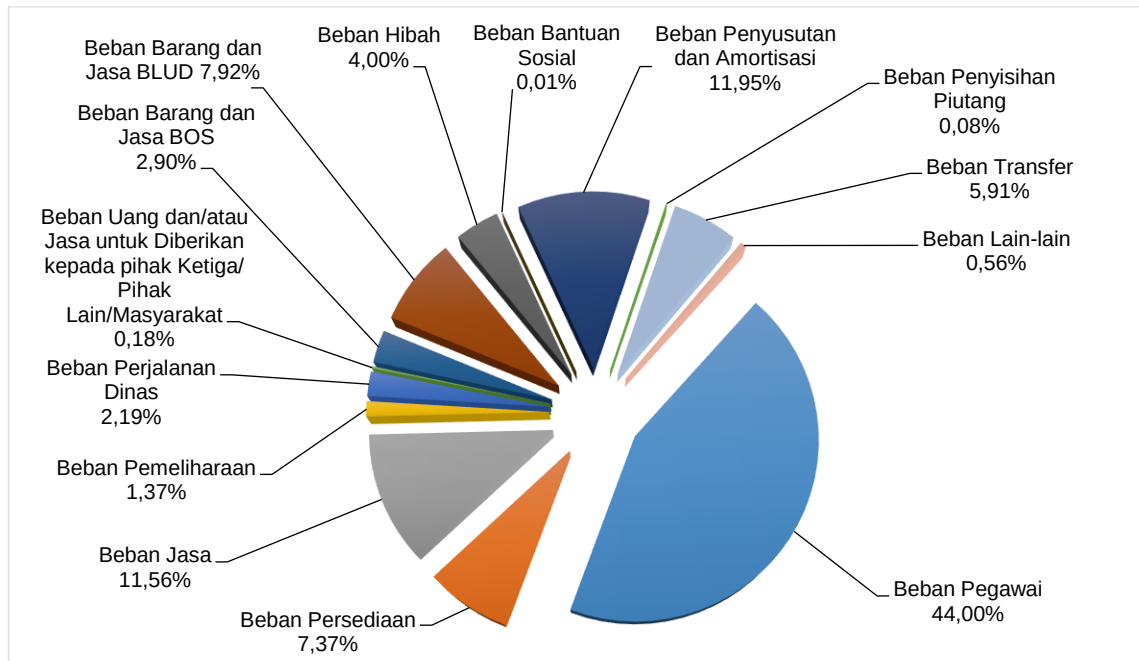
Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	4.926.204.375,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.885.684.199,58
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	15.671.574.189,00
Jumlah	26.483.462.763,58

5.4.1.2. Beban - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Beban - LO	860.629.493.408,15	935.412.586.261,64	(74.783.092.853,49)	(7,99)
Jumlah	860.629.493.408,15	935.412.586.261,64	(74.783.092.853,49)	(7,99)

*Beban-LO Pemerintah
Kabupaten Majene
Tahun 2023 adalah
senilai
Rp860.629.493.408,15*

Beban - LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Tahun 2023 adalah senilai Rp860.629.493.408,15. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp74.783.092.853,49) atau (7,99%) dibandingkan tahun 2022 senilai Rp935.412.586.261,64. Perbandingan besaran Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Majene pada TA 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5.32 Perbandingan Beban Operasi TA 2023

Beban untuk Laporan Operasional per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 senilai Rp860.629.493.408,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100 Rincian Beban Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban – LO		
Beban Pegawai – LO	378.689.132.030,00	410.666.470.398,00
Beban Persediaan – LO	63.418.777.607,42	80.789.468.387,94
Beban Jasa – LO	99.479.834.024,00	107.525.981.182,00
Beban Pemeliharaan – LO	11.759.257.794,00	13.662.054.886,00
Beban Perjalanan Dinas – LO	18.853.685.809,00	35.777.437.772,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat – LO	1.576.910.000,00	11.553.600.000,00
Beban Hibah – LO	34.405.131.852,00	23.110.610.755,00
Beban Bantuan Sosial – LO	57.600.000,00	775.546.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	102.813.696.890,10	107.496.338.693,36
Beban penyisihan Piutang – LO	720.220.756,59	(8.758.820,98)
Beban Transfer – LO	50.866.289.200,00	107.569.098.046,00
Beban Lain-lain – LO	4.851.677.574,64	23.255.102.204,71
Beban Barang dan Jasa BOS	24.965.142.758,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	68.172.137.112,40	13.239.636.757,61
Jumlah	860.629.493.408,15	935.412.586.261,64



5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp378.689.132.030,00. Rincian Beban Pegawai tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.101 Beban Pegawai

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Gaji Pokok ASN	217.664.805.849,00
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	19.475.700.509,00
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.056.930.000,00
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	16.029.245.820,00
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.680.516.412,00
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	12.293.801.940,00
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	274.335.442,00
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.110.655,00
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.988.705.138,00
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	447.643.667,00
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.342.930.091,00
12.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.909.243.830,00
13.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	15.868.800,00
14.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	320.838.780,00
15.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.738.500,00
16.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.213.922.003,00
17.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	176.447.508,00
18.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	63.867.093.168,00
19.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.450.587.800,00
20.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.104.000.000,00
21.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.985.833.388,00
22.	Beban Honorarium	517.770.000,00
23.	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
24.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	37.816.800,00
25.	Beban Tunjangan Beras DPRD	51.128.520,00
26.	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00
27.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
28.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.244.100,00
29.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
30.	Beban Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
31.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	692.728,00
32.	Beban Pembulatan Gaji DPRD	15.740,00
33.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	843.220.008,00
34.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.376.000.000,00
35.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
36.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.964.000,00
37.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
38.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.069.400,00
39.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	849.194,00
40.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.880,00
41.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.446.080,00
42.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00
43.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00
44.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
45.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
	Jumlah	378.689.132.030,00

5.4.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban yang timbul atas konsumsi barang-barang yang bersifat habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak. Beban Persediaan periode 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah senilai Rp63.418.777.607,42. Nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp17.370.690.780,52) dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp80.789.468.387,94.

Beban Persediaan yang pada akhir tahun tidak habis digunakan, berdasarkan PSAP Nomor 05 pada akhir periode pencatatan dicatat sebagai persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Pada tabel berikut rincian persediaan pada akhir TA 2023 Pemerintah Kabupaten Majene.

Tabel 5.102 Beban Persediaan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	85.448.940,00
2.	Beban Bahan-Bahan Kimia	105.182.050,00



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
3.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	231.027.211,00
4.	Beban Bahan-Bahan Baku	120.000.000,00
5.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.819.000,00
6.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	432.000.000,00
7.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	58.966.800,00
8.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.674.000,00
9.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	20.145.000,00
10.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.000.000,00
11.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.550.200,00
12.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.465.263.021,00
13.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	805.370.311,00
14.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.067.664.310,00
15.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.068.800,00
16.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	333.014.037,00
17.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	301.340.791,00
18.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	185.744.343,00
19.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	570.169.730,00
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	127.106.000,00
21.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	268.864.415,00
22.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.725.000,00
23.	Beban Obat-Obatan-Obat	9.265.464.543,65
24.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	980.630.778,02
25.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.542.775.751,75
26.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.592.624.716,00
27.	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.272.516.850,00
28.	Beban Natura dan Pakan-Pakan	5.000.000,00
29.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.057.293.846,00
30.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.439.807.163,00
31.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.520.000,00
32.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.000.000,00
Jumlah		63.418.777.607,42

Penjelasan sebelumnya atas pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada jenis Belanja Barang dan Jasa mencatat realisasi senilai Rp283.016.566.756,80 per 31 Desember 2023. Di antara komponen Belanja Barang dan Jasa tersebut, terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan senilai Rp60.311.209.986,00. Dibandingkan dengan saldo beban persediaan tahun anggaran 2023 yang tercatat senilai Rp63.418.777.607,42 maka dapat dikatakan terdapat beberapa transaksi yang mempengaruhi saldo beban persediaan selain dari pembelian persediaan. Salah satu yang mempengaruhi saldo beban tersebut adalah penggunaan persediaan di periode sebelumnya tahun



anggaran 2022 senilai Rp11.150.041.658,10 serta pengakuan sisa persediaan tahun berjalan yang hingga sampai 31 Desember 2023 yang belum digunakan senilai Rp18.934.770.927,78. Penjelasan transaksi yang mempengaruhi beban persediaan di tahun berjalan dapat kami uraikan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.103 Transaksi Mempengaruhi Saldo Beban Persediaan di Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Menambah beban persediaan di tahun berjalan	15.326.932.707,27
	a. Penambahan beban atas utang persediaan yang timbul di tahun berjalan	2.504.435.774,00
	b. Beban persediaan akibat reklas dari aset tetap ke Beban Barang (Persediaan)	2.017.843.246,00
	c. Pengakuan atas pendapatan hibah persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan untuk tahun 2023	8.325.871.940,58
	d. Koreksi penambahan saldo persediaan per 31 Desember 2023 pada RSUD Majene hasil dari pemeriksaan fisik	524.410,71
	e. Koreksi penambahan saldo persediaan pada Dinas PPKB yang belum dilaporkan	175.356.164,00
	f. Koreksi penambahan saldo Beban Persediaan pada Dinas PPKB yang belum dilaporkan	413.671.675,00
	g. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD (Persediaan) pada RSUD atas saldo akhir persediaan RSUD	1.889.229.496,98
2.	Mengurangi beban persediaan di tahun berjalan	(4.434.635.816,17)
	a. Pengurangan beban persediaan karena adanya reklas persediaan ke aset.	(125.112.000,00)
	b. Pengurangan beban persediaan atas utang tahun sebelumnya yang terbayar di tahun 2023	(2.303.730.698,00)
	c. Reklasifikasi Atas persediaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya menjadi Belanja Modal	(89.500.095,00)
	d. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD (persediaan) pada RSUD atas saldo awal persediaan RSUD	(1.916.293.023,17)
Akumulasi Penambahan (Pengurangan) tahun 2023		10.892.296.891,10

5.4.1.2.3. Beban Jasa-LO

Beban Jasa - LO per 31 Desember 2023 senilai Rp99.479.834.024,00, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.104 Rincian Beban Jasa Per SKPD

No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	14.266.480.756,00
2.	Dinas Kesehatan	27.757.933.431,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.856.065.270,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	325.841.603,00



No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	680.351.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.334.066.908,00
7.	Dinas Sosial	364.123.507,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.912.254.054,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.769.070.579,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	46.328.600,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.468.599.412,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	304.190.803,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	280.439.855,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.157.961.838,00
15.	Dinas Perhubungan	408.781.442,00
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	2.241.946.377,00
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	414.399.321,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	382.768.874,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.288.444.095,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	588.573.760,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.966.054.060,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	552.347.398,00
23.	Sekretariat Daerah	4.640.247.288,00
24.	Inspektorat	216.790.302,00
25.	Badan Perencanaan Daerah	292.612.902,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.020.174.981,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	3.772.122.858,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	706.089.156,00
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	859.481.431,00
30.	Sekretariat DPRD	1.884.657.725,00
31.	Kecamatan Banggae	1.174.555.565,00
32.	Kecamatan Banggae Timur	1.697.795.910,00
33.	Kecamatan Pamboang	327.899.991,00
34.	Kecamatan Sendana	384.182.932,00
35.	Kecamatan Tammerodo	142.645.000,00
36.	Kecamatan Tubo Sendana	127.150.000,00
37.	Kecamatan Ulumanda	99.000.000,00
38.	Kecamatan Malunda	539.220.798,00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	228.184.242,00
Jumlah		99.479.834.024,00

Beban Jasa per 31 Desember 2023 senilai Rp99.479.834.024,00 dengan rincian per Jenis sebagai berikut.



Tabel 5.105 Beban Jasa Per Jenis

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	36.250.508.412,00
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.220.264.645,00
3.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.797.314.034,00
4.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.167.756.200,00
5.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00
6.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.491.992.949,00
7.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	33.184.964.472,00
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	225.000.000,00
9.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	124.033.312,00
Jumlah		99.479.834.024,00

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan - LO

Beban Pemeliharaan - LO per 31 Desember 2023 senilai Rp11.759.257.794,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106 Rincian Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.114.494.884,00
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.124.569.662,00
3.	Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.520.193.248,00
Jumlah		11.759.257.794,00

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas - LO

Beban Perjalanan Dinas – LO per 31 Desember 2023 senilai Rp18.853.685.809,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.625.107.760,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	308.498.454,00
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.720.079.595,00
4.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00
JUMLAH		18.853.685.809,00



Berikut rincian Beban Perjalanan Dinas – LO tahun 2023 jika diurai menurut SKPD:

Tabel 5.108 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2023

No.	UNIT ORGANISASI	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	225.110.900,00
2.	Dinas Kesehatan	6.421.001.245,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	277.457.602,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	116.340.874,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	99.998.450,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63.145.795,00
7.	Dinas Sosial	16.890.633,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82.737.000,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	632.771.506,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	70.020.335,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	80.788.400,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46.593.630,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91.871.972,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.489.509.642,00
15.	Dinas Perhubungan	45.645.000,00
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	476.111.289,00
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	97.465.730,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	278.970.620,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	106.598.800,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.576.000,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.819.700,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	479.012.035,00
23.	Sekretariat Daerah	3.360.101.865,00
24.	Inspektorat	762.738.980,00
25.	Badan Perencanaan Daerah	140.599.465,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	313.572.719,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	287.842.070,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	229.496.600,00
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	67.641.300,00
30.	Sekretariat DPRD	2.265.373.865,00
31.	Kecamatan Banggae	4.988.000,00
32.	Kecamatan Banggae Timur	53.882.887,00
33.	Kecamatan Sendana	30.636.000,00
34.	Kecamatan Tammerodo	26.190.000,00
35.	Kecamatan Tubo Sendana	8.800.000,00
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.384.900,00
	TOTAL	18.853.685.809,00



5.4.1.2.6. Beban Uang yang Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.576.910.000,00	11.553.600.000,00	(9.976.690.000,00)	(86,35)
Jumlah	1.576.910.000,00	11.553.600.000,00	(9.976.690.000,00)	(86,35)

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2023 senilai Rp1.576.910.000,00 dengan rincian Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga senilai Rp1.329.560.000,00, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp88.500.000,00, Sekretariat Daerah senilai Rp155.850.000,00, dan Kecamatan Sendana senilai Rp3.000.000,00.

5.4.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BOS – LO

Saldo Beban Barang dan Jasa BOS pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp24.965.142.758,00 pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.

5.4.1.2.8. Beban Barang dan Jasa BLUD – LO

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan Beban Barang Dan Jasa yang tercatat pada satuan kerja yang melaksanakan prinsip Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene hingga saat ini telah menetapkan 12 (dua belas) satuan kerja yang menyelenggarakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah. Satuan kerja tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah dan sebelas Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Majene. Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp68.172.137.112,40 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD masing-masing unit kerja yang menyelenggarakan sistem Badan Layanan Umum Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.109 Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Unit Organisasi	Jumlah (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	52.859.895.861,60
2.	Puskesmas Banggae I	1.671.143.760,00
3.	Puskesmas Banggae II	901.932.234,00
4.	Puskesmas Lembang	1.757.729.693,00
5.	Puskesmas Malunda	1.862.451.528,00
6.	Puskesmas Pamboang	2.121.805.249,00
7.	Puskesmas Salutambung	456.328.924,00
8.	Puskesmas Sendana I	2.153.336.634,00
9.	Puskesmas Sendana II	909.677.453,00



No.	Unit Organisasi	Jumlah (Rp)
10.	Puskesmas Tammerodo	1.135.276.932,80
11.	Puskesmas Totoli	1.479.812.810,00
12.	Puskesmas Ulumanda	689.053.887,00
13.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	173.692.146,00
Jumlah		68.172.137.112,40

Beban Barang dan Jasa BLUD senilai Rp173.692.146,00 merupakan beban yang timbul atas Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD yang merupakan kekurangan iuran wajib 4% Pemda Tahun 2023 sesuai Surat Tagihan Kepala Cabang BPJS Polman Nomor 406/IX-05/0324 tanggal 3 Maret 2024 tentang Tagihan Tunggakan Iuran Wajib Pemda atas Penghasilan PNS Daerah Tahun 2022 – 2023. Berdasarkan jurnal koreksi nomor 76.05/09.0/005305/JU/JURNAL-UMUM/5.02.0.00.0.00.26.0000/05/2023, Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut dibebankan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5.4.1.2.9. Beban Hibah - LO

Beban Hibah – LO per 31 Desember 2023 senilai Rp34.405.131.852,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110 Beban Hibah – LO Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
	a) Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	50.000.000,00
	b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.389.345.927,00
	c) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.560.161.619,00
	d) Sekretariat Daerah	150.000.000,00
	e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.600.000.000,00
2.	Beban Hibah Dana BOS	
	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	7.944.431.000,00
3.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	711.193.306,00
Jumlah		34.405.131.852,00

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Hibah diakui berdasarkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan beban hibah diakui ketika timbul penurunan manfaat ekonomi yang mempengaruhi ekuitas pemerintah daerah. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tercatat senilai Rp25.749.507.546,00, Beban Hibah Dana BOS tercatat realisasi senilai Rp7.994.431.000,00, dan Beban Hibah Kepada Partai Politik tercatat realisasi senilai Rp711.193.306,00.



5.4.1.2.10. Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial – LO per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah Rp57.600.000,00. Beban Sosial – LO yang disajikan pada Tahun Anggaran 2023 tercatat pada Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dimana beban tersebut digunakan untuk membantu masyarakat rentan terkena risiko sosial berupa inflasi di wilayah Kabupaten Majene.

5.4.1.2.11. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berdasarkan PSAP Nomor 07 ditetapkan bahwa nilai penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan aset tak berwujud dalam neraca pada akun Akumulasi Penyusutan, Akumulasi Amortisasi dan akun Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Laporan Operasional. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023 senilai Rp102.813.696.890,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.699.760.748,10
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.304.110.098,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	43.773.095.065,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	226.996.341,00
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	809.734.638,00
Jumlah		102.813.696.890,10

5.4.1.2.12. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp720.220.756,59 dengan rincian SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.112 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	560.465.719,91
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	152.258.731,24
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	859.294,84
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	6.637.010,60
Jumlah		720.220.756,59



5.4.1.2.13. Beban Transfer - LO

Beban Transfer – LO per 31 Desember 2023 senilai Rp50.866.289.200,00. Berikut disajikan rincian beban Transfer – LO pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.113 Beban Transfer - LO

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	50.866.289.200,00
Jumlah		50.866.289.200,00

5.4.1.2.14. Beban Lain-lain - LO

Beban Lain-lain - LO per 31 Desember 2023 senilai Rp4.851.677.574,64, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Beban Lain-lain - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	851.274.599,00
2.	Beban Lain-Lain	4.000.402.975,64
Jumlah		4.851.677.574,64

Beban lain-lain merupakan beban operasional yang tidak termasuk dalam kategori beban operasional lainnya. Penyajian beban lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan tabel di atas terdiri dari beban penurunan nilai investasi dan beban lain-lain. Beban penurunan nilai investasi dicatat untuk melakukan penyesuaian nilai investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Majene. PDAM Tirta Mandar merupakan BUMD yang kepemilikannya modalnya 100% milik pemerintah daerah. Atas komposisi kepemilikan modal tersebut, maka metode pencatatan investasi dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Olehnya itu kerugian PDAM Tirta Mandar tersebut diakui dan dicatat sebagai Beban Penurunan Nilai Investasi pemerintah daerah yang mengurangi nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Mandar. Pada tahun 2023, nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene mengalami penurunan akibat kerugian yang dialami oleh PDAM Tirta Mandar berdasarkan Laporan Keuangan yang telah dilakukan audit oleh auditor independen. Dalam laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Budiandru & Rekan dengan Nomor 00015/04.54/AU.2/10/1826-1/I/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 terhadap Laporan Keuangan PDAM Tirta Mandar tercatat PDAM Tirta Mandar mengalami kerugian senilai Rp851.274.599,00 pada laporan laba rugi.



Adapun Beban Lain-Lain merupakan beban yang timbul sepanjang periode tahun 2023 atas transaksi aset lain-lain yang telah dihentikan operasionalnya dan dinyatakan rusak berat yang dilakukan penghapusan dikarenakan telah penjualan langsung atas aset tersebut yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya pada pos-pos aset tetap neraca. Daftar Beban Lain-Lain per SKPD Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian beban lain-lain - LO per SKPD

No.	Unit Organisasi	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	2.198.471.296,64
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	55.339.684,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	146.834.560,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.073.013,00
5.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	374.933.645,00
6.	Sekretariat Daerah	11.038.500,00
7.	Sekretariat DPRD	11.050.000,00
8.	Badan Pendapatan Daerah	808.350.000,00
9.	Kecamatan Banggae	374.128.946,00
10.	Kecamatan Banggae Timur	4.238.331,00
11.	Kecamatan Ulumanda	4.945.000,00
12.	Kelurahan Mosso	5.000.000,00
13.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	851.274.599,00
Jumlah		4.851.677.574,64

5.4.2. Kegiatan Non Operasional

5.4.2.1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada tahun 2023 tercatat (Rp9.512.406,00).

5.4.2.2. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa senilai Rp1.197.641.083,38 merupakan jumlah antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.207.153.489,38 dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp9.512.406,00).



Tabel 5.116 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	1.207.153.489,38	(68.197.813.266,21)
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(9.512.406,00)	(23.255.102.204,71)
Jumlah	1.197.641.083,38	(91.452.915.470,92)

5.4.3. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik:

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- Kejadian di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp1.977.663.278,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar (Rp915.372.885,00) dibanding tahun 2022 dimana saldo Pos Luar Biasa tercatat senilai Rp2.893.036.163,00. Pos Luar Biasa ini merupakan Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2023.

5.4.3.1. Beban Luar Biasa/Beban Tak Terduga - LO

Beban Luar Biasa pada Pemerintah Kabupaten Majene merupakan Beban Tak Terduga yang diakibatkan oleh terjadinya bencana alam, perbaikan infrastruktur akibat bencana dan pembayaran biaya penerangan jalan umum dengan total senilai Rp1.977.663.278,00. Daftar Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

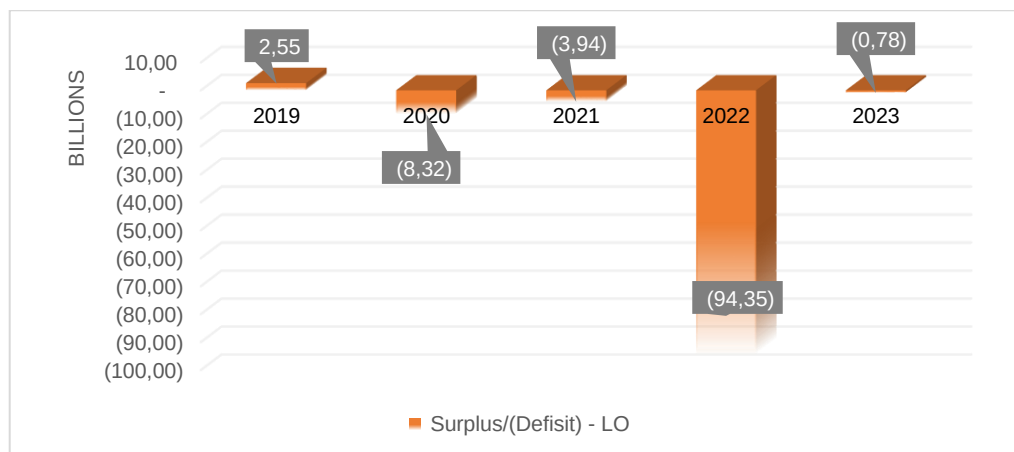
Tabel 5.117 Rincian Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga - LO

No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Pemulangan jenazah ke Kabupaten Bone Prov. Sulawesi Selatan	BKAD	3.000.000,00
2.	Pembayaran listrik pengungsian di dusun Aholeang dan dusun Rui Desa Mekatta	BKAD	20.000.000,00
3.	Pelaksanaan Operasi Ketupat Marano tahun 2023 Kab Majene	BKAD	5.000.000,00
4.	Pelaksanaan penyemprotan/ <i>Fogging</i> di wilayah kasus deman berdarah dengue Kab. Majene	BKAD	50.000.000,00
5.	Pembayaran PBB-P2 Mess Pemda di Jakarta tahun 2023	BKAD	118.944.911,00
6.	Rehabilitasi darurat tanggul laut Lalampanua	BKAD	198.600.000,00
7.	Penanganan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan Kab. Majene	BKAD	30.000.000,00
8.	Pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah secara serentak nasional	BKAD	15.482.000,00

No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
9.	Normalisasi fungsi Jalan di desa Mayamba Kecamatan Tammerodo Sendana	BKAD	120.000.000,00
10	Pembayaran token listrik pengungsian Dusun Aholeang dan Rui Desa Mekatta	BKAD	38.145.000,00
11.	Rehabilitasi Darurat Jalan Desa Seppong, Desa Awo Kec. Tammeorodo Sendana	BKAD	567.000.000,00
12.	Pembayaran tagihan kekurangan listrik penerangan jalan umum Kab. Majene	BKAD	158.178.56,00
13.	Pengelolaan persampahan ditempat pemrosesan akhir Moloku Kab. Majene	BKAD	11.312.800,00
14.	Pembangunan Buronjong Sungai Saleppe Kelurahan Banggae	BKAD	92.000.000,00
15.	Bantuan dana penyelesaian pembangunan rumah pengungsi Dusun Rui dan Aholeang Desa Mekatta	BKAD	500.000.000,00
16.	Bantuan dampak konflik sosial masyarakat Desa Tammerodo	BKAD	50.000.000,00
Jumlah			1.977.663.278,00

5.4.4. Surplus/(Defisit) - LO

Surplus/Defisit LO sebesar (Rp780.022.194,62) berasal dari Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa senilai Rp1.197.641.083,38 dikurangi surplus/defisit pada pos luar biasa sebesar (Rp1.977.663.278,00). Nilai tersebut mengalami kenaikan nilai surplus senilai Rp93.565.929.439,30 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut perkembangan Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene 5 (lima) tahun terakhir dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5.33 Tren Perkembangan Surplus/Defisit – LO Kabupaten Majene 2019-2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Majene mencatatkan kenaikan surplus signifikan yaitu senilai Rp93.565.929.439,30 atau 99,17% setelah mengalami Defisit-LO pada tahun 2022. Defisit pada pemerintah daerah merupakan konteks operasional yang positif. Artinya Pemerintah Kabupaten Majene mencatatkan aktivitas operasional yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu surplus pernah terjadi pada Tahun Anggaran 2019. Surplus/Defisit – LO pada tahun 2022 tercatat sebagai defisit dengan nilai defisit paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

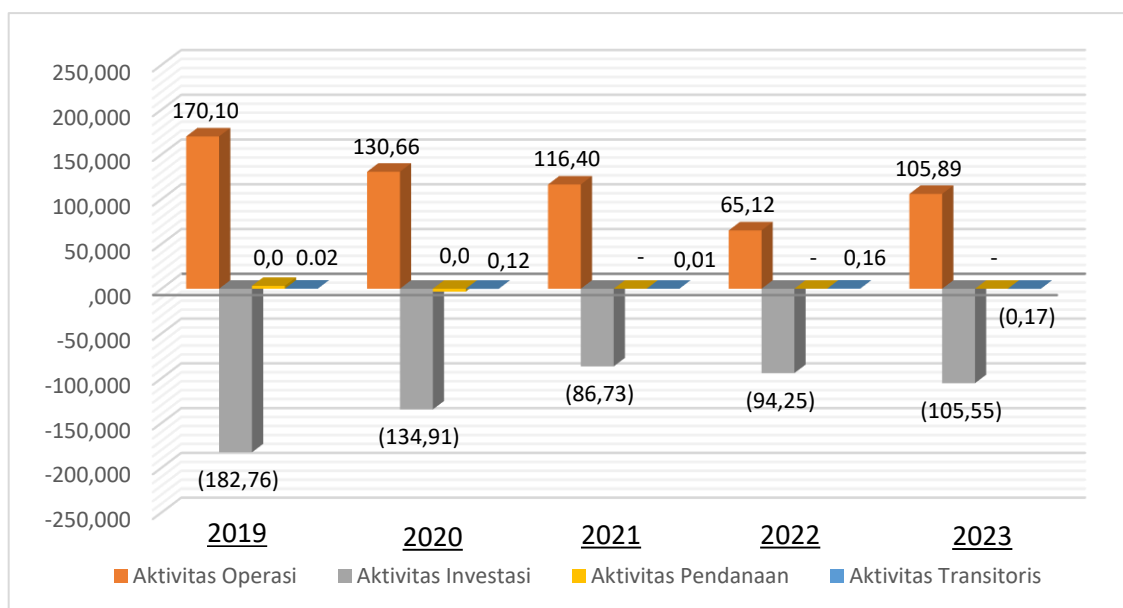
Laporan Arus Kas merupakan informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen pengguna laporan eksternal, para pemangku kepentingan dan masyarakat. Laporan Arus Kas tersebut mencerminkan kondisi objektif kas, perubahan selama satu periode, arus masuk dan keluar kas yang sangat jelas yang dapat diuji kebenarannya dengan melihat Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023. Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Majene periode 2023 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

Komposisi Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2023 berdasarkan aktivitas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.118 Posisi Arus Kas Bersih Berdasarkan Aktivitas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	105.890.395.086,57	65.120.931.018,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(105.553.186.102,00)	(94.251.583.440,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(171.115.933,20)	164.652.387,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	166.093.051,37	(28.966.000.034,58)

Tren arus kas bersih Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan aktivitas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.34 Komposisi Arus Kas Bersih Tahun 2019 s.d. 2023

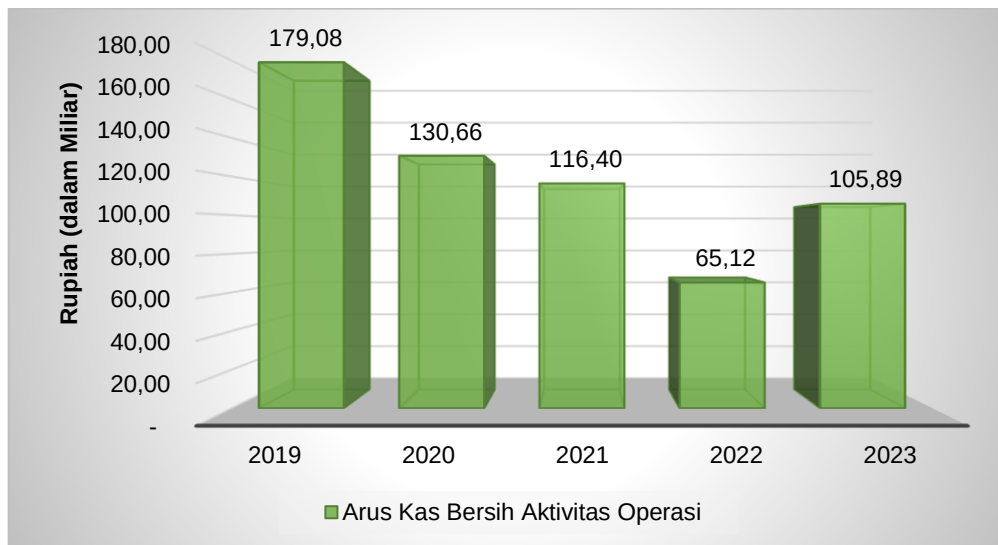
Penjelasan mengenai arus kas bersih dari masing-masing aktivitas di atas adalah sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	105.890.395.086,57	65.120.931.018,42	40.769.464.068,15	62,61
Jumlah	105.890.395.086,57	65.120.931.018,42	40.769.464.068,15	62,61

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 senilai Rp105.890.395.086,57 atau terjadi Kenaikan sebesar 62,61% dari Tahun 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Berikut tren perkembangan arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5.35 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2019-2023

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah akibat aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan operasional pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.



Arus Kas Operasi yang baik adalah arus kas yang bersaldo positif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data di atas dapat dilihat bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Majene bersaldo positif dari tahun 2019-2023. Walaupun di tahun 2022 mengalami penurunan, namun di tahun 2023 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mengalami peningkatan sebesar 62,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Majene cukup membaik. Arus kas positif dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan daerah dalam rangka mengembalikan pinjaman jangka pendek, menambah investasi daerah, atau memberikan subsidi kepada masyarakat. Dari grafik di atas dapat dilihat Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi tertinggi Pemerintah Kabupaten Majene tercatat pada tahun 2019, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama tahun 2023 adalah sebesar Rp105.890.395.086,57 dimana terjadi kenaikan sebesar 62,61% dari aktivitas operasi pada tahun 2022 yang tercatat senilai Rp65.120.931.018,42. Kenaikan tersebut disebabkan pada beberapa item arus kas masuk mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil. Pada tahun 2023 arus kas masuk yang bersumber dari Penerimaan Hibah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berikut rincian arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi sepanjang tahun 2023.

Tabel 5.119 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah – LRA	10.740.841.614,61	9.461.193.553,39
Penerimaan Retribusi Daerah – LRA	3.559.947.334,00	5.803.175.060,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.298.690.028,00	3.333.308.081,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	70.174.648.044,76	51.843.319.542,28
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	4.042.833.959,00	8.776.700.298,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.022.146.058,00	2.008.267.147,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	508.603.740.400,00	485.848.952.931,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	201.418.149.823,00	183.174.844.920,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	-	2.301.731.000,00
Penerimaan Dana Desa	55.815.279.000,00	55.584.815.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.379.027.542,00	23.814.548.328,00
Penerimaan Dana Bantuan Khusus Keuangan	0,00	63.550.000,00
Penerimaan Hibah	1.002.000.000,00	1.227.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	887.057.303.803,37	833.241.405.860,67
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	372.584.721.002,00	406.980.998.990,00
Pembayaran Barang dan Jasa	283.016.566.756,80	218.629.512.958,25
Pembayaran Hibah	11.505.624.306,00	36.875.447.859,00
Pembayaran Bantuan Sosial	57.600.000,00	775.546.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	1.977.663.278,00	2.633.036.163,00

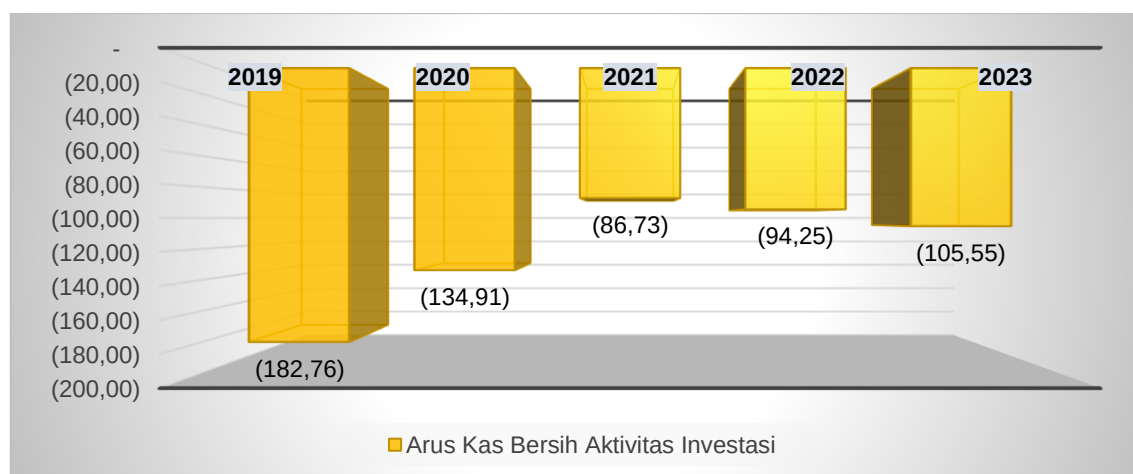
Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	827.869.060,00	1.237.099.872,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	388.485.314,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	110.808.379.000,00	100.988.833.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	781.166.908.716,80	768.120.474.842,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	105.890.395.086,57	65.120.931.018,42

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(105.553.186.102,00)	(94.251.583.440,00)	(11.301.602.662,00)	(11,99)
Jumlah	(105.553.186.102,00)	(94.251.583.440,00)	(11.301.602.662,00)	(11,99)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar (Rp105.543.186.102,00) atau terjadi penurunan sebesar 11,99% dari tahun 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap lama. Arus kas dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif menunjukkan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibanding dengan kas yang diperoleh dari penghentian atau penjualan aset tetap. Sebaliknya jika arus kas dari aktivitas investasi bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan pemerintah daerah tidak melakukan investasi pelepasan aset tetap. Oleh karena itu, saldo negatif (defisit) atas arus kas dari aktivitas investasi lebih disukai, sedangkan saldo positif diupayakan untuk dihindari karena jika bersaldo positif maka pertumbuhan aset tetapnya akan bernilai negatif padahal pemerintah daerah diharapkan memiliki pertumbuhan aset tetap yang positif. Tren perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5.36 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2019-2023



Dari data di atas dapat dilihat bahwa saldo kas bersih dari aktivitas investasi bersaldo negatif, sehingga ini menunjukkan adanya pertumbuhan aset yang positif yang berarti di Pemerintah Kabupaten Majene terjadi pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, irigasi, dan jaringan, belanja tanah, mesin dan peralatan, serta gedung dan bangunan. Arus kas bersih aktivitas investasi tertinggi tercatat terjadi pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan arus kas bersih aktivitas investasi terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2021. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama tahun 2023 adalah sebesar (Rp105.549.186.102,00) atau turun sebesar 11,99% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama tahun 2022 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.120 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	11.505.500,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	9.150.000,00	122.319.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas	20.655.500,00	122.319.500,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	723.073.962,00	1.025.276.300,00
Perolehan Peralatan dan mesin	18.297.386.946,00	13.710.223.053,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	53.184.829.425,00	19.183.777.725,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31.464.043.269,00	55.784.625.862,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	179.508.000,00	50.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.725.000.000,00	4.620.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	105.573.841.602,00	94.373.902.940,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(105.553.186.102,00)	(94.251.583.440,00)

Sepanjang tahun 2023 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi bersumber dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin dan Penjualan Aset Lainnya senilai Rp20.655.500,00. Arus Kas Masuk tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp101.664.000,00) jika dibandingkan tahun sebelumnya 2022, dimana arus kas masuk tersebut yang bersumber dari penjualan aset lainnya. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada tahun 2023 tercatat senilai Rp105.573.841.602. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp11.199.938.662,00 atau 11,87% dibanding arus keluar kas tahun sebelumnya senilai Rp94.373.902.940,00.

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00



Pada Tahun 2023 tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan atau nihil.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan surplus/defisit anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 tercatat senilai Rp0,00. Pada tahun 2021 tercatat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan senilai Rp0,00. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dapat kita lihat tabel berikut.

Tabel 5.121 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Majene tidak mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan baik yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank maupun pihak lainnya.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(171.115.933,20)	164.652.387,00	(335.768.320,20)	(203,93)
Jumlah	(171.115.933,20)	164.652.387,00	(335.768.320,20)	(203,93)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp171.115.933,20) atau terjadi penurunan sebesar (Rp335.768.320,20) atau (203,93%) dari Tahun 2022

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2023 tercatat sebesar (Rp171.115.933,20) dimana terjadi penurunan sebesar (Rp335.768.320,20) atau (203,93)% dari Tahun 2022 senilai Rp164.652.387,00. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.122 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.268.912.207,00	57.080.755.059,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran	200.000,00	0,00
Uang Masuk atas adanya Pendapatan Bunga pada SMP 10 Ulumanda dan SMP 9 Majene	79.980,00	0,00
Uang Masuk atas Sisa Saldo pada Rekening PPTK Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	227,00	0,00
Uang Masuk atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum	7.447.998,00	0,00
Uang Masuk atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekretariat Daerah	767.000,00	0,00
Uang Masuk atas Bantuan Sarana Peribadatan yang terlambat dibuatkan SPJ oleh Sekretariat Daerah	5.513.374,96	0,00
Jurnal Koreksi Pendapatan BLUD Pelayanan Kesehatan 2023	4.283.010,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	57.287.203.796,96	57.080.755.059,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.202.282.921,00	57.056.991.310,00
Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	84.888.638,00	0,00
Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	56.000.000,00	0,00
Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum	1.009.405,20	0,00
Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekretariat Daerah	754.765,96	0,00
Uang Keluar atas Kelebihan Pencairan Dana Desa	113.384.000,00	0,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran	0,00	(140.888.638,00)
Jumlah Arus Keluar Kas	57.458.319.730,16	56.916.102.672,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(171.115.933,20)	164.652.387,00

Arus kas masuk dan keluar dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2023 bersumber dari penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sampai akhir Tahun 2023. Tercatat terdapat Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga tahun 2023 sebesar Rp57.268.912.207,00 dan Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran senilai Rp200.000,00 serta Transaksi Arus Masuk Kas senilai Rp18.091.589,96 di sisi arus masuk kas. Adapun pada sisi arus keluar kas tercatat pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga tahun 2023 senilai Rp57.202.282.921,00. Tercatat juga Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp84.888.638,00, Uang Keluar atas Utang Jangka Pendek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp56.000.000,00, Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.009.405,20 dan Uang Keluar atas Jasa Giro pada Rekening PPTK Sekretariat Daerah senilai Rp754.765,96, dan Uang Keluar atas Kelebihan Pencairan Dana Desa senilai Rp113.384.000,00.



Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022, terdapat transfer Ganti Uang Persediaan dari RKUD ke rekening giro Bendahara pengeluaran SKPD. Transaksi di penghujung TA 2022 ini mengakibatkan Bendahara Pengeluaran tidak dapat melakukan proses pembayaran belanja melalui fasilitas Transaksi Non Tunai (TNT) Bank Sulselbar pada hari itu juga ke rekening tujuan. Rekening tujuan transaksi tersebut diantaranya adalah rekening milik ASN untuk pembayaran yang terkait dengan operasional seperti lembur, perjalanan dinas dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga transaksi yang dilakukan ke rekening PPTK untuk operasional unit kerja, dan juga rekening Pihak Ketiga atas kegiatan pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, terdapat saldo kas pada rekening Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang tidak bisa ditransaksikan hingga hari kerja berikutnya di Tahun 2023. Pada tabel di atas tercatat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp84.888.638,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) senilai Rp56.000.000,00. Berikut ini adalah rincian atas Ganti Uang Persediaan yang masih berada pada Bendahara Pengeluaran tersebut.

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rekening Giro Bank Sulselbar milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Nomor 0720020000100136 pada tanggal 30 Desember 2022 menerima transaksi transfer kas masuk dari Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp83.901.066,00. Selain itu, dari uang persediaan yang tersisa dari periode GU sebelumnya diketahui masih terdapat saldo kas senilai Rp1.098.934,00, sehingga total saldo kas yang berada pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp85.000.000,00. Kas tersebut diperuntukkan untuk membayar utang yang timbul akibat transaksi belanja TA 2022 yang belum sempat dibayarkan karena keterlambatan pencairan Ganti Uang Persediaan oleh Bendahara Umum Daerah. Berikut disajikan rincian utang yang harus dibayar dengan menggunakan saldo kas tersebut.

Tabel 5.123 Rincian Belanja pada Rekening Giro Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Uraian	Nilai (Rp)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
- Belanja Tagihan Air	2.146.000,00
- Belanja Tagihan Listrik	2.287.012,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.130.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.986.800,00
Penetapan Cagar Budaya	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.693.150,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.190.250,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	550.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.420.250,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.200.000,00



Uraian	Nilai (Rp)
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.300.000,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.950.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata	16.120.000,00
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	974.900,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	250.000,00
- Belanja Tagihan Air	600.000,00
- Belanja Tagihan Listrik	514.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.079.200,00
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.250.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.375.000,00
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata	10.944.076,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	338.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	719.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.338.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	736.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	437.000,00
Pengelolaan Investasi Pariwisata	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	594.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	336.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	230.000,00
Jumlah	84.888.638,00

Atas sisa kas senilai Rp111.362,00 telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dengan nomor tujuan rekening 072-001-00000001-1 pada tanggal 9 Januari 2023.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Per 31 Desember 2022 pada Rekening Giro Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Nomor 072002000010015-2 atas nama Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene pada tanggal 30 Desember 2022 memiliki saldo kas senilai Rp56.000.000,00 dan pada hari itu juga dilakukan pemindahbukuan ke beberapa rekening melalui fasilitas Transaksi Non Tunai (TNT) milik Bank Sulselbar. Saldo kas tersebut merupakan pembayaran Ganti Uang



Persediaan terakhir pada periode Desember 2022. Atas saldo kas tersebut dilakukan pemidaihbukuan ke rekening Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada masing-masing unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saldo kas tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran belanja di akhir tahun yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan. Berikut disajikan rincian belanja yang dibayarkan dengan menggunakan saldo kas tersebut.

Tabel 5.124 Rincian Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sub Kegiatan	Rek. Belanja	Nilai (Rp)
1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5.1.2.1.1.24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	487.000,00
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5.1.2.1.1.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500.000,00
3.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5.1.2.1.1.53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.000.000,00
4.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5.1.2.1.1.24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.940.000,00
5.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5.1.2.1.1.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00
6.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5.1.2.1.1.53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.500.000,00
7.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.1.2.1.1.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.400.000,00
8.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.1.2.1.1.52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00
9.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5.1.2.1.1.24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.570.000,00
10.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5.1.2.1.1.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	572.000,00
11.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5.1.2.1.1.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	952.000,00
12.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	5.1.2.1.1.24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.400.000,00
13.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	5.1.2.1.1.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	428.000,00
14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	5.1.2.1.1.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	253.000,00
15.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5.1.2.1.1.52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00
16.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5.1.2.1.1.53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	500.000,00
17.	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5.1.2.1.1.24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.000.000,00
18.	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5.1.2.1.1.24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.350.000,00
19.	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5.1.2.1.1.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000,00
20.	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5.1.2.1.1.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	506.000,00
21.	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5.1.2.1.1.52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00
22.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5.1.2.1.1.52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00



No.	Sub Kegiatan	Rek. Belanja	Nilai (Rp)
23.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.1.2.1.1.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	428.000,00
24.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.1.2.1.1.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	506.000,00
25.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.1.2.1.1.25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000,00
26.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.1.2.1.1.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.900.000,00
27.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.2.1.1.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.170.000,00
28.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.1.2.1.1.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.200.000,00
29.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.2.1.1.24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.414.000,00
30.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.2.1.1.27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	440.000,00
31.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.2.1.1.29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.932.000,00
32.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.2.2.1.60 Belanja Tagihan Air	76.000,00
33.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.2.2.1.61 Belanja Tagihan Listrik	2.416.000,00
34.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.2.2.1.67 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.190.000,00
35.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.2.3.2.36 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	13.220.000,00
36.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.1.2.3.2.36 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.780.000,00
Jumlah			56.000.000,00

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio %
Saldo Akhir Kas	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52	178.571.255,08	2,15
Jumlah	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52	178.571.255,08	2,15

Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp8.480.304.393,60 atau terjadi kenaikan sebesar 2,15 % dari tahun 2022.

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp8.480.304.393,60. Dibandingkan dengan sebelumnya di tahun 2022 senilai Rp8.301.733.138,52 maka dapat dilihat terjadi kenaikan senilai Rp178.571.255,08 atau 2,15%. Berikut rincian pembentuk Saldo Akhir Kas berdasarkan Arus Kas sepanjang Tahun Anggaran 2023 dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, serta Kenaikan/Penurunan Kas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.125 Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	105.890.395.086,57	65.120.931.018,42
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(105.553.186.102,00)	(94.251.583.440,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(171.115.933,20)	164.652.387,00
Kenaikan / Penurunan Kas	166.093.051,37	(28.966.000.034,58)
Saldo Awal Kas	8.301.733.138,52	37.371.777.636,94
Koreksi SILPA Tahun Lalu	12.478.203,71	(105.808.635,00)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	-	1.764.171,16
Saldo Akhir Kas	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52
Kas di Kas Daerah	83.313.671,24	84.310.247,12
Kas di Bendahara Penerimaan	-	157.422.650,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	200.000,00	395.152.322,91
Kas di BLUD	8.260.015.001,20	7.596.192.119,29
Kas di Bendahara FKTP	-	43.996.339,00
Kas di Bendahara BOS	924.890,00	2.267.164,00
Kas Lainnya	135.850.831,16	22.392.296,20
Setara Kas	-	-
Saldo Akhir Kas	8.480.304.393,60	8.301.733.138,52

Penjelasan nilai kas bersih dari masing-masing aktivitas dalam Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sampai dengan per 31 Desember 2023 senilai Rp105.890.395.086,57 merupakan selisih antara Arus Masuk Kas Penerimaan sebesar Rp887.057.303.803,37 dan Arus Keluar Kas Pembayaran senilai Rp781.166.908.716,80.

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sampai dengan per 31 Desember 2023 senilai (Rp105.553.186.102,00) merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Hasil Penjualan Aset dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya senilai Rp20.655.500,00 dan Arus Keluar Kas Perolehan Aset senilai Rp105.573.841.602,00;

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2023 senilai Rp0,00. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aktivitas arus kas masuk maupun keluar dari aktivitas pendanaan.

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan per 31 Desember 2023 senilai (Rp171.115.933,20) merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai Rp57.287.203.796,96 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebesar Rp57.458.319.730,16.



e. Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.480.304.393,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1.	Kas di Kasda	83.313.671,24
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	200.000,00
4.	Kas di BLUD	8.260.015.001,20
5.	Kas Dana BOS	924.890,00
6.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
7.	Kas Lainnya	135.850.831,16
8.	Setara Kas	0,00
Jumlah		8.480.304.393,60

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Pada tahun 2023 tercatat Defisit – LO Pemerintah Kabupaten Majene sebesar (Rp780.022.194,62). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp93.565.929.439,30) atau 99,17 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode tahun 2023. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah senilai Rp1.500.805.258.062,52.

5.6.1. Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas Awal	1.500.805.258.062,52	1.591.813.548.616,05	(91.008.290.553,53)	(5,72)
Jumlah	1.500.805.258.062,52	1.591.813.548.616,05	(91.008.290.553,53)	(5,72)

Ekuitas awal merupakan posisi kekayaan bersih pemerintah daerah di awal tahun yang akan diperhitungkan untuk membiayai operasional Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang tahun anggaran 2023. Ekuitas awal pada tahun 2023 senilai Rp1.500.805.258.062,52 yang merupakan saldo ekuitas akhir pada tahun 2022. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 5,72% atau senilai Rp91.008.290.553,53 dibandingkan di tahun 2022 dimana Ekuitas Awal tercatat senilai Rp1.591.813.548.616,05.

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO adalah selisih antara Pendapatan – LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit – LO merupakan pengurangan Pendapatan - LO senilai



Rp861.836.646.897,53 terhadap Beban-LO senilai Rp860.629.493.408,15 dan pengurangan atas Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO senilai Rp9.512.406,00 serta Beban Luar Biasa senilai Rp1.977.663.278,00.

Pada tahun 2023 tercatat Defisit – LO Pemerintah Kabupaten Majene sebesar (Rp780.022.194,62). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp93.565.929.439,30) dibandingkan tahun sebelumnya pada TA. 2022 tercatat Defisit – LO sebesar (Rp94.345.951.633,92). Rincian Surplus/Defisit– LO per SKPD disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.127 Surplus/Defisit LO per SKPD

No.	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	(292.511.589.997,38)	(286.317.623.679,50)
2.	Dinas Kesehatan	(104.531.308.453,97)	(100.052.969.474,32)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	(87.002.546.993,95)	(80.548.090.431,28)
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(12.213.665.726,00)	(6.948.181.967,35)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.150.874.574,00)	(4.703.378.826,00)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.112.704.224,00)	(4.788.004.135,00)
7.	Dinas Sosial	(1.882.700.570,00)	(3.176.878.693,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(7.677.544.522,00)	(7.548.218.114,00)
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.223.110.933,00)	(5.302.208.437,00)
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(4.311.359.622,00)	(4.992.143.025,00)
11.	Dinas Ketahanan Pangan	(1.661.512.458,00)	(2.656.590.287,00)
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(5.535.835.836,00)	(8.863.694.544,00)
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.735.654.259,00)	(3.872.324.795,00)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.509.864.015,00)	(3.350.171.766,67)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(9.141.224.125,00)	(9.648.052.393,66)
16.	Dinas Perhubungan	(2.918.062.119,00)	(4.136.961.007,00)
17.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	(4.463.421.413,24)	(4.214.602.126,26)
18.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	(4.418.061.982,00)	(9.851.939.071,00)
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(2.795.310.660,00)	(3.145.740.101,00)
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(14.140.813.503,00)	(11.175.208.001,53)
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.699.550.218,00)	(2.830.725.433,00)
22.	Badan Perencanaan Daerah	(3.197.130.782,00)	(4.710.432.952,00)
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	689.904.759.890,94	645.184.542.730,50
24.	Badan Pendapatan Daerah	2.226.219.883,70	1.532.567.764,88
25.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	(3.894.194.396,00)	(5.852.066.599,00)
26.	Badan Penelitian dan Pengembangan	(1.925.982.002,00)	(2.606.069.360,00)
27.	Sekretariat Daerah	(29.849.286.701,00)	(45.398.439.398,66)



No.	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
28.	Sekretariat DPRD	(16.503.225.749,00)	(29.560.429.005,00)
30.	Inspektorat Daerah	(5.176.642.669,00)	(7.170.096.425,50)
31.	Kecamatan Banggae	(6.433.774.570,00)	(5.977.238.611,00)
32.	Kecamatan Banggae Timur	(7.380.477.272,00)	(7.137.924.112,00)
33.	Kecamatan Pamboang	(2.760.904.855,00)	(2.879.015.584,00)
34.	Kecamatan Sendana	(3.647.242.749,00)	(3.900.113.030,02)
35.	Kecamatan Tammerodo Sendana	(1.198.162.066,00)	(1.354.703.251,00)
36.	Kecamatan Tubo Sendana	(1.588.305.526,00)	(1.989.724.317,00)
37.	Kecamatan Ulumanda	(1.238.103.195,00)	(1.587.758.599,00)
38.	Kecamatan Malunda	(3.319.069.994,00)	(3.615.670.737,00)
39.	Dinas Kelautan dan Perikanan	(11.476.479.570,72)	(16.768.764.603,71)
40.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	(14.685.303.668,00)	(32.430.909.235,84)
Jumlah		(780.022.194,62)	(94.345.951.633,92)

5.6.3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan/atau kesalahan mendasar seperti Koreksi Ekuitas awal atas Kas, Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Persediaan, Investasi, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Lainnya. Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp128.183.737.193,68. Saldo Koreksi Ekuitas tersebut merupakan akumulasi dari koreksi-koreksi yang secara langsung menambah atau mengurangi ekuitas di tahun berjalan. Koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.128 Koreksi yang Langsung Menambah Ekuitas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi atas adanya mutasi tambah yang mempengaruhi nilai aset tetap akibat adanya kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	105.291.050.295,01
2.	Belanja dana BOS SMPN 1 Majene tahun 2022 yang tidak terealisasi dan belum ditransaksikan di tahun 2023	742.000,00
3.	Koreksi atas saldo awal BLUD akibat adanya pendapatan jasa giro tahun 2022	17.188.473,71
4.	Koreksi atas adanya penyisihan piutang tahun 2022 pada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	3.392.338,30
5.	Koreksi atas pengakuan laba investasi jangka panjang pada Perusda tahun 2022	77.469.976,00
6.	Koreksi atas penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah	25.842.591.245,00
7.	Koreksi saldo persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pengakuan saldo awal per 1 Januari 2023.	133.151.205,00
Jumlah		131.365.585.533,02

Selain koreksi yang secara langsung menambah ekuitas, pada Tahun Anggaran 2023 juga terdapat koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129 Koreksi yang Langsung Mengurangi Ekuitas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi saldo awal kas pada Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah atas setoran pajak SP2D tahun 2022	182.000,00
2.	Koreksi saldo awal kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan atas setoran pajak SP2D tahun 2022	5.270.270,00
3.	Koreksi atas adanya mutasi kurang yang mempengaruhi nilai aset tetap	3.176.396.069,34
Jumlah		3.181.848.339,34

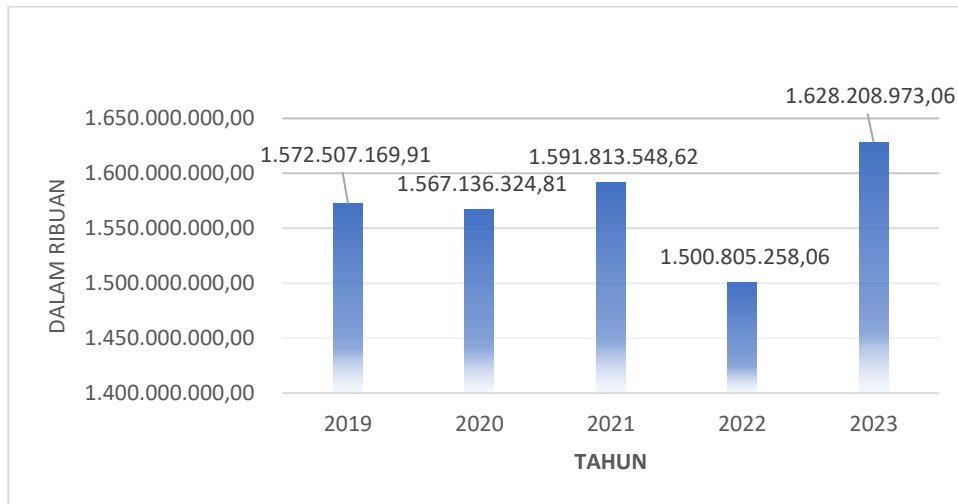
Koreksi yang langsung mengurangi ekuitas sesuai dengan tabel di atas terdiri dari penyesuaian saldo awal kas pada 2 (dua) SKPD yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah serta pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Berdasarkan dokumen sumber yang diterima, tidak semua nilai pencairan GU yang terdapat dalam jurnal koreksi BPK pada tahun sebelumnya, namun terdapat nilai pajak senilai Rp182.000,00 pada BKAD dan Rp5.270.270,00 pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan serta telah dilakukan penyetoran ke kas Negara. Berdasarkan PSAP Nomor 10 bahwa “Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan”, maka dilakukan koreksi atas saldo kas pada bendahara pengeluaran terhadap SKPD tersebut.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Ekuitas Akhir	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52	127.403.714.999,06	8,49
Jumlah	1.628.208.973.061,58	1.500.805.258.062,52	127.403.714.999,06	8,49

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 tercatat senilai Rp1.628.208.973.061,58. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp127.403.714.999,06 atau meningkat sebesar 8,49% dari Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022. Perubahan tersebut diakibatkan adanya pengurangan oleh Defisit – LO sebesar (Rp780.022.194,62) dan penambahan dari akumulasi Koreksi Ekuitas senilai Rp128.183.737.193,68.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas mencerminkan kondisi sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah pada suatu periode tertentu dalam menyelenggarakan operasionalisasi fungsi dan kewenangannya. Berikut analisis tren ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene sejak lima tahun terakhir.



Grafik 5.37 Tren Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene 2019-2023



BAB VI PENUTUP

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

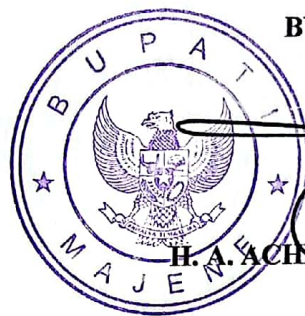
- a. Realisasi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 yaitu:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah - LRA sebesar **Rp87.794.782.521,37** atau **62,34%** dari anggaran sebesar **Rp140.838.163.462,00**;
 - 2) Pendapatan Transfer - LRA sebesar **Rp798.281.176.782,00** atau **100,85%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp791.537.242.000,00**; dan
 - 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA sebesar **Rp1.002.000.000,00** atau **46,39%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp2.160.000.000,00**.
- b. Realisasi Belanja Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 yaitu:
 - 1) Belanja Operasi sebesar **Rp667.164.512.064,80** atau **92,77%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp719.167.516.626,00**;
 - 2) Belanja Modal sebesar **Rp103.848.841.602,00** atau **89,43%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp116.127.586.618,00**; dan
 - 3) Belanja Tak Terduga sebesar **Rp1.977.663.278,00** atau **98,88%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp2.000.000.000,00**.
- c. Realisasi Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 yaitu:
 - 1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar **Rp1.216.354.374,00** atau **46,65%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp2.607.508.829,00**;
 - 2) Transfer Bantuan Keuangan sebesar **Rp110.808.379.000,00** atau **119,82%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp92.482.793.389,00**; dan
 - 3) Terdapat Surplus/(Defisit) antara Belanja dengan Transfer sebesar **Rp2.062.208.984,57**.
- d. Neraca Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023 menunjukkan:
 - 1) Jumlah Aset
 - a) Aset Lancar sebesar : Rp 30.627.497.984,64
 - b) Investasi Jangka Panjang : Rp 58.711.566.210,83
 - c) Aset Tetap : Rp 1.590.166.201.673,40
 - d) Aset Lainnya : Rp 6.312.594.785,16
 - 2) Kewajiban sebesar
 - a) Kewajiban Jangka Pendek : Rp 57.608.887.592,45
 - b) Kewajiban Jangka Panjang : Rp 0,00
 - 3) Ekuitas sebesar : Rp 1.628.208.973.061,58



e. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Majene untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan:

1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	: Rp	105.890.395.086,57
2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	: Rp	(105.553.186.102,00)
3) Arus Kas Bersih dari Pembiayaan	: Rp	0,00
4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	: Rp	(171.115.933,20)
5) Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023	: Rp	8.480.304.393,60

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2023.



BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, S.E., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REALISASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 1

NO	DESA	ANGGARAN POKOK	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
1	Buttu Baruga	713.519.000,00	713.519.000,00	-	100,00
2	Palipi Soreang	971.538.000,00	971.538.000,00	-	100,00
3	Pamboborang	993.817.000,00	993.817.000,00	-	100,00
4	Adolang	849.527.000,00	849.527.000,00	-	100,00
5	Bababulo	812.420.000,00	928.788.000,00	(116.368.000,00)	114,32
6	Bonde	812.743.000,00	929.111.000,00	(116.368.000,00)	114,32
7	Betteng	941.254.000,00	941.254.000,00	-	100,00
8	Simbang	661.127.000,00	777.495.000,00	(116.368.000,00)	117,60
9	Bonde Utara	1.092.111.000,00	1.208.479.000,00	(116.368.000,00)	110,66
10	Bababulo Utara	693.399.000,00	693.399.000,00	-	100,00
11	Buttu Pamboang	743.634.000,00	860.002.000,00	(116.368.000,00)	115,65
12	Banua Adolang	1.182.463.000,00	1.182.463.000,00	-	100,00
13	Adolang Dhua	794.320.000,00	910.688.000,00	(116.368.000,00)	114,65
14	Tinambung	812.131.000,00	928.499.000,00	(116.368.000,00)	114,33
15	Pesuloang	686.345.000,00	686.345.000,00	-	100,00
16	Balombong	939.950.000,00	939.950.000,00	-	100,00
17	Totolisi Sendana	955.368.000,00	955.368.000,00	-	100,00
18	Tallu Banua	1.007.654.000,00	1.124.022.000,00	(116.368.000,00)	111,55
19	Lalatedzong	683.822.000,00	683.822.000,00	-	100,00
20	Binanga	663.607.000,00	663.607.000,00	-	100,00
21	Puttada	723.466.000,00	723.466.000,00	-	100,00
22	Paminggalan	860.719.000,00	860.719.000,00	-	100,00
23	Leppangang	800.934.000,00	800.934.000,00	-	100,00
24	Pundau	912.954.000,00	912.954.000,00	-	100,00
25	Sendana	644.310.000,00	644.310.000,00	-	100,00
26	Banua Sendana	890.630.000,00	890.630.000,00	-	100,00
27	Tallu Banua Utara	743.200.000,00	859.568.000,00	(116.368.000,00)	115,66
28	Limboro Rambu-Rambu	744.683.000,00	744.683.000,00	-	100,00
29	Limbia	798.800.000,00	798.800.000,00	-	100,00
30	Bukit Samang	951.367.000,00	951.367.000,00	-	100,00
31	Seppong	838.232.000,00	838.232.000,00	-	100,00
32	Tammerodo	955.315.000,00	955.315.000,00	-	100,00
33	Ulidang	815.147.000,00	815.147.000,00	-	100,00
34	Tallambalao	966.262.000,00	966.262.000,00	-	100,00
35	Tammerodo Utara	750.437.000,00	750.437.000,00	-	100,00
36	Manyamba	807.350.000,00	807.350.000,00	-	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
REALISASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN 1

NO	DESA	ANGGARAN POKOK	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
37	Awo	1.156.341.000,00	1.156.341.000,00	-	100,00
38	Onang	1.029.202.000,00	1.029.202.000,00	-	100,00
39	Tubo	737.480.000,00	737.480.000,00	-	100,00
40	Onang Utara	720.244.000,00	720.244.000,00	-	100,00
41	Tubo Selatan	682.154.000,00	682.154.000,00	-	100,00
42	Bonde-Bonde	645.062.000,00	645.062.000,00	-	100,00
43	Tubo Tengah	714.607.000,00	714.607.000,00	-	100,00
44	Tubo Poang	722.693.000,00	722.693.000,00	-	100,00
45	Bambangan	942.727.000,00	942.727.000,00	-	100,00
46	Lombang	855.425.000,00	971.793.000,00	(116.368.000,00)	113,60
47	Lombong	861.840.000,00	861.840.000,00	-	100,00
48	Mekkatta	917.336.000,00	917.336.000,00	-	100,00
49	Maliaya	900.110.000,00	1.016.478.000,00	(116.368.000,00)	112,93
50	Lombang Timur	982.216.000,00	982.216.000,00	-	100,00
51	Salutahongan	1.123.510.000,00	1.123.510.000,00	-	100,00
52	Lombong Timur	1.017.591.000,00	1.133.959.000,00	(116.368.000,00)	111,44
53	Mekkatta Selatan	771.229.000,00	771.229.000,00	-	100,00
54	Kayuangin	1.053.717.000,00	1.053.717.000,00	-	100,00
55	Kabiraan	846.017.000,00	846.017.000,00	-	100,00
56	Sambabo	957.147.000,00	957.147.000,00	-	100,00
57	Tandeallo	1.040.156.000,00	1.040.156.000,00	-	100,00
58	Ulumanda	1.164.196.000,00	1.164.196.000,00	-	100,00
59	Salutambung	827.272.000,00	827.272.000,00	-	100,00
60	Popenga	1.212.713.000,00	1.329.081.000,00	(116.368.000,00)	109,60
61	Sulai	901.474.000,00	901.474.000,00	-	100,00
62	Panggalo	1.189.113.000,00	1.305.481.000,00	(116.368.000,00)	109,79
JUMLAH		54.186.127.000,00	55.815.279.000,00	(1.629.152.000,00)	103,01



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PEMILIK REKENING	REALISASI		TOTAL REALISASI
		KURANG BAYAR	TAHUN 2023	
1	DESA BINANGA	53.563.400,00	660.007.400,00	713.570.800,00
2	DESA TALLU BANUA	74.798.400,00	921.709.400,00	996.507.800,00
3	DESA BANUA SENDANA	64.602.400,00	796.070.400,00	860.672.800,00
4	DESA ULIDANG	61.360.400,00	756.082.400,00	817.442.800,00
5	DESA BABABULO	62.747.400,00	773.187.400,00	835.934.800,00
6	DESA TUBO SELATAN	56.582.400,00	697.280.400,00	753.862.800,00
7	DESA PANGGALO	91.590.400,00	1.128.669.400,00	1.220.259.800,00
8	DESA PUNDAU	59.101.400,00	728.334.400,00	787.435.800,00
9	DESA BUKIT SAMANG	67.078.400,00	826.526.400,00	893.604.800,00
10	DESA LIMBUA	61.543.400,00	758.316.400,00	819.859.800,00
11	DESA SEPPONG	64.465.400,00	794.359.400,00	858.824.800,00
12	DESA MANYAMBA	71.217.400,00	877.522.400,00	948.739.800,00
13	DESA AWO	75.346.400,00	928.451.400,00	1.003.797.800,00
14	DESA TUBO	61.447.400,00	757.234.400,00	818.681.800,00
15	DESA ONANG	85.149.400,00	1.049.259.400,00	1.134.408.800,00
16	DESA LOMBONG	68.342.400,00	842.193.400,00	910.535.800,00
17	DESA LOMBONG TIMUR	64.453.400,00	794.256.400,00	858.709.800,00
18	DESA MEKKATTA	73.742.400,00	908.684.400,00	982.426.800,00
19	DESA KAYUANGIN	67.740.400,00	834.786.400,00	902.526.800,00
20	DESA BUTTU BARUGA	57.723.400,00	711.318.400,00	769.041.800,00
21	DESA PAMBOBORANG	69.424.400,00	855.550.400,00	924.974.800,00
22	DESA BAMBANGAN	84.708.400,00	1.043.779.400,00	1.128.487.800,00
23	DESA BETTENG	67.294.400,00	829.177.400,00	896.471.800,00
24	DESA ULUMANDA	101.237.400,00	1.247.484.800,00	1.348.722.200,00
25	DESA TOTOLISI SENDANA	67.725.400,00	834.522.400,00	902.247.800,00
26	DESA SAMBABO	71.928.400,00	886.306.400,00	958.234.800,00
27	DESA SIMBANG	53.162.400,00	668.599.400,00	721.761.800,00
28	DESA TALLAMBALAO	76.420.400,00	941.766.400,00	1.018.186.800,00
29	DESA TUBO POANG	55.211.400,00	680.305.400,00	735.516.800,00
30	DESA TAMMERODO	69.108.400,00	851.633.400,00	920.741.800,00
31	DESA ONANG UTARA	65.358.400,00	805.375.400,00	870.733.800,00
32	DESA BONDE UTARA	68.675.400,00	846.196.400,00	914.871.800,00
33	DESA BONDE-BONDE	53.261.400,00	656.306.400,00	709.567.800,00
34	DESA SENDANA	58.256.400,00	717.875.400,00	776.131.800,00
35	DESA TAMMERODO UTARA	58.270.400,00	718.048.400,00	776.318.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PEMILIK REKENING	REALISASI		TOTAL REALISASI
		KURANG BAYAR	TAHUN 2023	
36	DESA ADOLANG	63.832.400,00	786.536.400,00	850.368.800,00
37	DESA ADOLANG DHUA	59.560.400,00	733.957.400,00	793.517.800,00
38	DESA TALLU BANUA UTARA	68.138.400,00	839.668.400,00	907.806.800,00
39	DESA BABABULO UTARA	57.222.400,00	705.111.400,00	762.333.800,00
40	DESA LALLATEDONG	62.064.400,00	764.759.400,00	826.823.800,00
41	DESA TINAMBUNG	63.187.400,00	778.598.400,00	841.785.800,00
42	DESA SALUTAMBUNG	66.055.400,00	813.930.400,00	879.985.800,00
43	DESA LIMBORO RAMBU-RAMBU	63.588.400,00	783.539.400,00	847.127.800,00
44	DESA POPENGA	84.570.400,00	1.042.079.400,00	1.126.649.800,00
45	DESA PALIPI SOREANG	63.905.400,00	787.514.400,00	851.419.800,00
46	DESA SULAI	64.921.400,00	800.000.400,00	864.921.800,00
47	DESA TUBO TENGAH	55.454.400,00	683.367.400,00	738.821.800,00
48	DESA MALIAYA	61.435.400,00	757.075.400,00	818.510.800,00
49	DESA BONDE	67.750.400,00	834.875.400,00	902.625.800,00
50	DESA SALUTAHONGAN	81.380.400,00	1.002.789.400,00	1.084.169.800,00
51	DESA BANUA ADOLANG	63.635.400,00	784.085.400,00	847.720.800,00
52	DESA PUTTADA	63.784.400,00	786.034.400,00	849.818.800,00
53	DESA BUTTU PAMBOANG	60.643.400,00	747.258.400,00	807.901.800,00
54	DESA MEKKATTA SELATAN	64.727.400,00	797.599.400,00	862.326.800,00
55	DESA KABIRAAAN	70.980.400,00	874.725.400,00	945.705.800,00
56	DESA PESULOANG	56.416.400,00	695.222.400,00	751.638.800,00
57	DESA BALOMBONG	60.444.400,00	744.805.400,00	805.249.800,00
58	DESA PAMINGGALAN	66.202.400,00	815.799.400,00	882.001.800,00
59	DESA LOMBANG	62.652.400,00	771.994.400,00	834.646.800,00
60	DESA LOMBANG TIMUR	70.298.400,00	866.299.400,00	936.597.800,00
61	DESA TANDEALLO	83.322.400,00	1.026.823.400,00	1.110.145.800,00
62	DESA LEPPANGAN	57.997.400,00	714.661.400,00	772.658.800,00
TOTAL		4.126.810.800,00	50.866.289.200,00	54.993.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2023

URAIAN	KATEGORI PIUTANG				JUMLAH
	LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (> 3 THN)	
PIUTANG PAJAK					
PBB P2	483.532.880,00	390.661.619,00	617.896.885,00	3.892.707.941,00	5.384.799.325,00
Tahun Tagihan 2010	-	-	-	128.202.893,00	128.202.893,00
Tahun Tagihan 2011	-	-	-	140.468.394,00	140.468.394,00
Tahun Tagihan 2012	-	-	-	176.483.440,00	176.483.440,00
Tahun Tagihan 2013	-	-	-	370.057.508,00	370.057.508,00
Tahun Tagihan 2014	-	-	-	446.514.995,00	446.514.995,00
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	297.858.452,00	297.858.452,00
Tahun Tagihan 2016	-	-	-	428.683.189,00	428.683.189,00
Tahun Tagihan 2017	-	-	-	450.291.401,00	450.291.401,00
Tahun Tagihan 2018	-	-	-	455.715.508,00	455.715.508,00
Tahun Tagihan 2019	-	-	-	549.806.133,00	549.806.133,00
Tahun Tagihan 2020	-	-	-	448.626.028,00	448.626.028,00
Tahun Tagihan 2021	-	-	617.896.885,00	-	617.896.885,00
Tahun Tagihan 2022	-	390.661.619,00	-	-	390.661.619,00
Tahun Tagihan 2023	483.532.880,00	-	-	-	483.532.880,00
BPHTB	-	-	-	186.132.996,50	186.132.996,50
Tahun Tagihan 2011	-	-	-	28.097.936,50	28.097.936,50
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	133.250.000,00	133.250.000,00
Tahun Tagihan 2017	-	-	-	21.285.060,00	21.285.060,00
Tahun Tagihan 2019	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
Tahun Tagihan 2020	-	-	-	-	-
Hotel	-	-	-	20.620.000,00	20.620.000,00
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	3.850.000,00	3.850.000,00
Tahun Tagihan 2017	-	-	-	15.650.000,00	15.650.000,00
Tahun Tagihan 2020	-	-	-	1.120.000,00	1.120.000,00
Tempat Hiburan	-	-	-	2.250.000,00	2.250.000,00
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	500.000,00	500.000,00
Tahun Tagihan 2016	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00
Restoran	12.781.000,00	52.297.750,00	72.975.920,00	301.958.421,00	440.013.091,00
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	112.467.300,00	112.467.300,00
Tahun Tagihan 2016	-	-	-	27.765.400,00	27.765.400,00
Tahun Tagihan 2017	-	-	-	79.632.621,00	79.632.621,00
Tahun Tagihan 2018	-	-	-	15.340.000,00	15.340.000,00
Tahun Tagihan 2019	-	-	-	23.751.050,00	23.751.050,00
Tahun Tagihan 2020	-	-	-	43.002.050,00	43.002.050,00
Tahun Tagihan 2021	-	-	72.975.920,00	-	72.975.920,00
Tahun Tagihan 2022	-	52.297.750,00	-	-	52.297.750,00
Tahun Tagihan 2023	12.781.000,00	-	-	-	12.781.000,00
Reklame	-	-	-	68.569.200,00	68.569.200,00
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	66.493.000,00	66.493.000,00
Tahun Tagihan 2016	-	-	-	2.076.200,00	2.076.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2023

URAIAN	KATEGORI PIUTANG				JUMLAH
	LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (> 3 THN)	
Galian C	-	1.564.000,00	-	587.005.319,90	588.569.319,90
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	3.872.000,00	3.872.000,00
Tahun Tagihan 2016	-	-	-	543.750.000,00	543.750.000,00
Tahun Tagihan 2017	-	-	-	32.337.000,00	32.337.000,00
Tahun Tagihan 2018	-	-	-	5.341.000,00	5.341.000,00
Tahun Tagihan 2019	-	-	-	1.705.319,90	1.705.319,90
Tahun Tagihan 2021	-	-	-	-	-
Tahun Tagihan 2022	-	1.564.000,00	-	-	1.564.000,00
Jumlah Piutang Pajak	496.313.880,00	444.523.369,00	690.872.805,00	5.059.243.878,40	6.690.953.932,40
% Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Pajak	2.481.569,40	44.452.336,90	345.436.402,50	5.059.243.878,40	5.451.614.187,20
Jumlah Piutang Pajak Netto	493.832.310,60	400.071.032,10	345.436.402,50	-	1.239.339.745,20
PIUTANG RETRIBUSI					
Pemakaian Rumah Dinas	19.720.000,00	7.360.000,00	-	36.120.000,00	63.200.000,00
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	12.280.000,00	12.280.000,00
Tahun Tagihan 2016	-	-	-	-	-
Tahun Tagihan 2017	-	-	-	720.000,00	720.000,00
Tahun Tagihan 2018	-	-	-	4.360.000,00	4.360.000,00
Tahun Tagihan 2019	-	-	-	4.280.000,00	4.280.000,00
Tahun Tagihan 2020	-	-	-	6.360.000,00	6.360.000,00
Tahun Tagihan 2021	-	-	-	8.120.000,00	8.120.000,00
Tahun Tagihan 2022	-	7.360.000,00	-	-	7.360.000,00
Tahun Tagihan 2023	19.720.000,00	-	-	-	19.720.000,00
Pelayanan Tempat Rekreasi & Olahraga	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00
Retribusi Gedung Olahraga	4.200.000,00	-	-	-	4.200.000,00
Ret. Pengawasan & Pengendalian Menara	23.862.500,00	10.695.000,00	3.795.000,00	-	38.352.500,00
Tahun Tagihan 2021	-	-	3.795.000,00	-	3.795.000,00
Tahun Tagihan 2022	-	10.695.000,00	-	-	10.695.000,00
Tahun Tagihan 2023	23.862.500,00	-	-	-	23.862.500,00
Pemakaian Sarana Daerah	32.500.000,00	31.500.000,00	65.000.000,00	22.500.000,00	151.500.000,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan	32.500.000,00	31.500.000,00	65.000.000,00	22.500.000,00	151.500.000,00
Retribusi Pasar	142.425.000,00	41.849.000,00	95.242.000,00	90.451.060,00	369.967.060,00
Tahun Tagihan 2017	-	-	-	13.700.000,00	13.700.000,00
Tahun Tagihan 2018	-	-	-	18.742.060,00	18.742.060,00
Tahun Tagihan 2019	-	-	-	12.523.000,00	12.523.000,00
Tahun Tagihan 2020	-	-	-	45.486.000,00	45.486.000,00
Tahun Tagihan 2021	-	-	95.242.000,00	-	95.242.000,00
Tahun Tagihan 2022	-	41.849.000,00	-	-	41.849.000,00
Tahun Tagihan 2023	142.425.000,00	-	-	-	142.425.000,00
Ret. Pasar Grosir / Pertokoan	44.985.000,00	21.330.000,00	62.970.000,00	50.409.200,00	179.694.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2023

URAIAN	KATEGORI PIUTANG				JUMLAH
	LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (> 3 THN)	
Tahun Tagihan 2015	-	-	-	7.810.600,00	7.810.600,00
Tahun Tagihan 2016	-	-	-	1.119.800,00	1.119.800,00
Tahun Tagihan 2017	-	-	-	450.800,00	450.800,00
Tahun Tagihan 2018	-	-	-	2.628.000,00	2.628.000,00
Tahun Tagihan 2019	-	-	-	7.320.000,00	7.320.000,00
Tahun Tagihan 2020	-	-	-	31.080.000,00	31.080.000,00
Tahun Tagihan 2021	-	-	62.970.000,00	-	62.970.000,00
Tahun Tagihan 2022	-	21.330.000,00	-	-	21.330.000,00
Tahun Tagihan 2023	44.985.000,00	-	-	-	44.985.000,00
Jumlah Piutang Retribusi	267.692.500,00	112.734.000,00	227.007.000,00	199.480.260,00	806.913.760,00
% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Retribusi	1.338.462,50	11.273.400,00	113.503.500,00	199.480.260,00	325.595.622,50
Jumlah Piutang Retribusi Netto	266.354.037,50	101.460.600,00	113.503.500,00	-	481.318.137,50
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
Piutang dari pengembalian Belanja ADD	113.384.000,00	-	-	-	113.384.000,00
Piutang Alokasi Dana Desa, Desa Tubo Poang	113.384.000,00	-	-	-	113.384.000,00
Piutang BLUD	58.474.967,00	-	-	-	58.474.967,00
Piutang BPJS RSUD	32.651.467,00	-	-	-	32.651.467,00
Piutang BPJS PKM Lembang	13.982.000,00	-	-	-	13.982.000,00
Piutang BPJS PKM Banggae II	3.674.200,00	-	-	-	3.674.200,00
Piutang BPJS PKM Pamboang	6.338.000,00	-	-	-	6.338.000,00
Piutang BPJS PKM Sendana I	1.053.200,00	-	-	-	1.053.200,00
Piutang BPJS PKM Sendana II	776.100,00	-	-	-	776.100,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah	171.858.967,00	-	-	-	171.858.967,00
% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang	859.294,84	-	-	-	859.294,84
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	170.999.672,16	-	-	-	170.999.672,16
Piutang Transfer Antar Daerah	1.327.402.119,00	-	-	-	1.327.402.119,00
Piutang DBH Pajak Rokok Triwulan 4 tahun 2023	1.327.402.119,00	-	-	-	1.327.402.119,00
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah	1.327.402.119,00	-	-	-	1.327.402.119,00
% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang	6.637.010,60	-	-	-	6.637.010,60
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah Netto	1.320.765.108,40	-	-	-	1.320.765.108,40
PIUTANG LAINNYA					
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	523.154.330,40	523.154.330,40
Sekretariat DPRD	-	-	-	466.851.500,00	466.851.500,00
Badan Keuangan Daerah dan Aset	-	-	-	43.302.830,40	43.302.830,40
Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	13.000.000,00	13.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHANNYA
PER 31 DESEMBER 2023

URAIAN	KATEGORI PIUTANG				JUMLAH
	LANCAR (1 THN)	KURANG LANCAR (1 - 2 THN)	DIRAGUKAN (2 - 3 THN)	MACET (> 3 THN)	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	56.999.299,04	56.999.299,04
Badan Keuangan Daerah dan Aset				56.999.299,04	56.999.299,04
Jumlah Piutang Lainnya	-	-	-	580.153.629,44	580.153.629,44
% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang	-	-	-	580.153.629,44	580.153.629,44
Jumlah Piutang Lainnya Netto	-	-	-	-	-
TOTAL PIUTANG	2.263.267.466,00	557.257.369,00	917.879.805,00	5.838.877.767,84	9.577.282.407,84
PENYISIHAN	11.316.337,34	55.725.736,90	458.939.902,50	5.838.877.767,84	6.364.859.744,58
JUMLAH PIUTANG NETTO	2.251.951.128,66	501.531.632,10	458.939.902,50	-	3.212.422.663,26



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR SISA PERSEDIAN
PER 31 DESEMBER 2023

LAMPIRAN 4

NO.	UNIT KERJA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR					OBAT-OBATAN		PERSD. UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	NATURA DAN PAKAN	JUMLAH
		ATK	PERALATAN & KEBERSIHAN	PERS.BENDA BERHARGA	BLANGKO KIA	BMHP	OBAT DI INSTALASI FARMASI	OBAT-OBATAN PUSKESMAS	BELANJA BRG DI SERAHKAN KE MASYARAKAT	INSTALASI GIZI/MAKAN MINUM PASIEN	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00
2	DINAS KESEHATAN (UNIT)	-	-	-	-	-	6.888.496.335,60	2.678.164.555,24	-	-	9.566.660.890,84
3	RSUD	6.709.416,00	1.497.400,00	-	-	861.879.601,73	1.001.880.548,96	-	-	17.786.941,00	1.889.753.907,69
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	7.217.936.572,25	-	7.217.936.572,25
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	61.275.000,00	-	-	-	-	-	61.275.000,00
6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00
7	BADAN PERENCANAAN DAERAH	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	22.910.393,00	-	-	-	-	-	-	22.910.393,00
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	175.356.164,00	-	-	-	175.356.164,00
TOTAL		7.587.416,00	1.497.400,00	22.910.393,00	61.275.000,00	861.879.601,73	8.065.733.048,56	2.678.164.555,24	7.217.936.572,25	17.786.941,00	18.934.770.927,78
		955.149.810,73					10.743.897.603,80		7.217.936.572,25	17.786.941,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG PFK
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	IURAN JAMINAN KESEHATAN	IURAN WAJIB PEGAWAI	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	JUMLAH	TANGGAL SETOR
1	Sekretariat Daerah			9.954.553,00	4.841.160,00	32.391.506,00	251.172,00	47.438.391,00	11 Mar 2024 15 Mar 2024 27 Mar 2024
2	Puskesmas Banggae II				150.000,00			150.000,00	6 Jan 2024
3	Puskesmas Tammerodo		9.512.406,00	3.069.066,00	18.361.373,00	837.019,00		31.779.864,00	6 Jan 2024
4	Puskesmas Salutambung			693.693,00	189.189,00			882.882,00	3 Jan 2024
5	Puskesmas Ulumanda	39.015,00			37.964,00	292.937,00		369.916,00	6 Jan 2024
6	Puskesmas Malunda				809.209,00			809.209,00	6 Jan 2024
7	TK Negeri Pembina Sendana			-	266.700,00	-	-	266.700,00	28 Feb 2024
8	TK Negeri Pembina Perdesaan			-	212.100,00	-	-	212.100,00	27 Feb 2024
9	TK Pembina Majene			-	9.000,00	-	-	9.000,00	15 Feb 2024
10	SPNF SKB			3.526.490,00			346.000,00	3.872.490,00	19 Mar 2024
11	SDN 3 Tinambung						20.000,00	20.000,00	5 Jan 2024
12	SDN 7 Taukong				365.000,00			365.000,00	8 Jan 2024
13	SDN 10 Salutambung				6.000,00			6.000,00	10 Jan 2024
14	SDN 11 Maliaya				140.580,00			140.580,00	26 Feb 2024
15	SDN 16 Puare				64.000,00		58.400,00	122.400,00	9 Jan 2024
16	SDN 12 Pattabeang				45.000,00			45.000,00	8 Jan 2024
17	SDN 13 Pallarangan				726.000,00			726.000,00	19 Mar 2024
18	SDN 21 Salutahongan			523.243,00	-	-	99.000,00	622.243,00	28 Feb 2024
19	SDN 21 Totolisi				105.180,00			105.180,00	18 Mar 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG PFK
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	IURAN JAMINAN KESEHATAN	IURAN WAJIB PEGAWAI	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	JUMLAH	TANGGAL SETOR
20	SDN 40 Pappota				4.500,00			4.500,00	30 Jan 2024
21	SDN 4 Mekkatta			1.091.675,00	331.200,00	-	248.000,00	1.670.875,00	3 Feb 2024
22	SDN 50 Talonga						122.760,00	122.760,00	19 Feb 2024
23	SDN 58 Pangale				96.000,00			96.000,00	8 Jan 2024
24	SDN 39 Batususun				50.320,00			50.320,00	24 Feb 2024
25	SDN 16 Garogo				457.200,00			457.200,00	16 Jan 2024
26	SDN 8 Sirindu				16.000,00			16.000,00	5 Jan 2024
27	SDN 1 Saleppa			2.096.160,00	1.498.076,00			3.594.236,00	19 Mar 2024
28	SMPN 1 Sendana			6.205.109,00	6.409.960,00			12.615.069,00	10 Jan 2024
29	SMPN 1 Majene				43.200,00			43.200,00	9 Jan 2024
30	SMPN 6 Majene				90.000,00			90.000,00	10 Jan 2024
31	SMPN 3 Sendana			177.120,00	189.000,00	-	104.010,00	470.130,00	9 Feb 2024
32	SMPN 2 Pamboang				482.416,00		9.200,00	491.616,00	29 Jan 2024 26 Feb 2024 14 Mar 2024
33	SMPN 4 Malunda				527.500,00	-	970.000,00	1.497.500,00	20 Mar 2024
Jumlah		39.015,00	9.512.406,00	27.337.109,00	36.523.827,00	33.521.462,00	2.228.542,00	109.162.361,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SISA UTANG S/D 2022		TAHUN 2023				SISA UTANG S/D TAHUN 2023	
				PEMBAYARAN UTANG		PENAMBAHAN UTANG			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA	6.689.012.453,00	-	4.834.208.350,00		9.849.282.743,00		11.704.086.846,00	-
2	DINAS KESEHATAN	2.984.368.706,00	-	1.816.938.870,00		241.565.753,00		1.408.995.589,00	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	119.500.000,00	10.706.636.420,00	-	10.703.167.605,00		13.466.538.914,12	119.500.000,00	13.470.007.729,12
4	PUSKESMAS BANGGAE I (BLUD)						146.423.198,00		146.423.198,00
5	PUSKESMAS BANGGAE II (BLUD)						54.762.291,00		54.762.291,00
6	PUSKESMAS TOTOLI (BLUD)						28.500.343,00		28.500.343,00
7	PUSKESMAS LEMBANG (BLUD)						151.754.855,00		151.754.855,00
8	PUSKESMAS SENDANA I (BLUD)						177.429.820,00		177.429.820,00
9	PUSKESMAS TAMMERODO (BLUD)						92.024.540,00		92.024.540,00
10	PUSKESMAS SENDANA II (BLUD)						62.441.705,00		62.441.705,00
11	PUSKESMAS SALUTAMBUNG (BLUD)						76.470.650,00		76.470.650,00
12	PUSKESMAS ULUMANDA (BLUD)						6.342.128,00		6.342.128,00
13	PUSKESMAS MALUNDA (BLUD)						225.127.968,00		225.127.968,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.952.618.213,00	-	2.035.316.315,00		2.663.784.980,00		8.581.086.878,00	-
15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.400.800.801,00	-	293.755.510,00		55.345.000,00		1.162.390.291,00	-
16	SATUAN POLISI PAMONG PARAJA	12.978.400,00	-	-				12.978.400,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SISA UTANG S/D 2022		TAHUN 2023				SISA UTANG S/D TAHUN 2023	
				PEMBAYARAN UTANG		PENAMBAHAN UTANG			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	584.754.040,00	-	-				584.754.040,00	-
18	DINAS SOSIAL	305.415.000,00	-	-		31.950.000,00		337.365.000,00	-
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	258.466.706,00	-	5.066.706,00				253.400.000,00	-
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	494.629.124,00	-	63.595.324,00		105.814.860,00		536.848.660,00	-
21	DINAS KETAHANAN PANGAN	91.603.060,00	-	-				91.603.060,00	-
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1.065.843.844,00	-	148.000.000,00		132.768.900,00		1.050.612.744,00	-
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	522.535.600,00	-	-		69.300.000,00		591.835.600,00	-
24	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	284.986.890,00	-	2.597.910,00				282.388.980,00	-
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	334.086.352,00	-	49.700.000,00				284.386.352,00	-
26	DINAS PERHUBUNGAN	42.823.200,00	-	-				42.823.200,00	-
27	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	261.373.278,00	-	168.931.566,00				92.441.712,00	-
28	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	1.551.000.579,00	-	224.050.000,00		45.000.000,00		1.371.950.579,00	-
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	317.508.900,00	-	3.200.000,00				314.308.900,00	-
30	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.470.889.403,00	-	727.281.280,00		29.050.000,00		1.772.658.123,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SISA UTANG S/D 2022		TAHUN 2023				SISA UTANG S/D TAHUN 2023	
				PEMBAYARAN UTANG		PENAMBAHAN UTANG			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	76.143.900,00	-	-		13.838.900,00		89.982.800,00	-
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.247.543.800,00	-	368.400.000,00		78.300.000,00		1.957.443.800,00	-
33	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	1.576.530.428,00	-	-		48.465.820,00		1.624.996.248,00	-
34	SEKRETARIAT DAERAH	3.333.535.476,00	-	819.120.248,00		110.877.800,00		2.625.293.028,00	-
35	INSPEKTORAT DAERAH	965.479.530,00	-	-				965.479.530,00	-
36	BADAN PERENCANAAN DAERAH	637.614.208,00	-	12.600.000,00				625.014.208,00	-
37	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.799.042.574,00	-	5.372.410.674,00		404.279.460,00		830.911.360,00	-
38	BADAN PENDAPATAN DAERAH	268.500.000,00	-	-		87.139.800,00		355.639.800,00	-
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	253.656.968,00	-	188.301.768,00		1.000.000,00		66.355.200,00	-
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	635.745.340,00	-	160.000.000,00		6.496.200,00		482.241.540,00	-
41	SEKRETARIAT DPRD	2.148.493.378,00	-	340.000.000,00		373.604.442,00		2.182.097.820,00	-
42	KECAMATAN BANGGAE DAN KELURAHAN	54.547.200,00	-	-		13.410.000,00		67.957.200,00	-
43	KECAMATAN BANGGAE TIMUR DAN KELURAHAN	49.647.530,00	-	26.779.000,00		501.821,00		23.370.351,00	-
44	KECAMATAN PAMBOANG	-	-					-	-
45	KECAMATAN SENDANA DAN KELURAHAN	70.656.500,00	-	-				70.656.500,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
SALDO UTANG BELANJA PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SISA UTANG S/D 2022		TAHUN 2023				SISA UTANG S/D TAHUN 2023	
				PEMBAYARAN UTANG		PENAMBAHAN UTANG			
		APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD
46	KECAMATAN TAMMERODO	20.187.500,00	-	-				20.187.500,00	-
47	KECAMATAN TUBO	24.261.000,00	-	-				24.261.000,00	-
48	KECAMATAN MALUNDA DAN KELURAHAN	65.850.832,00	-	12.680.000,00				53.170.832,00	-
49	KECAMATAN ULUMANDA	24.600.000,00	-	-				24.600.000,00	-
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	413.983.000,00	-	99.400.000,00				314.583.000,00	-
	JUMLAH	46.411.213.713,00	10.706.636.420,00	17.772.333.521,00	10.703.167.605,00	14.361.776.479,00	14.487.816.412,12	43.000.656.671,00	14.491.285.227,12



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
A	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA		11.704.086.846,00
	TAHUN 2018		326.063.719,00
1	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) KEKURANGAN GAJI TAHUN 2018	BELANJA PEGAWAI	326.063.719,00
	TAHUN 2019		2.040,00
1	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) KEKURANGAN SETORAN IURAN BPJS TAHUN 2019	BELANJA PEGAWAI	2.040,00
	TAHUN 2022		1.528.738.344,00
1	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN BANNER DAN RUBRIK KHUSUS MEDIA PARE POS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA KABUPATEN MAJENE BERDASARKAN SPK NO. 20/SPK/DISDIKPORA-SEKRET/X/2022 TANGGAL 11 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00
2	LSPEMBAYARAN LEMBUR DALAM RANGKA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA-SKPD SESUAI SPK NO. 941/08/2022 TANGGAL 5 AGUSTUS 2022. DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA. (SUMBER DANA: DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.938.000,00
3	LSPEMBAYARAN UANG LEMBUR KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN SP NO. 04/SP/DISDIKPORA-GTK/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.923.600,00
4	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PELATIHAN PERAN PEMUDA SEBAGAI SATU UPAYA PENINGKATAN MAJENE KOTA PENDIDIKAN BERDASARKAN SPKS NO. 036/SPKS-PO/DISDIKPORA/X/2022 TANGGAL 19 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: PEMBIYAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
5	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN SOSIALISASI PENTINGNYA BUDAYA LITERASI BAGI ANAK PENDIDIKAN DAN ANAK USIA BERDASARKAN SPK NO. 042/PK/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2022, TANGGAL 5 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
6	LSPEMBAYARAN PENINGKATAN NILAI- NILAI KEPEMUDAAN BERDASARKAN SPK NO. 004/SPK-SP/DISDIKPORA-PO/2022 TANGGAL 5 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	209.350,00
7	LSPEMBAYARAN PENINGKATAN NILAI- NILAI KEPEMUDAAN BERDASARKAN SPK NO. 004/SPK-SP/DISDIKPORA-PO/2022 TANGGAL 5 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00
8	LSPEMBAYARAN MAKAN DAN MINUM RAPAT KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN SPK NO. 06/SP/DISDIKPORA-GTK/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00
9	LSPEMBAYARAN BELANJA ATK KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN SP NO. 02/SP/DISDIKPORA-GTK/VIII/2022 TANGGAL 11 AGUSTUS 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.976.000,00
10	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN SOSIALSASI PEMANFAATAN INTERNET DAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN UASAH KREATIFITAS PEMUDA BERDASARKAN SPKS NO. 041/SPKS- PO/DISDIKPORA/XII/2022 TANGGAL 2 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
11	LSPEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SPK NO. 01/SPK/MULOK/DISDIKPORA/XI/2022 TANGGAL 22 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN- LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000,00
12	LSPEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SPK NO. 01/SPK/MULOK/DISDIKPORA/XI/2022 TANGGAL 22 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN- LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	253.000,00
13	LSPEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SPK NO. 01/SPK/MULOK/DISDIKPORA/XI/2022 TANGGAL 22 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN- LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	155.600,00
14	LSPEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SPK NO. 01/SPK/MULOK/DISDIKPORA/XI/2022 TANGGAL 22 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN- LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.640.000,00
15	LSPEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER, PANITIA, PEMBWA ACARA, DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SPK NO. 01/SPK/MULOK/DISDIKPORA/XI/2022 TANGGAL 22 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN- LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00
16	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN GOWES BARENG KOMUNITAS SEPEDA SE-KABUPATEN MAJENE BERDASARKAN SPKS NO. 040/SPKS-PO/DISDIKPORA/XI/2022 TANGGAL 28 NOVEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
17	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN PEMUDA BERBASIS EKONOMI KREATIF BERDASARKAN SPKS NO. 038/SPKS-PO/DISDIKPORA/XI/2022 TANGGAL 22 NOVEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
18	LSPEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PENDIDIKAN PADA KANTOR DISDIKPORA UNTUK BULAN JULI 2022 S/D DESEMBER 2022. BERDASARKAN SK BUPATI MAJENE NO. 605/HK/KEP-BUP/V/2022 TANGGAL 19 MEI 2022 (SUMBER DANA: DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	23.100.000,00
19	LSPEMBAYARAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH/SPM BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/VIII/2022 TANGGAL 2 AGUSTUS 2022. (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	18.890.700,00
20	LSPEMBAYARAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH/SPM BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/VIII/2022 TANGGAL 2 AGUSTUS 2022. (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.127.500,00
21	LSPEMBAYARAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH/SPM BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/VIII/2022 TANGGAL 2 AGUSTUS 2022. (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	349.000,00
22	LSPEMBAYARAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH/SPM BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/VIII/2022 TANGGAL 2 AGUSTUS 2022. (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00
23	LSPEMBAYARAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN PESERTA DIDIK ASESMEN SMP BERDASARKAN SPK NO. 01.03/SPK/ASESMEN-SMP/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
24	LSPEMBAYARAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN PESERTA DIDIK ASESMEN SMP BERDASARKAN SPK NO. 01.03/SPK/ASESMEN-SMP/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	925.750,00
25	LSPEMBAYARAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN PESERTA DIDIK ASESMEN SMP BERDASARKAN SPK NO. 01.03/SPK/ASESMEN-SMP/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000,00
26	LSPEMBAYARAN HONORARIUM SOSIALISASI POS PADA KEGIATAN ASESMEN NASIONAL TA 2022 BERDASARKAN SPK NO. 01.05/SPK/ASESMEN-SD/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00
27	LSPEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER PELATIHAN PROKTOR PADA KEGIATAN ASESMEN SMP TA 2022 BERDASARKAN SPK NO. 01.03/SPK/ASESMEN-SMP/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00
28	LSPEMBAYARAN ATAS PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR BERDASARKAN SPK NO. 01.06/SPK/IKM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
29	LSPEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS ATAS KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH/SPM PENDIDIKAN DASAR TA 2022 BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/VIII/2022 TANGGAL 2 AGUSTUS 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.997.000,00
30	LSPEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS ATAS KEGIATAN ASESMEN SEKOLAH SD TAHUN ANGGARAN 2022, SPK NO. 01.05/SPK/ASESMEN-SD/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN - LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	13.070.000,00
31	LSPEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS ATAS KEGIATAN ASESMEN SEKOLAH SMP TAHUN ANGGARAN 2022, SPK NO. 01.03/SPK/ASESMEN-SD/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN - LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.547.000,00
32	LSPEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA KEGIATAN RAKOR PENGEMBANGAN LEMBAGA/ORGANISASI PGRI BERDASARKAN SPK NO. 01.07/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
33	LSPEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH SESUAI SPK NO. 01.08/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00
34	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERWASITAN CABANG OLAH RAGA FUTSAL BERDASARKAN SPKS NO. 054/SPKS-PO/DISDIKPORA/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
35	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN MUTU TENAGA KEOLAH RAGAAN BERBASIS IPTEK BERDASARKAN SPKS NO. 053/SPKS-PO/DISDIKPORA/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
36	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PENINGKATAN SDM BAGI PEMUDA TENTANG KEWIRAUSAHAAN BERDASARKAN SPKS NO. 035/SPKS-PO/DISDIKPORA/X/2022 TANGGAL 19 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
37	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PELATIHAN TATACARA BERKENDARA DENGAN BENAR (<i>SAFETY RIDING</i>) BERDASARKAN SPK NO : 01.18/SPK/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 6 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
38	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN <i>DIGITAL ENTREPRENEURSHIP</i> BERDASARKAN SPK NO. 047/SPKS-PO/DISDIKPORA/XII/2022 TANGGAL 9 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
39	LSPEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH SESUAI SPK NO. 01.08/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.450.000,00
40	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMUDA DENGAN METODE PELATIHAN TEKNIK PENGELASAN BERDASARKAN SPKS NO. 050/SPKS-PO/DISDIKPORA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
41	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PENINGKATAN KREATIVITAS PEMUDA MELALUI PELATIHAN IT BERDASARKAN SPKS NO. 049/SPKS-PO/DISDIKPORA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
42	LSPEMBAYARAN SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN KEGIATAN RAKOR PENGEMBANGAN LEMBAGA/ORGANISASI PGRI BERDASARKAN SPK NO. 01.07/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00
43	LSPEMBAYARAN ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ATK PADA KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH SESUAI SPK NO. 01.08/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	165.000,00
44	LSPEMBAYARAN ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ATK PADA KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH SESUAI SPK NO. 01.08/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000,00
45	LSPEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN RAKOR PENGEMBANGAN LEMBAGA/ORGANISASI PGRI BERDASARKAN SPK NO. 01.07/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.476.000,00
46	LSPEMBAYARAN ALAT ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ATK DAN KERTAS <i>COVER</i> KEGIATAN RAKOR PENGEMBANGAN LEMBAGA/ORGANISASI PGRI BERDASARKAN SPK NO. 01.07/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.628.000,00
47	LSPEMBAYARAN ALAT ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ATK DAN KERTAS <i>COVER</i> KEGIATAN RAKOR PENGEMBANGAN LEMBAGA/ORGANISASI PGRI BERDASARKAN SPK NO. 01.07/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	116.000,00
48	LSPEMBAYARAN UANG LEMBUR ATAS KEGIATAN PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN SESUAI SPK NO. 001/SPK-PO/DA/DISDIKPORA/XII/2022 TANGGAL 3 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.193.000,00
49	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PELATIHAN PELATIH VOLI BERDASARKAN SPKS NO. 052/SPKS-PO/DISDIKPORA/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
50	LSPEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA KEGIATAN LOMBA GERAK JALAN ANTAR SISWA JENJANG SD BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISIDKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	14.100.000,00
51	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PELATIHAN PELATIH VOLI INDOOR BERDASARKAN SPKS NO. 051/SPKS-PO/DISIDKPORA/XII/2022 TANGGAL 13 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
52	LSPEMBAYARAN ATK, KERTAS COVER, DAN BAHAN KOMPUTER PADA KEGIATAN LOMBA GERAK JALAN ANTAR SISWA JENJANG SD BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISIDKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.573.188,00
53	LSPEMBAYARAN ATK, KERTAS COVER, DAN BAHAN KOMPUTER PADA KEGIATAN LOMBA GERAK JALAN ANTAR SISWA JENJANG SD BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISIDKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	108.312,00
54	LSPEMBAYARAN ATK, KERTAS COVER, DAN BAHAN KOMPUTER PADA KEGIATAN LOMBA GERAK JALAN ANTAR SISWA JENJANG SD BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISIDKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	218.500,00
55	LSPEMBAYARAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR GOR PELATTOANG, BERDASARKAN SPK NO. 007/SPK/PA-DISIDKPORA-PO/IX/2022 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022. (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.355.000,00
56	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR GOR PELATTOANG, BERDASARKAN SPK NO. 007/SPK/PA-DISIDKPORA-PO/IX/2022 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022. (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	82.745.000,00
57	LSPEMBAYARAN PERLENGKAPAN DINAS PADA KEGIATAN LOMBA GERAK JALAN ANTAR SISWA JENJANG SD BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISIDKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00
58	LSPEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA KEGIATAN LOMBA GERAK JALAN ANTAR SISWA JENJANG SD BERDASARKAN SPK NO. 01.04/SPK/SPM/DISIDKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00
59	LSPEMBAYARAN KEGIATAN PEMBINAAN PASKIBRAKA (PERJALANAN DINAS TETAP) BERDASARKAN SPK NO. 02/SPK-PO/PASKI/DISIDKPORA/VII/2022 TANGGAL 1 JULI 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	231.720,00
60	LSPEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR (PERJALANAN DINAS DALAM KOTA) BERDASARKAN SPK NO. 01/SPK/MULOK/DISIDKPORA/XI/2022 TANGGAL 22 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN- LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00
61	LSPEMBAYARAN UANG HARIAN DAN TRANSPORT PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN ASESMEN SD TA 2022 BERDASARKAN SPK NO. 01.05/SPK/ASESMEN-SD/DISIDKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.920.000,00
62	LSPEMBAYARAN UANG HARIAN DAN TRANSPORT PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN ASESMEN SMP TA 2022 BERDASARKAN SPK NO. 01.03/SPK/ASESMEN-SMP/DISIDKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
63	LSPEMBAYARAN TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN UAS DAN ASESMEN SMP TA 2022 BERDASARKAN SPK NO. 01.03/SPK/ASESMEN-SMP/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	28.500.000,00
64	LSPEMBAYARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN ASESMEN SD TA 2022 BERDASARKAN SPK NO. 01.05/SPK/ASESMEN-SD/DISDIKPORA-DIKDAS/IV/2022 TANGGAL 6 APRIL 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00
65	LSPEMBAYARAN UANG HARIAN PESERTA DAN PANITIA PADA KEGIATAN RAKOR PENGEMBANGAN LEMBAGA/ORGANISASI PGRI BERDASARKAN SPK NO. 01.07/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00
66	LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH SESUAI SPK NO. 01.08/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000,00
67	LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI SEKOLAH SESUAI SPK NO. 01.08/SPK/SPM/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000,00
68	LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DALAM RANGKA KEGIATAN PENINGKATAN NILAI-NILAI KEPEMUDAAN DI KECAMATAN TUBO SENDANA BERDASARKAN SPK NO. 04/SPK-PO/RTN/DISDIKPORA/X/2022 TANGGAL 5 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.920.000,00
69	LSPEMBAYARAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BIAYA PENGELOLAAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN PAGAR (ATK) BERDASARKAN SPK NO. 02.001/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XII/2022 TANGGAL 2 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA: DAU PMK 07)	BELANJA MODAL	7.401.600,00
70	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN SUMUR BOR <i>SPORT CENTER</i> RANGAS, BERDASARKAN SPK NO. 012/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2022 TANGGAL 12 OKTOBER 2022. (SUMBER DANA: DAU)	BELANJA MODAL	1.185.000,00
71	LSPEMBAYARAN 100% ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN MESIN RUMPUT, BERDASARKAN SPK NO. 018/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/XII/2022 TANGGAL 20 DESEMBER. (SUMBER DANA: LAIN- LAIN PAD)	BELANJA MODAL	13.875.000,00
72	LSPEMBAYARAN 5% ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LAPANGAN <i>TENNIS INDOOR</i> , BERDASARKAN SPK NO. 006/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2022, TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022. (SUMBER DANA: DAU)	BELANJA MODAL	72.224.852,00
73	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LAPANGAN <i>TENNIS INDOOR</i> , BERDASARKAN SPK NO. 006/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2022, TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022. (SUMBER DANA: DAU)	BELANJA MODAL	312.523.672,00
74	LSPEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN LAPANGAN <i>TENNIS INDOOR</i> PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA TA 2022. BERDASARKAN SPK NO. 006/SPK-PO/PENG/DISDIKPORA/VIII/2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022. (SUMBER DANA: DAU)	BELANJA MODAL	12.931.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
75	LSPEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR & PENGGANDAAN KEGIATAN PENGELOLAAN PEMB. LAPANGAN <i>TENNIS INDOOR</i> PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA TA 2022. BERDASARKAN SPK NO. 006/SPK-PO/PENG/DISDIKPORA/VIII/2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022. (SUMBER DANA: DAU)	BELANJA MODAL	5.000.000,00
76	LSPEMBAYARAN PENGADAAN ALAT PENDINGIN (AC) UPTD PENGELOLAAN GOR DAN STADION PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA. BERDASARKAN SPK NO. 01/SPK/DISDIKPORA-UPTD/XI 2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022. (SUMBER DANA: DAU NON EMAR)	BELANJA MODAL	5.000.000,00
77	LSPEMBAYARAN PENGADAAN <i>PRINTER</i> UPTD PENGELOLAAN GOR DAN STADION PADA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA. BERDASARKAN SPK NO. 02/SPK-UPTD/DISDIKPORA/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022. (SUMBER DANA: DAU NON EMAR)	BELANJA MODAL	4.500.000,00
	TAHUN 2023		9.849.282.743,00
1	KOREKSI TAMBAH ATAS PENGAKUAN UTANG BELANJA PEGAWAI ATAS TPG BULAN DESEMBER YANG BELUM DIBAYAR HINGGA 31 DESEMBER 2023 (PAJE 02 JUKOR BPK)	BELANJA PEGAWAI	4.628.305.000,00
2	KOREKSI PENGAKUAN SALDO PIUTANG BPJS KESEHATAN ATAS KEKURANGAN IURAN WAJIB 4% PEMDA TAHUN 2023 SESUAI SURAT TAGIHAN KEPALA CABANG BPJS POLMAN NOMOR 406/IX-05/0324 TANGGAL 3 MARET 2024 TENTANG TAGIHAN TUNGGAKAN IURAN WAJIB PEMDA ATAS PENGHASILAN PNS DAERAH TAHUN 2022 - 2023 (JUKOR 42)	BELANJA PEGAWAI	3.304.889.568,00
3	LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PEMBINAAN PASKIBRAKA TINGKAT KABUPATEN MAJENE TA 2023 BERDASARKAN SURAT TUGAS NO. T.800.1.11.1/170/VIII/2023 TANGGAL 15 MARET 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.810.000,00
4	LSPEMBAYARAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR (ATK) BERDASARKAN NOTA PESANAN TERLAMPIR. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00
5	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN BERDASARKAN SPK NO.59/SPK-PENUN/DAU//DISDIKPORA/PAUD-PNF/XI/2023 TANGGAL 2 NOVEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.700.070,00
6	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN BERDASARKAN SPK NO.57/SPK-PENUN/DAU//DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2023 TANGGAL 31 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	27.389.250,00
7	LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT BERDASARKAN SURAT TUGAS NO. T.800.I.II.II/185.A/X/2023 TANGGAL 16 OKTOBER 2023 (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
8	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR TK TATAKKO BERDASARKAN SPK NO. 43/SPK/DAU/DISIDKPORA/PAUD-PNF/X/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	21.350.300,00
9	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PELAKSANAAN REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH TK RAUDHATUL AKHYAR PGRI BERDASARKAN SPK NO.39/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2023 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	42.574.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
10	LSPEMBAYARAN BIAYA LEMBUR PADA KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS BERDASARKAN SPK NO. 941/12/2023 TANGGAL 1 NOVEMBER 2023 PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA TA 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00
11	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLI BERDASARKAN SPK NO. 06/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/IX/2023 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	42.657.762,00
12	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN (REHABILITASI RUANG KELAS) BERDASARKAN SPK NO. 01.161//SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2023 TANGGAL 1 NOVEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.952.600,00
13	LSPEMBAYARAN 5% ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TOILET TK BHAYANGKARI PAMBOANG BERDASARKAN SPK NO.26/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2023 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.345.575,00
14	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN REHABILITASI RUANG KELAS TK AISYIAH AL-IKHLASH TANISI BERDASARKAN SPK NO. 47/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	21.280.000,00
15	LSPEMBAYARAN 5% ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PAGAR TK BHAYANGKARI PAMBOANG BERDASARKAN SPK NO.25/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2023 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.795.700,00
16	LSPEMBAYARAN 5% ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UKS TK BHAYANGKARI PAMBOANG BERDASARKAN SPK NO.24/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2023 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.797.500,00
17	LSPEMBAYARAN 5% ATAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUANG GURU TK BHAYANGKARI PAMBOANG BERDASARKAN SPK NO.29/SPK/DAU/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2023 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.046.550,00
18	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLI DESA ONANG BERDASARKAN SPK NO. 08/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	42.557.625,00
19	PELATIHAN METODE PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00
20	PENYELENGGARAAN EKSEBISI /PERTANDINGAN PELTI MAJENE DI LUAR DAERAH	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
21	PEMBINAAN DAN PELATIHAN TENIS LAPANGAN ANAK USIA DINI	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
22	PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAKBOLA APOANG UTARA	BELANJA BARANG DAN JASA	2.242.517,00
23	PEMBANGUNAN LAPANGAN TAKRAW DESA BABABULO	BELANJA BARANG DAN JASA	89.861.000,00
24	PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLI	BELANJA BARANG DAN JASA	2.245.146,00
25	PEMBAYARAN 5 % PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLI DESA ONANG	BELANJA BARANG DAN JASA	2.239.875,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
26	PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLI DESA ULUMANDA	BELANJA BARANG DAN JASA	1.571.825,00
27	PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLI DUSUN BATU SAMBUA	BELANJA BARANG DAN JASA	3.025.000,00
28	PEMBAYARAN 5% PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLI KEC. MALUNDA	BELANJA BARANG DAN JASA	2.242.500,00
29	REHABILITASI RUANG KELAS TK AL-BAROKAH ULUMANDA	BELANJA BARANG DAN JASA	1.680.000,00
30	REHABILITASI RUANG KELAS TK KUNCUP MEKAR	BELANJA BARANG DAN JASA	1.120.000,00
31	REHABILITASI RUANG KELAS TK TERATAI	BELANJA BARANG DAN JASA	1.678.750,00
32	REHABILITASI RUANG KELAS TK PGRI KARTINI KABIRAAAN	BELANJA BARANG DAN JASA	1.120.000,00
33	REHABILITASI RUANG KELAS TK NURUL TAUFIK DEKING	BELANJA BARANG DAN JASA	1.119.225,00
34	PEMBANGUNAN PAGAR TK TAMMALANRE	BELANJA BARANG DAN JASA	1.118.500,00
35	PEMBANGUNAN PAGAR TK TATAKKO	BELANJA BARANG DAN JASA	1.123.700,00
36	PEMBANGUNAN PAGAR TK KASIH IBU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.792.500,00
37	PEMBANGUNAN PAGAR KB AINUN MU'MIN SIMULLU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.120.000,00
38	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN BERDASARKAN SPK NO. 01.162/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2023 TANGGAL 9 NOVEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	10.300.800,00
39	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SDN 17 GALUNG- GALUNG BERDASARKAN SPK NO.01.144/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 30 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	38.332.687,00
40	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SDN 3 MOSSO BERDASARKAN SPK NO. 01.116/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 4 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	42.607.500,00
41	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN BERDASARKAN SPK NO. 01.164/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2023 TANGGAL 9 NOVEMBER 2023.(SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	4.700.850,00
42	LSPEMBAYARAN 100% KEGIATAN PENGAWASAN BERDASARKAN SPK NO. 01.160/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 27 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	2.970.000,00
43	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR DAN HALAMAN KEC. BANGGAE, BANGGAE TIMUR PAMBOANG DAN SENDANA BERDASARKAN SPK NO. 01.156/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 27 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	64.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
44	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN (PEMB. TOILET) BERDASARKAN SPK NO. 01.159/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2023 TANGGAL 1 NOVEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	4.473.300,00
45	LSPEMBAYARAN 100% ATAS PENGAWASAN BERDASARKAN SPK NO.01.157/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2023 TANGGAL 1 NOVEMBER 2023.(SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	28.305.000,00
46	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN (PEMB. TOILET) BERDASARKAN SPK NO. 01.163/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2023 TANGGAL 6 NOVEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	1.481.850,00
47	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PENATAAN HALAMAN SMP NEG 1 MAJENE BERDASARKAN SPK NO.01.143/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 25 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	85.215.000,00
48	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PENGADAAN MEUBELAIR SDN 48 GALUNG BERDASARKAN SPK NO. 01.55/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2023 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	14.835.150,00
49	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR SDN 30 BABASONONG BERDASARKAN SPK NO. 01.57/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2023 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	24.875.100,00
50	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR SDN 35 JOLENG MEA BERDASARKAN SPK NO. 01.54/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2023 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	24.902.295,00
51	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PEKERJAAN PENGAWASAN (PEMBANGUNAN PAGAR), BERDASARKAN SPK NO. 026/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/XII/2023 TANGGAL 7 DESEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	5.900.000,00
52	LSPEMBAYARAN 95% ATAS REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU SDN 11 GALUNG BERDASARKAN SPK NO.01.94/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	31.967.500,00
53	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH BERDASARKAN SPK NO.01.154/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2023 TANGGAL 29 NOVEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	42.560.000,00
54	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI 43 KULASI BERDASARKAN SPK NO.01.73/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 24 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	32.000.750,00
55	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN TOILET SMPN 10 ULUMANDA BERDASARKAN SPK NO.01.82/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	31.967.635,00
56	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI 24 BATUTAKU BERDASARKAN SPK NO.01.65/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	32.015.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
57	LSPEMBAYARAN 95% PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI 18 BABABULO BERDASARKAN SPK NO.01.64/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	21.327.500,00
58	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN BERDASARKAN SPK NO. 01.147/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/XI/2023 TANGGAL 2 NOVEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	10.378.500,00
59	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 34 RAWANG BERDASARKAN SPK NO. 01.135/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 3 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	21.317.525,00
60	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN (HALAMAN DAN PAGAR SEKOLAH) BERDASARKAN SPK NO.56/SPK-PENUN/DAU//DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2023 TANGGAL 19 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	5.950.000,00
61	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN (DAK FISIK 2023) BERDASARKAN SPK NO.21/SPK-PENUN/DAU//DISDIKPORA/PAUD-PNF/IX/2023 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	17.998.000,00
62	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGAWASAN (PAGAR) BERDASARKAN SPK NO.55/SPK-PENUN/DAU//DISDIKPORA/PAUD-PNF/X/2023 TANGGAL 19 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	1.451.880,00
63	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN LAPANGAN BULUTANGKIS DESA BANUA BERDASARKAN SPK NO. 15/SPK/PA-DISDIKPORA-PO/X/2023 TANGGAL 5 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	85.294.447,00
64	LSPEMBAYARAN 5% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SD NEGERI 15 PARALLITANG BERDASARKAN SPK NO.01.121/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 6 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	1.681.400,00
65	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR SDN 9 SASSENDE BERDASARKAN SPK NO. 01.142/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 24 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	24.875.000,00
66	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR SDN 39 BATUSUSUN BERDASARKAN SPK NO. 01.52/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2023 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	24.902.295,00
67	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR SDN 38 PAO-PAO BERDASARKAN SPK NO. 01.58/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	24.875.100,00
68	LSPEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR SDN 18 BANUA BERDASARKAN SPK NO.01.60/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	24.902.295,00
69	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 MANGGE BERDASARKAN SPK NO.01.92/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 2 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	21.327.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
70	LSPEMBAYARAN 95% TAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 26 ADOLANG BERDASARKAN SPK NO.01.136/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 16 OKTOBER 2023 (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	21.327.500,00
71	LSPEMBAYARAN 95% ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 6 TINGGAS BERDASARKAN SPK NO. 01.39/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/IX/2023 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	63.887.818,00
72	LSPEMBAYARAN 95% ATAS KEGIATAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SDN 9 TANDE BERDASARKAN SPK NO. 01.123/SPK/DAU/PA/DISDIKPORA-DIKDAS/X/2023 TANGGAL 5 OKTOBER 2023. (SUMBER DANA: DAU PENDIDIKAN)	BELANJA MODAL	34.105.060,00
73	REHABILITASI PERPUSTAKAAN SDN 11 BAURUNG	BELANJA MODAL	2.243.750,00
74	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 11 GALUNG	BELANJA MODAL	2.243.750,00
75	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 35 PUMBALLAR	BELANJA MODAL	4.492.500,00
76	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SMPN 6 MAJENE	BELANJA MODAL	2.240.750,00
77	REHABILITASI RUMAH DINAS GURU SDN 52 PALIPI	BELANJA MODAL	2.241.150,00
78	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 39 CILALLANG	BELANJA MODAL	2.020.000,00
79	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS SMP 6 MALUNDA	BELANJA MODAL	3.371.000,00
80	LANJUTAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SDN 5 PANGALI ALI	BELANJA MODAL	2.240.000,00
81	REHABILITASI RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH SDN 26 PAKKOLA	BELANJA MODAL	1.120.000,00
82	REHABILITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS SDN 59 LIMBORO TIMUR	BELANJA MODAL	3.371.100,00
83	REHABILITASI RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH SDN 4 TANJUNG BATU	BELANJA MODAL	1.795.000,00
84	REHABILITASI PERPUSTAKAAN SDN 13 PALLARANGAN	BELANJA MODAL	1.677.650,00
85	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SMPN 5 MAJENE	BELANJA MODAL	2.245.007,00
86	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SDN 11 BAURUNG	BELANJA MODAL	2.242.500,00
87	LANJUTAN PEMBANGUNAN GOR DESA BONDE	BELANJA MODAL	4.489.186,00
88	PEMBANGUNAN LAPANGAN BULUTANGKIS DESA BANUA	BELANJA MODAL	4.489.182,00
89	PEMBAYARAN 5 % PEMBANGUNAN TRIBUN LAPANGAN TASINARA	BELANJA MODAL	4.487.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
90	PEMBAYARAN 95% REHABILITASI GOR GELORA MANDAR MAJENE	BELANJA MODAL	89.700.000,00
91	PEMBAYARAN 5% REHABILITASI KAMAR STADION PRASAMYA	BELANJA MODAL	4.487.500,00
92	PENATAAN HALAMAN SDN 9 PESAPOANG	BELANJA MODAL	1.120.000,00
93	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 38 KOTA	BELANJA MODAL	1.682.510,00
94	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 6 TINGGAS	BELANJA MODAL	3.362.517,00
95	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 30 ULIDANG	BELANJA MODAL	2.965.000,00
96	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 21 TOTOLISI	BELANJA MODAL	1.119.452,00
97	REHABILITASI PAGAR SDN 43 BUTTU SAMANG	BELANJA MODAL	1.117.500,00
98	REHABILITASI PAGAR SDN 7 BINANGA	BELANJA MODAL	1.680.000,00
99	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 18 BABABULO	BELANJA MODAL	1.122.500,00
100	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 3 MOSSO	BELANJA MODAL	1.570.000,00
101	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 16 BATURORO	BELANJA MODAL	1.680.007,00
102	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 17 GALUNG GALUNG	BELANJA MODAL	1.121.750,00
103	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 48 GALUNG UTARA	BELANJA MODAL	2.238.950,00
104	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 61 COPALA	BELANJA MODAL	44.850.000,00
105	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 6 BALOMBONG	BELANJA MODAL	1.682.500,00
106	REHABILITASI PAGAR SDN 2 KAMPUNG BARU	BELANJA MODAL	2.242.500,00
107	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 12 PELATTOANG	BELANJA MODAL	1.683.750,00
108	REHABILITASI PAGAR SDN 33 RAWANG RAWANG	BELANJA MODAL	1.680.000,00
109	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 52 PARABAYA	BELANJA MODAL	1.680.000,00
110	REHABILITASI PAGAR SDN 9 BANUA	BELANJA MODAL	1.680.000,00
111	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 7 ULU BALOMBONG	BELANJA MODAL	1.680.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
112	REHABILITASI PAGAR SDN 14 SIMBANG	BELANJA MODAL	1.119.450,00
113	REHABILITASI PAGAR SDN 48 GALUNG UTARA	BELANJA MODAL	1.119.450,00
114	REHABILITASI PAGAR SDN 18 DETENG DETENG	BELANJA MODAL	1.675.000,00
115	REHABILITASI PAGAR SDN 14 SUMAKUYU	BELANJA MODAL	1.680.005,00
116	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SEPPONG	BELANJA MODAL	1.120.000,00
117	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 20 SAMBABO	BELANJA MODAL	1.118.075,00
118	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 39 MANYAMBA	BELANJA MODAL	22.400.000,00
119	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR <i>SPORT CENTER</i> RANGAS	BELANJA MODAL	4.487.512,00
120	PEMBANGUNAN PAGAR TK PEMBINA SENDANA	BELANJA MODAL	3.362.500,00
121	PENGADAAN MEUBELAIR SDN 31 RATTEPUNAGA	BELANJA MODAL	24.902.295,00
122	PENGADAAN MEUBELAIR SDN 14 BAMBANGAN	BELANJA MODAL	24.875.100,00
123	PENGADAAN MEUBELAIR SDN 19 TAMMERIMBI	BELANJA MODAL	24.900.075,00
124	PENGADAAN MEBEULER SDN. 28 AHOLEANG	BELANJA MODAL	24.902.295,00
B	DINAS KESEHATAN		1.408.995.589,00
	TAHUN 2022		1.167.429.836,00
1	PEMBAYARAN LS HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG & JASA KEGIATAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA PEGAWAI	57.855.000,00
2	PEMBAYARAN LS BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) <i>FOGGING</i> DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) BULAN JANUARI - JUNI 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000,00
3	PEMBAYARAN LS BELANJA BAHAN ATK KEGIATAN PENDAMPINGAN KESEHATAN HAJI EMBARKASI/DEBARKASI, DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
4	PEMBAYARAN LS BELANJA PENGGANDAAN PADA PERCETAKAN ISRA UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA - SKPD LINGKUP DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.312.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
5	PEMBAYARAN LS BELANJA KEBUTUHAN FOTO COPY UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN SESUAI STANDAR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00
6	PEMBAYARAN LS BELANJA ATK PADA PERCETAKAN ISRA UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA - SKPD LINGKUP DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.687.500,00
7	PEMBAYARAN LS BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN, DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00
8	PEMBAYARAN LS BELANJA ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR PERLENGKAPAN DINAS DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI PENYEDIAAN PAKAIAN LAPANGAN PSC 119 MAJENE, DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	36.735.000,00
9	PEMBAYARAN LS BELANJA ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR PERLENGKAPAN DINAS DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI PENYEDIAAN PAKAIAN LAPANGAN PSC 119 MAJENE, DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.765.000,00
10	PEMBAYARAN LS BELANJA BAJU PANITIA HKN TERSEBUT UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PELAKSANAAN HARI KESEHATAN NASIONAL (HKN) KE 58 TAHUN 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00
11	PEMBAYARAN LS BELANJA PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA DALAM RANGKA PEMBELIAN TAS RANSEL KANTOR PSC 119, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
12	PEMBAYARAN LS BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI & MONEV PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN) TAHUN 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	17.835.000,00
13	PEMBAYARAN LS BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KOORDINASI BIDANG KESEHATAN, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00
14	PEMBAYARAN LS BIAYA PEMBELIAN KONSUMSI DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN PELAKSANAAN HARI KESEHATAN NASIONAL (HKN) KE 58 TAHUN 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00
15	PEMBAYARAN LS BELANJA MAKAN MINUM RUMAH SINGGAH PASIEN DI MAKASSAR UNTUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022 DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00
16	PEMBAYARAN LS BELANJA MAKAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN UNTUK BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 2022, DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
17	PEMBAYARAN LS BELANJA MAKAN MINUM PENYEMPROT/PETUGAS FOGGING DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) BULAN JANUARI - JUNI 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00
18	PEMBAYARAN LS REKENING LISTRIK PSC 119 UNTUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
19	PEMBAYARAN LS BELANJA MAKAN DAN MINUM LEMBUR BIDANG KESEHATAN, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00
20	PEMBAYARAN LS BELANJA BANTUAN IURAN PBPB KAB. MAJENE, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	41.893.600,00
21	PEMBAYARAN LS BELANJA KONTRIBUTSI JAMINAN KESEHATAN BAGI PBI SISA BULAN AGUSTUS S/D SEPTEMBER 2022 DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	660.345.000,00
22	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI SKPD DI PROVINSI MAMUJU & MAKASSAR TAHUN 2022 SESUAI SPPD & SURAT TUGAS TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (PAJAK ROKOK)	BELANJA BARANG DAN JASA	42.613.736,00
23	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE PUSKESMAS SE-KAB. MAJENE, DALAM RANGKA KEGIATAN BIAN SESUAI SPPD DAN NO. TUGAS TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	13.080.000,00
24	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM RANGKA KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN VAKSINASI COVID 19 DI PKM SE KAB. MAJENE TAHUN 2022 SESUAI SPPD DAN NO. TUGAS TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	25.892.000,00
25	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE PUSKESMAS SEKAB. MAJENE, DALAM RANGKA SUPERVISI TERPADU BIDANG P2P SESUAI SPPD DAN NO. TUGAS TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	14.852.000,00
26	PEMBAYARAN LS BELANJA UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM RANGKA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 TAHUN 2022 SESUAI SPPD & SURAT TUGAS TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA PAJAK (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.997.000,00
27	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJADIN DALAM DAERAH, DALAM RANGKA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA SDM KESEHATAN TINGKAT PKM DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN TAHUN 2022 SESUAI SPPD DAN NO. TUGAS TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00
28	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJADIN DALAM DAERAH KE PUSKESMAS, DALAM RANGKA PENDAMPINGAN TPCB BULAN NOVEMBER - DESEMBER 2022 SESUAI SPPD & SURAT TUGAS TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00
29	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJADIN DALAM DAERAH PADA KANTOR PSC 119, KEGIATAN FUNGSIONAL PENANGANAN PENJEMPUTAN PENGANTARAN PASIEN SESUAI SPPD & SURAT TUGAS TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	29.760.000,00
30	PEMBAYARAN LS JASA GAJI /UPAH JASA TENAGA KEAMANAN RS PRATAMA SALUTAMBUNG BULAN SEPTEMBER - DESEMBER TAHUN 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (PAJAK ROKOK)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00
31	PEMBAYARAN LS BELANJA MODAL ATK UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR, DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (DAU)	BELANJA MODAL	6.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
32	PEMBAYARAN LS BELANJA MODAL PENGGANDAAN PADA PERCETAKAN ISRA UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN PEMB. JALAN BETON & JEMBATAN AKSES PINTU MASUK RS PRATAMA, DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA MODAL	3.052.000,00
33	PEMBAYARAN LS HONORARIUM TIM PERENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN BETON & JEMBATAN AKSES PINTU MASUK RS PRATAMA SESUAI SK TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2022, BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA MODAL	7.500.000,00
34	PEMBAYARAN LS BELANJA MODAL RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN BETON AKSES JALAN MASUK RS PRATAMA PADA CV. SURYA NUSANTARA, SESUAI KONT/SPK NO.169/SPK/DK/XII/2022 TGL 15 DESEMBER 2022 DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA MODAL	6.855.000,00
35	PEMBAYARAN LS MC 01 (100%) BELANJA MODAL ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN AKSES PINTU MASUK RS PRATAMA, PADA CV. SULING MAS SESUAI KONTRAK NO.173/SPK/DK/XII/2022 TGL 19 DESEMBER 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA MODAL	14.155.000,00
36	PEMBAYARAN LS RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) BELANJA MODAL ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN AKSES PINTU MASUK RS PRATAMA, PADA CV. SULING MAS SESUAI KONTRAK NO.173/SPK/DK/XII/2022 TGL 19 DESEMBER 2022, DINKES KAB. MAJENE TA 2022 BERSUMBER DANA (SILPA)	BELANJA MODAL	745.000,00
	TAHUN 2023		241.565.753,00
1	PEMBAYARAN LS DESEMBER 2023, HONORARIUM TIM PERENCANA KEGIATAN PENGECETAN KANTOR DINAS KESEHATAN, SESUAI SK TERLAMPIR, DINKES KAB. MAJENE TA 2023 BERSUMBER DANA (DAU) KESEHATAN	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
2	PEMBAYARAN LS DESEMBER TAHUN 2023 BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS, PADA LINGKUP DINKES KAB. MAJENE TA 2023 BERSUMBER DANA (DBH) PUSAT	BELANJA BARANG DAN JASA	21.433.000,00
3	PEMBAYARAN LS DESEMBER 2023 BELANJA 100% PEKERJAAN PENGADAAN OBAT PKD & BMHP, SESUAI SP NO.003/SP/DK-DAU/XI/2023, PADA PT. ANUGRAH ARGON MEDICA CAB. MAKASSAR, DINKES KAB. MAJENE TA 2023 BERSUMBER DANA (DAU) KESEHATAN	BELANJA BARANG DAN JASA	29.417.840,00
4	PEMBAYARAN MC 100% PADA CV. BUKIT JABAR ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI. RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN (PANGALI-ALI) MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 180/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 03 OKTOBER 2023	BELANJA MODAL	78.946.967,00
5	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. BUKIT JABAR ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI. RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN (PANGALI-ALI) MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 180/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 03 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT. ASURANSI UMUM VIDEL NO. 29.93.01.1485.12.2023 TANGGAL 13 DESEMBER 2023	BELANJA MODAL	8.771.885,00
6	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. PUTRA TUNGGAL ULMAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI KANTOR DINAS KESEHATAN MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 186/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 3 OKTOBER 2023	BELANJA MODAL	8.975.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
7	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. REZKY NINI ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI PAGAR RSUD MAJENE MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 182/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 3 OKTOBER 2023	BELANJA MODAL	8.975.000,00
8	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. FATHOLA ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR PUSKESMAS SENDANA II - PAGAR BELAKANG GEDUNG NEGARA MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 220/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 10 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT. ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01.0207.12.2023 TANGGAL 13 DESEMBER 2023	BELANJA MODAL	4.485.027,00
9	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. KARYA MANDIRI LESTARI ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI PAGAR PUSTU LOMBANG MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 224/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 10 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT. ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01.12.2023 TANGGAL 6 DESEMBER 2023	BELANJA MODAL	6.725.000,00
10	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. PUTA TUNGAL ULMAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI PAGAR PSC MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 190/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 4 OKTOBER 2023	BELANJA MODAL	4.490.000,00
11	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. BINTANG MAS ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR PUSKESMAS LEMBANG MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 208/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 6 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01. .12.2023, TANGGAL 05 DESEMBER 2023	BELANJA MODAL	8.977.500,00
12	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. BINTANG MAS ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PUSTU TAUKONG KEC. ULUMANDA MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 194/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 4 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01. .12.2023, TANGGAL 05 DESEMBER 2023	BELANJA MODAL	8.987.500,00
13	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. BINTANG MAS ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI PUSTU BARUGA MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 206/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 6 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01. .12.2023, TANGGAL 05 DESEMBER 2023	BELANJA MODAL	4.480.000,00
14	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PPADA CV. BINTANG MAS ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI UGD PUSKESMAS BANGAAE I MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 226/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 10 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01. .12.2023, TANGGAL 06 DESEMBER 2023	BELANJA MODAL	6.725.000,00
15	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. BANAWA SEKAR ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI LABOLATORIUM PUSKESMAS BANGGAE II MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 222/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 10 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01. .12.2023, TANGGAL 28 NOVEMBER 2023	BELANJA MODAL	6.730.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
16	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. BANAWA SEKAR ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG UGD PUSKESMAS TOTOLI MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 198/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 5 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01 .12.2023, TANGGAL 28 NOVEMBER 2023	BELANJA MODAL	8.985.000,00
17	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. PUTRA TUNGGAL ULMAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN RAHABILITASI PUSTU BARUGA II MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 192/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 4 OKTOBER 2023 DENGAN JAMINAN PEMELIHARAAN DARI PT ASURANSI UMUM VIDEI NO. 29.93.01.0203.12.2023, TANGGAL 6 NOVEMBER 2023	BELANJA MODAL	4.494.340,00
18	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. MAJAPAHIT ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI ATAP PUSKESMAS PAMBOANG MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK NOMOR: 244/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 30 OKTOBER 2023	BELANJA MODAL	8.975.000,00
19	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) PADA CV. PUTRA TUNGGAL ULMAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI RUMAH DINAS CILALLANG MELALUI SUMBER DANA DAU KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE SESUAI KONTRAK: 188/SPK/DK-DAU/X/2023, TANGGAL 4 OKTOBER 2023	BELANJA MODAL	8.991.694,00
C	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		13.589.507.729,12
	TAHUN 2022		122.968.815,00
1	PEMBAYARAN 95% ATAS PEKERJAAN REHABILITASI RUMAH DOKTER RSUD KAB. MAJENE NO. KONTRAK/SPK: 02.02/SPK-PPK/DAU/RSUD/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022	BELANJA MODAL	66.215.000,00
2	PEMBAYARAN 5% ATAS PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG SECURITY/SATPAM RSUD KAB. MAJENE NO. KONTRAK/SPK: 01.02/SPK-PPK/DAU/RSUD/XII/2022 TANGGAL 16 DESEMBER 2022	BELANJA MODAL	2.490.000,00
3	PEMBAYARAN 5% ATAS PEKERJAAN REHABILITASI RUMAH DOKTER RSUD KAB. MAJENE NO. KONTRAK/SPK: 02.02/SPK-PPK/DAU/RSUD/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022	BELANJA MODAL	3.485.000,00
4	PEMBAYARAN 95% ATAS PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG SECURITY/SATPAM RSUD KAB. MAJENE NO. KONTRAK/SPK: 01.02/SPK-PPK/DAU/RSUD/XII/2022 TANGGAL 16 DESEMBER 2022	BELANJA MODAL	47.310.000,00
5	BELANJA MODAL BLUD : LHR NO:700.006/LHR/2023	BELANJA MODAL	3.468.815,00
	TAHUN 2023		13.466.538.914,12
1	KOREKSI PENGAKUAN SALDO PIUTANG BPJS KESEHATAN ATAS KEKURANGAN IURAN WAJIB 4% PEMDA TAHUN 2023 SESUAI SURAT TAGIHAN KEPALA CABANG BPJS POLMAN NOMOR 406/IX-05/0324 TANGGAL 3 MARET 2024 TENTANG TAGIHAN TUNGGAKAN IURAN WAJIB PEMDA ATAS PENGHASILAN PNS DAERAH TAHUN 2022 - 2023 (JUKOR 42)	BELANJA BARANG DAN JASA	173.692.146,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
2	- SUKU CADANG (WAHYU MOTOR)	BELANJA BARANG DAN JASA	21.711.600,00
3	- ATK USAHA DAMAI	BELANJA BARANG DAN JASA	110.141.348,40
4	-OKSIGEN (PT.MULTI GAS MEDIKA) BL.AGUSTUS	BELANJA BARANG DAN JASA	58.891.050,00
5	-OKSIGEN (PT.MULTI GAS MEDIKA) BL.SEPT	BELANJA BARANG DAN JASA	58.441.500,00
6	-OKSIGEN (PT.MULTI GAS MEDIKA)	BELANJA BARANG DAN JASA	58.441.500,00
7	-OKSIGEN (PT.MULTI GAS MEDIKA)	BELANJA BARANG DAN JASA	58.441.500,00
8	-OKSIGEN (PT.MULTI GAS MEDIKA)	BELANJA BARANG DAN JASA	58.441.500,00
9	-OKSIGEN (PT.SURYA INDOTIM IMEX) BL.NOV	BELANJA BARANG DAN JASA	24.975.000,00
10	-OKSIGEN (PT.SURYA INDOTIM IMEX) BL.DES	BELANJA BARANG DAN JASA	23.310.000,00
11	-ALKES	BELANJA BARANG DAN JASA	5.994.000,00
12	-PENGgantian KWITANSI PASIEN	BELANJA BARANG DAN JASA	11.709.600,00
13	-BMHP	BELANJA BARANG DAN JASA	3.111.552.852,70
14	-PEMELIHARAAN & PERBAIKAN SARANA GEDUNG BL.NOV	BELANJA BARANG DAN JASA	19.664.760,00
15	-PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (PINTU ALUMINIUM)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.665.000,00
16	-UPAH PEMASANGAN WASTAFEL RG.SERUNI	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
17	-UPAH PERBAIKAN LEMARI INSTRUMEN&MEJA TENUN	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000,00
18	-PEMELIHARAAN (INSTALASI AIR)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.329.780,00
19	-PEMELIHARAAN & PERBAIKAN AC BL. NOVEMBER	BELANJA BARANG DAN JASA	33.040.260,00
20	-PEMELIHARAAN & PERBAIKAN SARANA GEDUNG BL.DES	BELANJA BARANG DAN JASA	3.026.970,00
21	-PEMELIHARAAN & PERBAIKAN SARANA LISTRIK BL.DES	BELANJA BARANG DAN JASA	18.569.190,00
22	-KEGIATAN UTD	BELANJA BARANG DAN JASA	6.840.000,00
23	-LIMBAH B3 BL.MEI 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	119.681.199,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
24	-LIMBAH B3 BL.JUNI 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	146.356.997,00
25	-LIMBAH B3 BL.JULI 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	12.527.460,00
26	-LIMBAH B3 BL.SEPTEMBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	103.761.068,00
27	-LIMBAH B3 BL.OKTOBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	134.380.452,00
28	-LIMBAH B3 BL.NOVEMBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	73.161.465,00
29	-LIMBAH B3 BL.DESEMBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	45.358.929,00
30	-LIMBAH B3 BL.DESEMBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	32.159.675,00
31	-BBM BAG. FARMASI	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000,00
32	-RUJUKAN AMBULANCE	BELANJA BARANG DAN JASA	17.745.000,00
33	-MAKAN MINUM PASIEN	BELANJA BARANG DAN JASA	41.744.000,00
34	-MAKANAN FORMULA	BELANJA BARANG DAN JASA	6.520.000,00
35	-BERAS PASIEN	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00
36	-GAS PASIEN	BELANJA BARANG DAN JASA	4.420.000,00
37	-KORAN NOVEMBER S/D DESEMBER	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00
38	-INSENTIF DOKTER	BELANJA BARANG DAN JASA	119.756.666,00
39	-JASA PELAYANAN	BELANJA BARANG DAN JASA	4.888.048.751,00
40	-OBAT	BELANJA BARANG DAN JASA	3.416.525.518,02
41	-SPPD DR. JEARY RORRONG, SP.B	BELANJA BARANG DAN JASA	10.834.840,00
42	BELANJA MODAL ALKES VEIN FINDER & DOPPLER	BELANJA MODAL	74.799.237,00
43	PENGADAAN ALAT EKG	BELANJA MODAL	93.910.000,00
44	BELANJA MODAL PERALATAN MOBIL	BELANJA MODAL	1.800.000,00
45	PENGADAAN KURSI TUNGGU PASIEN	BELANJA MODAL	38.920.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
46	EXTARANCE IGD	BELANJA MODAL	62.250.000,00
47	PEMBANGUNAN RAMP SELASAR GEDUNG B TAHAP I	BELANJA MODAL	62.125.000,00
48	PEMBANGUNAN SELASAR	BELANJA MODAL	60.748.100,00
49	PEMBUATAN PLAT DEKKER TIMUR RADIOLOGI	BELANJA MODAL	25.725.000,00
D	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		8.581.086.878,00
	TAHUN 2022		5.917.301.898,00
1	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM DI LINGKUNGAN PACCANA, COPALA, BATTAYANG, RUSUNG KONTRAK NO.10.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0646.10.22 TGL26/10/2022 DPUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.930.000,00
2	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM DI LINGK. LIPU, LEMBANG, PARAPPE, SEGERI KONTRAK NO.09.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0645.10.22 TGL26/10/2022 DPUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.925.000,00
3	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA HONOR (PA, PPTK, PEJABAT PENGADAAN & TIM PENGADAAN) KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU SESUAI SK NO.525/HK/KEP-BUP/IV/2022 TGL21/4/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU).DAFTAR TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	3.850.000,00
4	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH TIMBO-TIMBO KEL. PANGALI- ALI KONTRAK NO.13.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & PHO NO.03.06.13/PHO-CK/DPUPR/XI/2022 TGL3/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	42.560.000,00
5	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH TIMBO-TIMBO KEL. PANGALI- ALI KONTRAK NO.13.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822342717 TGL5/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.240.000,00
6	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH LINGK. LEPPE BARAT KEL. LEMBANG KONTRAK NO.06.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL9/9/2022 & PHO NO.03.06.6/PHO-CK/DPUPR/XI/2022 TGL4/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	85.025.000,00
7	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH LINGK. LEPPE BARAT KEL. LEMBANG KONTRAK NO.06.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL9/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0585.11.22 TGL4/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.475.000,00
8	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00
9	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN (BIAYA PENDAMPING DAK) BERUPA BIAYA HONOR(PA, TIM TEKNIS, EMONITORING & OMSPAM) KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN SK NO.732/HK/KEP-BUP/VI/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	26.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
10	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN (BIAYA PENDAMPING DAK) BERUPA BIAYA SPPD KEGIATAN PEMB/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN ST NO.090/4190/ST/XII/2022 TGL12/12/2022 SPPD NO.094/4191/SPPD/XII/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000,00
11	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PERINTISAN JALAN DESA TINAMBUNG KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.85.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & PHO NO.03.12.11/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	86.450.000,00
12	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PERINTISAN JALAN DESA TINAMBUNG KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.85.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822344220-AY965 TGL20/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.550.000,00
13	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PERINTISAN JALAN DUSUN COCI KE DUSUN ADOLANG KONTRAK NO.06.02/KONT/BM-DPUPR/IV/2022 TGL16/9/2022 & PHO NO.03.12.6/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	312.819.995,00
14	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PERINTISAN JALAN DUSUN COCI KE DUSUN ADOLANG KONTRAK NO.06.02/KONT/BM-DPUPR/IV/2022 TGL16/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822344220-AY964 TGL20/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	34.757.777,00
15	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BIAYA PENGAWASAN SUPERVISI KONTRAK NO.05.05/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL30/8/2022 & BAST NO.08.01.1/BAST-DPUPR/XII/2022 TGL7/12/2022 KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00
16	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN AIR BERSIH SISTIM PIPANISASI DUSUN LABUANG PARABAYA DESA ONANG KONTRAK NO.04.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL10/9/2022 & PHO NO.03.06.4/PHO-CK/DPUPR/XI/2022 TGL22/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	87.490.000,00
17	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN AIR BERSIH SISTIM PIPANISASI DUSUN LABUANG PARABAYA DESA ONANG KONTRAK NO.04.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL10/9/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822342914-AO442 TGL07/12/2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.730.000,00
18	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH LINGK. PANGALI- ALI KONTRAK NO.11.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/XI/2022 TGL7/9/2022 & PHO NO.03.06.11/PHO-CK/DPUPR/XI/2022 TGL14/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	59.631.500,00
19	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH LINGK. PANGALI- ALI KONTRAK NO.11.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/XI/2022 TGL7/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822342314-AL602 TGL1/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.138.500,00
20	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN (APBD-P) BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN PERINTISAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU) SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	8.799.900,00
21	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA & PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PERINTISAN JALAN SESUAI SURAT TUGAS NO.094/3468/ST/XI/2022 TGL18/11/2022 & SPPD NO.094/3469/SPPD/XII/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022.(LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
22	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR LINGK. BATTAYANG KONTRAK NO.05.08/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL07/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0717.09.22 TGL30/9/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.560.000,00
23	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH SALUTAMBUNG KONTRAK NO.08.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL24/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822343115-AQ024 TGL9/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE.TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.235.000,00
24	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH SALUTAMBUNG KONTRAK NO.08.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL24/9/2022 & PHO NO.03.06.8/PHO-CK/DPUPR/XII/2022 TGL5/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE.TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	42.465.000,00
25	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR LINGK. PANGALE KEL. BAURUNG KEC. BANGGAE TIMUR KONTRAK NO.05.10/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL22/9/2022 & PHO NO.03.01.1/PHO-AIR/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	29.450.000,00
26	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR LINGK. PANGALE KEL. BAURUNG KEC. BANGGAE TIMUR KONTRAK NO.05.10/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL22/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0752.12.22 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00
27	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEK. PEMBANGUNAN SPAM DI KEC. BANGGAE TIMUR KEGIATAN SESUAI KONTRAK NO. 14.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/XII/2022 TGL 16/12/2022 & BAST NO. 04.07.12/FHO-AIR/DPUPR/XII/2022 TGL 21/12/2022 DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG TA. 2022 (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.735.000,00
28	PEMBAYARAN MC 01 95% PEK. PEMBANGUNAN SPAM DI KEC. BANGGAE TIMUR KEGIATAN SESUAI KONTRAK NO. 14.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/XII/2022 TGL 16/12/2022 & BAST NO. 03.07.12/PHO-AIR/DPUPR/XII/2022 TGL 21/12/2022 DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG TA. 2022 (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	108.965.000,00
29	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN AIR BERSIH BABAJOLENG DESA MALIAYA KONTRAK NO.01.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL23/9/2022 & PHO NO.03.06.1/PHO-CK/DPUPR/XII/2022 TGL5/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	63.650.000,00
30	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN AIR BERSIH BABAJOLENG DESA MALIAYA KONTRAK NO.01.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/IX/2022 TGL23/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0687.12.22 TGL5/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.350.000,00
31	PEMBAYARAN (LS) BIAYA JASA PETUGAS KESESUAIAN RTRW NON PNS KEGIATAN KOORDINASI & SINKRONISASI PEMBERIAN INSENTIF & DISINSENTIF SK NO.610/HK/KEP-BUP/V/2022 TGL20/5/2022 UNTUK BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER 2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (RETRIBUSI BASIL)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00
32	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMB. AULA KANTOR DESA TINAMBUNG (LANJUTAN) KONTRAK NO.02.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2022 TGL02/9/2022 & PHO NO.03.11.2/PHO-CK/DPUPR/XI/2022TGL28/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	58.175.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
33	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMB. AULA KANTOR DESA TINAMBUNG (LANJUTAN) KONTRAK NO.02.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2022 TGL02/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0689.11.22 TGL29/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.475.000,00
34	PEMBAYARAN BIAYA PERENCANAAN & PENGELOLAAN ANGGARAN PERUBAHAN BERUPA BIAYA HONOR (PA, TIM TEKNIS, PENELITI KONTRAK, TIM PERENCANA & ADMINISTRASI) KEGIATAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG SK NO.1087/HK/KEP-BUP/XII/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	14.840.000,00
35	PEMBAYARAN BIAYA PERENCANAAN & PENGELOLAAN ANGGARAN PERUBAHAN BERUPA BIAYA ATK KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN & PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PUPR KAB.MAJENE TA 2022. (DAU DTU). SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00
36	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR MESJID SYUHADA DI KABIRAAAN KONTRAK NO.01.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2022 TGL17/9/2022 & PHO NO.03.11.1/PHO-CK/DPUPR/XII/2002 TGL15/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	46.605.000,00
37	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR MESJID SYUHADA DI KABIRAAAN KONTRAK NO.01.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2022 TGL17/9/2022 & JAMINAN NO. SBD-0822343118-AQ169 TGL09/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.585.000,00
38	PEMBAYARAN 100% BIAYA PENGAWASAN ANGGARAN PERUBAHAN KONTRAK NO.01.03/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & BAST NO.06.09.2/BAST-CK/DPUPR/XII/2022 TGL16/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	57.400.000,00
39	PEMBAYARAN (LS) PEKERJAAN PUBLIKASI & ADVERTORIAL KILAS SULBAR.COM SESUAI SURAT PERJANJIAN NO.470/263.21/2022 TGL18/11/2022 & BAST NO.20.16.4/BAST-BM/DPUPR/XII/2022 TGL22/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DANA PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
40	PEMBAYARAN (LS) PEKERJAAN PUBLIKASI & ADVERTORIAL 99.NEWS.ID SESUAI SURAT PERJANJIAN NO.470/263.22/2022 TGL18/11/2022 & BAST NO.20.16.5/BAST-BM/DPUPR/XII/2022 TGL22/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DANA PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
41	PEMBAYARAN (LS) PEKERJAAN SULBAR99NEWS.COM KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDA SURAT PERJANJIAN NO.470/263.23/2022 TGL18/11/2022 & BAST NO.20.16.6/BAST-BM/DPUPR/XII/2022 TGL22/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00
42	PEMBAYARAN (LS) PEKERJAAN PUBLIKASI DAN ADVERTORIAL POIN SEMBILAN.COM SESUAI SURAT PERJANJIAN NO.470/263.24/2022 TGL18/11/2022 & BAST NO.20.16.6/BAST-BM/DPUPR/XII/2022 TGL22/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (LAIN- LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
43	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA HONOR (PA, PPTK, TIM TEKNIS, PENELITI KONTRAK, TIM ADMINISTRASI) KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) SK NO.830/HK/KEP-BUP/VIII/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DBH DTU)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.860.000,00
44	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022.(LAIN- LAIN PAD). SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	12.859.320,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
45	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA HONOR TIM PENYELENGGARA & TIM TPM KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). DAFTAR TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.450.000,00
46	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA SPPD KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.350.000,00
47	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA HONOR TENAGA TPM KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00
48	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). NOTA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.898.000,00
49	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	7.480.000,00
50	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA HONOR (TIM PENYELENGGARA & TIM TPM) KEGIATAN OPERASI & PEMELIHARAAN <i>BREAKWATER/SEAWALL</i> & BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA SK NO.313/HK/KEP-BUP/III/2022 TGL22/3/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU).	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00
51	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN OPERASI & PEMELIHARAAN <i>BREAKWATER/SEAWALL</i> & BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU) SESUAI NOTA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
52	KEGIATAN RUTIN YANG DI TAGIH OLEH TOKO (BELANJA GU)	BELANJA BARANG DAN JASA	31.509.945,00
53	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA & PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SURAT TUGAS NO.094/4128/ST/XII/2022 TGL2/12/2022 & SPPD NO.094/4129/SPPD/XII/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.040.000,00
54	PEMBAYARAN (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022.(LAIN- LAIN PAD). SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	9.410.000,00
55	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA & PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SURAT TUGAS NO.094/4128/ST/XII/2022 TGL2/12/2022 & SPPD NO.094/4129/SPPD/XII/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022.(LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	440.000,00
56	PEMBAYARAN PENGADAAN PC UNTUK BIDANG PENGAIRAN KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA KONTRAK NO.030/275.1/DPUPR/XI/2022 TGL21/11/2022 & BAST NO.20.16.1/BAST-KEPEG/DPUPR/XI/2022 TGL30/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	9.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
57	PEMBY.BIAYA PENGAWASAN & PENGELOLAAN BERUPA BIAYA SPPD KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN & PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA (BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAHA) DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU) DAFTAR TERLAMPIR	BELANJA MODAL	4.000.000,00
58	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN & PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA (BELANJA MODAL ASRAMA) DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	7.400.000,00
59	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN & PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA (BELANJA MODAL TUGU) DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	3.000.000,00
60	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN REHABILITASI PINTU GERBANG PERBATASAN MAJENE- MAMUJU KONTRAK NO.07.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & PHO NO. 03.11.7/PHO-CK/DPUPR/XII/2022 TGL1/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	63.840.000,00
61	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN REHABILITASI PINTU GERBANG PERBATASAN MAJENE- MAMUJU KONTRAK NO.07.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0688.12.22 TGL1/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	3.360.000,00
62	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON DUSUN BABASONDONG ULUMANDA KONTRAK NO.065.02/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2022 TGL12/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0635.11.22 TGL11/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	3.130.000,00
63	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA SPPD KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN (BELANJA MODAL) DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU) SESUAI SURAT TUGAS & SPPD TERLAMPIR	BELANJA MODAL	19.850.000,00
64	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN KAREMA DESA TAMMERODO KONTRAK NO.062.02/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2022 TGL8/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0634.12.22 TGL1/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	2.235.000,00
65	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN KAREMA DESA TAMMERODO KONTRAK NO.062.02/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2022 TGL8/9/2022 & PHO NO.03.12.47/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL1/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	42.465.000,00
66	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DUSUN DEKING DESA LOMBONG KONTRAK NO.033.02/SPK-PL/BM-DPUPR/VIII/2022 TGL24/8/2022 & PHO NO.03.12.70/PHO-BM/DPUPR/IX/2022 TGL29/9/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	85.120.000,00
67	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON LINGK. RANGAS KEL. RANGAS KONTRAK NO.023.02/SPK-PL/BM-DPUPR/VIII/2022 TGL23/8/2022 & PHO NO.01.12.50/PHO-BM/DPUPR/XI/2022 TGL1/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	40.275.000,00
68	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DUSUN DEKING DESA LOMBONG KONTRAK NO.033.02/SPK-PL/BM-DPUPR/VIII/2022 TGL24/8/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822334312-AG987 TGL21/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.480.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
69	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PANGALI-ALI (RABAT BETON) KONTRAK NO.055.02/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2022 TGL2/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0608.10.22 TGL26/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	2.685.000,00
70	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PANGALI-ALI (RABAT BETON) KONTRAK NO.055.02/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2022 TGL2/9/2022 & PHO NO.03.12.75/PHO-BM/DUPUR/X/2022 TGL26/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	51.015.000,00
71	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGK. RANGAS SESUAI KONTRAK NO.057.02/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2022 TGL2/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822343216-AQ291 TGL9/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	2.695.000,00
72	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU) SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	17.000.000,00
73	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA BETTENG KONTRAK NO.91.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL13/12/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822344114-AW918 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	9.475.000,00
74	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PUNDAKKA LINGK. GALUNG UTARA KONTRAK NO.86.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822344113-AW912 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.475.000,00
75	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PUNDAKKA LINGK. GALUNG UTARA KONTRAK NO.86.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & PHO NO.03.12.92/PHO-BM/DUPUR/XII/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	85.025.000,00
76	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON DUSUN SOPPENG JAWA BONDE KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.09.02/SPK-PL/BM-DPUPR/VIII/2022 TGL22/8/2022 & JAMINAN NO.SBD 2022 06.0 2 011114 TGL26/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.485.000,00
77	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEK. PEMB. JALAN BETON MENUJU KAWASAN PERTANIAN DUSUN KARALEMBANG BARAT DESA LOMBANG TIMUR KONTRAK NO.067.2/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2022 TGL13/9/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822344018-AW099 TGL16/12/2022 DPUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.475.000,00
78	PEMBAYARAN MC 01 95% PEK. PEMB. JALAN BETON MENUJU KAWASAN PERTANIAN DUSUN KARALEMBANG BARAT DESA LOMBANG TIMUR KONTRAK NO.067.2/SPK-PL/BM-DPUPR/IX/2022 TGL13/9/2022 & PHO NO.03.12.23/PHO-BM/DUPUR/XII/2022 TGL8/12/2022 DPUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	85.025.000,00
79	PEMBAYARAN MC 02 100% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN TALUMUNG (LANJUTAN) KONTRAK NO.049.2/SPK-PL/BM-DPUPR/VIII/2022 TGL30/8/2022 & PHO NO.03.12.57/PHO-BM/XI/2022 TGL9/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	29.846.250,00
80	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN TALUMUNG (LANJUTAN) KONTRAK NO.049.2/SPK-PL/BM-DPUPR/VIII/2022 TGL30/8/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822343716-AU484 TGL15/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	9.475.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
81	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAHU JALAN DI KEL. BARUGA SESUAI KONTRAK NO.088.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & PHO NO.03.12.97/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL20/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	128.107.500,00
82	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAHU JALAN DI KEL. BARUGA SESUAI KONTRAK NO.088.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.07.21.12.22 TGL20/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	6.742.500,00
83	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DESA ADOLANG DHUA KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.07.02/KONT/BM-DPUPR/IX/2022 TGL22/9/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822344310-AZ270 TGL21/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	22.250.000,00
84	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DESA ADOLANG DHUA KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.07.02/KONT/BM-DPUPR/IX/2022 TGL22/9/2022 & PHO NO.03.12.67/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	200.250.000,00
85	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DESA PAMBOBORANG KEC. BANGGAE KONTRAK NO.04.02/KONT/BM-DPUPR/IX/2022 TGL16/9/2022 & PHO NO.03.12.69/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	598.266.820,00
86	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DESA PAMBOBORANG KEC. BANGGAE KONTRAK NO.04.02/KONT/BM-DPUPR/IX/2022 TGL16/9/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822344310-AZ271 TGL21/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	66.474.091,00
87	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS PASSANGGARAHAN KELURAHAN PANGALI- ALI KONTRAK NO.090.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL12/12/2022 & PHO NO.03.12.90/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	170.629.500,00
88	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN RUAS PASSANGGARAHAN KELURAHAN PANGALI- ALI KONTRAK NO.090.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL12/12/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822344309-AZ225 TGL21/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	8.980.500,00
89	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN (APBD-P) BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU) SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	1.400.000,00
90	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN (APBD-P) BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU) SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	8.499.800,00
91	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN (APBD-P) BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN REHABILITASI JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU) SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	10.000.000,00
92	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA & PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SESUAI SURAT TUGAS NO.094/4190/ST/XII/2022 TGL12/12/2022 & SPPD NO.094/4191/SPPD/XII/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (LAIN PAD)	BELANJA MODAL	5.800.000,00
93	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA & PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN REHABILITASI JALAN SESUAI SURAT TUGAS NO.094/3774/ST/XI/2022 TGL22/11/2022 & SPPD NO.094/3775/SPPD/XI/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (LAIN PAD)	BELANJA MODAL	2.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
94	PEMBY.MC 01 95% PEK. PENGASPALAN JALAN LINGK. RANGAS TIMUR DAN LINGK. RANGAS TAMMALASSU KEC. BANGGAE KONTRAK NO.05.02/KONT/BM-DPUPR/IX/2022 TGL16/9/2022 & PHO NO.03.12.66/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	398.700.000,00
95	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEK. PENGASPALAN JALAN LINGK. RANGAS TIMUR DAN LINGK. RANGAS TAMMALASSU KEC. BANGGAE KONTRAK NO.05.02/KONT/BM-DPUPR/IX/2022 TGL16/9/2022 & JAMINAN NO. SBD-0822344310-AZ272 TGL21/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	44.300.000,00
96	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BIAYA PENGAWASAN PAKET LELANG (DAU) KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN KONTRAK NO.06.02/SPK-SUPERVISI/BM-DPUPR/IX/2022 TGL22/9/2022 & BAP NO.344/BAP/BM-DPUPR/XII/2022 TGL23/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	74.500.000,00
97	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BIAYA PENGAWASAN I KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN KONTRAK NO.05.02/SPK-SUPERVISI/BN-DPUPR/IX/2022 TGL6/9/2022 & BAST NO.04.12.101/BAST-DPUPR/XII/2022 TGL2/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	72.000.000,00
98	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI TROTOAR DALAM KOTA MAJENE KONTRAK NO.08.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/VIII/2022 TGL27/8/2022 & PHO NO.01.11.16/PHO-CK/DPUPR/XI/2022 TGL21/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	120.000,00
99	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI TROTOAR DALAM KOTA MAJENE KONTRAK NO.08.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/VIII/2022 TGL27/8/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822342717-AN162 TGL5/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	6.740.000,00
100	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	12.000.000,00
101	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA BETTENG KONTRAK NO.91.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XII/2022 TGL13/12/2022 & PHO NO.03.13.3/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	180.025.000,00
102	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KELURAHAN GALUNG KEC. BANGGAE KONTRAK NO.78.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2022 TGL5/10/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0726.12.22 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	8.975.000,00
103	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KELURAHAN GALUNG KEC. BANGGAE KONTRAK NO.78.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2022 TGL5/10/2022 & PHO NO.03.12.94/PHO-BM/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	116.675.000,00
104	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BIAYA PENGAWASAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SESUAI KONTRAK NO.07.02/SPK-SUPERVISI/BM-DPUPR/XI/2022 TGL25/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	9.600.000,00
105	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA HONOR (PA, PPTK, TIM PENYELENGGARA, PENGAWAS TEKNIS, BANTU, ADMINISTRASI & PENELITIAN) KONTRAK KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN SESUAI SK NO.310/HK/KEP-BUP/III/2022 TGL22/3/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU).	BELANJA MODAL	6.080.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
106	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BIAYA PENGAWASAN SUPERVISI KONTRAK NO.02.09/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL31/8/2022 & BAST NO.06.04.4/BAST-DPUPR/XII/2022 TGL6/12/2022 KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	13.050.000,00
107	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	4.200.000,00
108	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TAMBAK BULUTUPANG KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.02.10/SPK/AIR-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & PHO NO.03.04.9/PHO-AIR/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	85.025.000,00
109	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TAMBAK BULUTUPANG KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.02.10/SPK/AIR-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822344114 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.475.000,00
110	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN ADOLANG DESA BANUA ADOLANG KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.04.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/IX/2022 TGL09/9/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0644.10.22 TGL26/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.490.000,00
111	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE LINGK. LEPPE BARAT KONTRAK NO.08.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2022 TGL23/8/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822332513-AA976 TGL3/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.925.000,00
112	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEK. PEMBANGUNAN DRAINASE LINGK. LIMBORO BARAT KEL. TANDE KEC. BANGGAE TIMUR KONTRAK NO.10.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/VIII/2022 TGL23/8/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822343016-AP328 TGL8/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.475.000,00
113	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BALOMBONG SELATAN KEL. BALOMBONG SESUAI KONTRAK NO.05.02/SPK.DAU-BG/CK-DPUPR/VIII/2022 TGL31/8/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822343016-AP321 TGL8/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	8.985.000,00
114	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE DESA ADOLANG DHUA KEC. PAMBOANG SESUAI KONTRAK NO.01.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/IX/2022 TGL2/9/2022 & JAMINAN NO.SBD 2022 06.0 2 011058 TGL25/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.475.000,00
115	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI DRAINASE KEL. LABUANG KONTRAK NO.14.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/IX/2022 TGL16/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0600.10.22 TGL28/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	2.235.000,00
116	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMB/REHABILITASI DRAINASE KEL. BARUGA DHUA KONTRAK NO.15.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & PHO NO.03.09.19/PHO-CK/DPUPR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	170.715.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
117	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMB/REHABILITASI DRAINASE KEL. BARUGA DHUA KONTRAK NO.15.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822344220-AY963 TGL20/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	8.985.000,00
118	PEMBAYARAN 95% PEKERJAAN PEMB/REHABILITASI DRAINASE BELAKANG RUMAH JABATAN BUPATI KONTRAK NO.16.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & BAP NO.363/BAP-CK/DPUPR/XI/2022 TGL30/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	94.525.000,00
119	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMB/REHABILITASI DRAINASE BELAKANG RUMAH JABATAN BUPATI KONTRAK NO.16.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0763.12.22 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.975.000,00
120	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE DESA PUNDAU KONTRAK NO.03.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/VIII/2022 TGL24/8/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0603.10.22 TGL18/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.475.000,00
121	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE LABUANG KEL. LABUANG KONTRAK NO.06.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/IX/2022 TGL17/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0601.10.22 TGL21/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.475.000,00
122	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMB. TALUD DAN PASANGAN BATU DAN SELASAR LINGK. BATTAYANG KONTRAK NO.04.16/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL23/8/2022 & JAMINAN NO.29.93.01.0604.10.22 TGL18/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	8.960.000,00
123	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA HONOR (PA, PPTK & TIM PENYELENGGARA) KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING SESUAI SK NO.530/HK/KEP-BUP/IV/2022 TGL21/4/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). DAFTAR TERLAMPIR	BELANJA MODAL	70.550.000,00
124	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL LAUT KEC. TUBO SENDANA KONTRAK NO.03.24/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL8/9/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822342710-AM694 TGL5/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.475.000,00
125	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL LAUT KEC. TUBO SENDANA KONTRAK NO.03.24/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL8/9/2022 & PHO NO.03.03.5/PHO-AIR/DPUPR/XI/2022 TGL7/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	85.025.000,00
126	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMB. TANGGUL PEMECAH OMBAK (BATU GAJAH) PARAPPE KONTRAK NO.03.23/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL2/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD 2022 06.0 2 010670 TGL11/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	3.365.000,00
127	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BIAYA PENGAWASAN SUPERVISI I KONTRAK NO.04.41/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL7/9/2022 & BAST NO.14.02.2/BAST-DPUPR/XII/2022 TGL6/12/2022 KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	53.400.000,00
128	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BIAYA PENGAWASAN SUPERVISI KONTRAK NO.03.22/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL30/8/2022 & BAST NO.14.03.4/BAST-DPUPR/XII/2022 TGL6/12/2022 KEGIATAN PEMBANGUNAN SEAWALL & BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	80.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
129	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK & PENGGANDAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). SESUAI NOTA TERLAMPIR	BELANJA MODAL	7.800.000,00
130	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA SPPD KEGIATAN PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). TERLAMPIR	BELANJA MODAL	11.500.000,00
131	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD LIMBORO BARAT KEC. BANGGAE KONTRAK NO.04.42/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL8/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0662.10.22 TGL28/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	3.135.000,00
132	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL PANTAI PENAHAN OMBAK KEL. SIRINDU KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.03.12/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL16/8/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0663.11.22 TGL7/11/2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	5.375.000,00
133	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD LIMBORO BARAT KEC. BANGGAE KONTRAK NO.04.42/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL8/9/2022 & PHO NO.03.03.07/PHO-AIR/DUPUR/X/2022 TGL28/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	59.565.000,00
134	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL PANTAI PENAHAN OMBAK KEL. SIRINDU KEC. PAMBOANG KONTRAK NO.03.12/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL16/8/2022 & PHO NO.03.03.12/PHO-AIR/DUPUR/X/2022 TGL7/11/2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	69.875.000,00
135	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA ATK KEGIATAN PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). SESUAI NOTATERLAMPIR	BELANJA MODAL	15.200.000,00
136	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA SPPD KEGIATAN PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). TERLAMPIR	BELANJA MODAL	25.300.000,00
137	PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BERUPA BIAYA HONOR KEGIATAN PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU). DAFTAR TERLAMPIR	BELANJA MODAL	32.310.000,00
138	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD LINGK. TEPPU BARAT KEC. BANGGAE KONTRAK NO.04.09/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL22/8/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822343114-AP984 TGL9/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	8.055.000,00
139	PEMBAYARAN MC 01 95% PEK. PEMBANGUNAN TANGGUL LINGK. TEPPU KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE KONTRAK NO.03.08/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL16/8/2022 & PHO NO.03.03.6/PHO-AIR/DUPUR/XI/2022 TGL10/11/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	116.545.000,00
140	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEK. PEMBANGUNAN TANGGUL LINGK. TEPPU KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE KONTRAK NO.03.08/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL16/8/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822343114-AP985 TGL9/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	8.965.000,00
141	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PENGUAT TEBING SUNGAI TEPPU (BELAKANG MESJID) KONTRAK NO.04.44/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & PHO NO.03.02.6/PHO-AIR/DUPUR/XII/2022 TGL5/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	42.275.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
142	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PENGUAT TEBING SUNGAI TEPPU (BELAKANG MESJID) KONTRAK NO.04.44/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822343114-AP983 TGL9/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	2.225.000,00
143	PEMBAYARAN JAMINAN PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL PANTAI DUSUN BONDE-BONDE KONTRAK NO.03.25/SPK/AIR-DPUPR/IX/2022 TGL14/9/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0705.10.22 TGL25/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	3.350.000,00
144	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI DUSUN APOANG UTARA DESA BUKIT SAMANG KONTRAK NO.04.49/SPK/AIR-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & PHO NO.03.02.42/PHO-AIR/DUPUR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	94.810.000,00
145	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI DUSUN APOANG UTARA DESA BUKIT SAMANG KONTRAK NO.04.49/SPK/AIR-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & JAMINAN NO.SBD-0822344220-AY966 TGL20/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.990.000,00
146	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD DESA PUTTA'DA KONTRAK NO.04.48/SPK/AIR-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & PHO NO.03.02.42/PHO-AIR/DUPUR/XII/2022 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	76.570.000,00
147	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD DESA PUTTA'DA KONTRAK NO.04.48/SPK/AIR-DPUPR/XII/2022 TGL9/12/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822344113-AW914 TGL19/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	4.030.000,00
148	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD KELURAHAN PANGALI-ALI KONTRAK NO.04.34/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL26/8/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.29.93.01.0599.10.22 TGL10/10/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	2.685.000,00
149	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMB. TANGGUL PEMECAH OMBAK /BATU GAJAH LINGK. TANGNGA TANGNGA KEL. LABUANG KONTRAK NO.03.26/SPK/AIR-DPUPR/XII/2022 TGL14/12/2022 & BAKP NO.01.03.21/BAKP-AIR/DUPUR/XII/2022 TGL22/12/2022 DPUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	127.585.000,00
150	PEMBY RETENSI5% PEKERJAAN PEMB. TANGGUL PEMECAH OMBAK /BATU GAJAH LINGK. TANGNGA TANGNGA KEL. LABUANG KONTRAK NO.03.26/SPK/AIR-DPUPR/XII/2022 TGL14/12/2022 & JAMINAN NO.029.93.01.0727.12.22 TGL22/12/2022 DPUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	6.715.000,00
151	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN AIR PERKEBUNAN AWO KONTRAK NO.02.06/SPK/AIR-DPUPR/VIII/2022 TGL31/8/2022 & JAMINAN PEMELIHARAAN NO.SBD-0822342314-AL601 TGL1/12/2022 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2022. (DAU DTU)	BELANJA MODAL	3.575.000,00
	TAHUN 2023		2.663.784.980,00
1	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA SULAI SESUAI KONTRAK NO.06.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/X/2023 TGL02/10/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.950.050,00
2	PEMBAYARAN LS BIAYA PEMELIHARAAN ALAT BESAR- ALAT BESAR DARAT KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA PAD) NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	3.174.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
3	PEMBAYARAN LS BIAYA PEMELIHARAAN ALAT BESAR- ALAT BESAR DARAT KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA PAD) NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	6.359.000,00
4	PEMBAYARAN LS BIAYA PEMELIHARAAN ALAT BESAR- ALAT BESAR DARAT KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA PAD) NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	4.087.000,00
5	PEMBAYARAN LS BIAYA PEMELIHARAAN ALAT BESAR- ALAT BESAR DARAT KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA PAD) NOTA TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	4.646.000,00
6	PEMBAYARAN LS BERUPA BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA PAD) SESUAI SURAT TUGAS DAN SPPD TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	7.765.000,00
7	PEMBAYARAN LS BERUPA BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA PAD) SESUAI SURAT TUGAS DAN SPPD TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	3.435.000,00
8	PEMBAYARAN LS BERUPA BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER KEGIATAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA DINAS PUPR KAB. MAJENE TA. 2023.(SUMBER DANA PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.264.000,00
9	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PERINTISAN JALAN SEPPONG DESA ULUMANDA SESUAI KONTRAK NO.22.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2023 TGL17/11/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	72.648.900,00
10	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM DI TASUKKE DESA LOMBANG KEC. MALUNDA SESUAI KONTRAK NO.09.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/X/2023 TGL16/10/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	32.175.000,00
11	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MCK DI DESA TUBO TENGAH KEC. TUBO SENDANA KONTRAK NO.03.02/SPK.DAU-SAN/CK-DPUPR/X/2023 TGL16/10/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	48.420.000,00
12	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BINANGA KONTRAK NO.15.02/SPK.DAU-AM/CK-DPUPR/X/2023 TGL02/10/2023 & JAMINAN NO. 29.93.01.0199.12.23 TGL04/12/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
13	PEMBANGUNAN SUMUR BOR KELURAHAN PANGALI-ALI	BELANJA BARANG DAN JASA	3.142.300,00
14	PENGADAAN SUMUR BOR BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN PAMBOANG DAN SENDANA	BELANJA BARANG DAN JASA	4.475.000,00
15	PEMBANGUNAN AIR BERSIH DUSUN SEPPONG TIMUR DESA SEPPONG KEC. TAMMERODO SENDANA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.242.500,00
16	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	30.285.132,00
17	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.365.014,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
18	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA PAMBOBORANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.185.025,00
19	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI SALUMARATTE DESA TANDEALLO KEC. ULUMANDA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.589.175,00
20	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DUSUN PALIPI SOREANG KEC. BANGGAE SUMBER DANA: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.475.000,00
21	PEMBANGUNAN SPAM DI TASUKKE DESA LOMBANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.575.000,00
22	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BABABULO SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.775.000,00
23	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BABABULO SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
24	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BABABULO UTARA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.775.000,00
25	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BABABULO UTARA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
26	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BALOMBONG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
27	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BETTENG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
28	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BONDE SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.980.024,00
29	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BONDE UTARA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.775.000,00
30	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BONDE UTARA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
31	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BUTTU BARUGA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.775.000,00
32	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA BUTTU BARUGA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
33	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA PALIPI SOREANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
34	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA PAMBOBORANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.775.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
35	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA PAMBOBORANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
36	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA PESULOANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.775.000,00
37	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA PESULOANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
38	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA TALLU BANUA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.980.025,00
39	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA TALLU BANUA UTARA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
40	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KELURAHAN BARUGA DHUA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.775.000,00
41	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KELURAHAN BARUGA DHUA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
42	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KELURAHAN BAURUNG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
43	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KELURAHAN LABUANG UTARA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.775.000,00
44	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KELURAHAN LABUANG UTARA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
45	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN KELURAHAN RANGAS SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
46	PEMB. INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DESA POPENGA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	40.365.000,00
47	PEMB. INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DESA POPENGA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.485.000,00
48	PEMB. SARANA AIR BERSIH DESA BUTTU BARUGA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
49	PEMB. SARANA AIR BERSIH DESA TUBO SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	60.525.000,00
50	PEMB. SARANA AIR BERSIH DESA TUBO SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.725.000,00
51	PEMB. SARANA AIR BERSIH KEL. BARUGA DHUA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.491.650,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
52	PEMB. SARANA AIR BERSIH LINGK. BATTAYANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.485.000,00
53	PEMB. SARANA AIR BERSIH LINGK. COPALA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.283.900,00
54	PENGADAAN SARANA AIR BERSIH LINGK. TEPPU SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.742.500,00
55	PENINGKATAN SPAM KELURAHAN PANGALI-ALI SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.492.400,00
56	PENINGKATAN SPAM MELALUI PENAMBAHAN KAPASITAS DAN ATAU VOLUME DARI SARANA DAN PRASARANA SPAM TERBANGUN DESA/KEL LEMBANG	BELANJA BARANG DAN JASA	4.488.901,00
57	PENINGK. SPAM DESA TINAMBUNG KEC. PAMBOANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	60.525.000,00
58	PENINGK. SPAM DESA TINAMBUNG KEC. PAMBOANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.725.000,00
59	PEMB./REHABILITASI. AIR BERSIH DESA SIMBANG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.870.000,00
60	PEMBANGUNAN JAMBAH KELUARGA DI DESA BUTTU BARUGA KEC. BANGGAE TIMUR SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.980.021,00
61	PEMBANGUNAN PINTU GERBANG BATAS KOTA MAJENE - POLMAN (DAU PU)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.975.000,00
62	PEMBANGUNAN JAMBAH KELUARGA DI KEC. BANGGAE TIMUR SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
63	PEMBANGUNAN MCK DI DESA TUBO TENGAH KEC. TUBO SENDANA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.380.000,00
64	PEMBANGUNAN MCK KEC. BANGGAE TIMUR SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	40.349.700,00
65	PEMBANGUNAN MCK KEC. BANGGAE TIMUR SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.483.300,00
66	PEMB. INFRASTRUKTUR SANITASI /MCK DESA KAYUANGIN SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.477.801,00
67	PEMB. INFRASTRUKTUR SANITASI /MCK DESA SALUTAMBUNG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.485.000,00
68	PEMB. INFRASTRUKTUR SANITASI /MCK KEL. BARUGA SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00
69	PEMB. INFRASTRUKTUR SANITASI /MCK KEL. GALUNG SUMBER DANA: DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU KESEHATAN)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.494.450,00
70	PEMB./REHABILITASI. SANITASI KEL. GALUNG	BELANJA BARANG DAN JASA	9.897.225,00
71	PEMBUKAAN JALAN DESA BABABULO KEC. PAMBOANG SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	8.977.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
72	PERINTISAN JALAN DESA TALLU BANUA KEC. SENDANA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA BARANG DAN JASA	3.355.000,00
73	PERINTISAN JALAN LINGK. TANETE SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	4.480.000,00
74	PERINTISAN JALAN SEPPONG DESA ULUMANDA SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	8.072.100,00
75	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD LINGK. BARUGA KEC. BANGGAE TIMUR SESUAI KONTRAK NO.05.07/SPK/AIR-DPUPR/X/2023 TGL09/10/2023 & JAMINAN NO.29.93.01.1485.12.23 TGL16/11/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(SUMBER DANA DAU PU)	BELANJA MODAL	3.365.000,00
76	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD LINGKUNGAN LIMBORO TIMUR KEL. TANDE KONTRAK NO.05.12/SPK/AIR-DPUPR/X/2023 TGL20/10/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	80.775.000,00
77	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD LINGK. SALABOSE KEL. PANGALI-ALI KONTRAK NO.05.13/SPK/AIR-DPUPR/X/2023 TGL23/10/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	80.775.000,00
78	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN BRONJONG LINGKUNGAN SEGERI KEL. BARUGA DHUA SESUAI KONTRAK NO.05.21/SPK/AIR-DPUPR/XI/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	80.775.000,00
79	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN BETON LINGK. SIMULLU KEC. BANGGAE TIMUR KONTRAK NO.19.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2023 TGL10/11/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	39.529.615,00
80	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RABAT BETON DARI PARA-PARANG KE BUTTU TANDE SESUAI KONTRAK NO. 20.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2023 TGL 10/11/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA. 2023.(SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	80.775.000,00
81	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PERINTISAN JALAN LINGK. TANETE SESUAI KONTRAK NO.12.02/SPK-PL/BM-DPUPR/X/2023 TGL30/10/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	4.480.000,00
82	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAANPEMBAYARAN PEMBANGUNAN RABAT BETON LINGKUNGAN GALUNG UTARA SESUAI KONTRAK NO.17.02/SPK-PL/BM-DPUPR/XI/2023 TGL03/11/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	80.775.045,00
83	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI TINAMBUNG KEC. PAMBOANG SESUAI KONTRAK NO.05.20/SPK/AIR-DPUPR/XI/2023 TGL06/11/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	60.525.000,00
84	PEMBAYARAN RETENSI PEMELIHARAAN 5% PEKERJAAN LANJUTAN REHABILITASI RUMAH JABATAN SESUAI KONTRAK NO. 08.02/KONT.DAU-BG/CK-DPUPR/IX/2023 TGL27/09/2023 & JAMINAN NO.111021104122302065 TGL22/12/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023.(SUMBER DANA DAU PU)	BELANJA MODAL	44.565.061,00
85	PEMBAYARAN PEKERJAAN PELEBARAN JALAN PALEDOANG DESA PANGGALO KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SESUAI KONTRAK NO.13.02/SPK-PL/BM-DPUPR/X/2023 TGL22/12/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023 (SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	72.675.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
86	PEMBAYARAN MC 01 95% PEKERJAAN PELEBARAN JALAN DUSUN PANGGALO DESA PANGGALO SESUAI KONTRAK NO.15.02/SPK-PL/BM-DPUPR/X/2023 TGL31/10/2023 DINAS PUPR KAB. MAJENE TA 2023. (DBH PROVINSI)	BELANJA MODAL	72.675.000,00
87	PEMBANGUNAN TALUD BRONJONG SUNGAI MANDAR DESA POPENGA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	3.355.000,00
88	PEMBANGUNAN TALUD DESA SENDANA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	3.360.000,00
89	PEMBANGUNAN TALUD KEL. PANGALI-ALI SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
90	PEMBANGUNAN TALUD LINGK. COPALA KEL. BARUGA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	3.350.000,00
91	PEMBANGUNAN TALUD LINGK. LENA LINGK. GALUNG BARAT (LAJUTAN) SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
92	PEMBANGUNAN TALUD LINGK PA'LEO TOBANDA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	3.358.675,00
93	PEMBANGUNAN TALUD LINGK. SALABOSE KEL. PANGALI-ALI SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
94	PEMBANGUNAN TALUD LINGKUNGAN KALOLI KEL. TANDE TIMUR SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
95	PEMBANGUNAN TALUD LINGKUNGAN LIMBORO TIMUR KEL. TANDE SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
96	PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI TINAMBUNG KEC. PAMBOANG SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	6.725.000,00
97	TALUD BELAKANG RUMAH JABATAN BUPATI SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
98	PEMBANGUNAN BRONJONG LINGKUNGAN SEGERI KEL. BARUGA DHUA SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
99	PEMBANGUNAN DRAINASE KEL. PANGALI ALI KEC. BANGGAE SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	2.675.000,00
100	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGK. GALUNG UTARA SUMBER DANA: PENDAPATAN ASLI DAEERAH (PAD)	BELANJA MODAL	60.525.000,00
101	PEMBANGUNAN DRAINASE LINGK. GALUNG UTARA SUMBER DANA: PENDAPATAN ASLI DAEERAH (PAD)	BELANJA MODAL	6.725.000,00
102	PEMB. DRAINASE KEC. BANGGAE SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	80.775.000,00
103	PEMB. DRAINASE KEC. BANGGAE SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
104	PEMBANGUNAN/REHABILITASI DRAINASE KEL. LABUANG UTARA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	3.350.000,00
105	PEMB. REHABILITASI. DRAINASE LEMBANG JALAN COLING SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	3.365.000,00
106	REHABILITASI ASRAMA MAHASISWA JOGYAKARTA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	35.631.518,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
107	PEMBANGUNAN PINTU GERBANG KEL. RANGAS SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	3.354.465,00
108	PEMBANGUNAN/REHABILITASI TROTOAR DALAM KOTA MAJENE SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	4.488.900,00
109	PELEBARAN JALAN DUSUN PANGGALO DESA PANGGALO SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.075.000,00
110	PELEBARAN JALAN PALEDOANG DESA PANGGALO SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.075.000,00
111	PEMBANGUNAN JALAN BETON LINGK. SIMULLU KEC. BANGGAE TIMUR SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	4.392.180,00
112	PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON KEL. TANDE SUMBER DANA: PENDAPATAN ASLI DAERAH : DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
113	PEMBANGUNAN RABAT BETON DARI PARA-PARANG KE BUTTU TANDE SUMBER DANA: DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.000,00
114	PEMBANGUNAN RABAT BETON LINGKUNGAN GALUNG UTARA : DBH PROVINSI	BELANJA MODAL	8.975.005,00
115	PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RUAS RURA KEC. ULUMANDA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	4.485.000,00
116	REHABILITASI JALAN RUAS LOMBANG TAKAPAK KEC. MALUNDA SUMBER DANA: DAU-PU	BELANJA MODAL	6.730.023,00
117	DED (PERENCANAAN) SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN TAHUN 2024 PAKET 2 (ATB)	BELANJA MODAL	74.500.000,00
118	DED PENANGANAN JEMBATAN KABUPATEN (PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN) DAK TA 2024 (ATB)	BELANJA MODAL	49.494.900,00
E	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN		1.162.390.291,00
	TAHUN 2022		1.107.045.291,00
1	PEMBAYARAN BELANJA ATK SESUAI NOTA PESANAN NO. 10/NP/ATK-(C)-DPKPP/X/2022 TGL 3/10/2022 & BAST NO : 11/BAST/ATK(C)-DPKPP/X/2022 TGL 6/10/2022 KEGIATAN KERJASAMA PERBAIKAN TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU PADA DINAS PERKIMTAN (SUMBER DANA: DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.654.300,00
2	LS. PEMB. BIAYA ATK SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, SESUAI NP04/NP/PPTK/DPKPP/VII/2022 TGL 11/7/2022 DAN BAST NO:05BAST/PPTK/DPKPP/VII/2022 TGL 28/7/2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.440.000,00
3	PEMBAYARAN BELANJA ATK SESUAI NOTA PESANAN NO. 16/NP/ATK-(C)-DPKPP/X/2022 TGL 24/10/2022 & BAST NO : 17/BAST/ATK(C)-DPKPP/X/2022 TGL 25/10/2022 KEGIATAN KERJASAMA PERBAIKAN TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU PADA DINAS PERKIMTAN (SUMBER DANA: DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.850.000,00
4	LS. PEMB. BIAYA ATK (KERTAS DAN COVER) KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARAN DAN UTILITAS UMUM DII, SESUAI NP NO:06/NP/PPTK/DPKPP/VII/2022 TGL 11/7/2022 DAN BAST NO:07/BAST/PPTK/DPKPP/VII/2022 TGL 28/7/2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.282.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
5	PEMBAYARAN BELANJA ATK-BAHAN KOMPUTER SESUAI NP NO. 14/NP/ATK-(C)-DPKPP/X/2022 TGL 20/10/2022 & BAST NO: 15/BAST/ATK(C)-DPKPP/X/2022 TGL 21/10/2022 KEGIATAN KERJASAMA PERBAIKAN TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU PADA DINAS PERKIMTAN (SUMBER DANA: DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.895.000,00
6	PEMBAYARAN LS MOUNTHLY OF CERTIVICATE (MC 01) 95% ATAS PEK. PEMB. MCK KEL. BARUGA DHUA SESUAI SPK NO:02.22/SPK-SAB/DPKPP-KP/VIII/2022 TGL 18/8/2022 & BAST NO:03.26/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 9/9/2022 (DBH-PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	42.560.000,00
7	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PEK. PEMB. MCK KEL. BARUGA DHUA SESUAI SPK NO:02.22/SPK-SAB/DPKPP-KP/VIII/2022 TGL 18/8/2022 & BAST NO:02.26A/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 9/9/2022 (DBH-PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.240.000,00
8	PEMBAYARAN LS MOUNTHLY OF CERTIVICATE (MC 01) 95% ATAS PENGADAAN JAMBAN KELUARGA KEL. BARUGA SESUAI SPK NO:02.19/SPK-SAB/DPKPP-KP/VII/2022 TGL 26/7/2022 DAN BAST NO:03.25/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 9/9/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	170.620.000,00
9	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PENGADAAN JAMBAN KELUARGA KEL. BARUGA SESUAI SPK NO:02.19/SPK-SAB/DPKPP-KP/VII/2022 TGL 26/7/2022 DAN BAST NO:02.25A/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 9/9/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.980.000,00
10	LS. PEMB. BIAYA ATK RELOKASI WARGA KEC. MALUNDA KEGIATAN PENYELESAIAAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI 41/PESANAN/PPTK/ATKDBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAST NO:42/BAST/PPTK/ATK/DBH/X/2022 TGL 25/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	502.500,00
11	LS PEMB BIAYA BELANJA MAKAN & MINUM RELOKASI WARGA KEC MALUNDA KEG PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN & SANTUNAN TANAH SESUAI NP NO:44PESANAN/PPTK/MKNMNM/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAP NO:46/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
12	LS PEMB. BIAYA MAKAN & MINUM SD AHOLEANG, SD 18 PETTABEANG SD 18 BANUA KEG PENYELESAIAAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH SESUAI NP NO:29/PESANAN/PPTK/MKN&MNM/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 & BAP NO:31/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
13	LS. PEMB. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE MAKASSAR KEGIATAN PENYELESAIAAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI ST NO:54/ST.LD/DPKPP/VI/2022 TGL 28/6/2022 & SPPD NO:115.A/SPPD.LD/DPKPP/VI/2022 TGL 28/6/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.718.400,00
14	LS. PEMB. BIAYA MAKAN MINUM PENGADAAN TANAH UNSULBAR PADA KEGIATAN PENYELESAIAAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH TANAH, SESUAI NP NO:56/PESANAN/PPTK/MKNMNM/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAP NO:58/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
15	LS. PEMB. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEGIATAN PENYELESAIAAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI ST NO:41.A/ST.LD/DPKPP/VI/2022 TGL 7 JUNI 2022 DAN SPPD NO:69.D/SPPD.LD/DPKPP/VI/2022 TGL 7 JUNI 2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	20.161.200,00
16	LS. PEMB. BIAYA ATK PENGADAAN TANAH UNSULBAR PADA KEGIATAN PENYELESAIAAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:53/PESANAN/PPTK/ATKDBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAP NO:55/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	502.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
17	PEMBAYARAN LS MOUNTHLY OF CERTIVICATE (MC 01) 95% ATAS PENGADAAN JAMBAK KELUARGA DESA BUTTU BARUGA SESUAI SPK NO:02.21/SPK-SAB/DPKPP-KP/VIII/2022 TGL 18/8/2022 DAN BAST NO:03.24/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 8/9/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	170.620.000,00
18	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PENGADAAN JAMBAK KELUARGA DESA BUTTU BARUGA SESUAI SPK NO:02.21/SPK-SAB/DPKPP-KP/VIII/2022 TGL 18/8/2022 DAN BAST NO:02.24A/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 8/9/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.980.000,00
19	LS. PEMB. BIAYA UKUR SD BANUA, SD PETTAWEANG, & SD AHOLEAANG KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:13/PESANAN/PPTKBYUKUR/VIII/2022 TGL 22/8/2022 & BAST NO:14/BAST/PPTK/BYUKUR/DBH/VIII/2022 TGL 23/8/2022 (DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.533.560,00
20	LS. PEMB. BIAYA BELANJA MAKAN MINUM BLK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:35/PESANAN/PPTK/MKNMNM/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAP NO:37/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 24/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00
21	LS. PEMB. BIAYA UKUR UPTP BLK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:10/PESANAN/PPTK/BYUKUR/DBH/VIII/2022 TGL 22/8/2022 & BAP NO:12/BAP/DPKPP/06/VIII/2022 TGL 24/8/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.953.140,00
22	LS. PEMB. BIAYA ATK PENGADAAN TANAH BLK (BALAI LATIHAN KERJA) PADA KEGIATAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:14/PESANAN/PPTK/ATK/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAP NO:16/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
23	LS. PEMB. BIAYA ATK SD AHOLEANG, SD 18 PETTABEANG, SD 18 BANUA KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:11/PESANAN/PPTK/ATK/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 & BAP NO:13/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
24	LS PEMB. BIAYA SPPD DALAM KOTA DALAM RANGKA MENINJAU ASET PEMDA KAB. MAJENE DI MALUNDA KEG PENY MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNANTANAH, SESUAI ST NO:52.A/ST.DD/DPKPP/VI/2022 TGL 10/6/2022 & SPPD NO:148.C/SPPD.DD/DPKPP/VI/2022 TGL 10/6/2022 (DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.380.000,00
25	LS PEMB BIAYA HONORARIUM PENGAD. TANAH SD BANUA, SD PETTAWEANG, SD AHOLEANG, BLK & UNSULBAR KEG PENY MASALAH GANTI KERUGIAN & SANTUNAN TANAH SESUAI SK NO:800/HK/KEP-BUP/VIII/2022 TGL 1/8/2022 & BAP NO:92/BAP/DPKPP/06/XI/2022 TGL 30/11/2022 (DBH (PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.100.000,00
26	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PENGADAAN SUMUR BOR KEC. BANGGAE TIMUR SESUAI SPK NO:02.03/SPK-SAB/DPKPP-KP/XI/2022 TGL 25/11/2022 DAN BAST NO:02.27A/BAST-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XII/2022 TGL 8/12/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.490.000,00
27	PEMBAYARAN LS MONTHLY OF CERTIFICATE (MC 01) 95% ATAS PENGADAAN SUMUR BOR KEC. BANGGAE TIMUR SESUAI SPK NO:02.03/SPK-SAB/DPKPP-KP/XI/2022 TGL 25/11/2022 DAN BAST NO:03.27/BAST-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XII/2022 TGL 8/12/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	47.310.000,00
28	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PENGADAAN SUMUR BOR KEC. BANGGAE TIMUR SESUAI SPK NO:02.16/SPK-SAB/DPKPP-KP/APBDP/X/2022 TGL 4/10/2022 DAN BAST NO:02.18A/BAST-SAB/DPKPP-KP/APBDP/X/2022 TGL 5/10/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.975.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
29	PEMBAYARAN LS <i>MONTHLY OF CERTIFICATE</i> (MC 01) 95% ATAS PENGADAAN SUMUR BOR KEL. BAURUNG SESUAI SPK NO:02.04/SPK-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XI/2022 TGL 25/11/2022 DAN BAST NO:03.28/BAST-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XII/2022 TGL 9/12/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	47.215.000,00
30	LS. PEMB. BIAYA RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PEK. METERAN GRATIS LINGKUNGAN RANGAS TIMUR DI KAB. MAJENE, SESUAI SPK:03.03/PPK-SPK/PJU/XI/2022 TGL 24/11/2022 & BAST NO:03.02.A/BAST-PJU/DPKPP/XII/2022 TGL 5/12/2022, (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.740.000,00
31	LS PEMB. BIAYA RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PEK. PEMB SUMUR BOR (AIR BERSIH) DI DUSUN LABU-LABUANG PALIPI SOREANG SESUAI SPK NO:02.18/SPKSAB/DPKPP-KP/VII/2022 TGL 22/7/2022 & BAST NO:02.21.A/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 9/9/2022, (DBH(PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.115.000,00
32	LS. PEMB. BIAYA <i>MONTHLY OF CERTIFICATE</i> (MC 01) 95% [^] ATAS PEK. PEMBANGUNAN SUMUR BOR KEC. BANGGAE KAB. MAJENE, SESUAI SPK NO:02.02/SPK-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XI/2022 TGL 29/11/2022 & BAST NO:03.29/BAST-SAB/DPKPP-KP/XII/2022 TGL 12/12/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	28.310.000,00
33	LS. PEMB. BIAYA RETENSI PEMELIHARAAN 5% [^] ATAS PEK. PEMBANGUNAN SUMUR BOR KEC. BANGGAE KAB. MAJENE, SESUAI SPK NO:02.02/SPK-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XI/2022 TGL 29/11/2022 & BAST NO:02.29A/BAST-STPK/DPKPP-KP/XII/2022 TGL 12/12/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.490.000,00
34	PEMBAYARAN LS BANTUAN METERAN LISTRIK SUBSIDI LINGK. RANGAS TIMUR KEL. RANGAS SESUAI SPK NO. 07.03./PPK-SPK/PJU/IX/2022 TGL 9/12/2022 & BAST 03.08/BAST-PJU/DPKPP/XI/2022 TGL 9/12/2022 PADA DINAS PERKIMTAN (SUMBER DANA: LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	73.960.500,00
35	PEMBAYARAN LS <i>MONTHLY OF CERTIFICATE</i> (MC 01) 95% ATAS PENGADAAN SUMUR BOR LINGK BATTAYANG KEL. BANGGAE SESUAI SPK NO:02.01/SPK-SAB/DPKPP-KP/XI/2022 TGL 26/11/2022 DAN BAST NO:03.30/BAST-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XII/2022 TGL 12/12/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	47.310.000,00
36	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PENGADAAN SUMUR BOR LINGK BATTAYANG KEL. BANGGAE SESUAI SPK NO:02.01/SPK-SAB/DPKPP-KP/XI/2022 TGL 26/11/2022 DAN BAST NO:02.30A/BAST-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XII/2022 TGL 12/12/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.490.000,00
37	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PENGADAAN SUMUR BOR KEL. BAURUNG SESUAI SPK NO:02.04/SPK-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XI/2022 TGL 25/11/2022 DAN BAST NO:02.28A/BAST-SAB/DPKPP-KP/APBDP/XII/2022 TGL 9/12/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.485.000,00
38	LS. PEMB. BIAYA UANG MAKAN LEMBUR KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD TA 2022, SESUAI SPKL NO:253.A/DPKPP/02/VI/2022 TGL 7 JUNI 2022 DAN BAPP NO:01/DPA-P/PEP/XI/2022 TGL 1 NOVEMBER 2022, SUMBER DANA DAU (NON EARMARK)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00
39	LS PEMB BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BULAN FEBRUARI S/D DESEMBER KENDARAAN DINAS RODA EMPAT (DC 81 B) & KENDARAAN OPERASIONAL PJU RODA ENAM (DC 9003) PADA KEG BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SESUAI NOTA TERLAMPIR (SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.485.000,00
40	LS. PEMB. BIAYA PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DAN LAMPU PJU TENAGA SURYA, SESUAI NP NO:03/NP/PPTK/SPKPP/VII/2022 TGL 11 JULI 2022 DAN BAST NO:04/BAST/PPTK/DPKPP/VII/2022 TGL 28 JULI 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00
41	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PEK. PEMELIHARAAN LAMPU PJU DI KEL. TANDE TIMUR SESUAI SPK NO: 07.03/PPK-SPK/PJU/IX/2022 TGL 14/09/2022 DAN BAST NO:02.09.A/BAST-PJU/DPKPP/XI/2022 TGL 13/10/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.585.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
42	PEMBAYARAN LS <i>MONTHLY OF CERTIFICATE</i> (MC 01) 95% ATAS PEK. PEMELIHARAAN LAMPU PJU DI KEL. TANDE TIMUR SESUAI SPK NO: 07.03/PPK-SPK/PJU/IX/2022 TGL 14/09/2022 DAN BAST NO:03.09/BAST-PJU/DPKPPK/X/2022 TGL 11/10/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	68.115.000,00
43	LS PEMBAYARAN BIAYA <i>MONTHLY OF CERTIFICATE</i> (MC 01) 95% ATAS PEK. PEMB SUMUR BOR (AIR BERSIH) DI DUSUN LABU-LABUANG PALIPI SOREANG SESUAI SPK NO:02.18/SPKSAB/DPKPP-KP/VII/2022 TGL 22/7/2022 & BAST NO:03.21/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 9/9/2022, (DBH(PMK 07))	BELANJA BARANG DAN JASA	21.185.000,00
44	PEMBAYARAN SPPD LUAR DAERAH SESUAI ST NO : 090/1008/2022 TGL 18/7/2022 & SPPD NO. 121/SPPD-LD/DPKPP/VII/2022 TGL 18/7/2022 PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (SUMBER DANA: DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.814.200,00
45	PEMBAYARAN LS SPPD LUAR DAERAH SESUAI ST NO. 61/ST.LD/DPKPP/XI/2022 TGL 24/11/2022 & SPPD NO. 146/SPPD-LD/DPKPP/XI/2022 TGL 24/11/2022 KEGIATAN KERJASAMA PERBAIKAN TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU (DAU - PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	12.663.900,00
46	LS. PEMB. BIAYA SPPD LUAR DAERAH BIDAN PENJAL SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA SARANA, DAN UTILITAS UMUM, SESUAI ST NO:76/LD/DPKPP/XII/2022 TGL 12/12/2022 DAN SPPD NO:153/LD/DPKPP/XII/2022 TGL 12/12/2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.998.000,00
47	PEMBAYARAN LS SPPD DALAM KOTA SESUAI ST NO. 97/ST-DD/DPKPP/XI/2022 TGL 7/11/2022 & SPPD NO.242/SPPD-DD/DPKPP/XI/2022 KEGIATAN KERJASAMA PERBAIKAN TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU TA 2022 (SUMBER DANA: DAU - PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.978.000,00
48	LS. PEMB. BIAYA SPPD DALAM KOTA KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU), SESUAI ST NO:103.A/DD/DPKPP/XI/2022 TGL 28/11/2022 DAN SPPD NO:964/DD/DPKPP/XI/2022 TGL 28/11/2022 (SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
49	LS. PEMB. BIAYA SPPD DALAM KOTA KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, SESUAI ST NO:07/ST-DD/DPKPP/VII/2022 TGL 28/7/2022 DAN SPPD NO:06/SPPD-DD/DPKPP/VII/2022 TGL 28/7/2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00
50	LS. PEMB. BIAYA MAKAN MINUM <i>SPORT CENTER</i> PADA KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:26/PESANAN/PPTK/MKN&NMN/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAP NO:28/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07))	BELANJA MODAL	765.000,00
51	LS. PEMB. BIAYA ATK PENGADAAN TANAH <i>SPORT CENTER</i> PADA KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:17/PESANAN/PPTK/ATK/DBH/X/2022 TGL 24/10 2022 DAN BAP NO:19/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07))	BELANJA MODAL	502.500,00
52	LS. PEMB. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEG PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI ST NO:41.A/ST.LD/DPKPP/VI/2022 TGL 7/6/2022 DAN SPPD NO:69.C/SPPD.LD/DPKPP/VI/2022 TGL 7/6/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07))	BELANJA MODAL	2.859.200,00
53	LS. PEMB. BIAYA BELANJA ATK KANTOR PDAM PADA KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:20/PESANAN/PPTK/ATK/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAP NO:22/BAP/DPKPP/06/X/2022 TGL 26/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07))	BELANJA MODAL	305.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
54	LS. PEMB. BIAYA MAKAN MINUM PDAM KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:38/PESANAN/PPTK/MKNMNM/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAST NO:39/BAST/PPTK/MKNMNM/DBH/X/2022 TGL 25/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA MODAL	320.000,00
55	LS. PEMB. BIAYA ATK RELOKASI WARGA KEC. MALUNDA KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI NP NO:47/PESANAN/PPTK/ATKDBH/X/2022 TGL 24/10/2022 DAN BAST NO:48/BAST/PPTK/ATK/DBH/X/2022 TGL 25/10/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA MODAL	320.000,00
56	LS. PEMB. BIAYA BELANJA MAKAN MINUM JEMBATAN TUBO KEG PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH SESUAI NP NO:50/PESANAN/PPTK/MKNMNM/DBH/X/2022 TGL 24/10/2022 & BAST NO:51/BAST/PPTK/MKNMNM/DBH/X/2022 TGL 25/10/2022 (DBH (PMK 07)	BELANJA MODAL	1.000.000,00
57	LS. PEMB. BIAYA HONORARIUM PENGADAAN TANAH <i>SPORT CENTRE</i> PADA KEGIATAN PENY. MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH, SESUAI SK NO:800/HK/KEP-BUP/VIII/2022 TGL 1/8/2022 & BAP NO:99/BAP/DPKPP/O6/XI/2022 TGL 30/11/2022 (SUMBER DANA DBH (PMK 07)	BELANJA MODAL	2.275.000,00
58	LS. PEMB. BIAYA ATK KEGIATAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN TA 2022, SESUAI NP NO:01/PESANAN/PMKM/IV/2022 TGL 21 MARET 2022 DAN BAST NO:02/BAST/PMKM/III/2022 TGL 22 MARET 2022 (SUMBER DANA PAJAK)	BELANJA MODAL	1.028.000,00
59	LS. PEMB. BIAYA ATK KEGIATAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN, SESUAI NP NO:06/PESANAN/PPTK/PJU/VII/2022 TGL 8 AGUSTUS 2022 & BAST NO:02/BAST/PPTK/VIII/2022 TGL 9 AGUSTUS 2022, SUMBER DANA DAU (NON E MARK)	BELANJA MODAL	1.152.000,00
60	PEMBAYARAN LS <i>MONTHLY OF CERTIFICATE</i> (MC 01) 95% ATAS PEK. PEMB. DRAINASE LINGK. BANUA MALUNDA KEC. MALUNDA SESUAI SPK NO:02.20/SPK-DRA/DPKPP-KP/VIII/2022 TGL 25/8/2022 & BAST NO:03.20/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 16/9/2022 (DBH-PMK 07)	BELANJA MODAL	59.565.000,00
61	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PEK. PEMB. DRAINASE LINGK. BANUA MALUNDA KEC. MALUNDA SESUAI SPK NO:02.20/SPK-DRA/DPKPP-KP/VIII/2022 TGL 25/8/2022 & BAST NO:02.20A/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 16/9/2022 (DBH-PMK 07)	BELANJA MODAL	3.072.891,00
62	PEMBAYARAN LS <i>MONTHLY OF CERTIFICATE</i> (MC 01) 95% ATAS PEK. PEMB. DRAINASE MALIAYA DESA MALIAYA KEC. MALUNDA SESUAI SPK NO:02.19/SPK-DRA/DPKPP-KP/VIII/2022 TGL 25/8/2022 & BAST NO:03.19/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 16/9/2022 (DBH-PMK 07)	BELANJA MODAL	59.565.000,00
63	PEMBAYARAN LS RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PEK. PEMB. DRAINASE MALIAYA DESA MALIAYA KEC. MALUNDA SESUAI SPK NO:02.19/SPK-DRA/DPKPP-KP/VIII/2022 TGL 25/8/2022 & BAST NO:02.19A/BAST-SAB/DPKPP-KP/IX/2022 TGL 16/9/2022 (DBH-PMK 07)	BELANJA MODAL	3.135.000,00
64	LS. PEMB. BIAYA ATK KEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PENGELOLAAN LAMPU JALAN), SESUAI NP NO:05/PESANAN/PPTK/PJU/VI/2022 TGL 9 JUNI 2022 & BAST NO:06/BAST/PPTK/VI/2022 TGL 10 JUNI 2022, SUMBER DANA DAU (NON E MARK)	BELANJA MODAL	3.143.500,00
65	LS. PEMB. BIAYA <i>MONTHLY OF CERTIFICATE</i> (MC 01) 95% ATAS PEK. PENGELOLAAN KAWASAN PEKUBURAN KEC. BANGGAE TIMUR, SESUAI SPK NO:01.03/PPK-SPK/PMKN/IX/2022 TGL 22/9/2022 & BAST NO:03.01/BAST-PMKN/DPKPP/X/2022 TGL 11/10/2022, SUMBER DANA DAU NON E MARK)	BELANJA MODAL	39.995.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
66	LS.PEMBAYARAN BIAYA HONORARIUM PPK URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN (PJU) BIDAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PEMAKAMAN, SESUAI SK NO:858/HK/KEP-BUP/VIII/2022 TGL 25/8/2022 & BAPP NO:01/BAPP/PJU/X/2022 TGL 28/10/2022 (SUMBER DANA PAJAK)	BELANJA MODAL	4.500.000,00
67	LS. PEMB. BIAYA RETENSI PEMELIHARAAN 5% ATAS PEK. PENGELOLAAN KAWASAN PEKUBURAN KEC. BANGGAE TIMUR, SESUAI SPK NO:01.03/PPK-SPK/PMKN/IX/2022 TGL 22/9/2022 & BAST NO:02.01.A/BAST-PMKN/DPKPP/X/2022 TGL 13/10/2022 (SUMBER DANA DAU NON E MARK)	BELANJA MODAL	2.105.000,00
	TAHUN 2023		55.345.000,00
1	LSPEMBAYARAN BELANJA ALAT LISTRIK PEMELIHARAAN LAMPU JALAN UNTUK KEGIATAN KANTOR SESUAI BAST NO : 654/BAST/DPKPP-PJU/05/XII/2023 TGL 1 DESEMBER 2023 DAN SPD NO : 800/5907/LP-SPD/BKAD/2023 TANGGAL 1 DESEMBER 2023 (SUMBER DANA: PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00
2	LS BAYAR SPPD DALAM KOTA KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS UU DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN SESUAI ST NO : 15/ST/DPKPP/PJU/VIII/2023 TGL 3 AGUSTUS 2023 DAN SPD NO : 800/6722/LP-SPD/BKAD/2023 TGL 13 DESEMBER 2023 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00
3	LS.PEMBAYARAN JASA PENILAI TANAH RELOKASI KORBAN BANJIR DESA SALUTAMBUNG KEC. ULUMANDA KAB. MAJENE SESUAI BAST NO : 12/BAST/DPKPP/06/XII/2023 TGL 19 DESEMBER 2023 & SPD NO : 800/7683/LP-SPD/BKAD/2023 TGL 22 DESEMBER 2023 (SUMBER DANA: PAD)	BELANJA MODAL	49.395.000,00
F	SATUAN POLISI PAMONG PARAJA		12.978.400,00
	TAHUN 2022		12.978.400,00
1	LS -PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BELANJA IURAN SURAT KABAR) BULAN DESEMBER TA 2022. SESUAI NOTA PESANAN NO. 800/912/2022 TGL 05/12/2022 DAN BAST NO. 820/POL-PP/XII/2022 TGL 05/12/2022. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
2	LS - PEMB. LANGSUNG KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU (BELANJA MAKAN MINUM TAMU) BULAN DESEMBER TAHUN 2022. SESUAI NOTA PESANAN NO. 800/914/2022 TGL 05/12/2022 DAN BAST NO. 817/POL-PP/XII/2022 TGL 05/12/2022. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
3	LS -PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (BELANJA ONDERDIL KENDARAAN DINAS) BULAN DESEMBER. NOTA PESANAN NO. 800/915/2022 TGL 05/12/2022, BAST NO. 816/POL-PP/XII/2022 TGL 05/12/2022. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	3.700.000,00
4	LS -PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (BELANJA ALAT TULIS KANTOR) UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022. NOTA PESANAN NO. 800/910/2022 TGL 05-12-2022, BAST NO. 818/POL-PP/XII/2022 TGL 05-12-2022. SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00
5	LS - PEMB. LANGSUNG KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU (BELANJA MAKAN MINUM TAMU) BULAN DESEMBER 2022. SESUAI NOTA PESANAN NO. 800/818/2022 TGL 03/09/2022 DAN BAST NO. 817/POL-PP/XII/2022 TGL 05/12/2022. DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
6	LS -PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS) BULAN DESEMBER. NOTA PESANAN NO. 800/825/2022 TGL 16/12/2022 DAN BAST NO. 830/POL-PP/XII/2022 TGL 20/12/2022. DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	1.228.400,00
G	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		584.754.040,00
	TAHUN 2022		584.754.040,00
1	BELANJA BARANG & JASA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH KORBAN GEMPA BUMI NO SURAT PERINTAH MULAI KEJA:02.SPMK-PA/BPBD-RR/X/2022, NO:BERITA ACARA PEMBAY NO:33/BAP/RR-BPBD/XII/2022 & BERITA ACARA SERAH TERIMA (SUMBER DANA: LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
2	BELANJA BARANG & JASA KEGIATAN PEL. PENANGANAN PENDIDIKAN ANAK KORBAN BENCANA ALAM/NON ALAM DGN NO SURAT PERINTAH MULAI KEJA:01.SPMK-PA/BPBD-RR/X/2022, NO:BERITA ACARA PEMBAY NO:32/BAP/RR-BPBD/XII/2022 & BERITA ACARA SERAH TERIMA NO:01/BAST/RR-BPBD/XII/2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
3	PEMBAYARAN BIAYA PERBAIKAN SUKU CADANG KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR BPBD KABUPATEN MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00
4	PEMBAYARAN PERBAIKAN KENDARAAN OPERASIONAL BPBD KAB. MAJENE (MOBIL TANGKI) PEMBANTU SUPLAY PEMADAM KEBAKARAN, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	34.998.350,00
5	PEMBAYARAN PERBAIKAN KENDARAAN OPERASIONAL BPBD KAB. MAJENE (MOBIL TANGKI) PEMBANTU SUPLAY PEMADAM KEBAKARAN, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650,00
6	PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT RESCUE (BAJU PEMADAM KEBAKARAN) KANTOR BPBD KAB. MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022, BERITA ACARAPEMBAYARAN NO: 40/BAP/PK-BPBD/XII/2022 BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR: 012/BAST/B.MODAL/BPBD/XII/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	147.186.000,00
7	BELANJA PELATIHAN BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN PENANGGULANGAN & PENANGANAN BENCANA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SURAT PERINTAH KERJA:10/KONT/PK-BPBD/XII/2022, BERITA ACARA PEMBAYAR NO:39/BAP/PK-BPBD/XII/2022 & BAST:011/BAST/PK-BPBD/XII/2022, LAIN-LAINPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	99.400.000,00
8	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEGIATAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL KANTOR BPBD KABUPATEN MAJENE, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.832.020,00
9	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL KANTOR BPBD KAB. MAJENE SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	6.684.000,00
10	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL KANTOR BPBD KAB. MAJENE SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	7.130.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
11	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KANTPR BPBD KAB. MAJENE, SUMBER DANA DBH PROV	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00
12	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA ADMINISTRASI PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI SKPD KANTPR BPBD KAB. MAJENE SUMBER DANA DAU <i>NON EARMARK</i>	BELANJA BARANG DAN JASA	820.000,00
13	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA ADMINISTRASI PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI SKPD KANTPR BPBD KAB. MAJENE SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	14.309.020,00
14	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA ADMINISTRASI PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI SKPD KANTPR BPBD KAB. MAJENE SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	1.079.600,00
15	BIAYAPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS PENGELOLAAN KEGIATAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI DANA HIBAH KAB. MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	4.827.400,00
16	PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN REHABILITASI/PEMB. TANGGUL PANTAI DESA ULIDANG MAJENE TA 2022, DI LAKSANAKAN OLEH CV. MAKKULAU ENGINEERING, DENGAN KEMAJUAN PEKERJAAN 100% DGN SPK NO: 02.06/SPK-RR/BPBD.MJN/IV/2022 & BERITA ACARA PEMBAY NOMOR: 31/BAP/RR-BPBD/XII/2022	BELANJA MODAL	97.236.000,00
17	BIAYA PENGGANDAAN/FOTO COPY KEGIATAN REHABILITASI & REKONTRUKSI DANA HIBAH KAB. MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022, SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	5.500.000,00
18	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA (TELEVISI WARNA), DENGAN SURAT PESANAN BARANG NOMOR: 360/SP/305.A/BPBD/XII/2022 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR: 07/BASTB/B.MODAL/BPBD/XII/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	4.500.000,00
19	PEMBAYARAN BIAYA MAKANAN & MINUMAN RAPAT KEGIATAN PENGELOLAAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI DANA HIBAH KAB. MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	6.000.000,00
H	DINAS SOSIAL		337.365.000,00
	TAHUN 2022		305.415.000,00
1	PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI NON PNS DTKS SIKS-NG KECAMATAN DAN DESA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022 DENGAN SK NOMOR 1038/HK/KEP-BUP/XI/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00
2	PEMBAYARAN LEMBUR ASN DAN NON ASN PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN SKPD DENGAN SPK NOMOR: 450.12/158.2/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	920.000,00
3	PEMBAYARAN LEMBUR ASN DAN NON ASN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DENGAN NOMOR SPK : 450.12/106.1/2022 DINAS SOSIAL SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	840.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
4	PEMBAYARAN LEMBUR ASN DAN NON ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD DENGAN SPK NO. 450.12/163.2/2022 DINAS SOSIAL 2022 SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	720.000,00
5	PEMBAYARAN LEMBUR ASN DAN NON ASN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD DENGAN SPK NO. 450.12/158.1/2022 DINAS SOSIAL SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.120.000,00
6	PEMBAYARAN KEGIATAN SOSIALISASI BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL DENGAN NOMOR SPK 450/753.1/XII/2022 DAN NOMOR BAP 450/826.1/XII/2022 DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
7	PEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DAN PENYULUH SOSIAL DENGAN NOMOR SPK : 450/748.1/XI/2022 TANGGAL 29 NOVEMBER 2022 NOMOR BAST : 450/805.1/XII/2022 TANGGAL 9 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00
8	PEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN ABON IKAN BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PKH DENGAN NO. SPK 450/747.1/XI/2022 DAN BAP NO.450/838/XII/2022 DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
9	PEMBAYARAN KEGIATAN SOSIALISASI POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA DENGAN NOMOR SPK 450/752.1/XII/2022 DAN BAP NOMOR 450/811.1/XII/2022 DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
10	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.040.000,00
11	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.160.000,00
12	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.120.000,00
13	PEMBAYARAN SPPD PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA PAD LAIN-LAIN	BELANJA BARANG DAN JASA	5.690.000,00
14	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.987.000,00
15	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.350.000,00
16	PEMBAYARAN SPPD DALAM DAERAH DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.320.000,00
17	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.570.000,00
18	PEMBAYARAN SPPD DALAM DAERAH DINAS SOSIAL TA 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD DAN DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	14.478.000,00
	TAHUN 2023		31.950.000,00
1	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR SESUAI NOTA PESANAN NOMOR: 1013.2/801/12/2023 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD DINAS SOSIAL TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
2	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR SESUAI NOTA PESANAN NOMOR: 1013.2/801/12/2023 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD DINAS SOSIAL TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
3	PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUMAN KEGIATAN SESUAI NOTA PESANAN NOMOR: 1013/801/12/2023 TANGGAL 6 DESEMBER 2023 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD DINAS SOSIAL KAB. MAJENE TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
4	PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUMAN KEGIATAN SESUAI NOTA PESANAN NOMOR: 1013/801/12/2023 TANGGAL 6 DESEMBER 2023 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD DINAS SOSIAL KAB. MAJENE TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00
5	PEMBAYARAN PEMELIHARAAN KENDARAAN SESUAI NOTA PESANAN NOMOR: 801/1021.1/12/2023 SUMBER DANA DBH PUSAT DINAS SOSIAL TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	4.950.000,00
I	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		253.400.000,00
	TAHUN 2022		253.400.000,00
1	SUMBER DANA (LLPAD).PEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN GENERASI YANG KREATIF, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE DENGAN LEMBAGA PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT (LPKM). SPK NO : 560/845/2022 TGL 1	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
2	SUMBER DANA (LLPAD).PEMBAYARAN PELATIHAN PEMBUATAN HOTSPOT RUMAHAN DENGAN MIKROTIK BAGI KELOMPOK KERJA MILENIAL, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI BARAT (LINGKAR SULBAR	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
3	SUMBER DANA (LLPAD).PEMBAYARAN SOSIALISASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI BARAT (LINGKAR SULBAR) NO.SPK : 800/609/2022 TGL 6 DESEMBER 202	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
4	SUMBER DANA (LLPAD).PEMBAYARAN KEGIATAN MOTIVASI WIRAUASA MANDIRI, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN DAN PELATIHAN (LPKP) MITRA REZKY. NO.SPK : 800/612/2022 TGL 6 DESEMBER 2022. BAPP NO : 800/94	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
5	SUMBER DANA (LLPAD).PEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN OLAHAN KOPRA PUTIH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE DENGAN GENERASI SOSIAL PEDULI INDONESIA. NO.SPK : 800/626/2022 TGL 6 DESEMBER 2022. BAPP NO : 800/955/2022 TGL 16 DESEMBER 2022. BA	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
6	SUMBER DANA (LLPAD).PEMBAYARAN PENGADAAN AIR CONDITION (AC), DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAJENE DENGAN PT SIKAPAIYA MANDAR MAJENE. SPK NO : 800/623/2022 TGL 7 DESEMBER 2022. BAPP NO : 800/627/2022 TGL 8 DESEMBER 2022, BAP NO : 800/626/	BELANJA MODAL	4.900.000,00
J	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		536.848.660,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2022		431.033.800,00
1	PEMBAYARAN UANG LEMBUR DALAM RANGKA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RKA-SKPD SESUAI SURAT PERINTAH KERJA NO 006/SPK-LBR/DPP&PA/X/2022 TGL 27 OKTOBER 2022 SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.954.000,00
2	BIAYA PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BAGI APARAT DESA SESUAI SPK NOMOR: 037/SPK/DPP&PA/SEK/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 DAN BAP NOMOR: 037/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
3	BIAYA SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENINGKATAN PRODUKTIFITAS EKONOMI KELUARGA SPK NO 032/SPK/DPP&PA/SEK/XI/2022 TGL 02 NOVEMBER 2022 DAN BAP NO 032/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 07 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN PAD TA 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
4	BIAYA SOSIALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN ANGKA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SESUAI SPK NO 043/SPK/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 01 DESEMBER 2022 DAN BAP NO 043/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 19 DESEMBER 2022 SUMBER DANA SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
5	BIAYA PELATIHAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT SESUAI SPK NO 040/SPK/DPP&PA/SEK/XI/2022 TGL 29 NOVEMBER 2022 BAP NO 040/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 20 DESEMBER 2022 SUMBER DANA DAU.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
6	BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN SESUAI SPK NO 042/SPK/DPP&PA/SEK/XI/2022 TGL 30 NOVEMBER 2022 DAN BAP NO 042/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 20 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
7	BIAYA SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK KAJIAN TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI SESUAI SPK NO 038/SPK/DPP&PA/SEK/XI/2022 TGL 23 NOVEMBER 2022, BAP NO 038/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 09 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN PAD TA 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
8	BIAYA SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR SESUAI SPK NO 036/SPK/DPP&PA/SEK/XI/2022, TGL 17 NOVEMBER 2022 DAN BAP 036/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
9	BIAYA SOSIALISASI KEWASPPDAN TERHADAP KEKERASAN SIMBOLIK DALAM KELUARGA SESUAI SPK NO 044/SPK/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 01 DESEMBER 2022, BAP NO 044/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 15 DESEMBER SUMBER DANA LAIN PAD TA 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.800,00
10	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI SPK NO 045/SPK/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 02 DESEMBER 2022 DAN BAP NO 045/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA MODAL	13.034.000,00
11	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI SPK NO 045/SPK/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 02 DESEMBER 2022 DAN BAP NO 045/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA MODAL	34.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
12	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI SPK NO 045/SPK/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 02 DESEMBER 2022 DAN BAP NO 045/BAP/DPP&PA/SEK/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA MODAL	2.300.000,00
	TAHUN 2023		105.814.860,00
1	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA DAN DALAM KOTA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	11.651.200,00
2	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA DAN DALAM KOTA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.835.000,00
3	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA DAN DALAM DAERAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	40.651.460,00
4	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA DAN DALAM DAERAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.080.000,00
5	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA DAN DALAM KOTA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.101.700,00
6	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA DAN DALAM KOTA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.600.000,00
7	BIAYA PERJALAN DINAS BIASA DAN DALAM DAERAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.062.500,00
8	BIAYA PERJALAN DINAS BIASA DAN DALAM DAERAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PENDIDIKAN TA 2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.833.000,00
K	DINAS KETAHANAN PANGAN		91.603.060,00
	TAHUN 2022		91.603.060,00
1	PEMBAYARAN 100% ATAS KEGIATAN SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) KEPADA PELAKU USAHA DIBIDANG PANGAN DINAS KETAHAN PANGAN KAB. MAJENE DILEMBAGA LK-LIKHUS BERDASARAKN SPK NO. 03/SPK/XI/2022 TANGGAL 02 NOVEMBER 2022 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	34.822.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
2	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN PEMANTAUAN STOK DAN HARGA PANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI KWITANSI NO. 01 S/D 06/12/2022 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	6.798.000,00
3	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SESUAI KWITANSI NOMOR: 10 S/D 22 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00
4	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI KWITANSI NOMOR: 17 S/D 18 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	2.540.000,00
5	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN TAHAP ANGGARAN 2022 SESUAI DENGAN KWITANSI NOMOR: K56 S/D K73 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	4.101.000,00
6	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN KAB. MAJENE SESUAI KWITANSI NO. 52 DAN 53 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	1.048.000,00
7	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN TAHUN TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI KWITANSI NOMOR: K46 - K61 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	3.035.000,00
8	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN KAB. MAJENE SESUAI KWITANSI NO. 40 S/D 51 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00
9	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI BERBASIS PANGAN LOKAL TA 2022 SESUAI KWITANSI NO. 198 S/D 204 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	1.317.000,00
10	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI KWITANSI NOMOR K62 - K65 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	3.304.000,00
11	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NBM TAHUN ANGGARAN 2022 SPPD TERLAMPIR SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	1.632.000,00
12	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN PEMANTAUAN STOK PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 SPPD TERLAMPIR SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	6.031.000,00
13	SPP-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TA 2022 SESUAI KWITANSI NO : 227 S/D 248 DAN 458 S/D 576 SUMBER DANA LLPA	BELANJA BARANG DAN JASA	20.475.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
L	DINAS PERHUBUNGAN		42.823.200,00
	TAHUN 2022		42.823.200,00
1	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BERDASARKAN SURAT TUGAS NO : 090/1896.A/2022- 090/1949.A/2022-090/369/20220 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	42.823.200,00
M	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN		92.441.712,00
	TAHUN 2022		92.441.712,00
1	PENGAJUAN SPM LS BELANJA ATK, KERTAS & COVER, BHN KOMPUR UNTUK KEG PENG APK PROBIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK UTK BULAN DES 2022 PADA DISKOMIFO KAB.MAJENE SESUAI SPK:800/820/2022, BAP:900/841/BAP/XII/2022, NOTA PESANAN:900/821/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN	BELANJA BARANG DAN JASA	197.000,00
2	PENGAJUAN SPM LS BELANJA ATK, KERTAS & COVER, BHN KOMPUR UNTUK KEG PENG APK PROBIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK UTK BULAN DES 2022 PADA DISKOMIFO KAB.MAJENE SESUAI SPK:800/820/2022, BAP:900/841/BAP/XII/2022, NOTA PESANAN:900/821/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN	BELANJA BARANG DAN JASA	6.507.000,00
3	PENGAJUAN SPM LS BELANJA ATK, KERTAS & COVER, BHN KOMPUR UNTUK KEG PENG APK PROBIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK UTK BULAN DES 2022 PADA DISKOMIFO KAB.MAJENE SESUAI SPK:800/820/2022, BAP:900/841/BAP/XII/2022, NOTA PESANAN:900/821/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00
4	PENGAJUAN SPM LS BELANJA KAWAT/FLAKSMILE/INTERNET/TV BERLANGGANAN PADA KEGIATAN PENGELOLAAN <i>E-GOVERNMENT</i> DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS KOMINFO KAB. MAJENE TA 2022. PPTK NO. TIK.1/19 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	39.164.737,00
5	PENGAJUAN SPM LS BELANJA MAKAN&MINUM RAPAT UNTUK SUB KEG PENG APLIKASI PROBIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK UTK BULAN DES 2022 PADA DISKOMIFO KAB.MAJENE SESUAI SPK:800/826/2022, BAP:900/843/BAP/XII/2022, NOTAPESANAN:900/827/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	6.980.000,00
6	PENGAJUAN SPM LS BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. MAJENE TA 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	19.992.975,00
7	PENGAJUAN SPM LS BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM PADA SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA DINAS KOMINFO MAJENE TA 2022 SESUAI DENGAN KWITANSI TERLAMPIR. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	19.400.000,00
N	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN		1.371.950.579,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2022		1.326.950.579,00
1	PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI DAN TUNJUNGAN ASN BULAN SEPTEMBER - NOVEMBER 2022 DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN KAB. MAJENE TA 2022, UNTUK 2 ORG GOL. III DAN 1 ORG GOL. IV.	BELANJA PEGAWAI	1.209.399,00
2	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN ALAT PERBENKELAN TA 2022, SESUAI DENGAN SPK NO.518/05/SPK/2022 TGL31/10/2022 BASTP NO.518/12/BASTP/2022 TGL12/12/2022 & BAP NO.518/13/BAP/2022 TGL12/12/2022, SUMBER DANA DID (PEND. TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	403.880,00
3	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN ALAT PERTUKANGAN, SESUAI DENGAN SPK NO.518/02/SPK/2022 TGL20/10/2022, BASTP NO.518/09/BASTP/2022 TGL2/12/2022 & BAP NO.518/10/BAP/2022 TGL2/12/2022 SUMBER DANA DID (PEND. TF)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.500.000,00
4	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN ALAT PERBENKELAN TA 2022, SESUAI DENGAN SPK NO.518/05/SPK/2022 TGL31/10/2022 BASTP NO.518/12/BASTP/2022 TGL12/12/2022 & BAP NO.518/13/BAP/2022 TGL12/12/2022, SUMBER DANA DID (PEND. TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	37.900.000,00
5	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN ALAT PERTUKANGAN KAYU, SESUAI DGN SPK NO.518/15/SPK/2022 TGL19/12/2022, BASTB NO.518/15/BASTB/2022 TGL23/12/2022 & BAP NO.518/16/BAP/2022 TGL23/12/2022, SUMBER DANA DID (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA BARANG DAN JASA	49.500.000,00
6	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN ALAT PERBENGKELAN, SESUAI DGN SPK NO.518/12/SPK/2022 TGL12/12/2022, BASTB NO.518/24/BASTB/2022 TGL23/12/2022 BAP NO.518/25/BAP/2022 TGL23/12/2022, SUMBER DANA DID (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA BARANG DAN JASA	9.052.050,00
7	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PENGADAAN BANTUAN ALAT PERTUKANGAN KAYU, SESUAI DGN SPK NO.518/09/SPK/2022 TGL12/12/2022 BAP NO.518/21/BASTB/2022 TGL23/12/2022 & BAP NO.518/22/BAP/2022 TGL23/12/2022, SUMBER DANA DID (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA BARANG DAN JASA	13.625.250,00
8	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PELATIHAN LIFE SKILL BERBASIS PEMASARAN, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.518/216.D/KONT/2022 TGL17/11/2022 BASTP NO.518/228.B/BASTP/2022 TGL28/11/2022 & BAP NO.518/228.C/BAP/2022 TGL28/11/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
9	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN TENTANG USAHA KECIL MENENGAH, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.518/232/KONT/2022 TGL29/11/2022 BASTP NO.518/281/BASTP/2022 TGL8/12/2022 & BAP NO.518/282/BAP/2022 TGL8/12/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
10	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI PEMANFAATAN TIK BAGI PELAKU UKM, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.518/182.B/KONT/2022 TGL4/11/2022 BASTP NO.518/204/BASTP/2022 TGL17/11/2022 & BAP NO.518/205/BAP/2022 TGL17/11/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
11	LS 100% KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN SDM PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF DI ERA DIGITALISASI, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/222/KONT/2022 TGL24/11/2022 BASTP NO.518/278/BASTP/2022 TGL6/12/2022 & BAP NO.518/279/BAP/2022 TGL6/12/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
12	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DALAM MEMBANGUN USAHA BERBASIS IT, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/224.B/2KONT/2022 TGL25/11/2022 BASTP NO.518/250/BASTP/2022 TGL2/12/2022 & BAP NO.518/251/BAP/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
13	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI DIGITAL MARKETING PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), SESUAI DGN KONTRAK NO.518/179/KONT/2022 TGL31/10/2022 BASTP NO.518/198/BASTP/2022 TGL8/11/2022 & BAP NO.518/199/BAP/2022 TGL8/11/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
14	LS 100% KEGIATAN PELATIHAN ENTREPRENEURSHIP BERBASIS KEARIFAN LOKAL & POTENSI LOKAL MASYARAKAT, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/213/KONT/2022 TGL14/11/2022 BASTP NO.518/217/BASTP/2022 TGL23/11/2022 & BAP NO.518/218/BAP/2022 TGL23/11/2022 SUMBERDANALAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
15	LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI PENGEM.UMKM YANG KREATIF, INOVATIF & BERDAYA SAING UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN NAS, SESUAI KONTRAK NO.518/177/KONT/2022 TGL31/10/2022 BASTP NO.518/195/BASTP/2022 TGL8/11/2022 & BAP NO.518/196/BAP/2022 TGL8/11/2022 SUMBERDANALAINLAINPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
16	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN INOVASI UMKM, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/230/KONT/2022 TGL29/11/2022 BASTP NO.518/292/BASTP/2022 TGL12/12/2022 & BAP NO.518/293/BAP/2022 TGL12/12/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
17	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI PERKOPERASIAN BAGI WIRUSAHA BARU KEC.BANGGAE, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/236/KONT/2022 TGL1/12/2022, BASTP NO.518/289/BASTP/2022 TGL12/12/2022 & BAP NO.518/290/BAP/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
18	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PELATIHAN KEWIRUSAHAAN, VOCATIONAL & MANAJEMEN PERKOPERASIAN, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/253/KONT/2022 TGL2/12/2022 BASTP NO.518/295/BASTP/2022 TGL12/12/2022 & BAP NO.518/296/BAP/2022 TGL12/12/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
19	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN DASAR UMKM, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/255/KONT/2022 TGL2/12/2022 BASTP NO.518/298/BASTP/2022 TGL12/12/2022 & BAP NO.518/299/BAP/2022 TGL12/12/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
20	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI PERAN KOPERASI TERHADAP MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.518/228/KONT/2022 TGL28/11/2022 BASTP NO.518/262/BASTP/2022 TGL5/12/2022 & BAP NO.518/263/BAP/2022 TGL5/12/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
21	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN USAHA KEPADA PEDAGANG PASAR, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.510/089.B/KONT/2022 TGL28/11/2022 BASTP NO.510/125/BASTP/2022 TGL9/12/2022 & BAP NO.510/126/BAP/2022 TGL9/12/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
22	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN SOUVENIR BAGI IBU RUMAH TANGGA DAN REMAJA, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/274/KONT/2022 TGL6/12/2022 BASTP NO.518/303/BASTP/2022 TGL15/12/2022 & BAP NO.518/304/BAP/2022 TGL15/12/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
23	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM KOPERASI MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/276/KONT/2022 TGL6/12/2022, BASTP NO.518/306/BASTP/2022 TGL19/12/2022 & BAP NO.518/307/BAP/2022 TGL19/12/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
24	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI PERKOPERASIAN BAGI KELOMPOK PEDAGANG PASAR, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/301/KONT/2022 TGL13/12/2022 BASTP NO.518/309/BASTP/2022 TGL19/12/2022 & BAP NO.518/310/BAP/2022 TGL19/12/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
25	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PELATIHAN BERWIRAUSAHA BAGI PELAKU USAHA PEMULA, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/238/KONT/2022 TGL1/12/2022 BASTP NO.518/315/BASTP/2022 TGL19/12/2022 & BAP NO.518/316/BAP/2022 TGL19/12/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
26	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN USAHA DAN KEUANGAN UMKM, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/304.B/KONT/2022 TGL15/12/2022 BASTP NO.518/318/BASTP/2022 TGL20/12/2022 & BAP NO.518/319/BAP/2022 TGL20/12/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
27	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI PERANAN KEMITRAAN TERHADAP PELAKU UMKM, SESUAI DGN KONTRAK NO.518/287/KONT/2022 TGL9/12/2022, BASTP NO.518/312/BASTP/2022 TGL19/12/2022 & BAP NO.518/313/BAP/2022 TGL19/12/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
28	PEMBAYARAN LS 100% KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.518/220/KONT/2022 TGL24/11/2022 BASTP NO.518/244/BASTP/2022 TGL2/12/2022 & BAP NO.518/245/BAP/2022 TGL2/12/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
29	LS 100% KEGIATAN SOSIALISASI OSS PERIZINAN BAGI PARA PELAKU UMKM, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.518/235/KONT/2022 TGL1/12/2022 BASTP NO.518/284/BASTP/2022 TGL8/12/2022 & BAP NO.518/285/BAP/2022 TGL8/12/2022, SUMBER DANA LAINLAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
30	PEMBAYARAN 5% PEKERJAAN REHABILITASI LAPAK PASAR SENTRAL MAJENE PENJUAL MAKANAN TA 2022, SESUAI DGN KONTRAK NO.510/131/KONT/2022 TGL9/12/2022, BAP NO.510/161/BAP/2022 TGL19/12/2022. SUMBER DANA DBH PROVINSI.	BELANJA MODAL	3.140.000,00
31	PEMBAYARAN 95% PEKERJAAN REHABILITASI LAPAK PASAR SENTRAL MAJENE PENJUAL MAKANAN TA 2022, SESUAI DGN KONTRAK NO.510/131/KONT/2022 TGL9/12/2022, BAP NO.510/158/BAP/2022 TGL19/12/2022, SUMBER DANA DBH PROVINSI.	BELANJA MODAL	59.660.000,00
32	PEMBAYARAN 5% RETENSI PEKERJAAN REHABILITASI RUANGAN PASAR OLEH-OLEH LEMBANG TA 2022, SESUAI DGN KONTRAK NO.510/121/KONT/2022 TGL5/12/2022, BAP NO.510/167/BAP/2022 TGL23/12/2022. SUMBER DANA: DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANFER).	BELANJA MODAL	3.950.000,00
33	PEMBAYARAN 95% PEKERJAAN REHABILITASI RUANGAN PASAR OLEH-OLEH LEMBANG TA 2022, SESUAI DGN KONTRAK NO.510/121/KONT/2022 TGL5/12/2022, BAP NO.510/164/BAP/2022 TGL23/12/2022. SUMBER DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA MODAL	1.248.000,00
34	PEMBAYARAN 100% PERENCANAAN REHABILITASI LAPAK PASAR SENTRAL MAJENE PENJUAL MAKANAN, SESUAI DGN SPK NO.510/112/SPK-KONS/2022 TGL1/12/2022 & BAP NO.510/129/BAP/2022 TGL9/12/2022. SUMBER DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER)	BELANJA MODAL	2.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
35	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN PERENCANAAN REHABILITASI RUANGAN PASAR OLEH-OLEH LEMBANG TA 2022, SESUAI DGN SPK NO.510/097/SPK-KONT/2022 TGL21/11/2022, BAP NO.510/116/BAP/2022 TGL5/12/2022, SUMBER DANA: DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA MODAL	3.350.000,00
36	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN PERENCANAAN REHABILITASI LAPAK PASAR SENTRAL MAJENE TA 2022, SESUAI DGN SPK NO.510/079/SPK-KONS/2022 TGL3/10/2022, BAP NO.510/083.C/BAP/2022. SUMBER DANA: DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA MODAL	3.900.000,00
37	LS 100% BELANJA ATK ADMINISTRASI LAPAK PASAR SENTRAL MAJENE, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.510/088/KONT/2022 TGL8/11/2022 BASTP NO.510/118/BASTP/2022 TGL5/12/2022 & BAP NO.510/119/BAP/2022 TGL5/12/2022, SUMBER DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER)	BELANJA MODAL	3.000.000,00
38	LS 100% BELANJA ATK ADM.REHABILITASI RUANGAN PASAR OLEH-OLEH LEMBANG, SESUAI DENGAN KONTRAK NO.510/121/KONT/2022 TGL5/12/2022, BASTP NO.510/134/BASTP/2022 TGL12/12/2022 & BAP NO.510/135/BAP/2022 TGL12/12/2022. SUMBER DAU PMK 07(PEND. TF)	BELANJA MODAL	2.610.000,00
39	LS 100% BELANJA ATK ADMINISTRASI LAPAK PASAR SENTRAL MAJENE PENJUAL MAKANAN, SESUAI DGN KONTRAK NO.510/131/KONT/2022 TGL12/12/2022, BASTP NO.510/137/BASTP/2022 TGL13/12/2022 & BAP NO.510/138/BAP/2022 TGL13/12/2022, SUMBER DAU PMK 07 (PENDAPATAN TF)	BELANJA MODAL	2.100.000,00
40	PEMBAYARAN 95% PEKERJAAN REHABILITASI RUANGAN PASAR OLEH-OLEH LEMBANG TA 2022, SESUAI DGN KONTRAK NO.510/121/KONT/2022 TGL5/12/2022, BAP NO.510/164/BAP/2022 TGL23/12/2022. SUMBER DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA MODAL	34.302.000,00
41	PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN REHABILITASI RUANGAN PASAR OLEH-OLEH LEMBANG TA 2022, SESUAI DGN SK NO.1081/HK/KEP-BUP/XII/2022 TGL5/12/2022, BAP NO.510/152/BAP/2022 TGL16/12/2022 SUMBER DANA DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER)	BELANJA MODAL	2.400.000,00
42	PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN REHABILITASI LAPAK PASAR SENTRAL MAJENE PENJUAL MAKANAN TA 2022, SESUAI DGN SK NO.1082/HK/KEP-BUP/XII/2022 TGL5/12/2022, BAP NO.510/155/BAP/2022 TGL16/12/2022 SUMBER DANA: DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA MODAL	1.900.000,00
43	PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN REHABILITASI LAPAK PASAR SENTRAL MAJENE TA 2022, SESUAI DGN SK NO. 1080/HK/KEP-BUP/XII/2022 TGL5/12/2022, BAP NO.510/149/BAP/2022 TGL16/12/2022. SUMBER DANA: DAU PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER).	BELANJA MODAL	2.650.000,00
44	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN IPAL SENTRA IKM PENGELOLAAN KELAPA & TURUNANNYA KAB.MAJENE TA 2022, SESUAI DGN SPK NO.530/36/SPK-PWS/2022 TGL20/10/2022 & BAP NO.530/42/BAP-PWS/2022 TGL16/12/2022. SUMBER DBH PMK 07 (PENDAPATAN TRANSFER)	BELANJA MODAL	3.950.000,00
	TAHUN 2023		45.000.000,00
1	LSPEREMBAYARAN 100% PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT PELATTOANG KEC. TAMMERODO TA 2023, SESUAI DGN SPK NO.510/441/SPK/2023 TGL6/10/2023 BAP NO.510/497.C/BAP/2023 TGL2/11/2023 SPD NO. 800/7428/LP-SPD/BKAD/2023, SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00
O	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.772.658.123,00
	TAHUN 2022		1.743.608.123,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN DOKUMENTASI KARYA BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 09/SPK-PA/PPCB/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 172/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
2	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA ADAT (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 07/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 BASTP NO: 177/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
3	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 05/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 174/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
4	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENGUSULAN PERDA TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SESUAI DENGAN SK NO : 787/HK/KEP-BUP/VII/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00
5	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN BELANJA LEMBUR KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA DENGAN NOMOR SURAT TUGAS 800/108/2022 & 090/113/2022, BULAN DESEMBER 2022 (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.785.500,00
6	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAAN POTENSI WISATA BAGI POKDARWIS (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 39/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 193/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
7	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK INDUSTRI PARIWISATA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 41/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 203/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
8	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN TATA KELOLA & PROMOSI PARIWISATA DAERAH (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 11/SPK-PA/PEKMPPHKI/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 206/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	80.525.000,00
9	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN EVENT PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.679.148,00
10	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN EVENT PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.437.500,00
11	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN EVENT PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	271.400,00
12	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN EVENT PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	242.676,00
13	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN EVENT PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
14	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.666.350,00
15	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00
16	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	18.880.000,00
17	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00
18	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00
19	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	755.000,00
20	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	177.100,00
21	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	485.352,00
22	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	13.750.000,00
23	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	13.115.000,00
24	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00
25	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN <i>EVENT</i> PENTAS SENI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SESUAI SPK NO : 09/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022, BASTP NO : 198/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00
26	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA TINGKAT NASIONAL, DENGAN NO SK : 1074/HK/KEP-BUP/XI/2022, BASTP NO. 228/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
27	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA TINGKAT NASIONAL, DENGAN NO SK : 1074/HK/KEP-BUP/XI/2022, BASTP NO. 228/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00
28	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA TINGKAT NASIONAL, DENGAN NO SK : 1074/HK/KEP-BUP/XI/2022, BASTP NO. 228/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00
29	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA TINGKAT NASIONAL, DENGAN NO SK : 1074/HK/KEP-BUP/XI/2022, BASTP NO. 228/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00
30	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 47/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 181/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
31	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN INOVASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 43/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 185/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
32	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAAN WISATA BAHARI SEBAGAI DAYA TARIK WISATA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 27/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 189/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
33	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KREATIF (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 49/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 209/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
34	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN POTENSI WISATA KULINER DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 45/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 211/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
35	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/III/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	935.500,00
36	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/III/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00
37	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/III/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	10.005.000,00
38	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/III/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00
39	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/III/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
40	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/II/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
41	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/II/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	9.832.500,00
42	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/II/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.072.000,00
43	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN SDM WISATA DALAM MENUNJANG KEGIATAN KEPARIWISATAAN (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 47/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 236/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
44	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PAGELARAN UPACARA MASSOSSOR MANURUNG MAPPANDE BANUA TAHAP II (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 17/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 225/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
45	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PAGELARAN UPACARA MASSOSSOR MANURUNG MAPPANDE BANUA TAHAP II (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 17/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 225/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	21.700.000,00
46	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PAGELARAN UPACARA MASSOSSOR MANURUNG MAPPANDE BANUA TAHAP II (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 17/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 225/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00
47	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PAGELARAN UPACARA MASSOSSOR MANURUNG MAPPANDE BANUA TAHAP II (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 17/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 225/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
48	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PAGELARAN UPACARA MASSOSSOR MANURUNG MAPPANDE BANUA TAHAP II (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 17/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 225/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00
49	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PAGELARAN UPACARA MASSOSSOR MANURUNG MAPPANDE BANUA TAHAP II (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 17/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 225/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00
50	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PAGELARAN UPACARA MASSOSSOR MANURUNG MAPPANDE BANUA TAHAP II (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 17/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 225/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	18.300.000,00
51	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN PAGELARAN UPACARA MASSOSSOR MANURUNG MAPPANDE BANUA TAHAP II (LAIN-LAIN PAD) SESUAI DENGAN SPK NO : 17/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XI/2022 BASTP NO: 225/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00
52	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN KEGIATAN SOSIALISASI PENERAPAN SAPTA PESONA DALAM PERENCANAAN & PENGEMBANGAN DESTINASI DENGAN NO SPK : 49/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XII/2022 BASTP NO: 236/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
53	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG PELATIHAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS EKOWISATA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NO. 29/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XI/2022 & BASTP. NO. 244/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
54	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG PELATIHAN MUSEUM SEBAGAI WAHANA EDUKASI (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NO. 01/SPK-PA/PP/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 253/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
55	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PELATIHAN PEMASARAN DIGITAL DESTINASI PARIWISATA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NO. 23/SPK-PA/PEKMPPHKI/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 239/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
56	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PEMASARAN USAHA EKONOMI KREATIF (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NO. 21/SPK-PA/PEKMPPHKI/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 236/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.000,00
57	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN AKSESORIS PAKAIAN TRADISIONAL MANDAR (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NO. 13/SPK-PA/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 233/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
58	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA EKONOMI KREATIF (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NO. 13/REG-PA/PEKMPPHKI/DISBUDPAR/XI/2022 & BASTP. NO.247/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
59	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN FESTIVAL MARROMAI (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NO. 11/SPK-PA/DISBUDPAR/XI/2022 & BASTP. NO. 230/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
60	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PEMELIHARAAN 5% KEGIATAN REHABILITASI BERAT ANJUNGAN SANDEQ KEL. LABUANG (DAU PMK 07) SESUAI SPK NO. 07/SPK-PA/PUPDK/DISBUPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 253/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	8.995.000,00
61	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PEMELIHARAAN 95% KEGIATAN REHABILITASI BERAT ANJUNGAN SANDEQ KEL. LABUANG (DAU PMK 07) SESUAI SPK NO. 07/SPK-PA/PUPDK/DISBUPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 257/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	170.905.000,00
62	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PELATIHAN PEMBINAAN REGISTRASI CAGAR BUDAYA, BAGI GENERASI MILENIAL (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NO. 13/SPK-PA/PPCB/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 242/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
63	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG SOSIALISASI KEPADA KAUM MILENIAL DALAM MENDORONG PROMOSI WISATA MELALUI DIGITALISASI DI KAB. MAJENE (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 24/SPK-PA/PEKMPPHKI/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 273/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
64	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG SOSIALISASI MENUMBUH KEMBANGKAN USAHA DI DESTINASI WISATA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 51/SPK-PA/PSDPEK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 265/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
65	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.285.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
66	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	977.500,00
67	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	6.532.850,00
68	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	3.105.000,00
69	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.911.550,00
70	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	529.000,00
71	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.788.250,00
72	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
73	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	67.000,00
74	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
75	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00
76	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	27.700.000,00
77	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN PAGELARAN SENI & BUDAYA (LAIN-LAIN PAD) SESUAI 15/SPK-PA/PK/DISBUDPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 269/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	150,00
78	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PENGAWASAN REHABILITASI BERAT ANJUNGAN SANDEQ KEL. LABUANG (DAU PMK 07) SESUAI SPK NO. 09/SPK-PA/PUPDK/DISBUPAR/XII/2022 & BASTP. NO. 261/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
79	PENGAJUAN SPM LS PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA BULAN DESEMBER 2022 DENGAN SURAT TUGAS NO : 090/75/2022, 090/76/2022, 090/17/2022, 090/112/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	15.181.200,00
80	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA DENGAN NOMOR SURAT TUGAS 090/113/2022, BULAN DESEMBER 2022 (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.652.000,00
81	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA DENGAN NOMOR SURAT TUGAS 090/108/2022 & 090/113/2022, BULAN DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.812.500,00
82	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA TINGKAT NASIONAL, DENGAN NO SK : 1074/HK/KEP-BUP/XI/2022, BASTP NO. 228/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	25.400.000,00
83	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN SWAKELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN PELESTARIAN NILAI NILAI SEJARAH, DENGAN NO SK : 023/HK/KEP-BUP/III/2022, BASTP NO. 233/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	12.055.000,00
84	PENGAJUAN SPM LS PERMINTAANPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UNTUK BULAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER. 2022. DENGAN NOMOR SURAT TUGAS : 090/1121/2022, 090/54/2022, 090/71.A/2022, 090/73.A/2022 (DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	53.561.097,00
85	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG ANGSURAN 5 % PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR (DAU) SESUAI 05/SPK-PA/PUPDK/DISBUDPAR/IX/2022 & BASTP NO. 145/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA MODAL	6.730.000,00
86	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PENGELOLAAN (BELANJA PAKAI HABIS) PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR DISBUDPAR (DAU PMK 07) SESUAI SPK NO. 01/SPK-PA/PUPDK/VVIII/2022 & BASTP. NO. 245/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA MODAL	1.550.000,00
87	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PENGELOLAAN (BELANJA PAKAI HABIS) PEMBANGUNAN PAGAR PEMBATAH OBJEK WISATA PANTAI BARANE (DAU PMK 07) SESUAI SPK NO. 01/SPK-PA/PDTDP/VVIII/2022 & BASTP. NO. 249/BASTP KEU/DISBUDPAR/XII/2022 TA 2022	BELANJA MODAL	1.550.000,00
88	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN LANGSUNG HONORARIUM TIM TEKHNIS, PENGAWAS & TIM PENDUKUNG KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR DISBUDPAR KAB. MAJENE DENGAN NO SK : 787/HK/KEP-BUP/VII/2021 SUMBER DANA (DAU) DTU	BELANJA MODAL	7.450.000,00
89	PENGAJUAN SPM LPEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENGELOLA & PENGAWAS PEMBANGUNAN PAGAR PEMBATAH PANTAI BARANE TA 2022. SESUAI SK NO : 787/HK/KEP-BUP/VII/2022. (DAU PMK 07)	BELANJA MODAL	7.450.000,00
	TAHUN 2023		29.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	PENGAJUAN SPM LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PER TANGGAL 20 DESEMBER 2023. DENGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.960.000,00
2	PENGAJUAN SPM LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PER 20 DESEMBER 2023 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.440.000,00
3	PENGAJUAN SPM LSPEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENGELOLA/PENGAWAS & PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN SESUAI SK NO. 100.3.3.2/778/IX/TAHUN 2023 (DAU-PEND)	BELANJA MODAL	6.300.000,00
4	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SENI SPK NO. 033/SPK-PA/PKT/DISBUDPAR/XI/2023 NO. 605/BAP-KEU/DISBUDPAR/XII/2023 (DAU-PEND)	BELANJA MODAL	1.800.000,00
5	PENGAJUAN SPM LSPEMBAYARAN HONORARIUM TIM PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SENI SESUAI SK NO. 100.3.3.2/758/IX/TAHUN 2023 (DAU-PEND)	BELANJA MODAL	4.000.000,00
6	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN DUSUN ONANG SESUAI SPK NO. 028/SPKPA/PK/DISBUDPAR/XII/2023 & BAP NO. 558/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2023 (DAUPEND)	BELANJA MODAL	1.350.000,00
7	PENGAJUAN SPM (LS)PEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PEGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN SESUAI SPK NO. 027/SPKPA/PK/DISBUDPAR/XI/2023 & BAP NO. 554/BASTP-KEU/DISBUDPAR/XII/2023 (DAUPEND)	BELANJA MODAL	1.200.000,00
P	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		89.982.800,00
	TAHUN 2022		76.143.900,00
1	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR DAN KERTAS COVER KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.186.000,00
2	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA ATK DAN KERTAS COVER KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.423.000,00
3	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA ATK /KERTAS COVER DAN BAHAN KOMPUTER. KEGIATAN AKUISISI PENGOLAHAN PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.884.600,00
4	SPM-LSPEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR DAN KERTAS COVER KEGIATAN PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE TA 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.149.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
5	SPM-LSPEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR DAN KERTAS COVER KEGIATAN PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE TA 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	91.500,00
6	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA ATK DAN KERTAS COVER KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	92.000,00
7	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA ATK /KERTAS COVER DAN BAHAN KOMPUTER. KEGIATAN AKUISISI PENGOLAHAN PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	744.000,00
8	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR DAN KERTAS COVER KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.610.000,00
9	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA ATK /KERTAS COVER DAN BAHAN KOMPUTER. KEGIATAN AKUISISI PENGOLAHAN PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.210.000,00
10	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN KOTA (LOMBA PERPUSTAKAAN) TAHUN ANGGARAN 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.726.000,00
11	SPM-LSPEMBAYARAN HONORARIUM DEWAN JURI DAN UANG PEMBINAAN JUARA. (LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR) SESUAI SK BUPATI NO. 594/HK/KEP-BUP/V/2022. TGL 10 MEI 2022. KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00
12	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENYUSUN KATALOGISASI BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2022 BERDASARKAN SK BUPATI NO. 268/HK/KEP-BUP/III/2022 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TA 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00
13	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI (OPERATOR PENGELOLA ARSIP) TRIWULAN IV (EMPAT). KEGIATAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. BERDASARKAN SK BUPATI NO. 654/HK/KEPBUP/VI/2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00
14	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA (SERVIS/PEMELIHARAAN) KENDARAAN OPERASIONAL (PERPUSTAKAAN KELILING) PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00
15	SPM-LSPEMBAYARAN HONORARIUM DEWAN JURI DAN UANG PEMBINAAN JUARA. (LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR) SESUAI SK BUPATI NO. 594/HK/KEP-BUP/V/2022. TGL 10 MEI 2022. KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
16	SPM-LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA DALAM RANGKA KOORDINASI DI DPK PROV. SULBAR TERKAIT BANTUAN BUKU DAN RAK BUKU DI DESA WILAYAH KAB. MAJENE SESUAI SURAT TUGAS 090/2407/2022.KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA. (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00
17	SPM-LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE MAMUJU DAN KE POLEWALI KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD. SESUAI SURAT TUGAS 090/2326/2022. DST. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MAJENE. SUMBER DNANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.945.000,00
18	SPM-LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. SESUAI SURAT TUGAS NO. 090/096/2022. DST. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.582.000,00
19	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA. (PENDAMPINGAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH) SESUAI SURAT TUGAS NO. 090/66/2022. DST. DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00
20	SPM-LS PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN AUDIT PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI KECAMATAN KEGIATAN AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS SESUAI SURAT TUGAS NO. 090/106/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.370.000,00
21	SPM-LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING DI TIAP KECAMATAN SE-KAB MAJENE SESUAI SURAT TUGAS 090/133/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.520.000,00
22	SPM-LSPEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA (PENULUSURAN NASKAH KUNO DAN ETNIS DAERAH SESUAI NO. SURAT TUGAS 090/125/2022. DST. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.920.000,00
23	SPP-LSPEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA (PENULUSURAN NASKAH KUNO DAN ETNIS DAERAH SESUAI NO. SURAT TUGAS 090/112/2022. DST. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.240.000,00
24	SPM-LSPEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MAJENE. KEGIATAN PENGAWASAN RENOVASI GEDUNG FASILITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN. SESUAI SK. BUPATI. 855/HK/KEP-BUP/VIII/2022. SUMBER DANA DAU	BELANJA MODAL	2.750.000,00
TAHUN 2023			13.838.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	SPM-LSPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD. SESUAI NOMOR SURAT TUGAS 090/21/2023 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2023. SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	9.416.000,00
2	SPP-LSPEMBAYARAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN (BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2023. SUMBER DANA DBH PUSAT	BELANJA BARANG DAN JASA	1.410.000,00
3	SPM-LSPEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2023. SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.262.900,00
4	SPM-LSPEMBAYARAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN (BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2023. SUMBER DANA DBH PUSAT	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00
Q	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.957.443.800,00
	TAHUN 2022		1.879.143.800,00
1	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PEMASARAN PRODUK HASIL PERIKANAN, SPK NO:106/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BASTNO:905/365/BAST/XII/2022 TGL 07 DESEMBER 2022, BAPNO:905/366/BAP/XII/2022 TGL 07 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
2	PEMBAYARAN LS PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI NELAYAN, SPK NO : 97/SPS/DKP/XI/2022 TGL 14 NOVEMBER 2022, BAST NO : 905/371/BAST/XII/2022 TGL 09 DESEMBER 2022, BAP NO : 905/372/BAP/XII/2022 TGL 09 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
3	PEMBAYARAN LS PELATIHAN PENGOLAHAN LIMBAH IKAN MENJADI PAKAN TERNAK, SPK NO : 73/SPS/DKP/IX/2022 TGL 12 OKTOBER 2022, BAST NO : 905/360/BAST/XII/2022 TGL 07 DESEMBER 2022, BAP NO : 905/359/BAP/XII/2022 TGL 07 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
4	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT UNTUK MASYARAKAT PESISIR, SPK NO : 105/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO : 905/386/BAST/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022, BAP NO : 905/387/BAP/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
5	PEMBAYARAN LS PELATIHAN OLAHAN RUMPUT LAUT BERBASIS MASYARAKAT, FORUM KOMUNIKASI PEMUDA DESA, SPK NO:118/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/425/BAST/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022, BAP NO:905/426/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
6	PEMBAYARAN LS BINTEK PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MASYARAKAT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN KABUPATEN MAJENE, SPKNO:109/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BASTNO:905/392/BAST/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022, BAPNO:905/393/BAP/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
7	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI OSS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN, SPK NOMOR: 107/SPS/DKP/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022, BAST NOMOR: 905/389/BAST/XII/2022 TANGGAL 13 DESEMBER 2022, BAP NOMOR: 905/390/BAP/XII/2022 TANGGAL 13 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
8	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI KARTU E-KUSUKA DAN ASURANSI BAGI NELAYAN KECIL DI KEC. SENDANA, SPK NO : 89/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO : 905/383/BAST/XII/2022 TGL 13 DESEMBER 2022, BAP NO : 905/384/BAP/XII/2022 TGL 13 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
9	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI TENTANG TEKNIK STRATEGI DALAM MEMASARKAN HASIL OLAHAN PERIKANAN, SPK NO:90/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/434/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/435/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
10	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DILINDUNGI, PKBM NUSA SULBAR, SPK NO:99/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/431/BAST/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022, BAP NO:905/432/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
11	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN, LKP TOPANRITA, SPK NO:111/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/422/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/423/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
12	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI PENGOLAHAN DATA STATISTIK KELOMPOK NELAYAN, SPK NO:119/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/488/BAST/XII/2022 TGL 14 DESEMBER2022, BAP NO:905/489/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
13	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI GEMAR MAKAN IKAN, SPK NO:120/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/485/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/486/XII/2022 TGL 14DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
14	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI GEMAR MAKAN IKAN BAGI MASYARAKAT PESISIR, LPM2D BINA INSAN, SPK NO:121/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/473/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/474/XII/2022 TGL 14DESEMBER 2022 SUMBER DANA DBH PROVINSI.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
15	PEMBAYARAN LS BINTEK BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG, LKPK ANUGRAH REJEKI, SPK NO:113/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/479/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/480/XII/2022 TGL 14DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
16	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI GEMAR MAKAN IKAN DALAM RANGKA PENURUNAN STANTING, PKBM SEKOLAH RAKJAT, SPK NO:110/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/497/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/498/XII/2022 TGL 14DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
17	PEMBAYARAN LS PELATIHAN PENANGANAN HASIL PERIKANAN, GENERASI SOSIAL PEDULI INDONESIA (GSPi), SPK NO:112/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/476/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/477/XII/2022 TGL 14DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
18	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI PENGGUNAAN ALAT BANTU PENANGKAPAN MODERN, PKBM QIRA'AH, SPK NO:114/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/500/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/501/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
19	PEMBAYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA (PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN) DAN MAKANAN & MINUMAN RAPAT PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00
20	PEMBAYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA (PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN) DAN MAKANAN & MINUMAN RAPAT PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.700.000,00
21	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA KEGIATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.460.000,00
22	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00
23	PEMBAYARAN LS PENGADAAN SAMPAN KEL. RANGAS, SPK NOMOR: 43/SPK/DKP-PENG/XII/2022 TANGGAL 09 DESEMBER 2022, BAST NOMOR: 905/380/BAST/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022, BAP NOMOR: 905/381/BAP/X/2021 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.900.000,00
24	PEMBAYARAN LS PENGADAAN KAPAL 5GT KELOMPOK NELAYAN DI KEL. TOTOLI KEC. BANGGAE, SPK NO : 37/SPK/DKP-PENG/XI/2022 TGL 04 NOVEMBER 2022, BAST NO : 905/374/BAST/XII/2022 TGL 09 DESEMBER 2022, BAP NO: 905/375/BAP/X/2021 TGL 09 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	119.500.000,00
25	PEMBAYARAN LS PENGADAAN MESIN KATINTING LENGKAP DENGAN PERAHUDAN ALAT TANGKAP LINGK.RANGAS, KAB.MAJENE BANGGAE, SPKNO:39/SPK/DKP-PENG/XII/2022TGL01DESEMBER2022, BASTNO:905/428/BAST/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022, BAP NO:905/429429/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.900.000,00
26	PEMBAYARAN LS PENGADAAN MESIN KATINTING BANGGAE, SPK NOMOR: 44/SPK/DKP-PENG/XII/2022 TANGGAL 08 DESEMBER 2022, BAST NOMOR: 905/452/BAST/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022, BAP NOMOR: 905/453/BAP/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA SILPA	BELANJA BARANG DAN JASA	46.300.000,00
27	PEMBAYARANLS PENGADAANMESINKATINTINGNELAYAN, CV.MUBARAK, SPK NO:40/SPK/DKP-PENG/XII/2022 TGL1DESEMBER2022, BASTNO:905/458/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAPNO :905/459/BAP/XII/2022TGL14DESEMBER2022 SUMBER DANA SILPA RP46.434.700, SUMBERDANA LLPAD RP3.465.300	BELANJA BARANG DAN JASA	49.900.000,00
28	PEMBAYARAN LS PENGADAAN MESIN KATINTING/TEMPEL, SPK NOMOR: 46/SPK/DKP-PENG/XII/2022 TANGGAL 09 DESEMBER 2022, BAST NOMOR: 905/464/BAST/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022, BAP NOMOR: 905/465/BAP/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	141.500.000,00
29	PEMBAYARAN LS PENGADAAN JARING UNTUK NELAYAN DI KEC. SENDANA, SPK NOMOR: 45/SPK/DKP-PENG/XII/2022 TANGGAL 08 DESEMBER 2022, BAST NOMOR: 905/467/BAST/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022, BAP NOMOR: 905/468/BAP/XII/2022 TGL 14 DESEMBER2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	99.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
30	PEMBAYARAN LS PENGADAAN PUKAT, CV. HAJAR HASWAT, SPK NOMOR: 41/SPK/DKP-PENG/XII/2022 TANGGAL 07 DESEMBER 2022, BAST NOMOR: 905/455/BAST/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022, BAP NOMOR: 905/456/BAP/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.800.000,00
31	PEMBAYARAN LS NORMALISASI TAMBAK DUSUN BULUTUPANG, KAB. MAJENE, PAMBOANG, LALAMPANUA, SPK NO : 47/SPK/DKP-REHAB/XII/2022 TGL12DESEMBER2022, BAST NO : 905/515/BAST/XII/2022 TGL22DESEMBER2022, BAP NO : 905/516/BAP/XII/2022 TGL 22 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	89.889.000,00
32	PEMBAYARAN PUBLIKASI KEGIATAN DAN ADVENTURIAL, SPK NOMOR: 95/SPK/DKP-PENG/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 , BAST NOMOR: 905/395/BAST/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022, BAP NOMOR: 905/396/BAP/XII/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00
33	PEMBAYARAN BELANJA ALAT BAHAN KEGIATAN KANTOR UNTUK PENGELOLAAN INFLASI SESUAI NOTA PESANAN : 002/NPB-ATK DAU/XII/2022 TANGGAL 02 DESEMBER 2022 PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU PMK 134	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
34	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI MEMPERKUAT PENYELAMATAN EKOSISTEM PESISIR LAUT, SPK NO:93/SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/470/BAST/XII/2022 TGL 14 DESEMBER2022, BAP NO:905/471/XII/2022 TGL 14 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
35	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI TRANSPLANTASI TERUMBU KARANG, LINKAR SULBAR, SPK NO:108SPS/DKP/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022, BAST NO: 905/494/BAST/XII/2022 TGL 14DESEMBER2022, BAP NO:905/495/XII/2022 TGL14DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
36	PEMBAYARAN LS PENGAWASAN NORMALISASI TAMBAK, CV. AKBAR CONSULTANT, SPK NO : 53/SPK/DKP-PGW/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022, BAST NO : 905/524/BAST/XII/2022 TGL 22 DESEMBER 2022, BAP NO : 905/525/BAP/XII/2022 TGL 22 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00
37	PEMBAYARAN LS PERENCANAAN NORMALISASI TAMBAK, CV. GOLEM CONSULTANT, SPK NO : 52/SPK/DKP-PRC/XII/2022 TGL 07 DESEMBER 2022, BAST NO : 905/527/BAST/XII/2022 TGL 22 DESEMBER 2022, BAP NO : 905/528/BAP/XII/2022 TGL 22 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.900.000,00
38	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 094/355.C/2022 TANGGAL 14 AGUSTUS 2022 PADA KEGIATAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	14.008.000,00
39	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS : 094/485.A/2022 TANGGAL 5 OKTOBER 2022 PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	3.620.000,00
40	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS : 094/561/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER 2022 PADA KEGIATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00
41	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS : 094/570/2022 TANGGAL 10 MEI 2022 PADA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
42	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 094/461/2022 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2022 PADA KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
43	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 090/1752/2022 TANGGAL 18 JULI 2022 PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	20.289.300,00
44	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS :094/436.B/2022 TGL 31 AGUSTUS 2022 DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS : 094/277.A/2022 TGL 29 JUNI 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.672.500,00
45	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS :094/436.B/2022 TGL 31 AGUSTUS 2022 DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS : 094/277.A/2022 TGL 29 JUNI 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	9.277.000,00
46	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS : 094/534/2022 TANGGAL 9 NOVEMBER 2022 PADA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	3.260.000,00
47	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS:094/467.C/2022 TGL27OKTOBER2022 DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS:094/592/2022 TGL2DESEMBER2022 PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	720.000,00
48	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS:094/467.C/2022 TGL27OKTOBER2022 DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS:094/592/2022 TGL2DESEMBER2022 PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.013.000,00
49	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS:094/534/2022 TGL 09 NOVEMBER 2022 DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS :094/551/2022 TGL 28 OKTOBER 2022 PADA KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000,00
50	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI SURAT TUGAS:094/534/2022 TGL 09 NOVEMBER 2022 DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS :094/551/2022 TGL 28 OKTOBER 2022 PADA KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN SUMBER DANA LLPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
51	PEMBAYARAN LS PENGADAAN BELANJA MODAL KOMPUTER, CV. QK. KOMPUTER, SP NO : 48/SPS/DKP-PENG/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022, BASTB NOMOR: 905/491/BASTB/XII/2022 TANGGAL 15 DESEMBER 2022, BAP NO : 905/492/BAP/XII/2022 TGL 15 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA MODAL	3.770.000,00
52	PEMBAYARAN LS PENGADAAN BELANJA MODAL KOMPUTER, CV. QK. KOMPUTER, SP NO : 48/SPS/DKP-PENG/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022, BASTB NOMOR: 905/491/BASTB/XII/2022 TANGGAL 15 DESEMBER 2022, BAP NO : 905/492/BAP/XII/2022 TGL 15 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LLPAD	BELANJA MODAL	19.665.000,00
53	REHABILITASI AULA DEMPOLT TA 2022, BAST PEKERJAAN I NOMOR: 49/PHO/XII/2022. TANGGAL 26 DESEMBER 2022, BAST PEKERJAAN II, NOMOR: 49/FHO/XII/2022. TANGGAL 26 DESEMBER 2022, BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN TANGGAL 26 DESEMBER 2022, BAP DAN BAPP TANGGAL 26 DESEMBER 2022	BELANJA MODAL	39.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2023		78.300.000,00
1	PEMBAYARAN LS JASA KONSULTAN PENGAWAS SPK : 35/SPK/DKP-PGW/XI/2023 , 22 SEPTEMBER 2023, BAST : 905/391/BAST/XII/2023, 04 DESEMBER 2023, BAP : 905/392/BAP/XII/2023, 12 DESEMBER 2023, SUMBER DANA DAU-PEND	BELANJA BARANG DAN JASA	28.600.000,00
2	PEMBAYARAN LS SOSIALISASI KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) KEPADA MASYARAKAT SPK : 94/SPS/DKP/XI/2023 , 20 NOVEMBER 2023, BAST : 905/385/BAST/XI/2023, 30 NOVEMBER 2023, BAP: 905/386/BAP/XII/2023, 12 DESEMBER 2023, SUMBER DANA DAU-PEND	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
R	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		1.624.996.248,00
	TAHUN 2022		1.576.530.428,00
1	BAYAR PEMELIHRAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PD SUB KEGIATAN PEMELIHRAAN/REHABILITASI GEDUNG KNTR DISTANAKBUN, NOTA PESNAN NO. 900/2776/XII/2022 TGL5 DESEMBER 2022, BAPP NO. 520/2789/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 06 DESEMBER 2022, TERLAMPIR (LAIN" PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.050.400,00
2	BAYAR PEMELIHRAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR, BAHAN BAKU PD SUB KEGIATAN PEMELIHRAAN/REHABILITASI GEDUNG KNTR DISTANAKBUN, NOTA PESNAN NO. 900/2781/XI/2022 TGL5 DESEMBER 2022, BAPP NO. 520/2705/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 06 DESEMBER 2022, TERLAMPIR (LAIN" PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00
3	BAYAR BIAYA PEMB. BENIH CABE PD SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPK PERUBAHAN IKLIM(DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEB SESUAI SURAT PESANAN NO.900/2873.A/BAPP/XII/2022, DAN BAP NO. 900/2834/BAP/XII/2022 TERLAMPIR (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00
4	BAYAR 100% PKRJN PNGDN BIBIT KOPI KT TANDO TUNGGAL SUB KEGIATAN PENANGNAN DMPK PERUB.IKLIM (DPI)TNMN PNGN, HORTI, DAN PERKEB, SPK NO.10/SPK/DISTANAKBUN-BUN/APBD-P/XII/2022 TGL13 DES 2022, BASTP NO. 520/2972/BASTHP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL19 DES 2022(LAIN" PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.800.000,00
5	BAYAR BAHN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN PENGDN BIBIT KMBING LINGK.PMBLR SUB KEGIATAN PENGADN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBRNYA DR DAERH KAB/KOTA LAIN, SPK NO.05/SPK/DISTANAKBUN-NAK/IX/2022 TGL8 SEP 2022, BASTHP NO.520/2334/BASTHP/DISTANAKBUN/X/2022 TGL21OKT 2022 (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	47.500.000,00
6	BAYAR BELANJA SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM/BAHN/ALAT/MATERIAL PRAKTK/PRAKTIKM (SARUNG TANGN IB) SUB KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANMN, NOTA PESANAN NO.520/2770/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL9 DES 2022 BAPP NO.520/2871/BAPP/DISTANAKBUN/XII/2022 (LAIN" PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
7	BAYAR BLNJA SUKU CADANG ALT PERTANIAN/PLASTIK SHEATH IB SUB KEGIATAN PENINGKTN KUALITAS SDG HEWN/TANMN, NOTA PESANAN NO.520/2770.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL9 DES 2022 BAPP NO.520/2872/BAPP/DISTANAKBUN/XII/2022, BAP NO.900/2874/BAP/DISTANAKBUN/XII/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
8	BAYAR BELANJA SUKU CADANG ALAT PERTANIAN PD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DISTANAKBUN KAB. MAJENE TA 2022 SESUAI NOTA PESANAN NO.52/2626A/XII/2022 TGL 1 DESEMBER 2022 DAN BAP NO.900/2702A/XII/2022 TGL7 DESEMBER 2022 (DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.369.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
9	BAYAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN SARANA PERTANIAN (PARANG) SALUTALLANG SUB KEGIATAN PENDMPINGN PENGGNAAN SARNA PENDUKUNG PERTNIAN, SPK NO.037/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/X/2022 TGL7 OKTBR 2022, BASTHP NO.520/2438.A/DISTANAKBUN/11/2022 TGL 4 NOP 2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	28.200.000,00
10	BAYAR ALAT/BAHAN KEG KANTOR-PENGGAANDAN, SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI (DAK FSK) TA 2022 SESUAI BAPP NO. 900/3017/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 20 DESEMBER 2022 TERLAMPIR (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.999.600,00
11	BAYAR ALT/BHN U KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER PD SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM BID TNMN PANGN, HORTI, PERKEB PETRNKN DAN KSHTNHNW BAPP NO.520/2671.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL5 DESMBR 2022 DAN BAPB NO.520/1732/BAPB/XII/2022 TGL2 DES 2022 (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	295.000,00
12	BAYAR ALAT/BAHN U/KEG KANTR-KERTAS DAN COVER PD SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC. DAN DESA 2022, SESUAI BAPP NO. 900/3020/2022 TGL 20 DESEMBER 2022 DAN BAP NO. 900/3043/2022 TGL 21 DESEMBER 2022 TERLAMPIR (DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	323.000,00
13	BAYAR BELANJA ALAT/BAHN KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER PD SUB KEGIATAN PENDAMPINGANUNIT USAHA HEWAN TA 2022 DISTANAKBUN SESUAI BAPP NO.900/3073/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 22 DESEMBER 2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	340.000,00
14	BAYAR ALAT/BAHAN KEG KNTR KERTS COVER SUB KEGIATAN PENGAWASAN, PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK 2022, SESUAI NOTA PESANAN NO.900/2037/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL24 NOVEMBER 2022 DAN BAPP NO. 900/3009/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL20 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	499.000,00
15	BAYAR BELANJA ALAT/BAHAN KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DR DAERAH KAB/KOTA LAIN, SESUI NOTA PESNAN NO.520/2673.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 6 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO.520/2654.A/BAPP/DISTANAKBUN/XII/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	762.000,00
16	BAYAR BELANJA ALAT/BAHN KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER PD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PEMNFAATAN SARANA DAN PRASARNA PENYULUHN PERTNIAN TA 2022 SESUAI BAPP NO.800/3023/2022 TGL 20 DESEMBER 2022 DAN BAP NO. 900/3046/2022 TGL 21 DESEMBER 2022 (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	942.000,00
17	BAYAR KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENGENDLIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN HORTIKULTUR DAN PERKEBUNAN DISTANAKBUN 2022, BAPP NO.520/3013/2022 TGL20 DESEMBER 2022 DAN NOTA PESNAN NO. 900/2693.A/DISTANAKBUN/2022 TGL 5 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	989.250,00
18	BAYAR ALAT/BAHAN KEG KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PEMB REHABILITASI DAN PEMELIHARAANN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI (DAK FSK) TA 2022 SESUAI BAPP NO. 900/2715/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 8 DESEMBER 2022 TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	9.975.000,00
19	BAYAR BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK PD SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN UNIT USAHA HEWAN TA 2022 DISTANAKBUN SESUAI BAPP NO.900/3074/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 22 DESEMBER 2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
20	BAYAR BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER PADA SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN UNIT USAHA HEWAN TA 2022 DISTANAKBUN SESUAI BAPP NO. 900/3076/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 22 DESEMBER 2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	345.000,00
21	BAYAR ALAT/BAHAN KANTOR - BAHAN KOMPUTER SUB KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN, SESUAI NOTA PESANAN NO.520/2690.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 7 DESEMBER 2022 BAPP NO. 520/2703.A/BAPP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 7 DESEMBER (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	345.000,00
22	BAYAR BELANJA ALAT/BAHAN KANTOR BAHAN KOMPTR SUB KEGIATAN PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KAB/KOTA LAIN 2022 SESUAI NOTA PESANAN NO. 520/2651.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 5 DESEMBER, BAPP NO.520/2653.A/BAPP/DISTANAKBUN/XII/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	436.000,00
23	BAYAR BELNJA ALAT/BAHAN KOMPUTER SUB KEGIATAN PENGAWASAN, PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK 2022, SESUAI NOTA PESANAN NO.900/3037.A/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL24 NOVEMBER 2022 DAN BAPP NO. 900/3011/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL20 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	437.000,00
24	BAYAR ALAT/BAHN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC. DAN DESA 2022, SESUAI BAPP NO. 900/3021/2022 TGL 20 DESEMBER 2022 DAN BAP NO. 900/3044/2022 TGL 21 DESEMBER 2022 TERLMPPIR (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	710.000,00
25	BAYAR BELANJA ALAT/BAHN KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARNA PENYULUHAN PERTANIAN TA 2022 SESUAI BAPP NO.800/3024/2022 TGL 20 DESEMBER 2022 DAN BAP NO. 900/3047/2022 TGL 21 DESEMBER 2022 (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	856.000,00
26	BAYAR BAHAN KOMPUTER SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN HORTIKULTUR DAN PERKEBUNAN DISTANAKBUN 2022, BAPP NO.520/3015/2022 TGL20 DESEMBER 2022 DAN NOTA PESNAN NO.900/2692.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 5 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.179.500,00
27	BAYAR BIAYA PEMBELIAN DOLOMIT/SELIKA SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN. SPK NO.003/SPK/PPK-HORTI/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL13 DESMBER 2022, BASTP NO.520/2959/BASTP/XII/2022 TGL19 DESMBER 2022 (DAU PMK134)	BELANJA BARANG DAN JASA	28.450.000,00
28	BAYAR OBAT-OBATAN LAINNYA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISASI PENGGANGGU TUMBUHN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2022, BAPP NO.520/2706/2022 TGL7 DESEMBER 2022 DAN NOTA PESANAN NO. 520/2606/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL30 NOV 2022, TRLMPIR.(LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.384.000,00
29	BAYAR 100% PEKERJAAN BELNJA OBAT-OBATAN LAINNYA SUB KEGIATAN PENJAMINAN PEREDARAN HPT BAHAN PAKAN/PAKAN, NOTA PESANAN PEMBELIAN BARANG NO.520/2588/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL25 NOVEMBER 2022, BAPP NO.520/2661/BAPP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL5 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.749.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
30	BAYAR OBAT-OBATAN LAINNYA SUB KEGIATAN PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KAB/KOTA LAIN, NOTA PESANAN NO. 520/2587/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 25 NOVEMBER 2022, BAPP NO.520/2676.A/BAPP/DISTANAKBUN/XII/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.048.000,00
31	BAYAR BIAYA PEMBELIAN OBAT-OBATAN LAINNYA SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, TA 2022 SESUAI SURAT PESNANNO. 520/2809.A/XII/2022, BAPP NO. 520/2839/BAPP/XII/2022 DAN BAPNO.900/2869/BAP/XII/2022 (DAU PMK 134)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.260.000,00
32	BAYAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK KOMPOS SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, SPK NO.004/SPK/PPK-HORT/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 13 DESEMBER 2022, BASTHP NO.520/2957/BASTHP/DISTANAKBUN/XII/2022 (DAU PMK 134)	BELANJA BARANG DAN JASA	32.900.000,00
33	BAYAR PEMBELIAN BAHAN KOMPUTER SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN. NOTA PESANAN NO.520/3113/XII/2022 TGL 5 DESEMBER 2022, BASTP NO. 520/3114/BASTP/XII/2022 TGL 7 DESEMBER 2022, BAP NO. 900/3115/XII/2022 TGL7 DES (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	675.000,00
34	BAYAR PEMBELIAN KERTAS DAN COVER SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, NOTA PESANAN NO.520/3116/XII/2022 TGL 5 DESEMBER 2022, BASTP NO. 520/3117/BASTPB/XII/2022, BAP NO. 900/3118/XII/2022 TGL 7 DESMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	933.000,00
35	BAYAR PEMBELIAN ATK SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, NOTA PESANAN NO. 520/3110/XII/2022 TGL 5 DESEMBER 2022, BASTP NO. 520/3111/BASTP/XII/2022 TGL 7 DESEMBER 2022, BAP NO.900/3112/XII/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
36	BAYAR 100% PEKERJAAN BIAYA PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGLOLAAN (KEC.BANGGAE TIMUR, PAMBOANG, ULUMANDA) SUB KEGIATAN PEMB REHAB DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGSI USAHA TANI SPK NO.038/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022TGL28 NOPMBR 2022, BASTP NO.520/2744.A/DISTANAKBUN/12/2022 TGL9DES 2022 (LL PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00
37	BAYAR BARANG PAKAI HABIS (ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR) SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI SESUAI BAPP NO. 900/1940/DISTANAKBUN/IX/2022 TGL 9 SEPTEMBER 2022 (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.202.000,00
38	BAYAR BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT (PERJALANAN DINAS DALAM KOTA) SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI, BAPP NO.900/2853/XII/2022 TGL12 DES 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2622/XII/2022 TGL 01 AGUSTUS 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.599.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
39	BAYAR RETENSI 5% PEKERJAAN REHABILITASI SALURAN IRIGASI, DUSUN PAKU, DESA TANDIALLO, KEC.ULUMANDA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI SPK NO.039/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL12 DES 2022, BASTP NO.520/3025/DISTANAKBUN/12/2022 TGL20 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.685.000,00
40	BAYAR BARANG PAKAI HABIS (ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR) SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI BAPP NO. 900/1934/DISTANAKBUN/IX/2022 TGL 8 SEPTEMBER 2022 (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00
41	BAYAR RETENSI 5% PENINGKATAN JALAN TANI RABAT BETON LINGK. SALABULO (KAWASAN <i>FOOD ESTATE</i>) SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI SPK NO.042/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL14 DES 2022, BASTP NO.520/3026/DISTANAKBUN/12/2022 TGL20 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.725.000,00
42	BAYAR BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT (PERJALANAN DINAS BIASA) SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI, BAPP NO.900/2857/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2695/XII/2022 TGL 7 DESEMBER 2022 (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.320.000,00
43	BAYAR 95% PENINGKATAN JALAN TANI RABAT BETON LINGK. SALABULO (KAWASAN <i>FOOD ESTATE</i>) SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI SPK NO.042/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL14 DES 2022, BASTP NO.520/2956.A/DISTANAKBUN/12/2022 TGL19 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00
44	BAYAR BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT (PERJALANAN DINAS DALAM KOTA) SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI, BAPP NO.900/2859/XII/2022TGL 12 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2589/XII/2022 TGL 25 NOVEMBER 2022 (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.678.000,00
45	BAYAR RETENSI 5% PEKERJAAN JALAN USAHA TANI DUSUN REA TIMUR DUSUN BONDE-BONDE SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI SPK NO.028/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/VIII/2022 TGL 18 AGUSTUS 2022, BAP NO.520/2068/DISTANAKBUN/09/2022 TGL 28 SEPTEMBER 2022 (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.070.000,00
46	BAYAR RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI DUSUN KAMPUNG BARU DUSUN BUTTNGN SUBKEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI (DAK) SPKS NO.029/SPK/PA-PSP/DAK/DISTANAKBUN/VIII/2022 TGL18 AGTS 2022, BASTP NO.520/2018/DISTANAKBUN/09/2022 TGL21 SEP 2022 (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.075.000,00
47	BAYAR RETENSI 5% PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI DUSUN PALLARNGAN SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI SPK NO.030/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/VIII/2022 TGL 19 AGUSTUS 2022, BAP NO.520/2459/DISTANAKBUN/11/2022 TGL 8 NOVEMBER 2022 (DAU PMK07)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.075.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
48	BAYAR BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT (PERJALANAN DINAS BIASA) SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI BAPP NO.900/2847/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2638/XII/2022 TGL 02 DESEMBER 2022 (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.100.000,00
49	BAYAR BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT (PERJALANAN DINAS DALAM KOTA) SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN, BAPP NO.900/2849/XII/2022 TGL 12 DES 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2639/XII/2022 TGL 02 DESEMBER 2022 (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.050.000,00
50	BAYAR 100% PEKERJAAN BIAYA PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI (DAK) SPKS NO. 032/SPK/PA-PSP/DPPP/IX/2022 TGL 2 SEPTEMBER 2022, BASTP NO. 520/2591/DISTANAKBUN/11/2022 TGL 28 NOVEMBER 2022 (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00
51	BAYAR BIAYA PEMBELIAN ORGANIK CAIR SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN SPK NO.002/SPK/PPK-HORTI/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 13 DESEMBER 2022, BASTP NO. 520/2958/BASTPB/XII/2022 TGL 19 DESEMBER 2022 (DAU PMK134)	BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000,00
52	BAYAR 95% PEKERJAAN REHABILITASI SALURAN IRIGASI, DUSUN PAKU, DESA TANDIALLO, KEC.ULUMANDA SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI SPK NO.039/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 12 DES 2022, BASTP NO.520/2958.A/DISTANAKBUN/12/2022 TGL 19 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	51.015.000,00
53	BAYAR 95% PENINGKATAN JALAN TANI RABAT BETON LINGK. SALABULO (KAWSN FOOD ESTATE) SUB KEGIATAN PEMB REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI (DAU PMK 07) SPK NO.042/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 14 DES 2022, BASTP NO.520/2956.A/DISTANAKBUN/12/2022 TGL 19 DES 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	82.975.000,00
54	BAYAR 65% PEKERJAAN JALAN USAHA TANI DUSUN REA TIMUR DUSN BONDE-BONDE SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI SPK NO.028/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/VIII/2022 TGL 18 AGUSTUS 2022, BAP NO.520/2066/DISTANAKBUN/09/2022 TGL 28 SEPTEMBER 2022 (DAU PMK 07)	BELANJA BARANG DAN JASA	104.910.000,00
55	BAYAR ANGSURAN BLN 65% PEKRJ. PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI DUSN KAMPUNG BARU DUSUN BUTTNGN SUB KEGIATAN PEMB.REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALN USAHA TANI (DAK)SPKS NO.029/SPK/PA-PSP/DAK/DISTANAKBUN/VIII/2022 TGL 18 AGTS 2022, BASTP NO.520/2015/DISTANAKBUN/09/2022 TGL 20 SEP 2022 (DAU PMK07)	BELANJA BARANG DAN JASA	104.975.000,00
56	BAYAR 65% PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI DUSUN PALLARANGAN SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI SPK NO.030/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/VIII/2022 TGL 19 AGUSTUS 2022, BAP NO. 520/2458/DISTANAKBUN/11/2022 TGL 8 NOVEMBER 2022 (DAU PMK07)	BELANJA BARANG DAN JASA	104.975.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
57	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TA 2022, SESUAI BAPP NO. 520/2704/2022 TGL 7 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2703/2022 TGL 7 DESEMBER 2022, TERLAMPIR (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	841.000,00
58	BAYAR SEBESAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK ORGANIK CAIR PADA SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN, SPK NO.034/SPKS/PA-PSP/DISTANAKBUN/X/2022 TGL 3 OKTBR 2022, BASTHP NO.520/2496/DISTANAKBUN/11/2022 TGL 14 NOP 2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	19.960.000,00
59	BAYAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAKAO KT. BUNGA PELITA II SUB KEGIATAN PENANGNAN DMPK PERUB.IKLIM (DPI)TNMN PNGN, HORTI, DAN PERKEB, SPK NO.09/SPK/DISTANAKBUN-BUN/APBD-P/XII/2022 TGL 14 DES 2022, BASTP NO. 520/2975/BASTHP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL19 DES 2022 (DID)	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00
60	BAYAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR/DRUM DUSUN BATTALOPI SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN, SPK NO.035/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/X/2022 TGL4 OKTBR 2022, BASTHP NO.520/2437/DISTANAKBUN/11/2022 TGL 4 NOP 2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00
61	BAYAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN SARANA PERTANIAN (<i>HAND SPRAYER</i>) SALUTALLANG SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN, SPK NO.036/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/X/2022 TGL4 OKTBR 2022, BASTHPNO.520/2438/DISTANAKBUN/11/2022 TGL 4 NOVEMBER 2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	28.300.000,00
62	BAYAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAKAO KT. BUNGA PELITA II SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI)TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN, SPK NO.09/SPK/DISTANAKBUN-BUN/APBD-P/XII/2022 TGL14 DES 2022, BASTP NO.520/2975/BASTHP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL19 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	29.700.000,00
63	BAYAR 100% PEKERJAAN BANTUAN BIBIT KOPI DESA TALU BANUA SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI)TANAMAN PANGAN, HORTUKULTURAN DAN PERKEBUNAN SPK NO.11/SPK/DISTANAKBUN-BUN/APBD-P/XII/2022 TGL14 DES 2022, BASTP NO.520/2978/BASTHP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL19 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	47.300.000,00
64	BAYAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN PENANGKAL HAMA BABI KT.SITANGGRAN SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN, SPK NO.040/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL13DES 2022, BASTHP NO.520/2898/DISTANAKBUN/12/2022 TGL 16 DES 2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	48.100.000,00
65	BAYAR SEBESAR 100% <i>HAND</i> TRAKTOR KT. SIPAPARUA PADA SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN, SESUAI SPK NO. 041/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL14 DESEMBER 2022, BASTHP NO.17/BASTHP/CV.CP/XII/2022 TGL 16 DESEMBER 2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
66	BAYAR 100% PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KOPI MALUNDA SUB.KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTUKULTURAN DAN PERKEBUNAN SPK NO.08/SPK/DISTANAKBUN-BUN/APBD-P/XII/2022 TGL 13 DES 2022, BASTP NO. 520/2969/BASTHP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 19 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	99.600.000,00
67	BAYAR MAKAN DAN MINUM PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2022, SESUAI BAPP NO.900/3022/2022 TGL 20 DESEMBER 2022 DAN BAP NO. 900/3045/2022 TGL 21 DESEMBER 2022 TERLAMPIR (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00
68	BAYAR PEKERJAAN PENYEDIAAN BAHAN BACAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DISTANAKBUN SESUAI SPKS NO. 027/2543.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 21 DESEMBER 2022, BASTP NO. 800/2995/BAPB/XII/2022 TGL 21 DESEMBER 2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00
69	BAYAR UANG LEMBUR PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAP. KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD TA 2022 DISTANAKBUN KAB. MAJENE TA 2022 SESUAI SPK NO. 900/2019/DISTANAKBUN/IX/2022 TGL 21 SEPTMBER 2022, DAN BAPP NO.520/2118/DISTANAKBUN/X/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.360.000,00
70	BAYAR UANG LEMBUR UNTUK KEBUTUHAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DISTANAKBUN 2022 SPK NO. 090/2415/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL 3 NOVEMBER 2022. BAPP NO.520/2493/2022 TGL 14 NOV 2022, DAFTAR HADIR DAN PEMBAYARN TERLAMPIR.(DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.412.000,00
71	BAYAR BIAYA KERJA LEMBUR SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD TA 2022 DISTANAKBUN KAB. MAJENE TA 2022 SESUAI SPK NO. 090/2098//DISTANAKBUN/IX/2022 TGL 30 SEPTEMBER 2022 BAPP NO. 520/2463/2022 TGL 3 OKTOBER 2022, DAFTAR LEMBUR TERLAMPIR (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.448.000,00
72	BAYAR 100% PEKERJAAN JASA KONSULTASI SID/DED USULAN KEG DAK TA 2023 SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGN IRIKSI USAHA TANI, SPK NO.003/SPK/PA-PSP/DISTANAKBUN/VII/2022 TGL 06 JULI 2022, BASTHP NO. 520/1683.A/DISTANAKBUN/08/2022 TGL 1 AGUSTUS 2022(LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	34.500.000,00
73	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 2022 SESUAI DAFTAR NOMINATIF NO.900/2787/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO. 900/2788/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 TERLAMPIR (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	228.140,00
74	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENGEMB.KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KEC.DAN DESA TA 2022 SESUAI DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2809/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO. 900/2810/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 TERLAMPIR.(DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	545.800,00
75	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DAN GANGGUN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKBUNAN, BAPP NO. 520/2694/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 6 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2687/DISTANAKBUN/XII/2022 (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
76	BAYAR PERJALANAN DINAS DLM KOTA SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN PASCA BENCNA ALAM BID TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKBUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, BAPP NO. 520/2692/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL6 DESEMBER 2022 DAN DAFTN NOMINATIF NO.900/2685/DISTANAKBUN/XII/2022 (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00
77	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHN PERTANIAN TA 2022, SESUAI DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2830/2022 TGL 13 DESEMBER 2022, DAN BAPP NO. 900/2831/2022 TGL 13 DESEMBER 2022 TERLAMPIR. (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	820.000,00
78	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA, SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN/LCP2B 2022, BAPP NO.900/2603/BAPP/XI/2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2539/XI/2022 21 NOV2022. (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00
79	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DISTANAKBUN KAB. MAJENE TA 2022 SESUAI BAPP NO.520/2646/XII/2022 TGL 2 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO. 520/2645/XII/2022 TGL 2 DESEMBER 2022 (DAU NON EARMARK)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00
80	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS DISTANAKBUN KAB. MAJENE 2022, BAPP NO.520/2658/XII/2022 TGL 5 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2657/XII/2022 TGL 5 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00
81	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENDAMPINGN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN DISTANAKBUN, BAPP NO.900/2555/BAPP/XI/2022 TGL22 NOVEMBER 2022 DAN DAFTN NOMNTF PERJALANAN DINAS BIASA NO.900/2553/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL22 NOVMBR 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.790.000,00
82	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENJAMINAN PEREDARAN HPT BAHAN PAKAN/PAKAN DISTANAKBUN, SESUAI BAPP NO. 900/2513/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL16 NOVEMBER 2022 DAN DAFTN NOMNTF PERJALANAN DINAS BIASA NO.900/2512/DISTANAKBUN/XI/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00
83	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS DISTANAKBUN KAB. MAJENE TA 2022, BAPP NO.520/2660/XII/2022 TGL 5 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2659/XII/2022 TGL5 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00
84	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN UNIT USAHA HEWAN DAN PRODUK HEWAN TA 2022 DISTANAKBUN SESUAI BAPP NO. 900/2679/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 6 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS BIASA, TERLAMPIR. (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.449.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
85	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KAB/KOTA LAIN TA 2022 SESUAI BAPP NO.900/2881/DISTANAKBUN/XII/2022 DAN DAFT R NOMINATIF NO.900/2880/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 16 DESEMBER 2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.640.000,00
86	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) HORTIKULTURA TA 2022, SESUAI BAPP NO. BAPP/900/2751/2022 TGL 09 DESEMBER 2022. TERLAMPIR DAFTAR NOMINATIF (DAU PMK 134)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.719.708,00
87	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAN JALAN USAHA TANI DISTANAKBUN 2022, BAPP NO.900/2863/XII/2022 TGL 15 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINTIF PERJALNAN DINAS DALAM KOTA NO. 900/2075/IX/2022 TGL 28 SEPTEMBER 2022 (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.010.000,00
88	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI DISTANAKBUN 2022, BAPP NO.900/2861/XII/2022 TGL 15 DESEMBER 2022 DAN DAFT R NOMINATIF PERJALNAN DINAS DALAM KOTA NO. 900/2040/IX/2022 TGL 26 SEPTEMBER 2022 (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.010.000,00
89	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI KOMODITAS, TEKNOLOGI, DAN SPESIFIK LOKAL SESUAI BAPP NO.900/2948/XII/2022 TGL 16 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2530/XI/2022 TGL 18 NOVEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.010.000,00
90	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA, PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD DISTANAKBUN TA 2022 SESUAI DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN NO. 800/3136/XII/2022 DAN BAPP NO. 520/3137/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 23 DES 2022, (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.160.000,00
91	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TA 2022, SESUAI BAPP NO. 520/2738/2022 TGL 8 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2737/2022 TGL 8 DESEMBER 2022, TERLAMPIR (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.367.000,00
92	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TA 2022, SESUAI DAFTAR NOMINATIF NO. 800/3124/XII/2022 DAN BAPP NO. 520/3123/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL 23 DESEMBER 2022, TERLAMPIR (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.870.000,00
93	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) HORTIKULTURA, SESUAI BAPP NO. 900/2750/2022 TGL 9 DESEMBER 2022, TERLAMPIR DAFTAR NOMINATIF (DBH PMK 134)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.875.460,00
94	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KEC DAN DESA TA 2022, DAFTAR NOMINATIFPEMBAYARAN NO.900/2785/2022 TGL 12 DESEMBER 2022, DAN BAPP NO.900/2786/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 TERLAMPIR.(DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	301.570,00
95	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA, PADA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN, DAFTAR NOMINATIF NO.520/2727/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 8 DES 2022 DAN BAPP NO. 900/2774/DISTANAKBUN/XII/2022. (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
96	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA TA 2022 SESUAI DAFTAR NOMINATIFPEMBAYARAN NO. 900/2816/2022 TGL 13 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO. 900/2817/2022 TGL 13 DESEMBER 2022, TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	729.000,00
97	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA MONITORING DAN EVALUASI PERKEMBANGAN HARGA PASAR SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN PASCA BENCANA NON ALAM BERSIFAT ZOONOSIS SESUAI SURAT TUGAS NO.090/817/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL18 NOV 2022 DAN BAPP NO. 900/2698/XII/2022 TGL7 DESEMBER 2022(DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	860.000,00
98	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN UNIT USAHA HEWAN TA 2022 DISTANAKBUN SESUAI BAPP NO. 900/2780/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 12 DESEMBER 2022, DAN DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS BIASA TERLAMPIR. (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	920.000,00
99	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN, PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKBUNAN, BAPP NO. 520/2693/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL6 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2686/DISTANAKBUN/XII/2022 (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.190.000,00
100	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA, SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDSASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, DAFTAR PEMBAYARN NO.800/2949.A/XII/2022 TGL 16 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO.800/2950/DISTANAKBUN/XII/2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00
101	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN TA 2022 DISTANAKBUN SESUAI BAPP NO.900/2469/DISTANAKBUN/X/2022 TGL10 NOVEMBER 2022, DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2466/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL 10 NOVEMBER 2022, (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000,00
102	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DISTANAKBUN KAB. MAJENE TA 2022, BAPP NO.520/2644/XII/2022 TGL 2 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO. 520/2643/XII/2022 TGL 2 DESEMBER 2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.210.000,00
103	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG LAINNYA PADA DISTANAKBUN, SESUAI BAPP NO. 520/2699/XII/2022 TGL 7 DESEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS BIASA NO. 900/2681/XII/2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00
104	BAYAR PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENGWSAN PENGGUNAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIKASI LOKASI DAFTAR NOMINATIF NO.520/1759/DISTANAKBUN/VIII/2022 TGL10 AGS 2022 DAN BAPP NO. 900/1770/DISTANAKBUN/VIII/2022 TGL 11 AGSTS 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.710.000,00
105	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 2022 SESUAI BAPP NO. 900/2555.A/BAPP/XI/2022 TGL22 NOVEMBER 2022 DAN DFTAR NOMINATIF PERJLANAN DINAS DALAM KOTA NO. 900/2554/XI/2022 TGL 22 NOVEMBER 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.860.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
106	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) HORTIKULTRA, SESUAI BAPP NO. 900/2985/2022 TGL 19 DESEMBER 2022. (TERLAMPIR DAFTAR NOMINATIF) (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.230.000,00
107	BAYAR PERJALANAN DINAS DLM KOTA SUB KEGIATAN PENGLOLN LAHAN PERTNIAN PANGAN BERKLANJUTN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LCP2B, BAPP NO.900/2604/BAPP/XI/2022 TGL 29 NOV 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2539.A/XI/2022 TGL 21 NOVEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.736.000,00
108	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENGAWASAN, PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK 2022, DAFTAR NOMINATIFPEMBAYARAN NO. 900/2828/DISTANAKBUN/VII/2022 TGL 13 DES 2022 DAN BAPP NO. 520/2829/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 13 DES 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.780.000,00
109	BAYAR PERJALANAN DINAS DLM KOTA SUB KEGIATAN PEMB. REHABILITASI DAN PEMELIHARAN JALAN USAHA TANI DISTANAKBUN 2022, BAPP NO.900/2865/XII/2022 TGL 15 DESEMBER 2022 DAN DAFTR NOMINATIF PERJALNAN DINAS DALAM KOTA NO. 900/2074/IX/2022 TGL 29 SEPTEMBER 2022 (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.180.000,00
110	BAYARPEMBAYARAN SURT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KOTA) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA DISTANAKBUN TA 2022 TA 2022, SESUAI BAPP NO. 900/3109/XII/2022 TGL 23 DESEMBER 2022, TERLAMPIR (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.084.000,00
111	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENGAWSAN PENGGUNAAN SARANA PENDKUNG PERTANIAN SESUAI KOMODITAS TEKNOLOGI, DAN SPESIFIK LOKAL SESUAI BAPP NO.900/2946/XII/2022 TGL16 DESEMBR 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2531/XI/2022 TGL 18 NOV 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.370.000,00
112	BAYAR PERJLANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENJAMINAN PEREDARAN HPT BAHN PAKAN/PAKAN, SESUAI DAFTR NOMINATIF PERJLANAN NO. 520/2816.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 13 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO.520/2817.A/BAPP/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 13 DESMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.434.000,00
113	BAYAR PERJALANAN DINAS DALM KOTA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHN BARANG MILIK DAERAH SKPD TA 2022, DAFTAR NOMINATIF NO. 900/2982/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 19 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO. 900/2982/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 19 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00
114	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD DISTANAKBUN, SESUAI DAFTAR NOMINATF PERJALANAN NO. 800/06/XI/2022 DAN BAPP NO.520/2490/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL 09 DESEMBER 2022 TERLAMPIR (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.383.000,00
115	BAYAR PERJLANAN DINAS DLM KOTA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISASI PENGANGGU TUMBUHN (OPT) TANMN PANGAN, HORTIKULTRA DAN PERKEBUNAN 2022, DAFTAR NOMINATIF NO.520/2697/DISTANAKBUN/XII/2022, BAPP NO.900/2773/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL12 DES 2022, TRLMPIR. (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	8.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
116	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMTAN DAN DESA 2022 SESUAI DAFTAR NOMINATIF NO.900/2792/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO. 900/2793/2022 TGL 12 DESEMBER 2022 TERLAMPIR (DBH PROV)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.388.000,00
117	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) HORTIKULTURA, SESUAI BAPP NO. 900/2749/2022 TGL 9 DESEMBER 2022 (TERLAMPIR DAFTAR NOMINATIF) (DBH PMK 134)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.770.000,00
118	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN IZIN USAHA PERTANIAN TA 2022, SESUAI BAPP NO. 900/2748/2022 TGL 9 DESEMBER 2022, (TERLAMPIR DAFTAR NOMINATIF) (DBH PMK 134)	BELANJA BARANG DAN JASA	15.470.000,00
119	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMB REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI DISTANAKBUN TA 2022, BAPP NO.900/2517/XI/2022 TGL 16 NOVEMBER 2022 DAN DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS DALAM KOTA NO. 900/2486/XI/2022 TGL 11 NOV 2022(LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00
120	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KAB/KOTA LAIN TA 2022 SESUAI BAPP NO.900/2963/DISTANAKBUN/XII/2022 DAN DAFTAR NOMINATIF NO.900/2962/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 19 DESEMBER 2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	29.048.000,00
121	BAYAR BELANJA MODAL MEUBEL MEJA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, SPKS NO. 027/2416/DISTANAKBUN/XI/2022 TGL 3 NOVEMBER 2022, BASTB NO. 900/2649/BAPB/XII/2022 DAN BAP NO. 520/2650.A/DISTANAKBUN/XII/2022 TGL 02 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA MODAL	4.080.000,00
	TAHUN 2023		48.465.820,00
1	PEMBAYARAN SURAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, DISTANAKBUN SESUAI BAPP NO.900/2263/XII/2023 TGL 11 DESEMBER 2023, TERLAMPIR. PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	29.280.980,00
2	PEMBAYARAN SURAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, DISTANAKBUN SESUAI BAPP NO.900/2345/XII/2023 TGL 21 DESEMBER 2023, TERLAMPIR. PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	19.184.840,00
S	SEKRETARIAT DAERAH		2.625.293.028,00
	TAHUN 2022		2.514.415.228,00
1	BIAYA BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA (GORDEN) PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SESUAI SPK NO. 114/1565.A/2022 TANGGAL 31 OKTOBER. SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
2	BELANJA LS BIAYA ATK PADA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL SESUAI BAPP NO. 31/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN2 PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.580.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
3	BELANJA LS BIAYA ALAT TULIS KANTOR PADA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN SESUAI BAPP NO. 31/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN2 PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.902.000,00
4	PEMBAYARAN LS BELANJA ATK PADA SUB KEGIATAN FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL (KEGIATAN BKMT) SESUAI BAPP NO: 400/154-KSR/2022 TGL 12 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD) TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	3.415.500,00
5	BELANJA LS BIAYA PEMBELIAN ATK PADA KEGIATAN PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, SESUAI BAPP NO. 026/BAG.ASDPEM/XII/2022 TANGGAL 20 DESEMBER 2022. LAIN2 PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.015.000,00
6	PEMBAYARAN LS BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SESUAI SPK NOMOR: 8.B/SPK-HK/X/2022 TGL 19-10-22 DAN BAPP NOMOR: 24/BAPP/XII/22 TGL 16-12-22 (LAIN-LAIN PAD) TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	7.609.000,00
7	BIAYA BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA SUB. KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, SESUAI SPK NO. 114/01/2022 TANGGAL 14 MARET 2022. LAIN2 PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	8.588.000,00
8	BIAYA BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA SUB. KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR, SESUAI SPK NO. 114/04/2022 TANGGAL 14 MARET 2022. LAIN2 PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	8.592.000,00
9	BELANJA LS BIAYA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR (PENGGAANDAN DAN ATK) PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE SESUAI SPK NO. 114/83.A/2022 TANGGAL 3 FEBRUARI 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00
10	PEMBAYARAN LS BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SESUAI SPK NOMOR: 650/1830.A/2022 TGL 1-12-2022 DAN BAPP NOMOR: 600/2063.A/UMUM-SETDA/XII/2022 TGL 21-12-2022 (LAIN-LAIN PAD).TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	18.304.000,00
11	BELANJA LS SUB KEGIATAN FASILITAS KERJASAMA DALAM NEGRI (BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SESUAI DENGAN BAPP NOMOR: 900/BAG-KS/83/2022 TANGAL 12 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.407.000,00
12	PEMBAYARAN LS BELANJA & KERTAS COVER PADA SUB KEGIATAN FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL (KEGIATAN BKMT) SESUAI BAPP NO: 400/163.A-KSR/2022 TGL 15 DESEMBER 2022. (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD) TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.830.000,00
13	BELANJA LS BIAYA KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN SESUAI BAPP NO. 32/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.935.000,00
14	BELANJA LS BIAYA KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL SESUAI BAPP NO. 33/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.720.000,00
15	PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER TA 2022 SESUAI BAPP NO. 600/2160.A/UMUM-SETDA/XII/2022 TGL 23 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
16	PEMBAYARAN LS BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - KERTAS DAN COVER SESUAI SPK NOMOR: 650/1831.A/2022 TGL 1-12-2022 DAN BAPP NOMOR: 600/2066.A/UMUM-SETDA/XII/2022 TGL 21-12-2022. (LAIN-LAIN PAD) TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	10.891.500,00
17	BIAYA BELANJA KETAS DAN COVER PADA SUB. KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR, SESUAI SPK NO. 114/08/2022 TANGGAL 14 MARET 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	11.640.000,00
18	BIAYA BELANJA KERTAS DAN CEVER PADA SUB. KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, SESUAI SPK NO. 114/02/2022 TANGGAL 14 MARET 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	12.329.000,00
19	BELANJA LS BIAYA BAHAN KANTOR PADA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL SESUAI BAPP NO. 33/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	359.000,00
20	BELANJA LS SUB KEGIATAN FASILITAS KERJASAMA DALAM NEGERI (BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER SESUAI DENGAN BAPP NOMOR: 900/BAG-KS/82/2022 TANGAL 12 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	17.396.900,00
21	PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER TA 2022 SESUAI BAPP NO. 600/2150/UMUM-SETDA/XII/2022 TGL 23 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00
22	BELANJA LS BIAYA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR (PERABOT KANTOR) PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, SESUAI SPK NO. 114/128.A/2022 TANGGAL 22 FEBRUARI 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	24.965.000,00
23	PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK TA 2022 SESUAI BAPP NO. 600/2164/UMUM-SETDA/XII/2022 TGL 23 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00
24	BELANJA LS BIAYA ALAT/BAHAN LISTRIK PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR SESUAI SPK NO. 114/715.A/2022 TANGGAL 3 JUNI 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	24.970.000,00
25	BELANJA LS BIAYA BELANJA ALAT/BAHAN LISTRIK (LAMPU TAMAN RUJAB BUPATI MAJENE) PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH SESUAI SPK NO. 114/1689.A/2022 TANGGA 15 NOVEMBER 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00
26	BELANJA LS BIAYA PENGADAAN PAKAIAN LAPANGAN PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA SESUAI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR: 114/1568.A/2022 TANGGAL 31 OKTOBER 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00
27	BELANJA LS PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN-PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT KEC. SENDANA PEMELIHARAAN 95% TAHUN 2022 SESUAI BAPP NO: 400/167.A-KSR/2022 SUB KEGIATAN FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL. SUMBER DANA DAU PMK 07	BELANJA BARANG DAN JASA	13.485.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
28	BELANJA LS PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN-PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT KEC. SENDANA TAHUN 2022 SUB KEGIATAN FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL SESUAI BAPP NO. 400/167-KSR/2022 TANGGAL 14 DES 2022. SUMBER DANA DAU PMK 07	BELANJA BARANG DAN JASA	19.810.000,00
29	BELANJA LS PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN-PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT KEC. BANGGAE TIMUR SUB. KEGIATAN FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL SESUAI BAPP NO.400/168-KSR/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022. SUMBER DANA DAU PMK 07	BELANJA BARANG DAN JASA	23.010.000,00
30	BELANJA LS PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN-PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT KEC. SENDANA PEMELIHARAAN 95% TAHUN 2022 SESUAI BAPP NO: 400/167.A-KSR/2022 SUB KEGIATAN FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL. SUMBER DANA DAU PMK 07	BELANJA BARANG DAN JASA	42.721.500,00
31	BELANJA BIAYAPEMBAYARAN 90% BANTUAN RUMAH TAHFIZ AL QUR'AN KECAMATA SENDANA, SESUAI BAPP NO. 400/133-KSR/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022 DAN BAP NO. 134/BAP/KESRA/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. SUMBER DANA PMK 07	BELANJA BARANG DAN JASA	138.583.500,00
32	BLNJA PERSEDIAAN UTK DIJUAL/DISERAHKAN PERSEDIAAN UTK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA SETDA KAB. MAJENE, PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KNTR TA 2022 SESUAI SPK NO.30/PENG-PK/SETDA/XII/2022 9 DES 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00
33	BELANJA LS BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PADA RAPAT PADA KEGIATAN MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW 1444 H/2022 SESUAI BAPP NO. 400/179-KSR/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00
34	BELANJA LS MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA SUB KEGIATAN FASILITAS KERJASAMA LUAR NEGERI SESUAI DENGAN BAPP NOMOR: 0081/BAPP/BAG-KS/XII/2022 TANGGAL 09 DESEMBER 2022 PADA OPADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE BAGIAN KERJASAMA TA 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
35	PEMBAYARAN LS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SESUAI SPK NOMOR: 8.A/SPK-HK/X/2022 TGL 10-10-2022 DAN BAPP NOMOR: 23/BAPP/XII/2022 TGL 16-12-2022 (LAIN-LAIN PAD) TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.595.000,00
36	BELANJA LS MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA SUB KEGIATAN EVALUASI KERJASAMA SESUAI DENGAN BAPP NOMOR: 0080/BAPP/BAG-KS/XII/2022 TANGGAL 09 DESEMBER 2022 PADA OPADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE BAGIAN KERJASAMA TA 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
37	BELANJA LS BIAYA MAKAN DAN MINUM JAMUAN RAPAT PADA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN SESUAI BAPP NO. 24/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
38	BELANJA LS MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA SUB KEGIATAN FASILITAS DALAM NEGERI SESUAI DENGAN BAPP NOMOR: 0079/BAPP/BAG-KS/XII/2022 TANGGAL 09 DESEMBER 2022 PADA OPADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE BAGIAN KERJASAMA TA 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00
39	BIAYA BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT PADA SUB. KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, SESUAI SPK NO. 114/03/2022 TANGGAL 14 MARET 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	19.725.000,00
40	BIAYA BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT PADA SUB. KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR, SESUAI SPK NO. 114/09/2022 TANGGAL 14 MARET 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	19.909.000,00
41	BELANJA LS BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT DALAM RANGKAPENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, SESUAI BAPP NO. 027/BAG.ASDPEM/XII/2022 TANGGAL 20 DESEMBER 2022.LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	25.050.000,00
42	BELANJA LS BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PADA JAMUAN TAMU PADA KEGIATAN MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW 1444 H/2022 SESUAI BAPP NO. 400/180-KSR/2022 TANGGAL 14 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
43	BELANJA LS BIAYA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU PADA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL SESUAI BAPP NO. 27/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	7.275.000,00
44	BELANJA LS BIAYA MAKAN DAN MINUM TAMU PADA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN SESUAI BAPP NO. 28/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	9.360.000,00
45	BELANJA BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PADA KEGIATAN BKMT, SESUAI BAPP NO. 400/153-KSR/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 DAN BAP NO. 156/BAP/KESRA/XII/2022 TGL 13 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
46	BELANJA LS BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH, SESUAI SPK NO. 114/129.A/2022 TANGGAL 22 FEBRUARI 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	19.981.000,00
47	PEMBAYARAN LS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU SESUAI SPK NOMOR: 650/1829/2022 TGL 1-12-22 DAN BAPP NOMOR: 680/2060.A/UMUM-SETDA/2022 TGL 21-12-22 (LAIN-LAIN PAD) TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	33.233.500,00
48	BELANJA LS MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU (SAFARI RAMADHAN MAKASSAR) SUB KEGIATAN FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL SESUAI BAP NO: 166/BAP/KESRA/XII/2022 TANGGAL 15 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
49	BELANJA LS BIAYA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU TAHUN 2022 SESUAI BAPP NO. 900/2162/2022 TANGGAL 23 DESEMBER 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
50	BELANJA LS BIAYA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU PADA SUB. KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
51	BELANJA LS HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (BIAYA INSENTIF PEMBAWA ACARA (MC) PADA KEGIATAN MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW 1444 H/2022 M SESUAI BAPP NO. 400/181-KSR/2022 TAHUN ANGGARAN 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00
52	BELANJA LS HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA & REFORMASI BIROKRASI, SESUAI BAPP NO. 800/011.A.ORG/SETDA/XII/2022 TGL 5 DES 2022 DAN SESUAI SK 795/HK/KEP-BUP/VII/2022 TGL 28 JULI 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	14.700.000,00
53	BELANJA LS KEGIATAN HONORARIUM TIM PENDAMPING PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH UNTUK TRIWULAN I S/D IV SESUAI SK NO. 1064/HK/KEP-BUP/XI/2022 TGL 28 NOV 2022 DAN SK NO. 659/HK/KEP-BUP/VI/2022 TGL 7 JUNI 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	28.780.000,00
54	BELANJA LS BIAYA INSENTIF PEMIMPIN ZIKIR BULAN PADA KEGIATAN ZIKIR DAN DO'A BERSAMA TAHUN 2022 SESUAI BAPP NO. 400/175-KSR/2022 DAN BIAYA INSENTIF PEMBAWA ACARA BULAN APRIL S/D DES PADA KEGIATAN ZIKIR DAN DOA YASINAN SESUAI BAPP NO. 400/175-KSR/2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	32.400.000,00
55	BELANJA LS HONORARIUM NARASUMBER & PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA PADA SUB KEGIATAN FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPRITUAL (KEGIATAN BKMT) TA 2022 SESUAI BAPP NO: 400/155-KSR/2022 TGL 12 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00
56	BELANJA BIAYA KEGIATAN BARANG DAN JASA LANGGANAN JURNAL, SURAT KABAR/MAJALLAH (PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN MELALUI MEDIA TRIBUN SULBAR) SESUAI SURAT PERJANJIAN NO. 040/22/SP-PROKOMPI/II/2022 TANGGAL 10 JANUARI 2022. DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00
57	BELANJA LS BIAYA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE UNTUK BULAN SEPTEMBER S.D DESEMBER 2022 SESUAI BAPP NO.014/37/SP3.PROKOMPI/XII/2022. DBH PROVINSI.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.023.332,00
58	BIAYA LEMBUR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN RANHAM TAHUN 2022 SESUAI SPK NO 06/SPK-HK /VIII/2022 TGL 20 AGUSTUS 2022 DAN 07/SPK-HK/VIII/2022 TGL 27 AGUSTUS 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.528.000,00
59	BELANJA LS LEMBUR PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI SPK NO.05/SPK-HK/VIII/2022 TGL 12 S/D 13 AGT 2022 & LEMBUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SESUAI SPK NO. 04/SPK-HK/VII/2022 TGL 21 JULI 2022 BAGIAN HUKUM LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.663.000,00
60	BELANJA LS LEMBUR SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM & PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM KEGIATAN PENATAAN JDIH SESUAI SPK NO:08/SPK-HK/IX/2022 TGL 10 S/D 11 SEPT DAN SPK NO.09/SPK-HK/XI/2022 17 NOV 2022 BAGIAN HUKUM OPADA SETDA. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.683.000,00
61	PEMBAYARAN LEMBUR PENYUSUNAN RKA TAHUN 2023 SESUAI SPK NOMOR: 0074.B/PERKEU-SETDA/IX/2022 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	5.993.000,00
62	PEMBAYARAN LEMBUR PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA TAHUN 2022 SESUAI SPK NOMOR: 0091.A/PERKEU-SETDA/XI/2022 TANGGAL 4 OKTOBER 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	5.985.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
63	BELANJA LS BIAYA <i>MEDICAL CHECK UP</i> (PENYEDIAAN ALAT/BAHAN KESEHATAN) KEPALA DAERAH PADA SUB. KEGIATAN PELAKSANAAN <i>MEDICAL CHECK UP</i> KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SESUAI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NO. 114/95.A/2022 TANGGAL 10 FEBRUARI 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
64	BELANJA LS ASURANSI KETENAGAKERJAAN NON ASN PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN, SESUAI NPP-DIV NO. 22243241-000	BELANJA BARANG DAN JASA	27.091.584,00
65	BELANJA LS BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN GENSET PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BMD PENINJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI SPK NO. 114/820.A/2022 TANGGAL 27 JUNI 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.100.000,00
66	BELANJA LS BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BBM PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN, SESUAI SPK NO. 114/274.A/2022 TANGGA 1 APRIL 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	29.651.000,00
67	PEMBAYARAN LS BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG (PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS) SESUAI SPK NOMOR: 600/1833.A/UMUM-SETDA/2022 TGL 1 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	36.381.100,00
68	BELANJA LS BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN, SESUAI SPK NO. 114/82.A/2022 TANGGA 3 FEBRUARI 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	83.000.000,00
69	BELANJA LS BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR (PEMELIHARAAN AC) PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SESUAI SPK NO. 114/823.A/2022 TANGGAL 28 JUNI 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.400.000,00
70	BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT (PEMBUATAN PAPAN NAMA RUJAB BUPATI) PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH SESUAI SPK NO. 600/1628.A/2022 TANGGAL 8 NOVEMBER 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00
71	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI, SESUAI BAPP NO. 800/010.A.ORG/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.851.200,00
72	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN, SESUAI BAPP NO. 800/08.A.ORG/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00
73	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB. KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI SESUAI DENGAN NOMOR: 77/BAPP/BAG-KS/XII/2022 TANGGAL 09 DESEMBER 2022 OPADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE BAG. KERJASAMA.TA 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.991.300,00
74	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB. KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA SESUAI DENGAN NOMOR: 78/BAPP/BAG-KS/XII/2022 TANGGAL 09 DESEMBER 2022 OPADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE BAG. KERJASAMA.TA 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.169.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
75	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN SESUAI BAPP NOMOR: 900/018/ADPEM/XII/2022 TANGGAL 6 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	7.040.000,00
76	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN SESUAI BAPP NOMOR: 900/020/ADPEM/XII/2022 TGL 6 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	8.317.700,00
77	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB. KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	9.410.900,00
78	PEMBAYARAN LS SUB. KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI DENGAN BAPP NOMOR: 076/BAPP/BAG-KS/XII/2022 TANGGAL 9 DESEMBER 2022 PADA OPADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.438.100,00
79	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM BIASA PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA, SESUAI BAPP NO. 800/07.A.ORG/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.922.800,00
80	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, SUB KEGIATAN PENGELOLAAN EVALUASI & PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SESUAI BAPP NOMOR: 900/019/ADPEM/XII/2022 TGL 6 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	16.055.700,00
81	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB. KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	17.242.800,00
82	BELANJA LS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA KEGIATAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN SDA, SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI & EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN & LINGK. HIDUP SESUAI BAPP NOMOR: 900/39/SDA/XII/2022 TGL 6 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	17.749.200,00
83	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM, SESUAI BAPP NO. 25/BAPP/HK/XII/2022 TANGGAL 22 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	22.160.000,00
84	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA SUB. KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	25.550.000,00
85	BELANJA LS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA KEGIATAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN SDA, SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI & EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN KELAUTAN & PERIKANAN SESUAI BAPP NOMOR: 900/38/SDA/XII/2022 TGL 6 DESEMBER 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	28.820.100,00
86	BELANJA LS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA KEGIATAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN SDA, SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI & EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR SESUAI BAPP NOMOR: 900/40/SDA/XII/2022 TGL 6 DESEMBER 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	41.242.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
87	BIAYA BELANJA DINAS LUAR DAERAH PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SUB KEGIATAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SESUAI BAPP NOMOR: 900/1819.A/UMUM-SETDA/XII/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	207.094.862,00
88	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI, SESUAI BAPP NO. 800/06.A.ORG/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.460.800,00
89	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN SESUAI BAPP NO. 16/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	17.798.500,00
90	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PADA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL SESUAI BAPP NO. 15/EK-SETDA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022. TAHUN ANGGARAN 2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	38.998.500,00
91	BELANJA BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PADA KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI DAN SUB. KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA, SESUAI BAPP NO. 800/013.A/ORG/SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 ESEMBER 2022. LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.029.200,00
92	BELANJA BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PADA KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI DAN SUB. KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA, SESUAI BAPP NO. 800/012.A/ORG/SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022. LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.138.000,00
93	BELANJA LS BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN, SESUAI BAPP NO. 800/09.A.ORG/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA BARANG DAN JASA	476.000,00
94	PEMBAYARAN LS BELANJA PERJALANAN DINAS DAERAH PADA SUB. KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SESUAI DENGAN BAPP NOMOR: 900/1981.A/UMUM-SETDA/XII/2022 TANGGAL 22 DESEMBER 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD). TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	51.341.750,00
95	BELANJA LS BELANJA MODAL SEPEDA GUNUNG PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH TAHUN 2022, SESUAI SPK NO. 28/SP/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	36.900.000,00
96	BELANJA MODAL LS PENGADAAN LEMARI BUPET RUJAB WAKIL BUPATI KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN (SP) NO. 22/SP/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	5.800.000,00
97	BELANJA MODAL LS ALAT KANTOR LAINNYA (PENGADAAN PROYEKTOR) PADA SUB. KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN (SPK) NO. 35/PENG-PK/SETDA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	22.300.000,00
98	BELANJA LS PENGADAAN LEMARI RUJAB BUPATI KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN (SP) NO. 20/SP/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	22.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
99	BELANJA MODAL KURSI RAPAT PADA KEGIATAN FASILITASI KERUMAHTANGGAN SEKRETARIAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN SPK NO. 40/PENG-PK/SETDA/XII/2022 TANGGAL 13 DESEMBER 2022	BELANJA MODAL	29.500.000,00
100	BELANJA MODAL LS PENGADAAN MEBEL RUJAB BUPATI KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN (SPK) NO. 33/PENG-PK/SETDA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	49.700.000,00
101	BELANJA LS PENGADAAN ALAT PENDINGIN (AC) RUJAB WAKIL BUPATI KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN (SP) NO. 21/SP/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	13.000.000,00
102	BELANJA MODAL LS PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN (SPK) NO. 34/PENG-PK/SETDA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	60.750.000,00
103	BELANJA LS PENGADAAN <i>PRINTER</i> BAGIAN UMUM SETDA KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN (SP) NO. 25/SP/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	9.200.000,00
104	BELANJA MODAL LS PENGADAAN LAPTOP RUJAB BUPATI KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SPK NO. 36/PENG-PK/SETDA/XII/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	27.400.000,00
105	BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE, PADA KEGIATAN PENGADAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI SPK NOMOR: 29/PENG-PK/SETDA/XII/2022 TANGGAL 7 DESEMBER 2022	BELANJA MODAL	41.000.000,00
106	BELANJA MODAL LS PENGADAAN LAPTOP SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SURAT PESANAN (SP) NO. 28/SP/SETDA/XII/2022 TANGGAL 6 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	58.100.000,00
107	BIAYA PENGAWASAN ATAS BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR (REHABILITASI RUJAB WAKIL BUPATI MAJENE) PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL BUPATI MAJENE, SESUAI SPK NO. 18.A/SPK/REHAB/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	4.700.000,00
108	BIAYA 5% ATAS BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR (REHABILITASI RUJAB WAKIL BUPATI MAJENE) PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL BUPATI MAJENE, SESUAI SPK NO. 18/SPK/REHAB/SETDA/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	7.150.000,00
109	PEMBAYARAN 5 % ATAS BELANJA MODAL REHABILITASI RUJAB BUPATI KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI SURAT PERJANJIAN (SP) NO. 41/SPK/REHAB/SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	9.975.000,00
110	MC-02 ATAS BELANJA MODAL REHABILITASI RUJAB BUPATI KAB. MAJENE PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI SURAT PERJANJIAN (SP) NO. 41/SPK/REHAB/SETDA/XII/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022.	BELANJA MODAL	189.525.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2023		110.877.800,00
1	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA SESUAI DENGAN BAPP NOMOR: 002/EK-SETDA/BAPP/IX/2023 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2023 DAN SPPD NO. 800/7093/LP-SPPD/BKAD/2023 TANGGAL 19 DESEMBER 2023.(SUMBER DANA PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.160.800,00
2	BELANJA BIAYA BAHAN BAKAR PELUMAS SEKRETARIAT DAERAH BERUPA PEMBELIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS SESUAI NO. B.600/2019/UMUM-SETDA/XII/2023 DAN SPPD NO. 800/7596/LP-SPPD/BKAD/2023	BELANJA BARANG DAN JASA	5.850.000,00
3	BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SUB. KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN SESUAI BAPP NO. B.900/003/BAG-ADEPEM/XII/2023 DAN SPPD NO. 800/7599/LP-SPPD/BKAD/2023. TAHUN ANGGARAN 2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00
4	BELANJA LS BIAYA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH PADA BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2023 SESUAI BAPP NO. B.600/2029/XII/2023 DAN SPPD NO. 800/7595/LP-SPPD/BKAD/2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00
5	BIAYA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEKRETARIAT DAERAH BERUPA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS SESUAI NO. B.003.3/2123/UMUM-SETDA/XII/2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00
6	BIAYA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL RUMAH NEGARA GOLONGAN I SEKRETARIAT DAERAH BERUPA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS SESUAINO. B.600/1626/UMUM-SETDA/XII/2023 DAN SPPD NO. 800/7593/LP-SPPD/BKAD/2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00
7	BELANJA BAHAN BAKAR DARI PELUMAS (ISI ULANG TABUNG GAS) UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH MAJENE SESUAI SPPD NO. 800/7249/LP-SPPD/BKAD/2023 TANGGAL 20 DESEMBER DESEMBER 2023 DAN SESUAI BAP NO. 012/BAP/RUJAB-BUPATI/XII/2023	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00
8	BELANJA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH (BIAYA BBM BUS SEKOLAH) PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN. SESUAI SPPD NO. 800/7378/LP-SPPD/BKAD/2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.896.000,00
9	BELANJA LS BIAYA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH SESUAI SPPD NO. 800/7230/LP-SPPD/BKAD/2023. TANGGAL 20 DESEMBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023 SUMBER DANA: PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	13.771.000,00
10	PENGAKUAN SALDO SEKRETARIAT DAERAH - BANTUAN SARANA PERIBADATAN BAITUL MAUNA SPJ TERLAMBAT MASUK, BARU DIBAYARKAN DI 30 JANUARI 2024 DAN SISA JASA TABUNGAN, TIDAK ADA SK REKENING. (JUKOR 54)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00
T	SEKRETARIAT DPRD		2.182.097.820,00
	TAHUN 2022		1.808.493.378,00
1	BELANJA PENGADAAN GORDEN RUMAH JABATAN KETUA DPRD PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD TA 2022, SESUAI SP NOMOR: 004/SP/SEKR-DPRD/XI/2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	64.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
2	PEMBAYARAN 100% BELANJA PAKAIAN ADAT (AKSESORIS) ANGGOTA DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN & KESEJAHTERAAN DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS & ATRIBUT TA 2022. SESUAI SPK NO: 002/SPK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	69.925.000,00
3	BELANJA BLANGKO SPPADA SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SESUAI NOTA PESANAN NO: 01/NP-BLSPADA/SEKR-DPRD/II/2022. SUMBER DANA DBH PROVINSI.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
4	BELANJA CETAK KWITANSI PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SESUAI NOTA PESANAN NO: 017/NP-KEU/SEKR-DPRD/XI/2022. SUMBER DANA DBH PROVINSI.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
5	BELANJA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN/PENGGANDAAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN BERDASARKAN NOTA PESANAN NO: 02.4/NP-FC/SEKR-DPRD/IV/2022. DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	4.999.800,00
6	BIAYA BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00
7	BELANJA ATK UNTUK KEPERLUAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN TA 2022, SESUAI BAPP NO: 023/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XI/2022. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000,00
8	BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA & PPAS SESUAI BAPP NO: 020/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XI/2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000,00
9	BELANJA ATK UNTUK KEPERLUAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KUA & PPAS PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN TA 2022, SESUAI BAPP NO: 020/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XI/2022. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000,00
10	BELANJA ATK UNTUK KEPERLUAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN TA 2022, SESUAI BAPP NO: 021/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XI/2022. DANA	BELANJA BARANG DAN JASA	332.500,00
11	BELANJA ATK UNTUK KEPERLUAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN TA 2022 SESUAI BAPP NO.: 022/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XI/2022. DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	333.000,00
12	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN SPP/SPM PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SESUAI NOTA PESANAN NO: 016/NP-KEU/SEKR-DPRD/XI/2022. SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00
13	BELANJA (ATK) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD SEKRET DPRD KAB. MAJENE TA 2022. SESUAI NOTA PESANAN NO. 011/NP-KEU/SEKR. DPRD/X/2022 TANGGAL 10 OKTOBER 2022. DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	460.000,00
14	BELANJA (ATK) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD PADA SEKRET. DPRD KAB. MAJENE SESUAI NOTA PESANAN NO. 014/NP-KEU/SEKR-DPRD/X/2022. DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	460.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
15	BELANJA (ATK) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD SEKRET DPRD KAB. MAJENE TA 2022. SESUAI NOTA PESANAN NO.010/NP-KEU/SEKRET. DPRD/X/2022. DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	460.000,00
16	BELANJA (ATK) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN PADA SEKRET DPRD KAB.MAJENE TA 2022 SESUAI NOTA PESANAN NO. 013/NP-KEU/SEKR-DPRD/X/2022. DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	460.000,00
17	BELANJA ATK DAN CETAK PENGGANDAAN KANTOR DPRD MAJENE PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI BAPP NO: 031/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XII/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA DBH PROV	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000,00
18	BELANJA ATK UNTUK KEPERLUAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD TA 2022, SESUAI BAPP NO: 024/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XI/2022. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	913.000,00
19	BELANJA (ATK) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD. SESUAI NOTA PESANAN NO. 012/NP-KEU/SEKR-DPRD/X/2022 TANGGAL 17 OKTOBER 2022. DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	920.000,00
20	BELANJA (ATK) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SEKRET. DPRD KAB. MAJENE TA 2022. SESUAI NOTA PESANAN NO. 015/NP-KEU/SEKR-DPRD/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022. DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
21	BELANJA ATK DAN PENGGANDAAN RKA PERUBAHAN PADA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANNGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RKA-SKPD SEKR DPRD TA 2022 NOTA PESANAN : NO. 008NP-KEU/SEKR-DPRD/X/2022. DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	1.380.000,00
22	BELANJA ATK DAN PENGGANDAAN DOKUMEN DPPA PADA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANNGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD SEKR DPRD TA 2022. NOTA PESANAN : NO.009/NP-KEU/SEKR-DPRD/X/2002.DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	1.380.000,00
23	BELANJA ATK DAN CETAK PENGGANDAAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SESUAI BAPP NO. 026/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XII/2022. SUMBER DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	1.446.000,00
24	BELANJA ATK DAN CETAK PENGGANDAAN UNTUK KEPERLUAN KANTOR SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SESUAI BAPP NO: 027/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XII/2022. DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	1.465.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
25	BELANJA ATK DAN CETAK PENGGANDAAN SEKRETARIAT DPRD PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SESUAI BAPP NO: 030/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XII/2022 PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA DBH PROV	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00
26	BELANJA ATK) & CETAK UNTUK KEPERLUAN KANTOR SUB KEGIATAN PENYUSUNAN & PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH & PERATURAN DPRD TA 2022 SESUAI BAPP NO: 018/BAP-PERSID/SEKRET-DPRD/XI/2022. DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	1.705.000,00
27	BELANJA ATK DAN CETAK PENGGANDAAN SEKRETARIAT DPRD PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SESUAI BAPP NO. 025/BAP-PERSID/SEKR-DPRD/XII/2022. SUMBER DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	1.990.000,00
28	BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SEKR DPRD KAB. MAJENE TA 2022 SESUAI NP NO: 26/NP-ATK/SEKRET-DPRD/X/2022. DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	4.743.500,00
29	BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.948.500,00
30	BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SEKR DPRD KAB. MAJENE TA 2022 SESUAI NP NO: 05/NP-ATK/SEKRET-DPRD/VI/2022. DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
31	BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.171.000,00
32	BIAYA BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00
33	BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	22.880.500,00
34	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN/ALAT PEMBERSIH PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR SESUAI NOTA PESANAN : 09/NP-AK/SEKR-DPRD/VII/2022. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.035.000,00
35	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR/PERABOT KANTOR SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
36	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR/PERABOT KANTOR SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00
37	BELANJA PENGADAAN PSR PIMPINAN, ANGGOTA & SEKRETARIS DPRD PADA KEGIATAN LAYANAN KEUANGAN & KESEJATERAAN DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS & ATRIBUT TA 2022, SESUAI SP NOMOR: 001/SP-PBJ/SEKR-DPRD/X/2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	52.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
38	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAB. MAJENE SUB KEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM. SPMK NO 027/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.925.000,00
39	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS SESUAI SPMK NO: 016/SPMK/SEKR-DPRD/VIII/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.684.000,00
40	BELANJA MAKANAN MINUMAN RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN SESUAI SPMK NO: 016.A/SPMK/SEKR-DPRD/VIII/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.860.000,00
41	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SUB KEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT. SPMK NO 028/SPMK/SEKR-DPRD/X/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.135.000,00
42	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN FASILITAS FRAKSI DPRD. SESUAI SPMK NO: 026/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022 TANGGAL 14 SEP 2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.160.000,00
43	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DPRD SESUAI SPMK NO: 029/SPMK/SEKR-DPRD/X/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00
44	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, SESUAI SPMK NO: 024/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	4.530.000,00
45	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD SESUAI SPMK NO: 023/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00
46	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI FRAKSI DPRD SESUAI SPMK NO. 018/SPMK/SEKR-DPRD/VIII/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	9.267.500,00
47	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	BELANJA BARANG DAN JASA	10.355.000,00
48	BELANJA MAKANAN MINUMAN RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SESUAI SPMK NO: 025/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	14.475.000,00
49	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DPRD TA 2022, SESUAI SPMK NO. 018/SPMK/SEKR-DPRD/VIII/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	16.280.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
50	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT-RAPAT DPRD PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD. SESUAI SPMK NO: 021/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	20.250.000,00
51	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 PADA SEKRET DPRD TA 2022. SESUAI SPKL NO: 006/SPKL-KHK-RIS/SEKR-DPRD/X/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00
52	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN FASILITAS FRAKSI DPRD. SESUAI SPMK NO: 026/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022 TANGGAL 14 SEP 2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.620.000,00
53	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS SESUAI SPMK NO: 016/SPMK/SEKR-DPRD/VIII/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.789.500,00
54	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAB. MAJENE SUB KEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM. SPMK NO 027/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.822.500,00
55	BELANJA MAKANAN MINUMAN RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN SESUAI SPMK NO: 016.A/SPMK/SEKR-DPRD/VIII/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.932.500,00
56	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SUB KEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT. SPMK NO 028/SPMK/SEKR-DPRD/X/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.960.000,00
57	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, SESUAI SPMK NO: 024/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA DBH	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00
58	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD SESUAI SPMK NO: 023/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00
59	BELANJA MAKAN MINUM HARIAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT DPRD PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU SESUAI NOTA PESANAN : 04.3/NP-MMH/SEKRET-DPRD/V/2022. NOTA TERLAMPIR SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	9.319.000,00
60	BELANJA MAKANAN MINUMAN RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SESUAI SPMK NO: 025/SPMK/SEKR-DPRD/IX/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00
61	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
62	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI FRAKSI DPRD SESUAI SPMK NO. 018/SPMK/SEKR-DPRD/VIII/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	9.916.500,00
63	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAMU DPRD PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH DPRD TA 2022, SESUAI SPMK NO. 018/SPMK/SEKR-DPRD/VIII/2022. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	12.265.000,00
64	BELANJA MAKAN MINUM HARIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA SEKRETARIAT DPRD PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00
65	BELANJA CETAK IKLAN HARI JADI MAJENE KE-477 PADA MEDIA SULBARUPADAATE.COM PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN SESUAI SPK NO: 57/PK-PA/SEKRT-DPRD/XI/2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	19.900.000,00
66	BIAYA PUBLIKASI ADVEKTORIAL KEGIATAN DPRD PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN SESUAI SPK NO: 48/PK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022 DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00
67	BIAYA ADVEKTORIAL PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SESUAI SPK NO: 42/PK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022 DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00
68	BIAYA KEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KEGIATAN DPRD DI MEDIA PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN SESUAI SPK NO: 31/PK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022. PAJAK TERLAMPIR. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
69	BIAYA ADVETORIAL KEGIATAN DPRD DI MEDIA MSALEMBO PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN SESUAI SPK NO: 32/PK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
70	BIAYA ADVOKASI KEGIATAN DPRD DI MEDIA TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI SURAT PERJANJIAN KERJA NOMOR: 34/PK-PA/SEKRT-DPRD/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
71	BIAYA ADVEKTORIAL PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SESUAI SPK NO: 33/PK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022 DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00
72	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD PADA SEKRET DPRD TAHUN ANGGARAN 2022. SESUAI SPKL NO: 002/SPKL-KHK-RIS/SEKR-DPRD/VI/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.221.000,00
73	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PADA SEKRET DPRD TA 2022. SESUAI SPKL NO: 001/SPKL-KHK-RIS/SEKR-DPRD/IV/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.528.000,00
74	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN KUA DAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2023 PADA SEKRET DPRD TA 2022. SESUAI SPKL NO: 004/SPKL-KHK-RIS/SEKR-DPRD/VII/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.540.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
75	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TA 2022 PADA SEKRET DPRD TA 2022. SESUAI SPKL NO: 005/SPKL-KHK-RIS/SEKR-DPRD/VIII/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.540.000,00
76	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022 PADA SEKRET DPRD TA 2022. SESUAI SPKL NO: 006/SPKL-KHK-RIS/SEKR-DPRD/X/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.540.000,00
77	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD SESUAI SPKL NO:007/SPKL-KEU/SEKR-DPRD/II/2022. (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.995.000,00
78	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN SUB KEGIATAN PEMBAHASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 SESUAI SPKL NO: 007/SPKL-KHK-RIS/SEKR-DPRD/XI/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.052.000,00
79	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN FASILITAS TUGAS DPRD SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD SESUAI SPKL NO: 002/SPKL-KHK-HUMAS/SEKR-DPRD/VIII/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.090.000,00
80	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SESUAI SPKL NO: 001/SPKL-KHK-HUMAS/SEKR-DPRD/VII/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.090.000,00
81	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD, SESUAI SPK NO: 009/SPKL-KEU/SEKR-DPRD/X/2022 TANGGAL 17 OKTOBER 2022. DANA DBH PROVINSIINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	6.698.000,00
82	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD, SESUAI SPK NO: 010/SPKL-KEU/SEKR-DPRD/X/2022. DANA DBH PROVINSIINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	6.698.000,00
83	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD, SESUAI SPK NO: 008/SPKL-KEU/SEKR-DPRD/X/2022 TANGGAL 3 OKTOBER 2022. DANA DBH PROVINSIINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	6.698.000,00
84	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN, SESUAI SPK NO: 011/SPKL-KEU/SEKR-DPRD/XI/2022 TANGGAL 7 NOVEMBER 2022. DANA DBH PROVINSIINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	6.698.000,00
85	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD, SESUAI SPK NO: 012/SPKL-KEU/SEKR-DPRD/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022. DANA DBH PROVINSIINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	6.698.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
86	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI SPKL NO: 001/SPKL-PERSID-KHK/SEKR-DPRD/IX/2022 DAN DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.777.000,00
87	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA SESUAI SPKL NO: 004/SPKL-PERSID-KHK/SEKR-DPRD/X/2022 DAN DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.817.000,00
88	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTASI DPRD SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD PADA SEKRET DPRD TA 2022. SESUAI SPKL NO: 003/SPKL-KHK-RIS/SEKR-DPRD/VI/2022. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.957.000,00
89	UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA TAHUN ANGGARAN 2022, SESUAI SPKL TERLAMPIR DAN DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.968.000,00
90	BELANJA SUKU CADANG DAN SERVICE KENDARAAN DINAS SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN, TERMASUK PPN DAN PPH. (NOTA TERLAMPIR)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.378.840,00
91	BELANJA SUKU CADANG DAN SERVICE KENDARAAN DINAS SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN, TERMASUK PPN DAN PPH. (NOTA TERLAMPIR)	BELANJA BARANG DAN JASA	25.372.380,00
92	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS UNSUR PIMPINAN DAN SEKRETARIAT DPRD PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI NOTA PESANAN NO: 43/NP-BBM/SEKRET-DPRD/XI/2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
93	BELANJA SUKU CADANG DAN SERVICE PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	34.999.410,00
94	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS UNSUR PIMPINAN DAN SEKRETARIAT DPRD PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI NOTA PESANAN NO: 22/NP-BBM/SEKRET-DPRD/VI/2022. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	80.223.700,00
95	BELANJA SUKU CADANG DAN SERVICE PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.317.000,00
96	BELANJA SUKU CADANG DAN SERVICE PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.680.000,00
97	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SEKR DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN & MESIN LAINNYA SESUAI NP NO: 01/MP-PPK/SEKRET-DPRD/XI/2022. DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
98	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SEKR DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN & MESIN LAINNYA SESUAI NP NO: 01/MP-PPK/SEKRET-DPRD/XI/2022. DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.000,00
99	BIAYA PEMELIHARAAN 5% ATAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DPRD (RUANG KOMISI 3) PADA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA. SESUAI SPK NO: 004/SPK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.495.000,00
100	MC-01 ATAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DPRD (REHABILITASI RUANG KOMISI 3) PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR. SESUAI SPK NO: 004/SPK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022. DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	47.405.000,00
101	BELANJA PERBAIKAN LAPTOP/KOMPUTER KANTOR SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA SESUAI BAPP NO.17.A/BAP-PK/SEKR-DPRD/X/2022. DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	260.001,00
102	BELANJA PERBAIKAN LAPTOP/KOMPUTER KANTOR SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA SESUAI BAPP NO.17.A/BAP-PK/SEKR-DPRD/X/2022. DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	739.999,00
103	BELANJA PERJALANAN DINAS SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI SKPD. DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.089.600,00
104	BELANJA PERJALANAN DINAS STAF SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD SUB. KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD TAHUN ANGGARAN 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	7.736.400,00
105	BELANJA PERJALANAN DINAS STAF SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB. KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2022. SUMBER DANA DBH PROVINSIINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	8.034.000,00
106	BELANJA PERJALANAN DINAS SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN DAERAH. DAFTAR REKENING TERLAMPIR SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	8.526.800,00
107	BELANJA PERJALANAN DINAS STAF SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB. KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. SUMBER DANA DBH PROVINSIINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	13.641.700,00
108	BIAYA PERJALANAN DINAS STAF SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	21.313.280,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
109	BELANJA PERJALANAN DINAS DAN KONTRIBUTSI BIMBINGAN TEKNIS <i>LEGAL DRAFTING</i> PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASRKAAN TUGAS DAN FUNGSI. (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR). DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	99.960.000,00
110	BELANJA PERJALANAN DINAS STAF SEKRETARIAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB. KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TAHUN ANGGARAN 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	251.628.968,00
111	BELANJA PENGADAAN AC RUANG KERJA KETUA DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN & MESIN LAINNYA TA 2022, SESUAI SP NOMOR: 003/SP/SEKR-DPRD/XI/2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	9.900.000,00
112	PEMBAYARAN 100% BELANJA PEMBUATAN APLIKASI (<i>WEBSITE</i>) PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SESUAI SPK NO: 005/SPK-PA/SEKR-DPRD/XI/2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	40.000.000,00
	TAHUN 2023		373.604.442,00
1	BELANJA MAKAN MINUM HARIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN FASILITASI TUGAS DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD TAHUN ANGGARAN 2023 SESUAI NOTA TERLAMPIR. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	16.700.000,00
2	BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2023. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00
3	BELANJA MAKAN MINUM RUMAH JABATAN KETUA DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD UNTUK BULAN JULI S/D OKTOBER 2023. PAJAK TERLAMPIR SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	148.000.000,00
4	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH SUB KEGIATAN FASILITASI, VERIFIKASI, DAN KOORDINASI PERSETUJUAN KERJA SAMA DAERAH. SESUAI SPMK : 020/SEKR-DPRD/IX/2023. TERMASUK PAJAK TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00
5	BELANJA MAKAN MINUM RUMAH JABATAN WAKIL KETUA I DPRD KAB. MAJENE PADA KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD UNTUK BULAN JULI S/D NOVEMBER 2023. PAJAK TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00
6	BELANJA PERJALANAN DINAS STAF SEKRETARIAT DPRD MAJENE PADA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD. (DAFTAR REKENING PENERIMA TERLAMPIR) SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	35.104.442,00
U	BADAN PENDAPATAN DAERAH		355.639.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2022		268.500.000,00
1	PEMBAYARAN BIAYA KEGIATAN SURVEY/PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KAB. MAJENE SESUAI SPK NO: 007/KONT-PEND.PBB/XII/2022 PADA BAPENDA KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA: LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	268.500.000,00
	TAHUN 2023		87.139.800,00
1	PEMBAYARAN BIAYA PERLENGKAPAN BAHAN KOMPUTER DAN KELENGKAPAN BERUPA TINTA PRINT KEGIATAN PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH SESUAI SPK NO. 006/SPK-PPPADA/BAPENDA-MN/X/2023 & BAP NO. 006.02/BAP/BAPENDA-MN/X/2023 PADA BAPENDA KAB.MAJENE SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
2	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA, DALAM RANGKA KEGIATAN BIDANG PENDAPATAN III PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAJENE TA 2023 SESUAI KWITANSI TERLAMPIR SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000,00
3	PEMBAYARAN BIAYA CETAK KARCIS, BLANGKO PAJAK & RETRIBUSI LAINNYA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAJENE TA 2023 SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	75.745.800,00
4	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK) KEGIATAN KELENGKAPAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN & PENGAWASAN PAJAK DAERAH SESUAI SPK NO. 009/SPK/BAPENDA-MN/X/2023 & BAP NO. 009.02/BAP/BAPENDA-MN/XI/2023 PADA BAPENDA KAB.MAJENE SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
5	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA, DALAM RANGKA KEGIATAN BIDANG PENDAPATAN II PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAJENE TA 2023 SESUAI KWITANSI TERLAMPIR SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.120.000,00
6	PEMBAYARAN BIAYA JASA LEMBUR PNS DAN NON PNS UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) 2024 BAGIAN PERENCANAAN SESUAI SPK NO.205/SPK-LBR/BPADA-MN/XI/2023 TGL01 NOVEMBER 2023 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MAJENE TA 2023. (SUMBER DANA: PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.996.000,00
7	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH UNTUK BIDANG PENDAPATAN III SESUAI SPK NO. 008/SPK-PGHPADA/BAPENDA/XI/2023 & BAP NO. 008.02/BAP/BAPENDA-MN/XI/2023 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.MAJENE SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	518.000,00
8	PEMBAYARAN BIAYA PENGGANDAAN /FOTO COPY KEGIATAN KELENGKAPAN PENDATAAN PAJAK DAERAH SESUAI SPK NO. 007/SPK-PPTPJKBAPENDA-MN/X/2023 & BAP NO. 007.02/BAP/BAPENDA-MN/X/2023 PADA BAPENDA KAB.MAJENE SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.920.000,00
V	KECAMATAN BANGGAE DAN KELURAHAN		67.957.200,00
	TAHUN 2020		2.000.000,00
	A. KECAMATAN BANGGAE		2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH KANTOR KECAMATAN BANGGAE CV CREASY CONSULTANT 3578/SPPADA/LS/XII/2020 TGL 28 DESEMBER 2020	BELANJA MODAL	2.000.000,00
	TAHUN 2022		52.547.200,00
	A. KECAMATAN BANGGAE		2.489.200,00
1	LS -PEMBAYARAN LEMBUR KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD KANTOR KECAMATAN BANGGAE SESUAI SPK NOMOR: 05/SPK/KEC-BG/XI/2022 TANGGAL 01 NOVEMBER 2022 (SUMBER DANA: DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.458.000,00
2	LS - SPPADA LUAR DAERAH AN. ARJUNA HAERUDDIN, SE MENGANTAR ATLET KONTINGEN MAJENE (CABOR TAEKWONDO) MENGIKUTI PEKAN OLAHRAHA PROVINSI PORPROVINSI (IV) PADA HARI SENIN S/D SELASA TANGGAL 19 S/D 20 DESEMBER 2022 DI MAMUJU.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.031.200,00
	B. KELURAHAN BANGGAE		7.220.000,00
3	BAYAR BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN RAPAT KANTOR UNTUK BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2022 PADA KANTOR KELURAHAN BANGGAE SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	573.000,00
4	BAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM JAMUAN RAPAT KANTOR UNTUK BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2022 PADA KANTOR KELURAHAN BANGGAE SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.826.000,00
5	BAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM JMAUAN TAMU UNTUK BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER 2022 PADA KANTOR KELURAHAN BANGGAE (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.500,00
6	BAYAR BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR UNTUK BULAN MARET S/D JUNI 2022 PADA KANTOR KEL. BANGGAE (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.560.500,00
7	LS - BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH AN. ANDI NADIFA BASO TONRA LIPU, S.IP DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/26/2022 DAFTAR TERLAMPIR (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD DAN DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.260.000,00
	C. KELURAHAN PANGALI-ALI		4.700.000,00
8	PEMBAYARAN ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR KELURAHAN PANGALI-ALI	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00
9	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TUJUAN MAMUJU DALAM RANGKA KOORDINASI DAN KONSULTASI URUSAN DINAS KANTOR KELURAHAN PANGALI-ALI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/ST/KLPA/12/XI/2022 DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR (SUMBER DANA LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00
	D. KELURAHAN TOTOLI		11.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
10	LS - BELANJA ALAT TULIS KANTOR KELURAHAN TOTOLI BULAN DESEMBER TAHUN 2022, SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
11	BELANJA PENGGANDAAN KANTOR KELURAHAN TOTOLI BULAN DESEMBER TAHUN 2022, SUMBER DANA DBH PROV	BELANJA BARANG DAN JASA	1.850.000,00
12	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT PKK KANTOR KELURAHAN TOTOLI BULAN NOVEMBER TAHUN 2022, SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
13	BELANJA BIAYA MAKAN MINUM TAMU KANTOR KELURAHAN TOTOLI BULAN DESEMBER TAHUN 2022, SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
14	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT PKK KANTOR KELURAHAN TOTOLI BULAN OKTOBER TAHUN 2022, SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
15	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KANTOR KELURAHAN TOTOLI BULAN DESEMBER TAHUN 2022, SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00
16	BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2022, SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD (TOTOLI)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
17	LS- BELANJA KERTAS KANTOR KELURAHAN TOTOLI BULAN DESEMBER TAHUN 2022, SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
18	BELANJA BIAYA SPPADA KELURAHAN TOTOLI BULAN NOVEMBER TAHUN 2022, SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
	E. KELURAHAN BARU		13.820.000,00
19	LS -PEMBAYARAN SPPADA LUAR DAERAH TUJUAN MAMUJU URUSAN DINAS KANTOR KELURAHAN BARU AN. TRISNAMULWARDI, SE DENGAN NO. SURAT TUGAS : 090/07/2022 SUMBER DANA PAD (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	820.000,00
20	LS -PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SOUNDSYSTEM PADA KANTOR KELURAHAN BARU DENGAN NO. SPK : 02/SPK/KEL.BR/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 SUMBER DANA PAD (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA MODAL	3.000.000,00
21	LS -PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN LEPTOP PADA KANTOR KELURAHAN BARU DENGAN NO. SPK : 03/SPK/KEL.BR/XI/2022 TANGGAL 21 NOVEMBER 2022 SUMBER DANA PAD (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA MODAL	10.000.000,00
	F. KELURAHAN RANGAS		12.668.000,00
22	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI MAJENE KE KAB. MAMUJU DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/KEL.RANGAS/95/XI/2022. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00
23	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI RANGAS KEC. BANGGAE TIMUR DAN KEC. MALUNDA AN. TAKBIR, S.P. TAHUN ANGGARAN 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.040.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
24	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI RANGAS KE KEC. BANGGAETIMUR MENGHADIRI PENGUKUHAN DUTA BAPAK ASUH ANAK STUNTING DAN DATA BERESIKO STUNTING KAB. MAJENE. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000,00
25	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI MAJENE KE MAKASSAR AN. IRMAN, A.MD.KOM MENGHADIRI DIALOG ANTARA PEMERINTAH KAB. MAJENE DENGAN HIMPUNAN KELUARGA MANDAR MAJENE (HIKAMM) DENGAN SURAT TUGAS NOMOR 090 /12 /2022. SUMBER DANA PAD DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.648.000,00
26	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI MAJENE KE KAB. MAMUJU DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/KEL.RANGAS/61.A/VIII/2022. SUMBER DANA DBH PROVINSI.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.000,00
27	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DARI MAJENE KE KAB. MAMUJU DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/KEL.RANGAS/61.A/VIII/2022. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	952.000,00
28	BAYAR BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI PADA KANTOR KELURAHAN RANGAS DENGAN NOMOR SPK :01/SPK/KEL.RANGAS/XI/2022 TANGGAL 28-11-2022 TAHUN ANGGARAN 2022. SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	7.500.000,00
	TAHUN 2023		13.410.000,00
	A. KECAMATAN BANGGAE		11.750.000,00
1	PEMBAYARAN RETENSI 5% (PEMELIHARAAN) ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA KANTOR KECAMATAN BANGGAE	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00
2	PEMBAYARAN TIM PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA KANTOR KECAMATAN BANGGAE	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00
3	PEMBAYARAN TIM PENGELOLAAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA KANTOR KECAMATAN BANGGAE	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
4	PEMBAYARAN TIM PERENCANAAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA KANTOR KECAMATAN BANGGAE	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00
	B. KELURAHAN BARU		1.660.000,00
5	LS -PEMBAYARAN PERALATAN DAN BENSIN/OLI MOTOR DINAS KEL. BARU SUMBER DANA DBH PROV TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.660.000,00
W	KECAMATAN BANGGAE TIMUR DAN KELURAHAN		23.370.351,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2022		22.868.530,00
	A. KECAMATAN BANGGAE TIMUR		4.601.000,00
1	BELANJA LANGSUNG (LS) LEMBUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KEUANGAN S.D BULAN OKTOBER TA 2022 TANGGAL 29 OKTOBER 2022 S.D 03 NOVEMBER 2022 PADA KANTOR KEC. BANGGAE TIMUR KAB. MAJENE, SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00
2	BELANJA LANGSUNG (LS) LEMBUR PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) TA 2022 TANGGAL 09 NOVEMBER 2022 S.D 14 NOVEMBER 2022 PADA KANTOR KEC. BANGGAE TIMUR KAB. MAJENE, SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	2.301.000,00
	B. KELURAHAN BARUGA		5.200.000,00
1	BAYAR BELANJA ALAT /BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR UNTUK BULAN DESEMBER TA 2022 PADA KANTOR KELURAHAN BARUGA (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00
2	BELANJA LANGSUNG (LS) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TA 2022 PADA KANTOR KELURAHAN BARUGA SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00
	C. KELURAHAN TANDE		501.821,00
1	BELANJA LANGSUNG ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR/KERTAS DAN COVER UNTUK BULAN DESEMBER TA 2022 KANTOR KELURAHAN TANDE (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	501.821,00
	D. KELURAHAN LABUANG UTARA		2.401.196,00
1	BELANJA LANGSUNG ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR/KERTAS DAN COVER UNTUK BULAN DESEMBER TA 2022 KANTOR KELURAHAN LABUANG UTARA (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.401.196,00
	E. KELURAHAN LABUANG		1.200.000,00
1	BELANJA LANGSUNG (LS) INSENTIF PENUNJANG KOORDINASI BABinsa DAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2022 PADA KANTOR KELURAHAN LABUANG (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00
	F. KELURAHAN LEMBANG		1.481.513,00
1	BELANJA LANGSUNG ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR UNTUK BULAN DESEMBER TA 2022 KANTOR KELURAHAN LEMBANG (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.481.513,00
	G. BARUGA DHUA		3.723.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	BELANJA LANGSUNG ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR KANTOR KELURAHAN BARUGA DHUA TA 2022 (SUMBER DANA DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.015.000,00
2	BELANJA LANGSUNG LOGISTIK KANTOR - MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KELURAHAN BARUGA DHUA TA 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	906.000,00
3	BELANJA LANGSUNG FASILITAS KUNJUNGAN TAMU - BELANJA PAKAN NATURA PADA KANTOR KELURAHAN BARUGA DHUA TA 2022 (SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.802.000,00
	H. KELURAHAN TANDE TIMUR		3.760.000,00
1	PENGAJUAN BELANJA LANGSUNG LS REKAP PERJALANAN DINAS BIASA RP. 3.280.000 PERJALANAN DINAS TETAP RP. 3.884.000 DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 2.020.000 PADA KANTOR KELURAHAN TANDE TIMUR TAHUN 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.740.000,00
2	PENGAJUAN BELANJA LANGSUNG LS REKAP PERJALANAN DINAS BIASA RP. 3.280.000 PERJALANAN DINAS TETAP RP. 3.884.000 DAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 2.020.000 PADA KANTOR KELURAHAN TANDE TIMUR TAHUN 2022 SUMBER DANA LAIN LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.020.000,00
	TAHUN 2023		501.821,00
	A. KELURAHAN TANDE		501.821,00
1	BELANJA LANGSUNG (LS)PEMBAYARAN ATK KERTAS DAN COVER (UTANG TAHUN 2022) KANTOR KELURAHAN TANDE SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	501.821,00
X	KECAMATAN SENDANA DAN KELURAHAN		70.656.500,00
	TAHUN 2022		70.656.500,00
	A. KECAMATAN SENDANA		49.502.500,00
1	PEMBAYARAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM PKK KEC. SENDANA SESUAI SPK NOMOR 011/SPK/KS/IX/2022 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2022 DAN BAST NOMOR 011/BAST/KS/IX/2022 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2022, SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
2	PEMBAYARAN PEMBELIAN BAJU PESERTA LASQI KECAMATAN SENDANA SESUAI SPK NOMOR 012/SPK/KS/XI/2022 TANGGAL 20 NOVEMBER 2022 DAN BAST NOMOR 012/BAST/KS/XI/2022 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022, SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00
3	PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM BUS SEKOLAH BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER 2022 SESUAI NOTA PESANAN DAN NOTA PEMBELIAN TERLAMPIR, SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00
4	PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM MOBIL DINAS CAMAT BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER 2022 SESUAI NOTA PESANAN DAN NOTA PEMBELIAN TERLAMPIR, SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	4.290.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
5	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KETUA T.P PKK KECAMATAN SENDANA DAN PENGURUS PKK KEC. SENDANA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR 090/005/PKK/IX/2022 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2022 DAN SPPADA NOMOR 092/009/PKK/IX/2022 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2022, SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.920.000,00
6	BAYAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANGGOTA FORKOPIMCAM SENDANA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR 090/01/FORKOPIMCAM/2022 TANGGAL 14 MARET 2022 DAN SPPADA NOMOR 092/01/FORKOPIMCAM/2022 TANGGAL 14 MARET 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	11.520.000,00
7	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH CAMAT DAN STAF SESUAI SURAT TUGAS NOMOR 090/1991/2022 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2022 DAN SPPD NOMOR 092/128/IX/2022 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00
8	PEMBAYARN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH CAMAT DAN STAF, SESUAI SURAT TUGAS NOMOR 090/2210.A/2022 TANGGAL 14 OKTOBER 2022 DAN SPPADA NOMOR 092/149/X/2022 TANGGAL 14 OKTOBER 2022, SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	2.272.500,00
9	PEMBAYARAN PEMBELIAN KOMPUTER PC SESUAI SPK NOMOR 002/SPK/KMD/XI/2022 TANGGAL 20 NOVEMBER 2022 DAN BAST NOMOR 002/BAST/KMD/XII/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022	BELANJA MODAL	9.200.000,00
	B. KELURAHAN MOSSO		11.140.000,00
10	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN HUT RI TAHUN 2022 PADA KANTOR KELURAHAN MOSSO BULAN DESEMBER 2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
11	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA KANTOR KEL. MOSSO BULAN DESEMBER 2022 SESUAI SPK NO. 01/SPK/KM/2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022 DAN BAPP NO. 01/BAPP/KM/2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.000,00
12	PEMBAYARAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PKK KEL. MOSSO BULAN DESEMBER 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	360.000,00
13	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH SEKRETARIS LURAH KEL.MOSSO KE MAMUJU TANGGAL 14-15 OKTOBER 2022 SESUAI SURAT TUGAS NO. 090/099/KM/X/2022 TGL 14 OKTOBER 2022 DAN SPPADA NO. 094/099//2022 TGL 14-15 OKTOBER 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.230.000,00
14	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ASN DAN STAF KANTOR KEL.MOSSO BULAN MEI S/D DESEMBER 2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.960.000,00
15	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS KETUA PKK KEL. MOSSO TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	640.000,00
	C. KELURAHAN MOSSO DHUA		10.014.000,00
16	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ASN DAN STAF KANTOR KEL.MOSSO DHUA BULAN DESEMBER 2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.120.000,00
17	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH ASN DAN STAF KANTOR KEL.MOSSO DHUA BULAN DESEMBER 2022, SUMBER DANA DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	1.591.522,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
18	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH ASN DAN STAF KANTOR KEL.MOSSO DHUA BULAN DESEMBER 2022, SUMBER DANA DAU (NON EARMARK)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.302.478,00
Y	KECAMATAN MALUNDA DAN KELURAHAN		53.170.832,00
	TAHUN 2022		53.170.832,00
	A. KECAMATAN MALUNDA		4.834.332,00
1	BAYAR BELANJA TAGIHAN AIR DARI BULAN AGUSTUS S/D OKTOBER, LISTRIK DARI BULAN AGUSTUS S/D NOVEMBER DAN TAGIHAN WIFI INDIHOME DARI BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2022 PADA SUMBER DANA DAU, DBH PROVINSI, LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.964.682,00
2	BAYAR BELANJA TAGIHAN AIR DARI BULAN AGUSTUS S/D OKTOBER, LISTRIK DARI BULAN AGUSTUS S/D NOVEMBER DAN TAGIHAN WIFI INDIHOME DARI BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2022 PADA SUMBER DANA DAU, DBH PROVINSI, LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	138.000,00
3	BAYAR BELANJA TAGIHAN AIR DARI BULAN AGUSTUS S/D OKTOBER, LISTRIK DARI BULAN AGUSTUS S/D NOVEMBER DAN TAGIHAN WIFI INDIHOME DARI BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2022 PADA SUMBER DANA DAU, DBH PROVINSI, LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	580.000,00
4	BELANJA ALAT /BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR DARI BULAN APRIL S/D AGUSTUS TAHUN 2022 PADA SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	647.650,00
5	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT DARI BULAN APRIL S/D AGUSTUS DAN MAKAN MINUM JAMUAN TAMU DARI BULAN APRIL S/D AGUSTUS 2022. PADA SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
6	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT DARI BULAN APRIL S/D AGUSTUS DAN MAKAN MINUM JAMUAN TAMU DARI BULAN APRIL S/D AGUSTUS 2022. PADA SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	504.000,00
	B. KELURAHAN MALUNDA		27.821.500,00
7	PEMBAYARAN BELANJA PENGGUNAAN ATK KANTOR LURAH MALUNDA UNTUK BULAN JANUARI S/D MARET 2022. PADA SUMBER DANA LAIN PAD SESUAI NOTA DAN KWITANSI TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.985.500,00
8	PEMBAYARAN BELANJA PENGGUNAAN ATK KANTOR LURAH MALUNDA UNTUK BULAN APRIL S/D MEI 2022. PADA SUMBER DANA LAIN PAD SESUAI NOTA DAN KWITANSI TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.595.000,00
9	PEMBAYARAN BELANJA PENGGUNAAN ATK KANTOR LURAH MALUNDA UNTUK BULAN JUNI S/D AGUSTUS 2022. PADA SUMBER DANA DAU SESUAI NOTA DAN KWITANSI TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.687.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
10	PEMBAYARAN BELANJA PENGGUNAAN ATK KANTOR LURAH MALUNDA UNTUK BULAN SEPTEMBER S/D OKTOBER 2022. PADA SUMBER DANA DBH PROVINSI SESUAI NOTA DAN KWITANSI TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.519.000,00
11	PEMBAYARAN BELANJA PENGGUNAAN ATK KANTOR LURAH MALUNDA UNTUK BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER 2022. PADA SUMBER DANA DBH PROVINSI SESUAI NOTA DAN KWITANSI TERLAMPIR.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
12	BAYAR BELANJA PEMUATAN UCAPAN HARI JADI MAJENE YANG KE 47 DOK. HARIAN KAREWA MANDAR, UNTUK BULAN AGUSTUS 2022. PADA SUMBER DANA DAU.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
13	BAYAR BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN <i>WIFI</i> INDIHOME DARI BULAN MARET S/D NOVEMBER 2022 KNTOR LURAH MALUNDA PADA SUMBER LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.265.000,00
14	BAYAR BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN <i>WIFI</i> INDIHOME DARI BULAN MARET S/D NOVEMBER 2022 KNTOR LURAH MALUNDA PADA SUMBER LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.850.000,00
15	PEMBAYARAN BELANJA BIASA, SPPADA TETAP, DAN SPPADA DALAM KOTA KANTOR KELURAHAN MALUNDA KECAMATAN MALUNDA UNTUK BULAN JULI S/D DESEMBER 2022. PADA SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.230.000,00
16	PEMBAYARAN BELANJA BIASA, SPPADA TETAP, DAN SPPADA DALAM KOTA KANTOR KELURAHAN MALUNDA KECAMATAN MALUNDA UNTUK BULAN JULI S/D DESEMBER 2022. PADA SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.290.000,00
17	PEMBAYARAN BELANJA BIASA, SPPADA TETAP, DAN SPPADA DALAM KOTA KANTOR KELURAHAN MALUNDA KECAMATAN MALUNDA UNTUK BULAN JULI S/D DESEMBER 2022. PADA SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00
18	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN MEDEL KURSI TAMU 1 (SATU) STEL DAN SOFA 1 (SATU) STEL KANTOR LURAH MALUNDA DENGAN SPK NOMOR: 001/SPK-KEL.MLD/XI/2022 PADA SUMBER DANA LAIN PAD.	BELANJA MODAL	9.500.000,00
	C. KELURAHAN LAMUNGAN BATU		20.515.000,00
19	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN PERJALANAN DINAS BIASA KANTOR KELURAHAN LAMUNGAN BATU KECAMATAN MALUNDA UNTUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER DAN JULI S/D DESEMBER 2022. PADA SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00
20	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN PERJALANAN DINAS BIASA KANTOR KELURAHAN LAMUNGAN BATU KECAMATAN MALUNDA UNTUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER DAN JULI S/D DESEMBER 2022. PADA SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.920.000,00
21	PEMBAYARAN BELANJA MODA PENGADAAN MEDEL KURSI PUTAR SEBANYAK 1 UNIT DAN MEJA BIRO SEBANYAK 4 UNIT DENGAN SPK NOMOR: 008/SPK/LMB/XII/2022 DAN BAST 008/BAST/KEL-LMB/XII/2022	BELANJA MODAL	10.495.000,00
Z	KECAMATAN ULUMANDA		24.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2022		24.600.000,00
1	BELANJA LANGSUNG (LS) PENGADAAN PAKAIAN DINAS KANTOR KECAMATAN ULUMANDA TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00
2	BELANJA LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS KANTOR CAMAT ULUMANDA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022 (SUMBER DANA DAU) SESUAI BELANJA PERJALANAN DINAS TETAP NOMOR: 090/114/2022 DAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA NOMOR: 090/100/2022	BELANJA BARANG DAN JASA	3.280.000,00
3	BELANJA LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS KANTOR CAMAT ULUMANDA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022 (SUMBER DANA DAU) SESUAI BELANJA PERJALANAN DINAS TETAP NOMOR: 090/114/2022 DAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA NOMOR: 090/100/2022	BELANJA BARANG DAN JASA	12.320.000,00
AA	KECAMATAN TUBO		24.261.000,00
	TAHUN 2022		24.261.000,00
1	PEMBAYARAN SARANA PENYEDIAAN ALAT LISTRIK KANTOR (TAGIHAN LISTRIK KANTOR) UNTUK KECAMATAN TUBO SENDANA TAHUN ANGGARAN 2022 SUMBER DANA ALOKASI UMUM	BELANJA BARANG DAN JASA	9.321.000,00
2	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH UNTUK PEGAWAI KANTOR KECAMATAN TUBO SENDANA TAHUN ANGGARAN 2022 SUMBER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00
3	PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH UNTUK PEGAWAI KANTOR KECAMATAN TUBO SENDANA TAHUN ANGGARAN 2022 SUMBER DANA ALOKASI UMUM (DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.940.000,00
AB	KECAMATAN TAMMERODO		20.187.500,00
	TAHUN 2022		20.187.500,00
1	LS -PEMBAYARAN BELANJA PERJALAN DINAS (SPPD) DALAM KOTA PEGAWAI SESUAI SURAT TUGAS, NOMOR: 090/1877.A/2022 PADA KANTOR KECAMATAN TAMMERODO SENDANA TA 2022. (SUMBER DANA: DAU) REKAP TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	6.650.000,00
2	LS -PEMBAYARAN BELANJA PERJALAN DINAS (SPPD) TETAP/LUAR DAERAH PEGAWAI SESUAI SURAT TUGAS, NOMOR: 090/2009.A/2022 DAN DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS, NOMOR: 090/666/2022 PADA KANTOR KECAMATAN TAMMERODO SENDANA TA 2022 (SUMBER DANA: DAU) REKAP TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	5.450.000,00
3	LS -PEMBAYARAN BELANJA PERJALAN DINAS (SPPD) TETAP/LUAR DAERAH PEGAWAI SESUAI SURAT TUGAS, NOMOR: 090/2009.A/2022 DAN DALAM KOTA SESUAI SURAT TUGAS, NOMOR: 090/666/2022 PADA KANTOR KECAMATAN TAMMERODO SENDANA TA 2022 (SUMBER DANA: DAU) REKAP TERLAMPIR	BELANJA BARANG DAN JASA	8.087.500,00
AC	BADAN PERENCANAAN DAERAH		625.014.208,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2022		625.014.208,00
1	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA PADA KANTOR BAPEDA SESUAI SURAT PERINTAH KERJA/SURAT PESANAN NOMOR: 050.13/015-NP/BAPEDA/XI/2022 TANGGAL 31 OKTOBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	19.345.000,00
2	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN BULAN OKTOBER - DESEMBER SESUAI SK NOMOR :676/HK/KEP-BUP/VI/2022 TANGGAL 10 JUNI 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	46.200.000,00
3	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA LEMBUR KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/89/X/2022 TGL 1 OKTOBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.767.200,00
4	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA LEMBUR KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/91/X/2022 TGL 1 OKTOBER 2022 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.835.000,00
5	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA LEMBUR KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/68/VIII/2022 TGL 18 AGUSTUS 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.380.000,00
6	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA LEMBUR KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/90/X/2022 TGL 1 OKTOBER 2022 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.621.000,00
7	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA LEMBUR KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/92/XI/2022 TGL 1 NOVEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.370.000,00
8	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA LEMBUR KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/85/2022 TGL 26 OKTOBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.692.000,00
9	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA STUDI PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK PADA KANTOR BAPEDA SESUAI SURAT PERINTAH KERJA/SURAT PESANAN NOMOR: 050.13/02-SPK/BAPEDA/XI/2022 TANGGAL 14 NOVEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
10	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA STUDI PENELITIAN DAN BANTUAN TEKNIK PADA KANTOR BAPEDA SESUAI SURAT PERINTAH KERJA/SURAT PESANAN NOMOR: 050.13/01-SPK/BAPEDA/XI/2022 TANGGAL 14 NOVEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00
11	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/193/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
12	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/194/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
13	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/194/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.859.600,00
14	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 090/1211/2022 TANGGAL 29 AGUSTUS 2022 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.252.000,00
15	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/188/2022 TANGGAL 7 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.271.200,00
16	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/191/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.796.200,00
17	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/13/2022 TANGGAL 17 FEBRUARI 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.280.000,00
18	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 090/2627/2022 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.749.000,00
19	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/126/2022 TANGGAL 26 AGUSTUS 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.966.000,00
20	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 090/1229/2022 TANGGAL 29 AGUSTUS 2022 (SUMBER DANA DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.127.700,00
21	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/191/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.155.860,00
22	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/194/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.237.600,00
23	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/190/2022 TANGGAL 12 DESEMBER 2022 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	11.620.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
24	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/77/2022 TANGGAL 7 JUNI 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	12.336.637,00
25	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/77/2022 TANGGAL 7 JUNI 2022 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	13.587.400,00
26	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/161/2022 TANGGAL 2 NOVEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	14.793.200,00
27	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/077/2022 TANGGAL 7 JUNI 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	14.996.000,00
28	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/176/2022 TANGGAL 15 NOVEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	15.085.800,00
29	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/011/2022 TANGGAL 11 FEBRUARI 2022 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	15.148.400,00
30	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/151/2022 TANGGAL 14 OKTOBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	20.165.600,00
31	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/982/2022 TANGGAL 14 OKTOBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	24.995.800,00
32	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/184/2022 TANGGAL 2 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	28.143.640,00
33	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/133/2022 TANGGAL 8 AGUSTUS 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	35.310.457,00
34	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/077/2022 TANGGAL 7 JUNI 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	53.292.885,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
35	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/131/2022 TANGGAL 30 AGUSTUS 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	55.975.900,00
36	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/124/2022 TANGGAL 5 AGUSTUS 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	772.000,00
37	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/124/2022 TANGGAL 5 AGUSTUS 2022 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.144.000,00
38	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/139/2022 TANGGAL 1 OKTOBER 2022(LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00
39	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/124/2022 TANGGAL 5 AGUSTUS 2022 (PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.994.000,00
40	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/088/2022 TANGGAL 20 JUNI 2022 (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.346.000,00
41	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/136/2022 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00
42	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/109/VII/2022 TANGGAL 18 JULI 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.318.000,00
43	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/139/2022 TANGGAL 1 OKTOBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.994.000,00
44	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/124/2022 TANGGAL 5 AGUSTUS 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.355.000,00
45	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/124/2022 TANGGAL 5 AGUSTUS 2022 (DBH PROVINSI)	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
46	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 050.13/112/2022 TANGGAL 11 FEBRUARI 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	14.910.000,00
47	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA MODAL PERSONAL <i>COMPUTER</i> PADA KANTOR BAPEDA SESUAI SURAT PERINTAH KERJA/SURAT PESANAN NOMOR: 050.13/001-NP/BAPEDA/XII/2022 TANGGAL 16 DESEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA MODAL	30.850.000,00
48	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA MODAL PERSONAL <i>COMPUTER</i> KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA KANTOR BAPEDA SESUAI SURAT PERINTAH KERJA/SURAT PESANAN NOMOR: 050.13/020-NP/BAPEDA/XI/2022 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA MODAL	4.600.000,00
49	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PADA KANTOR BAPEDA SESUAI SURAT PERINTAH KERJA/SURAT PESANAN NOMOR: 050.13/001-SPK/BAPEDA/XII/2022 TGL 15 DESEMBER 2022 (25.172.570, - DBH PROVINSI) (100.95, - PAD)	BELANJA MODAL	25.273.529,00
AD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		1.050.612.744,00
	TAHUN 2022		917.843.844,00
1	LS HONOR PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG & JASA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN REHABILITASI, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN & ATAU KERUSAKAN LH KAB./KOTA SESUAI SK NO: 997/HK/KEP-BUP/X/2022 TGL 31-10-2022 DBH PROVINSI	BELANJA PEGAWAI	31.355.000,00
2	LS HONOR PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG & JASA KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR SECARA OTOMATIS, KONTINYU & ONLINE, KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LH KAB./KOTA SESUAI SK NO: 998/HK/KEP-BUP/X/2022 TGL 31-10-2022 DBH PROVINSI	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00
3	ANGSURAN 100% PENGADAAN TANAMAN HIAS SPK NO.277/2.11.04.2.01.04.0008/1B/XII/2022 TGL 08-12-2022, BAST NO.309/2.11.04.2.01.04.0008/2.B/XII/2022 TGL 13-12-2022 & BAP NO.312/2.11.04.2.01.04.0008/2.B/XII/2022 TGL 13-12-2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.400.000,00
4	ANGSURAN 100% PENANAMAN POHON PRODUKTIF UNTUK PENCEGAHAN LAHAN KRITIS PUAWANG SPK NO.272/2.11.03.2.03.04.0008/1B/XII/2022 TGL 08-12-2022, BAST NO.315/2.11.03.2.03.04.0008/2.B/XII/2022 TGL 13-12-2022 & BAP NO.318/2.11.03.2.03.04.0008/2.B/XII/2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	85.500.000,00
5	ANGSURAN 100% PENANAMAN MANGROVE DI DESA TOTOLISI SENDANA SPK NO.292/2.11.03.2.03.04.0008/1B/XI/2022 TGL 09-12-2022, BAST NO.339/2.11.03.2.03.04.0008/2.B/XII/2022 TGL 13-12-2022 & BAP NO.342/2.11.03.2.03.04.0008/2.B/XII/2022 TGL 13-12-2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	47.500.000,00
6	ANGSURAN 100% PENANAMAN MANGROVE DI PESIRIS PANTAI KAB. MAJENE SPK NO.287/2.11.03.2.03.04.0008/1B/XII/2022 TGL 09-12-2022, BAST NO.333/2.11.03.2.03.04.0008/2.B/XII/2022 TGL 13-12-2022 & BAP NO.336/2.11.03.2.03.04.0008/2.B/XII/2022 TGL 13-12-2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00
7	ANGSURAN 100% PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI KEBERSIHAN SARUNG TANGAN NOTA PESANAN NO.900/704.A/2022 TGL 10-10-2022, BAST NO.349/900/2.B/XII/2022 TGL 14-12-2022 & BAP NO.351/900/2.B/XII/2022 TGL 14-12-2022 DAU PMK 07	BELANJA BARANG DAN JASA	5.434.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
8	ANGSURAN 100% PENGADAAN PERLENGKAPAN DINAS SEPATU BOOTS NOTA PESANAN NO.900/703.A/2022 TGL 10-10-2022, BAST NO.343/900/2.B/XII/2022 TGL 14-12-2022 & BAP NO.345/900/2.B/XII/2022 TGL 14-12-2022 DAU PMK 07	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00
9	ANGSURAN 100% PENANAMAN TANAMAN PRODUKTIFDI DESA LIMBORO RAMBU2 SPK NO.202/2.11.03.2.03.04.0039/1.B/XI/2022 TGL 1-11-2022, BAST NO.229/2.11.03.2.03.04.0039/2.B/XI/2022 TGL 11-11-2022 & BAP NO.232/2.11.03.2.03.04.0039/2.B/XI/2022 TGL 11-11-2022. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00
10	ANGS. 100% PENCEGAHAN LAHAN KRITIS DENGAN PENANAMAN TANAMAN PRODUKTIFDI DESA TALLUBANUA UTARA SPK NO.254/2.11.03.2.03.04.0039/1B/XI/2022 TGL 25-11-2022, BAST NO.327/2.11.03.2.03.04.0039/2.B/XII/2022 TGL 13-12-2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00
11	LS HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN REHABILITASI, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA SESUAI SK NO: 997/HK/KEP-BUP/X/2022 TGL 31-10-2022 PADA DLHK. DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	29.250.000,00
12	LS HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR SECARA OTOMATIS, KONTINYU DAN ONLINE, KEGIATAN PENGELOLAAM LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA SESUAI SK NO: 998/HK/KEP-BUP/X/2022 TGL 31-10-2022 PADA DLHK DBH PROVINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00
13	ANG. 100% PELATIHAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN NO.195/2.11.03.2.01.02.0007/1.B/X/2022 TGL 24-10-2022, BAST NO.246.C/2.11.11.2.01.04.0007/2.B/XI/2022 TGL 23-11-2022 & BAP NO.247/2.11.11.2.01.04.0007/2.B/XI/2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
14	ANGS.100% PLTHN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI BARANG LYK PAKAI SPK : NO.225/2.11.11.2.01.04.0007/1.B/XI/2022 TGL 11-11-2022, BAST NO.283/2.11.11.2.01.04.0007/2.B/XII/2022 TGL 09-12-2022 & BAP NO.285/2.11.11.2.01.04.0007/2.B/XII/2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
15	ANGS 100% SATUAN PEMELIHARAAN KEND. RODA 4 OPER. KEBER (PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK/BBM KEND. KEBER) NOTA PESANAN NO.900/748.A/2022 TGL 02-11-2022, BAST NO.352/900/2.B/XII/2022 TGL 14-12-2022 & BAP NO.354/900/2.B/XII/2022 TGL 14-12-2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	29.890.244,00
16	ANGS 100% SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 OPERASIONAL KEBERS (PENGADAAN SUKU CADANG KEND KEBERSIHAN) NOTA PESANAN NO.900/478.A/2022 TGL 16-11-2022, BAST NO.346/900/2.B/XII/2022 TGL 14-12-2022 & BAP NO.348/900/2.B/XII/2022 TGL 14-12-2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	29.500.000,00
17	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, NO.SURAT TUGAS : 090/743/2022 PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	8.445.600,00
18	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH), NO.SURAT TUGAS : 090/732/2022 PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.876.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
19	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN KOORDINASI & SINKRONISASI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN/ATAU PENYIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ATAU MELALUI PENGADILAN, NO.SURAT TUGAS : 090/733/2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	6.240.000,00
20	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA NO.SURAT TUGAS : 090/707.B/2022, 090/757/2022 PADA DLHK KAB. MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	6.392.100,00
21	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LH KABUPATEN/KOTA NO.SURAT TUGAS : 090/205/2022 PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.764.000,00
22	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA NO.SURAT TUGAS : 090/74/2022, 090/153/2022 PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	6.088.000,00
23	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENGURANGAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMBATAAN, PENDAURAN ULANG DAN PEMANFAATAN KEMBALI NO.SURAT TUGAS : 090/744/2022 PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.728.800,00
24	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) NO.SURAT TUGAS : 090/665/2022, 090/655/2022, 090/731/2022, 090/467.A/2022 PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.356.000,00
25	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LH KABUPATEN/KOTA NO.SURAT TUGAS : 090/518/2022, 090/508/2022, 090/516/2022, 090/672/2022, 090/739/2022, 090/740/2022, 090/752/2022, 090/508/2022, PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	6.910.000,00
26	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA NO.SURAT TUGAS : 090/653/2022, 090/656/2022, 090/657/2022, 090/697/2022, 090/711/2022, 090/714.A/2022, 090/727/2022, PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	7.986.000,00
27	LS PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN KOORDINASI & SINKRONISASI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN/ATAU PENYIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ATAU MELALUI PENGADILAN NO.SURAT TUGAS 090/666/2022, 090/750/2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.230.000,00
28	LS PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, NO.SURAT TUGAS : 090/834/2022, 090/717/2022, 090/718/2022 LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.648.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
29	LS PENGAWAS PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BANGUNAN PELINDUNG ALAT PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN, PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP SK NO: 999/HK/KEP-BUP/X/2022 TGL 31-10-2022 PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	3.000.000,00
30	LS HONOR PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BANGUNAN PELINDUNG ALAT PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN, PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP SK NO: 999/HK/KEP-BUP/X/2022 TGL 31-10-2022 PADA DLHK KABUPATEN MAJENE. LAIN-LAIN PAD	BELANJA MODAL	2.250.000,00
	TAHUN 2023		132.768.900,00
1	ANG 100% SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 OPERASIONAL KEBERSIHAN (PENGADAAN BBM KENDARAAN KE IX) NOVEMBER NO.179/2.11.01.2.09.02.0035/1.C/XII/2023, BAST NO.184/2.11.01.2.09.02.0035/2.B/XII/2023 & BAP NO.186/2.11.01.2.09.02.0035/2.B/XII/2023 PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00
2	ANG 100% SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 OPERASIONAL KEBERSIHAN (PENGADAAN BBM KENDARAAN KE VIII) NOVEMBER NO.178/2.11.01.2.09.02.0036/1.C/XII/2023, BAST NO.181/2.11.01.2.09.02.0036/2.B/XII/2023 & BAP NO.183/2.11.01.2.09.02.0036/2.B/XII/2023 PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.476.000,00
3	ANG 100% BELANJA BALIHO TA 2023 NOTA PESANAN NOMOR: 180/2.11.11.2.01.04.0024/1.C/XII/2023, BAST NOMOR: 187/2.11.11.2.01.04.0024/2.B/XII/2023 & BAP NOMOR: 189/2.11.11.2.01.04.0024/2.B/XII/2023 DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
4	ANG 100% ATAS PENGADAAN ALAT PEMBAKARAN SAMPAH DI DESA BABABULO UTARA KECAMATAN PAMBOANG SESUAI SPK NO.168/2.11.11.2.01.07.0039/1.B/X/2023, BAST NO.174/2.11.11.2.01.07.0039/2.B/XII/2023 & BAP NO.177/2.11.11.2.01.07.0039/2.B/XII/2023 DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	64.700.000,00
5	PEMBAYARAN LS TAGIHAN PAJAK KENDARAAN DINAS TA 2023 NOTA TAGIHAN NOMOR: 190/2.11.01.2.09.02.0067/1.C/XII/2023, BAST NOMOR: 191/2.11.01.2.09.02.0067/2.B/XII/2023 & BAP NOMOR :193/2.11.01.2.09.02.0067/2.B/XII/2023 PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	7.592.900,00
AE	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		591.835.600,00
	TAHUN 2022		522.535.600,00
1	BAYAR BELANJA BAHAN KOMPUTER BERUPA BELANJA TINTA/RIBBON PADA KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN & PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN SESUAI SPK NO.902/SPK-1/DISDUKCAPIL/II/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00
2	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA (LUAR DAERAH) PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	37.551.600,00
3	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN PERISTIWA KEPENDUDUKAN SESUAI SPK NO. 08.A/SPK-KEU/DUK-CAPIL/VII/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.656.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
4	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEG PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN PELAKSANANAAN, PEMANTAUAN PENYELENGGARAN ADMINDUK SESUAI SPK NO. 011.A/SPK-KEU/DUK-CAPIL/VIII/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00
5	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SESUAI SPK NO. 012/SPK-KEU/DUK-CAPIL/X/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.000,00
6	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA & IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD SESUAI SPK NO. 013/SPK-KEU/DUK-CAPIL/X/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.000,00
7	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD SESUAI SPK NO. 014/SPK-KEU/DUK-CAPIL/X/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.000,00
8	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SPK NO.001/SPK-KEU/DUK-CAPIL/I/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00
9	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI SPK NO.02.A/SPK-KEU/DUK-CAPIL/I/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00
10	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD SESUAI SPK NO. 02.C/SPK-KEU/DUK-CAPIL/II/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	592.000,00
11	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA UMUM KANTOR SESUAI SPK NO. 05.A/SPK-KEU/DUK-CAPIL/V/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00
12	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTAR PENDUDUK SESUAI SPK NO. 06/SPK-KEU/DUK-CAPIL/VI/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (2.12.02.2.01.04)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.416.000,00
13	BAYAR BELANJA PERJALANANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN JASA SURAT MENYURAT TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022 DANA LAIN-LAIN PAD (2.12.01.2.08.01)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.225.000,00
14	BAYAR BELANJA PERJALANANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022 (2.12.04.2.03.05)	BELANJA BARANG DAN JASA	12.960.000,00
15	BAYAR BELANJA PERJALANANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN SUPERVISI BERSAMA DENGAN KANTOR KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022 (2.12.03.2.03.03)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.590.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
16	BAYAR BELANJA ATK BERUPA BLANGKO KIA PADA KEGIATAN PENCATATAN. PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN SESUAI SPK NO.902/SPK03/DISDUKCAPIL/VIII/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.MAJENE TA 2022 (2.12.02.2.01.05)	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
17	PEMBAYARAN UANG LEMBUR PNS DAN NON PNS PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RKA-SKPD SESUAI SPK NO. 02.B/SPK-KEU/DUK-CAPIL/II/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.01.2.01.02)	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00
18	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.01.2.06.09)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00
19	BAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PADA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022 (DAU) (2.12.01.2.06.09)	BELANJA BARANG DAN JASA	26.035.000,00
20	BAYAR BELANJA BAHAN KOMPUTER BERUPA TINTA PADA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.01.2.01.01)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
21	BAYAR BELANJA KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.01.2.08.01)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
22	BAYAR BELANJA KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.02.2.01.04)	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
23	BAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.01.2.08.01)	BELANJA BARANG DAN JASA	37.390.000,00
24	BAYAR BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA KEGIATAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (DBH PROV) (2.12.04.2.01.02)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
25	BAYAR BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.01.2.06.05)	BELANJA BARANG DAN JASA	62.100.000,00
26	BAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDUDUK UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.02.2.01.04)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.880.000,00
27	BAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT DAN TAMU PADA KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.780.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
28	BAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT DAN TAMU PADA KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	23.080.000,00
29	BAYAR BELANJA BAHAN KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (LAIN-LAIN PAD) (2.12.02.2.01.05)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.480.000,00
30	BAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PADA KEGIATAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (DBH PROVINSI) (2.12.05.2.01.02)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
31	BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD (2.12.01.2.09.09)	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00
32	BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD (2.12.01.2.09.02)	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00
33	BAYAR BELANJA KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (DBH PROVINSI) (2.12.05.2.01.02)	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00
34	BAYAR BELANJA BAHAN KOMPUTER PADA KEGIATAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN UNTUK BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (DBH PROVINSI) (2.12.05.2.01.02)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00
35	BAYAR BELANJA BAHAN CETAK BERUPA FILM <i>PRINTER</i> PADA KEG PENCATATAN.PENATAUSAHAAN & PENERBITAN DOK ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN SESUAI SPK NO.902/SP-04/DISDUKCAPIL/VIII/2022 RINCIAN SUMBER DBHPROV. RP.7.500.000 DAN LAIN-LAIN PAD RP.28.500.000 TA 2022 (2.12.02.2.01.05)	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00
36	BAYAR HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA PADA KEGIATAN SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (2.12.04.2.03.05)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.350.000,00
37	BAYAR BELANJA MODAL BERUPA BELANJA MODAL MEBEUL DAN BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR SESUAI SPK NO.810/428/SPK/DISDUK-CAPIL/XII/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (2.12.01.2.07.06)	BELANJA MODAL	15.300.000,00
38	BAYAR BELANJA MODAL BERUPA BELANJA MODAL MEBEUL DAN BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR SESUAI SPK NO.810/428/SPK/DISDUK-CAPIL/XII/2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE TA 2022 (2.12.01.2.07.06)	BELANJA MODAL	29.000.000,00
	TAHUN 2023		69.300.000,00
1	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER (BLANGKO KARTU IDENTITAS ANAK) 4792000000-PNN-098543789	BELANJA BARANG DAN JASA	69.300.000,00
AF	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		282.388.980,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2022		282.388.980,00
1	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BULAN DESEMBER TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	99.655.080,00
2	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA DAU)	BELANJA BARANG DAN JASA	16.058.900,00
3	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	57.755.000,00
4	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.288.000,00
5	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.026.000,00
6	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	6.226.000,00
7	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	12.716.000,00
8	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00
9	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00
10	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT /BID. KELEMBAGAAN PADA KANTOR	BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.000,00
11	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPADA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	4.430.000,00
12	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	5.936.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
13	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	14.248.000,00
14	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.989.000,00
15	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	3.736.000,00
16	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.860.000,00
17	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00
18	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.860.000,00
19	BELANJA LANGSUNG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KANTOR DINAS PMD KAB. MAJENE TA 2022 (SUMBER DANA LLPAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	24.355.000,00
AG	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		284.386.352,00
	TAHUN 2022		284.386.352,00
1	BELANJA MAKAN DAN MINUM PADA KEGIATAN ORIENTASI TEKHNIS KELOMPOK KEGIATAN(BKB, BKR, BKL, UPPKA) BAGI MITRA DAN ORMAS PADA TANGGAL 24-24 OKTOBER 2022(LAIN - LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00
2	BELANJA SEWA GEDUNG PADA KEGIATAN TEKHNIS KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL, UPPKA) BAGI MITRA DAN ORMAS PADA TANGGAL 24-25 OKTOBER 2022 (LAIN - LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
3	BELANJA BAHAN KOMPUTER KEGIATAN ORIENTASI TEKNIS KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL, UPPKA) BAGI MITRA DAN ORMASPPD TGL 24-25 OKTOBER 2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.037.652,00
4	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN ORIENTASI TEKHNIS KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL, UPPKA) BAGI MITRA DAN ORMAS PADA TANGGAL 24-25 OKTOBER 2022.(LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	18.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
5	BELANJA BAHAN KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN ORIENTASI TEKNIS KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL, UPPKA) BAGI MITRA DAN ORMAS PADA TANGGAL 24-25 OKTOBER 2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	418.600,00
6	UNTUK KEPERLUAN BELANJA PERLENGKAPAN DINAS (BAJU PANITIA) PADA KEGIATAN ORIENTASI TEKNIS KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL, UUPKA) BAGI MITRA DAN ORMAS PADA TANGGAL 24-25 OKTOBER 2022.(LAIN - LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00
7	BAYAR SOSIALISASI PERENCANAAN HIDUP BERKELUARGA BAGI REMAJA SESUAI SPK NO. 015/SPK/DPPKB/KB/XI/2022 DAN BAP NO 015/BAP/DPPKB/KB/XII/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.800,00
8	BAYAR SOSIALISASI PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KKB SESUAI PERMENPAN NO. 18 TAHUN 2020 SESUAI SPK NO. 16/SPK/DPPKB/KKK/XII/2022 DAN BAP NO. 16/BAP/DPPKB/SEK/XII/2022. (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.800,00
9	BAYAR SOSIALISASI REMAJA ANTI STUNTING DI DESA PALIPI SOREANG SESUAI SPK NO. 17/SPK/DPPKB/KKK/XII/2022 DAN BAP NO. 17/BAP/DPPKB/KKK/XII/2022 (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.800,00
10	BAYAR SOSIALISASI ORANG TUA HEBAT DALAM PENURUNAN STUNTING SESUAI SPK NO.18/SPK/DPPKB/KKK/XII/2022 DAN BAP NO. 18/BAP/DPPKB/KKK/XII/2022. (LAIN LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.800,00
11	BAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT (KOORDINASI DAN MONITORING STUNTING) KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TA 2022 (LAIN - LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	21.860.000,00
12	BAYAR PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (TRANSFOR PESERTA) KEGIATAN ORIENTASI TEKNIS KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL, UPPKA) BAGI MITRA DAN ORMAS PADA TANGGAL 24-25 OKTOBER 2022 (LAIN - LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	10.300.000,00
13	BAYAR SPPADA LUAR KUNJUNGAN TERKAIT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TA 2022. (LAIN - LAIN PAD)	BELANJA BARANG DAN JASA	18.936.900,00
AH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		314.308.900,00
	TAHUN 2022		314.308.900,00
1	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER, KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.317.000,00
2	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER KERTAS DAN COVER KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	882.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
3	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER KERTAS DAN COVER KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	527.600,00
4	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN CETAK, KERTAS DAN COVER PADA BIDANG PERIZINAN KEGIATAN PENY.PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00
5	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN CETAK, KERTAS DAN COVER PADA BIDANG PERIZINAN KEGIATAN PENY.PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.170.000,00
6	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER DAN PENGGANDAAN KEGIATAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00
7	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, KERTAS DAN COVER PADA PEMANTAUAN KOMITMEN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
8	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER, KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.424.000,00
9	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER KERTAS DAN COVER KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.070.000,00
10	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN CETAK, KERTAS DAN COVER PADA BIDANG PERIZINAN KEGIATAN PENY.PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	208.000,00
11	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER DAN PENGGANDAAN KEGIATAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00
12	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, KERTAS DAN COVER PADA PEMANTAUAN KOMITMEN PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	550.000,00
13	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN CETAK, KERTAS DAN COVER PADA BIDANG PERIZINAN KEGIATAN PENY.PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
14	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER DAN PENGGANDAAN KEGIATAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	240.000,00
15	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER, KERTAS DAN COVER PADA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	759.000,00
16	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN CETAK, KERTAS DAN COVER PADA BIDANG PERIZINAN KEGIATAN PENY. PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00
17	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BAHAN KOMPUTER DAN PENGGANDAAN KEGIATAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	710.000,00
18	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
19	BIAYAPEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM TAMU KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA SUMBER DANA LAIN - LAIN PENDAPATAN	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00
20	BELANJA HONORARIUM KEGIATAN TIM PENY. RANPERDA SARANG BURUNG WALET SESUAI SK NO:1036/HK/KEP-BUP/XI/2022 DAN HONORARIUM TIM PENY. RANPERDA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTAS SESUAI SK NO:1037/HK/KEP-BUP/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER SUMBER DANA L2PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00
21	BELANJA HONORARIUM KEGIATAN TIM PENY. RANPERDA SARANG BURUNG WALET SESUAI SK NO:1036/HK/KEP-BUP/XI/2022 DAN HONORARIUM TIM PENY. RANPERDA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTAS SESUAI SK NO:1037/HK/KEP-BUP/XI/2022 TANGGAL 18 NOVEMBER SUMBER DANA L2PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	11.600.000,00
22	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PEMELIHARAAN JASA SERVICE SUKU CADANG KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00
23	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/106/2022 TANGGAL 18 AGUSTUS S.D 20 AGUSTUS DENGAN TUJUAN KE MAROS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	19.148.750,00
24	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/124/2022 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022 DENGAN TUJUAN POIEWALI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	19.633.650,00
25	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/133/2022 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022 DENGAN TUJUAN POLEWALI MANDAR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA DBH PROVINSIINSI	BELANJA BARANG DAN JASA	5.069.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
26	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH SESUAI SURAT TUGAS NOMOR: 090/169/2022 TANGGAL 8 DESEMBER TUJUAN KE MAMUJU SELAMA 2 HARI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN- LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	20.824.800,00
27	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PADA KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 094/197/2022 TANGGAL 30 JUNI 2022 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	17.172.000,00
28	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DENGAN SURAT TUGAS NOMOR: 090/120/2022 TANGGAL 26 AGUSTUS 2022 TUJUAN KE MAMUJU PADA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	14.026.950,00
29	BIAYAPEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS KEGIATAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARNG MILIK DAERAH PADA SKPD SUMBER DANA LAIN - LAIN PENDAPATAN	BELANJA BARANG DAN JASA	675.000,00
30	PEMBAYARAN LANGSUNG ANGSURAN BULANAN (<i>MONTHLY CERTIFICATE</i>) MC.01 SEBESAR 95% BELANJA MODAL PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR MPP (MALL PELAYANAN PUBLIK) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA LAIN - LAIN PAD	BELANJA MODAL	163.475.000,00
31	PEMBAYARAN LANGSUNG RETENSI PEKERJAAN SEBESAR 5% BELANJA MODAL PEMELIHARAAN REHABILITASIILITAS GEDUNG KANTOR MALL PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA SILPA	BELANJA MODAL	12.575.000,00
32	PEMBAYARAN LANGSUNG PENGAWASAN BELANJA MODAL REHABILITASI GEDUNG KANTOR MALL PELAYANAN PUBLIK SESUAI SURAT PERINTAH KERJA SPK NOMOR: 488/SPK/DPMTSP/X/2022 TANGGAL 18 OKTOBER 2022 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUMBER DANA SILPA	BELANJA MODAL	8.800.000,00
AI	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		830.911.360,00
	TAHUN 2022		426.631.900,00
1	PEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR KERTAS DAN BAHAN <i>COMPUTER</i> KEGIATAN KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.937.000,00
2	PEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR KERTAS DAN BAHAN <i>COMPUTER</i> KEGIATAN KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.302.000,00
3	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA ALAT TULIS KANTOR KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD, SUMBER DANA PAJAK ROKOK	BELANJA BARANG DAN JASA	3.855.000,00
4	PEMBAYARAN ALAT TULIS KANTOR KERTAS DAN BAHAN <i>COMPUTER</i> KEGIATAN KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
5	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT DALAM RANGKA KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.925.000,00
6	PEMBAYARANG LANGSUNG MAKAN DAN MINUM TAMU UTNUK KEGIATAM KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD SUMBER DAN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	14.600.000,00
7	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA JASA KONSULTASI BIMBINGAN TEHNIK PENINGKATAN KAPASITAS SDM ASN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	99.400.000,00
8	PEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PERJALANAN DINAS KEMAMUJU UTNUK 2 ORANG PEGAWAI SURAT TUGAS NOMOR 870/408/BKAD/XII/2022 SUMBER DANA PAJAK ROKOK	BELANJA BARANG DAN JASA	2.993.700,00
9	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP DAERAH UNTUK 2 ORANG PEGAWAI SURAT TUGAS NOMOR 870/404/BKAD/XII/2022 SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	4.331.200,00
10	PEMBAYARAN LANGSUNG BIAYA PERJALANAN DINAS SURAT TUGAS NOMOR 870/379/BKAD/XI/2022 TGL 18 NOVEMBER 2022 SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	2.938.000,00
11	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA PENGADAAN MODAL BERUPA LAPTOP ASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB MAJENE SUMBER DANA PAD	BELANJA MODAL	22.650.000,00
12	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA MODAL PENGADAAN <i>PRINTER</i> EPSON L3210 PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, SUMBER DANA PAJAK ROKOK	BELANJA MODAL	3.450.000,00
13	PEMBAYARA LANGSUNG (LS) BIAYA TIDAK TERDUGA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE WARGA DUSUN RUI/AHOLEANG DESA MEKATTA KEC. MALUNDA KAB. MAJENE SK BUPATI NOMOR 1116/HK/KEP-BUP/XII/2002 SUMBER DAN DAU	BELANJA TAK TERDUGA	200.000.000,00
14	PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) BELANJA TIDAK TERDUGA BERUPA PEMBUATAN TALUD/BRONJONG PADA DI DESA MEKATTA KEC. MALUNDA KAB MAJENE SESUAI SK BUAPTI NOMOR 1120/HK/KEP-BUP/XII/2022 TGL 19 DESEMBER 2022, SUMBER DANA DAU	BELANJA TAK TERDUGA	60.000.000,00
	TAHUN 2023		404.279.460,00
1	KOREKSI PENGAKUAN SALDO PIUTANG BPJS KESEHATAN ATAS KEKURANGAN IURAN WAJIB 4% PEMDA TAHUN 2023 SESUAI SURAT TAGIHAN KEPALA CABANG BPJS POLMAN NOMOR 406/IX-05/0324 TANGGAL 3 MARET 2024 TENTANG TAGIHAN TUNGGAKAN IURAN WAJIB PEMDA ATAS PENGHASILAN PNS DAERAH TAHUN 2022 - 2023 (JUKOR 42)	BELANJA PEGAWAI	404.279.460,00
AJ	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		66.355.200,00
	TAHUN 2022		65.355.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
1	SPP-LSPEMBAYARAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN SESUAI KONTRAK KERJA NOMOR: 800/BKPSDM/032.A/I/2022 DAN SK DENGAN NOMOR 1063/HK/KEP-BUP/XI/2022. PADA BKPSDM KAB. MAJENE. SUMBER DANA: LPAD.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00
2	SPP-LSPEMBAYARAN LEMBUR KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD . SESUAI SURAT PERINTAH LEMBUR NO: 800/BKPSDM/1576.A/VII/2022 PADA BKPSDM KAB. MAJENE. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	8.630.000,00
3	SPP-LSPEMBAYARAN LEMBUR KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD . SESUAI SURAT PERINTAH LEMBUR NOMOR: 800/BKPSDM/1795.A/IX/2022 PADA BKPSDM KAB. MAJENE. SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	7.824.000,00
4	SPP-LSPEMBAYARAN LEMBUR KEGIATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) SESUAI SURAT PERINTAH LEMBUR DENGAN NOMOR 800/BKPSDM/241.A/II/2022 DAN 800/BKPSDM/1651.A/VIII/2022 PADA BKPSDM TA 2022 KAB. MAJENE. SUMBER DANA: LPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	8.981.000,00
5	SPP-LSPEMBAYARAN LEMBUR DALAM RANGKA PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01-01-2022 SESUAI SURAT PERINTAH LEMBUR DENGAN NOMOR 800/BKPSDM/029.A/I/2022 DAN 800/BKPSDM/1702.A/VII/2022 PADA BKPSDM KAB. MAJENE TA 2022. SUMBER DANA: LPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	12.220.000,00
6	SPP-LSPEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEGIATAN PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN SESUAI DENGAN SPJ YANG DI LAMPIRKAN PADA BKPSDM KAB. MAJENE TA 2022. SUMBER DANA: LPAD	BELANJA BARANG DAN JASA	200,00
7	SPP-LS BIAYA PENGADAAN 2 UNIT LAPTOP SESUAI SPK 800/BKPSDM/1115.A/XII/2022 TGL 1 DESEMBER 2022 DAN BAP 002/BAP/BKPSDM/XII/2022 PADA BKPSDM KAB. MAJENE TA 2022. SUMBER DANA LPAD AN. CV. MANDALA PUTRA	BELANJA MODAL	20.700.000,00
	TAHUN 2023		1.000.000,00
1	SPP-LSPEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN KOORDINASI & PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD, SESUAI DENGAN SPJ YANG DI LAMPIRKAN PADA KANTOR BKPSDM KAB. MAJENE TAHUN 2023. SUMBER DANA: PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00
AK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		314.583.000,00
	TAHUN 2022		314.583.000,00
1	PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN KEWASPASAAAN DAN DETEKSI DINI BAGI PEMUDA DAN PELAJAR TERHADAP POTENSI TERORISME DAN RADIKALISME DENGAN NO: 33/SPK/XII/2022, NO: 103/BASTP/XII/2022 DAN NO: 104/BAP/XII/2022 SUMBER DANA DBH PROV	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
2	PEMABAYARAN LANGSUNG KEGIATAN SOSIALISASI BAHAYA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA BAGI PEMUDA PELAJAR SE KAB . MAJENE DENGAN NO: 38/SPK/XII/2022, NO :118/BASTP/XII/2022 & NO: 119/BAP/XII/2022 SUMBER LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00
3	PEMABAYARAN LANGSUNG KEGIATAN TUGAS DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DENGAN NO: 35/SPK/XII/2022 NO ; 110/BAP/XII/2022 NO: 109/BASTP/XII/2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.800,00
4	PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN SOSIALISASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DENGAN NO: 34/SPK/XII/2022, NO: 106/BASTP/XII/2022 & NO: 107/BAP/XII/2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.745.800,00
5	PEMBAYARAN LANGSUNG KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI KAUM PEMUDA DENGAN NO: 31/SPK/XII/2022, NO: 97/BASTP/XII/2022 & NO: 098/BAP/XII/2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00
6	PEMBAYARAN LANGSUNG SEWA GEDUNG PERTEMUAN UNTUK KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA KARAKTER KEBANGSAAN SESUAI NOTA TERLAMPIR SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.125.000,00
7	PEMBAYARAN LANGSUNG HONORARIUM NARASUMBER & HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA KARAKTER KEBANGSAAN DENGAN NO: 606/HK/KEP-BUP/V/2022 SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	1.980.000,00
8	PEMBAYARAN LANGSUNG HONORARIUM TIM PELAKSANA & TIM NON PNS TENAGA OPERATOR (SEKRETARIAT) KEGIATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) UNTUK BULAN JULI S/D DESEMBER DENGAN NO: 264/HK/KEP-BUP/III/2022 SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD DBH PROF	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000,00
9	PEMBAYARAN LANGSUNG HONORARIUM NARASUMBER & HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA KARAKTER KEBANGSAAN DENGAN NO: 606/HK/KEP-BUP/V/2022 SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
10	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA & KARAKTER KEBANGSAAN SESUAI NOTA TERLAMPIR SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
11	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN KEGIATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) TAHUN 2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00
12	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT/BAHAN KERTAS COVER KEGIATAN VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	165.000,00
13	PEMBAYARAN LANGSUNG ATK DAN MATERAI UNTUK KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN BELA NEGARA & KARAKTER KEBANGSAAN SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	3.714.200,00
14	PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT/BAHAN KERTAS COVER KEGIATAN VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	343.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
15	PEMABAYARAN LANGSUNG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA & PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DENGAN NO: 090/132/XI/2022 & NO: 090/66/VI/2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	7.975.000,00
16	PEMABAYARAN LANGSUNG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS DENGAN NO :090/66/VI/2022 & NO :090/08/1/2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	7.655.000,00
17	PEMABAYARAN LANGSUNG PERJALANAN DINAS BIASA & PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PENGGANTI TRANSPOR PESERTA) KEGIATAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DENGAN NO: 090/98/IX/2022 DAN NO: 090/117/XI/2022 SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	21.535.000,00
18	PEMABAYARAN LANGSUNG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS DENGAN NO :090/66/VI/2022 & NO :090/08/1/2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.460.000,00
19	PEMABAYARAN LANGSUNG PERJALANAN DINAS BIASA & PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PENGGANTI TRANSPOR PESERTA) KEGIATAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DENGAN NO: 090/98/IX/2022 DAN NO: 090/117/XI/2022 SUMBER DANA DAU	BELANJA BARANG DAN JASA	8.082.900,00
20	PEMABAYARAN LANGSUNG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA & PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DENGAN NO: 090/132/XI/2022 & NO: 090/66/VI/2022 SUMBER DANA LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.410.000,00
AL	INSPEKTORAT DAERAH		965.479.530,00
	TAHUN 2022		965.479.530,00
1	LS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PENDAMPINGAN & ASISTENSI SUB. KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00
2	LS HONORARIUM NARASUMBER & HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN & SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN & ASISTENSI SUB. KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	746.000,00
3	LS HONORARIUM NARASUMBER & HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN & SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN & ASISTENSI SUB. KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	2.054.000,00
4	LS HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR & HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	10.858.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
5	LS HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR & HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	8.642.000,00
6	LS HONORARIUM NARASUMBER & HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN & SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN & ASISTENSI SUB. KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	22.397.000,00
7	LS HONORARIUM NARASUMBER & HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN & SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN & ASISTENSI SUB. KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	8.103.000,00
8	LS HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR & HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	23.722.000,00
9	LS HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR & HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL (LAIN-LAIN PAD) INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BELANJA BARANG DAN JASA	9.728.000,00
10	LS LEMBUR KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN MONEV TL PEMERIKSAAN APIP (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NOMOR: 29/SPK-LBR/INSP-MN/XI/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	10.519.000,00
11	LS LEMBUR KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN MONEV TL PEMERIKSAAN APIP (LAIN-LAIN PAD) SESUAI SPK NOMOR: 30/SPK-LBR/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	10.408.000,00
12	LS BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB. KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: /INSP-MN/VI/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	124.758.640,00
13	LS BELANJA PERJ DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTETERNAL SUB. KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL (DBH PROVINSI) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.138.A/INSP-MN/X/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	5.457.900,00
14	LS BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH SUB. KEGIATAN TUGAS & FUNGSI (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.183-186/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	4.724.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
15	LS BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH SUB. KEGIATAN TUGAS & FUNGSI (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.143/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	52.371.990,00
16	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN MONEV. TL LHP PK DAN APIP (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.089/INSP-MN/IX/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	10.070.000,00
17	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS SUB. KEGIATAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.038/INSP-MN/IV/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	14.775.000,00
18	LS BELANJA PERJ DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTETERNAL SUB. KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL (DBH PROVINSI) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.059, 060, 061/INSP-MN/VI/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	10.050.000,00
19	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.030/INSP-MN/III/2022 INSP. KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	1.035.000,00
20	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN REVIU LAPORAN KINERJA (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.045/INSP-MN/V/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	28.610.000,00
21	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI SUB. KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMDA (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.050/INSP-MN/V/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	29.390.000,00
22	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI SUB. KEGIATAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI PRB URUSAN PEMDA (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.077/INSP-MN/VII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	20.290.000,00
23	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.049/INSP-MN/V/2022 INSP. KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	55.430.000,00
24	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN PENGAWASAN DESA (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.076/INSP-MN/VII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	18.775.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
25	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TER SUB. KEGIATAN PENGW. TUJUAN TERTENTU (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.053/INSP-MN/V/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	7.670.000,00
26	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TER SUB. KEGIATAN PENYE. KERUGIAN NEGARA (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.022/INSP-MN/III/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	26.030.000,00
27	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI SUB. KEGIATAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.109/INSP-MN/XI/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	29.625.000,00
28	LS BELANJA PERJ DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTETERNAL SUB. KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL (LAI2 PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.079/INSP-MN/VII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	44.080.000,00
29	LS BELANJA PERJ DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYE. PENGAWASAN INTETERNAL SUB. KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMDA (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.85, 105, 110, 116 SD 122/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	96.970.000,00
30	LS BELANJA PERJ DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENDAMPINGAN & ASISTENSI SUB. KEGIATAN PENDAMPINGAN ASISTENSI PRB (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.78, 80, 98/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	34.115.000,00
31	LS BELANJA PERJN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN TUJUAN TERTENTU SUB. KEGIATAN PENGAWASAN DGN TUJUAN TERTENTU (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.112/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	7.340.000,00
32	LS BELANJA PERJ DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENDAMPINGAN & ASISTENSI SUB. KEGIATAN PENDAMPINGAN ASISTENSI URUSAN PEMDA (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.83.A, 91.A, 100, 111/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	29.390.000,00
33	LS BELANJA PERJN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN TUJUAN TERTENTU SUB. KEGIATAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.91, 99, 101-105/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	66.960.000,00
34	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL SUB. KEGIATAN MONEV. TL LHP BPK DAN APIP (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/I/2022 SESUAI ST NO: 700.106, 115/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	18.060.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
35	LS BELANJA PERJ DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTETERNAL SUB. KEGIATAN KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL (LAI2 PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.92 SD 97/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	74.760.000,00
36	LS BELANJA PERJ DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENDAMPINGAN & ASISTENSI SUB. KEGIATAN MONEV PEMBERANTASAN KORUPSI (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.108, 113/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	9.730.000,00
37	LS BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI SUB. KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (LAIN-LAIN PAD) BERDASAR SK BUPATI NO: 02/HK/KEP-BUP/II/2022 SESUAI ST NO: 700.080.A/INSP-MN/III/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	16.760.000,00
38	LS BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR 5% KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SUB. KEGIATAN SARANA & PRASARANA GEDUNG KANTOR (PAD - LAIN2 & DBH PROVINSI) PADA "CV. DINASTY DANI PRATAM" SESUAI SPK NO: 700.01/INSP-MN/XII/2022 INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA MODAL	8.375.000,00
39	LS BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH SUB. KEGIATAN SARANA & PRASARANA GEDUNG KANTOR (DAU) SESUAI SPK NO: 702.02/INSP-MN/XI/2022 PADA CV. AKBAR CONSULTANT INSPEKTORAT KAB. MAJENE TAHUN 2022	BELANJA MODAL	11.800.000,00
AM	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		482.241.540,00
	TAHUN 2022		475.745.340,00
1	PEMBAYARAN LS BIAYA BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL KELITBANGAN, "USAHA CATERING BERKAH 4PUTRA /FARAMITHA R)", SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00
2	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN DESIMINASI HASIL-HASIL PENELITIAN & PENGEMBANGAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PANGAN MENGENAI "KAMPUNG KELAPA KAB. MAJENE", SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
3	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN DESIMINASI HASIL-HASIL PENELITIAN & PENGEMBANGAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PANGAN MENGENAI "KAMPUNG KELAPA KAB. MAJENE", SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
4	PEMBAYARAN 100% KEGIATAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN KESEHATAN KABUPATEN MAJENE, SESUAI SPK NOMOR: 07/SPK/BALITBANG/IX/2022, TANGGAL 26 SEPTEMBER - 24 DESEMBER 2022, & BAP NOMOR 11/BAP/LITBANG/XII/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00
5	PEMBAYARAN 100% KEGIATAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJENE, SESUAI SPK NOMOR: 08/SPK/BALITBANG/IX/2022, TANGGAL 26 SEPTEMBER - 24 DESEMBER 2022, & BAP NOMOR 12/BAP/LITBANG/XII/2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
6	PEMBAYARAN 60% KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, SESUAI SPK NOMOR: 01/SPK/BALITBANG/V/2022, TGL 27 MEI 2022 & BAP NOMOR: 08/BAP/LITBANG/XII/2022, BADAN PENELITIAN & PENGEMB. KAB. MAJENE, SUMBER DANA LL PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	-
7	PEMBAYARAN 60% KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DATA DAN PENGKAJIAN PERATURAN, SESUAI SPK NOMOR: 04/SPK/PPBJ-LITBANG/VI/2022, TGL 3 JUNI 2022 & BAP NOMOR: 13/BAP/LITBANG/XII/2022, BADAN PENELITIAN & PENGEMB. KAB. MAJENE, SUMBER DANA LL PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00
8	PEMBAYARAN 60% KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (WILAYAH PESISIR), SESUAI SPK NOMOR: 06/SPK/PPBJ-LITBANG/VI/2022, TGL 10 JUNI 2022 & BAP NOMOR: 07/BAP/LITBANG/XI/2022, BADAN PENELITIAN & PENGEMB. KAB. MAJENE, SUMBER DANA LL PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00
9	PEMBAYARAN 60% KEGIATAN STUDI KELAYAKAN SEKTOR PARIWISATA DALAM BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN PANGAN, SESUAI SPK NOMOR: 03/SPK/BALITBANG/V/2022, TGL 27 MEI 2022 & BAP NOMOR: 10/BAP/LITBANG/XII/2022, BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN KAB. MAJENE, SUMBER DANA LL PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00
10	PEMBAYARAN 60% KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SESUAI SPK NOMOR: 05/SPK/PPBJ-LITBANG/VI/2022, TGL 3 JUNI 2022 & BAP NOMOR: 14/BAP/LITBANG/XII/2022, BADAN PENELITIAN & PENGEMB. KAB. MAJENE, SUMBER DANA LL PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00
11	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH, SESUAI SPPD NOMOR: 090//2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.804.300,00
12	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH, SESUAI SPPD NOMOR: 090//2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	6.988.600,00
13	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH, SESUAI SPPD NOMOR: 090//2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	8.107.800,00
14	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH, SESUAI SPPD NOMOR: 090//2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.101.800,00
15	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH, SESUAI SPPD NOMOR: 090//2022, SUMBER DANA LAIN-LAIN PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	10.640.100,00
16	PEMBAYARAN LS BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH SESUAI SURAT TUGAS NO. 090/2610/2022, SUMBER DANA DAU NON AMARK	BELANJA BARANG DAN JASA	11.102.740,00
	TAHUN 2023		6.496.200,00
1	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	3.135.000,00
2	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	940.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
3	PEMBAYARAN LS PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DANA PAD	BELANJA BARANG DAN JASA	2.421.200,00
AN	PUSKESMAS BANGGAE I (BLUD)		146.423.198,00
	TAHUN 2023		146.423.198,00
1	PEMBAYARAN JASA MEDIK REMUNERASI NON KAPITASI NOVEMBER TAHUN 2022, TAHUN ANGGARAN 2024 PUSKESMAS BANGGAE I	BELANJA BARANG DAN JASA	16.541.000,00
2	PEMBAYARAN JASA MEDIK REMUNERASI NON KAPITASI DESEMBER TAHUN 2022, TAHUN ANGGARAN 2024 PUSKESMAS BANGGAE I	BELANJA BARANG DAN JASA	15.228.500,00
3	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN REMUNERASI RETRIBUSI DESEMBER 2023, PUSKESMAS BANGGAE I	BELANJA BARANG DAN JASA	5.561.850,00
4	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN REMUNERASI NON KAPITASI OKTOBER 2023 PUSKESMAS BANGGAE I	BELANJA BARANG DAN JASA	18.690.000,00
5	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN REMUNERASI NON KAPITASI NOVEMBER-DESEMBER 2023 PUSKESMAS BANGGAE I	BELANJA BARANG DAN JASA	9.544.500,00
6	PEMBAYARAN JASA MEDIK REMUNERASI KAPITASI DESEMBER 2023 PUSKESMAS BANGGAE I	BELANJA BARANG DAN JASA	79.730.698,00
7	PEMBAYARAN PENGISIAN TABUNG OKSIGEN PUSKESMAS BANGGAE I BULAN DESEMBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.126.650,00
AO	PUSKESMAS BANGGAE II (BLUD)		54.762.291,00
	TAHUN 2023		54.762.291,00
1	BELANJA JASA MEDIK KAPITASI BULAN DESEMBER TAHUN 2023 PEGAWAI PUSKESMAS BANGGAE II	BELANJA BARANG DAN JASA	39.044.920,00
2	BELANJA JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN DESEMBER TAHUN 2023 PEGAWAI PUSKESMAS BANGGAE II	BELANJA BARANG DAN JASA	4.878.371,00
3	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI OKTOBER DAN NOVEMBER TAHUN 2023 PEGAWAI PUSKESMAS BANGGAE II	BELANJA BARANG DAN JASA	10.839.000,00
AP	PUSKESMAS TOTOLI (BLUD)		28.500.343,00
	TAHUN 2023		28.500.343,00
1	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI NON KAPITASI NOVEMBER -DESEMBER 2022 PUSKESMAS TOTOLI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	9.733.885,00
2	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI NON KAPITASI OKTOBER 2023 PUSKESMAS TOTOLI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	7.850.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
3	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI RETRIBUSI SEPTEMBER 2023 PUSKESMAS TOTOLI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.894.971,00
4	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI RETRIBUSI OKTOBER 2023 PUSKESMAS TOTOLI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.376.250,00
5	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI RETRIBUSI NOVEMBER 2023 PUSKESMAS TOTOLI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.001.032,00
6	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI RETRIBUSI DESEMBER 2023 PUSKESMAS TOTOLI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	5.643.705,00
AQ	PUSKESMAS LEMBANG (BLUD)		151.754.855,00
	TAHUN 2023		151.754.855,00
1	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KAPITASI BULAN DESEMBER, BLUD PUSKESMAS LEMBANG BULAN DESEMBER TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	80.547.205,00
2	PEMBAYARAN HONOR PEMBINA TEKNIS & PEMBINA KEUANGAN, BLUD PUSKESMAS LEMBANG BULAN JULI-DESEMBER TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00
3	PEMBAYARAN HONOR SPI BLUD PUSKESMAS LEMBANG BULAN JULI-DESEMBER TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00
4	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI BULAN AGUSTUS-OKTOBER TAHUN 2023, BLUD PUSKESMAS LEMBANG, BLUD PUSKESMAS LEMBANG	BELANJA BARANG DAN JASA	48.191.500,00
5	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI BULAN NOVEMBER-DESEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	13.716.150,00
AR	PUSKESMAS SENDANA I (BLUD)		177.429.820,00
	TAHUN 2023		177.429.820,00
1	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI KAPITASI ASN NON KAPITASI BULAN DESEMBER TAHUN 2022, AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	61.992.020,00
2	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI KAPITASI NON ASN NON KAPITASI BULAN DESEMBER TAHUN 2022, AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER TAHUN 2023 PUSKEMAS SENDANA I TAHUN ANGGARAN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	53.903.487,00
3	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI KAPITASI NON ASN PUSTU POSKESDES NON KAPITASI BULAN DESEMBER TAHUN 2022, AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER TAHUN 2023 PUSKEMAS SENDANA I TAHUN ANGGARAN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.973.293,00
4	BELANJA ALAT DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN DESEMBER PUSKESMAS SENDANA I TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.935.000,00
5	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG BULAN DESEMBER PUSKESMAS SENDANA I TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.890.000,00
6	BELANJA KERTAS DAN COVER BULAN DESEMBER PUSKESMAS SENDANA I TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	5.710.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
7	BELANJA OBAT-OBATAN BULAN DESEMBER PUSKESMAS SENDANA I TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	8.170.000,00
8	BELANJA ISI TABUNG O2 BULAN DESEMBER PUSKESMAS SENDANA I TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.855.920,00
9	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA EMPAT BULAN DESEMBER PUSKESMAS SENDANA I TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.450.000,00
10	BELANJA UPAH TUKANG PERBAIKAN ATAP GEDUNG PUSKESMAS SENDANA I TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00
11	BAYAR JASA REMUNERASI RETRIBUSI ASN BULAN DESEMBER (DANA RETRIBUSI BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023) TAHUN 2023 PUSKESMAS SENDANA I TAHUN ANGGARAN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	7.824.239,00
12	BAYAR JASA REMUNERASI RETRIBUSI NON ASN PUSKESMAS BULAN DESEMBER (DANA RETRIBUSI BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023) TAHUN 2023 PUSKESMAS SENDANA I TAHUN ANGGARAN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	24.198.913,00
13	BAYAR JASA REMUNERASI RETRIBUSI NON ASN PUSTU POSKESDES BULAN DESEMBER (DANA RETRIBUSI BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023) TAHUN 2023 PUSKESMAS SENDANA I TAHUN ANGGARAN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.045.691,00
14	BAYAR JASA REMUNERASI RETRIBUSI MANAGEMENT PUSKESMAS BULAN DESEMBER (DANA RETRIBUSI BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2023) TAHUN 2023 PUSKESMAS SENDANA I TAHUN ANGGARAN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.681.257,00
AS	PUSKESMAS TAMMERODO (BLUD)		92.024.540,00
	TAHUN 2023		92.024.540,00
1	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI BULAN FEB-DES PUSKESMAS TAMMERODO TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	6.711.600,00
2	PEMBAYARAN SARANA RETRIBUSI BULAN FEBRUARI-DESEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	4.474.400,00
3	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN OKTOBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	14.562.960,00
4	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	11.486.775,00
5	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN AGUSTUS TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	9.930.772,00
6	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	9.291.307,00
7	PEMBAYARAN JASA MANEJEMEN KAPITASI BULAN DESEMBER 202	BELANJA BARANG DAN JASA	4.038.257,00
8	PEMBAYARAN JASA ASN KAPITASI BULAN DESEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	18.385.735,00
9	PEMBAYARAN JASA HONOR KAPITASI BULAN DESEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	13.142.734,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
AT	PUSKESMAS SENDANA II (BLUD)		62.441.705,00
	TAHUN 2023		62.441.705,00
1	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN ASN NON KAPITASI KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN DESEMBER 2022 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.513.905,00
2	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN TENAGA KONTRAK NON KAPITASI KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN DESEMBER 2022 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.977.777,00
3	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN TENAGA SUKARELA NON KAPITASI KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN DESEMBER 2022 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.611.957,00
4	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN DANA TAKTIS NON KAPITASI KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN DESEMBER 2022 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	145.037,00
5	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI ASN (UTANG) UNTUK KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN SEPTEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	7.071.897,00
6	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI TENAGA KONTRAK (UTANG) UNTUK KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN SEPTEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.996.120,00
7	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI TENAGA SUKARELA (UTANG) KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN SEPTEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.137.072,00
8	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN DANA TAKTIS NON KAPITASI KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN SEPTEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	265.181,00
9	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI ASN (UTANG) UNTUK KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN OKTOBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	5.737.060,00
10	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI TENAGA KONTRAK (UTANG) UNTUK KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN OKTOBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.955.582,00
11	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI TENAGA SUKARELA (UTANG) KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN OKTOBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	4.004.039,00
12	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN DANA TAKTIS NON KAPITASI KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN OKTOBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	237.679,00
13	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI ASN (UTANG) UNTUK KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN NOVEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	6.193.178,00
14	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI TENAGA KONTRAK (UTANG) UNTUK KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN NOVEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.358.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
15	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN NON KAPITASI REMUNERASI TENAGA SUKARELA (UTANG) KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN NOVEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.678.374,00
16	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN DANA TAKTIS NON KAPITASI KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN NOVEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	242.897,00
17	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA (SARANA NON KAPITASI UTANG) UNTUK JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN DESEMBER 2022 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.435.000,00
18	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/TAMU (SARANA NON KAPITASI UTANG) UNTUK JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN DESEMBER 2022 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00
19	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- BAHAN CETAK (SARANA NON KAPITASI UTANG) UNTUK JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN DESEMBER 2022 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	349.500,00
20	PEMBAYARAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI (UTANG) UNTUK KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023 TA 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	11.405.100,00
21	PEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/TAMU (SARANA NON KAPITASI UTANG) UNTUK KEGIATAN JKN PUSKESMAS SENDANA II BULAN DESEMBER 2023 TA 2023.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.076.000,00
AU	PUSKESMAS SALUTAMBUNG (BLUD)		76.470.650,00
	TAHUN 2023		76.470.650,00
1	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI KAPITASI BULAN OKTOBER PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	13.023.484,00
2	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI KAPITASI BULAN NOVEMBER PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	7.836.566,00
3	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI KAPITASI BULAN DESEMBER PUSKESMAS SALUTAMBUNG 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.426,00
4	PEMBAYARAN JASA REMUNERASI NON KAPITASI BULAN OKTOBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	19.326.780,00
5	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN FEBRUARI PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	267.540,00
6	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN FEBRUARI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	182.000,00
7	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN MARET PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	135.339,00
8	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN MARET TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	91.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
9	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN APRIL PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	750.288,00
10	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN APRIL TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	9.150,00
11	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN APRIL TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	391.250,00
12	PEMBAYARAN BELANJA TINTA KOMPUTER UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN APRIL TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	110.000,00
13	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN JUNI PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	478.044,00
14	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN JUNI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	65.200,00
15	PEMBAYARAN BELANJA TINTA KOMPUTER UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN JUNI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000,00
16	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN JULI PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	600.348,00
17	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN JULI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400,00
18	PEMBAYARAN BELANJA TINTA KOMPUTER UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN JULI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	110.000,00
19	PEMBAYARAN BELANJA PERABOT KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN JULI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	292.000,00
20	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN SEPTEMBER PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	118.200,00
21	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000,00
22	PEMBAYARAN BELANJA PERABOT KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000,00
23	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN OKTOBER PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	679.628,00
24	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN OKTOBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	55.200,00
25	PEMBAYARAN BELANJA TINTA KOMPUTER UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN OKTOBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	370.000,00
26	PEMBAYARAN BELANJA PERABOT KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN OKTOBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
27	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN NOVEMBER PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	182.542,00
28	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	28.040,00
29	PEMBAYARAN BELANJA FOTOKOPI UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	94.760,00
30	PEMBAYARAN JASA RETRIBUSI BULAN DESEMBER PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.343.319,00
31	PEMBAYARAN BELANJA FOTOKOPI UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN DESEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	616.400,00
32	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN KOMPUTER UPTD PUSKESMAS SALUTAMBUNG BULAN DESEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00
33	PEMBAYARAN JASA NON KAPITASI BULAN OKTOBER TAHUN 2022 PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN ANGGARAN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	4.274.966,00
34	PEMBAYARAN JASA NON KAPITASI BULAN NOVEMBER PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	6.158.936,00
35	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN DESEMBER TAHUN 2022 PUSKESMAS SALUTAMBUNG TAHUN ANGGARAN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	6.040.244,00
AV	PUSKESMAS ULUMANDA (BLUD)		6.342.128,00
	TAHUN 2023		6.342.128,00
1	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN FEBRUARI PUSKESMAS ULUMANDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.034.063,00
2	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN MARET - JUNI PUSKESMAS ULUMANDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	339.150,00
3	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN ALAT TULIS KANTOR BULAN DESEMBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	238.000,00
4	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN OKTOBER PUSKESMAS ULUMANDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.092.515,00
5	PEMBAYARAN BAHAN ALAT TULIS KANTOR BULAN DESEMBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.402.020,00
6	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN NOVEMBER PUSKESMAS ULUMANDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	740.340,00
7	PEMBAYARAN BAHAN ALAT TULIS KANTOR BULAN DESEMBER 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	496.040,00
AW	PUSKESMAN MALUNDA (BLUD)		225.127.968,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
	TAHUN 2023		225.127.968,00
1	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BULAN DESEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	570.800,00
2	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER BULAN DESEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	780.000,00
3	BELANJA BAHAN BAKAR BULAN OKTOBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00
4	BELANJA PEMELIHARAAN HALAMAN (PERLENGKAPAN PENGECORAN HALAMAN DEPAN PUSKESMAS) BULAN SEPTEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	7.090.000,00
5	BELANJA PEMELIHARAAN HALAMAN (UPAH TUKANG PENGECORAN HALAMAN DEPAN PUSKESMAS) BULAN SEPTEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00
6	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BULAN DESEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	5.570.000,00
7	BELANJA PEMELIHARAAN HALAMAN (PERLENGKAPAN PENGECORAN HALAMAN DEPAN PUSKESMAS) BULAN SEPTEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	5.110.000,00
8	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BULAN DESEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	788.800,00
9	BELANJA PEMELIHARAAN HALAMAN (PENGECORAN HALAMAN DEPAN PUSKESMAS) BULAN OKTOBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00
10	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG (PEMASANGAN BESI K3) BULAN DESEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00
11	BELANJA PEMELIHARAAN HALAMAN (PERLENGKAPAN PENGECORAN HALAMAN DEPAN PUSKESMAS) BULAN OKTOBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.610.000,00
12	BELANJA PEMELIHARAAN HALAMAN (PERLENGKAPAN PENGECORAN HALAMAN DEPAN PUSKESMAS) BULAN OKTOBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.810.000,00
13	PEMBAYARAN BELANJA KERTAS DAN COVER BULAN DESEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	407.500,00
14	PEMBAYARAN ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BULAN DESEMBER PUSKESMAS MALUNDA TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.980.500,00
15	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI BULAN OKTOBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	37.276.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
16	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI TAHUN 2022 (SILPA)	BELANJA BARANG DAN JASA	3.582.000,00
17	PEMBAYARAN JASA MEDIK KAPITASI BULAN DESEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	61.739.623,00
18	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI DESEMBER 2022	BELANJA BARANG DAN JASA	26.407.980,00
19	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN JANUARI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	4.625.400,00
20	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN FEBRUARI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.224.400,00
21	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN MARET TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.543.000,00
22	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN APRIL TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.982.000,00
23	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN MEI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.531.800,00
24	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN JUNI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	3.288.000,00
25	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN JULI TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.315.800,00
26	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN AGUSTUS TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.118.000,00
27	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.122.200,00
28	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN OKTOBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	2.682.600,00
29	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	1.845.000,00
30	PEMBAYARAN JASA MEDIK RETRIBUSI BULAN DESEMBER TAHUN 2023	BELANJA BARANG DAN JASA	16.596.600,00
31	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI JANUARI ASN 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	2.556,00
32	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI JANUARI SUKARELA 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	35.821,00
33	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI FEBRUARI KONTRAK 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	22.012,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD, TAHUN, DAN URAIAN UTANG	JENIS BELANJA	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
34	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI FEBRUARI SUKARELA 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	1.777.898,00
35	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI MARET SUKARELA 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	96.931,00
36	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI MARET ASN 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	26.837,00
37	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI SUKARELA MEI 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	18.314,00
38	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI SUKARELA JUNI 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	228.882,00
39	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI SUKARELA JULI 2023 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	668.037,00
40	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI NOVEMBER 2022 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	36.331,00
41	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI NOVEMBER KONTRAK 2022 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	21.841,00
42	PEMBAYARAN JASA MEDIK NON KAPITASI NOVEMBER SUKARELA 2022 (GAGAL TRANSFER)	BELANJA BARANG DAN JASA	94.305,00
	JUMLAH		57.491.941.898,12